



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA
NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN KONAWE UTARA
TAHUN 2021 - 2026**





BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA
NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN
KONAWE UTARA TAHUN 2021 - 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, untuk periode 2021-2026 telah terpilih Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara, maka perlu disusun Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai penjabaran visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih;
 - b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021-2026;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6373);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6042);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459)
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540)
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 20 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

(RTRW) Kabupaten Konawe Utara Tahun 2012 - 2032;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Konawe Utara 2012 - 2032;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA
dan
BUPATI KONAWE UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2021 - 2026.**

BAB II KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Kabupaten Konawe Utara.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Konawe Utara.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
7. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
8. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah Kabupaten untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah Kabupaten sesuai dengan urusan pemerintahan sesuai kewenangannya.
9. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.

10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
12. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan, baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat maupun penanggung resiko.
14. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Kabupaten Konawe Utara.
15. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang ada.
16. Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah adalah proses penyusunan rencana pembangunan Daerah yang dilaksanakan untuk menghasilkan dokumen perencanaan selama periode 1 (satu) tahun.
17. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
18. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
20. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
21. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
22. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
23. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah Kabupaten/Perangkat Daerah Kabupaten yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
24. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah Kabupaten/Perangkat Daerah Kabupaten untuk mencapai sasaran.
25. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan, untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.
26. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau lebih Unit Kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumberdaya, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang atau jasa.
27. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disebut RTRW adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah Daerah Kabupaten, yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, rencana tata ruang pulau/kepulauan dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional.

28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB II RUANG LINGKUP RPJMD

Pasal 2

- (1) RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD, Rencana Strategis, Rencana Kerja Perangkat Daerah, dan RPJM Desa.

BAB III TATA CARA PERENCANAAN

Pasal 3

RPJMD berorientasi pada proses, dengan menggunakan pendekatan:

- a. teknokratik;
- b. partisipatif;
- c. politis;
- d. atas bawah (*top down*); dan
- e. bawah atas (*bottom up*)

Pasal 4

RPJMD berorientasi pada substansi, dengan menggunakan pendekatan:

- a. holistik-tematik;
- b. integratif; dan
- c. spasial

BAB IV

SISTEMATIKA

Pasal 5

Sistematika RPJMD Kabupaten Konawe Utara 2021-2026 terdiri dari :

Bab I : PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya, proses penyusunan RPJMD dan sistematika penyusunan

Bab II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Memuat gambaran secara logis dasar-dasar analisis dan gambaran umum kondisi Daerah, yang meliputi aspek geografi dan demografi secara indikator kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten.

Bab III : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Memuat gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah dilakukan pada perumusan ke dalam sub bab.

Bab IV : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

Memuat permasalahan dan isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang. Penyajian isu-isu strategis meliputi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis.

Bab V : VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Menjelaskan visi dan misi Pemerintah Daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, tujuan dan sasaran serta indikator kinerja setiap misi pembangunan.

Bab VI : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Memuat dan menjelaskan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih.

Bab VII : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, perangkat daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

Bab VIII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Memuat gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

BAB IX : PENUTUP

Memuat pedoman transisi serta kaidah pelaksanaannya.

Pasal 6

Isi beserta uraian RPJMD Kabupaten Konawe Utara sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

PELAKSANAAN RPJMD

Pasal 7

- (1) RPJMD sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Renja Perangkat daerah serta dokumen perencanaan pembangunan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
- (3) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2026.
- (4) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
- (5) RPJMD menjadi acuan Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD.

- (3) Kepala Perangkat Daerah melakukan Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat daerah.
- (4) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.
- (5) Mekanisme dan tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD mengacu pada peraturan perundang-undangan.

BAB VII PERUBAHAN RPJMD

Pasal 9

- (1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila :
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. terjadi perubahan yang mendasar, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan c tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
- (3) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan Bupati dan Wakil Bupati wajib menyusun RKPD pada tahun terakhir pemerintahannya.
- (2) Penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dokumen perencanaan untuk tahun pertama periode pemerintahan tahun berikutnya dengan memperhatikan target kinerja RPJMD 2021-2026 yang belum tercapai, sebelum RPJMD periode berikutnya ditetapkan.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman dalam penyusunan APBD tahun pertama periode pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati terpilih berikutnya.
- (4) RPJMD dijadikan dasar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2026.

BAB IX PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016-2021;
Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di Wanggudu
pada tanggal 25 Oktober 2021

BUPATI KONAWE UTARA,

ttd

RUKSAMIN

Diundangkan di Wanggudu
pada tanggal 25 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE UTARA,

ttd

KASIM PAGALA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2021
NOMOR 125

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA PROVINSI
SULAWESI TENGGARA : (11/118/2021)

Salinan Sesuai Aslinya

Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Konawe Utara



RAM ASYUR SUPU, SH
Pembina Tk. I, Gol. IV/b
Nip. 19670420 200312 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA
NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2021- 2026

I. UMUM

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, pasal 264 ayat (4) yang menyatakan bahwa Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala daerah terpilih dilantik. Berdasarkan ketentuan Pasal 263 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

RPJMD dijabarkan kedalam siklus rencana tahunan sebagai RKPD yang memuat prioritas pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi makro, serta program perangkat daerah, lintas perangkat daerah dan program kewilayahan beserta rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengamanatkan bahwa perencanaan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan.

Keberhasilan dalam pelaksanaan RPJMD sangat tergantung dari kesepakatan, kesepahaman serta komitmen bersama antara semua pemangku kepentingan di Kabupaten Konawe Utara,

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pendekatan teknokratik” adalah dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pendekatan partisipatif” adalah dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pendekatan politis” adalah dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala daerah terpilih kedalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pendekatan atas-bawah (top down) dan bawah-atas (bottom up)” adalah hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pendekatan holistik-tematik” adalah dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensial, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pendekatan integratif” adalah dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pendekatan spasial” adalah dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA
NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN KONAWE UTARA
TAHUN 2021 - 2026**



Narasi



**Pemerintah Kabupaten Konawe Utara
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah / BAPPEDA
Tahun 2021**

Jl. Lintas Timur Sulawesi (Trans Sulawesi), Komp. Perkantoran Pemda Kab. Konawe Utara
Kel. Wanggudu - Kec. Asera 93353
konaweutarakab.go.id - bappedakabkonut@gmail.com

PENGANTAR

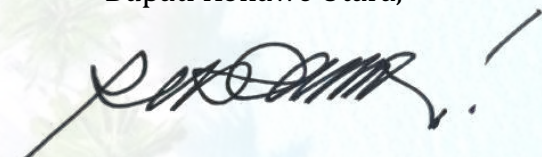
Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan taufik, rahmat, dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021-2026 dapat diselesaikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Penyusunan RPJMD diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 86 Tahun 2017. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021-2026 merupakan penyempurnaan Rancangan Akhir setelah mendapatkan masukan dari proses Musrenbang, pembahasan bersama Badan Legislasi DPRD Kabupaten Konawe Utara, serta masukan berdasarkan hasil evaluasi dengan Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara.

Harapan Kami semoga dokumen ini dapat bermanfaat dan menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan di Kabupaten Konawe Utara untuk lima tahun ke depan guna menjawab berbagai permasalahan daerah untuk mewujudkan Visi Konawe Utara Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing.

Wanggudu, Oktober 2021

Bupati Konawe Utara,



Dr. Ir. H. RUKSAMIN, ST, M.Si, IPU, ASEAN.Eng

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xviii
BAB I PENDAHULUAN	I -1
1.1. Latar Belakang	I-2
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I-6
1.3. Hubungan Antar Dokumen	I-12
1.3.1. RPJMN Tahun 2020 - 2024	I-13
1.3.2. RPJPD Kabupaten Konawe Utara.....	I-15
1.3.3. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD	I-18
1.3.4. RTRWN.....	I-18
1.3.5. RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 – 2023	I-40
1.3.6. RTRW Kabupaten Konawe Utara Tahun 2012 - 2032.....	I-40
1.3.7. RPJMD Daerah Sekitar	I-41
1.3.8. Dokumen Perencanaan Multi Sektor	I-42
1.3.9. Rencana Strategis Perangkat Daerah.....	I-42
1.3.10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).....	I-42
1.4. Maksud dan Tujuan	I-42
1.5. Sistematika Penulisan	I-43
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.....	II-1
2.1. Aspek Gegografi dan Demografi	II-2
2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah.....	II-2
2.1.1.1. Kondisi Topografi	II-4
2.1.1.2. Kondisi Geologi	II-4

2.1.1.3. Hidrologi dan Hidrogeologi	II-5
2.1.1.4. Kondisi Klimatologi	II-6
2.1.1.5. Penggunaan Lahan	II-7
2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah	II-8
2.1.3. Wilayah Rawan Bencana	II-9
2.1.4. Kondisi Demografi	II-11
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-15
2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi .	II-16
2.2.1.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	II-16
2.2.1.2. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	II-18
2.2.1.3. Struktur Ekonomi	II-24
2.2.1.4. PDRB Perkapita	II-25
2.2.1.5. Laju Inflasi	II-26
2.2.1.6. Koefesien Gini (Ketimpangan)	II-27
2.2.1.7. Tingkat Kemiskinan	II-28
2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial.....	II-29
2.2.2.1. Angka Harapan Lama Sekolah	II-29
2.2.2.2. Angka Rata-Rata Lama Sekolah	II-30
2.2.2.3. Angka Kematian Bayi	II-31
2.2.2.4. Angka Kematian Ibu	II-32
2.2.2.5. Angka Harapan Hidup	II-33
2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga	II-34
2.3. Aspek Pelayanan Umum	II-35
2.3.1. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	II-35
2.3.1.1. Pendidikan	II-35
2.3.1.2. Kesehatan	II-40
2.3.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	II-50

2.3.1.4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	II-56
2.3.1.5.	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	II-61
2.3.1.6.	Sosial	II-62
2.3.2	Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	II-63
2.3.2.1.	Tenaga Kerja	II-63
2.3.2.2.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	II-64
2.3.2.3.	Pangan	II-66
2.3.2.4.	Pertanahan	II-67
2.3.2.5.	Lingkungan Hidup	II-68
2.3.2.6.	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	II-69
2.3.2.7.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ..	II-70
2.3.2.8.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	II-71
2.3.2.9.	Perhubungan	II-73
2.3.2.10.	Komunikasi dan Informatika	II-77
2.3.2.11.	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	II-78
2.3.2.12.	Penanaman Modal	II-80
2.3.2.13.	Kepemudaan dan Olahraga	II-81
2.3.2.14.	Statistik	II-81
2.3.2.15.	Persandian	II-82
2.3.2.16.	Kebudayaan	II-82
2.3.2.17.	Perpustakaan	II-83
2.3.2.18.	Kearsipan	II-83
2.3.3	Fokus Layanan Urusan Pilihan	II-84

2.3.3.1. Kelautan dan Perikanan	II-84
2.3.3.2. Pariwisata	II-85
2.3.3.3. Pertanian	II-86
2.3.3.4. Perkebunan	II-87
2.3.3.5. Kehutanan	II-88
2.3.3.6. Energi dan Sumber Daya Mineral	II-88
2.3.3.7. Perdagangan	II-89
2.3.3.8. Perindustrian	II-90
2.3.3.9. Transmigrasi	II-91
2.3.4 Unsur Pendukung	II-92
2.3.4.1. Sekretariat Daerah	II-92
2.3.4.2. Sekretariat DPRD	II-93
2.3.5. Unsur Penunjang	II-94
2.3.5.1. Perencanaan	II-94
2.3.5.2. Keuangan	II-96
2.3.5.3. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	II-99
2.3.6 Unsur Pengawasan.....	II-101
2.3.6.1 Pengawasan (Inspektorat Daerah)	II-101
2.3.7 Unsur Kewilayahan	II-103
2.4. Aspek Daya Saing Daerah	II-104
2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	II-104
2.4.1.1 Kemampuan Ekonomi Daerah	II-104
2.4.1.2 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita	II-104
2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur	II-105
2.4.2.1 Wilayah Produktif	II-105
2.4.2.2 Penyediaan Air Minum	II-106

2.4.2.3	Penyediaan Energi Listrik	II-107
2.4.2.4	Penyediaan Jaringan Telekomunikasi	II-108
2.4.3	Fokus Iklim Berinvestasi	II-109
2.4.3.1	Angka Kriminalitas	II-109
2.4.3.2	Jumlah Demonstrasi	II-110
2.4.3.3	Kemudahan Perizinan	II-110
2.4.3.4	Peraturan Daerah Yang Mendukung Iklim Usaha	II-116
2.4.3.5	Perkembangan Pembangunan Desa	II-116
2.4.4	Fokus Sumber Daya Manusia	II-123
2.4.4.1	Rasio Ketergantungan	II-124
2.5	Capaian Kinerja RPJMD 2016-2021	II-125
BAB III	GAMBARAN KEUANGAN DAERAH	III-1
3.1.	Kinerja Keuangan Masa Lalu	III-3
3.1.1.	Kinerja pelaksanaan APBD	III-4
3.1.2.	Neraca Daerah	III-17
3.2.	Kebijakan Pengelolaan Keuangan Tahun Masa Lalu	III-23
3.2.1.	Kinerja Belanja Daerah	III-23
3.2.2.	Proporsi Penggunaan Anggaran	III-27
3.2.3.	Analisis Pembiayaan	III-28
3.3.	Kerangka Pendanaan	III-34
3.3.1.	Proyeksi Keuangan Daerah	III-34
3.3.2.	Perhitungan Kerangka Pendanaan	III-39
BAB IV	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH	IV-1
4.1.	Permasalahan Pembangunan	IV-2
4.2.	Isu Strategis	IV-24
4.2.1.	Isu Global/ Internasional	IV-25
4.2.1.1	Komitmen Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	

	(TPB)/Sustainable Development Goals	
	(SDGs	IV-25
4.2.1.2	Kesadaran Aksi Global Terkait Climate	
	Action (Aksi Iklim).....	IV-30
4.2.1.3	Dampak Pandemi Covid-19.....	IV-31
4.2.1.4	Perkembangan Teknologi Informasi	
	(Revolusi Industri 4.0).....	IV-37
4.2.2.	Isu Nasional yang Tercantum dalam RPJMN	
	2020 - 2024.....	IV-38
4.2.3.	Isu Strategis Provinsi Sulawesi Tenggara	
	2018 - 2023	IV-40
4.2.4.	Isu Strategis Yang Dihasilkan Dari Kajian	
	Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD	
	Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021-2026	IV-41
4.2.5.	Rumusan Isu - Isu Strategis Kabupaten	
	Konawe Utara	IV-42
BAB V	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN.....	V-1
5.1	Visi	V-2
5.2	Misi.....	V-3
5.3	Tujuan dan Sasaran Pembangunan	V-12
BAB VI	STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM	
	PEMBANGUNAN.....	VI-1
6.1	Strategi.....	VI-2
6.2	Arah Kebijakan Pembangunan Daerah.....	VI-7
6.3	Arah Kebijakan Pembangunan Kewilayahan.....	VI-19
6.4	Program Pembangunan Daerah	VI-22
BAB VII	KERANGKA PENDANAAN DAN PROGRAM PERANGKAT	
	DAERAH	VII-1
7.1	Kerangka Pendanaan Pembangunan.....	VII-2
7.2	Program Perangkat Daerah	VII-2
	7.2.1 Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan	
	Pelayanan Dasar	VII-3

7.2.2	Urusan Wajin Yang Tidak Berkaitan Dengan	
	Pelayanan Dasar	VII-5
7.2.3	Urusan Pilihan.....	VII-8
7.2.4	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan.....	VII-10
7.2.5	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	VII-10
7.2.6	Unsur Kewilayahan.....	VII-11
7.2.7	Unsur Pemerintahan Umum	VII-11
BAB VIII	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	
	DAERAH	VIII-1
BAB IX	PENUTUP	IX-1
9.1	Pedoman Transisi	IX-2
9.2	Kaidah Pelaksanaan	IX-2

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Integrasi Hasil KLHS RPJMD ke dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021-2026	I-19
Tabel 1.1	Integrasi Hasil KLHS RPJMD ke dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021-2026.....	I-19
Tabel 2.1	Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Konawe Utara	II-3
Tabel 2.2	Luas Wilayah dan Jenis Tanah di Kabupaten Konawe Utara	II-5
Tabel 2.3	Keadaan Curah Hujan Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020	II-6
Tabel 2.4	Luas Penggunaan Lahan di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020.....	II-7
Tabel 2.5	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Konawe Utara	II-12
Tabel 2.6	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Konawe Utara	II-13
Tabel 2.7	Jumlah dan Kepadatan Penduduk di Kabupaten Konawe Utara	II-13
Tabel 2.8	Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020	II-14
Tabel 2.9	Perkembangan IPM Kabupaten Konawe Utara	II-17
Tabel 2.10	Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Konawe Utara	II-19
Tabel 2.11	Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten Konawe Utara	II-21
Tabel 2.12	Persentase PDRB Atas Dasar Harga Konstan (2010) di Kabupaten Konawe Utara	II-22
Tabel 2.13	Perkembangan Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten Konawe Utara	II-23

Tabel 2.14	Perkembangan PDRB Perkapita di Kabupaten Konawe Utara	II-25
Tabel 2.15	Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Konawe Utara	II-28
Tabel 2.16	Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Kabupaten Konawe Utara	II-34
Tabel 2.17	Kondisi PAUD di Kabupaten Konawe Utara	II-35
Tabel 2.18	Kondisi Pendidikan Dasar di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020	II-36
Tabel 2.19	Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kabupaten Konawe Utara	II-37
Tabel 2.20	Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kabupaten Konawe Utara	II-38
Tabel 2.21	Sekolah Terakreditasi Kabupaten Konawe Utara	II-39
Tabel 2.22	Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Kabupaten Konawe Utara.....	II-39
Tabel 2.23	Rasio Posyandu per 1000 Balita di Kabupaten Konawe Utara	II-40
Tabel 2.24	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Konawe Utara	II-41
Tabel 2.25	Penilaian Akreditasi Puskesmas di Kabupaten Konawe Utara	II-41
Tabel 2.26	Rasio Jumlah Puskesmas, Pustu, Poskesdes, Polindes di Kabupaten Konawe Utara	II-42
Tabel 2.27	Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Konawe Utara	II-43
Tabel 2.28	Rasio Jumlah Dokter Per Jumlah 1000 Penduduk di Kabupaten Konawe Utara	II-44
Tabel 2.29	Rasio Tenaga Medis Per Jumlah 1000 Penduduk di Kabupaten Konawe Utara	II-44
Tabel 2.30	Data Kebersertaan Jaminan Kesehatan di Kabupaten Konawe Utara	II-45

Tabel 2.31	Jumlah Balita Gizi Buruk di Kabupaten Konawe Utara	II-46
Tabel 2.32	Jumlah Balita Pendek (Stunting) di Kabupaten Konawe Utara	II-46
Tabel 2.33	Angka Kesakitan di Kabupaten Konawe Utara	II-47
Tabel 2.34	Persentase PHBS di Kabupaten Konawe Utara	II-48
Tabel 2.35	Pelaksanaan SPM Kesehatan Kabupaten Konawe Utara.....	II-49
Tabel 2.36	Panjang Jalan di Kabupaten Konawe Utara	II-51
Tabel 2.37	Kondisi Jalan di Kabupaten Konawe Utara	II-51
Tabel 2.38	Kondisi Jaringan Irigasi di Kabupaten Konawe Utara	II-52
Tabel 2.39	Daerah Irigasi Yang Teraliri Dengan Baik di Kabupaten Konawe Utara	II-53
Tabel 2.40	Tingkat Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang di Kabupaten Konawe Utara.....	II-54
Tabel 2.41	Ketersediaan Prasarana Perumahan Kabupaten Konawe Utara	II-56
Tabel 2.42	Proyek Kebutuhan Rumah setiap Kecamatan di Kabupaten Konawe Utara.....	II-57
Tabel 2.43	Ketersediaan Prasarana Perumahan Kabupaten Konawe Utara.....	II-58
Tabel 2.44	Luas Kawasan Pemukiman Kumuh Kabupaten Konawe Utara.....	II-59
Tabel 2.45	Jumlah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Konawe Utara	II-61
Tabel 2.46	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu di Kabupaten Konawe Utara	II-61
Tabel 2.47	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Konawe Utara	II-62
Tabel 2.48	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Konawe Utara	II-63

Tabel 2.49	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Konawe Utara	II-64
Tabel 2.50	Kinerja Pemberdayaan Perempuan dan PA di Kabupaten Konawe Utara	II-65
Tabel 2.51	Jumlah Kasus Kejahatan dan Kasus yang telah diselesaikan ..	II-65
Tabel 2.52	Partisipasi Perempuan dalam berpolitik	II-66
Tabel 2.53	Kinerja Urusan Pangan di Kabupaten Konawe Utara	II-67
Tabel 2.54	Perkembangan Status Hak Tanah di Kabupaten Konawe Utara	II-68
Tabel 2.55	Kinerja Pengelolaan Lingkungan di Kabupaten Konawe Utara	II-68
Tabel 2.56	Cakupan Penerbitan KTP di Kabupaten Konawe Utara	II-69
Tabel 2.57	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran di Kabupaten Konawe Utara	II-70
Tabel 2.58	Kinerja Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Konawe Utara	II-71
Tabel 2.59	Kepersertaan Keluarga Berencana di Kabupaten Konawe Utara	II-72
Tabel 2.60	Jumlah Kasus Pernikahan dan Perceraian yang tercatat	II-72
Tabel 2.61	Jumlah Kampung KB di Kabupaten Konawe Utara.....	II-72
Tabel 2.62	Sarana dan Prasarana Perhubungan di Kabupaten Konawe Utara.....	II-73
Tabel 2.63	Prasarana Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri Di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2008 - 2021	II-74
Tabel 2.64	Jumlah Sarana Transportasi Darat, Laut, Sungai dan Danau Di Kabupaten Konawe Utara	II-76
Tabel 2.65	Kinerja Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Konawe Utara	II-77
Tabel 2.66	Alamat Subdomain Website Pemerintah Kabupaten Konawe Utara dan Penerapan Sistem Informasi/ Aplikasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	II-78

Tabel 2.67	Persentase Koperasi Aktif di Kabupaten Konawe Utara	II-78
Tabel 2.68	Perkembangan Modal dan aset Koperasi di Kabupaten Konawe Utara	II-79
Tabel 2.69	Pertumbuhan Jumlah UMKM di Kabupaten Konawe Utara	II-79
Tabel 2.70	Penyerapan Tenaga Kerja Pada UMKM di Kabupaten Konawe Utara	II-80
Tabel 2.71	Jumlah dan Nilai Investasi PMDN/PMA di Kabupaten Konawe Utara	II-80
Tabel 2.72	Perkembangan Olahraga di Kabupaten Konawe Utara	II-81
Tabel 2.73	Kinerja Urusan Kebudayaan di Kabupaten Konawe Utara	II-82
Tabel 2.74	Kinerja Urusan Perpustakaan di Kabupaten Konawe Utara	II-83
Tabel 2.75	Kondisi Pengelolaan Sub Sektor Perikanan di Kabupaten Konawe Utara	II-84
Tabel 2.76	Kondisi Pengelolaan Pariwisata Kabupaten Konawe Utara ..	II-85
Tabel 2.77	Perkembangan Kinerja Sektor Pertanian di Kabupaten Konawe Utara	II-86
Tabel 2.78	Perkembangan Produktivitas Sub Sektor Perkebunan di Kabupaten Konawe Utara	II-87
Tabel 2.79	Data Kondisi Pasar Tradisional/Rakyat di Kabupaten Konawe Utara	II-89
Tabel 2.80	Jumlah Industri Kecil Menengah di Kabupaten Konawe Utara	II-90
Tabel 2.81	Jenis Industri dan Jumlah Tenaga Kerja di Kabupaten Konawe Utara	II-91
Tabel 2.82	Penempatan Transmigrasi di Kabupaten Konawe Utara	II-91
Tabel 2.83	Kinerja Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan di Kabupaten Konawe Utara	II-92
Tabel 2.84	Kinerja Fungsi Penunjang Perencanaan dan Kelitbangan di Kabupaten Konawe Utara.....	II-95

Tabel 2.85	Kinerja Fungsi Penunjang Keuangan	II-98
Tabel 2.86	Kondisi Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Konawe Utara	II-99
Tabel 2.87	Jumlah ASN Berdasarkan Jabatan di Kabupaten Konawe Utara	II-100
Tabel 2.88	Kinerja Fungsi Penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan di Kabupaten Konawe Utara	II-100
Tabel 2.89	Target dan Realisasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Internal dan Eksternal di Kabupaten Konawe Utara.....	II-102
Tabel 2.90	Kondisi Jumlah Aparatur Pengawasan dan Status Leveling APIP di Kabupaten Konawe Utara	II-103
Tabel 2.91	Kondisi Makro Ekonomi Kabupaten Konawe Utara	II-104
Tabel 2.92	Persentase Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga di Kabupaten Konawe Utara	II-105
Tabel 2.93	Persentase Luas Wilayah Produktif Kabupaten Konawe Utara	II-106
Tabel 2.94	Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Air Minum Menurut Sumbernya di Kabupaten Konawe Utara	II-107
Tabel 2.95	Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik di Kabupaten Konawe Utara	II-107
Tabel 2.96	Aplikasi Sistem Informasi di Kabupaten Konawe Utara	II-108
Tabel 2.97	Angka Kriminalitas di Kabupaten Konawe Utara	II-109
Tabel 2.98	Jumlah Demonstrasi/Unjuk Rasa di Kabupaten Konawe Utara	II-110
Tabel 2.99	Jenis Pelayanan Perizinan di Kabupaten Konawe Utara	II-111
Tabel 2.100	Lama Proses Perizinan di Kabupaten Konawe Utara	II-115
Tabel 2.101	Rekapitulasi Perizinan di Kabupaten Konawe Utara	II-115
Tabel 2.102	Status Desa di Kabupaten Konawe Utara Menurut Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2019	II-117

Tabel 2.103	Tingkat Pendidikan Tenaga Kerja di Kabupaten Konawe Utara	II-123
Tabel 2.104	Rasio Ketergantungan (Beban Tanggungan) di Kabupaten Konawe Utara	II-124
Tabel 2.105	Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran S.d Tahun 2020 Terhadap Target Akhir RPJMD	II-125
Tabel 3.1	Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016 – 2020	III-6
Tabel 3.2	Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016-2020 (Rupiah)	III-12
Tabel 3.3	Indeks Kapasitas Fiskal Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015-2020	III-14
Tabel 3.4	Fiskal Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021	III-15
Tabel 3.5	Tabel Uraian Belanja dan Pendapatan Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021	III-16
Tabel 3.6	Neraca Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016-2020	III-18
Tabel 3.7	Analisis Rasio Keuangan Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016-2019	III-21
Tabel 3.8	Rasio Solvabilitas Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016-2019	III-22
Tabel 3.9	Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016-2020 (Rupiah)	III-25
Tabel 3.10	Analisis Proporsi Belanja Pegawai	III-27
Tabel 3.11	Perkembangan Pembiayaan Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016-2020 (Rupiah)	III-29
Tabel 3.12	Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016-2020	III-31
Tabel 3.13	Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016-2020	III-31

Tabel 3.14	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016-2020.....	III-33
Tabel 3.15	Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021-2026.....	III-36
Tabel 3.16	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021-2026	III-40
Tabel 3.17	Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021-2026	III-41
Tabel 4.1	Keterkaitan Masalah Daerah dan Permasalahan Perangkat Daerah	IV-4
Tabel 4.2	Rumusan Permasalahan Pembangunan Daerah.....	IV-22
Tabel 4.3	Pencapaian Target Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Konawe Utara.....	IV-29
Tabel 4.4	Pencapaian Target Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Konawe Utara.....	IV-30
Tabel 4.5	Keterkaitan Isu Strategis Kabupaten Konawe Utara, Isu Internasional, Isu Nasional, Isu Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Isu Strategis KLHS RPJMD.....	IV-43
Tabel 5.1	Keterkaitan Misi RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021-2026 dengan Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2011-2032, Misi dan 7 Agenda Pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024, dan RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023	V-8
Tabel 5.2	Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021-2026	V-13
Tabel 5.3	Keterkaitan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala daerah dan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021-2026	V-19
Tabel 6.1	Strategi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021-2026.....	VI-2
Tabel 6.2	Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021-2026.....	VI-8

Tabel 6.3	Program Pembangunan Daerah Dalam Rangka Pencapaian Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Tahun 2021-2026	VI-23
Tabel 7.1	Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026	VII-2
Tabel 7.2	Indikasi Rencana Program Perangkat Daerah Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Tahun 2021-2026	VII-12
Tabel 8.1	Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021-2026	VIII-3
Tabel 8.2	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021-2026	VIII-10
Tabel 8.3	Penyelarasan Target Indikator Makro Kabupaten Konawe Utara,Provinsi Sulawesi Tenggara dan Nasional	VIII-27
Tabel 8.4	Penyelarasan Dukungan Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Konawe Utara Terhadap Program Prioritas Nasional	VIII-28

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Hubungan Antar Dokumen Perencanaan.....	I-12
Gambar 1.2	Keterkaitan RPJMD Kabupaten Konawe Utara Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.....	I-13
Gambar 1.3	Visi, Misi, Arahkan dan Tujuan Agenda Pembangunan dalam RPJMN Tahun 2020-2024	I-14
Gambar 1.4	Keselarasan RPJMD Kabupaten Konawe Utara dan RPJMN.....	I-14
Gambar 1.5	Keselarasan RPJMD Kabupaten Konawe Utara dan RPJPD	I-17
Gambar 1.6	Keselarasan RPJMD Kabupaten Konawe Utara Dan RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara	I-40
Gambar 2.1	Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Konawe Utara.....	II-3
Gambar 2.2	Peta Resiko Bencana Banjir di Kabupaten Konawe Utara ...	II-10
Gambar 2.3	Peta Resiko Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Konawe Utara.....	II-10
Gambar 2.4	Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015-202	II-16
Gambar 2.5	Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, dan Nasional	II-18
Gambar 2.6	Kontribusi PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020.....	II-20
Gambar 2.7	Struktur Ekonomi Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016 - 2020	II-24
Gambar 2.8	Perkembangan Laju Inflasi Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016 - 2020.....	II-26
Gambar 2.9	Distribusi Pendapatan (Gini Ratio) Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016 - 2020	II-27

Gambar 2.10	Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Konawe Utara	II-30
Gambar 2.11	Angka Rata - Rata Lama Sekolah di Kabupaten Konawe Utara	II-31
Gambar 2.12	Angka Kematian Bayi di Kabupaten Konawe Utara	II-31
Gambar 2.13	Angka Kematian Ibu di Kabupaten Konawe Utara	II-32
Gambar 2.14	Usia Harapan Hidup di Kabupaten Konawe Utara	II-33
Gambar 3.1	Gambaran Umum Realisasi APBD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016-2020 (Milyar Rupiah)	III-5
Gambar 3.2	Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016-2020 (Milyar Rupiah)	III-6
Gambar 3.3	Proporsi Unsur Pendapatan Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016- 2020 (Persen)	III-9
Gambar 3.4	Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016-2020 (Milyar Rupiah)	III-10
Gambar 3.5	Perkembangan Pendapatan Dana Tranfer Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016-2020 (Milyar Rupiah)	III-11
Gambar 3.6	Perkembangan Lain-Lain Pendapatan yang Sah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016-2020 (Milyar Rupiah)	III-11
Gambar 3.7	Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016-2020 (Milyar Rupiah)	III-23
Gambar 3.8	Proporsi Unsur Belanja Daerah terhadap Total Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016-2020 (Milyar Rupiah)	III-24
Gambar 3.9	Perkembangan Penerimaan Pembiayaan Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016-2020 (Milyar Rupiah)	III-30
Gambar 3.10	Perkembangan Pengeluaran Pembiayaan Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016-2020 (Milyar Rupiah)	III-30
Gambar 3.11	Perkembangan SILPA tahun Berjalan Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016-2020 (Milyar Rupiah)	III-32

Gambar 4.1	Hubungan Permasalahan Daerah dan Perangkat Daerah	IV-3
Gambar 4.2	Pencapaian Target Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Konawe Utara	IV-29

BAB I PENDAHULUAN



1.1. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Sejak menjadi Daerah Otonomi Baru berdasarkan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2007 tanggal 2 Januari Tahun 2007, perkembangan pembangunan di Kabupaten Konawe Utara telah dirasakan manfaatnya bagi masyarakat. Namun seiring dengan tantangan pada masa mendatang, diperlukan keberlanjutan dan perubahan kearah yang lebih baik dari aktivitas pembangunan sehingga dapat mewujudkan visi pembangunan jangka panjang “Konawe Utara Yang Mandiri, Maju, Adil, dan Sejahtera”.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik Dr. Ir. H. Ruksamin, ST, M.Si, IPU, ASEAN.Eng sebagai Bupati Konawe Utara dan H. Abuhaera, S.Sos, M.Si sebagai Wakil Bupati Konawe Utara tanggal 26 April 2021 dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.74-265 Tahun 2021 Tanggal 12 April 2021. Untuk itu, berdasarkan ketentuan Pasal 264 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilantik.

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021-2026 dilakukan menggunakan beberapa pendekatan perencanaan pembangunan, baik pendekatan penganggaran berbasis program, pendekatan berorientasi proses, maupun pendekatan berorientasi substansi. Pendekatan penganggaran berbasis program didahului dengan perencanaan berbasis kinerja. Pendekatan tersebut merupakan suatu pendekatan dalam sistem penganggaran yang memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dan kinerja yang diharapkan, serta efisiensi dalam pencapaian kinerja tersebut.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Konawe Utara disusun melalui pendekatan yang berorientasi pada proses antara lain:

1. Pendekatan Teknokratik, yaitu pendekatan perencanaan yang menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah. Hal ini ditunjukkan oleh proses penyusunan RPJMD dengan melibatkan tenaga ahli yang berkompeten.
2. Pendekatan Politik, yaitu pendekatan perencanaan yang mengakomodasi kepentingan-kepentingan politik dalam pelaksanaan pembangunan, yang ditunjukkan dengan diakomodasinya saran dan masukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe Utara.
3. Pendekatan Partisipatif, yaitu pendekatan perencanaan yang mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang disampaikan melalui konsultasi publik dan musrenbang RPJMD.
4. Pendekatan *Top-down* dan *Bottom-Up*, yaitu pendekatan yang memperhatikan kebijakan dan program-program prioritas pemerintah pusat dan provinsi. Hal ini ditunjukkan oleh konsistensi Penyusunan RPJMD yang mengacu pada RPJMN tahun 2020-2024 dan RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2018-2023. Komitmen ini dilaksanakan melalui telaah kebijakan, konsultasi dan evaluasi Ranperda RPJMD dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Selain itu penyusunan kebijakan dan program RPJMD juga mengakomodir kebutuhan masyarakat Kabupaten Konawe Utara.

Pendekatan berorientasi pada substansi yang digunakan dalam Penyusunan RPJMD Kabupaten Konawe Utara meliputi pendekatan Holistik-Tematik, pendekatan integratif dan pendekatan spasial. Pendekatan tersebut merupakan penjabaran tema Prioritas Pembangunan ke dalam perencanaan yang menyeluruh mulai dari hulu

hingga hilir suatu rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam keterpaduan pemangku kepentingan dan pendanaan, serta dalam satu kesatuan wilayah dan keterkaitan antar wilayah.

1. Pendekatan Holistik-Tematik, dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.
2. Pendekatan Integratif, dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan daerah kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah.
3. Pendekatan Spasial, dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan. Dalam hal ini penyusunan RPJMD sudah memperhatikan lokasi dan kesesuaiannya dengan rencana tata ruang wilayah.

Selain itu sesuai Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, maka Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Konawe Utara 2021 – 2026 akan diintegrasikan dengan hasil - hasil KLHS RPJMD yang saat ini sedang dilaksanakan. Semua ini dilakukan agar komitmen pencapaian Tujuan pembangunan Berkelanjutan (TPB) menjadi dasar dalam perumusan kebijakan, rencana, dan program pembangunan daerah.

Karakteristik yang lain dari RPJMD Tahun 2021-2026 ini menyangkut waktu pemberlakuan RPJMD, dimana RPJMD Tahun 2021-2026 ini secara normal akan mulai berlaku pada bulan Oktober 2021 (Penetapan RPJMD paling lambat 6 bulan sejak dilantiknya Kepala Daerah terpilih). Sementara itu, sesuai dengan Pasal 355 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD paling lambat minggu ketiga bulan Juli. Namun dengan mempertimbangkan masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang sudah dimulai sejak tanggal 26 April 2021, maka implementasi program dan kegiatan yang dituntut oleh masyarakat akan mewarnai sejak awal masa kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Kondisi ini menempatkan perencanaan dan penganggaran tahun 2021 sebagai tahun transisi, yaitu sebagian masih mengacu pada perencanaan jangka menengah sebelumnya

(Tahun 2016-2021) dan sebagian lagi sudah mengacu pada perencanaan jangka menengah sesudahnya, yaitu tahun 2021-2026.

RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021-2026 disusun pada era pandemi Covid-19 belum berakhir. Dampak pandemi ini tidak hanya menyasar permasalahan di bidang kesehatan, namun juga berpengaruh buruk terhadap sektor-sektor lain, mulai dari pendidikan, ekonomi dan keuangan, infrastruktur, budaya, agama, pariwisata, dan lain-lain. Salah satu indikator yang dapat dilihat adalah pertumbuhan ekonomi Kabupaten Konawe Utara yang tertekan hingga mencapai angka -0,72 pada tahun 2020 dan Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar -0,65. Angka ini menggambarkan begitu parahnya dampak pandemi ke hampir semua lapangan usaha. Oleh karena itu, RPJMD ini mendapatkan tantangan yang cukup besar untuk dapat membuat skenario-skenario pembangunan yang dapat secara bertahap membangkitkan kembali perekonomian di Kabupaten Konawe Utara. Gambaran-gambaran visioner atas kondisi di akhir periode RPJMD atau di tahun 2026 nanti (sebagaimana dapat dilihat pada Bab V) menjadi salah satu pemacu agar upaya yang akan dilakukan dari segenap komponen pemerintah dan masyarakat Kabupaten Konawe Utara dapat terarah dan sejalan dengan pencapaian visi tersebut.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Konawe Utara ini memiliki kedudukan strategis sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD yang merupakan dokumen perencanaan tahunan daerah untuk selanjutnya menjadi dasar penyusunan APBD tahun 2022 hingga tahun 2026. Dokumen RPJMD juga merupakan acuan dalam menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan lima tahun pada tingkat Perangkat Daerah, serta dokumen RPJMD juga akan menjadi acuan bagi DPRD dan masyarakat luas untuk melakukan pengawasan dan evaluasi kinerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomomr 6573);
15. Menambahkan Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

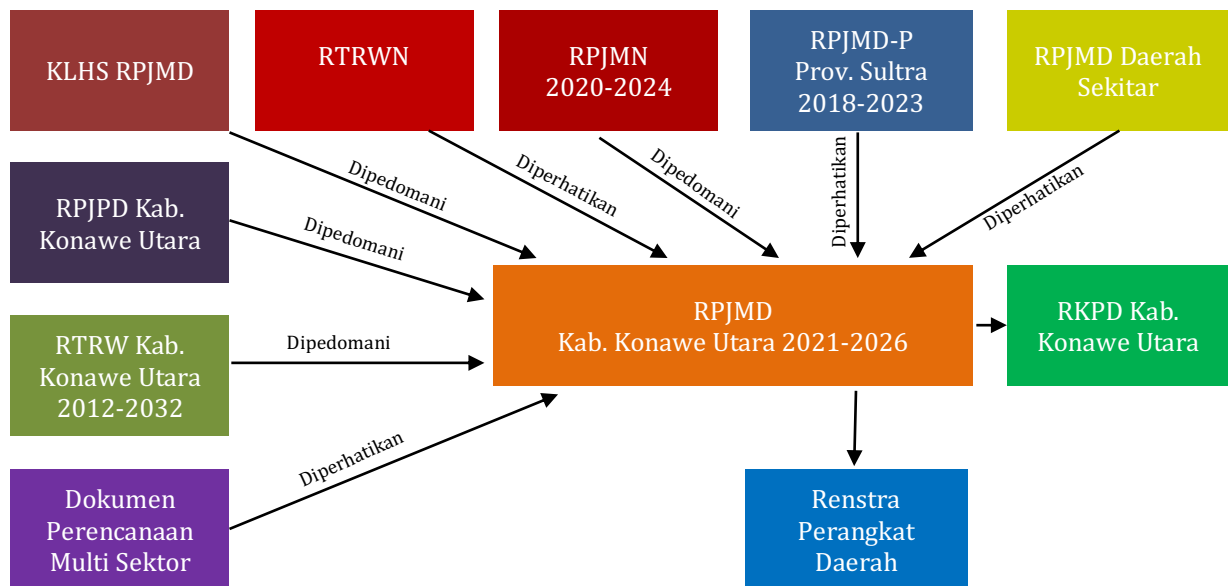
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
26. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
28. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
29. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
30. Menambahkan Dasar Hukum Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341)
31. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);

32. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
33. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
34. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
35. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
36. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
38. Menambahkan Dasar Hukum Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
42. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 - 2034 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 Nomor 2);
43. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 - 2034;
44. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 9);
45. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 9);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 20 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Konawe Utara Tahun 2012 - 2032;
47. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Konawe Utara 2012 - 2032.
48. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016-2021;

Keterkaitan antara RPJMD Kabupaten Konawe Utara dengan dokumen perencanaan lainnya tercantum pada Gambar 1.2.



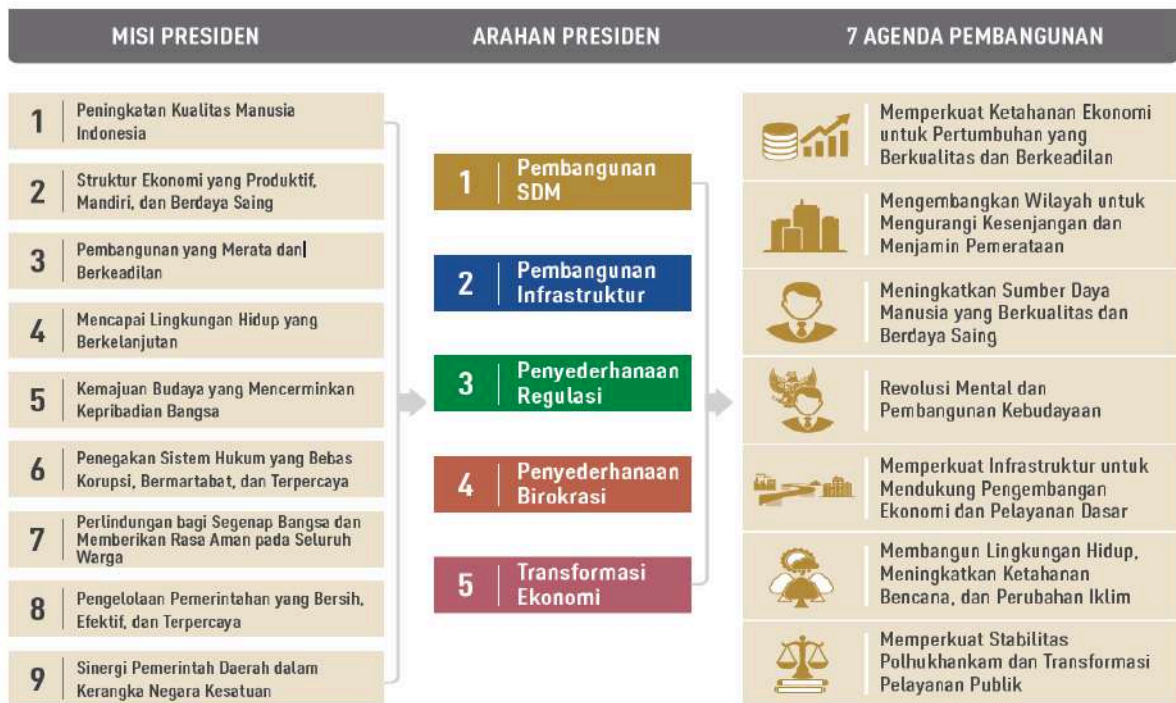
Gambar 1.2 Keterkaitan RPJMD Kabupaten Konawe Utara Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.3.1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024

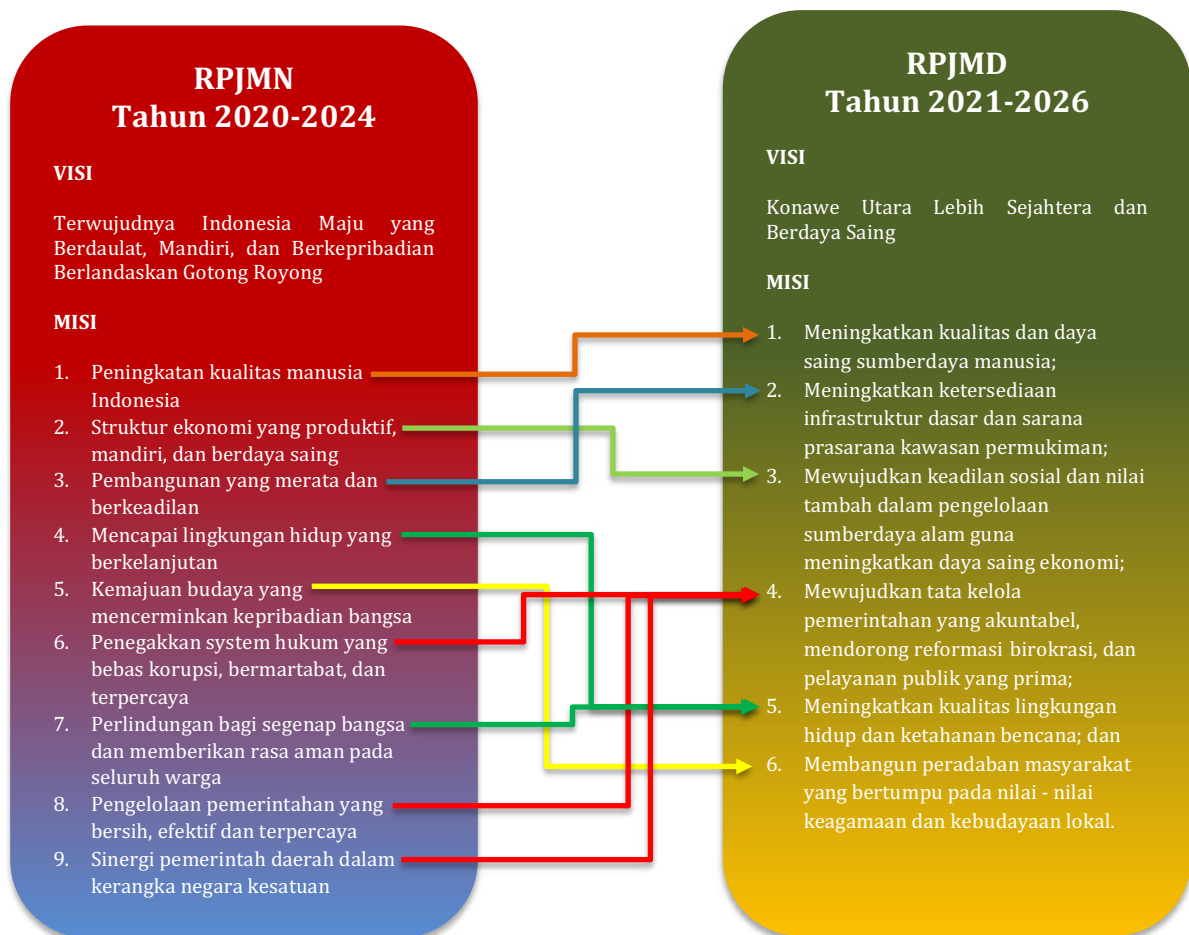
Penyusunan RPJMD Kabupaten Konawe Utara memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Terutama terkait isu strategis, 5 (lima) arahan Presiden, 7 (tujuh) sasaran pokok agenda pembangunan, kebijakan pengembangan wilayah dan indikator kinerja yang tercantum dokumen RPJMN tahun 2020-2024.

Visi Presiden :

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”



Gambar 1.3. Visi, Misi, Arahan dan Tujuh Agenda Pembangunan dalam RPJMN Tahun 2020-2024 (Sumber : Lampiran 1 Perpres 18 Tahun 2020, hal. -I.12-)



Gambar 1.4. Keselarasan RPJMD Kabupaten Konawe Utara dan RPJMN

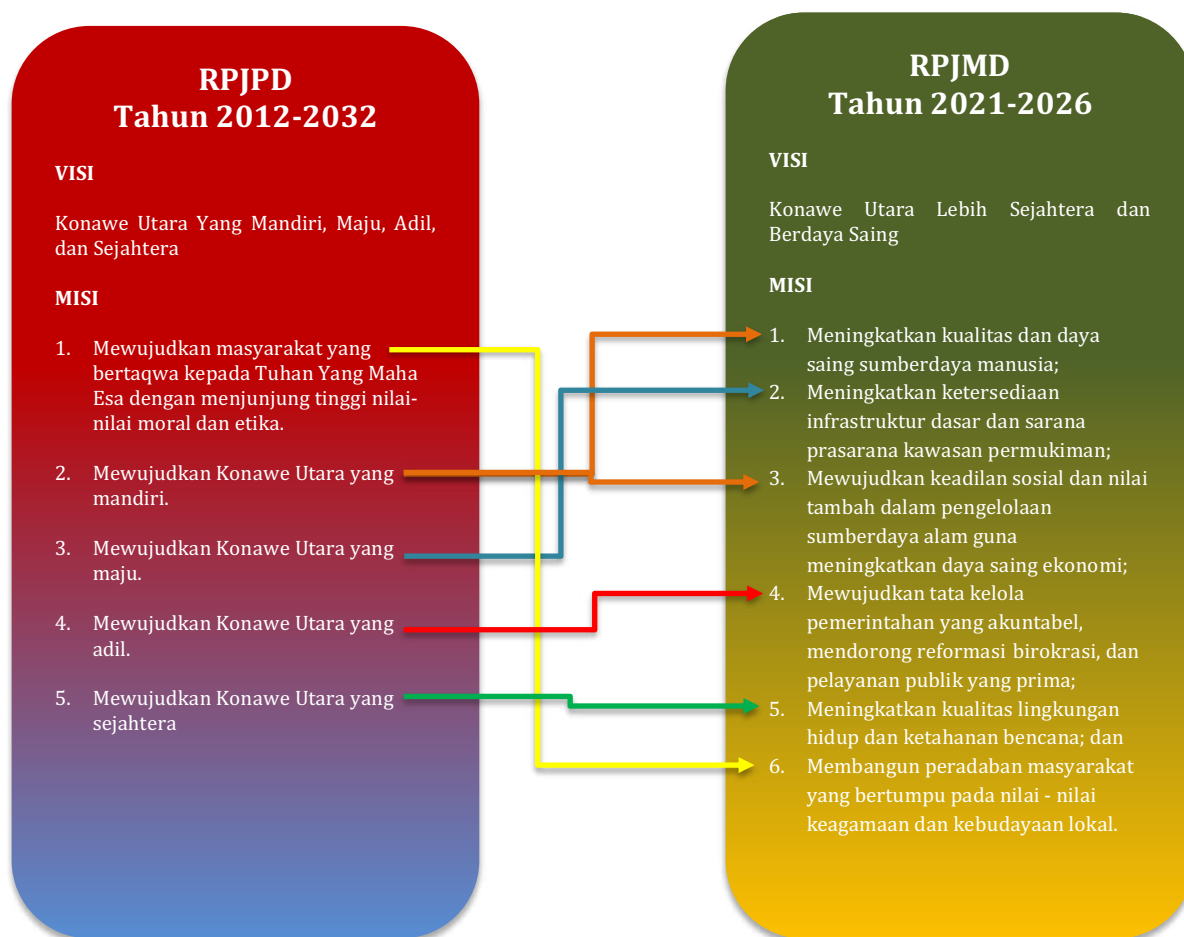
1.3.2 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Konawe Utara

Penyusunan RPJMD Kabupaten Konawe Utara berpedoman pada dokumen RPJPD Kabupaten Konawe Utara, terutama terkait dengan isu strategis, sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan pada RPJMD tahap ke-3 dalam dokumen RPJPD yang ditujukan untuk lebih memantapkan pelaksanaan pembangunan di berbagai bidang pada tahap-tahap sebelumnya. Selain itu pada RPJMD Tahap III ini akan diarahkan pula pada prioritas sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas pendidikan, aksesibilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pendidikan, serta pemerataan pendidikan dan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu.
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan, aksesibilitas, dan partisipasi masyarakat dalam Kesehatan.
3. Peningkatan perluasan kesempatan kerja, kualitas tenaga kerja, perlindungan tenaga kerja, dan transmigrasi.
4. Pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga pendapatan perkapita pada akhir periode pembangunan jangka panjang mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan kabupaten maju di Indonesia.
5. Peningkatan inovasi produk dan perluasan jangkauan pemasaran baik dalam negeri maupun luar negeri; penerapan sistem industri, dalam lingkup mikro, kecil dan menengah, serta koperasi yang ramah lingkungan dan berbasis keluarga dan teknologi; fasilitasi kawasan pengembangan industri kreatif yang memadai; peningkatan produktivitas pertanian, perikanan dan kelautan serta kehutanan diarahkan untuk menghasilkan produk- produk yang bertumpu pada sistem agribisnis dan agroindustri, guna menjamin ketersediaan pangan dan nilai tambah dalam rangka mengurangi kemiskinan dan pengangguran; pengembangan kepariwisataan memanfaatkan keberagaman pesona keindahan alam, budaya dan potensi daerah lainnya; penguatan kelembagaan ekonomi guna menciptakan regulasi dan perizinan yang efisien dan efektif; dan optimalisasi fungsi pasar tradisional untuk meningkatkan pendapatan pedagang melalui pemberian modal yang mudah dan murah.

6. Peningkatan jaringan infrastruktur yang andal guna meningkatkan aksesibilitas serta mendukung kegiatan produksi pada kawasan-kawasan pertumbuhan baru/ kawasan strategis
7. Perencanaan, Pemanfaatan dan pengendalian ruang dalam suatu sistem wilayah pembangunan yang berkelanjutan, melalui: penataan ruang sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
8. Pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup yang tercermin oleh tetap terjaganya fungsi, daya dukung, dan kemampuan pemulihannya dalam mendukung kualitas kehidupan industri dan ekonomi secara serasi dan seimbang. Pengurangan risiko bencana melalui penataan pemukiman dan merelokasi penduduk dari wilayah rawan bencana, melalui: pembuatan rencana penataan permukiman berbasis mitigasi bencana; sosialisasi dan peningkatan kewaspadaan masyarakat siaga bencana; dan peningkatan kelembagaan dan kapasitas masyarakat.
9. Pengurangan penyandang masalah kesejahteraan sosial, tercapainya pertumbuhan penduduk tumbuh seimbang, serta peningkatan peran perempuan dalam pembangunan.
10. Peningkatan prestasi olahraga dan kualitas generasi muda, melalui: peningkatan sarana dan prasarana penunjang olah raga; membudayakan olah raga dalam kehidupan sehari-hari bagi masyarakat; dan peningkatan kualitas dan partisipasi pemuda dalam pembangunan dan pemberdayaan pemuda sebagai subyek pembangunan, melalui pengembangan lembaga kepemudaan yang berwawasan kebangsaan.
11. Peningkatan karakter masyarakat yang berbudaya, tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, berkeperibadian Indonesia, berdasarkan falsafah Pancasila yang dicirikan dengan watak dan perilaku yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, bertoleransi, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dan dinamis.
12. Peningkatan kapabilitas perangkat daerah dan kemampuan pengelolaan keuangan daerah secara efisien, efektif, transparan, partisipatif dan akuntabel, melalui: peningkatan kinerja, kapasitas dan profesionalisme aparatur pemerintah dan lembaga pemerintah dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan.

13. Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, melalui: peningkatan teknologi informasi dalam pelayanan publik; peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan *Standart Operating Procedure* (SOP) yang berorientasi pada terciptanya kepuasan masyarakat; peningkatan sarana dan prasarana publik; dan peningkatan daya respon terhadap keinginan dan kebutuhan masyarakat.
14. Menciptakan ketertiban masyarakat, melalui: terciptanya kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan masyarakat.



Gambar 1.5. Keselarasan RPJMD Kabupaten Konawe Utara dan RPJPD

1.3.3 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD

Penyusunan RPJMD Kabupaten Konawe Utara mempedomani dokumen dan hasil dari proses KLHS RPJMD Kabupaten Konawe Utara, terutama memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dan memastikan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang telah ditetapkan Nasional telah terakomodir dalam target RPJMD. Secara ringkas pengintegrasian KLHS ke dalam RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021- 2026 dapat dilihat pada Tabel 1.1.

1.3.4 Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

Hasil telaah terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), mengatur secara umum tentang pengembangan wilayah nasional dan daerah, namun tidak secara khusus menyampaikan tentang arah pengembangan Kawasan Sulawesi Tenggara pada umumnya maupun Konawe Utara khususnya. Namun demikian, terdapat beberapa hal yang penting untuk dijadikan dasar kebijakan bagi pengembangan Kawasan Konawe Utara, yaitu;

1. Pada Pasal 7 ayat 2 huruf b4, menyatakan bahwa kebijakan yang berlaku untuk daerah-daerah di Pulau Sulawesi diharapkan dapat mengembangkan Kawasan lindung dengan luas paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari luas daerah tersebut sesuai dengan kondisi, karakter, dan fungsi ekosistemnya serta tersebar secara proporsional;
2. Pasal 14 ayat 2, pengembangan Kawasan Wilayah (PKW) sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan kriteria:
 - a. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul kedua kegiatan ekspor-impor yang mendukung PKN;
 - b. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten;
 - c. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten; dan/atau
 - d. kawasan perkotaan yang berada di pesisir yang berfungsi atau berpotensi mendukung ekonomi kelautan nasional.

Kebijakan dalam RTRWN di atas diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan pengembangan Kabupaten Konawe Utara.

Tabel 1.1
Integrasi Hasil KLHS RPJMD ke dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021-2026

No. Indikator	Indikator	Target Nasional	Indikator Daerah	Status (Tahun 2020)	Proyeksi	Status (Tahun 2026)	Keterkaitan D3TLH	Keterangan D3TLH	Rekomendasi KLHS	Gambaran Umum Kondisi Daerah (Bab 2)	Permasalahan dan Isu Strategis (Bab 4)	Visi dan Misi (Bab 5)	Strategi Arah Kebijakan dan Program Pembangunan (Bab 6)	
													Strategi dan Arah Kebijakan	Program Pembangunan
Tujuan 1 : Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk dimanapun														
5.7.2	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Progr am Keluarga Harapan	Menurun menjadi 2,8 juta	Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial	SB	48,06	SB	Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan	<div>1. Jasa ekosistem penyediaan pangan di Kabupaten Konawe Utara secara menyeluruh berada pada kondisi indikasi sedang, dengan total persentase luas 298.718,96 Ha (71,66%),</div> <div>2. Penyebaran jasa ekosistem penyediaan pangan dengan indikasi sangat tinggi berada di Kecamatan Andowia (3.354 Ha), menyusul Landawe (3.116,62 Ha) dan Molawe (2.863,71 Ha)</div> <div>3. Jenis penyediaan pangan di Kabupaten Konawe Utara berasal dari hasil perkebunan dan holtikultura, hasil pertanian tanaman pangan dan peternakan, hasil perikanan laut dan air tawar,hasilhutan dan lain-lain</div>	<div>Jangka Pendek:</div> <div>1. Pemberian Bantuan Sosial;</div> <div>2. Pemberian modal usaha;</div> <div>3. Pemberian pelatihan kewirausahaan;</div> <div>4. Penyusunan Database kemiskinan</div> <div>Jangka Menengah:</div> <div>1. Bersinergi dengan Pengusaha untuk membuka lapangan kerja baru</div> <div>2. Mengikuti program-program hibah pengentasan kemiskinan.</div> <div>Jangka Panjang:</div> <div>Bersinergi dengan pengusaha untukmemberikan CSR pengentasan kemiskinan;</div>	Aspek Kesejahteraan Masyarakat (Tingkat Kemiskinan)	Kualitas dan daya saing sumber daya manusia	<div>Misi Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia</div> <div>Tujuan Meningkatkan kualitas sumber daya manusia</div> <div>Sasaran Meningkatknya penanganan masalah kesejahteraan sosial</div>	Penurunan angka kemiskinan melalui program-program penanggulangan kemiskinan bagi warga miskin	Program Perlindungan jaminan sosial
5.29.2	Jumlah lokasi Penguatan pengurangan risiko bencana daerah	Meningka t (2018: 1)	Jumlah desa tangguh bencana	SB	47	SB	<div>1.Jasa ekosistem Pengatura n Iklim</div> <div>2.Jasa Ekosistem Pengatura n Pencegah an dan Perlindun gan terhadap bencana Alam</div>	<div>1. Jasa Pengaturan Iklim di Kabupaten Konawe Utara berada dalam kondisi sangat tinggi dengan luas wilayah 304.246,89 Ha</div> <div>2. Kondisi pengaturan iklim sangat tinggi berada diwilayah Kec. Asera (131.609,63 Ha), kemudian menyusul Kec. Wiwirano (70.169,62Ha) dan Kec. Oheo (30.104,30 Ha)</div> <div>3. Jasa ekosistem pengaturan pencegahan dan perlindungan terhadap bencana alam di Kab. Konawe Utara berada dalam kondisi tinggi, dengan persentase luas wilayah sebesar 316.643,53 Ha (75,96Ha)</div>		Aspek Geografi dan Demografi (Wilayah Rawan Bencana)	Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana Alam	<div>Misi Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana</div> <div>Tujuan Meningkatkan kualitas lingkungan hidup</div> <div>Sasaran Terwujudnya tata kelola dan manajemen bencana</div>	Meningkatkan ketahanan daerah dalam menghadapi bencana melalui pengurangan resiko bencana untuk ketangguhan (mitigasi, kesiapsiagaan, pra bencana), manajemen kedaruratan, dan manajemen pemulihan	Program Penanggulangan Bencana

No. Indikator	Indikator	Target Nasional	Indikator Daerah	Status (Tahun 2020)	Proyeksi	Status (Tahun 2026)	Keterkaitan D3TLH	Keterangan D3TLH	Rekomendasi KLHS	Gambaran Umum Kondisi Daerah (Bab 2)	Permasalahan dan Isu Strategis (Bab 4)	Visi dan Misi (Bab 5)	Strategi Arah Kebijakan dan Program Pembangunan (Bab 6)	
													Strategi dan Arah Kebijakan	Program Pembangunan
5.7.3	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial	Meningkat (2018:100%)	Persentase Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat	TT	100	SB	Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan	1. Jasa ekosistem penyediaan pangan di Kabupaten Konawe Utara secara menyeluruh berada pada kondisi indikasi sedang, dengan total persentase luas 298.718,96 Ha (71,66%), 2. Penyebaran jasa ekosistem penyediaan pangan dengan indikasi sangat tinggi berada di Kecamatan Andowia (3.354 Ha), menyusul Landawe (3.116,62 Ha) dan Molawe (2.863,71 Ha) 3. Jenis penyediaan pangan di Kabupaten Konawe Utara berasal dari hasil perkebunan dan holtikultura, hasil pertanian tanaman pangan dan peternakan, hasil perikanan laut dan air tawar, hasil hutan dan lain-lain		Aspek Pelayanan Umum (Sosial)	Kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Misi Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Tujuan Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Sasaran Meningkatkannya penanganan masalah kesejahteraan sosial	Penurunan angka kemiskinan melalui program-program penanggulangan kemiskinan bagi warga miskin	Program Perlindungan jaminan sosial
Tujuan 2 : Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan														
5.5.4	Kekurangan gizi (underweight) pada anak balita	Menurun menjadi 17%	Prevalensi balita gizi buruk	SB		SB	Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan	1. Jasa ekosistem penyediaan pangan di Kabupaten Konawe Utara secara menyeluruh berada pada kondisi indikasi sedang, dengan total persentase luas 298.718,96 Ha (71,66%), 2. Penyebaran jasa ekosistem penyediaan pangan dengan indikasi sangat tinggi berada di Kecamatan Andowia (3.354 Ha), menyusul Landawe (3.116,62 Ha) dan Molawe (2.863,71 Ha) 3. Jenis penyediaan pangan di Kabupaten Konawe Utara berasal dari hasil perkebunan dan holtikultura, hasil pertanian tanaman pangan dan peternakan, hasil perikanan laut dan air tawar, hasil hutan dan lain-lain	Jangka Pendek: 1. Internalisasi indikator kedalam RPJMD Konut 2021 -2026; 2. Sosialisasi Konsumsi Pangan 4 Sehat 5 Sempurna; Jangka Menengah: 1. Penyusunan Database Kualitas Pangan daerah; 2. Peningkatan pertanian pangan daerah. 3. Penggunaan pupuk organik dalam pertanian pangan; Jangka Panjang: Program Konsumsi Pangan Sehat Daerah.	Aspek Pelayanan Umum (Kesehatan)	Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya manusia	Misi Meningkatkan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia Tujuan Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia SasaranMeningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Peningkatan pelayanan kesehatan (promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif), penerapan hidup bersih dan sehat, pengendalian penyakit dan perbaikan status gizi masyarakat, serta perluasan jaminan kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

No. Indikator	Indikator	Target Nasional	Indikator Daerah	Status (Tahun 2020)	Proyeksi	Status (Tahun 2026)	Keterkaitan D3TLH	Keterangan D3TLH	Rekomendasi KLHS	Gambaran Umum Kondisi Daerah (Bab 2)	Permasalahan dan Isu Strategis (Bab 4)	Visi dan Misi (Bab 5)	Strategi Arah Kebijakan dan Program Pembangunan (Bab 6)	
													Strategi dan Arah Kebijakan	Program Pembangunan
5.20.3	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari	Menurun menjadi 8,5%	Ketersediaan Energi dan Proten Perkapita	NA	3.126	SB	1.Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan 2.Jasa Ekosistem Penyediaan Air Bersih	1. Jasa ekosistem penyediaan pangan di Kabupaten Konawe Utara berada pada kondisi sedang dengan total luas 298.718,96 Ha (71,66%) 2. Jasa ekosistem penyediaan air bersih di Kabupaten Konawe Utara berada dalam kondisi sedang dengan total luas 297.269,24 (71,31%) 3. Penyebaran jasa ekosistem penyediaan pangan dengan indikasi sangat tinggi berada di Kecamatan Andowia (3.354 Ha), menyusul Landawe (3.116,62 Ha) dan Molawe (2.863,71 Ha) 4. Jasa ekosistem penyediaan air bersih dengan kondisi sangat tinggi berada di Kec. Andowia (3.354,38 Ha, Kec. Molawe (2.863,71 Ha), dan Kec. Landawe (2.845,93 Ha)		Aspek Pelayanan Umum (Pangan)	Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya manusia	Misi Meningkatkan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia Tujuan Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia Sasaran Meningkatnya ketahanan pangan	Penyediaan pangan yang baik dengan harga yang terjangkau dalam rangka meningkatkan kualitas konsumsi pangan	1. Program Pengawasan Keamanan Pangan 2. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat 3. Program Penanganan Kerawanan Pangan
5.5.5	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta	Menurun menjadi 28%	Prevalensi kasus stunting	NA	10	SB	Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan	1. Jasa ekosistem penyediaan pangan di Kabupaten Konawe Utara secara menyeluruh berada pada kondisi indikasi sedang, dengan total persentase luas 298.718,96 Ha (71,66%), 2. Penyebaran jasa ekosistem penyediaan pangan dengan indikasi sangat tinggi berada di Kecamatan Andowia (3.354 Ha), menyusul Landawe (3.116,62 Ha) dan Molawe (2.863,71 Ha) 3. Jenis penyediaan pangan di Kabupaten Konawe Utara berasal dari hasil perkebunan dan holtikultura, hasil pertanian tanaman pangan dan peternakan, hasil perikanan laut dan air tawar, hasil hutan dan lain-lain	Jangka Pendek: 1. Sosialisasi bahaya stunting kepada masyarakat; 2. Penyuluhan PHBS dalam segala aktivitas. Jangka Menengah: 1. Penyusunan database stunting daerah; 2. Program Imunisasi Bagi Bayi dan Balita. Jangka Panjang : Implementasi program Kabupaten Kota Sehat	Aspek Pelayanan Umum (Kesehatan)	Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya manusia	Misi Meningkatkan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia Tujuan Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia Sasaran Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Peningkatan pelayanan kesehatan (promotif, kuratif, rehabilitatif), penerapan hidup bersih dan sehat, pengendalian penyakit dan perbaikan status gizi masyarakat, serta perluasan jaminan kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

No. Indikator	Indikator	Target Nasional	Indikator Daerah	Status (Tahun 2020)	Proyeksi	Status (Tahun 2026)	Keterkaitan D3TLH	Keterangan D3TLH	Rekomendasi KLHS	Gambaran Umum Kondisi Daerah (Bab 2)	Permasalahan dan Isu Strategis (Bab 4)	Visi dan Misi (Bab 5)	Strategi Arah Kebijakan dan Program Pembangunan (Bab 6)	
													Strategi dan Arah Kebijakan	Program Pembangunan
5.5.18	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk	Menurun menjadi 245	Prevalensi Tuberkulosis (TB)/ 100.000 penduduk	SB	125	SB			Optimalisasi peran Penyuluh Kesehatan dalam mensosialisasikan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	Aspek Pelayanan Umum (Kesehatan)	Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya manusia	Misi Meningkatkan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia Tujuan Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia SasaranMeningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Peningkatan pelayanan kesehatan (promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif), penerapan hidup bersih dan sehat, pengendalian penyakit dan perbaikan status gizi masyarakat, serta perluasan jaminan kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Tujuan 3 : Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia														
5.5.10	Angka Kematian Ibu (AKI)	Menurun menjadi 306	Angka Kematian Ibu/100.000 kelahiran hidup	SB	127	SB	Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan	1. Jasa ekosistem penyediaan pangan di Kabupaten Konawe Utara secara menyeluruh berada pada kondisi indikasi sedang, dengan total persentase luas 298.718,96 Ha (71,66%) 2. Penyebaran jasa ekosistem penyediaan pangan dengan indikasi sangat tinggi berada di Kecamatan Andowia (3.354 Ha), menyusul Landawe (3.116,62 Ha) dan Molawe (2.863,71 Ha) 3. Jenis penyediaan pangan di Kabupaten Konawe Utara berasal dari hasil perkebunan dan holtikultura, hasil pertanian tanaman pangan dan peternakan, hasil perikanan laut dan air tawar, hasil hutan dan lain-lain	Jangka Pendek: 1. Sosialisasi terkait pentingnya berobat di fasilitas kesehatan; 2. Peningkatan kualitas Tenaga Kesehatan khususnya Bidan Desa. Jangka Menengah: 1. Peningkatan sarana dan prasarana faskes baik Puskesmas dan Poskesdes: 2. Peningkatan kuantitas Bidan Desa, 1 Desa 1 Bidan. Jangka Panjang : Upgrade keilmuan Bidan Desa	Aspek Kesejahteraan (Angka Kematian Ibu)	Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya manusia	Misi Meningkatkan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia Tujuan Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia Sasaran Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Peningkatan pelayanan kesehatan (promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif), penerapan hidup bersih dan sehat, pengendalian penyakit dan perbaikan status gizi masyarakat, serta perluasan jaminan kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

No. Indikator	Indikator	Target Nasional	Indikator Daerah	Status (Tahun 2020)	Proyeksi	Status (Tahun 2026)	Keterkaitan D3TLH	Keterangan D3TLH	Rekomendasi KLHS	Gambaran Umum Kondisi Daerah (Bab 2)	Permasalahan dan Isu Strategis (Bab 4)	Visi dan Misi (Bab 5)	Strategi Arah Kebijakan dan Program Pembangunan (Bab 6)	
													Strategi dan Arah Kebijakan	Program Pembangunan
5.5.13	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup	Menurun	Angka Kematian Bayi/100.000 kelahiran hidup	SB	0,72	SB	Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan	<p>1. Jasa ekosistem penyediaan pangan di Kabupaten Konawe Utara secara menyeluruh berada pada kondisi indikasi sedang, dengan total persentase luas 298.718,96 Ha (71,66%),</p> <p>2. Penyebaran jasa ekosistem penyediaan pangan dengan indikasi sangat tinggi berada di Kecamatan Andowia (3.354 Ha), menyusul Landawe (3.116,62 Ha) dan Molawe (2.863,71 Ha)</p> <p>3. Jenis penyediaan pangan di Kabupaten Konawe Utara berasal dari hasil perkebunan dan holtikultura, hasil pertanian tanaman pangan dan peternakan, hasil perikanan laut dan air tawar, hasil hutan dan lain-lain</p>	<p>Jangka Pendek: Sosialisasi PHBS bagi Ibu dan Bayi.</p> <p>Jangka Menengah: Wajib Imunisasi dasar lengkap bayi;</p> <p>Jangka Panjang: Peningkatan Program Bayi Sehat.</p>	Aspek Kesejahteraan Masyarakat (Angka Kematian Bayi)	Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya manusia	<p>Misi Meningkatkan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia</p> <p>Tujuan Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia</p> <p>Sasaran Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat</p>	<p>Peningkatan pelayanan kesehatan (promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif), penerapan hidup bersih dan sehat, pengendalian penyakit dan perbaikan status gizi masyarakat, serta perluasan jaminan kesehatan</p>	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
5.12.2	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern	Meningkat menjadi 66%	Jumlah peserta KB aktif	SB	12.051	SB			<p>Jangka Pendek: Sosialisasi terkait penggunaan kontrasepsi</p> <p>Jangka Menengah: Penambahan Penyuluh KB di tiap Desa 1 Penyuluh KB.</p> <p>Jangka Panjang: Upgrade ilmu penyuluh KB.</p>	Aspek Pelayanan Umum (Pengendalian {Penduduk dan Keluarga Berencana)	Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya manusia	<p>Misi Meningkatkan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia</p> <p>Tujuan Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia</p> <p>Sasaran Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan pengarusutamaan hak anak</p>	<p>Peningkatan kualitas hidup melalui pemberdayaan perempuan, pengarusutamaan gender dalam pembangunan, perlindungan perempuan, pengarusutamaan hak anak, serta meningkatkan pengendalian penduduk melalui intensifikasi program KB</p>	Program Pembinaan Keluarga Berencana

No. Indikator	Indikator	Target Nasional	Indikator Daerah	Status (Tahun 2020)	Proyeksi	Status (Tahun 2026)	Keterkaitan D3TLH	Keterangan D3TLH	Rekomendasi KLHS	Gambaran Umum Kondisi Daerah (Bab 2)	Permasalahan dan Isu Strategis (Bab 4)	Visi dan Misi (Bab 5)	Strategi Arah Kebijakan dan Program Pembangunan (Bab 6)	
													Strategi dan Arah Kebijakan	Program Pembangunan
5.12.6	Unmet need pelayanan Kesehatan	Menurun menjadi 9,9%	Cakupan PUS Unmeetneed	SB	0,01	SB				Aspek Pelayanan Umum (Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)	Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya manusia	Misi Meningkatkan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia Tujuan Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia Sasaran Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan pengarusutamaan hak anak	Peningkatan kualitas hidup melalui pemberdayaan perempuan, pengarusutamaan gender dalam pembangunan, perlindungan perempuan, pengarusutamaan hak anak, serta meningkatkan pengendalian penduduk melalui intensifikasi program KB	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera
Tujuan 4 : Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua														
5.4.10	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat ; (2) SMP/MTs/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi	Meningkat menjadi 94,78%	Angka Partisipasi Murni (APM) : (1) SD/MI (2) SLTP/MTs dan Angka Partisipasi Kasar (APK) : (1) PAUD (2) SD/MI (3) SLTP/MTs	TT	92.14	SB			Jangka Pendek: 1. Sosialisasi wajib belajar 12 Tahun; 2. Sekolah gratis 9 Tahun; 3. Pemanfaatan sistem DAPODIK lebih efektif dan efisien; Jangka Menengah: 1. Pemberian Beasiswa Konasara bagi pelajar kurang mampu dan berprestasi hingga 9 Tahun; 2. Bersinergi dengan Perumda Konasara untuk pemberian beasiswa dari sumberdana CSR dari perusahaan swasta Jangka Panjang: 1. Perbaikan seluruh Bangunan Sekolah yang rusak; 2. Program 1 Sekolah per 3 Desa.	Aspek Pelayanan Umum (Pendidikan)	Kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Misi Meningkatkan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia Tujuan Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia Sasaran Meningkatnya akses pendidikan	Peningkatan partisipasi pendidikan dan peningkatan kualitas pengelolaan pendidikan melalui pendidikan karakter, peningkatan motivasi belajar, pemberian bantuan beasiswa bagi peserta didik, beasiswa Konasara bagi perguruan tinggi, peningkatan sarana prasarana sekolah serta bahan ajar, peningkatan kualitas dan pemerataan tenaga pengajar sesuai dengan kebutuhan wilayah	1. Program Pengelolaan Pendidikan 2. Program Pengembangan Kurikulum Pendidik dan Tenaga Kependidikan

No. Indikator	Indikator	Target Nasional	Indikator Daerah	Status (Tahun 2020)	Proyeksi	Status (Tahun 2026)	Keterkaitan D3TLH	Keterangan D3TLH	Rekomendasi KLHS	Gambaran Umum Kondisi Daerah (Bab 2)	Permasalahan dan Isu Strategis (Bab 4)	Visi dan Misi (Bab 5)	Strategi Arah Kebijakan dan Program Pembangunan (Bab 6)	
													Strategi dan Arah Kebijakan	Program Pembangunan
5.4.11	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun	Meningkat menjadi 96,1%	Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	SB	98,21	SB	Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan	1. Jasa ekosistem penyediaan pangan di Kabupaten Konawe Utara secara menyeluruh berada pada kondisi indikasi sedang, dengan total persentase luas 298.718,96 Ha (71,66%), 2. Penyebaran jasa ekosistem penyediaan pangan dengan indikasi sangat tinggi berada di Kecamatan Andowia (3.354 Ha), menyusul Landawe (3.116,62 Ha) dan Molawe (2.863,71 Ha) 3. Jenis penyediaan pangan di Kabupaten Konawe Utara berasal dari hasil perkebunan dan holtikultura, hasil pertanian tanaman pangan dan peternakan, hasil perikanan laut dan air tawar, hasil hutan dan lain-lain	Optimalisasi peran perpustakaan daerah dalam menjamin kecukupan literasi bagi masyarakat	Aspek Pelayanan Umum (Pendidikan)	Kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Misi Meningkatkan kualitas dan daya saing sumberdaya manusiaTujuan Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia SasaranMeningkatnya akses pendidikan	Peningkatan partisipasi pendidikan dan peningkatan kualitas pengelolaan pendidikan melalui pendidikan karakter, peningkatan motivasi belajar, pemberian bantuan beasiswa bagi peserta didik, beasiswa Konasara bagi perguruan tinggi, peningkatan sarana prasarana sekolah serta bahan ajar, peningkatan kualitas dan pemerataan tenaga pengajar sesuai dengan kebutuhan wilayah	1. Program Pengelolaan Pendidikan 2. Program Pengembangan Kurikulum Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
5.4.12	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun	Meningkat	Angka Huruf Melek	SB	99,07	SB	Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan	1. Jasa ekosistem penyediaan pangan di Kabupaten Konawe Utara secara menyeluruh berada pada kondisi indikasi sedang, dengan total persentase luas 298.718,96 Ha (71,66%), 2. Penyebaran jasa ekosistem penyediaan pangan dengan indikasi sangat tinggi berada di Kecamatan Andowia (3.354 Ha), menyusul Landawe (3.116,62 Ha) dan Molawe (2.863,71 Ha) 3. Jenis penyediaan pangan di Kabupaten Konawe Utara berasal dari hasil perkebunan dan holtikultura, hasil pertanian tanaman pangan dan peternakan, hasil perikanan laut dan air tawar, hasil hutan dan lain-lain		Aspek Pelayanan Umum (Pendidikan)	Kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Misi Meningkatkan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia Tujuan Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia Sasaran Meningkatnya akses pendidikan	Peningkatan partisipasi pendidikan dan peningkatan kualitas pengelolaan pendidikan melalui pendidikan karakter, peningkatan motivasi belajar, pemberian bantuan beasiswa bagi peserta didik, beasiswa Konasara bagi perguruan tinggi, peningkatan sarana prasarana sekolah serta bahan ajar, peningkatan kualitas dan pemerataan tenaga	1. Program Pengelolaan Pendidikan 2. Program Pengembangan Kurikulum Pendidikan dan Tenaga Kependidikan

No. Indikator	Indikator	Target Nasional	Indikator Daerah	Status (Tahun 2020)	Proyeksi	Status (Tahun 2026)	Keterkaitan D3TLH	Keterangan D3TLH	Rekomendasi KLHS	Gambaran Umum Kondisi Daerah (Bab 2)	Permasalahan dan Isu Strategis (Bab 4)	Visi dan Misi (Bab 5)	Strategi Arah Kebijakan dan Program Pembangunan (Bab 6)	
													Strategi dan Arah Kebijakan	Program Pembangunan
													pengajar sesuai dengan kebutuhan wilayah	
5.4.14	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik	Meningkat	Jumlah Guru yang bersertifikat (1) SD/MI (2) SLTP/Mts	SB	32,74	SB			Peningkatan syarat perekrutan guru bersertifikat pendidik, pemberian pendidikan dan pelatihan berkala bagi guru	Aspek Pelayanan Umum (Pendidikan)	Kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Misi Meningkatkan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia Tujuan Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia Sasaran Meningkatnya akses pendidikan	Peningkatan partisipasi pendidikan dan peningkatan kualitas pengelolaan pendidikan melalui pendidikan karakter, peningkatan motivasi belajar, pemberian bantuan beasiswa bagi peserta didik, beasiswa Konasara bagi perguruan tinggi, peningkatan sarana prasarana sekolah serta bahan ajar, peningkatan kualitas dan pemerataan tenaga pengajar sesuai dengan kebutuhan wilayah	1. Program Pengelolaan Pendidikan 2. Program Pengembangan Kurikulum 3. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Tujuan 5 : Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan														
5.13.4	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangandalam 12 bulan terakhir	Menurun (2018: 0,25%)	Jumlah Korban Kekerasan Perempuan yang ditindaklanjuti	SB	1	SB			Jangka Pendek: Sosialisasi anti diskriminasi Jangka Menengah: 1. Perekrutan ASN dan TKS yang tidak diskriminatif terhadap Perempuan dan disabilitas; 2. Bersinergi dengan Perumda Konasara untuk pembukaan lapangan pekerjaan bagi perempuan dan disabilitas; 3. Pembuatan Perda tentang Perlindungan Perempuan, Anak, dan Disabilitas di ruang publik.	Aspek Pelayanan Umum (Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)	Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya manusia	Misi Meningkatkan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia Tujuan Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia Sasaran Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan pengarusutamaan hak anak	Peningkatan kualitas hidup melalui pemberdayaan perempuan, pengarusutamaan gender dalam pembangunan, perlindungan perempuan, pengarusutamaan hak anak, serta meningkatkan pengendalian penduduk melalui intensifikasi program KB	Program Perlindungan Perempuan

No. Indikator	Indikator	Target Nasional	Indikator Daerah	Status (Tahun 2020)	Proyeksi	Status (Tahun 2026)	Keterkaitan D3TLH	Keterangan D3TLH	Rekomendasi KLHS	Gambaran Umum Kondisi Daerah (Bab 2)	Permasalahan dan Isu Strategis (Bab 4)	Visi dan Misi (Bab 5)	Strategi Arah Kebijakan dan Program Pembangunan (Bab 6)	
													Strategi dan Arah Kebijakan	Program Pembangunan
									Jangka Panjang: Pelibatan perempuan dan disabilitas dalam pengambilan kebijakan					
5.13.3	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan	Menurun menjadi 20,48%	Jumlah Korban Kekerasan anak yang ditindaklanjuti	SB	1	SB				Aspek Pelayanan Umum (Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)	Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya manusia	Misi Meningkatkan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia Tujuan Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia Sasaran Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan pengarusutamaan hak anak	Peningkatan kualitas hidup melalui pemberdayaan perempuan, pengarusutamaan gender dalam pembangunan, perlindungan perempuan, pengarusutamaan hak anak, serta meningkatkan pengendalian penduduk melalui intensifikasi program KB	Program Perlindungan Khusus Anak
5.1.1	Proporsi kursi yang diduduki perempuan diparlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah	Meningkat	Persentase Perempuan yang menduduki jabatan publik	SB	8,23	SB			Optimalisasi peran perempuan dalam penentuan kebijakan pembangunan	Aspek Pelayanan Umum (Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)	Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya manusia	Misi Meningkatkan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia Tujuan Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia Sasaran Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan pengarusutamaan hak anak	Peningkatan kualitas hidup melalui pemberdayaan perempuan, pengarusutamaan gender dalam pembangunan, perlindungan perempuan, pengarusutamaan hak anak, serta meningkatkan pengendalian penduduk melalui intensifikasi program KB	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

No. Indikator	Indikator	Target Nasional	Indikator Daerah	Status (Tahun 2020)	Proyeksi	Status (Tahun 2026)	Keterkaitan D3TLH	Keterangan D3TLH	Rekomendasi KLHS	Gambaran Umum Kondisi Daerah (Bab 2)	Permasalahan dan Isu Strategis (Bab 4)	Visi dan Misi (Bab 5)	Strategi Arah Kebijakan dan Program Pembangunan (Bab 6)	
													Strategi dan Arah Kebijakan	Program Pembangunan
Tujuan 6 : Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan														
5.5.44	Persentase Rumah Tangga bersanitasi layak	Meningkat	Penduduk Berakses Sanitasi Yang Layak	NA	63%	SB	Jasa Ekosistem pengaturan tata aliran air	1. Jasa ekosistem pengaturan tata aliran air di Kabupaten Konawe Utara pada kondisi tinggi, dengan luas wilayah 277.116,11 Ha (66,48 Ha) 2. Wilayah pada kondisi tinggi berada di Kec. Asera (117.328,84 Ha), menyusul Kec. Wiwirano (58.751,78Ha) dan Kec. Oheo (27.676,28 Ha)	Jangka Pendek: 1. Sosialisasi PHBS dalam pembangunan; 2. Penyusunan database sanitasi. Jangka Menengah: 1. Mengikuti program hibah 2. Sanitasi baik APBN maupun Bantuan Luar Negeri Sanimas, dsb). Jangka Panjang: Peningkatan akses Sanitasi perkotaan dan pedesaan	Aspek Pelayanan Umum (Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman)	Infrastruktur wilayah dan sarana prasarana kawasan permukiman	Misi Meningkatkan ketersediaan infratraktur dasar dan sarana prasarana permukiman Tujuan Meningkatkan kualitas infrastruktur wilayah SasaranTerpenuhi sarana prasarana kawasan permukiman	Penurunan luas kawasan kumuh melalui peningkatan kualitas rumah layak huni dan jalan lingkungan permukiman, serta pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana	Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)
Tujuan 7 : Menjamin akses energy yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua														
Tujuan 8 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua														
5.26.5	PDB per kapita	Meningkat (2018:22, 86 Juta)	PDRB per kapita berlaku	SB	62.831	SB	Jasa Ekosistem penyediaan air bersih	1. Jasa ekosistem penyediaan air bersih di Kabupaten Konawe Utara berada dalam kondisi sedang 2. Persentase luas wilayah dengan kondisi sedang yakni 297.269,24 Ha (71,31), berada di wilayah Kec. Andowia (3.354,38 Ha), menyusul Kec. Molawe (2.863,71 Ha) dan Kec. Landawe (2.845,93 Ha)	Jangka Pendek: 1. Menjaga stabilitas harga dan laju inflasi daerah; 2. Pembangunan sarana dan prasarana pariwisata guna peningkatan pemasukan daerah. Jangka Menengah: 1. Membuka kerjasama dan investasi dengan pihak luar; 2. Mempersingkat birokrasi perizinan usaha. Jangka Panjang: Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Aspek Kesejahteraan Masyarakat (PDRB Per Kapita)	Daya saing ekonomi daerah	Misi Mewujudkan keadilan sosial dan nilai tambah dalam pengelolaan sumberdaya alam guna meningkatkan daya saing ekonomi Tujuan Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi Sasaran Meningkatnya pertumbuhan sektor - sektor unggulan daerah	1. Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian melalui penyediaan bibit, sarana dan prasarana pertanian, kapasitas petani/kelompok tani, dan bantuan permodalan 2. Pengembangan perternakan melalui penyediaan sarana prasarana, pemanfaatan teknologi, dan peningkatan	1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap 2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya 3. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian 4. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian 5. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi

No. Indikator	Indikator	Target Nasional	Indikator Daerah	Status (Tahun 2020)	Proyeksi	Status (Tahun 2026)	Keterkaitan D3TLH	Keterangan D3TLH	Rekomendasi KLHS	Gambaran Umum Kondisi Daerah (Bab 2)	Permasalahan dan Isu Strategis (Bab 4)	Visi dan Misi (Bab 5)	Strategi Arah Kebijakan dan Program Pembangunan (Bab 6)	
													Strategi dan Arah Kebijakan	Program Pembangunan
													kesehatan hewan 3. Meningkatkan produktivitas perikanan melalui pembinaan nelayan tangkap dan budidaya, penyediaan sarana prasarana, dan pengembangan pola kemitraan 4. Meningkatkan kinerja ekspor dan perdagangan dalam negeri melalui peningkatan kualitas pasar, pengawasan, promosi dan pemasaran produk-produk unggulan 5. Pengembangan kapasitas kopersidan UMKM 6. Mendorong pengembangan industri dan kawasan industri sesuai dengan potensi daerah	6. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan 7. Program Pengendalian Usaha Industri Kabupaten/Kota

No. Indikator	Indikator	Target Nasional	Indikator Daerah	Status (Tahun 2020)	Proyeksi	Status (Tahun 2026)	Keterkaitan D3TLH	Keterangan D3TLH	Rekomendasi KLHS	Gambaran Umum Kondisi Daerah (Bab 2)	Permasalahan dan Isu Strategis (Bab 4)	Visi dan Misi (Bab 5)	Strategi Arah Kebijakan dan Program Pembangunan (Bab 6)	
													Strategi dan Arah Kebijakan	Program Pembangunan
5.19.9	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur	Menurun (2018:4,11%)	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	SB	3,53	SB				Aspek Pelayanan Umum (Tenaga Kerja)	Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya manusia	Misi Mewujudkan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia Tujuan Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia Sasaran Meningkatnya sumberdaya manusia yang kompeten dan produktif	Memperluas kesempatan kerja, pelatihan tenaga kerja, penyediaan lapangan kerja, perlindungan dan pengawasan ketenagakerjaan	1. Program Perencanaan Tenaga Kerja 2. Program Penempatan Tenaga Kerja 3. Program Pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja
5.22.2	Jumlah wisatawan mancanegara	Meningkat (2018:10)	Jumlah Kunjungan wisata	SB	13.569	SB	Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim	1. Kondisi Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim di Kabupaten Konawe Utara yaitu kondisi sangat tinggi, dengan luas wilayah 304.246,89 Ha (72,99%) 2. Wilayah terluas pada kondisi sangat tinggi berada di Kec. Asera (131.609,63 Ha), kemudian Kec. Wiwirano (70.169,62 Ha) dan Kec. Oheo (30.104,30 Ha) 3. Kondisi sangat rendah berada di wilayah Kec. Asera (3.607,79 Ha), Kec. Molawe (2.398,69 Ha) dan Kec. Wiwirano (2.279,48 Ha)	Jangka Pendek: 1. Internalisasi indikator kedalam RPJMD Konut 2021 - 2026; 2. Membangun sarana dan prasarana penunjang pariwisata. Jangka Menengah: 1. Pengembangan tempat-tempat wisata baru dengan konsep kekinian; 2. Optimalisasi event-event rutin di tempat-tempat wisata Jangka Panjang: Bekerjasama dengan Pemprov Sultra dan Kementerian Pariwisata untuk pengadaan eventnasional dan internasional di Konawe Utara	Aspek Pelayanan Umum (Pariwisata)	Daya saing ekonomi daerah	MisiMewujudkan keadilan sosial dan nilai tambah dalam pengelolaan sumberdaya alam guna meningkatkan daya saing ekonomi TujuanMeningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi Sasaran Meningkatnya pertumbuhan sektor - sektor unggulan daerah	Peningkatan kunjungan wisata melalui pengembangan atraksi serta peningkatan destinasi wisata baru	1. Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata 2. Program Pemasaran Pariwisata

No. Indikator	Indikator	Target Nasional	Indikator Daerah	Status (Tahun 2020)	Proyeksi	Status (Tahun 2026)	Keterkaitan D3TLH	Keterangan D3TLH	Rekomendasi KLHS	Gambaran Umum Kondisi Daerah (Bab 2)	Permasalahan dan Isu Strategis (Bab 4)	Visi dan Misi (Bab 5)	Strategi Arah Kebijakan dan Program Pembangunan (Bab 6)	
													Strategi dan Arah Kebijakan	Program Pembangunan
5.22.3	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	Meningkat (2018:35.010)	Jumlah Kunjungan wisata	SB	13.569	SB	Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim	1. Kondisi Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim di Kabupaten Konawe Utara yaitu kondisi sangat tinggi, dengan luas wilayah 304.246,89 Ha (72,99%) 2. Wilayah terluas pada kondisi sangat tinggi berada di Kec. Asera (131.609,63 Ha), kemudian Kec. Wiwirano (70.169,62 Ha) dan Kec. Oheo (30.104,30 Ha) 3. Kondisi sangat rendah berada di wilayah Kec. Asera (3.607,79 Ha), Kec. Molawe (2.398,69 Ha) dan Kec. Wiwirano (2.279,48 Ha)		Aspek Pelayanan Umum (Pariwisata)	Daya saing ekonomi daerah	Misi Mewujudkan keadilan sosial dan nilai tambah dalam pengelolaan sumberdaya alam guna meningkatkan daya saing ekonomi Tujuan Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi Sasaran Meningkatnya pertumbuhan sektor - sektor unggulan daerah	Peningkatan kunjungan wisata melalui pengembangan atraksi serta peningkatan destinasi wisata baru	1. Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata 2. Program Pemasaran Pariwisata
Tujuan 9 : Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi														

No. Indikator	Indikator	Target Nasional	Indikator Daerah	Status (Tahun 2020)	Proyeksi	Status (Tahun 2026)	Keterkaitan D3TLH	Keterangan D3TLH	Rekomendasi KLHS	Gambaran Umum Kondisi Daerah (Bab 2)	Permasalahan dan Isu Strategis (Bab 4)	Visi dan Misi (Bab 5)	Strategi Arah Kebijakan dan Program Pembangunan (Bab 6)	
													Strategi dan Arah Kebijakan	Program Pembangunan
5.17.2	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur	Meningkat (2018:7,66%)	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	TT	1,18	SB	1.Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan 2.Jasa ekosistem penyediaan air bersih 3.Jasa ekosistem penyediaan serat, bahan bakar dan mineral lain	1. Jasa ekosistem penyediaan pangan di Kabupaten Konawe Utara berada pada kondisi sedang dengan total luas 298.718,96 Ha (71,66%) 2. Jasa ekosistem penyediaan air bersih di Kabupaten Konawe Utara berada dalam kondisi sedang dengan total luas 297.269,24 (71,31%) 3. Jasa Ekosistem penyediaan serat, bahan bakar dan mineral lain di Kabupaten Konawe Utara berada dalam kondisi sangat tinggi 4. Penyebaran jasa ekosistem penyediaan pangan dengan indikasi sangat tinggi berada di Kecamatan Andowia (3.354 Ha), menyusul Landawe (3.116,62 Ha) dan Molawe (2.863,71 Ha) 5. Penyebaran jasa ekosistem penyediaan air bersih dengan kondisi sangat tinggi berada di Kec. Andowia (3.354,38 Ha, Kec. Molawe (2.863,71 Ha), dan Kec. Landawe (2.845,93 Ha). 6. Wilayah terluas penyediaan serat di Kec. Asera (126.358,53 Ha), kemudian Kec. Wiwirano (67.051,59 Ha) dan Kec. Oheo (30.104,30 Ha)	Jangka Pendek: 1. Menjaga stabilitas harga dan laju inflasi daerah; 2. Pembangunan sarana dan prasarana pariwisata guna peningkatan pemasukan daerah; Jangka Menengah: 1. Membuka kerjasama dan investasi dengan pihak luar; 2. Mempersingkat birokrasi perizinan usaha Jangka Panjang: Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Aspek Kesejahteraan Masyarakat (PDRB)	Daya saing ekonomi daerah	Misi Mewujudkan keadilan sosial dan nilai tambah dalam pengelolaan sumberdaya alam guna meningkatkan daya saing ekonomi Tujuan Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi Sasaran Meningkatnya pertumbuhan sektor - sektor unggulan daerah	Mendorong pengembangan industri dan kawasan industri sesuai dengan potensi daerah	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
Tujuan 10 : Mengurangi kesenjangan intra- dan antarnegara														
5.26.7	Koefisien Gini	Menurun Menjadi 0,36%	Indeks Gini	SB	0,364	SB	Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan	1. Jasa ekosistem penyediaan pangan di Kabupaten Konawe Utara secara menyeluruh berada pada kondisi indikasi sedang, dengan total persentase luas 298.718,96 Ha (71,66%), 2. Penyebaran jasa ekosistem penyediaan pangan dengan indikasi sangat tinggi berada di Kecamatan Andowia (3.354 Ha), menyusul Landawe (3.116,62 Ha) dan Molawe (2.863,71 Ha) 3. Jenis penyediaan pangan di Kabupaten Konawe Utara berasal dari hasil perkebunan dan holtikultura, hasil pertanian tanaman pangan dan peternakan, hasil perikanan laut dan air tawar, hasil hutan dan lain-lain	Jangka Pendek: 1. Pemberian Bantuan Sosial; 2. Pemberian modal usaha; 3. Pemberian pelatihan kewirausahaan; 4. Penyusunan Database kemiskinan Jangka Menengah: 1. Bersinergi dengan Pengusaha untuk membuka lapangan kerja baru; 2. Mengikuti program-program hibah pengentasan kemiskinan. Jangka Panjang: Bersinergi dengan pengusaha untuk memberikan CSR pengentasan kemiskinan	Aspek Kesejahteraan Masyarakat (Koefisien Gini)	Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya manusia	Misi Mewujudkan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia Tujuan Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia Sasaran Meningkatnya sumberdaya manusia yang kompeten dan produktif	Memperluas kesempatan kerja, pelatihan tenaga kerja, penyediaan lapangan kerja, perlindungan dan pengawasan ketenagakerjaan	1. Program Perencanaan Tenaga Kerja 2. Program Penempatan Tenaga Kerja 3. Program Hubungan Industrial 4. Program Pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja
Tujuan 11 : Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan														

No. Indikator	Indikator	Target Nasional	Indikator Daerah	Status (Tahun 2020)	Proyeksi	Status (Tahun 2026)	Keterkaitan D3TLH	Keterangan D3TLH	Rekomendasi KLHS	Gambaran Umum Kondisi Daerah (Bab 2)	Permasalahan dan Isu Strategis (Bab 4)	Visi dan Misi (Bab 5)	Strategi Arah Kebijakan dan Program Pembangunan (Bab 6)	
													Strategi dan Arah Kebijakan	Program Pembangunan
5.8.8	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	Meningkat (2018:65, 75%)	Jumlah rumah layak huni	NA	18.909	SB	Jasa Ekosistem pengaturan kualitas udara	1. Indikasi kondisi Jasa ekosistem pengaturan kualitas udara di Kabupaten Konawe Utara berada dalam kondisi sangat tinggi 2. Luas Wilayah jasa ekosistem pengaturan kualitas udara yaitu 265.439,25 Ha (63,68%) dengan wilayah terluas di Kec. Asera (82.252, 99 Ha), Kec. Wiwirano (67.051,59 Ha) dan Kec. Oheo (30.104, 30 Ha) 3. Kondisi sangat rendah pada jasa pengatuan kualitas udara berada di wilayah Kec. Langgikima (3.371,18 Ha), Kec. Asera (3.085,64 Ha) dan Kec. Wiwirano (2.891, 21 Ha)	Jangka Panjang: 1. Membentuk kawasan permukiman yang modern dan ramah lingkungan; 2. Mengembangkan TPA sebagai penampungan residu dari TPST serta mengembangkan teknologi PLTSa dan teknologi lain yang dapat mereduksi sampah di TPA Jangka Menengah: 1. Pengentasan kawasan kumuh; 2. Penerapan wajib RTH 30% disetiap pembangunan kawasan; 3. Mereduksi sampah di tingkat sumber dengan menerapkan bank sampah dan TPS 3R	Aspek Pelayanan Umum (Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman)	Infrastruktur wilayah dan sarana prasarana kawasan permukiman	Misi Meningkatkan ketersediaan infratraktur dasar dan sarana prasarana kawasan permukiman Tujuan Meningkatkan kualitas infrastruktur wilayah Sasaran Terpenuhinya sarana prasarana kawasan permukiman	Penurunan luas kawasan kumuh melalui peningkatan kualitas rumah layak huni dan jalan lingkungan permukiman, serta pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana	Program Kawasan Permukiman
									Jangka Pendek: 1. Penataan kawasan kumuh; 2. Menyusun kebijakan wajib RTH disetiap Izin Mendirikan Bangunan; 3. Membangun kesadaran masyarakat dalam pelestarian lingkungan; 4. Pengurangan RTLH secara berkesinambunga 5. Mengembangkan TPST dalam skala beberapa kecamatan dengan konsep pengelolaan 3R dengan ditambah landfill.					

No. Indikator	Indikator	Target Nasional	Indikator Daerah	Status (Tahun 2020)	Proyeksi	Status (Tahun 2026)	Keterkaitan D3TLH	Keterangan D3TLH	Rekomendasi KLHS	Gambaran Umum Kondisi Daerah (Bab 2)	Permasalahan dan Isu Strategis (Bab 4)	Visi dan Misi (Bab 5)	Strategi Arah Kebijakan dan Program Pembangunan (Bab 6)	
													Strategi dan Arah Kebijakan	Program Pembangunan
5.29.12	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah	Ada	Indeks resiko bencana	NA	162,26	SB	1.Jasa ekosistem Pengaturan Iklim 2.Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan terhadap bencana Alam 3.Jasa ekosistem pengaturan tata aliran air	1. Jasa Pengaturan Iklim di Kabupaten Konawe Utara berada dalam kondisi sangat tinggi dengan luas wilayah 304.246,89 Ha 2. Kondisi pengaturan iklim sangat tinggi berada diwilayah Kec. Asera (131.609,63 Ha), kemudian menyusul Kec. Wiwirano (70.169,62Ha) dan Kec. Oheo (30.104,30 Ha) 3. Jasa ekosistem pengaturan pencegahan dan perlindungan terhadap bencana alam di Kab. Konawe Utara berada dalam kondisi tinggi, dengan persentase luas wilayah sebesar 316.643,53 Ha (75,96Ha) 4. Jasa ekosistem pengaturan tata aliran air di Kabupaten Konawe Utara pada kondisi tinggi, dengan luas wilayah 277.116,11Ha	Jangka Pendek: 1. Internalisasi Penyusunan Indeks Resiko bencana ke dalam RPJMD Konut 2021 - 2026; 2. Sosialisasi daerah rawan bencana; 3. Sosialisasi resiko bencana; 4. Penyusunan database kebencanaan. Jangka Menengah: 1. Penyusunan indeks resiko bencana; 2. Update Peta Rawan Bencana; Jangka Panjang: Pembuatan Sistem Kebencanaan Daerah	Aspek Geografi dan Demografi (Wilayah Rawan Bencana)	Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana Alam	Misi Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencanaTujuan Meningkatkan kualitas lingkungan hidupSasaranTerwujudnya tata kelola dan manajemen bencana	Meningkatkan ketahanan daerah dalam menghadapi bencana melalui pengurangan resiko bencana untuk ketangguhan (mitigasi, kesiapsiagaan, pra bencana), manajemen kedaruratan, dan manajemen pemulihan	1. Program Penanggulangan Bencana 2. Program Penanganan Bencana

Tujuan 12 : Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan

Tujuan 13 : Mengambil segala tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya

Tujuan 14 : Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan

Tujuan 15 : Melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati

Tujuan 16 : Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan

No. Indikator	Indikator	Target Nasional	Indikator Daerah	Status (Tahun 2020)	Proyeksi	Status (Tahun 2026)	Keterkaitan D3TLH	Keterangan D3TLH	Rekomendasi KLHS	Gambaran Umum Kondisi Daerah (Bab 2)	Permasalahan dan Isu Strategis (Bab 4)	Visi dan Misi (Bab 5)	Strategi Arah Kebijakan dan Program Pembangunan (Bab 6)	
													Strategi dan Arah Kebijakan	Program Pembangunan
5.28.4	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam \12 bulan terakhir	Menurun (2018:0,04)	Angka Kriminalitas	NA	17	SB	Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan	<p>1. Jasa ekosistem penyediaan pangan di Kabupaten Konawe Utara secara menyeluruh berada pada kondisi indikasi sedang, dengan total persentase luas 298.718,96 Ha (71,66%),</p> <p>2. Penyebaran jasa ekosistem penyediaan pangan dengan indikasi sangat tinggi berada di Kecamatan Andowia (3.354 Ha), menyusul Landawe (3.116,62 Ha) dan Molawe (2.863,71 Ha)</p> <p>3. Jenis penyediaan pangan di Kabupaten Konawe Utara berasal dari hasil perkebunan dan holtikultura, hasil pertanian tanaman pangan dan peternakan, hasil perikanan laut dan air tawar, hasil hutan dan lain-lain</p>	<p>Jangka Pendek:</p> <p>1. Internalisasi indikator ke dalam RPJMD Konut 2021 - 2026</p> <p>2. Sosialisasi anti diskriminatif;</p> <p>Jangka Menengah:</p> <p>1. Perekrutan ASN dan TKS yang tidak diskriminatif terhadap Perempuan dan Disabilitas;</p> <p>2. Bersinergi dengan Perumda Konasara untuk pembukaan lapangan pekerjaan bagi perempuan.</p> <p>3. Pembuatan Perda Konut tentang Perlindungan Perempuan, Anak, dan Disabilitas di ruang publik.</p>	Aspek Daya Saing Daerah (angka kriminalitas)	Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	<p>Misi Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, mendorong reformasi birokrasi, dan pelayanan publik yang prima</p> <p>Tujuan Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien</p> <p>Sasaran Terwujudnya birokrasi yang kapabel, optimalnya Implementasi SPBE, serta pelayanan publik yang terpercaya</p>	Meningkatkan kondusivitas daerah, penegakan Perda dan peningkatan SDM	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

No. Indikator	Indikator	Target Nasional	Indikator Daerah	Status (Tahun 2020)	Proyeksi	Status (Tahun 2026)	Keterkaitan D3TLH	Keterangan D3TLH	Rekomendasi KLHS	Gambaran Umum Kondisi Daerah (Bab 2)	Permasalahan dan Isu Strategis (Bab 4)	Visi dan Misi (Bab 5)	Strategi Arah Kebijakan dan Program Pembangunan (Bab 6)	
													Strategi dan Arah Kebijakan	Program Pembangunan
5.24.4	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)	Meningkat menjadi 60%	Opini BPK	SB	Meningkat	SB			Jangka Pendek: Sosialisasi Bahaya Laten Korupsi; Jangka Menengah: 1. Penyusunan Kajian dan Peraturan Anti Korupsi; 2. Pembuatan sistem pelaporan kinerja Pemerintah daerah; Jangka Panjang: Pembuatan sistem pelaporan keuangan yang transparan	Aspek Pelayanan Umum (Keuangan)	Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Misi Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, mendorong reformasi birokrasi, dan pelayanan publik yang prima Tujuan Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien Sasaran Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan aset melalui peningkatan kapasitas SDM, pengendalian belanja dan dana transfer, sinkronisasi perencanaan dan penganggaran, pengelolaan pembiayaan, pemanfaatan dan inventarisasi aset	1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah 3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
5.2.1	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)	Meningkat menjadi B	Nilai dan status kinerja pemerintah daerah (EKPPD)	SB	Meningkat	SB				Aspek Pelayanan Umum (Sekretariat Daerah)	Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Misi Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, mendorong reformasi birokrasi, dan pelayanan publik yang prima Tujuan Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien Sasaran Meningkatkan akuntabilitas kinerja	1. Implementasi reformasi birokrasi dan pelayanan publik melalui optimalisasi pencapaian target pada 8 (delapan) area perubahan 2. Peningkatan kualitas kebijakan daerah di bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum, pembangunan dan	1. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 2. Program Perekonomian dan Pembangunan

No. Indikator	Indikator	Target Nasional	Indikator Daerah	Status (Tahun 2020)	Proyeksi	Status (Tahun 2026)	Keterkaitan D3TLH	Keterangan D3TLH	Rekomendasi KLHS	Gambaran Umum Kondisi Daerah (Bab 2)	Permasalahan dan Isu Strategis (Bab 4)	Visi dan Misi (Bab 5)	Strategi Arah Kebijakan dan Program Pembangunan (Bab 6)	
													Strategi dan Arah Kebijakan	Program Pembangunan
												pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah	administrasi umum, melalui koordinasi, pemantauan dan evaluasi serta perumusan rekomendasi kebijakan kepala daerah	
5.2.2	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan	Meningkat menjadi 80%	Persentase penyerapan anggaran pembangunan dan realisasinya	NA	96	SB				Aspek Pelayanan Umum (Keuangan)	Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	<p>Misi Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, mendorong reformasi birokrasi, dan pelayanan publik yang prima</p> <p>Tujuan Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien</p> <p>Sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah</p>	<p>1. Implementasi reformasi birokrasi dan pelayanan publik melalui optimalisasi pencapaian target pada 8(delapan) area perubahan</p> <p>2. Peningkatan kualitas kebijakan daerah di bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum, pembangunan dan penyelenggaraan administrasi umum, melalui koordinasi, pemantauan dan evaluasi serta perumusan rekomendasi kebijakan kepala daerah</p>	<p>1. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat</p> <p>2. Program Perekonomian dan Pembangunan</p>

Tujuan 17 : Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan

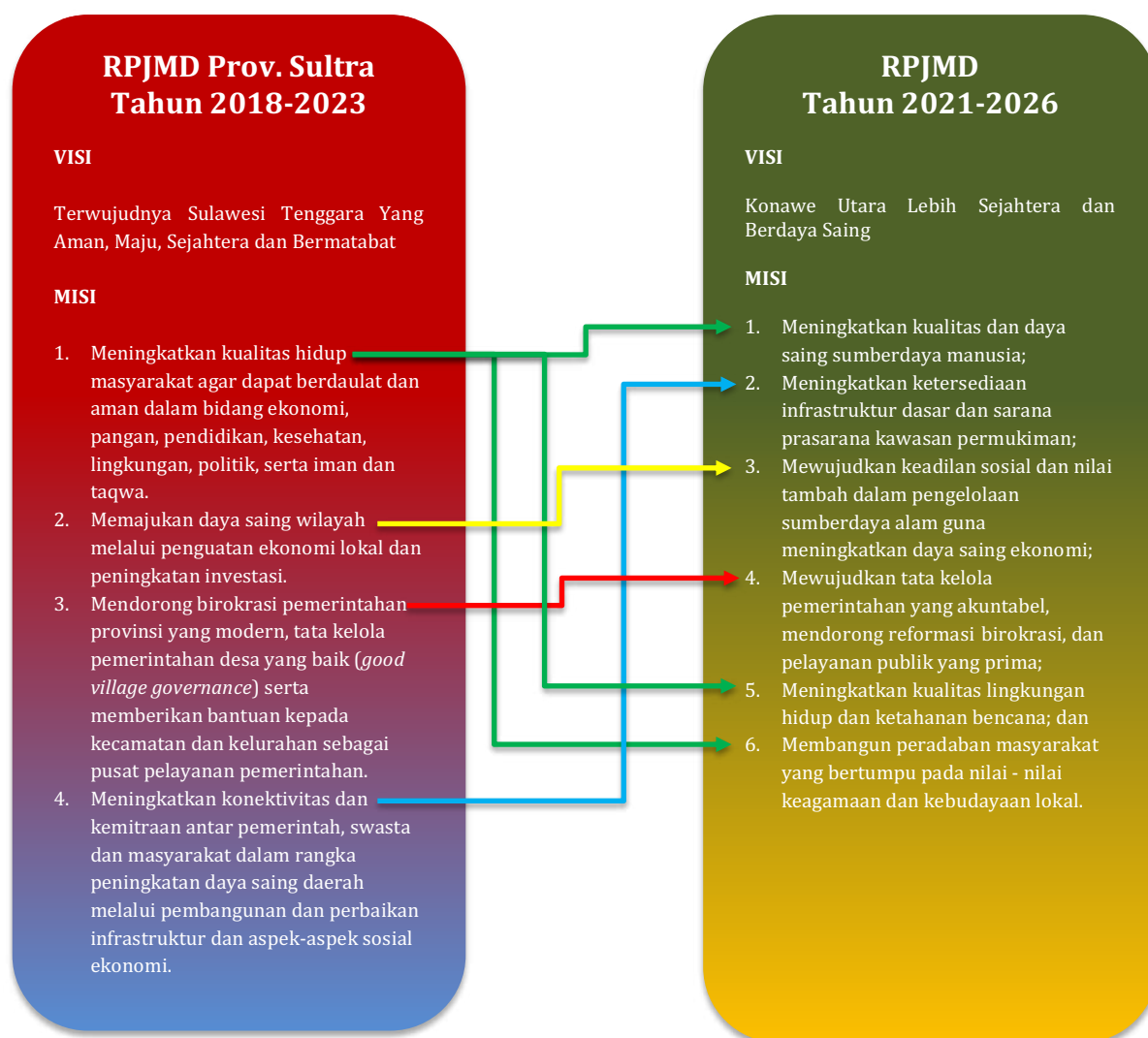
No. Indikator	Indikator	Target Nasional	Indikator Daerah	Status (Tahun 2020)	Proyeksi	Status (Tahun 2026)	Keterkaitan D3TLH	Keterangan D3TLH	Rekomendasi KLHS	Gambaran Umum Kondisi Daerah (Bab 2)	Permasalahan dan Isu Strategis (Bab 4)	Visi dan Misi (Bab 5)	Strategi Arah Kebijakan dan Program Pembangunan (Bab 6)	
													Strategi dan Arah Kebijakan	Program Pembangunan
5.25.5	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik	Meningkat (2018:1,31)	Persentase kenaikan pendapatan daerah	SB	40	SB			<p>Jangka Pendek:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjaga stabilitas harga dan laju inflasi daerah; 2. Pembangunan sarana dan prasarana pariwisata guna peningkatan pemasukan daerah <p>Jangka Menengah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membuka kerjasama dan investasi dengan pihak luar; 2. Mempersingkat birokrasi perizinan usaha <p>Jangka Panjang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 	Aspek Pelayanan Umum (Keuangan)	Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	<p>Misi</p> <p>Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, mendorong reformasi birokrasi, dan pelayanan publik yang prima</p> <p>Tujuan</p> <p>Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien</p>	<p>Peningkatan pelayanan, pendaftaran, dan penetapan, dan penagihan sumber-sumber PAD</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah 3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
5.15.4	Proporsi individu yang menggunakan internet	Meningkat (2018:20,29%)	Jumlah Penerapan SPBE	NA	7	SB	Jasa Ekosistem pengaturan kualitas udara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indikasi kondisi jasa ekosistem pengaturan kualitas udara di Kabupaten Konawe Utara berada dalam kondisi sangat tinggi 2. Luas Wilayah jasa ekosistem pengaturan kualitas udara yaitu 265.439,25 Ha (63,68%) dengan wilayah terluas di Kec. Asera (82.252, 99 Ha), Kec. Wiwirano (67.051,59 Ha) dan Kec. Oheo (30.104, 30 Ha) 3. Kondisi sangat rendah pada jasa pengatutan kualitas udara berada di wilayah Kec. Langgikima (3.371,18 Ha), Kec. Asera (3.085,64 Ha) dan Kec. Wiwirano (2.891, 21 Ha) 	<p>Jangka Pendek:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Internalisasi indikator kedalam RPJMD Konut 2021 - 2026; 2. Sosialisasi penggunaan TI; 3. Penyusunan database TI kabupaten. <p>Jangka Menengah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan peraturan daerah terkait pelaporan barang-barang/peralatan TI; 2. Peningkatan akses internet ditempat umum dan kapasitas 3. internet daerah. <p>Jangka Panjang:</p> <p>Pengendalian dan Peningkatan akses internet</p>	Aspek Pelayanan Umum (Komunikasi dan Informatika)	Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	<p>Misi</p> <p>Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, mendorong reformasi birokrasi, dan pelayanan publik yang prima</p> <p>Tujuan</p> <p>Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien</p> <p>Sasaran</p> <p>Terwujudnya birokrasi yang kapabel, optimalnya Implementasi SPBE, serta pelayanan publik yang terpercaya</p>	<p>Pengembangan sarana prasarana egovernment untuk menunjang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan pelayanan publik</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Informasi dan Komunikasi Publik 2. Program Pengelolaan aplikasi informatika

No. Indikator	Indikator	Target Nasional	Indikator Daerah	Status (Tahun 2020)	Proyeksi	Status (Tahun 2026)	Keterkaitan D3TLH	Keterangan D3TLH	Rekomendasi KLHS	Gambaran Umum Kondisi Daerah (Bab 2)	Permasalahan dan Isu Strategis (Bab 4)	Visi dan Misi (Bab 5)	Strategi Arah Kebijakan dan Program Pembangunan (Bab 6)	
													Strategi dan Arah Kebijakan	Program Pembangunan
	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	Ada	Persentase Kepemilikan dokumen Pencatatan Sipil Berbasis Elektronik	SB	100	SB			Peningkatan pencatatan Kelahiran	Aspek Pelayanan Umum (Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Misi Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, mendorong reformasi birokrasi, dan pelayanan publik yang prima Tujuan Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien Sasaran Terwujudnya birokrasi yang kapabel, optimalnya Implementasi SPBE, serta pelayanan publik yang terpercaya	Meningkatkan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan catatan sipil melalui peningkatan kesadaran masyarakat dan perbaikan kualitas layanan administrasi kependudukan	1. Program Pendaftaran Penduduk 2. Program Pencatatan Sipil

Sumber : KLHS RPJMD Kab. Konawe Utara, diolah

1.3.5 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023

Penyusunan RPJMD Kabupaten Konawe Utara memperhatikan dokumen RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2018-2023 terutama terkait permasalahan, tujuan dan sasaran, misi, misi, dan arah kebijakan pembangunan kewilayahan yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara.



Gambar 1.6. Keselarasan RPJMD Kabupaten Konawe Utara Dan RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara

1.3.6 Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2012-2032

Perencanaan pembangunan daerah pada prinsipnya bertujuan mengintegrasikan rencana tata ruang wilayah dengan rencana pembangunan daerah.

Dalam kaitan itu, penyusunan RPJMD Kabupaten Konawe Utara berpedoman pada RTRW Kabupaten Konawe Utara Tahun 2012-2032 serta memperhatikan draft revisi RTRW yang pada tahun 2021 ini sedang berjalan.

Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten adalah rencana yang mencakup sistem pusat permukiman yang berkaitan dengan kawasan perkotaan dan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana wilayah. Adapun sistem pusat perkotaan di Kabupaten Konawe Utara antara lain : Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) di kecamatan Lasolo; Pusat Kegiatan Lingkungan (PKL) di Wanggudu; Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) di Kecamatan Sawa, Molawe, Langgikima, Wiwirano, Andowia, Motui, Lembo, dan Oheo; dan Pusat Pelayanan Lokal (PPL) di Kecamatan Landawe, Boenaga, dan Wawolesea. Selanjutnya pusat-pusat kegiatan tersebut dihubungkan dengan sistem jaringan transportasi darat, sistem transportasi laut, sistem transportasi udara, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumberdaya air, dan sistem jaringan prasarana lainnya (air minum, persampahan, air limbah, drainase, jalu dan ruang evakuasi bencana).

Rencana pola ruang wilayah Kabupaten adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah Kabupaten yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budidaya yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya RTRW Kabupaten yang memberikan gambaran pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten hingga 20 (dua puluh) tahun mendatang yang harus diperhatikan dalam pembangunan dan pemanfaatan ruang tahun 2021-2026, yaitu : Kawasan Hutan Lindung, Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Dibawahnya, Kawasan Perlindungan Setempat, Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya, Kawasan Rawan Bencana Alam, Kawasan Lindung Geologi, Kawasan Hutan, Kawasan Pertanian, Kawasan Perikanan, Kawasan Pertambangan, Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Pariwisata, Kawasan Permukiman, dan Kawasan Peruntukan Lainnya

1.3.7 RPJMD Daerah Sekitar

Penyusunan RPJMD Kabupaten Konawe Utara memperhatikan dokumen RPJMD daerah sekitar (Kabupaten Konawe, Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Kabupaten Morowali di Provinsi Sulawesi Tengah) khususnya terkait dengan kebijakan pembangunan di wilayah perbatasan dengan

Kabupaten Konawe Utara yang kemungkinan berpengaruh pada wilayah Kabupaten Konawe Utara seperti Kawasan Industri Konawe dan Kawasan Industri Morowali.

1.3.8 Dokumen Perencanaan Multi Sektor

Penyusunan RPJMD Kabupaten Konawe Utara memperhatikan dokumen perencanaan multi sektor yang telah tersusun, antara lain Rencana Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (RPPLH), Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Daerah (RP4D), Rencana Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPARDA), Rencana Induk SPAM (RISPAM) dan lain sebagainya. RPJMD juga akan menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan multi sektor yang penyusunannya dilakukan setelah RPJMD ditetapkan.

1.3.9 Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021-2026 menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan lima tahun pada tingkat perangkat daerah.

1.3.10 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Konawe Utara tahun 2021-2026 setelah ditetapkan akan menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD Kabupaten Konawe Utara tahun 2022 hingga tahun 2026 yang merupakan dokumen perencanaan tahunan daerah.

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021-2026 dimaksudkan untuk menyediakan rencana pembangunan daerah kurun waktu lima tahun sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara agar terarah, terpadu dan berkesinambungan. Sedangkan tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan gambaran tentang kondisi daerah, permasalahan dan isu strategis, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program pembangunan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi kepala daerah;

2. Merumuskan arah kebijakan dan prioritas pembangunan tahunan daerah sebagai acuan resmi dalam penyusunan RKPD yang merupakan dokumen perencanaan daerah tahunan, dan Renstra Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan lima tahun perangkat daerah;
3. Memberikan tolok ukur dan instrumen bagi pemerintah daerah, DPRD dan masyarakat dalam melakukan evaluasi kinerja pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, hubungan antar dokumen, serta sistematika penulisan.

Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah, memuat gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang meliputi aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.

Bab III Gambaran Keuangan Daerah, memuat gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Bab IV Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah, memuat analisis permasalahan pembangunan dan isu- isu strategis pembangunan daerah tahun 2016-2021.

Bab V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, memuat visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah.

Bab VI Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah, memuat strategi, arah kebijakan pembangunan serta program pembangunan prioritas berdasarkan strategi yang dipilih dengan target capaian indikator kinerja

Bab VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah, memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

Bab VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, memuat penetapan indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

Bab IX Penutup, memuat pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan setelah periode RPJMD berakhir.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH



2.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

Analisis pada aspek geografi perlu dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah, dan kerentanan wilayah terhadap bencana. Sedangkan gambaran kondisi demografi, antara lain mencakup perubahan penduduk, komposisi dan populasi masyarakat secara keseluruhan atau kelompok dalam waktu tertentu.

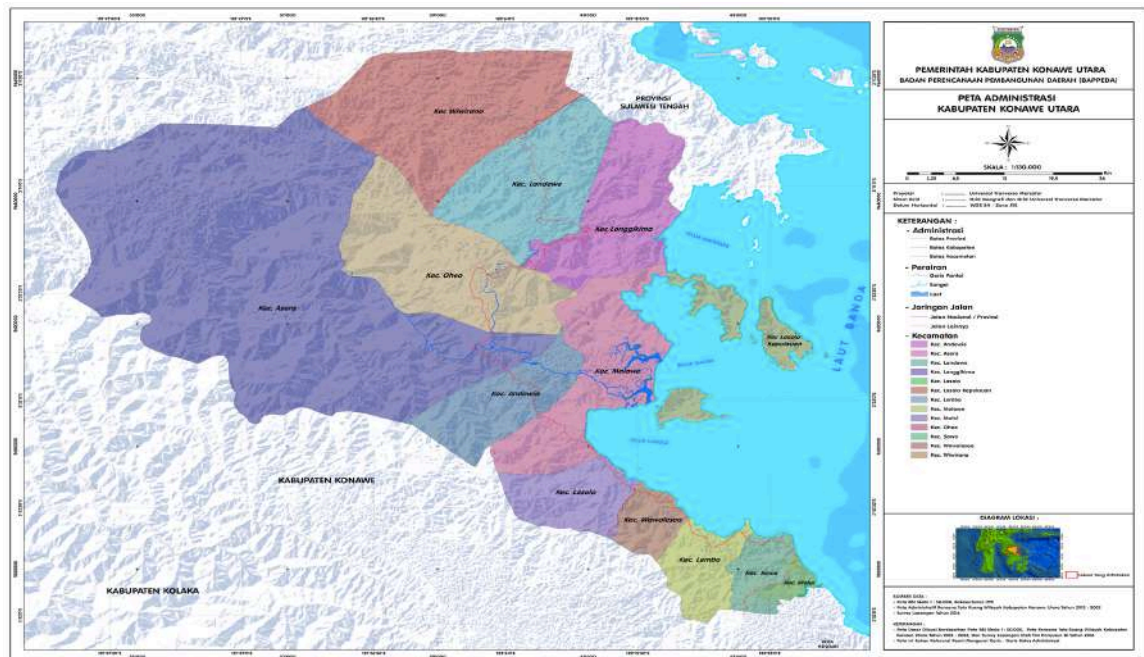
2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Secara geografis Kabupaten Konawe Utara terletak di bagian selatan Khatulistiwa, melintang dari Utara ke Selatan antara 02°97' dan 03°86' LS, membujur dari Barat ke Timur antara 121°49' dan 122°49' BT. Kabupaten Konawe Utara memiliki luas wilayah sebesar 500.339 Ha atau sekitar 13,38 persen dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. Sedangkan luas wilayah perairan laut (termasuk perairan Kabupaten Konawe dan Kabupaten Konawe Selatan) ±11.960Km² atau 10,87 persen dari luas perairan Sulawesi Tenggara. Secara administrasi Kabupaten Konawe Utara berbatasan dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Morowali (Provinsi Sulawesi Tengah) dan Kecamatan Routa (Kabupaten Konawe).
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Morowali (Provinsi Sulawesi Tengah) dan Laut Banda.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bondoala, Kecamatan Amonggedo, Kecamatan Meluhu, Kecamatan Anggaberri, Kecamatan Tongauna dan Kecamatan Abuki (Kabupaten Konawe).
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Latoma Kabupaten Konawe dan Kabupaten Kolaka Utara.

Secara administratif Kabupaten Konawe Utara terdiri dari 13 kecamatan. Kecamatan Wiwirano adalah kecamatan yang mempunyai wilayah paling luas yaitu 968,06 km² atau 19,34 persen dari seluruh wilayah Kabupaten Konawe Utara. Sedangkan kecamatan dengan luas wilayah yang paling sempit adalah Kecamatan Motui dengan luas 61,30 km² atau hanya 1,22 persen dari luas Kabupaten Konawe Utara.

Gambar 2.1.
Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Konawe Utara



Selain itu, wilayah Kabupaten Konawe Utara juga terbagi atas 159 desa dan 11 kelurahan, dengan jumlah desa yang terbanyak terletak di Kecamatan Asera dan Oheo, yaitu masing - masing 17 desa. Sementara kecamatan dengan jumlah desa paling sedikit adalah Kecamatan Lasolo Kepulauan, yaitu 6 desa. Secara rinci klasifikasi wilayah desa di Kabupaten Konawe Utara dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1.
Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Konawe Utara

No.	Kecamatan	Ibukota	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah		
				Desa	Kel.	UPT
1.	Sawa	Sawa	93,76	13	1	-
2.	Motui	Bende	61,30	14	1	1
3.	Lembo	Lembo	78,12	11	1	-
4.	Wawolesea	Wawolesea	149,40	9	-	-
5.	Lasolo	Tinobu	139,40	13	1	-
6.	Lasolo Kepulauan	Boenaga	62,42	6	-	-
7.	Molawe	Molawe	365,06	8	1	-
8.	Andowia	Andowia	595,90	14	1	-
9.	Asera	Asera	863,32	17	2	1
10.	Oheo	Linomoiyo	738,50	17	1	1
11.	Langgikima	Langgikima	476,75	11	1	-

No.	Kecamatan	Ibukota	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah		
				Desa	Kel.	UPT
12.	Landawe	Hialu	603,53	10	-	-
13.	Wiwirano	Lamonae	968,06	15	1	1
Total			5.003,39	159	11	4

Sumber : BPS, Kabupaten Konawe Utara Dalam Angka Tahun 2021

2.1.1.1 Kondisi Topografi

Wilayah Konawe Utara berada pada ketinggian 0 - >2000 mdpl dengan kemiringan lereng antara 0 - >40%. Kemiringan antara 25% sampai dengan >40% berada pada hulu Sungai Lasolo yang merupakan wilayah Pegunungan Matarombeo. Wilayah dengan kemiringan lereng 0-8% umumnya berada pada kaki bukit, lembah antar sungai, dan wilayah di muara-muara sungai. Wilayah dengan ketinggian >2000 meter dan kemiringan lebih dari 40% berada pada sekitar hulu Sungai Konawehea, yaitu Pegunungan Mekongga mengarah ke utara sampai Pegunungan Matarombeo umumnya berbukit hingga bergunung.

Seperti halnya dengan kondisi topografi Kabupaten lainnya di Sulawesi Tenggara, Kabupaten Konawe Utara memiliki topografi permukaan tanah yang pada umumnya bergunung, bergelombang dan berbukit yang mengelilingi dataran rendah yang sangat potensial untuk perkembangan sektor pertanian.

2.1.1.2 Kondisi Geologi

Berdasarkan himpunan batuan dan pencirinya, geologi Lembar Lasusua-Kendari dapat dibedakan dalam dua lajur, yaitu Lajur Tinodo dan Lajur Hialu. Lajur Tinodo dicirikan oleh batuan endapan paparan benua dan Lajur Hialu oleh endapan kerak samudra/ofiolit, secara garis besar kedua mendala ini dibatasi oleh Sesar Lasolo.

Struktur geologi yang dijumpai di wilayah Kabupaten Konawe Utara adalah sesar, lipatan dan kekar. Sesar dan kelurusan umumnya berarah barat laut-tenggara searah dengan sesar geser lurus mengiri Lasolo. Sesar Lasolo bahkan masih aktif hingga saat ini. Sesar tersebut diduga ada kaitannya dengan Sesar Sorong yang aktif kembali pada Kala Oligosen (Simandjuntak, dkk., 1983). Sesar naik ditemukan di daerah Wawo sebelah barat Tampakura dan di Tanjung Labuandala di selatan Lasolo,

yaitu beranjaknya Batuan Ofiolit ke atas Batuan Malihan Mekonga, Formasi Meluhu, dan Formasi Matano.

Adapun jenis tanah di Kabupaten Konawe Utara meliputi Latosol 116.829 Ha atau 23,35%, Podzolik 140.845 Ha atau 28,15%, Organosol 23.566 Ha atau 4,71%, Mediteran 16.961 Ha atau 3,39%, Aluvial 24.067 Ha atau 4,80% dan tanah campuran 178.071 Ha atau 35,59%.

Tabel 2.2.
Luas Wilayah dan Jenis Tanah
di Kabupaten Konawe Utara

No.	Jenis Tanah	Luas (km ²)	Persentase (%)
1.	Latosol	1.168,29	23,35
2.	Podzolik	1.408,45	28,15
3.	Organosol	235,66	4,71
4.	Mediteran	169,61	3,39
5.	Aluvial	240,16	4,80
6.	Tanah Campuran	1.780,71	35,39
Jumlah		5.003,39	100,00

Sumber : RTRW Kabupaten Konawe Utara Tahun 2012-2032

2.1.1.3 Hidrologi dan Hidrogeologi

Sungai adalah sistem pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi pada kanan dan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan. Daerah Pengaliran Sungai adalah suatu kesatuan wilayah tata air yang terbentuk secara alamiah, dimana air meresap dan/atau mengalir melalui sungai dan anak-anak sungai yang bersangkutan.

Daerah Aliran Sungai yang melalui Kabupaten Konawe Utara adalah wilayah Sungai Lasolo Sampara dengan sub wilayah sungai terdiri dari SWS Sungai Lasolo, SWA Lalindu, SWS Tinobu, SWS Sampara, dan SWS S. Lambuti. SWS Lasolo-Sampara mempunyai 63 DPS dengan jumlah total luas DPS 14.979,6 km² dan total panjang sungainya 847,2 km.

Adanya Daerah Aliran Sungai (DAS) perlu dicermati sebagai potensi bagi sumber daya air untuk keperluan irigasi pertanian, energi listrik, sarana. Hal lain yang harus dicermati terkait dengan keberadaan daerah aliran sungai yakni kerentanan terhadap bencana banjir seperti halnya yang terjadi pada titik muara

sungai pertemuan Sungai Lasolo dan Sungai Landawe di perbatasan kecamatan Molawe-Asera adalah yang telah menjadi daerah banjir tahunan.

2.1.1.4 Kondisi Klimatologi

Kondisi iklim di Kabupaten Konawe Utara tidak jauh berbeda dengan kondisi iklim di daratan Provinsi Sulawesi Tenggara, keduanya memiliki dua musim dalam setahun (musim hujan dan musim panas). Pada musim hujan, angin banyak mengandung uap air yang berasal dari Benua Asia dan Samudra Pasifik. Rata-rata suhu udara maksimum 32°C. Tekanan udara rata-rata 1.010,6 milibar dengan kelembaban udara rata-rata 78 persen, kecepatan angin pada umumnya berjalan normal yaitu sekitar 3,75 m/sec.

Pada tahun 2020, Bulan Maret merupakan bulan dengan jumlah hari hujan terbanyak yakni sebanyak 23 hari hujan dengan total curah hujan terbesar yakni sebesar 534 mm. Dalam kurun waktu kalender tahun 2020, total 141 hari diantaranya terjadi hujan dengan curah hujan rintik 2 mm sampai hujan deras dengan intensitas 110 mm yang merupakan hujan terderas yang terjadi di bulan Agustus. Berdasarkan pada klasifikasi iklim Schmidt dan Fergusson, wilayah Kabupaten Konawe Utara dibedakan dalam dua klasifikasi yaitu Tipe Iklim B yakni tipe Iklim dengan kelembaban 14,3-33,3 % pada daerah Wiwirano hingga Molawe, dan Tipe Iklim C yaitu dengan kelembaban 33,3-60 % pada wilayah Lasolo hingga Motui.

Tabel 2.3.
Keadaan Curah Hujan Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020

No.	Bulan	Hari Hujan (HH)	Curah Hujan (mm)
1.	Januari	13	219
2.	Februari	15	314
3.	Maret	15	273
4.	April	15	355
5.	Mei	14	309
6.	Juni	16	484
7.	Juli	9	139
8.	Agustus	2	11
9.	September	1	10
10.	Oktober	1	8

No.	Bulan	Hari Hujan (HH)	Curah Hujan (mm)
11.	November	2	11
12.	Desember	3	267

Sumber : Konawe Utara Dalam Angka, Tahun 2021

2.1.1.5 Penggunaan Lahan

Kabupaten Konawe Utara memiliki luas wilayah sebesar 500.339 Ha. Penggunaan lahan terbesar adalah hutan negara seluas 350.962 Ha dan perkebunan seluas 143.086 Ha. Sebesar 0,39 persen atau sekitar 1.963 Ha dimanfaatkan sebagai lahan sawah yang luasnya mengalami penambahan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Data selengkapnya penggunaan lahan di Kabupaten Konawe Utara disajikan pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4.
Luas Penggunaan Lahan di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020

No.	Penggunaan Lahan	Luas Lahan (Ha)	Persentase (%)
I.	a. Diusahakan	1.963	0,39
	b. Tidak Diusahakan	862	0,17
II.	Lahan Pertanian Bukan Sawah		
	a. Tegal/kebun	32.084	6,41
	b. Ladang/huma	84.278	16,84
	c. Perkebunan	143.086	28,60
	d. Ditanami pohon/hutan rakyat	21.095	4,22
	e. Padang penggembalaan/padang rumput	8.617	1,72
	f. Hutan negara		
	g. Sementara tidak diusahakan	21.534	4,30
	h. Lainnya (tambak,kolam, hutan negara, dll)	63.908	12,77
III.	Lahan Bukan Pertanian (Jalan, Permukiman, Perkantoran, Sungai, dll)	122.912	24,57
Jumlah		500.339	500.339

Sumber : BPS, Kabupaten Konawe Utara dalam Angka, Tahun 2021

2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Kabupaten Konawe Utara memiliki potensi pengembangan wilayah cukup prospektif. Potensi ini dituangkan dalam kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Konawe Utara (Pasal 3, Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 20 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Konawe Utara Tahun 2012 - 2032). Arah pengembangan wilayah Kabupaten Konawe Utara adalah sebagai berikut:

- a. Pengembangan dan peningkatan pusat-pusat pelayanan yang dapat mendorong pertumbuhan yang merata sesuai dengan hirarki dan skala pelayanannya;
- b. Pengembangan dan peningkatan kualitas dan jangkauan jaringan transportasi, energi listrik, telekomunikasi, dan sumber daya air, pelayanan sarana dan prasarana air minum, persampahan, air limbah, dan drainase untuk meningkatkan pertumbuhan wilayah;
- c. Pengembangan kegiatan industri pertambangan yang ramah lingkungan dalam rangka memberi nilai tambah dalam perekonomian wilayah;
- d. Pengembangan kegiatan unggulan pertanian, perkebunan, perikanan, dan pertambangan secara bijak dengan memperhatikan daya dukung lingkungan;
- e. Pelestarian lingkungan hidup dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan daya dukung lingkungan demi kelangsungan di masa mendatang; dan
- f. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Berdasarkan penelaahan RTRW dan deskripsi wilayah di Kabupaten Konawe Utara, dapat diidentifikasi wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya seperti perikanan, pertanian, pariwisata, industri, pertambangan dan lain - lain, adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan kawasan industri pertambangan di Kecamatan Motui dan Langgikima;
2. Pengembangan kawasan agropolitan secara terpadu di Kecamatan Lembo dan Kecamatan Lasolo;
3. Pengembangan kawasan perikanan yang terintegrasi di Kecamatan Molawe, Kecamatan Lasolo dan Kecamatan Lembo;
4. Pengembangan kegiatan unggulan sub sektor perikanan tambak di Kecamatan Motui dan Sawa;
5. Pengembangan kawasan wisata Pantai Taipa di Kecamatan Lembo, pengembangan

kawasan wisata bahari Pulau Labengki di Kecamatan Lasolo Kepulauan, pengembangan kawasan wisata Air Panas Wawolesea di Kecamatan Wawolesea, pengembangan kawasan wisata alam dan sejarah di Kecamatan Oheo dan Kecamatan Asera, dan pengembangan kawasan wisata alam minat khusus di Kecamatan Wiwirano;

6. Pengembangan kegiatan sub sektor tanaman pangan, sub sektor perkebunan dan hortikultura, sub sektor peternakan, sub sektor kehutanan serta sub sektor perikanan air tawar di Kecamatan Andowia, Asera, dan Oheo; dan
7. Pengembangan kegiatan perkebunan kelapa sawit serta industri pengolahannya di Kecamatan Wiwirano dan Langgikima.

2.1.3 Wilayah Rawan Bencana

Wilayah Kabupaten Konawe Utara merupakan salah satu bagian wilayah yang rawan bencana khususnya bencana banjir. Bencana banjir besar yang terjadi pada Bulan Juli tahun 2019 merupakan pelajaran berharga bagi proses pembangunan kedepan. Kejadian bencana banjir terjadi di DAS Lasolo dengan luas Daerah Tangkapan Air titik banjir 600.191 Ha dan menerjang di 7 Kecamatan, 47 Desa, 4 Kelurahan. Penyebab banjir adalah curah hujan yang tinggi, sistem drainase yang buruk, pendangkalan sungai, dan aktivitas di kawasan hutan. Berdasarkan konfigurasi topografinya, lokasi area banjir tersebut merupakan dataran banjir (flood plain) yang dikelilingi perbukitan terjal, sehingga berfungsi sebagai tampungan depresi. Termasuk dalam kategori Banjir Limpasan yang didominasi akibat overlandflow, bukan hanya luapan dari Badan Sungai Lasolo, Lalindu, Landawe, dan sungai-sungai kecil lainnya. Kejadian bencana alam tersebut telah meluluhlantakkan sebagian besar wilayah Kabupaten Konawe Utara dan menyebabkan 9.609 jiwa atau 2.502 KK mengungsi, dengan total korban terdampak sebanyak 18.765 jiwa. Resiko bencana di Kabupaten Konawe Utara selengkapnya sebagaimana disajikan pada gambar berikut :

Selain 2 (dua) jenis bencana tersebut, Kabupaten Konawe Utara juga berpotensi terhadap beberapa bencana lain, seperti gempa bumi, gelombang pasang dan tsunami. Secara lebih rinci wilayah rawan bencana di Kabupaten Konawe Utara adalah sebagai berikut:

1. Wilayah rawan bencana tanah longsor meliputi seluruh kecamatan
2. Wilayah rawan bencana gelombang pasang dan tsunami meliputi: Kecamatan Motui, Kecamatan Sawa, Kecamatan Lembo, Kecamatan Molawe, Kecamatan Lasolo, Kecamatan Lasolo Kepulauan.
3. Wilayah rawan bencana banjir meliputi: Kecamatan Motui, Kecamatan Sawa, Kecamatan Lembo, Kecamatan Lasolo, Kecamatan Molawe, Kecamatan Andowia, Kecamatan Asera, Kecamatan Oheo, Kecamatan Wiwirano.
4. Wilayah rawan bencana gempa bumi mencakup seluruh wilayah Kabupaten Konawe Utara mengingat terdapat sesar lasolo.

Dengan demikian pengarusutamaan kerentanan bencana di Kabupaten Konawe Utara sebagai faktor penting dalam pembangunan dengan menitikberatkan pada upaya penanganan dan pengurangan kerentanan bencana khususnya bencana banjir dan tanah longsor serta peningkatan ketahanan terhadap risiko perubahan iklim.

2.1.4 Kondisi Demografi

Keberadaan penduduk sangat penting di dalam proses pembangunan, oleh karena itu penduduk akan menjadi beban bagi daerah apabila tidak dikelola dengan baik dan sebaliknya akan menjadi modal potensial apabila mampu dikelola dengan baik. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020 sebanyak 67.871 jiwa yang terdiri dari 35.112 jiwa laki-laki dan 32.759 jiwa perempuan, dengan angka sex ratio jenis kelamin sebesar 107,18. Rata - rata laju pertumbuhan penduduk per tahun di Kabupaten Konawe Utara sebesar 2,7 persen.

Tabel 2.5.
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Konawe Utara

Tahun	Jenis Kelamin		Jumlah Penduduk	Jumlah KK	Rasio Jenis Kelamin
	Laki-Laki	Perempuan			
2010	24.346	23.579	47.925	10.892	103,25
2011	27.519	25.042	52.561	11.318	109,89
2012	28.088	25.569	53.657	11.779	109,85
2013	28.665	26.087	54.752	12.167	109,88
2014	29.902	27.175	57.077	12.384	110,03
2015	30.499	27.902	58.401	12.580	109,31
2016	31.186	28.487	59.673	12.584	109,47
2017	31.884	29.000	60.884	13.115	109,94
2018	32.720	29.683	62.403	13.442	110,23
2019	33.390	30.424	63.815	18.867	109,75
2020	35.112	32.759	67.871	19.218	107,18

Sumber : Dirangkum dari BPS, Konawe Utara dalam Angka, Tahun 2017 s.d 2021

Jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Lasolo, Molawe, Andowia, dan Asera. Hal ini terjadi karena keempat kecamatan tersebut merupakan konsentrasi penduduk setelah Kabupaten Konawe Utara terbentuk menjadi daerah otonomi baru, selain itu kecamatan tersebut merupakan daerah percepatan pengembangan wilayah dan pusat-pusat perekonomian sehingga secara umum menjadi daya tarik bagi penduduk untuk tinggal dilokasi tersebut.

Komposisi penduduk menurut jenis kelamin diperlukan guna menentukan kebijakan yang berprespektif gender. Data pada tabel 2.6 menunjukkan jumlah penduduk perempuan semakin meningkat dan lebih banyak dari penduduk laki-laki, oleh sebab itu dalam menentukan suatu kebijakan perlu mempertimbangkan kesetaraan gender. Salah satunya mungkin dapat memberikan peluang lebih besar bagi perempuan untuk dapat turut berperan aktif dalam pemerintahan.

Tabel 2.6.
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan
di Kabupaten Konawe Utara

No.	Kecamatan	Jenis Kelamin			Jumlah KK
		Laki - Laki	Perempuan	Jumlah	
1.	Sawa	2.379	2.137	4.516	1.482
2.	Motui	2.358	2.347	4.705	1.568
3.	Lembo	2.792	2.630	5.422	1.588
4.	Lasolo	4.168	3.961	8.129	1.740
5.	Wawolesea	1.757	1.739	3.496	1.026
6.	Lasolo Kep.	1.195	1.029	2.224	917
7.	Molawe	3.399	3.209	6.608	1.568
8.	Asera	3.882	3.722	7.604	1.830
9.	Andowia	3.574	3.470	7.044	1.520
10.	Oheo	2.389	2.225	4.614	1.691
11.	Langgikima	2.833	2.371	5.204	1.213
12.	Wiwirano	2.937	2.624	5.561	1.711
13.	Landawe	1.449	1.295	2.744	1.364
	TOTAL	35.112	32.759	67.871	19.218

Sumber : BPS, Kabupaten Konawe Utara dalam Angka, Tahun 2021

Ditilik dari kepadatan penduduk kecamatan, penyebaran penduduk belum merata. Kecamatan dengan luas wilayah yang lebih kecil mempunyai jumlah penduduk lebih banyak dibandingkan dengan kecamatan yang memiliki luas wilayah lebih besar, sebagaimana disajikan pada Tabel 2.7.

Tabel 2.7.
Jumlah dan Kepadatan Penduduk
di Kabupaten Konawe Utara

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Tahun 2020			Kepadatan (jiwa/km ²)
			Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
1.	Sawa	93,76	2.410	2.207	4.573	49
2.	Motui	61,3	2.305	2.268	4.617	75
3.	Lembo	78,12	2.829	2.651	5.480	70
4.	Wawolesea	149,4	4.261	4.027	8.288	55
5.	Lasolo	139,4	1.748	1.728	3.476	25

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Tahun 2020			Kepadatan (jiwa/km ²)
			Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
6.	Lasolo Kep.	62,42	1.094	1.087	2.181	35
7.	Molawe	365,06	3.284	3.146	6.430	18
8.	Asera	863,32	3.760	3.620	7.905	9
9.	Andowia	595,9	4.048	3.857	7.380	12
10.	Oheo	738,5	2.427	2.301	4.728	6
11.	Langgikima	476,75	2.678	2.360	5.038	11
12.	Wiwirano	968,06	2.884	2.596	5.480	6
13.	Landawe	603,53	1.535	1.404	2.939	5
Konawe Utara		5.003,39	35.263	33.252	68.515	14

Sumber : BPS, Kabupaten Konawe Utara Dalam Angka, tahun 2021, dianalisis

Statistik penduduk menurut kelompok umur akan menggambarkan jumlah usia produktif atau non produktif di Kabupaten Konawe Utara. Pada tahun 2020 tercatat kelompok umur di bawah 20 tahun berjumlah 26.971 jiwa yang merupakan penduduk usia sekolah, kelompok umur 20-65 tahun sebanyak 38.576 jiwa adalah penduduk usia produktif atau angkatan kerja, sedangkan lanjut usia atau kelompok umur 65+ berjumlah 2.324 jiwa.

Berdasarkan komposisi penduduk, menggambarkan bahwa jumlah penduduk produktif atau tenaga kerja di Kabupaten Konawe Utara lebih besar dari penduduk yang tidak produktif (usia sekolah dan lanjut usia). Bonus demografi ini menjadi potensi dalam proses pembangunan dalam kaitannya dengan kemampuan sumber daya manusia dalam mengelola sumber-sumber daerah.

Tabel 2.8.
Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur
Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020

Tingkat Umur	Jumlah Penduduk		Total
	Laki - Laki	Perempuan	
0 - 4	3.784	3.698	7.482
5 - 9	3.377	3.415	6.792
10 - 14	3.252	3.039	6.291
15 - 19	3.218	3.188	6.406
20 - 24	3.106	2.808	5.914

Tingkat Umur	Jumlah Penduduk		Total
	Laki - Laki	Perempuan	
25 - 29	3.169	3.057	6.226
30 - 34	3.062	2.737	5.799
35 - 39	2.751	2.503	5.254
40 - 44	2.488	2.247	4.735
45 - 49	2.052	1.751	3.803
50 - 54	1.598	1.383	2.981
55 - 59	1.167	1030	2.197
60 - 64	853	814	1.667
65 +	1.235	1.089	2.324
Jumlah	35.112	32.759	67.871

Sumber : BPS, Kabupaten Konawe Utara Dalam Angka, Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa struktur penduduk Kabupaten Konawe Utara didominasi oleh penduduk usia sekolah dan usia produktif, sehingga diperlukan adanya kebijakan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara terkait pendidikan dan ketenagakerjaan.

Proporsi penduduk Kabupaten Konawe Utara pada tahun 2020 didominasi kelompok umur produktif (15-64 tahun) sebesar 66,28%, sementara itu penduduk kelompok usia muda (0-14 tahun) sebesar 30,30%, dan kelompok usia lanjut (di atas 65 tahun) sebesar 3,42%. Penduduk usia muda dan penduduk usia lanjut disebut juga penduduk non produktif. Berdasarkan komposisi tersebut, rasio beban ketergantungan penduduk usia non produktif terhadap penduduk usia produktif sebesar 50,88%, yang menunjukkan bahwa 100 orang penduduk usia produktif menanggung sekitar 51 orang penduduk yang belum/tidak produktif.

2.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

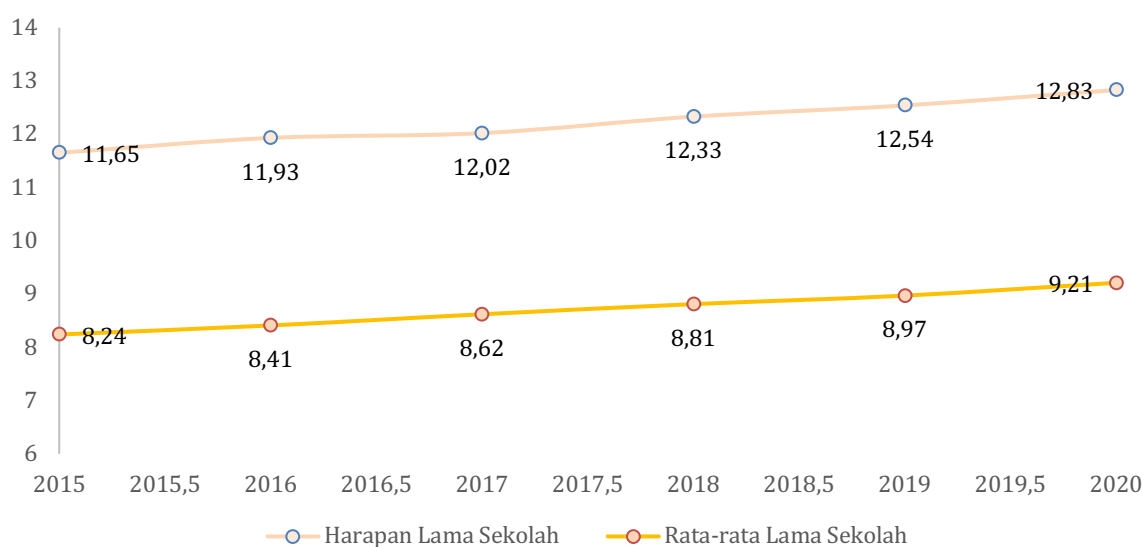
Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olahraga. Untuk menganalisis aspek kesejahteraan masyarakat, terlebih dahulu disusun tabel capaian indikator setiap variabel yang akan dianalisis untuk penyusunan RPJMD Kabupaten Konawe Utara. Indikator variabel aspek kesejahteraan masyarakat dimaksud terdiri dari:

2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu indeks komposit yang menggambarkan tingkat pembangunan manusia. IPM mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup, dengan melalui pendekatan tiga dimensi yaitu kesehatan, pengetahuan dan dimensi hidup layak. Dimensi kesehatan diukur melalui angka harapan hidup, dimensi pengetahuan diukur melalui harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah dan dimensi hidup layak diukur melalui kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran perkapita.

Penghitungan IPM untuk dimensi pengetahuan menggunakan indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Dimensi standar hidup layak menggunakan indikator Produk Nasional Bruto (PNB) perkapita, sedangkan untuk menghitung dimensi kesehatan menggunakan indikator Usia Harapan Hidup saat lahir (UHH). Metode agregasinya disempurnakan menjadi rata-rata geometrik. Ketidaktersediaan data PNB ditingkat provinsi dan kabupaten/kota, digunakan proksi pengeluaran perkapita yang disesuaikan, dari data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Metode ini mulai diterapkan di Indonesia pada penghitungan IPM tahun 2014.



Gambar 2.4. Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015 - 2020

Tabel 2.9.
Perkembangan IPM Kabupaten Konawe Utara

Tahun	IPM Konawe Utara	IPM Sulawesi Tenggara	IPM Nasional
2014	66,03	67,55	68,90
2015	66,44	68,75	69,55
2016	67,20	69,31	70,18
2017	67,71	69,86	70,81
2018	68,50	70,61	71,39
2019	69,22	71,20	71,92
2020	69,86	71,45	71,94

Sumber : BPS Sulawesi Tenggara, 2021

Berdasarkan hasil penghitungan IPM, dapat dilihat bahwa selama lima tahun terakhir nilai IPM Kabupaten Konawe Utara menunjukkan perkembangan yang positif, namun masih dibawah angka rata-rata provinsi dan nasional. Nilai IPM terus mengalami peningkatan mulai dari 66,44 pada tahun 2015 hingga mencapai 69,86 pada tahun 2020, termasuk dalam kategori sedang (IPM 60 - 70). Meskipun capaiannya terus meningkat, tetapi nilai IPM Kabupaten Konawe Utara selama lima tahun terakhir belum mampu meningkatkan level capaiannya menjadi tinggi (IPM > 70) sampai dengan sangat tinggi ($70 < \text{IPM} < 80$).

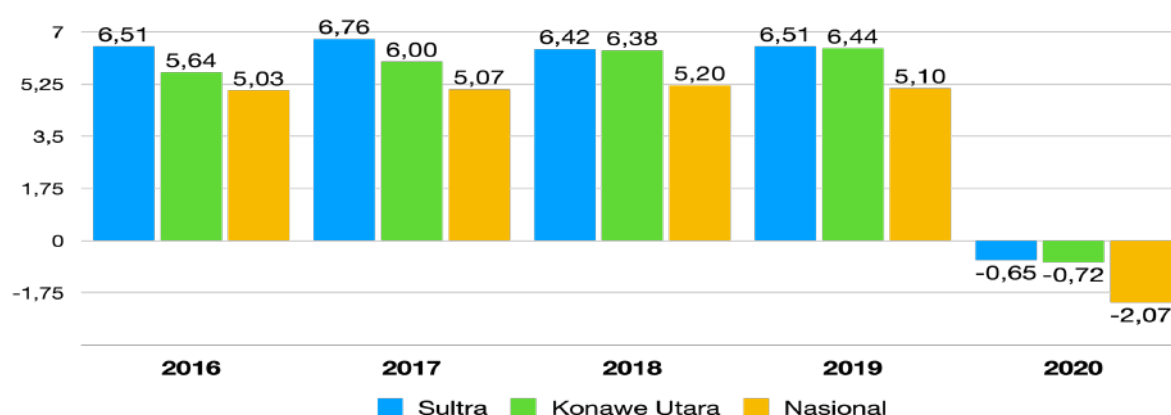
Harapannya, pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Konawe Utara pada tahun-tahun mendatang mampu memberikan dampak positif terutama yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan dan kualitas penduduk Kabupaten Konawe Utara. Belum mampunya IPM Kabupaten Konawe Utara menembus kategori sangat tinggi bisa disebabkan peningkatan komponen-komponennya yang belum optimal.

IPM Kabupaten Konawe Utara masih dapat ditingkatkan antara lain dengan peningkatan laju pertumbuhan indeks kesehatan yaitu lebih mengutamakan perbaikan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan kemudahan akses sarana kesehatan yang tersedia, penggunaan air bersih, keberadaan fasilitas MCK penduduk dan kualitas kesehatan lingkungan tempat tinggal penduduk; peningkatan laju pertumbuhan indeks pengetahuan yaitu dengan meningkatkan partisipasi sekolah penduduk melalui upaya semua anak usia sekolah (SD-SLTP) bisa bersekolah

dan tidak putus sekolah; peningkatan laju pertumbuhan indeks pengeluaran dengan meningkatkan daya beli penduduk melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita, membuka lapangan usaha baru, dan adanya program bantuan sosial pemerintah seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), dll.

2.2.1.2 Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi tingkat kemajuan perekonomian Kabupaten Konawe Utara yaitu pertumbuhan PDRB. PDRB menggambarkan kemampuan daerah dalam mengelola dan menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan barang dan jasa. Dari PDRB dapat diketahui nilai tambah dari kegiatan ekonomi dalam suatu wilayah, pertumbuhan ekonomi dan struktur ekonomi daerah. Oleh karena itu dapat dijadikan bahan evaluasi terhadap kebijaksanaan pembangunan daerah khususnya pembangunan ekonomi guna penyusunan atau menggariskan kebijakan lebih lanjut. Pada Tahun 2019 perekonomian Kabupaten Konawe Utara mampu tumbuh sebesar 6,44 persen, dan mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi -0,72 persen. Pertumbuhan ini berada di bawah pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar -0,65 persen, namun sudah diatas nasional sebesar -2,07 persen. Sebagaimana ditampilkan pada gambar berikut.



Gambar 2.5 Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, dan Nasional

Sumber : BPS Kabupaten Konawe Utara, 2021

Perekonomian Kabupaten Konawe Utara dari tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2016, ekonomi Kabupaten Konawe Utara tumbuh 5,64 persen, meningkat menjadi 6,41 pada tahun 2019. Namun pada tahun 2020, perekonomian Kabupaten Konawe Utara melambat menjadi -1,20. Hal ini disebabkan karena laju pertumbuhan melambat pada beberapa sektor. Sektor yang paling mengalami perlambatan pertumbuhan antara lain sektor pertambangan dan penggalan, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, serta sektor jasa lainnya. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Konawe Utara disajikan pada tabel 2.10 berikut ini:

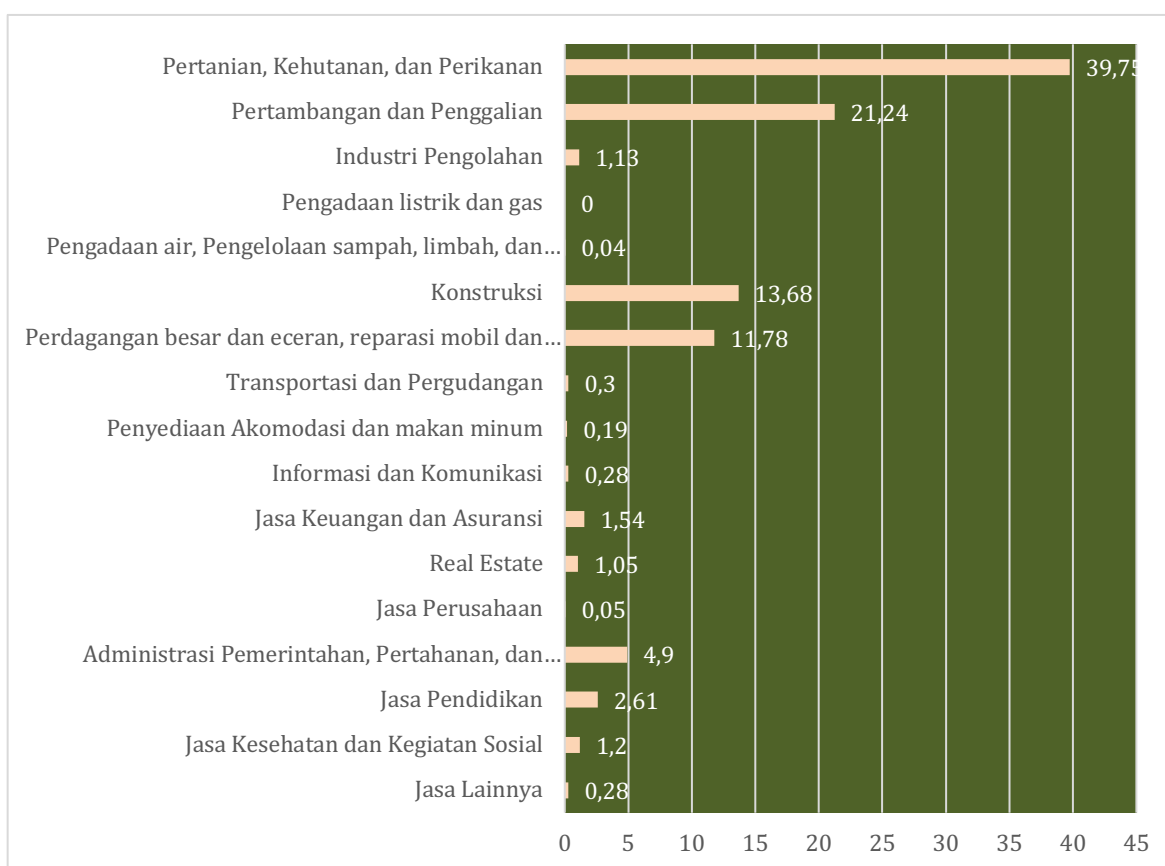
Tabel 2.10.
Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Konawe Utara

Lapangan Usaha		2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	6,34	6,14	6,63	5,21	(1,20)
B	Pertambangan dan Penggalan	1,71	10,49	7,81	9,61	(2,49)
C	Industri Pengolahan	7,97	4,07	0,74	2,79	(1,26)
D	Pengadaan listrik dan gas	8,19	6,63	1,66	4,32	5,57
E	Pengadaan air. Pengelolaan sampah. limbah & Daur ulang	5,84	1,17	1,05	1,11	4,24
F	Konstruksi	4,53	3,08	6,11	6,05	(0,03)
G	Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	12,71	6,06	6,88	7,72	(1,38)
H	Transportasi dan Pergudangan	8,23	4,63	5,48	3,86	(1,53)
I	Penyediaan Akomodasi & makan minum	7,11	4,67	6,85	7,48	(0,22)
J	Informasi dan Komunikasi	6,88	9,68	7,84	8,13	11,08
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	10,45	4,77	1,48	5,57	6,61
L	Real Estate	0,54	0,69	0,76	0,66	0,22
M.N	Jasa Perusahaan	9,20	5,44	5,19	6,26	(1,57)
O	Administrasi Pemerintahan. Pertahanan & Jaminan sosial	2,70	0,17	2,31	5,77	1,50
P	Jasa Pendidikan	6,26	3,09	6,73	3,69	6,82
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,78	3,39	6,22	3,33	9,88
R.S.T.U	Jasa Lainnya	7,12	2,56	5,26	5,73	(3,22)
Pertumbuhan PDRB		5,64	6,00	6,38	6,41	(0,72)

Sumber : BPS, Kabupaten Konawe Utara Dalam Angka, Tahun 2021

Sumber utama pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Konawe Utara terutama didukung oleh kinerja pada sektor : (1) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, (2) Pertambangan dan Penggalian, (3) Konstruksi, (4) Perdagangan Besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Sumber-sumber tersebut yang mengalami laju pertumbuhan negatif dibandingkan tahun 2019.

Ditilik dari kontribusi sektoral, perekonomian Kabupaten Konawe Utara pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2019 belum mengalami perubahan dan masih didominasi oleh lima sektor ekonomi, yaitu: (1) sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 39,75 persen, menurun dibanding tahun 2019 sebesar 39,93 persen; (2) sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar 21,24 persen menurun dibanding tahun 2019 sebesar 21,49 persen, (3) sektor Konstruksi sebesar 13,68 sama dengan tahun 2019; dan (4) sektor Perdagangan Besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 11,78 persen menurun dibanding tahun 2019 sebesar 11,89 persen.



Sumber : BPS Kabupaten Konawe Utara, 2021

Gambar 2.6 Kontribusi PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020

Tabel 2.11
Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten Konawe Utara

Lapangan Usaha		PDRB	2016 (%)	PDRB	2017 (%)	PDRB	2018 (%)	PDRB	2019* (%)	PDRB	2020** (%)
		(Juta Rp.)		(Juta Rp.)		(Juta Rp.)		(Juta Rp.)		(Juta Rp.)	
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.214.892,17	41,05	1.334.559,94	40,89	1.452.563,09	40,44	1.567.801,91	39,93	1.576.457,56	39,75
B	Pertambangan dan Penggalian	568.226,73	19,2	660.701,98	20,25	746.907,95	20,79	843.652,27	21,49	842.442,58	21,24
C	Industri Pengolahan	37.699,80	1,27	40.705,49	1,25	42.118,38	1,17	44.234,56	1,13	44.635,88	1,13
D	Pengadaan listrik dan gas	77,8	0	93,56	0,00	96,29	0,00	101,87	0,00	110,33	0,00
E	Pengadaan air, Pengelolaan sampah, limbah & Daur ulang	1.276,46	0,04	1.307,93	0,04	1.324,47	0,04	1.325,93	0,03	1.394,45	0,04
F	Konstruksi	419.351,29	14,17	448.520,56	13,74	497.246,10	13,84	537.157,45	13,68	542.419,96	13,68
G	Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	331.135,45	11,19	372.032,74	11,40	417.307,92	11,62	466.857,55	11,89	467.321,43	11,78
H	Transportasi dan Pergudangan	9.602,98	0,32	10.309,40	0,32	11.167,43	0,31	11.922,20	0,30	11.923,82	0,30
I	Penyediaan Akomodasi & makan minum	5.512,77	0,19	5.963,10	0,18	6.586,22	0,18	7.265,41	0,19	7.429,31	0,19
J	Informasi dan Komunikasi	7.581,12	0,26	8.489,47	0,26	9.256,67	0,26	9.964,42	0,25	10.943,74	0,28
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	45.955,48	1,55	49.900,66	1,53	52.345,97	1,46	57.395,20	1,46	60.927,62	1,54
L	Real Estate	38.502,59	1,3	39.679,31	1,22	40.932,02	1,14	41.399,75	1,05	41.590,90	1,05
M,N	Jasa Perusahaan	1.425,52	0,05	1.542,23	0,05	1.671,43	0,05	1.832,80	0,05	1.856,95	0,05
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan sosial	158.458,05	5,35	162.060,70	4,97	173.563,95	4,83	186.515,85	4,75	194.492,16	4,90
P	Jasa Pendidikan	76.141,22	2,57	81.497,20	2,50	88.634,61	2,47	95.340,42	2,43	103.533,23	2,61
Q	Jasa Kesehatan	34.172,42	1,15	36.255,32	1,11	39.577,14	1,10	42.103,90	1,07	47.596,16	1,20
R,S,T,U	Jasa Lainnya	9.414,47	0,32	9.875,20	0,30	10.496,04	0,29	11.237,91	0,29	11.151,22	0,28
PDRB		2.959.426,32	99,98	3.263.494,79	100,00	3.591.795,68	100,00	3.926.109,40	100,00	3.966.227,30	100,00

Sumber : BPS, Kabupaten Konawe Utara Dalam Angka, Tahun 2021

Tabel 2.12
Persentase PDRB Atas Dasar Harga Konstan (2010) di Kabupaten Konawe Utara

Lapangan Usaha		PDRB	2016 (%)	PDRB	2017 (%)	PDRB	2018 (%)	PDRB	2019* (%)	PDRB	2020** (%)
		(Juta Rp.)		(Juta Rp.)		(Juta Rp.)		(Juta Rp.)		(Juta Rp.)	
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	968.856,48	40,81	1.028.370,78	40,86	1.096.508,56	40,96	1.153.598,76	40,50	1.139.739,54	40,30
B	Pertambangan dan Penggalian	465.843,30	19,62	514.710,58	20,45	554.909,37	20,73	608.224,39	21,35	593.108,86	20,97
C	Industri Pengolahan	31.374,31	1,32	32.652,28	1,3	32.894,25	1,23	33.813,48	1,19	33.388,63	1,18
D	Pengadaan listrik dan gas	76,66	0	81,74	0	83,09	0,00	86,69	0,00	91,51	0,00
E	Pengadaan air, Pengelolaan sampah, limbah & Daur ulang	1.056,09	0,04	1.068,44	0,04	1.079,69	0,04	1.091,69	0,04	1.137,98	0,04
F	Konstruksi	321.081,37	13,52	330.970,67	13,15	351.201,98	13,12	372.444,90	13,07	372.322,26	13,17
G	Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	269.453,54	11,35	285.771,97	11,36	305.423,36	11,41	329.006,02	11,55	324.452,84	11,47
H	Transportasi dan Pergudangan	8.756,77	0,37	9.162,62	0,36	9.664,87	0,36	10.038,06	0,35	9.884,79	0,35
I	Penyediaan Akomodasi & makan minum	4.292,15	0,18	4.492,66	0,18	4.800,30	0,18	5.159,24	0,18	5.147,81	0,18
J	Informasi dan Komunikasi	7.692,63	0,32	8.437,28	0,34	9.098,76	0,34	9.838,80	0,35	10.929,06	0,39
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	34.040,32	1,43	35.664,22	1,42	36.191,36	1,35	38.209,03	1,34	40.734,41	1,44
L	Real Estate	33.489,60	1,41	33.720,68	1,34	33.976,62	1,27	34.202,07	1,20	34.277,72	1,21
M,N	Jasa Perusahaan	1.203,21	0,05	1.268,61	0,05	1.334,45	0,05	1.418,05	0,05	1.395,84	0,05
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan sosial	125.377,16	5,28	125.590,30	4,99	128.491,44	4,80	135.905,39	4,77	137.939,95	4,88
P	Jasa Pendidikan	64.869,72	2,73	66.875,29	2,66	71.376,00	2,67	74.009,77	2,60	79.056,24	2,80
Q	Jasa Kesehatan	28.512,53	1,2	29.479,10	1,17	31.312,70	1,17	32.356,46	1,14	35.553,28	1,26
R,S,T,U	Jasa Lainnya	8.032,83	0,34	8.238,52	0,33	8.671,48	0,32	9.168,73	0,32	8.873,50	0,31
PDRB		2.374.008,67	99,97	2.516.555,74	100,00	2.677.018,28	100,00	2.848.571,53	100,00	2.828.034,22	100,00

Sumber : BPS, Kabupaten Konawe Utara Dalam Angka, Tahun 2021

Dari Tabel 2.11 dapat dilihat bahwa empat kategori lapangan usaha yang memiliki kontribusi terbesar adalah lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan; lapangan usaha pertambangan dan penggalian; lapangan usaha konstruksi; lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Oleh sebab itu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, maka program kegiatan dapat diarahkan pada sektor tersebut.

Tabel 2.13.
Perkembangan Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
di Kabupaten Konawe Utara

Lapangan Usaha		2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	41,05	40,89	40,44	39,93	39,75
B	Pertambangan dan Penggalian	19,2	20,25	20,79	21,49	21,24
C	Industri Pengolahan	1,27	1,25	1,17	1,12	1,13
D	Pengadaan listrik dan gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Pengadaan air, Pengelolaan sampah, limbah, dan Daur ulang	0,04	0,04	0,04	0,03	0,04
F	Konstruksi	14,17	13,74	13,84	13,68	13,68
G	Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	11,19	11,4	11,62	11,89	11,78
H	Transportasi dan Pergudangan	0,32	0,32	0,31	0,3	0,3
I	Penyediaan Akomodasi dan makan minum	0,19	0,18	0,18	0,19	0,19
J	Informasi dan Komunikasi	0,26	0,26	0,26	0,25	0,28
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,55	1,53	1,46	1,46	1,54
L	Real Estate	1,3	1,22	1,14	1,05	1,05
M,N	Jasa Perusahaan	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan sosial	5,35	4,97	4,83	4,75	4,9
P	Jasa Pendidikan	2,57	2,5	2,47	2,43	2,61
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,15	1,11	1,1	1,07	1,2
R,S,T,U	Jasa Lainnya	0,32	0,3	0,29	0,29	0,28
TOTAL PERSENTASE PDRB		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS, Kabupaten Konawe Utara Dalam Angka, Tahun 2021

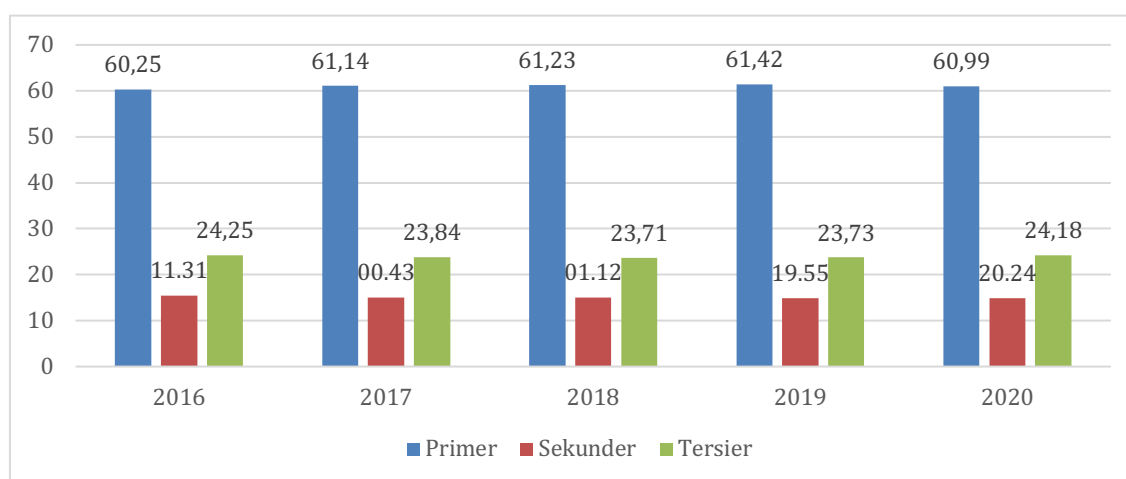
Dalam jangka waktu lima tahun terakhir kontribusi sektor pertanian sebagai penyumbang terbesar terhadap perekonomian Kabupaten Konawe Utara menunjukkan *trend* perlambatan. Namun sektor pertambangan dan penggalian menunjukkan pertumbuhan dan kontribusi yang sangat signifikan. Perlambatan yang

terjadi pada lapangan usaha pertanian sebagai salah satu sektor primer, menunjukkan bahwa sektor sekunder dan tersier semakin mempengaruhi aktivitas perekonomian Kabupaten Konawe Utara.

2.2.1.3 Struktur Ekonomi

Kondisi perekonomian Kabupaten Konawe Utara pada tahun 2020 dari sisi transformasi struktural yaitu pergeseran struktur ekonomi yang ditandai dengan pergeseran peranan lapangan usaha pada tiga sektor nampaknya tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun sebelumnya. Ketiga sektor tersebut adalah :

1. Sektor primer (60,99%) yang terdiri dari lapangan usaha (1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; dan (2) Pertambangan dan Penggalan;
2. Sektor sekunder (20,24%) yang terdiri dari lapangan usaha (1) Industri Pengolahan; (2) Pengadaan Listrik dan Gas; (3) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang dan (4) Konstruksi.;
3. Sektor tersier (24,18%) yang terdiri dari lapangan usaha (1) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor; (2) Transportasi dan Pergudangan; (3) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; (4) Informasi dan Komunikasi; (5) Jasa Keuangan; (6) Real Estate; (7) Jasa Perusahaan; (8) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; (9) Jasa Pendidikan ; (10) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dan (11) Jasa lainnya.



Sumber : BPS Kabupaten Konawe Utara, 2021

**Gambar 2.7 Struktur Ekonomi Kabupaten Konawe Utara
Tahun 2016 - 2020**

2.2.1.4 PDRB Perkapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB perkapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut.

Nilai PDRB perkapita Kabupaten Konawe Utara sejak tahun 2016-2019 senantiasa mengalami kenaikan, namun mengalami penurunan di tahun 2020. Pada Tahun 2020, PDRP perkapita Kabupaten Konawe Utara mengalami penurunan sebesar 1,10 persen dibanding tahun 2019, dari 61.523.002 menjadi 60.847.572. Pandemi covid-19 yang melanda dunia termasuk Kabupaten Konawe Utara mengakibatkan berbagai proses perekonomian tidak berjalan sebagaimana mestinya. Menurunnya aktivitas perekonomian ini mengakibatkan turunnya PDRB Perkapita Kabupaten Konawe Utara. Meskipun demikian, jika dilihat dari dua tahun terakhir, yaitu dari tahun 2018 sampai tahun 2020, PDRB per kapita mengalami peningkatan sebesar 5,72 persen, dari 57.558.060 pada tahun 2018 menjadi 60.847.572 pada tahun 2020.

Tabel 2.14.
Perkembangan PDRB Perkapita di Kabupaten Konawe Utara

Tahun		Harga Berlaku		Harga Konstan (2010)	
		Nilai (Rp.)	Pertumbuhan (%)	Nilai (Rp.)	Pertumbuhan (%)
1	2016	49.594.059,62	7,14	39.783.631,63	3,39
2	2017	53.601.845,97	8,08	41.333.613,59	3,90
3	2018	57.558.060,83	7,40	42.898.871,53	3,82
4	2019	61.523.002,95	6,89	44.638.661,11	4,05
5	2020	60.847.572,37	(1,10)	43.386.070,14	(2,81)
Rata-rata		56.624.908,35	5,68	42.408.169,60	2,47

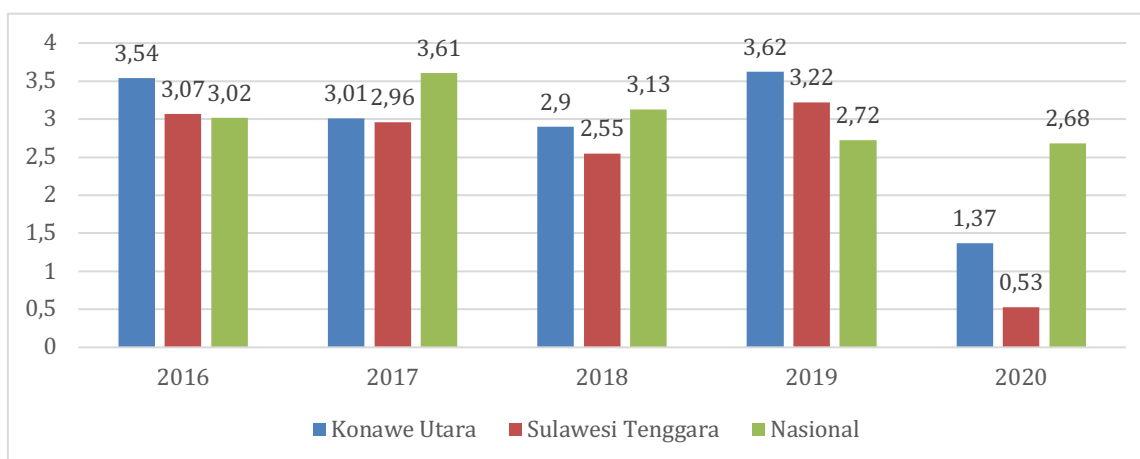
Sumber : PDRB Kab. Konawe Utara Menurut Pengeluaran Tahun 2016-2020

PDRB perkapita Kabupaten Konawe Utara menunjukkan peningkatan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 baik secara nominal maupun laju pertumbuhannya yang selalu bernilai positif. Meskipun tahun 2020 mengalami penurunan, jika dilihat dari lima tahun terakhir mengalami peningkatan sebesar

22,69 persen, pada tahun 2016 hanya sebesar 49.594.059 meningkat menjadi 60.847.572 pada tahun 2020. Peningkatan ini jauh lebih besar daripada peningkatan jumlah penduduk sebesar 9,23 persen. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Kabupaten Konawe Utara rata-rata mampu menciptakan PDRB atau nilai tambah sebesar nilai per kapita di masing-masing tahun tersebut.

2.2.1.5 Laju Inflasi

Inflasi menggambarkan kenaikan/penurunan harga dari sekelompok barang dan jasa yang berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Laju inflasi Kabupaten Konawe Utara mengalami penurunan dari 3,62 persen pada tahun 2019 menjadi 1,37 persen pada tahun 2020. Angka tersebut relatif lebih tinggi apabila dibandingkan dengan laju inflasi Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu 0,53 persen, namun relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan inflasi nasional sebesar 2,68%.



Sumber : BPS Kabupaten Konawe Utara, 2021

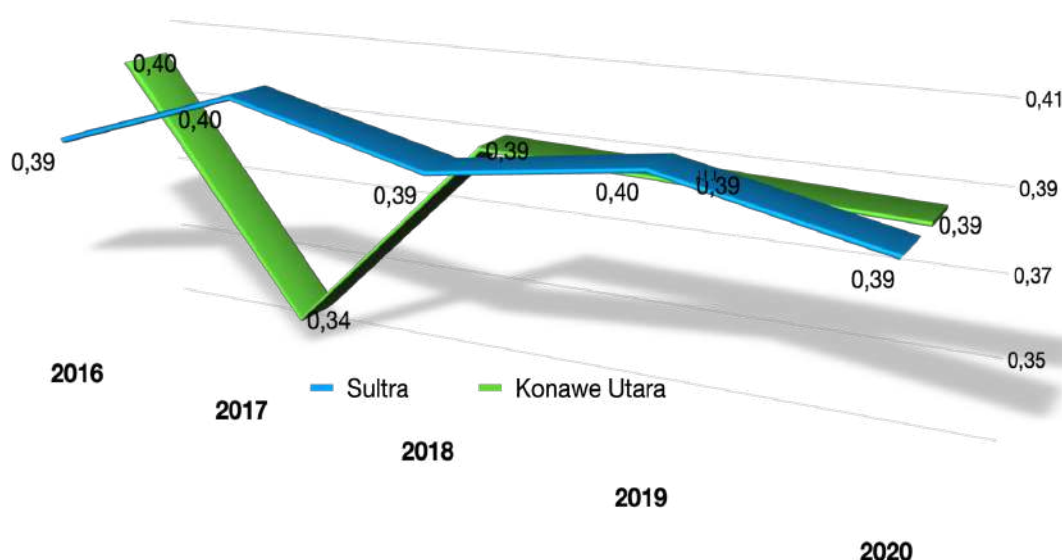
Gambar 2.8 Perkembangan Laju Inflasi Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016 - 2020

Inflasi di bawah 10% per tahun termasuk ke dalam kriteria inflasi ringan, yang mempunyai dampak positif dalam arti dapat mendorong perekonomian lebih baik (meningkatkan pendapatan dan investasi). Keberhasilan ini dipengaruhi oleh strategi efektif yang dilakukan oleh Tim Pemantau dan Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Konawe Utara melalui; 1). Upaya menjaga keterjangkauan harga; 2). Menjaga ketersediaan pasokan bahan kebutuhan pokok, cadangan pangan pemerintah daerah dan kelembagaan; 3). Mendorong kelancaran distribusi melalui kerja sama perdagangan antar daerah dan meningkatkan infrastruktur perdagangan;

serta 4). Melakukan komunikasi efektif dengan perbaikan kualitas dan validitas data.

2.2.1.6 Koefisien Gini

Koefisien Gini merupakan salah satu indikator untuk mengetahui distribusi dan ketimpangan pendapatan penduduk. Tingkat ketimpangan pendapatan dapat dilihat melalui koefisien gini yang berkisar antara 0 dan 1. Semakin mendekati 0 artinya distribusi pendapatan semakin merata. Sebaliknya, semakin mendekati 1 artinya distribusi pendapatan semakin timpang. Gambaran Perkembangan Koefisien Gini Kabupaten Konawe Utara tahun 2016-2020 dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Tenggara disajikan pada grafik berikut:



Sumber : BPS Kabupaten Konawe Utara, 2021

Gambar 2.9 Distribusi Pendapatan Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016-2020

Berdasarkan data yang dihimpun oleh BPS Kabupaten Konawe Utara, Indeks Gini Kabupaten Konawe Utara dari tahun 2016-2020 mengalami perubahan yang fluktuatif. Dimana Indeks Gini pada tahun 2020 lebih rendah dari tahun 2018 dan 2019. Indeks Gini di Kabupaten Konawe Utara tahun 2020 diharapkan bisa diturunkan dengan mendorong empat kategori lapangan usaha yang memiliki kontribusi terbesar di Kabupaten Konawe Utara, yaitu lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan; lapangan usaha pertambangan dan penggalian; lapangan usaha penyediaan konstruksi; dan lapangan usaha perdagangan besar dan eceran.

2.2.1.7 Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan adalah ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non makanan (diukur dari sisi pengeluaran). Kebutuhan dasar makanan merupakan pengeluaran untuk memenuhi konsumsi 2.100 kkal perkapita perhari (52 jenis komoditi), sedang kebutuhan dasar non makanan merupakan kebutuhan minimum perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan dan lainnya (51 jenis komoditi non makanan di perkotaan dan 47 jenis komoditi non makanan di pedesaan).

Tabel 2.15.
Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Konawe Utara

Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	Persentase Penduduk Miskin/Po (%)	Garis Kemiskinan/GK (Rp/Kap/Bln)
2012	53.657	6.400	11,78	206.472
2013	54.752	5.900	10,62	207.521
2014	57.077	5.828	10,15	208.232
2015	58.401	5.810	9,97	216.578
2016	59.673	5.790	9,75	232.307
2017	60.884	8.440	13,93	244.391
2018	62.017	8.818	14,22	260.861
2019	63.814	8.670	13,59	273.544
2020	67.871	8.780	13,53	305.100

Sumber : BPS, Kabupaten Konawe Utara Dalam Angka, Tahun 2021

Dari tahun 2011 sampai dengan 2017 tingkat kemiskinan menunjukkan kecenderungan menurun, kemudian mengalami peningkatan kembali di tahun 2018 menjadi 14,22%. Pada tahun 2019 sampai tahun 2020 tingkat kemiskinan di Kabupaten Konawe Utara kembali menurun menjadi 13,53%, apabila dilihat dari garis kemiskinan dari tahun ke tahun terjadi peningkatan pengukuran dengan angka terakhir sebesar Rp. 305.100. Hal ini menunjukkan pengeluaran penduduk miskin dan kesenjangan antara penduduk miskin belum mengalami perbaikan kualitas.

Upaya Pemerintah Daerah dalam meningkatkan perekonomian penduduk berpendapatan menengah ke bawah akan mengurangi kesenjangan ekonomi. Namun peningkatan pemerataan pendapatan tidak hanya bisa dilakukan oleh pemerintah dengan mengalokasikan bantuan untuk masyarakat menengah ke bawah, tetapi

dukungan dari masyarakat bergolongan ekonomi tinggi sangat diperlukan. Beberapa program yang tengah digalakkan oleh pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan antara lain:

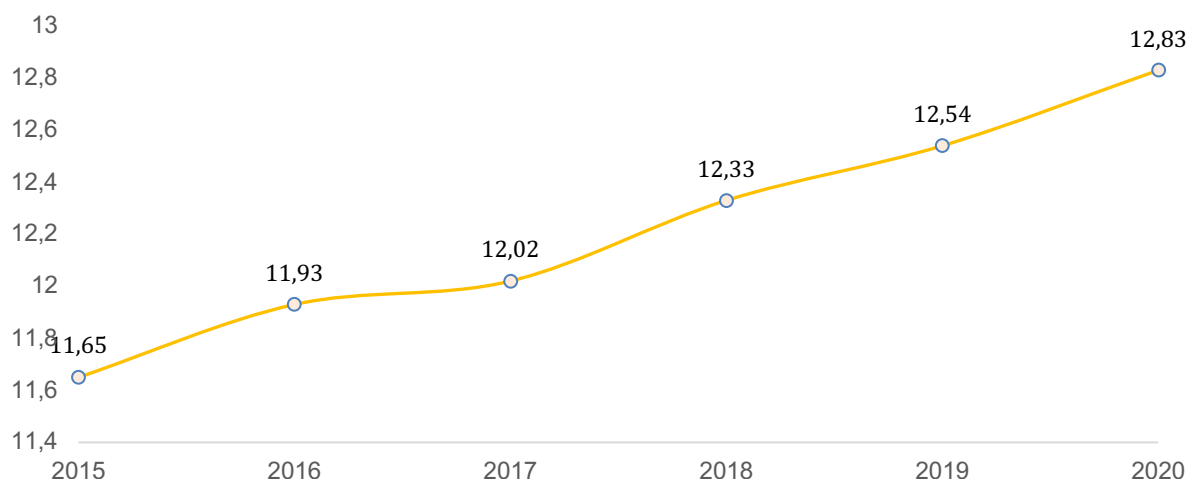
- a. Membuka peluang pertumbuhan kegiatan - kegiatan ekonomi baru yang berbasis masyarakat seperti pengembangan obyek wisata yang berbasis alam dan pengembangan usaha-usaha kuliner baru
- b. Menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok, hal ini bertujuan menjamin daya beli masyarakat miskin/keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan pokok terutama beras dan kebutuhan pokok utama selain beras;
- c. Mendorong pertumbuhan yang berpihak pada rakyat miskin dengan pemberian bantuan untuk kegiatan produktif skala usaha mikro;
- d. Memperluas cakupan program pembangunan berbasis masyarakat serta pendampingan program yang berkelanjutan;
- e. Meningkatkan akses masyarakat miskin kepada pelayanan dasar; dan
- f. Membangun serta menyempurnakan sistem perlindungan sosial bagi masyarakat miskin, seperti pemberian beras untuk warga miskin lansia.

Namun demikian program penanggulangan kemiskinan tersebut belum optimal karena keterbatasan jangkauan pelaksanaan program yang belum bisa menyeluruh. Jadi meskipun realisasi kinerja program dan keuangan telah tercapai 100% tetapi belum bisa secara signifikan mencapai target.

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

2.2.2.1 Angka Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah merupakan indikator kinerja daerah dalam bidang pendidikan. Angka Harapan Lama Sekolah digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan bidang pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

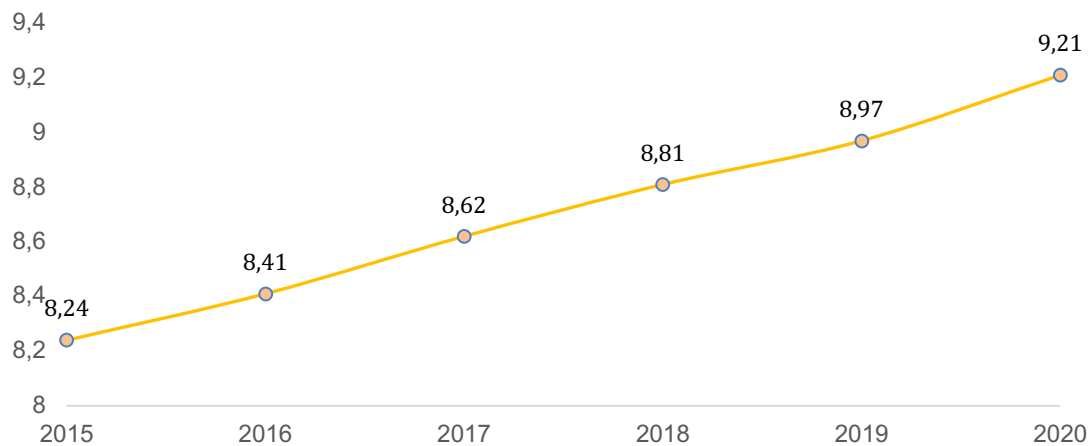


Gambar 2.10
Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Konawe Utara

Gambar 2.9 diatas menunjukkan perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Konawe Utara dari tahun 2015 sampai dengan 2020 selalu meningkat. Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Konawe Utara pada tahun 2020 sebesar 12,83 tahun meningkat dibanding tahun 2019. Hal ini berarti lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu (tujuh tahun ke atas) di masa mendatang adalah selama 12,83 tahun atau setara dengan mengenyam pendidikan sampai perguruan tinggi jenjang Diploma I. Peningkatan Angka Harapan Lama Sekolah ini tidak lepas dari upaya pemerintah untuk mengutamakan program pembangunan di bidang pendidikan.

2.2.2.2 Angka Rata - Rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Konawe Utara terus mengalami peningkatan, dari 8,24 tahun pada tahun 2015 menjadi 9,21 pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan minat penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi semakin meningkat, meskipun angka ini menunjukkan bahwa rata-rata penduduk di Kabupaten Konawe Utara bersekolah hanya setingkat SLTP.

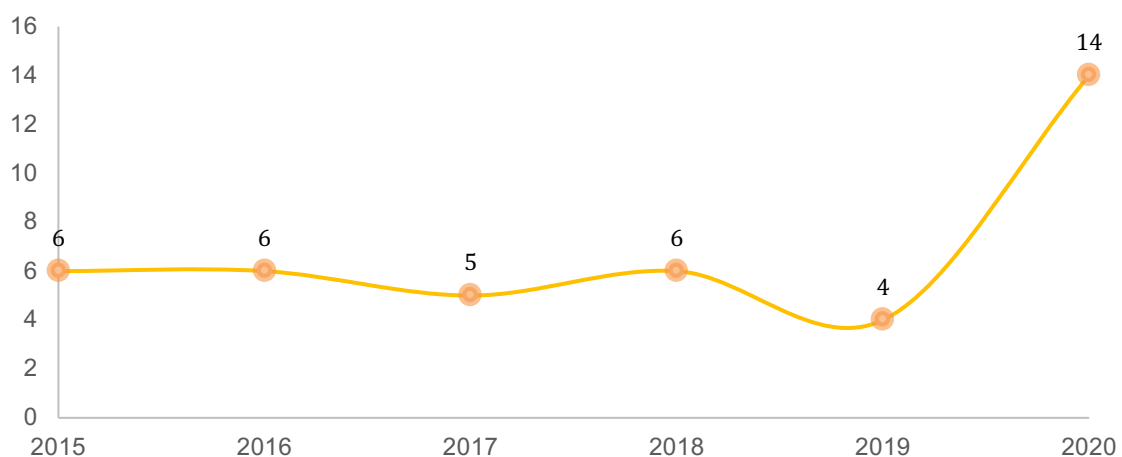


Gambar 2.11
Angka Rata - Rata Lama Sekolah di Kabupaten Konawe Utara

Peningkatan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Konawe Utara tidak lepas dari upaya pemerintah dalam menekan angka putus sekolah melalui kebijakan Beasiswa dan Bantuan Operasional Sekolah.

2.2.2.3 Angka Kematian Bayi

Angka kematian bayi dihitung dengan jumlah kematian bayi usia dibawah satu tahun dalam kurun waktu setahun per 1000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Pada tahun 2020 jumlah absolut kematian bayi sebanyak 12 kasus meningkat dibanding tahun 2019 sebesar 4 kasus. Capaian indikator Angka Kematian Bayi (AKB) pada tahun 2019 sebesar 0,004 terjadi penurunan dibanding tahun 2018 sebesar 0,006 per 1.000 kelahiran hidup

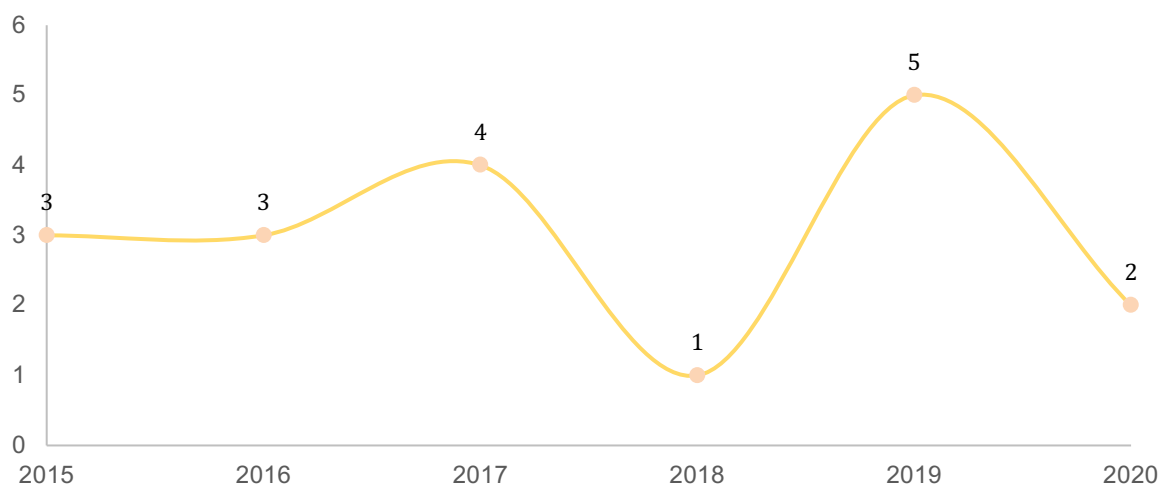


Gambar 2.12
Angka Kematian Bayi di Kabupaten Konawe Utara

Penyebab kematian bayi pada tahun 2020 terbanyak disebabkan penyakit seperti aspirasi, diare, pendarahan, intrakranial dan penyakit lainnya. Upaya yang dapat dilakukan untuk menurunkan AKB antara lain meningkatkan peran serta masyarakat melalui keterpaduan lintas program yaitu program pencegahan penyakit melalui imunisasi pada bayi dan program perbaikan gizi masyarakat serta dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas sumberdaya di fasilitas pelayanan kesehatan ibu dan anak.

2.2.2.4 Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu (AKI) dihitung dari jumlah kematian ibu maternal (hamil, melahirkan, dan nifas), bukan karena sebab kecelakaan ataupun penyakit lainnya. Capaian angka kematian ibu pada tahun 2020 sebesar 0,002 per 100.000 kelahiran hidup (2 kasus kematian ibu) turun dibandingkan tahun 2019 sebesar 0,005 per 100.000 kelahiran hidup (5 kasus kematian ibu).



Gambar 2.13
Angka Kematian Ibu di Kabupaten Konawe Utara

Penyebab kematian ibu antara lain adanya perdarahan dan Pre Eklampsia, serta penyebab lain-lain. Upaya mempercepat penurunan kematian ibu memerlukan keterpaduan lintas program, yaitu program perbaikan gizi masyarakat, khususnya pada ibu hamil melalui Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pemulihan bagi ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK) ibu hamil, program pencegahan penyakit, program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat melalui penyiapan masyarakat dalam desa siaga, ambulan desa, dan donor darah, partisipasi masyarakat melalui pemberdayaan kader kesehatan untuk pendampingan ibu hamil resiko tinggi dan

pengenalan deteksi dini resiko ibu hamil resiko tinggi, peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan serta sumber daya manusia, dan peningkatan Puskesmas mampu Penanganan Obstetri Neonatal Emergency Dasar (PONED) serta pelaksanaan Jaminan Persalinan (Jampersal).

2.2.2.5 Angka Harapan Hidup

Derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Konawe Utara di wujudkan dalam IKU Bupati yaitu Angka Harapan Hidup (AHH). Angka Harapan Hidup Kabupaten Konawe Utara dari tahun ke tahun mengalami peningkatan.



Gambar 2.14
Angka Harapan Hidup di Kabupaten Konawe Utara

Gambar diatas menunjukkan AHH Kabupaten Konawe Utara pada tahun 2020 yaitu 68,98 tahun. Peningkatan AHH ini dipengaruhi oleh multifaktor, antara lain faktor kesehatan yang menjadi salah satu faktor yang berperan penting di dalamnya. Secara berjenjang indikator AHH di dukung oleh Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Utara yaitu Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi, Prevalensi Balita Gizi Buruk, Prevalensi HIV /AIDS, dan Angka Kesakitan (Incidence Rate/ IR) DBD.

Penyakit tidak menular (PTM) juga mempengaruhi pencapaian indikator AHH. Kelompok Penyakit Tidak Menular (PTM), seperti stroke, diabetes mellitus, kanker, hipertensi merupakan kelompok penyakit penyebab kematian terbanyak di Indonesia, dengan kecenderungan meningkat. Peningkatan PTM jelas berdampak negatif pada produktivitas masyarakat. Di sisi lain, penyakit menular masih

merupakan masalah kesehatan. Kondisi morbiditas dan mortalitas PTM makin meningkat disertai dengan masih banyaknya penyakit menular di masyarakat, akan menjadikan beban ganda dalam pelayanan kesehatan sekaligus tantangan yang harus dihadapi dalam pembangunan bidang kesehatan di Indonesia. Untuk itu penanganan penyakit menular dan tidak menular harus dilakukan secara komprehensif dan sistematis.

2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Analisis kinerja atas seni budaya dan olahraga dilakukan terhadap indikator - indikator jumlah grup kesenian, jumlah klub olahraga dan jumlah sarana olahraga.

Tabel 2.16.
Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga
Kabupaten Konawe Utara

No.	Capaian Pembangunan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah grup kesenian	1	2	2	2	2
2.	Jumlah gedung kesenian	1	1	1	1	1
3.	Jumlah klub olahraga	17	20	20	69	21
4.	Jumlah sarana olahraga	247	267	294	294	282

Sumber : Dispora Konawe Utara, Tahun 2021

Pembangunan di bidang pemuda dan olahraga di Kabupaten Konawe Utara dapat dilihat dari semakin banyak jumlah organisasi dan prestasi olahraga yang dicapai oleh Kabupaten Konawe Utara baik tingkat provinsi maupun nasional meskipun jumlah klub dan gedung olahraga yang ada masih terbatas. Pada Pekan olahraga tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2010 Kabupaten Konawe Utara menduduki peringkat 14, pada tahun 2014 peringkat 11, dan pada tahun 2018 peringkat 6 dari 17 kabupaten/kota. Melihat kelompok/organisasi olahraga yang semakin berkembang dan munculnya jenis olahraga baru yang dipertandingkan perlu upaya pemerintah dalam mengembangkan potensi sumberdaya manusia olahraga yaitu pelatih, wasit, pembina, klub olahraga dan atlet. Selain itu juga perlu melengkapi sarana dan prasarana olahraga yang dapat dimanfaatkan untuk latihan maupun pertandingan

2.3 ASPEK LAYANAN UMUM

2.3.1. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

2.3.1.1 Pendidikan

1) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar, melalui jalur pendidikan formal, non formal, dan/atau informal. Pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal meliputi TK dan RA, sedangkan jalur pendidikan non formal meliputi Kelompok Bermain (KB), TPA, dan satuan PAUD sejenis.

Tabel 2.17.
Kondisi PAUD di Kabupaten Konawe Utara

No.	Nama Lembaga	Jumlah		Jumlah Peserta Didik	Jumlah Guru
		Negeri	Swasta		
1.	TK	12	76	3.099	245
2.	KB	-	-	-	-
3.	TPA	-	-	-	-

Sumber : Dinas P & K Kab. Konawe Utara, Tahun 2021

Tabel 2.17 menunjukkan bahwa Lembaga PAUD yang dikelola swasta di Kabupaten Konawe Utara cukup banyak sehingga dapat membantu dalam peningkatan Pendidikan PAUD di Kabupaten Konawe Utara. Pada tahun 2020 pemerintah Kabupaten Konawe Utara telah memberikan insentif pada 245 pendidik PAUD non formal untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik.

2) Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Wajib belajar sembilan tahun yang merupakan kewenangan pemerintah Kabupaten adalah pendidikan dasar jenjang SD dan SMP.

a. Kondisi Pendidikan Dasar

Gambaran kondisi yang mendukung keberhasilan wajib belajar sembilan tahun disajikan pada Tabel 2.18 yang menunjukkan bahwa lembaga pendidikan dan tenaga pendidikan di Kabupaten Konawe Utara dalam rangka penuntasan wajib belajar sembilan tahun secara kuantitas telah cukup memadai. Jumlah guru SD yang telah bersertifikat pendidik profesional adalah 269 orang atau 30,64% dari total guru (PNS, guru tetap yayasan, dan GTT SD). Sementara itu, guru SMP yang telah bersertifikat pendidik profesional sejumlah 138 orang atau 30,20% dari total guru PNS, GTY, dan GTT. Angka tersebut menunjukkan bahwa diperlukan peningkatan sertifikasi guru guna mewujudkan profesionalitas kinerja pendidik di Kabupaten Konawe Utara. Selanjutnya disaat bersamaan diperlukan pula perhatian terhadap peningkatan kesejahteraan bagi guru GTT dan PTT.

Tabel 2.18.
Kondisi Pendidikan Dasar di Kabupaten Konawe Utara
Tahun 2020

Lembaga Pendidikan	Sekolah		Jumlah Siswa	Rasio Guru/Murid	Guru			Rasio Guru/Sekolah
	Negeri	Swasta			Jumlah	Sertifikasi	%	
1. SD	104	-	8.239	10,66	878	269	30,64	8,44
2. MI	-	-	-	-	-	-	-	-
3. SMP	35	1	3.730	12,25	457	138	30,20	12,69
4. MTs	4	-	521	11,71	61	-	-	-
5. SMA	11	-	3.125	6,34	198	-	-	-
6. SMK	3	2	327	14,68	48	-	-	-
7. MA	-	2	229	12,23	28	-	-	-
Jumlah	157	5	16.171	10,33	1.670	407		

Sumber : Dinas P & K Kab. Konawe Utara, Tahun 2021

b. Tingkat Kelulusan SD dan SMP

Tingkat kelulusan jenjang SD/MI dan SMP/MTs pada lima tahun terakhir hingga tahun 2020 mencapai 100%, sesuai dengan target yang dicanangkan pada tahun 2020. Dalam kaitannya dengan angka putus sekolah, segala upaya telah dilakukan untuk meniadakan anak putus sekolah. Angka putus sekolah pada tahun 2020 untuk jenjang SD/MI sebesar 0,01% dan jenjang SMP/MTs tahun 2020 sebesar 0,02%.

c. Biaya Operasional Pendidikan (BOP)

BOP Kabupaten Konawe Utara diberikan untuk tiap siswa SD/MI sebesar Rp.350.000,- per siswa per tahun sedangkan untuk tiap siswa SMP Negeri sebesar Rp.500.000,- per siswa per tahun dan siswa SMP Swasta diberikan Rp.450.000,- per siswa per tahun. Selain itu untuk siswa miskin SD/MI diberikan dana bantuan sebesar Rp.450.000,- per siswa per tahun dan siswa miskin SMP sebesar Rp.750.000,- per siswa per tahun.

d. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Pada tabel berikut ini diuraikan Angka Partisipasi Sekolah (APS) dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, dimana pada tabel tersebut digambarkan bahwa ada kecenderungan menurunnya partisipasi sekolah pada jenjang yang lebih tinggi. Peningkatan APS dapat ditunjang dengan pembangunan infrastruktur pendidikan seperti pembangunan gedung sekolah yang dilengkapi dengan laboratorium dan perpustakaan serta penambahan tenaga pengajar.

Tabel 2.19.
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS)
di Kabupaten Konawe Utara

No.	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	APS Penduduk Usia 7 - 12 th	97,11	99,19	99,21	99,21	99,28
2.	APS Penduduk Usia 13 - 15 th	78,86	79,90	80,38	93,43	94,24
3.	APS Penduduk Usia 15 - 18 th	53,83	53,91	54,91	74,92	73,47

Sumber : BPS, Kab. Konawe Utara Dalam Angka, 2017 s.d 2021

e. Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai 100 persen. Secara umum, APM akan selalu lebih rendah dari APK karena

APK memperhitungkan jumlah penduduk di luar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Pada Tahun 2020, APM SD/MI Kabupaten Konawe Utara sebesar 97,70 meningkat dari tahun 2019 sebesar 97,53. Data ini menunjukkan bahwa 98 dari 100 anak usia 7-12 tahun di Kabupaten Konawe Utara bersekolah tepat waktu di jenjang SD/ sederajat.

Tabel 2.20.
Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK)
Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019 - 2020.

No.	Jenjang Pendidikan	Angka Partisipasi Murni		Angka Partisipasi Kasar	
		2019	2020	2019	2020
1.	SD/MI	97,53	97,70	109,25	107,97
2.	SMP/MTs	76,95	77,64	85,34	87,10
3.	SMA/SMK/MA	62,92	63,41	86,81	87,74

Sumber : BPS, Kab. Konawe Utara Dalam Angka, 2017 s.d 2021

f. Akreditasi sekolah

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) secara eksplisit disebutkan pada pasal 60 Ayat 2, bahwa Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik. Sebagai tindak lanjut amanah konstitusi tersebut pemerintah menetapkan kebijakan mutu yang tertuang dalam PP Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 19 Tahun 2005 Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang dijadikan dasar penetapan variabel, indikator, dan butir penilaian dalam instrumen penilaian akreditasi.

Pada Tahun 2020, jumlah Sekolah Dasar yang terakreditasi A sebanyak 1 sekolah dan terakreditasi B sebanyak 17 Sekolah. Untuk Sekolah Menengah Pertama, jumlah sekolah terakreditasi A sebanyak 4 sekolah dan terakreditasi B sebanyak 11

Sekolah. Persentase sekolah terakreditasi minimal B dapat dilihat pada Tabel 2.21 berikut.

Tabel 2.21.
Sekolah Terakreditasi
Kabupaten Konawe Utara

No.	Jenjang Pendidikan	Akreditasi				Total	Persentase Terakreditasi Minimal B
		A	B	C	Belum Terakreditasi		
1.	SD/MI	1	17	32	54	104	17,31
2.	SMP/MTs	4	11	12	9	36	41,67

Sumber : BPS, Kab. Konawe Utara Dalam Angka, 2017 s.d 2021

3) Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan

Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelaksanaan SPM bidang Pendidikan di Kabupaten Konawe Utara telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan dalam mengukur capaian SPM.

Tabel 2.22.
Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan
Kabupaten Konawe Utara

NO	Kelompok Usia	Jumlah Anak	Sedang Bersekolah					ATS	Capaian SPM (%)
			TK/RA/ Sederajat	SD/MI/ Sederajat	SMP/MTs/ Sederajat	Kesetaraan	Jumlah		
1	5-6 tahun	2.898	1.831	1	-	1	1.833	-	63,25%
2	7-12 tahun	8.836	51	7.576	32	6	7.665	21	86,75%
3	13-15 Tahun	4.927	-	669	3.072	29	3.770	25	76,52%

Dari tabel 2.22, dapat dilihat pelaksanaan capaian SPM bidang Pendidikan sudah dilaksanakan dengan baik pada 2 kelompok usia yaitu usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun sedangkan pada Kelompok usia 5-6 tahun pelaksanaan masih belum maksimal, sehingga Pemerintah Kabupaten Konawe Utara melaksanakan berbagai

upaya dalam meningkatkan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal bidang Pendidikan.

2.3.1.2 Kesehatan

1) Pelayanan Kesehatan

a. Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) per Satuan Balita

Posyandu merupakan wadah peran serta masyarakat untuk memberikan dan memperoleh pelayanan kesehatan dasar, maka strategi operasional pemeliharaan dan perawatan kesejahteraan ibu dan anak secara dini dapat dilakukan di setiap posyandu. Idealnya satu Posyandu melayani 100 Balita. Keberadaan posyandu berperan untuk mendukung penurunan Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (ibu Hamil, melahirkan dan nifas), pembudayaan NKKBS, peningkatan peran serta dan kemampuan masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dan KB, dan sebagai wahana gerakan reproduksi keluarga sejahtera.

Tabel 2.23.
Rasio Posyandu per 1000 Balita
Di Kabupaten Konawe Utara

No.	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah Posyandu	147	164	170	155	158
2.	Jumlah Balita	1.355	7.368	7.517	7.575	7.482
3.	Rasio	108,49	22,26	22,62	20,46	21,12

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Utara, 2021

Dari Tabel 2.23 dapat diketahui bahwa pada tahun 2020 rasio Posyandu per 1000 Balita sebesar 21,12 berarti dalam 1000 Balita terdapat 21 Posyandu.

b. Ketersediaan Fasilitas Kesehatan

Keberhasilan program pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan dapat diketahui dengan semakin meningkatnya kuantitas dan kualitas fasilitas pelayanan kesehatan oleh pemerintah dan swasta, dengan demikian diharapkan lebih banyak kemudahan akses masyarakat untuk mendapat pelayanan kesehatan.

Setiap 240.000 penduduk harus tersedia satu unit RS sebagaimana diatur dalam Kepmen Permukiman dan Prasarana Wilayah nomor 534/KPTS/M/2001. Jumlah penduduk

Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020 sebanyak 67.871 jiwa, hal ini menunjukkan ketersediaan rumah sakit di Kabupaten Konawe Utara telah mencukupi.

Tabel 2.24.
Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan
di Kabupaten Konawe Utara

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Rumah Sakit	1	1	1	1	1
2.	Puskesmas	15	22	22	22	22
3.	Puskesmas Pembantu	22	10	10	40	36
4.	Poskedes	10	5	5	5	5
5.	Polindes	7	7	7	7	7
6.	Posyandu	147	164	170	155	158
7.	Praktek Dokter	1	1	1	1	1
8.	Praktek Bidan	1	1	1	1	1
9.	Apotek	3	3	3	3	7

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Utara, 2021

Akreditasi puskesmas di Kabupaten Konawe Utara mulai dijalankan tahun 2017. Dari 22 puskesmas, saat ini sudah 16 puskesmas telah terakreditasi, 4 puskesmas diantaranya yaitu puskesmas Tetewatu, Lasolo, Matandahi, Motui telah berstatus akreditasi utama.

Tabel 2.25.
Penilaian Akreditasi Puskesmas
di Kabupaten Konawe Utara

No.	Nama Puskesmas	Jenis Puskesmas	2017	2018	2019	Status
1.	Andeo	Non Rawat Inap	√			Madya
2.	Andowia	Non Rawat Inap	-	-	-	
3.	Asera	Non Rawat Inap		√		Madya
4.	Lamparinga	Non Rawat Inap			√	Madya
5.	Landawe	Non Rawat Inap		√		Madya
6.	Langgikima	Non Rawat Inap		√		Madya
7.	Langgikima Pesisir	Non Rawat Inap				
8.	Laronanga Pantai	Non Rawat Inap				
9.	Lasolo	Rawat Inap	√			Utama
10.	Lasolo Kepulauan	Non Rawat Inap				
11.	Lembo	Non Rawat Inap		√		

No.	Nama Puskesmas	Jenis Puskesmas	2017	2018	2019	Status
12.	Matandahi	Rawat Inap	√			Utama
13.	Molawe	Non Rawat Inap		√		
14.	Motui	Rawat Inap		√		Utama
15.	Oheo	Non Rawat Inap				
16.	Paka Indah	Non Rawat Inap			√	Madya
17.	Sawa	Non Rawat Inap		√		Madya
18.	Tapungaya	Non Rawat Inap		√		Madya
19.	Tetewatu	Non Rawat Inap			√	Utama
20.	Wanggudu Raya	Non Rawat Inap				
21.	Wawolesea	Non Rawat Inap		√		Madya
22.	Hialu	Non Rawat Inap			√	Madya

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Utara, 2021

Akreditasi puskesmas bertujuan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat, sarana dan prasarana puskesmas sampai dengan kinerja para tim medis sesuai standar prosedur. Manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat yang mendapat pelayanan di tempat tersebut. Pemerintah daerah berkomitmen untuk meningkatkan status akreditasi seluruh puskesmas di Kabupaten Konawe Utara menjadi akreditasi paripurna. Untuk itu peningkatan fasilitas sarana dan parasana, serta tenaga kesehatan akan terus ditingkatkan.

c. Rasio Puskesmas, Pustu, Poskesdes, Polindes

Angka rasio jumlah puskesmas, poliklinik dan puskesmas pembantu (pustu) per jumlah penduduk mengalami perubahan seiring dengan jumlah penduduk yang bertambah dari tahun 2016 - 2020. Angkanya berkisar antara 0,07 (tahun 2016) sampai 0,10 (tahun 2020).

Tabel 2.26.
Rasio Jumlah Puskesmas, Pustu, Poskesdes, Polindes
di Kabupaten Konawe Utara

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Puskesmas, Pustu, Poskesdes, Polindes	44	45	45	45	70
2.	Jumlah Penduduk	59.673	60.884	62.017	63.814	67.871

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
3.	Rasio	0,07	0,04	0,07	0,07	0,10

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Konawe Utara Dalam, 2021

d. Tenaga Kesehatan

Ketersediaan tenaga kesehatan yang disertai dengan peningkatan ketersediaan fasilitas kesehatan tentunya akan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Tabel 2.27.
Jumlah Tenaga Kesehatan
di Kabupaten Konawe Utara

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Dokter Spesialis	6	1	-	-	-
2.	Dokter Umum	28	11	33	14	9
3.	Dokter Gigi	4	7	5	5	5
4.	Bidan	152	187	192	192	143
5.	Perawat	236	76	69	69	68
6.	Apoteker	27	2	18	18	15

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Konawe Utara, 2021

Secara khusus, ketersediaan tenaga kesehatan erat kaitannya dengan rasio dokter per jumlah penduduk. Rasio dokter per jumlah penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dibandingkan jumlah penduduk yang ada. Menurut standar sistem pelayanan kesehatan terpadu, idealnya satu dokter melayani 2.500 penduduk.

Tabel 2.28.
Rasio Jumlah Dokter Per Jumlah 1000 Penduduk
di Kabupaten Konawe Utara

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Dokter Umum, Dokter Spesialis, Dokter Gigi	38	19	38	19	14
2.	Jumlah Penduduk	58.401	60.884	62.012	63.814	67.871
3.	Rasio	0,6	0,3	0,6	0,2	0,2

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Konawe Utara, 2021

Pada Tahun 2020 rasio dokter per jumlah penduduk mencapai 0,20 per 1000 penduduk atau satu dokter melayani 2.000 penduduk. Hal ini menunjukkan masih kurangnya dokter di Kabupaten Konawe Utara. Upaya pemenuhan kebutuhan dokter dengan cara melakukan kontrak tenaga dokter.

Tabel 2.29.
Rasio Tenaga Medis Per Jumlah 1000 Penduduk
di Kabupaten Konawe Utara

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Tenaga Medis (Bidan, Perawat, dan Apoteker)	415	284	279	279	226
2.	Jumlah Penduduk	58.401	60.884	62.012	63.814	67.871
3.	Rasio	0,7	0,4	0,4	0,4	0,3

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Konawe Utara, 2021

e. Jaminan Kesehatan

Pembiayaan pelayanan kesehatan penduduk Konawe Utara melalui kepesertaan JKN pada tahun 2020 telah terdaftar sebesar 67.627 jiwa atau 99,64%, Data kepesertaan JKN Kabupaten Konawe Utara disajikan pada Tabel 2.30.

Tabel 2.30.
Data Kepesertaan Jaminan Kesehatan
di Kabupaten Konawe Utara

No.	Jenis Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	2017		2018		2019		2020	
		Peserta (jiwa)	%	Peserta (jiwa)	%	Peserta (jiwa)	%	Peserta (jiwa)	%
1.	PBI APBN	27.086	41,75	27.084	41,66	27.086	42,45	27.084	41,66
2.	PBI APBD Kab.	26.827	41,35	25.675	39,49	24.707	38,72	25.675	39,49
3.	PBI APBD Prov.	2.189	3,37	2.110	3,25	2.189	3,43	2.110	3,25
4.	Pekerja Penerima Upah (PPU)	6.677	10,29	7.564	11,63	6.677	10,46	7.564	11,63
5.	Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU)	1.239	1,91	1.672	2,57	1.239	1,94	1.672	2,57
6.	Bukan Pekerja	193	0,3	348	0,54	193	0,30	348	0,54
Jumlah Penduduk Yang Terdaftar JKN		64.211	98,96	64.453	99,13	62.091	97,30	67.627	99,64
Jumlah Penduduk Yang Belum Terdaftar JKN		673	1,04	564	0,87	1.723	2,70	244	0,36
Total Penduduk Kab. Konawe Utara		64.884	100	65.017	100	63.814	100	87.871	100

Sumber : BPJS Kesehatan Kab. Konawe Utara, 2020, diolah

Jumlah Penduduk yang belum terdaftar kepesertaan JKN sebesar 244 jiwa atau 0,36%, hal ini dapat tercapai karena pemerintah Kabupaten Konawe Utara adalah telah berkoordinasi secara intensif dengan stakeholder dan pemutakhiran data setiap bulan. Beberapa penduduk yang belum terdaftar JKN merupakan tugas pemerintah untuk mengupayakan agar semua penduduk terdaftar dalam JKN.

2) Balita Gizi Buruk

Status gizi Balita dapat diketahui dari berat badan menurut umur, yaitu membandingkan antara berat badan menurut umur ataupun panjang badannya dengan rujukan (standar) yang telah ditetapkan.

Tabel 2.31.
Jumlah Balita Gizi Buruk
di Kabupaten Konawe Utara

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Balita Yang Diukur	949	5.158	3.725	3.847	7.482
2.	Jumlah Balita Gizi Buruk	1	10	9	8	0
3.	Prevalensi Balita Gizi Buruk	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Konawe Utara, 2021

Tabel 2.32.
Jumlah Balita Pendek (stunting)
di Kabupaten Konawe Utara

No.	Uraian	Tahun		
		2018	2019	2020
1.	Jumlah Balita Yang Diukur Tinggi Badan	5.462	5.195	5.058
2.	Jumlah Balita Pendek (TB/U)	1.442	312	585
3.	Prevalensi Stunting	26,40	6,01	11,6

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Konawe Utara, 2021

Gizi buruk dapat mengarah pada stunting. Stunting adalah kondisi tubuh anak mengalami gangguan pertumbuhan sehingga menyebabkan ukuran tubuh yang lebih pendek daripada teman-teman seusianya. Kondisi stunting tidak bisa dikembalikan seperti semula. Kondisi stunting dapat dicegah, dengan memenuhi kebutuhan nutrisi sejak hamil hingga anak berusia dua tahun (periode 1000 hari pertama kehidupan).

Prevalensi stunting di Kabupaten Konawe Utara cenderung menurun, dari sebesar 26,40 pada Tahun 2018 menjadi 11,6 pada Tahun 2020. Kondisi ini masih jauh di bawah angka rata-rata prevalensi stunting nasional sebesar 27% dan akan terus terus ditekan dan dicegah secara optimal. Pemerintah Kabupaten Konawe Utara telah mendorong percepatan penurunan dan pencegahan stunting yang tertuang dalam Peraturan Bupati Konawe Utara No.17 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Stunting Di Kabupaten Konawe Utara. Hal ini sejalan dengan prioritas nasional dibidang penanggulangan dan pencegahan stunting di Indonesia sesuai dengan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10/M.PPN/HK/02/2021 tentang Penetapan Perluasan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2022.

3) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Data kesakitan terdiri dari dua sumber, yaitu bersumber dari masyarakat (community based data) dan bersumber dari sarana pelayanan kesehatan (facility based data) melalui sistem pencatatan dan pelaporan. Data kesakitan merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui derajat kesehatan masyarakat.

Penyakit tidak menular (PTM) juga mempengaruhi pencapaian indikator Angka Harapan Hidup (AHH). Kelompok Penyakit Tidak Menular (PTM), seperti stroke, Diabetes Mellitus, kanker, hipertensi merupakan kelompok penyakit penyebab kematian terbanyak di Indonesia, dengan kecenderungan meningkat. Peningkatan PTM jelas berdampak negatif pada produktivitas masyarakat. Di sisi lain, penyakit menular masih merupakan masalah kesehatan terutama wabah Covid-19. Kondisi morbiditas dan mortalitas PTM makin meningkat disertai dengan masih banyaknya penyakit menular di masyarakat, akan menjadikan beban ganda dalam pelayanan kesehatan sekaligus tantangan yang harus dihadapi dalam pembangunan bidang kesehatan di Indonesia. Untuk itu penanganan penyakit menular dan tidak menular harus dilakukan secara komprehensif dan sistematis.

Tabel 2.33.
Angka Kesakitan
di Kabupaten Konawe Utara

No.	Uraian	Kasus				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Malaria	372	469	381	62	-
2.	Tuberkulosis (TB) BTA	119	120	126	107	77
3.	Pneumonia Balita	2	3	2	2	-
4.	Kusta	7	7	6	3	-
5.	Tetanus	81	52	74	62	61
6.	Campak	125	96	101	107	105
7.	Diare	82	65	71	64	58
8.	DBD	31	32	55	26	-
9.	Hipertensi	74	63	51	42	39
10.	ISPA	194	172	120	191	154
Jumlah		1.087	1.079	987	666	494

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Konawe Utara, 2021

4) Promosi Kesehatan

Pendataan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat di tatanan rumah tangga, institusi tempat kerja, institusi pendidikan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan tempat-tempat umum. Data capaian PHBS tahun 2020 di Kabupaten Konawe Utara pada semua tatanan disajikan pada Tabel 2.34.

Tabel 2.34.
Persentase PHBS
di Kabupaten Konawe Utara

No.	Uraian	Persentase (%)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Rumah Tangga	41,21	47,14	50,27	53,00	57,53
2.	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	82,72	83,82	88,31	91,67	94,46
3.	Institusi Pendidikan	54,77	58,42	59,89	61,00	63,56
4.	Tempat Kerja	39,15	40,42	41,21	42,72	43,75
5.	Tempat - Tempat Umum	51,52	52,42	54,65	55,18	56,74

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Konawe Utara, 2021

5) Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan

Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yang ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang mengatur tahapan yang harus dilakukan pemerintah daerah dalam rangka mencapai target layanan yang ditetapkan 100 persen.

Penerapan SPM bidang kesehatan di Kabupaten Konawe Utara telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, seperti disajikan pada tabel 2.35 dengan total 12 indikator SPM yang dilaksanakan terdapat 2 indikator yang masih rendah yaitu Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus dan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat.

Tabel 2.35.
Pelaksanaan SPM Kesehatan Kabupaten Konawe Utara

NO	Uraian	Keterangan	Capaian 2020	Target 2020	Capaian SPM
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar	1714	1752	97,83
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan	1416	1672	84,69
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar	1394	1424	97,89
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita usia 12-23 bulan yang mendapat Pelayanan Kesehatan sesuai Standar + Jumlah Balita usia 24-35 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar + Balita usia 36-59 bulan	2170	2180	99,54
5.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	1615	1651	97,82
6.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Jumlah orang usia 15–59 tahun di kab/kota yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar	41508	43315	95,83
7.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali	3521	3521	98,44
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	957	1297	73,79
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah penderita diabetes mellitus usia ≥ 15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	198	361	54,85
10.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	3	28	28,57
11.	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberculosis	Jumlah orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang	97	127	76,38
12.	Pelayanan Kesehatan orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	561	573	97,91

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020

6) Upaya Promotif dan Preventif dalam Menghadapi Pandemi Covid-19

Peran tenaga kesehatan sangat penting dalam penanganan Covid-19 pada setiap level intervensi. Utamanya pada level masyarakat untuk melakukan komunikasi risiko dan edukasi masyarakat terkait protokol kesehatan untuk melawan Covid-19. Kemudian untuk melakukan contact tracing & tracking (penyelidikan kasus dan investigasi wabah), serta fasilitasi dan pemberdayaan masyarakat.

Upaya pemerintah daerah dalam menghadapi Pandemi Covid-19 sejak tahun 2020 sampai dengan saat ini tidak terlepas dari empat pilar Kesehatan yakni : Preventif, Promotif, Kuratif dan rehabilitatif. Pelaksanaan promotif dan preventif dalam pencegahan Covid-19 di Kabupaten Konawe Utara terus diupayakan di berbagai lini termasuk di desa-desa agar masyarakat dapat berperilaku bersih dan sehat di era pandemi ini. Saat ini masyarakat juga mulai menyadari akan pentingnya berperilaku hidup bersih dan sehat untuk mencegah penularan Covid 19.

Pilar preventif dan promotif dalam upaya pencegahan dan pengendalian serta kesiapsiagaan Pandemi Covid-19 di Kabupaten telah memberikan hasil yang cukup optimal, hal ini di dukung pula dengan diterbitkannya berbagai surat edaran, peraturan bupati, bahkan peraturan daerah, diantaranya yakni : Peraturan Kabupaten Konawe Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Kabupaten Konawe Utara; serta Pembentukan Unit Reaksi Cepat PPKM Kabupaten Konawe Utara.

2.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1) Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap

Jalan sebagai bagian prasarana transportasi mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi, budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan. Jalan sebagai prasarana distribusi barang dan jasa merupakan urat nadi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Oleh sebab itu jalan harus dalam kondisi mantap untuk memperlancar transportasi. Panjang jalan nasional di Kabupaten Konawe Utara sepanjang, 118 km, jalan provinsi 38,10 km, dan jalan kabupaten 699,94 km.

Tabel 2.36.
Panjang Jalan di Kabupaten Konawe Utara

No.	Jenis Permukaan	Jalan Kabupaten (km)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Aspal	114,76	119,59	128,52	136,40	136,40
2.	Pengerasan	0,45	1,30	0,80	0,15	0,15
3.	Kerikil	436,01	446,12	445,76	444,96	447,66
4.	Tanah	148,72	132,93	124,86	118,19	115,73
Jumlah		699,94	699,94	699,94	699,94	699,94

Sumber : Dinas PU Kab. Konawe Utara, 2020

Secara keseluruhan persentase kualitas jalan kabupaten dalam kondisi mantap di Kabupaten Konawe Utara sebesar 83,41%, sisanya belum mantap 16,59%.

Tabel 2.37.
Kondisi Jalan di Kabupaten Konawe Utara

No.	Tahun	Panjang (km)	Kondisi Mantap		Kondisi Belum Mantap	
			Panjang (km)	%	Panjang (km)	%
1.	2016	699,94	488,56	69,80	211,38	30,20
2.	2017	699,94	509,13	72,74	190,81	27,26
3.	2018	699,94	547,14	78,17	152,80	21,83
4.	2019	699,94	581,72	83,11	118,22	16,89
5.	2020	699,94	588,16	84,03	111,78	15,97

Sumber : Dinas PU Kab. Konawe Utara, 2021

Jalan kondisi mantap yaitu jalan aspal kondisi baik, sedang, pengerasan, dan kerikil sebaliknya kondisi belum mantap yaitu kondisi jalan rusak, rusak berat dan jalan tanah. Pada Tahun 2020 jalan kabupaten dalam kondisi mantap sepanjang 588,16 km (84,03%) naik dari tahun sebelumnya sepanjang 581,72 km (83,11%) pada Tahun 2019. Sebagian besar pemeliharaan jalan kabupaten tahun 2020 pada ruas dengan kondisi jalan sedang, dan sebagian pada kondisi jalan belum mantap (rusak dan rusak berat). Disamping itu, terdapat perubahan kondisi jalan dari mantap menjadi tidak mantap yang belum termasuk penanganan tahun 2020. Perencanaan

kedepan, pemeliharaan jalan akan diprioritaskan untuk jalan dengan kondisi tidak mantap.

2) Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik

Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi. Secara operasional, jaringan irigasi dibedakan ke dalam tiga kategori, yaitu jaringan irigasi primer, sekunder, dan tersier. Rasio jaringan irigasi adalah perbandingan panjang jaringan irigasi terhadap luas lahan pertanian. Panjang jaringan irigasi meliputi jaringan primer, sekunder dan tersier.

Dalam pengelolaan jaringan irigasi, tolok ukur keberhasilan pengelolaan adalah efisiensi dan efektifitas. Tolok ukur efisiensi dapat diwakili dengan cakupan daerah irigasi (DI) yang terlayani air irigasi sementara tolok ukur efektifitas diwakili oleh capaian saluran irigasi dalam kondisi baik.

Sampai dengan Tahun 2020, di wilayah Kabupaten Konawe Utara terdapat 22 Daerah Irigasi (DI) dengan total luas 3.941 Ha. Kondisi jaringan irigasi primer dalam kondisi baik tahun 2020 adalah 66,79% (7.698,26 m), sedangkan irigasi sekunder sebesar 69,65% (1.453,39 m). Data capaian saluran irigasi dalam kondisi baik selama lima tahun terakhir dari tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 2.38.
Kondisi Jaringan Irigasi di Kabupaten Konawe Utara

Tahun	Total Irigasi Primer (m)	Kondisi				Total Irigasi Sekunder (m)	Kondisi			
		Baik (m)	%	Rusak (m)	%		Baik (m)	%	Rusak (m)	%
2016	11.287,13	5.669,52	50,23	5.617,60	49,77	2.103,53	1.056,60	50,23	1.046,92	49,77
2017	11.346,75	5.868,70	51,72	5.478,05	48,28	2.099,35	1.261,77	60,10	837,58	39,90
2018	11.406,38	6.946,16	60,90	4.460,21	39,10	2.095,18	1.121,01	53,50	974,16	46,50
2019	11.466,00	7.059,94	61,57	4.406,06	38,43	2.091,00	1.319,64	63,10	771,36	36,89
2020	11.525,63	7.698,26	66,79	3.827,37	33,21	2.086,83	1.453,39	69,65	633,43	30,35

Sumber : Dinas PU Kab. Konawe Utara, 2021

Tabel 2.39.
Daerah Irigasi Yang Teraliri Dengan Baik
di Kabupaten Konawe Utara

No.	Tahun	Luas DI Kewenangan Kabupaten Yang Teraliri Dengan Baik (Ha)	%
1.	2016	1.949	50,23
2.	2017	2.058	53,03
3.	2018	2.587	59,75
4.	2019	2.852	61,81
5.	2020	2.650	67,23

Sumber : Dinas PU Kab. Konawe Utara, 2020

3) Perencanaan Tata Ruang

Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. Produk perencanaan tata ruang yang telah dimiliki Kabupaten Konawe Utara adalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Konawe Utara. Dokumen yang disusun telah mendapat persetujuan substansi dari Menteri Pekerjaan Umum R.I dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 20 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2012 - 2032.

Peninjauan Kembali (PK) Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2012 Kabupaten Konawe Utara tentang RTRW Kabupaten Konawe Utara Tahun 2012-2032 telah dilaksanakan pada tahun 2017 dan telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 11 tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang. Hasil rekomendasi PK RTRW yaitu dilakukan review RTRW. Namun sampai dengan tahun 2020 karena keterbatasan anggaran dan panjangnya proses penyusunan hingga penetapan, untuk itu perlu dilakukan upaya dan langkah percepatan dalam penyelesaian revisi RTRW Kabupaten Kabupaten Konawe Utara 2012-2032 pada tahun 2021, mengingat periode dokumen RPJMD Kabupaten Konawe Utara berakhir tahun 2021 dan penyusunan RPJMD harus berpedoman pada RTRW.

Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang di Kabupaten Konawe Utara menunjukkan adanya ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dengan keperuntukkannya, seperti terdapat pada tabel berikut:

Tabel 2.40.
Tingkat Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang
di Kabupaten Konawe Utara

No.	Fungsi Kawasan	Tingkat Kesesuaian (Ha)			Jumlah (Ha)	Keterangan Ketidak sesuaian
		Sesuai	Belum Sesuai	Tidak Sesuai		
A	KAWASAN LINDUNG					
1.	Kawasan Hutan Lindung	213.254,16	-	-	213.254,16	
2.	Kawasan Resapan Air	-	-	-	-	
3.	Sempadan Pantai	-	-	-	-	
4.	Sempadan Sungai	-	-	-	-	
5.	Kawasan Cagar Budaya	-	-	-	-	
	Jumlah (Ha)	213.254,16	-	-	213.254,16	
	% Terhadap Kawasan Lindung	100,00	-	-	100,00	
	% Terhadap Kawasan Kabupaten Konawe Utara	42,62	-	-	42,62	
					-	
B	KAWASAN BUDIDAYA				-	
1.	Kawasan peruntukan Hutan Produksi Terbatas (HPT)	85.986,04	34.542,56	9.782,71	130.311,31	Terjadinya penurunan status fungsi kawasan hutan
2.	Kawasan peruntukan Hutan Produksi (HP)	39.701,09	20.242,33	5.354,42	65.297,84	Terjadinya penurunan status fungsi kawasan hutan
3.	Kawasan peruntukan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK)	21.553,72	6.975,48	3.526,08	32.055,28	Terjadinya penurunan status fungsi kawasan hutan
4.	Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan	953,72	455,02	248,60	1.657,34	Terjadinya alih fungsi menjadi kawasan permukiman
5.	Kawasan peruntukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	1.500,00	-	-	1.500,00	Menunggu Pentapan RP2
6.	Kawasan peruntukan pertanian basah	2.137,39	240,88	1.019,26	3.397,53	Perubahan kawasan menjadi perkebunan
7.	Kawasan peruntukan Perkebunan Kelapa Sawit	13.336,55	1.161,44	904,01	15.402,00	Menjadi Kawasan Pertambangan

No.	Fungsi Kawasan	Tingkat Kesesuaian (Ha)			Jumlah (Ha)	Keterangan Ketidak sesuai
		Sesuai	Belum Sesuai	Tidak Sesuai		
8.	Kawasan peruntukan perkebunan tanaman rakyat	17,65	1,95	4,73	24,33	Alih fungsi menjadi kawasan perkebunan sawit
9.	Kawasan peruntukan pertambangan	14.995,18	7.172,46	5.661,36	27.829,00	Menggunakan kawasan hutan
10.	Kawasan peruntukan permukiman	6.574,89	1.389,31	1.331,98	9.296,18	Kurangnya anggaran dalam program pengembangan permukiman yang sudah diatur dalam indikasi program
11.	Kawasan peruntukan perikanan budidaya	72,89	-	13,85	86,74	Alih fungsi lahan
12.	Kawasan peruntukan peternakan	98,38	22,42	3,74	124,54	Belum maksimalnya program pengembangan peternakan
13.	Kawasan peruntukan lainnya	89,55	8,22	4,99	102,76	Belum maksimalnya pengadaan tanah untuk pembangunan lainnya
	Jumlah (Ha)	187.017,05	72.212,07	27.855,73	287.084,85	
	% Terhadap kawasan budidaya	60,32	28,01	11,68	100,01	
	% Terhadap Kawasan Kabupaten Konawe Utara	34,61	16,07	6,70	57,38	
					-	
	Total (Ha)	400.271,21	72.212,07	27.855,73	500.339,01	
	% Terhadap Kawasan Kabupaten Konawe Utara	80,00	14,43	5,57	100,00	
	Kategori	Tinggi	Sedang	Rendah		

Sumber : Bappeda, 2021

Tabel diatas menunjukkan sebagian besar ruang yang ada masih sesuai dengan keperuntukkannya yaitu 80,00%, masuk dalam kategori tinggi, namun masih

ada ketidaksesuaian sebesar 5,57%, masuk dalam kategori rendah. Hal ini dikarenakan sebagian besar pemanfaatannya belum mentaati rencana pola ruang. Upaya yang dilakukan pemda antara lain melalui kegiatan sosialisasi dan konsolidasi tanah, konsultansi serta audit pemanfaatan tanah.

2.3.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1) Jumlah Rumah dan Kekurangan Rumah serta RTLH

Rumah atau hunian tempat tinggal merupakan kebutuhan dasar manusia yang mutlak harus terpenuhi. Secara umum, kondisi rumah layak huni di Kabupaten Konawe Utara telah mencapai 74 %, sedangkan kondisi rumah tidak layak huni sebesar 26%, hal ini dapat dilihat dari tabel 2.41.

Tabel 2.41.
Ketersediaan Sarana Perumahan
Kabupaten Konawe Utara

No.	Kecamatan	Jumlah Rumah 2019 (unit)	RTLH 2019 (unit)	RLH 2019 (unit)	% RTLH	% RLH
1	Sawa	1.294	114	1.180	9%	91%
2	Motui	1.246	580	666	47%	53%
3	Lembo	1.298	215	1.083	17%	83%
4	Lasolo	1.815	471	1.344	26%	74%
5	Wawolesea	1.018	273	745	27%	73%
6	Lasolo Kepulauan	553	210	343	38%	62%
7	Molawe	1.367	287	1.080	21%	79%
8	Asera	2.142	598	1.544	28%	72%
9	Andowia	1.320	530	790	40%	60%
10	Oheo	1.311	122	1.189	9%	91%
11	Langgikima	1.415	258	1.157	18%	82%
12	Wiwirano	1.540	366	1.174	24%	76%
13	Landawe	828	357	471	43%	57%
Kab. Konawe Utara		17.147	4.381	12.766	26%	74%

Sumber : RP3KP Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020

2) Jumlah Kebutuhan Rumah (*Backlog*)

Setelah diketahui kebutuhan rumah akibat pertumbuhan penduduk, maka dapat dihitung kebutuhan rumah total di Kabupaten Konawe Utara pada tahun proyeksi. Kebutuhan rumah total didapat dari penjumlahan *backlog eksisting* dengan

kebutuhan rumah karena pertumbuhan penduduk. Kebutuhan rumah tambahan dari tahun awal rencana. Untuk lebih jelasnya lihat Tabel 2.42.

Tabel 2.42.
Proyek Kebutuhan Rumah setiap Kecamatan di Kabupaten Konawe Utara

No	Kecamatan	Jumlah KK Tahun 2019	Jumlah Rumah 2019 (unit)	Backlog Rumah 2019	Jumlah KK Proyeksi 2040	Kebutuhan Rumah KK	Total Kebutuhan Rumah	Kebutuhan Rumah/ Tahun
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e = c - d</i>	<i>f</i>	<i>g = f - c</i>	<i>h = (g+e)</i>	<i>i = h/20</i>
1	Sawa	1.294	1.294	-	3.221	1.927	1.927	96
2	Motui	1.246	1.246	-	2.651	1.405	1.405	70
3	Lembo	1.575	1.298	277	3.661	2.086	2.363	118
4	Lasolo	2.272	1.815	457	5.361	3.089	3.546	177
5	Wawolesea	1.015	1.018	- 3	1.989	974	971	49
6	Lasolo Kepulauan	567	553	14	6.726	6.159	6.173	309
7	Molawe	1.728	1.367	361	4.501	2.773	3.134	157
8	Asera	2.142	2.142	-	4.482	2.340	2.340	117
9	Andowia	1.981	1.320	661	4.358	2.377	3.038	152
10	Oheo	1.311	1.311	-	5.177	3.866	3.866	193
11	Langgikima	1.415	1.415	-	2.747	1.332	1.332	67
12	Wiwirano	1.493	1.540	-47	3.585	2.092	2.045	102
13	Landawe	828	828	-	1.458	630	630	31
Kab. Konawe Utara		18.867	17.147	1.720	49.917	31.050	32.770	1.638

Sumber : RP3KP Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020

3) Sarana Prasarana Kawasan Permukiman

Analisis pelayanan umum bagian perumahan dapat dilihat dari beberapa aspek diantaranya rumah tangga pengguna air bersih dan jumlah seluruh rumah tangga dan jumlah rumah tangga pengguna listrik dengan jumlah seluruh rumah tangga di Kabupaten Konawe Utara. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.43.
Ketersediaan Prasarana Perumahan
Kabupaten Konawe Utara

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Rumah Tangga Pengguna Air minum layak	4.024	4.266	4.904	7.730	9.288
	Jumlah Rumah Tangga	12.584	13.115	13.442	18.867	19.218
	Persentase (%)	31,98	32,53	36,48	40,97	48,33
2.	Rumah Tangga Pengguna Listrik	9.238	10.377	13.169	18.741	19.218
	Jumlah Rumah Tangga	12.584	13.115	13.442	18.867	19.218
	Persentase (%)	73,41	79,12	97,97	99,33	100,00
3.	Rumah Tangga Bersanitasi layak	3.727	3.885	4.228	6.851	6.978
	Jumlah Rumah Tangga	12.584	13.115	13.442	18.867	19.218
	Persentase (%)	29,62	29,62	31,45	36,31	36,31

Sumber : Konawe Utara Dalam Angka, 2021

4) Kawasan Permukiman Kumuh

Berdasarkan digitasi citra satelit dalam revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Konawe Utara, luas kawasan permukiman di Kabupaten Konawe Utara sebesar 2.450,45 Ha. Permukiman kumuh di Kabupaten Konawe Utara di berdasarkan SK Bupati Konawe Utara No. 397/2019 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kab. Konawe Utara seluas 112.669 Ha dengan Kawasan yang tersebar di 44 titik kawasan kumuh. Selanjutnya, hasil verifikasi luas kawasan pemukiman kumuh pada kegiatan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) Tahun 2021 diketahui bahwa luasan kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Konawe Utara seluas 528,13 Ha. Dengan demikian, dalam penanganan kawasan pemukiman kumuh di Kabupaten Konawe Utara mengacu pada data tersebut. Nama kawasan serta luas kawasan permukiman kumuh sesuai SK Kumuh Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019 dan hasil verifikasi luasan Tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 2.44.

Tabel 2.44.
Luas Kawasan Pemukiman Kumuh
Kabupaten Konawe Utara

No	Nama Kawasan	Luas Kawasan Kumuh	
		Luasan SK Tahun 2019 (Km ²)	Luasan Verifikasi Tahun 2021 (Ha)
1	Wawonsangi	49,73	14,55
2	Tambakua	162,97	5,30
3	Alenggo	16,00	39,10
4	Molore Pantai	11,46	8,68
5	Sarimukti	35,66	29,00
6	Morombo Pantai	5,00	13,00
7	Morombo	10,30	9,00
8	Waturambaha	18,98	6,50
9	Boedingi	1,60	2,00
10	Tapunopaka	1,46	9,30
11	Sambandete	91,69	14,40
12	Tinondo	84,72	9,50
13	Laumoso	25,22	28,00
14	Puusuli	69,12	18,05
15	Tapuemea	1,27	7,00
16	Labungga	24,50	16,00
17	Puuwanggudu	45,00	1,70
18	Wanggudu Raya	24,45	11,00
19	Amorome Utama	33,72	53,16
20	Kelurahan Asera	6,89	16,30
21	Longeo Utama	30,30	9,00
22	Amorome	53,35	15,30
23	Wawolibue	3,61	9,30
24	Walalindu	5,61	1,60
25	Tapuwatu	25,00	3,30

No	Nama Kawasan	Luas Kawasan Kumuh	
		Luasan SK Tahun 2019 (Km ²)	Luasan Verifikasi Tahun 2021 (Ha)
26	Alaa Wanggudu	7,76	4,70
27	Muara Tinobu	0,87	4,70
28	Otipulu	8,35	5,70
29	Tetelupai	3,60	3,00
30	Tanjung Bunga	1,58	10,50
31	Watuwula	3,96	5,30
32	Puusiambu	4,26	12,60
33	Tudungano	1,70	9,30
34	Punggulahi	3,90	11,00
35	Sambasule	2,00	5,30
36	Poni Poniki	3,50	4,70
37	Tobimeita	5,20	5,70
38	Sama Subur	2,00	15,00
39	Kelurahan Wanggudu	111,78	28,74
40	Wunduhaka	5,88	8,50
41	Banggina	2,00	0,00
42	Tanjung Laimea	2,10	2,60
43	Tapungaya	7,50	15,00
44	Paka Indah	89,90	25,75
Jumlah		1.105,45	528,13

Sumber : SK Bupati Konawe Utara No. 397/2019 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kab. Konawe Utara, Hasil verifikasi kegiatan RP2KPKPK Tahun 2021

1) Rumah Tidak Layah Huni (RTLH)

Pada tahun 2020, RTLH dapat tertangani 80 unit dari dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan RUTILAHU dengan rincian data sebagai berikut :

Tabel 2.45.
Jumlah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
di Kabupaten Konawe Utara

No.	Tahun	Jumlah RTLH (Unit)
1.	2017	250
2.	2018	271
3.	2019	200
4.	2020	80

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2021

2.3.1.5 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Pembinaan politik daerah di Kabupaten Konawe Utara juga dilaksanakan oleh Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik. Kegiatan ini perlu dilaksanakan mengingat pentingnya pendidikan politik dan berorganisasi bagi masyarakat agar masyarakat sadar dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan politik di Kabupaten Konawe Utara. Tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan kualitas kehidupan sosial politik dan meningkatnya partisipasi politik serta partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan umum.

Tabel 2.46.
Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu
di Kabupaten Konawe Utara

No.	Jumlah DPT	Pileg 2019	Pilpres 2019	Pilbup 2020
1.	Jumlah Pemilih	43.922	43.922	46.123
2.	Jumlah Pengguna Hak Pilih	39.483	39.770	42.875
3.	Tingkat Partisipasi (%)	89,89	90,55	92,96
4.	Jumlah Suara Sah	37.957	38.632	42.864
5.	Jumlah Tidak Sah/Golput	1.526	1.138	518
6.	Persentase Suara Sah (%)	96,14	97,14	98,80

Sumber : KPU Kab. Konawe Utara, 2021

Melihat partisipasi masyarakat dalam pemilu belum optimal maka dalam rangka persiapan Pilkada Serentak Tahun 2024 yang akan dilaksanakan pada bulan November Tahun 2023, perlu upaya-upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terutama generasi muda sebagai pemilih pemula. Kegiatan pembinaan politik salah satunya adalah sosialisasi politik bagi pemilih pemula dan perempuan.

2.3.1.6 Sosial

Jenis Pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah kabupaten merupakan pelayanan dalam rangka penanggulangan masalah sosial terdiri atas :

1. Pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial (Pemberian bantuan sosial bagi PMKS; Pelaksanaan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS dalam panti sosial).
2. Penyediaan sarana dan prasarana sosial (Penyediaan sarana dan prasarana panti sosial; Penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti).
3. Penanggulangan korban bencana pada tahap tanggap darurat (Bantuan sosial bagi korban bencana; Evakuasi korban bencana)
4. Pelaksanaan dan Pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu
5. Pelaksanaan jaminan sosial

PMKS adalah seseorang, keluarga, atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan, dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, atau keterasingan dari kondisi atau perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung atau menguntungkan. PMKS merupakan permasalahan sosial yang tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah saja tetapi masyarakat dan dunia swasta.

Tabel 2.47.
Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
di Kabupaten Konawe Utara

NO	URAIAN	JUMLAH
1.	Lanjut Usia	3.020
2.	Disabilitas	148
3.	Korban tindak kekerasan terhadap anak	23
4.	RUTILAHU	280
	Total	3.471

Sumber : Dinas Sosial Kab. Konawe Utara, Tahun 2021

2.3.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

2.3.2.1 Tenaga Kerja

1) Angkatan Kerja

Tingkat partisipasi angkatan kerja merupakan perbandingan jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja dapat digunakan untuk menyatakan jumlah angkatan kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Konawe Utara disajikan pada Tabel 2.48. Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS, tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Konawe Utara cenderung meningkat. Pada tahun 2020 tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 74,45%.

Tabel 2.48.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
di Kabupaten Konawe Utara

No.	Jenis	2019		Jumlah	2020		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan		Laki-Laki	Perempuan	
1.	Angkatan Kerja			29.535			33.592
	- Bekerja	18.542	9.834	28.376	20.559	11.759	32.318
	- Pengangguran Terbuka	901	258	1.159	841	433	1.274
2.	Bukan Angkatan Kerja			13.232			11.531
	- Sekolah	1.619	1.758	3.377	866	1.293	2.159
	- Mengurus Rumah Tangga	839	8.008	8.847	790	7.686	8.476
	- Lainnya	805	203	1.008	686	210	896
Jumlah		22.706	20.061	42.767	23.742	21.381	45.123
TPAK (%)		69,06			74,45		

Sumber : BPS, Kab. Konawe Utara Dalam Angka, 2021

2) Tingkat Pengangguran

Ada dua jenis pengangguran yaitu pengangguran terbuka (*open unemployment*) dan setengah pengangguran (*disguised unemployment*).

Pengangguran Terbuka adalah orang yang tidak punya pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan usaha. Setengah pengangguran adalah orang yang bekerja dibawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan).

Tingkat Pengangguran di Kabupaten Konawe Utara cenderung mengalami penurunan meskipun dengan laju yang lambat dan berfluktuatif. Hal ini ditunjukkan oleh tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Tabel 2.49. TPT merupakan perbandingan antara jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja. Pada tahun 2016, tingkat pengangguran di Kabupaten Konawe Utara mencapai angka 5,95%, turun menjadi 4,23 pada tahun 2017 dan pada Tahun 2018 terus menurun menjadi 3,59%. Menurut data BPS tahun 2020 tingkat pengangguran terbuka meningkat menjadi 3,92%, dan kembali menurun menjadi 3,79% tahun 2020.

Tabel 2.49.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
di Kabupaten Konawe Utara

No.	Jenis	2019		Jumlah	2020		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan		Laki-Laki	Perempuan	
1.	Angkatan Kerja			29.535			33.592
	- Bekerja	18.542	9.834	28.376	20.559	11.759	32.318
	- Pengangguran Terbuka	901	258	1.159	841	433	1.274
	Jumlah	22.706	20.061	42.767	23.742	21.381	45.123
	TPT (%)	3,92%			3,79%		

Sumber : BPS, Kab. Konawe Utara Dalam Angka, 2021

Beberapa upaya berupa program kegiatan yang telah dilakukan yaitu: Program Peningkatan kesempatan kerja, penempatan tenaga kerja, transmigrasi umum, perlindungan dan pengembangan ketenagakerjaan, peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, dan perluasan tenaga kerja.

2.3.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan Perempuan adalah usaha sistematis dan terencana untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Tujuan dari pemberdayaan perempuan adalah untuk perempuan sendiri untuk menjadi agen perubahan yang aktif dalam melakukan transformasi gender.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indeks komposit yang tersusun dari beberapa variabel yang mencerminkan tingkat keterlibatan wanita dalam proses pengambilan keputusan dibidang politik dan ekonomi. Indeks pemberdayaan gender di Kabupaten Konawe Utara cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 sebesar 69,13 meningkat menjadi 69,52 pada tahun 2020. Hal ini mengindikasikan bahwa pemberdayaan perempuan di Kabupaten Konawe Utara semakin meningkat.

Tabel 2.50.
Kinerja Pemberdayaan Perempuan dan PA
di Kabupaten Konawe Utara

No.	Uraian	Jumlah
1.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	69,52
2.	Indeks Pengarusutamaan Gender (IPG)	86,17
3.	Persentase Kekerasan Anak Yang Ditindaklanjuti	100%
4.	Panti Asuhan	1 gedung
5.	Kapasitas Tampung	25 orang
6.	Anak Asuh	25 orang
7.	Pengasuh	2 orang

Sumber : Dinas PP dan PA Kab. Konawe Utara, Tahun 2021

Tabel 2.51.
Jumlah Kasus Kejahatan dan
Kasus yang telah diselesaikan

No.	Kasus	2018	2019	2020
1.	Aniaya Biasa	21	24	21
2.	Pencurian	17	6	9
3.	Pengroyokan	7	6	4
4.	Aniaya	7	-	23
5.	Pengancaman	2	1	2
6.	Curi dalam keluarga	-	-	-
7.	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	10	4	9
8.	Penipuan	2	3	1
Total		66	44	69
Kasus yang diselesaikan		66	44	69
Persentase Kasus Yang diselesaikan		100%	100%	100%

Sumber : Dinas PP dan PA Kab. Konawe Utara, Tahun 2021

Tabel 2.52.
Partisipasi Perempuan dalam berpolitik

No.	Uraian	2018	2019	2020
1.	Laki – Laki	15	17	17
2.	Perempuan	5	3	3
Total		20	20	20
Persentase Partisipasi Perempuan dalam berpolitik		33,33%	15%	15%

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Di Kabupaten Konawe Utara, partisipasi politik perempuan khususnya keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan menjadi agenda penting Pemerintah Daerah dan legislatif. Berbagai kebijakan afirmasi dan penguatan terus diupayakan. Dalam demokrasi inklusif, masyarakat sebagai salah satu pilar penting demokrasi mempunyai peranan yang sangat penting untuk mewujudkan partisipasi politik perempuan yang lebih luas dan bermakna. Partisipasi perempuan dalam politik sangatlah penting. Sebab keberadaan mereka dapat meningkatkan kesejahteraan kelompok perempuan dengan mewakili, mengawal dan mempengaruhi agenda dan proses pembuatan kebijakan, serta turut serta dalam proses pembangunan.

Persentase perempuan dalam berpolitik di Kabupaten Konawe Utara dilihat dengan mengukur jumlah perempuan yang menjadi anggota DPRD Kabupaten dibandingkan dengan jumlah total anggota DPRD Kabupaten Konawe Utara. Pada tahun 2018, sebanyak 5 dari 20 anggota DPRD Kabupaten Konawe Utara merupakan anggota legislator perempuan. Pada Tahun 2019 dan Tahun 2020, keterwakilan perempuan di legislatif menurun menjadi hanya 3 orang, atau hanya sebesar 15%. Ke depan diharapkan terjadi peningkatan keterwakilan perempuan dalam legislatif sebagai upaya mengawal dan memperjuangkan hak-hak perempuan menuju kesetaraan gender.

2.3.2.4 Pangan

Ketersediaan pangan adalah tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan/atau sumber lain. Ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, dari segi kuantitas, kualitas,

keragaman dan keamanannya. Ketersediaan pangan dapat dipenuhi dari tiga sumber yaitu (1) produksi dalam negeri; (2) pasokan pangan; (3) pengelolaan cadangan pangan.

Cadangan pangan merupakan salah satu komponen penting dalam ketersediaan pangan, karena cadangan pangan merupakan sumber pasokan untuk mengisi kesenjangan antara produksi dan kebutuhan dalam negeri atau daerah dari waktu ke waktu, sehingga diharapkan tidak terjadi lonjakan harga pangan pokok.

Pola Pangan Harapan (PPH) adalah susunan beragam pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama baik secara absolut maupun dari suatu pola ketersediaan atau konsumsi pangan. Acuan untuk menilai tingkat keragaman konsumsi pangan adalah PPH dengan skor 100 sebagai pola yang ideal. Skor PPH semakin mendekati angka 100 menunjukkan bahwa pola konsumsi pangan masyarakat semakin beragam.

Kinerja pada Urusan Pangan di Kabupaten Konawe Utara secara lengkap terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.53.
Kinerja Urusan Pangan di Kabupaten Konawe Utara

No.	Uraian	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
1.	Ketersediaan pangan utama kkl/kapita/hari	1.900	1.950	2.220	2.400
2.	Pola Pangan Harapan	76,28	77,26	76,93	79,60
3.	Rata-rata jumlah ketersediaan padi dalam setahun (ton)	1.373	1.579	1.581	1.640
4.	Rata-rata jumlah ketersediaan jagung dalam setahun (ton)	68,16	71,25	72,26	70,56
5.	Rata-rata jumlah ketersediaan palawija dalam setahun (ton)	60,75	67,33	62,42	63,50

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Tahun 2021

2.3.2.5 Pertanian

Pada urusan pertanian yang telah dilaksanakan meliputi kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum melalui Tim P2T (Panitia Pengadaan Tanah) Kabupaten Konawe Utara, Fasilitasi penyelesaian konflik tanah negara dan upaya

tertib administrasi pertanahan melalui penyediaan data base pertanahan di 11 kelurahan. Data status tanah di Kabupaten Konawe Utara tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel 2.54.

Tabel 2.54.
Perkembangan Status Hak Tanah
di Kabupaten Konawe Utara

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Hak Milik	2.755	5.302	2.470	3.101	1.211
2.	Hak Guna Bangunan	-	-	1	-	4
3.	Hak Guna Usaha	-	-	-	-	-
4.	Hak Pakai	-	53	93	148	222
Jumlah		20.262	20.262	2.755	5.355	2.564

Sumber : BPN Kab. Konawe Utara, 2021

2.3.2.6 Lingkungan Hidup

Pada urusan lingkungan hidup, gambaran kondisi lingkungan hidup yang digambarkan melalui beberapa indikator yang terkait dengan lingkungan sebagaimana diuraikan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.55.
Kinerja Pengelolaan Lingkungan
di Kabupaten Konawe Utara

No.	Indikator Kinerja	Capaian					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan AMDAL	90	90	90	90	90	90
2.	Jumlah Perusahaan Yang Memiliki AMDAL	42	42	44	48	54	54
3.	Jumlah Perusahaan Yang Memiliki Tempat pengelolaan Limbah	9	10	12	14	16	16
4.	Jumlah Sumber Air Yang Dipantau Kualitasnya, Ditetapkan Status Mutu Airnya Dan Diinformasikan Status Mutu Airnya	11	11	8	12	13	5

No.	Indikator Kinerja	Capaian					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
5.	Jumlah Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran Dan/Atau Perusakan	1	1	3	2	2	2

Sumber : DLH Kab. Konawe Utara, Tahun 2021

2.3.2.7 Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Cakupan penerbitan kartu tanda penduduk merupakan salah satu indikator SPM yang dilaksanakan Kabupaten Konawe Utara dalam pelayanan dokumen kependudukan dengan penanggungjawab kegiatan berada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe Utara. Cakupan penerbitan KTP adalah cakupan penduduk yang telah memperoleh KTP sesuai dengan standar pelayanan lima hari harus selesai diterbitkan KTP. Perkembangan pencapaian cakupan penerbitan kartu tanda penduduk di Kabupaten Konawe Utara tahun 2026-2020 ditampilkan pada Tabel 2.56.

Tabel 2.56.
Cakupan Penerbitan KTP
di Kabupaten Konawe Utara

No.	Indikator Kinerja	Capaian					
		2019			2020		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Jumlah KTP ber-NIK yang diterbitkan	21.278	19.822	41.100	23.707	22.198	45.905
2.	Jumlah Penduduk Wajib KTP	22.838	21.426	44.264	23.707	22.198	45.905
3.	Persentase penduduk yang memiliki KTP ber-NIK	93,17	92,51	92,85	100,00	100,00	100,00

Sumber : Dinas Kependudukan dan Capil Kab. Konawe Utara, Tahun 2021

Selain cakupan penerbitan KTP, indikator SPM yang juga dilaksanakan Kabupaten Konawe Utara dalam pelayanan dokumen kependudukan adalah cakupan penerbitan akta kelahiran. Akta kelahiran merupakan salah satu dokumen hasil pencatatan sipil yang meregistrasi setiap kelahiran sebagai peristiwa kependudukan.

Cakupan penerbitan akta kelahiran adalah cakupan penduduk lahir yang memperoleh akta kelahiran sebagai bentuk registrasi kependudukan sesuai dengan standar pelayanan tujuh hari harus selesai diterbitkan.

Penerbitan akta kelahiran dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melalui serangkaian kegiatan yang meliputi penyebarluasan informasi publik tentang pelayanan akta kelahiran, registrasi setiap kelahiran dan penerbitan akta kelahiran dari setiap peristiwa kelahiran di tahun bersangkutan. Pencapaian cakupan penerbitan akta kelahiran di Kabupaten Konawe Utara dari tahun 2015 hingga tahun 2020 disajikan pada Tabel 2.57.

Tabel 2.57.
Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran
di Kabupaten Konawe Utara

No.	Indikator Kinerja	Capaian					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah penduduk yang lahir dan memperoleh akta kelahiran di tahun N	13.127	16.409	20.511	25.639	4.310	22.558
2.	Jumlah kelahiran di tahun N	17.171	19.865	22.719	27.650	4.310	26.894
3.	Persentase penerbitan akta kelahiran	76,45	82,60	90,28	92,72	100,00	83,88

Sumber : Dinas Kependudukan dan Capil Kab. Konawe Utara, Tahun 2021

2.3.2.8 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Pemberdayaan masyarakat atau dalam kata lain community-development merupakan salah satu metode gerakan yang digunakan dalam menjalankan pembangunan masyarakat, baik dalam aspek ekonomi, sosial budaya, pendidikan, kesehatan, atau kombinasi semua aspek tersebut.

Pemerintah Kabupaten Konawe Utara melakukan pemberdayaan masyarakat desa melalui berbagai program dan kegiatan fasilitasi, seperti pelaksanaan program Jumat Berkah berupa pelayanan, penyuluhan, pemberian bantuan dan melihat langsung potensi desa serta kendala yang dihadapi masyarakat untuk diselesaikan bersama masyarakat desa. Pemerintah kabupaten juga melakukan pendampingan dan penguatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di setiap desa. Upaya-upaya lain seperti pengembangan kapasitas masyarakat desa, kaderisasi masyarakat desa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Desa, serta fasilitasi musyawarah pembangunan desa, fasilitasi pengembangan kebun pekarangan di desa. Upaya-upaya tersebut telah memberikan hasil yang cukup memuaskan, hal ini dapat dilihat pada peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020 sebesar 0,5855 dibanding Tahun 2019 sebesar 0,5429. Adapun capaian kinerja pada urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.58.
Kinerja Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Di Kabupaten Konawe Utara

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Indeks Desa Membangun (IDM)	0,5219	0,5236	0,5352	0,5429	0,5855
2.	Persentase BPD Aktif	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.	Persentase LPM Berprestasi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4.	Persentase PKK Aktif	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5.	Persentase Posyandu Aktif	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : DPMD dan Pemdes Kab. Konawe Utara, Tahun 2021

2.3.2.9 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur (PUS) menjadi peserta KB aktif adalah jumlah peserta KB aktif (PA) dibandingkan dengan seluruh PUS dalam suatu wilayah pada kurun waktu tertentu. Jumlah peserta PUS pada tahun 2020 mengalami sedikit penurunan dibandingkan dengan tahun 2019, tampak pada tabel berikut ini:

Tabel 2.59.
Kepersertaan Keluarga Berencana
di Kabupaten Konawe Utara

No.	Uraian	2017		2018		2019		2020	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1.	PUS	13.882		16.979		18.279		18.276	
2.	Peserta KB Aktif	11.897		13.256		13.482		13.959	
3.	Peserta KB MKJP	15		17		22		22	
4.	Peserta KB Pria	6		13		29		29	
5.	Peserta KB Baru	1.087		1.878		1.945		2.062	
6.	PUS Unmetneed	14		19		21		18	
7.	Rasio Ekseptor KB Per 100 PUS	79,72		81,84		82,62		82,73	

Sumber : DPPKB Kab. Konawe Utara, Tahun 2021

Tabel 2.60.
Jumlah Kasus Pernikahan dan Perceraian yang tercatat

No.	Uraian	Capaian	
		2019	2020
1.	Pernikahan yang tercatat	397	418
2.	Perceraian yang tercatat	-	-

Sumber : BPS, Konawe Utara Dalam Angka Tahun 2021

Tabel 2.61.
Jumlah Kampung KB di Kabupaten Konawe Utara

No.	Uraian	Lokasi	Ket.
1.	Kec. Wiwirano	- Desa Lamparinga - Desa Wawoheo	
2.	Kec. Landawe	- Desa Matabenua - Desa Matabaho	
3.	Kec. Langgikima	- Desa Pariama - Desa Mekar Jaya	
4.	Kec. Oheo	- Desa Mopute	
5.	Kec. Asera	- Desa Puuwanggudu	
6.	Kec. Andowia	- Desa Amolame	
7.	Kec. Molawe	- Desa Tapuemea	

No.	Uraian	Lokasi	Ket.
8.	Kec. Lasolo	- Desa Lalowaru	
9.	Kec. Lembo	- Desa Pasir Putih	
10.	Kec. Sawa	- Desa Ulusawa	
11.	Kec. Motui	- Desa Poni - Poniki	
12.	Kec. Lasolo Kepulauan	- Desa Boenaga	
13.	Kec. Wawolesea	- Desa Tanjung Bunga	

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021

2.3.2.10 Perhubungan

Kabupaten Konawe Utara sebagai pintu gerbang dari wilayah utara Provinsi Sulawesi Tenggara telah memiliki beberapa fasilitas prasarana perhubungan yang mendukung arus transportasi baik barang maupun penumpang. Tabel 2.62 memperlihatkan prasarana perhubungan yang terdapat di Kabupaten Konawe Utara.

Tabel 2.62.
Sarana dan Prasarana Perhubungan
di Kabupaten Konawe Utara

No	Jenis Prasarana Moda	Jumlah (Unit)	Lokasi
1.	Transportasi Udara	1	
	- Heliport	1	Kel. Wanggudu
2.	Transportasi Perairan	20	-
	- Pelabuhan Laut	1	Ds. Lameruru,
		1	Kel. Molawe
		1	Ds. Molore
		1	Ds. Boenaga
		1	Ds. Waturambaha
	- Dermaga/Tambatan Perahu (Laut)	1	Ds. Tapungggaya
		1	Kel. Molawe
		1	Ds. Pasir Putih
		1	Ds. Tokowuta
		2	Ds. Taipa

No	Jenis Prasarana Moda	Jumlah (Unit)	Lokasi
		1	Kel. Tinobu
		1	Ds. Kampo Cina
		1	Ds. Ulu Sawa
	- Pelabuhan Sungai dan Danau	1	Kel. Lamona
		2	Andowia
		1	Ds. Bandaeha-Oheo
		1	Ds. Lambuluo
		1	Ds. Banggina
3.	Transportasi Darat	1	
	- Terminal Angkutan Darat Type B	1	Ds. Lahimbua

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Konawe Utara, 2021

Tabel 2.63.
Prasarana Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri
Di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2008 - 2021

No	Jenis Prasarana	Lokasi		Status Operasional
		Koordinat	Tempat	
1.	Tersus PT. Cinta Djaya	3°33'54.00"S // 122°12'11.89"T	Ds. Mandiodo	Beroperasi
2.	Tersus PT. Stargate Resource Pasific	3°18'27.73"S // 122°17'09.45"T	Ds. Molore	Beroperasi
3.	Tersus PT. Stargate Resource Pasific	3°18'40.57"S // 122°17'25.90"T	Ds. Molore	Beroperasi
4.	Tersus PT. Konawe Nikel Nusantara	3°23'32.65"S // 122°15'06.23"T	Ds. Morombo	Beroperasi
5.	Tersus. PT. Sriwijaya Raya	3°33'51.80"S // 122°12'37.76"T	Ds. Tapungaya	Beroperasi
6.	Tersus PT. Pertambangan Bumi Indonesia	3°23'46.24"S // 122°14'31.47"T	Ds. Morombo Pantai	Beroperasi
7.	Tersus PT. Makmur Lestari Primatama	3°19'30.10"S // 122°17'39.70"T	Ds. Molore	Belum Beroperasi
8.	Tersus PT. Cipta Djaya Surya	3°19'50.20"S // 122°17'27.49"T	Ds. Molore	Beroperasi
9.	Tersus PT. Bumi Konawe Abadi	3°47'45.08"S // 122°27'51.66"T	Ds. Pudongala	Beroperasi
10.	Tersus PT. Bumi Konawe Minerina	3°34'50.79"S // 122°11'56.03"T	Ds. Mandiodo	Beroperasi
11.	Tersus PT. Bumi Konawe Minerina	3°34'36.40"S // 122°14'07.66"T	Ds. Tapungaya	Beroperasi
12.	Tersus PT. Dwimitra Multiguna Sejahtera	3°39'59.50"S // 122°15'34.20"T	Ds. Tapunopaka	Beroperasi
14.	Tersus PT. Dwimitra Multiguna	3°21'25.30"S //	Ds. Molore	Beroperasi

No	Jenis Prasarana	Lokasi		Status Operasional
		Koordinat	Tempat	
	Sejahtera	122°17'34.23"T		
15.	Tersus PT. Pernick Sultra	3°21'44.94"S // 122°19'30.58"T	Ds. Waturambaha	Beroperasi
16.	Tersus PT. Sultra Jembatan Mas	3°24'9.02"S // 122°23'13.89"T	Ds. Waturambaha	Belum Beroperasi
17.	Tersus PT. Adhi Kartiko Pratama	3°16'39.99"S // 122°18'36.18"T	Ds. Lameruru	Beroperasi
18.	Tersus PT. Kembar Emas Sultra	3°17'19.68"S // 122°18'09.51"T	Ds. Lameruru	Beroperasi
19.	Tersus PT. Sinar Jaya Utama Sultra	3°22'12.92"S // 122°20'25.17"T	Ds. Waturambaha	Beroperasi
20.	Tersus PT. Wanagon Anoa Indonesia	3°34'38.96"S // 122°11'53.96"T	Ds. Mandiodo	Beroperasi
21.	Tersus PT. Bosowa Minning	3°16'48.48"S // 122°18'27.63"T	Ds. Lameruru	Beroperasi
22.	Tersus PT. Daka Group	3°26'59.32"S // 122°23'02.25"T	Ds. Boedinge	Beroperasi
23.	Tersus PT. Mallibu	3°24'08.25"S // 122°14'34.16"T	Ds. Morombo Pantai	Tidak Beroperasi
24.	Tersus PT. Cipta Djaya Surya	3°23'31.07"S // 122°14'37.98"T	Ds. Morombo Pantai	Beroperasi
25.	Tersus PT. Manunggal Sarana Surya Pratama	3°24'14.63"S // 122°23'19.76"T	Ds. Waturambaha	Beroperasi
26.	Tersus PT. Paramitha Persadatama	3°26'22.62"S // 122°23'01.79"T	Ds. Boedinge	Beroperasi
27.	Tersus PT. Bhumi Karya Utama	3°22'52.37"S // 122°16'27.79"T	Ds. Morombo	Beroperasi
28.	Tersus PT. Tristaco Mineral Makmur	3°22'22.22"S // 122°16'41.20"T	Ds. Morombo	Beroperasi
29.	Tersus PT. Karyatama Konawe Utara	3°16'45.18"S // 122°18'30.49"T	Ds. Lameruru	Belum Beroperasi
30.	Tersus PT. Duta Tambang Gunung Perkasa	3°23'29.88"S // 122°16'17.12"T	Ds. Morombo	Beroperasi
31.	Tersus PT. Binanga Hartama Raya	3°22'54.51"S // 122°18'17.83"T	Ds. Morombo	Beroperasi
32.	Tersus PT. Bhumi Swadaya Mineral	3°16'26.78"S // 122°18'39.91"T	Ds. Lameruru	Beroperasi
33.	Tersus PT. Bososi Pratama	3°23'57.87"S // 122°14'27.84"T	Ds. Morombo Pantai	Beroperasi
34.	Tersus PT. Indra Bakti Mustika	3°17'14.85"S // 122°18'14.35"T	Ds. Lameruru	Belum Beroperasi
35.	Tersus PT. Roshini Indonesia	3°23'00.78"S // 122°21'12.71"T	Ds. Waturambaha	Beroperasi
36.	Tersus PT. Tiran Indonesia	3°16'24.50"S // 122°18'48.90"T	Ds. Lameruru	Beroperasi
37.	Tersus Pt. Primastian Metal Pratama	3°27'41.76"S // 122°21'56.14"T	Ds. Boedinge	Beroperasi
38.	Tersus PT. Global Citra Konawe Utara	3°47'43.60"S // 122°27'37.67"T	Ds. Pudonggala	Beroperasi
39.	Tersus PT. Antam	3°27'58.48"S // 122°18'4.22"T	Ds. Tapunopaka	Beroperasi
40.	Tersus PT. Alam Raya Indah	3°22'09.00"S // 122°17'05.84"T	Ds. Morombo	Beroperasi

No	Jenis Prasarana	Lokasi		Status Operasional
		Koordinat	Tempat	
41.	Tersus PT. Titan Agro Abadi	3°24'27.64"S // 122°14'35.10"T	Ds. Morombo	Belum Beroperasi
42.	Tersus PT. Jety Baraya Sulawesi	3°34'3.46"S // 122°12'28.86"T	Ds. Mandiodo	Beroperasi
43.	Tersus PT. Kabaena Kromit Pratama	3°34'24.46"S // 122°11'51.83"T	Ds. Mandiodo	Beroperasi
44.	Tersus PT. Cinta Djaya	3°33'55.17"S // 122°12'0.51"T	Ds. Mandiodo	Beroperasi
45.	Tersus PT. Rizki Sinar Biokas	3°27'48.37"S // 122°22'3.46"T	Ds. Boedinge	Belum Beroperasi
46.	Tersus PT. Apollo Nikel Indonesia	3°22'52.62"S // 122°22'0.15"T	Ds. Waturambaha	Belum Beroperasi
47.	Galangan PT. Buana Karya Shipyard	3°23'45.28"S // 122°15'19.08"T	Ds. Morombo	Beroperasi

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Konawe Utara, 2021

Angkutan umum yang ada di Kabupaten Konawe Utara berupa armada bis angkutan penumpang sedangkan armada lain seperti kereta api, kapal laut, dan pesawat udara tidak terdapat di Kabupaten Konawe Utara.

Tabel 2.64.
Jumlah Sarana Transportasi Darat, Laut, Sungai dan Danau
Di Kabupaten Konawe Utara

No	Jenis Sarana Angkutan	Jumlah Sarana					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Bus Besar	6	6	5	4	4	4
2.	Bus Sedang	5	5	6	10	10	56
3.	Bus Kecil	24	24	34	42	42	1.723
4.	Truck Besar	40	40	45	56	56	70
5.	Truck Sedang	26	26	30	39	39	212
6.	Truck Kecil/Pick UP	3	3	37	44	65	622
7.	Perahu Jukung	497	497	435	405	405	428
8.	Perahu Ketek	201	201	248	196	196	190
9.	Speed Boat	15	15	20	28	28	35

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Konawe Utara, 2021

Kedepan perlu dilakukan upaya-upaya guna meningkatkan penggunaan angkutan umum di masyarakat, antara lain melakukan kajian tentang pemerataan trayek angkutan umum pada pusat-pusat kegiatan yang belum tersentuh oleh angkutan umum, peningkatan kualitas pelayanan angkutan umum, memperbaiki sistem serta sarana dan prasarana fisik angkutan umum melalui Program peningkatan pelayanan angkutan, kegiatan pengumpulan database pelayanan angkutan, survei angkutan umum dan tradisional, dan survei angkutan barang.

2.3.2.11 Komunikasi dan Informatika

Pelayanan dalam urusan komunikasi dan informatika dalam upaya penyebarluasan informasi maupun efisiensi dalam komunikasi. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, perkembangan media komunikasi dan informasi di Kabupaten Konawe Utara memperlihatkan pertumbuhan yang cukup pesat, hal ini tentunya sangat didukung dengan kebutuhan masyarakat akan media komunikasi dan informatika yang terus meningkat. Gambaran tentang perkembangan pelayanan pada urusan komunikasi dan informatika dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.65.
Kinerja Bidang Komunikasi dan Informatika
di Kabupaten Konawe Utara

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase wilayah yang terlayani jaringan mobile broadband	72,62	72,89	72,92	76,02
2.	Jumlah Kecamatan Yang Terlayani	7 Kec	7 Kec.	7 Kec.	7 Kec.
3.	Jumlah penduduk yang menggunakan handphone.	25.879	26.763	29.651	29.712
4.	Jumlah BTS	19	19	19	21
5.	Jumlah Penerapan sistem informasi/aplikasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	11	12	13	20

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Konawe Utara, Tahun 2021

Keberadaan website milik pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan penyebarluasan informasi penyelenggaraan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Pemerintah Kabupaten Konawe Utara memiliki satu website utama dengan alamat <http://www.konaweutarakab.go.id/>, dengan 9 subdomain. Subdomain untuk OPD sebagaimana disajikan pada Tabel 2.66.

Tabel 2.66.
Alamat Subdomain Website
Pemerintah Kabupaten Konawe Utara dan Penerapan Sistem
Informasi/Aplikasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

No.	Instansi	Domain/Subdomain
1.	Pemerintah Daerah	http://www.konaweutarakab.go.id/
2.	Bappeda	http://www.eplanning.bappeda.konaweutarakab.go.id/
3.	Dinas PU	http://simtaru.puprkonaweutarakab.id/#
4.	DPKAD	http://konut.simda.online
		http://ssh.konaweutarakab.go.id
5.	Bagian Organisasi	http://e-kinerja.konaweutarakab.go.id
6.	Dinas Komunikasi dan Informatika	http://diskominfo.konaweutarakab.go.id
		http://ppid.konaweutarakab.go.id
7.	BKPSDM	http://bkpsdm.konaweutarakab.go.id
		http://e-sila.skj.konaweutarakab.go.id
8.	Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	http://dpmptsp.konaweutarakab.go.id
9.	Catatan Sipil dan Kependudukan	http://siak-online.konaweutarakab.go.id
		http://dukcapilkonut.online

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Konawe Utara, Tahun 2021

2.3.2.12 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Layanan umum bidang urusan koperasi dan UMKM diarahkan pada pengembangan koperasi dan UMKM menjadi unit usaha yang kuat, maju, dan mandiri serta memiliki daya saing dengan fokus pada revitalisasi koperasi serta fasilitasi koperasi dan UMKM. Perkembangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Konawe Utara dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.67.
Persentase Koperasi Aktif
di Kabupaten Konawe Utara

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Koperasi	268	268	287	287	296
2	Jumlah Koperasi Aktif	228	200	224	224	227
3	Persentase Koperasi Aktif	85,07	74,63	78,05	78,05	76,69

Sumber : Dinas Koperasi & UMKM Kab. Konawe Utara, 2021

Tabel 2.68.
Perkembangan Modal dan aset Koperasi
di Kabupaten Konawe Utara

No	Uraian	2017	2018	2019	2020
1	Modal Sendiri (Rp.Juta)	4.071	3.871	3.961	3.968
2	Modal Luar (Rp.Juta)	3.763	3.563	3.763	3.763
3	Aset (Rp.Ribu)	610.684	660.684	675.582	675.582
4	Omzet (Rp.Ribu)	596.740	698.740	712.500	705.375

Sumber : Dinas Koperasi & UMKM Kab. Konawe Utara, 2021

Sasaran pembangunan dalam mengembangkan UMKM di Kabupaten Konawe Utara antara lain meningkatnya kinerja, produktivitas usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), meningkatnya akses kelembagaan keuangan dan permodalan pada UMKM/Industri Kecil dan Menengah (IKM), meningkatnya sumber daya manusia (SDM) pengelola koperasi UMKM/IKM, meningkatnya kualitas dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan UKM, serta terwujudnya masyarakat yang berjiwa wirausaha (entrepreneur) tinggi dan mampu mengembangkan potensi dan sumber daya yang ada.

Upaya yang telah dilakukan antara lain fasilitasi UMKM, pelatihan manajemen ekspor, impor, dan pelatihan penggunaan teknologi. Perkembangan UKM di Kabupaten Konawe Utara menunjukkan hal yang positif bagi peningkatan aktivitas perekonomian. Pada tahun 2020 jumlah UMKM di Kabupaten Konawe Utara mencapai sebanyak 2.570 unit, meningkat dibanding tahun 2019.

Tabel 2.69.
Pertumbuhan Jumlah UMKM
di Kabupaten Konawe Utara

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Usaha Mikro	957	1.176	1.223	1.021	1.079
2.	Usaha Kecil	1.053	1.452	1.561	1.323	1.364
3.	Usaha Menengah	86	106	128	133	132
Jumlah UMKM		1.530	2.096	2.734	2.912	2.477

Sumber : Dinas Koperasi & UMKM Kab. Konawe Utara, 2021

Tabel 2.70.
Penyerapan Tenaga Kerja Pada UMKM
di Kabupaten Konawe Utara

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Usaha Mikro	1.357	1.471	1.490	1.506	1.392
2.	Usaha Kecil	2.356	2.364	2.484	2.559	912
3.	Usaha Menengah	402	418	429	457	270
Jumlah Tenaga Kerja		3.928	3.928	4.115	4.253	4.403
Angkatan Kerja		27.499	28.382	31.104	29.535	33.592
Rasio Penyerapan Tenaga Kerja Pada UMKM		14,28%	13,84%	13,23%	14,40%	13,11%

Sumber : Dinas Koperasi & UMKM Kab. Konawe Utara, 2021

2.3.2.13 Penanaman Modal

Dalam proses pembangunan, investasi memiliki peranan yang sangat penting. Investasi menentukan dinamika dan akselerasi pembangunan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jika proses investasi berlangsung baik maka perekonomian akan tumbuh dengan baik selama proses investasi tersebut menghasilkan output yang efisien.

Kabupaten Konawe Utara yang kaya dengan berbagai potensi sumber daya alam, menjadi perhatian khusus bagi para penanam modal dalam negeri (1) maupun penanam modal asing (PMA) untuk berinvestasi. Kondisi ini diperlihatkan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.71.
Jumlah dan Nilai Investasi PMDN/PMA
di Kabupaten Konawe Utara

Tahun	Jumlah Investor			Nilai Investasi (Rp.Milyar)	Peningkatan nilai realisasi (Rp. Milyar)
	PMDN	PMA	Total		
2012	0	9	9	-	-
2013	0	5	5	-	-
2014	2	5	7	-	-
2015	0	1	1	1,2	1,2
2016	1	1	2	1,3	0,1
2017	1	1	2	3,7	2,4
2018	1	6	7	1,44	-2,26
2019	2	6	8	146,5	145,06
2020	2	6	8	163,88	17,38

Sumber : Dinas PM dan Pelayanan Terpadu Kab. Konawe Utara, Tahun 2021

2.3.2.14 Kepemudaan dan Olahraga

Kapasitas pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan khususnya generasi muda yang tergabung dalam organisasi dan komunitas melalui pengembangan potensi pemuda dan peningkatan peran pemuda dalam pembangunan diantaranya melalui pelatihan bela negara, karang taruna, pemuda dan sosial, serta kader anti narkoba.

Jumlah organisasi olahraga di Kabupaten Konawe Utara mengalami peningkatan. Peningkatan organisasi olahraga di Kabupaten Konawe Utara tersebut menunjukkan keberhasilan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara dalam memasyarakatkan olahraga.

Tabel 2.72.
Perkembangan Olahraga
di Kabupaten Konawe Utara

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Organisasi	9	12	14	16	16
2.	Jumlah Atlit yang dibina	1	1	1	4	11
3.	Jumlah klub olahraga	17	20	20	21	21
4.	Jumlah sarana olahraga	247	267	294	295	300

Sumber : Dispora Konawe Utara, Tahun 2021

Pada Pekan olahraga tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2010 Kabupaten Konawe Utara menduduki peringkat 14, pada tahun 2014 peringkat 11, dan pada tahun 2018 peringkat 6 dari 17 kabupaten/kota. Melihat organisasi olahraga yang semakin berkembang, perlu upaya pemerintah dalam mengembangkan potensi sumberdaya manusia olahraga yaitu pelatih, wasit, pembina, klub olahraga dan atlet. Selain itu juga perlu melengkapi sarana dan prasarana olahraga yang dapat dimanfaatkan untuk latihan maupun pertandingan.

2.3.2.15 Statistik

Urusan statistik di Kabupaten Konawe Utara masih ditangani oleh Pemerintah Pusat melalui Badan Pusat Statistik (BPS) yang bertempat di Wanggudu. Namun demikian, karena melihat bahwa di segenap kegiatan statistik perlu diadakan keseragaman dan koordinasi, maka Pemerintah Kabupaten Konawe Utara bekerjasama dengan BPS melaksanakan beberapa program yang hasilnya

dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Utara sebagai bahan penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan, yaitu terdiri dari 4 (empat) publikasi; Buku Daerah Dalam Angka, Buku PDRB, Statistik Daerah, dan Statistik Kesejahteraan.

2.3.2.16 Persandian

Bagi pemerintah daerah, masalah persandian sebagaimana dimuat dalam Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, masuk menjadi salah satu urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Pengendalian sistem keamanan informasi merupakan pelaksanaan dari urusan persandian. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan antara lain, meliputi: Sosialisasi Keamanan Informasi ; Pemeliharaan Jaringan telekomunikasi; Kegiatan Forum Komunikasi Sandi Daerah; Koordinasi persandian pusat dan daerah.

2.3.2.17 Kebudayaan

Salah satu potensi sebagai penyangga utama wisata di Kabupaten Konawe Utara adalah potensi budaya baik yang berupa warisan budaya benda maupun warisan budaya tak benda. Upaya pelestarian budaya meliputi perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian, nilai tradisi budaya dan warisan budaya melalui festival.

Tabel 2.73.
Kinerja Urusan Kebudayaan
di Kabupaten Konawe Utara

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	-	1	-	-	-
2.	Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya	1	1	1	1	1
3.	Situs Cagar Budaya Yang Dilindungi	4	4	4	4	4
4.	Kawasan Cagar Budaya Yang Dilindungi	-	-	-	-	-
5.	Bagunan Cagar Budaya Yang Dilindungi	-	-	-	-	-

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Konawe Utara, Tahun 2021

2.3.2.18 Perpustakaan

Urusan perpustakaan selama tahun 2017 hingga 2020 masih dibutuhkan upaya yang maksimal dari pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat sehingga capaian kinerja per tahun bidang perpustakaan semakin meningkat. Capaian kinerja yang telah dicapai dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.74.
Kinerja Urusan Perpustakaan
di Kabupaten Konawe Utara

No.	Indikator Kinerja	Capaian				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah pengunjung perpustakaan	588	733	769	825	219
2.	Jumlah judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah	1.842	2.311	2.286	2.291	2.291
3.	Jumlah eksamplar koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	6.035	7.449	7.573	7.624	7.624
4.	Jumlah desa/kelurahan yang mendapatkan bantuan buku	3	5	5	6	-

Sumber : Dinas Perpustakaan Kab. Konawe Utara, Tahun 2021

2.3.2.19 Kearsipan

Sesuai dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, salah satu urusan yang ditangani daerah adalah kearsipan. Urusan kearsipan diarahkan untuk penyelamatan dan pelestarian arsip daerah serta peningkatan kualitas pelayanan dalam bidang kearsipan. Arsip sebagai bukti pelaksanaan kegiatan instansi memiliki fungsi strategis dan dinamis. Strategis artinya bahwa informasi yang terekam dalam arsip tidak hanya memiliki nilai guna primer yang berguna bagi instansi pencipta sebagai bahan pengambilan keputusan manajemen, tetapi arsip tentu memiliki nilai guna sekunder yaitu nilai guna kebulatan dan informasional yang berguna untuk lembaga lain, orang, dan masyarakat luas. Nilai guna kebulatan suatu arsip karena terkait dengan keberadaan instansi, benda, tempat, dan orang. Sementara nilai guna informasional suatu arsip karena terkait dengan terjadinya peristiwa, kebijakan pemerintah, dan lain sebagainya.

Pada urusan Kearsipan yaitu Pengelolaan arsip secara baku dengan indikator kinerja yaitu persentase arsip statis dan dinamis yang diarsipkan dan Peningkatan SDM pengelola kearsipan di Kabupaten Konawe Utara, pada tahun 2020 sebesar 9,88 persen.

2.3.3 Fokus Layanan Urusan Pilihan

2.3.3.1 Kelautan dan Perikanan

Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, mengamanatkan bahwa pengelolaan perikanan harus dilaksanakan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kebersamaan, kemitraan, kemandirian, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, kelestarian, dan pembangunan yang berkelanjutan.

Sasaran pembangunan kelautan dan perikanan adalah mencapai peningkatan produksi dan produktivitas perikanan dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi ikan, menyediakan bahan baku industri, meningkatkan pendapatan pembudidaya dan nelayan serta memperluas kesempatan berusaha dan kesempatan kerja. Kondisi pengelolaan sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Konawe Utara disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.75.
Kondisi Pengelolaan Sub Sektor Perikanan
di Kabupaten Konawe Utara

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Kontribusi Sub Sektor Perikanan Terhadap PDRB (%)	15,64	16,30	6,01	8,19	8,73
2.	Produksi Perikanan (Ton)					
	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	12.743	13.846	14.765	15.165	15.059
	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	17.603	17.575	21.422	9.397	8.819
	Produksi Hasil Olahan Perikanan (Ton)	975	1.017	1.145	1.503	1.378
3.	Nilai Hasil Perikanan (Juta Rp.)					

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
4.	Konsumsi Ikan (Kg/kap/thn)	49,24	49,34	49	49,27	49,32
5.	Jumlah Unit Pengolahan Ikan					
	- Pengasapan Ikan	75	82	84	85	88
	- Penggaraman/Pengeringan	245	249	252	255	258
6.	Jumlah Unit Armada & Alat Tangkap Ikan					
	- Perahu Tanpa Motor	440	453	688	341	330
	- Motor Tempel	2.113	2.113	1.968	2.128	1.832
	- Kapal Motor	197	207	66	73	76
	- Alat tangkap pukat	929	1.007	436	360	455
	- Alat tangkap jaring	1.212	1220	1497	894	1030
	- Alat tangkap pancing	960	980	1.486	490	630
	- Alat tangkap lainnya	265	295	345	354	504
7.	Nilai Tukar Nelayan	100,08	106,06	106,07	106,09	106,12

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan, Tahun 2021

2.3.3.2 Pariwisata

Pengembangan Potensi Kepariwisata yang tersebar diseluruh wilayah Kabupaten Konawe Utara berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016 – 2026 yang telah membagi Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP) menjadi 6 (enam) wilayah KPP yaitu : KPP Taipa, KPP Pulau Labengki, KPP Wawolesea, KPP Wiwirano, KPP Oheo, dan KPP Asera.

Perkembangan Kepariwisata Kabupaten Konawe Utara mengalami peningkatan yang cukup baik sejalan dengan meningkatnya kualitas aksesibilitas dan sarana penunjang. Capaian kinerja Kebudayaan dan Pariwisata dijabarkan pada tabel berikut :

Tabel 2.76.
Kondisi Pengelolaan Pariwisata
Kabupaten Konawe Utara

No.	Indikator Kinerja	Capaian				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah wisatawan Mancanegara	942	1.920	1.940	1.790	44
2.	Jumlah wisatawan domestik	23.705	26.613	53.820	61.446	8.143

No.	Indikator Kinerja	Capaian				
		2016	2017	2018	2019	2020
	Jumlah Kunjungan (orang)	24.647	28.533	55.760	63.236	8.187
3.	Jumlah akomodasi	2	3	3	15	23
4.	Rata - rata lama tinggal (hari)	2	2	2	3	3
5.	Jumlah objek wisata	6	6	6	6	6
6.	Jumlah desa wisata	-	-	-	1	1

Sumber : Dinas Pariwisata Kab. Konawe Utara, Tahun 2021

Prioritas Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Konawe Utara yaitu di Kawasan “Segitiga Berlian” (Taipa-Pulau Labengki-Air Panas Wawolesea). Namun demikian, Pemerintah Daerah tetap mengembangkan objek wisata lainnya di Kabupaten Konawe Utara.

2.3.3.3 Pertanian

Sektor pertanian merupakan salah satu prioritas pembangunan Kabupaten Konawe Utara. Sektor ini memiliki peran penting terhadap perekonomian Kabupaten Konawe Utara, karena merupakan salah satu sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB, selalu berada diatas 40 persen dengan total yang bekerja di sector pertanian sebesar 39,07 dari angkatan kerja

Dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan, Pemerintah Kabupaten Konawe Utara telah melaksanakan pembangunan pertanian dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada, yaitu pemanfaatan teknologi pertanian, kelembagaan, SDM pertanian dan sarana produksi. Lahan pertanian di Kabupaten Konawe Utara sesuai untuk budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.

Tabel 2.77.
Perkembangan Kinerja Sektor Pertanian
di Kabupaten Konawe Utara

No	Kinerja	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian Tanaman Pangan					
1	Laju Pertumbuhan Sub Sektor Tanaman Pangan (%)	1,73	2,50	0,52	1,73	2,51
2	Produksi Tanaman Padi (Ton)	18.072	18.949	16.422,78	7.339,05	6.560,70
	Luas Panen (Ha)	5.077	4.211	3.819,25	1.999,45	1.963,44
	Produktivitas (Ton/Ha)	3,56	4,50	4,30	3,67	3,34

No	Kinerja	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
3	Produksi Jagung (Ton)	3.818	13.977	5.087,46	14.033	3.539
	Luas Panen (Ha)	388	2.930	847,91	2.344	
	Produktivitas (Ton/Ha)	9,84	4,77	6,00	5,99	
B	Hortikultura					
1	Laju Pertumbuhan Sub Sektor Hortikultura (%)	-10,84	-4,67	4,86	6,65	0,12
2	Produksi Bawang Merah (Ton)			0.5	52.7	152
	Luas Panen (Ha)					
	Produktivitas (Ton/Ha)					
3	Produksi Cabai (Ton)	79,9	72,4	5.2	421,9	760
	Luas Panen (Ha)					
	Produktivitas (Ton/Ha)					
C	Peternakan					
1	Laju Pertumbuhan Sub Sektor Peternakan (%)		8,76	6,01	8,18	2,32
2	Produksi Daging Sapi (Kg)	38.800	40.500	45.200	89.540	91.675
	Produksi Daging Kambing (Kg)	1.150	1.250	1.350	2.343	2.743
	Produksi Daging Ayam (Kg)	31.827	33.652	35.919	76.670	78.871
	Produksi Daging Itik (Kg)	298	305	314	-	-

Sumber : Dinas Tanaman Pangan Kab. Konawe Utara, Tahun 2021

2.3.3.4 Perkebunan

Sub Sektor perkebunan adalah sub sektor andalan Kabupaten Konawe Utara. Laju pertumbuhan sub sektor perkebunan pada PDRB tahun 2020 sebesar 8,05 persen atau meningkat dari tahun 2019 sebesar 8,19 persen. Komoditas utama yang diusahakan antara lain yaitu kakao, kelapa sawit, kelapa, lada dan cengkeh. Tabel berikut menggambarkan luas tanaman menghasilkan dan produksi hasil beberapa komoditas perkebunan di Kabupaten Konawe Utara.

Tabel 2.78.
Perkembangan Produktivitas Sub Sektor Perkebunan
di Kabupaten Konawe Utara

No.	Komoditas	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kelapa Dalam	Luas Panen (Ha)	4,055	4,055	1,388	2,426.5	2,426.5
		Produksi (Ton)	1,559.08	1,559.08	1,589.13	1,589.13	961.35
		Produktivitas (Ton/Ha)	38.45	38.45	114.49	65.49	39.62
2	Kelapa Sawit	Luas Panen (Ha)	456	456	15,520.5	18,006.1	18,006.1

		Produksi (Ton)	593.75	593.75	593.75	593.75	60.23
		Produktivitas (Ton/Ha)	130.21	130.21	3.83	3.30	0.33
3	Kopi	Luas Panen (Ha)	995	995	413	511.5	511.5
		Produksi (Ton)	341.46	341.46	341.46	341.46	251.54
		Produktivitas (Ton/Ha)	34.32	34.32	82.68	66.76	49.18
4	Kakao	Luas Panen (Ha)	7,979	7,979	2,561	3,988.5	3,988.5
		Produksi (Ton)	1,418.37	1,418.37	1,418.32	1,418.32	585.70
		Produktivitas (Ton/Ha)	17.78	17.78	55.38	35.56	14.68

Sumber : BPS, Kab. Konawe Utara Dalam Angka, 2017 s.d 2021

2.3.3.5 Kehutanan

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, urusan kehutanan sudah bukan merupakan wewenang pemerintah daerah kabupaten lagi, tetapi ditarik ke pemerintah daerah provinsi.

Sebagai upaya Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Konawe Utara telah menyiapkan rencanaa peningkatan pengelolaan perhutanan sosial. Kewenangan kab/kota dalam urusan kehutanan berupa pelaksanaan pengelolaan Hutan Tanaman Rakyat oleh kab/kota sesuai dengan PP 23 Tahun 2021 Pasal 26 ayat 7. Hutan Tanaman Rakyat di Konawe Utara seluas ±950 Ha yang berlokasi di Desa Awila, Molawe, Molawe Puncak Kec. Molawe dan Desa Banggarema Kec. Andowia.

2.3.3.6 Energi dan Sumberdaya Mineral

Kewenangan urusan ESDM oleh Kabupaten ini sangat terbatas, khususnya terkait Sumber Daya Energi dan kebutuhan energi secara umum. Upaya yang telah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan energy adalah dengan melakukan kajian. Kajian Geothermal di Air Panas Wawolesea menunjukkan bahwa energy panas bumi di Wawolesea belum dapat dijadikan alternative energy dikarenakan standar panas minimal energy panas bumi seharusnya 90°C sedangkan panas bumi di Wawolesea adalah 75°C. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan beberapa kajian sebagai langkah awal ketercukupan energy di Kabupaten Konawe Utara.

2.3.3.7 Perdagangan

Urusan perdagangan di Kabupaten Konawe Utara diprioritaskan pada pengembangan pasar tradisional. Terhitung sejak disahkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, maka pasar tradisional telah berubah penyebutannya menjadi Pasar Rakyat, dengan tetap memperhatikan kekhususan pasar rakyat terkait aspek lokasi yang bersifat tetap berupa toko/kios/los dan bentuk lainnya serta menjadi tempat jual beli dengan proses tawar menawar.

Sebagai bagian dalam urat nadi perekonomian daerah, peran pasar rakyat/tradisional sangatlah signifikan untuk menjalankan berbagai fungsinya, antara lain: memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah; meningkatkan kesempatan kerja; menyediakan sarana berjualan, terutama bagi pelaku usaha UMKM; menjadi referensi harga bahan pokok yang mendasari perhitungan tingkat inflasi dan indikator kestabilan harga; meningkatkan PAD. Sampai dengan akhir tahun 2020 di Kabupaten Konawe Utara terdapat 14 pasar yang kondisinya sudah baik dan cukup baik, data tersebut disajikan pada Tabel 2.79.

Tabel 2.79.
Data Kondisi Pasar Tradisional/Rakyat
di Kabupaten Konawe Utara

No.	Nama Pasar	Luas Tanah (m2)	Kepemilikan	Jumlah Pedagang Kios/Los	Rehab./Pemb.	Kondisi
1.	Pasar Motui	1.774,5	Pemda	1 kios 2 los kering 1 los basah	2018	Baik
2.	Pasar Sawa	405,5	Pemda	1 kios 2 los kering 1 los basah	2017	Baik
3.	Pasar Lembo	3.203,5	Pemda	1 kios 2 los kering	2019	Baik
4.	Pasar Wawolesea	1.475,5	Pemda	1 Unit	2020	Baik
5.	Pasar Tinobu	6.736	Pemda	1 kios 4 los kering 2 los basah	2019	Baik
6.	Pasar Molawe	4.864	Pemda	3 kios 4 los kering	2020	Baik

No.	Nama Pasar	Luas Tanah (m2)	Kepemilikan	Jumlah Pedagang Kios/Los	Rehab./Pemb.	Kondisi
				5 los basah		
7.	Pasar Lahimbua	2.235	Pemda	2 kios 1 los kering	2019	Baik
8.	Pasar Kuliner	5.079	Pemda	2 kios 1 los kering	2020	Baik
9.	Pasar Asera	1.632,5	Pemda	4 los kering	2017	Baik
10.	Pasar Todoloiyo	1.309	Pemda	1 kios 2 los kering 1 los basah	2020	Baik
11.	Pasar Lamona	9.184	Pemda	1 Unit	2018	Baik
12.	Pasar Langgikima	9.070,7	Pemda	2 los kering 1 los basah	2018	Baik
13.	Pasar Landawe		Pemda	1 kios 2 los kering 1 los basah	2020	Baik

Sumber : Dinas Perindag Kab. Konawe Utara, 2021

2.3.3.8 Perindustrian

Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB masih relatif kecil, hanya 1,13 persen tahun 2020. Kegiatan pembangunan industri di Kabupaten Konawe Utara diarahkan pada peningkatan aktivitas dan daya saing industri kecil menengah. Perkembangan sektor industri di Kabupaten Konawe Utara disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.80.
Jumlah Industri Kecil Menengah
di Kabupaten Konawe Utara

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Industri Besar	3	3	3	3	3
2	Industri Menengah	4	5	7	11	15
3	Industri Kecil	399	251	254	257	276
4	Jumlah IKM	406	259	264	271	294
5	Jumlah IKM yang difasilitasi	25	27	35	38	42

Sumber : Dinas Perindag Kab. Konawe Utara 2021

Tabel 2.81.
Jenis Industri dan Jumlah Tenaga Kerja
di Kabupaten Konawe Utara

No	Jenis Usaha Industri	Jumlah Perusahaan	Jumlah Tenaga Kerja	Produksi (unit)	Nilai (Rp.000)
1.	Makanan dan Minuman	216	280	70.704.050	921.800
2.	Kayu dan hasil hutan	194	277	632,905	883.022
3.	Kertas dan barang dari kertas	1	3	400	80.000
4.	Kimia dan barang dari karet	-	-	-	-
5.	Galian bukan logam	48	147	134.504.834	1.824.150
6.	Logam dasar besi dan baja	3	5	110	103.300
7.	Furnitur	60	107	1.604.050.000	480.281
8.	Pengolahan lainnya	1	3	-	26.400
9.	Lainnya	54	72	17.052.150	828.600
Jumlah		577	894	2.459.216.992	5.147.554

Sumber : BPS, Kab. Konawe Utara Dalam Angka, Tahun 2021

2.3.3.9 Transmigrasi

Penyelenggaraan urusan Transmigrasi sebagai suatu pendekatan untuk mencapai tujuan kesejahteraan, pemerataan pembangunan daerah, serta perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Pelaksanaan transmigrasi di Kabupaten Konawe Utara sampai saat ini masih tergantung pada kuota dari Pemerintah Pusat. Perkembangan yang terjadi sekarang justru semakin menurunnya kuota/jatah transmigran dari tahun ke tahun. Hal ini berbanding terbalik dengan jumlah animo, minat, serta pendaftar calon transmigran yang cukup besar.

Tabel 2.82.
Penempatan Transmigrasi
di Kabupaten Konawe Utara

Tahun	Jumlah KK	Jiwa		Jumlah	Asal Daerah
		Laki-Laki	Perempuan		
2016	75	158	125	287	Jawa, Lampung, Banten
2017	25	54	59	113	Jawa, NTB
2018	15	15	17	32	Jawa
2019	14	16	18	34	Jawa
2020	-	-	-	-	-

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2021

Kawasan Transmigrasi di Kabupaten Konawe Utara terdiri dari 4 (empat) wilayah Unit Permukiman Transmigrasi (UPT), yaitu UPT Padalere, UPT Puuhialu, UPT Puupi, dan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Hialu. Dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) pada areal kawasan transmigrasi dan permukiman penduduk di Kabupaten Konawe Utara diarahkan untuk menciptakan sentra-sentra agribisnis dan agroindustri yang mampu menarik investasi swasta, sebagai penggerak perekonomian para transmigran dan penduduk sekitar menjadi pusat-pusat pertumbuhan baru, sekaligus untuk membuka kesempatan kerja dan peluang usaha.

2.3.4 Unsur Pendukung

2.3.4.1 Sekretariat Daerah

Fungsi perumusan kebijakan merupakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah. Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif. Setda Kabupaten Konawe Utara terdiri atas 12 Bagian.

Tabel 2.83.
Kinerja Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan
di Kabupaten Konawe Utara

No.	Indikator Kinerja	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Nilai evaluasi atas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai/ Predikat	C	C	B	B	B
2.	Nilai evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah (EKPPD)	Nilai/ Predikat	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Baik
3.	Jumlah produk hukum : - Peraturan Daerah - Peraturan Bupati - Keputusan Bupati	Jumlah	15 136 838	9 43 392	7 35 445	6 81 436	4 52 852
4.	Jumlah kegiatan						

No.	Indikator Kinerja	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
	kerjasama kemitraan pembangunan antara pemda konawe utara dengan pemerintah daerah lainnya	Kegiatan	13	138	143	274	192
5.	Persentase pengaduan masyarakat yang tertangani dan terselesaikan	%	100	100	100	100	100
6.	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai/ Predikat	-	-	-	CC (50,04)	-

Sumber : Sekretariat Daerah Kab. Konawe Utara, 2021

Predikat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah tahun 2018, 2019 dan 2020 dengan nilai B meningkat dari tahun 2017 dengan predikat C. Hal ini dapat diartikan bahwa komitmen pemerintah daerah dalam menetapkan tujuan dan sasaran yang berorientasi hasil, peningkatan keterkaitan antara program,/kegiatan dan sasaran, selanjutnya mengurutkan/cascading semua indikator kinerja dimulai dari dokumen perencanaan jangka menengah sampai dengan perencanaan tahunan masing-masing Perangkat Daerah telah membuahkan hasil yang cukup memuaskan, selanjutnya akan terus ditingkatkan di tahun - tahun mendatang.

2.3.4.2 Sekretariat DPRD

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan perwakilan yang telah diberi mandat oleh rakyat dalam urusan pemerintahan. DPRD merupakan mitra Kepala Daerah yang berkedudukan sama tetapi mempunyai fungsi yang berbeda. Dalam melaksanakan fungsinya DPRD di bantu oleh Sekretariat DPRD. Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan DPRD dalam melaksanakan hak, tugas dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

2.3.5 Unsur Penunjang

2.3.5.1 Perencanaan

Penyusunan rencana pembangunan Kabupaten Konawe Utara didasarkan pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya diturunkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Dalam hal perencanaan, ketersediaan dan akurasi data tetap menjadi perhatian, di samping itu sejumlah studi dilakukan untuk menjadi pedoman arah pembangunan ke depan. Untuk sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan maka koordinasi dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Pusat juga dilaksanakan.

Tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang semakin berkualitas dan kompetitif baik dalam aspek pelayanan publik dan akuntabilitas berbasis kinerja dan transparan memberi dampak terhadap penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang baik dan tepat dengan melibatkan seluruh *stakeholder* pembangunan secara komprehensif. Pengintegrasian perencanaan daerah dengan pengelolaan keuangan sampai dengan *monev* dan evaluasi kinerja dalam penerapan *e-planning terintegrasi* menjadi salah satu upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas tersebut.

Untuk melaksanakan fungsinya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Konawe Utara, mempunyai kewenangan :

1. Penyusunan Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RPKD) sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
2. Penyusunan Rencana Pendanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai usulan program masing-masing yang berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
3. Penyusunan rencana kerja pengalokasian dana yang bersumber dari APBN sebagai masukan Bappenas dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP);
4. Melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka menciptakan sinkronisasi program kegiatan OPD serta menjaring aspirasi masyarakat dan pelaku pembangunan se-Kabupaten Konawe Utara;

5. melaksanakan tugas koordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam hal Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rencana Anggaran dan Belanja Daerah (RAPBD) serta perubahannya sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
6. Melaksanakan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat, OPD Kabupaten serta membina hubungan kerja dengan Lembaga Non Departemen dan Swasta untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
7. Melaksanakan koordinasi, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah pada setiap OPD lingkup Pemerintah Kabupaten sebagai bahan penyusunan program kerja pembangunan tahun berikutnya;
8. Melaksanakan pengkajian dan penelitian pembangunan Daerah untuk perencanaan pembangunan Daerah sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
9. Melakukan kegiatan lain dalam rangka perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan petunjuk Bupati.

Selain itu, tujuan yang akan dicapai yaitu untuk mencapai kualitas perencanaan didukung penelitian dan pengembangan yang salah satu caranya melalui semakin berkembangnya jejaring /network dengan *stakeholder* lain yang terkait (akademisi). Untuk mewujudkan hal tersebut terdapat beberapa kendala antara lain masih terdapatnya kesenjangan antara implementasi dan kebijakan dan belum optimalnya data/informasi dan hasil-hasil kajian penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah.

Tabel 2.84.
Kinerja Fungsi Penunjang Perencanaan dan Kelitbangan
di Kabupaten Konawe Utara

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Tersedianya dokumen perencanaan yang telah ditetapkan dengan perkada tepat waktu	2	2	2	2	2
2	Keseuaian program RPJMD dengan program RKPD	60,34	60,40	60,68	62,48	60,74
3	Jumlah penelitian yang dilaksanakan oleh bidang litbang Bappeda	-	3	2	3	3

Sumber : Bappeda Kab. Konawe Utara, Tahun 2021

2.3.5.2 Keuangan

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan mengingat perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah, timbul hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud merupakan sub-sistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Pengelolaan keuangan daerah tersebut bertumpu pada upaya peningkatan efisiensi, efektifitas, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan keuangan publik baik dari sisi pendapatan maupun belanja.

Selain kedua undang-undang tersebut, terdapat peraturan perundang - undangan lain yang menjadi acuan pengelolaan keuangan daerah, antara lain:

1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Sumber-sumber keuangan yang menjadi pendapatan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan/dana transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dana perimbangan/dana transfer merupakan sumber pendapatan daerah yang bersumber dari transfer dana dari pemerintah atasan (APBN dan APBD Provinsi Sultra) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, bagi hasil pajak daerah, dan bantuan keuangan.

Dana perimbangan/dana transfer selain dimaksudkan untuk membantu daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah. Ketiga komponen dana perimbangan ini merupakan bagian dari transfer ke daerah dari Pemerintah Pusat serta merupakan satu kesatuan yang utuh.

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah diarahkan selain untuk mempercepat realisasi visi dan misi daerah juga untuk mengatasi berbagai permasalahan pokok seperti penanganan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja, perbaikan mutu pelayanan publik utamanya pelayanan dasar, peningkatan produktivitas sektor dominan yang mempengaruhi PDRB, dan perluasan daya saing investasi. Namun demikian, berbagai permasalahan pengelolaan keuangan yang dihadapi yaitu, belum optimalnya upaya peningkatan potensi pendapatan daerah terutama dari pajak daerah; masih sering terlambatnya pelaporan keuangan daerah; belum optimalnya integrasi sistem pengelolaan keuangan secara online; dan masih banyaknya permintaan pembayaran yang bertumpu di akhir tahun adalah permasalahan pengelolaan keuangan yang dihadapi oleh Dinas Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Utara. Selain itu pengelolaan aset daerah belum optimal terkait dengan masih rendahnya koordinasi antar OPD dalam penghapusan aset daerah dan masih kurangnya tenaga teknis pengukuran aset menggunakan teknologi informasi.

Tabel 2.85
Kinerja Fungsi Penunjang Keuangan

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Predikat Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dari BPK	TW	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Tingkat kemandirian keuangan daerah (persentase realisasi PAD terhadap realisasi pendapatan daerah)	1,30%	1,35%	1,40%	2,00%	1,49%	1,79%

Sumber : DPAKD Kab. Konawe Utara, 2021

Tabel diatas memperlihatkan masih rendahnya tingkat kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Konawe Utara. Kondisi tersebut, perlu didukung dengan kebijakan penajaman APBD yang sesuai visi dan misi daerah melalui efektifitas dan efisiensi belanja daerah dan upaya peningkatan pendapatan daerah yang tetap mendukung iklim investasi daerah serta adanya komitmen seluruh elemen pengelola keuangan daerah, sehingga tercipta pengelolaan keuangan yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Beberapa upaya strategis untuk mendukung terwujudnya *good governance* dalam pengelolaan keuangan dan barang daerah yang profesional, terbuka, dan bertanggung jawab, ditempuh dengan:

1. Mempedomani kebijakan pemerintah dalam pengelolaan keuangan dan barang daerah;
2. Mengupayakan aplikasi sistem informasi pengelolaan keuangan dan barang daerah yang terintegrasi dengan sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) Kementerian Dalam Negeri RI;
3. Mengikuti Diklat teknis dan *workshop* mengenai pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah, perkembangan peraturan pengelolaan keuangan dan barang daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun lembaga keuangan lainnya;
4. Mengupayakan adanya informasi sedini mungkin dari pemerintah pusat agar prediksi pendapatan daerah, khususnya dana perimbangan, dalam APBD semakin

realistis;

5. Melaksanakan sistem informasi pengelolaan pajak daerah yang terintegrasi;
6. Meningkatkan koordinasi antar Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) penghasil dalam upaya tercapainya target pendapatan asli daerah yang diampu oleh masing-masing OPD penghasil dan mengevaluasi atas kinerja Pendapatan Asli Daerah;
7. Meningkatkan koordinasi antar OPD untuk memonitor dan melaporkan pengelolaan keuangan dan barang daerah yang menjadi tanggung-jawabnya;
8. Penyebarluasan informasi pendapatan, pengelolaan keuangan, dan pengelolaan aset daerah melalui media masa, media *online*, *leaflet*, dan lain-lain;
9. Menambah dan merevisi *Standard Operating Procedure* (SOP) pajak daerah, pengelolaan keuangan, dan pengelolaan aset daerah berdasarkan peraturan yang berlaku;
10. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas melalui pembentukan Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD);
11. Melaksanakan tata kelola keuangan berbasis akrual agar dapat menyajikan laporan keuangan lebih transparan dan akuntabel.

2.3.5.3 Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah kepegawaian dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Pelatihan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020 berjumlah 2.728 orang terdiri dari 1.393 laki-laki dan 1.335 perempuan.

Tabel 2.86.
Kondisi Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Konawe Utara

No.	Golongan	2018	2019	2020
1	Golongan I	8	7	6
2	Golongan II	427	396	345
2	Golongan III	1.689	1.841	1.937
4	Golongan IV	372	377	440
Jumlah		2.496	2.621	2.728

Sumber : BKPSDM Kab. Konawe Utara, 2021

Tabel 2.87.
Jumlah ASN Berdasarkan Jabatan
di Kabupaten Konawe Utara

No.	Golongan	2018	2019	2020
1	Fungsional Tertentu	956	928	1.055
2	Fungsional Umum	818	1.029	1.034
3	Struktural			
	Eselon IV	498	436	417
	Eselon III	195	191	189
	Eselon II	29	37	33
Jumlah		2.496	2.621	2.728

Sumber : BKPSDM Kab. Konawe Utara, 2021

Permasalahan yang dihadapi pengelolaan kepegawaian di Kabupaten Konawe Utara diantaranya adalah belum optimalnya pengembangan dan pembinaan aparatur jabatan fungsional yang dipengaruhi oleh kurangnya informasi dan anggaran untuk pejabat fungsional untuk mengikuti diklat teknis.

Tabel 2.88.
Kinerja Fungsi Penunjang Kepegawaian, Pendidikan
dan Pelatihan di Kabupaten Konawe Utara

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pejabat struktural yang telah mengikuti diklat kepemimpinan sesuai jenjang jabatannya	107	143	154	162	162
2	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat teknis dan fungsional	314	368	371	388	388

Sumber : BKPSDM Kab. Konawe Utara, 2021

Badan Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Konawe Utara belum memiliki sertifikasi/akreditasi, sehingga tidak dapat menyelenggarakan diklat secara mandiri dan belum adanya pasal di dalam PP Nomor 100 tahun 2001 tentang Pendidikan dan Pelatihan PNS yang menyebutkan sanksi bagi Pejabat struktural yang tidak mengikuti Diklatpim sesuai dengan jenjangnya sehingga tersirat bahwa Diklatpim bukan merupakan diklat wajib bagi pejabat struktural. Yang menjadi perhatian kedepannya yaitu perlu pengoptimalan sistem manajemen SDM aparatur dengan menggunakan teknologi informasi

sehingga program kegiatan dalam rangka peningkatan aparatur PNS dapat terkontrol dan terencana secara sistematis.

2.3.6 Unsur Pengawasan

2.3.6.1 Pengawasan (Inspektorat Daerah)

Salah satu fungsi penunjang pemerintahan adalah pengawasan. Fungsi ini lebih dititikberatkan pada tindakan konsultatif dan preventif agar pelaksanaan pembangunan daerah berada di jalur yang benar.

Kebijakan pengawasan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara merupakan salah satu bentuk dan tekad untuk mendukung cita-cita reformasi yaitu untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa sebagai konsekuensi untuk menciptakan kabupaten yang baik, efektif, efisien, dan bebas dari KKN. Kebijakan tersebut diambil oleh manajemen (instansi atau pejabat yang mempunyai kewenangan mengambil keputusan di bidang pengawasan) dan dijadikan sebagai pedoman bagi seluruh anggota organisasi APIP dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasannya.

Inspektorat Kabupaten Konawe Utara sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) memiliki peran dan fungsi melaksanakan tugas pengawasan urusan pemerintahan yang diatur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007. Inspektorat provinsi dan kabupaten/kota mempunyai fungsi sebagai perencanaan program pengawasan; perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan; pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian pengawasan.

Auditor adalah pelaksana pengawasan yang mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan pengawasan intern pada instansi pemerintah dan memberikan rekomendasi berdasarkan temuan-temuan pemeriksaan yang disajikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Manfaat pengawasan internal melalui pemeriksaan auditor tidak hanya berupa banyaknya temuan yang dilaporkan, namun juga berupa efektivitas tindak lanjut oleh auditor. Pengawasan internal akan menjadi sia-sia tanpa tindakan perbaikan dalam penyelesaian tindak lanjut sehingga tujuan pengawasan tidak tercapai, yakni peningkatan kinerja bagi organisasi dan akan menimbulkan ketidakpercayaan publik.

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) dalam lingkup pemerintah daerah di Indonesia telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional.

Tuntutan kepatuhan terhadap penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan auditor atau APIP di Indonesia dalam peraturan tersebut di atas, secara hukum mengisyaratkan kewajiban untuk penyelesaiannya. Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dari suatu rangkaian pengawasan yang meliputi: perencanaan pengawasan, proses pengawasan, laporan hasil pengawasan sampai dengan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.89.
Target dan Realisasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Internal dan Eksternal di Kabupaten Konawe Utara

No.	Tahun	TLHP Internal dan Eksternal	
		Target (%)	Realisasi (%)
1.	2016	100,00	70,62
2.	2017	100,00	71,24
3.	2018	100,00	79,31
4.	2019	100,00	81,02
5.	2020	100,00	80,38

Sumber : Inspektorat Kab. Konawe Utara, 2021

Dari tabel di atas terlihat bahwa Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (THLP) baik internal maupun eksternal yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Konawe Utara selama tahun 2016 - 2020 dengan realisasi melebihi target yang telah direncanakan. Rata rata capaian Tindak Lanjut Hasil pemeriksaan (THLP) baik internal maupun eksternal yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Konawe Utara selama tahun 2016 - 2020 adalah sebesar 80,38%.

Untuk memaksimalkan kinerja APIP maka diperlukan peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya aparatur Inspektorat Kabupaten Konawe Utara.

Berdasarkan formasi dan hasil Analisis Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara, pada tahun 2020 masih terdapat kekurangan tenaga Aparatur Pengawasan sejumlah 26 personil. Kondisi jumlah tenaga Aparatur Pengawasan dan rincian kebutuhannya terdapat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.90.
Kondisi Jumlah Aparatur Pengawasan dan Status Leveling APIP
di Kabupaten Konawe Utara

No.	Jenis Jabatan	Jumlah	Kebutuhan	Kekurangan
1	Struktural			
	Inspektur	1	-	-
	Sekretaris	1	-	-
	Inspektur Pembantu	4	-	-
	Kasubag	2	-	-
2	Fungsional Tertentu			
	Auditor	11	25	14
	P2UPD	-	10	10
	Auditor Kepegawaian	-	2	2
3	Fungsional Umum	-	-	-
	Jumlah	19	37	26
	Status Leveling APIP	2,9		

Sumber : Inspektorat Kab. Konawe Utara, 2021

2.3.7 Unsur Kewilayahan

Fungsi penunjang pemerintahan umum merupakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh kecamatan. Kabupaten Konawe Utara terdiri dari 13 (tiga belas) wilayah kecamatan. Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa. Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat adalah pegawai negeri sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diangkat oleh Bupati.

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di Kecamatan;
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa;
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan;
9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.4 ASPEK DAYA SAING DAERAH

2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

2.4.1.1 Kemampuan Ekonomi Daerah

Kondisi makro ekonomi daerah Kabupaten Konawe Utara disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.91.
Kondisi Makro Ekonomi Kabupaten Konawe Utara

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Pertumbuhan Ekonomi	5,64	6,00	6,38	6,44	(0,72)
PDRB Perkapita (Rp.000)	49.594	53.601	57.559	61.524	60.847
Inflasi	3,54	3,01	3,00	2,92	2,25
Kemiskinan	9,75	13,93	14,22	13,66	13,53
Pengangguran	5,96	4,23	3,95	3,92	3,79
Indeks Pembangunan Manusia	67,20	67,71	68,50	69,22	69,86
Indeks Ketimpangan (Gini Ratio)	0,404	0,341	0,372	0,370	0,388

Sumber : BPS Tahun 2021

2.4.1.2 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita

Pola pengeluaran konsumsi rumah tangga dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Selain itu, pola pengeluaran dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk, dimana semakin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran maka semakin baik tingkat perekonomian penduduk. Pada kondisi pendapatan terbatas, pemenuhan kebutuhan makanan akan menjadi prioritas utama, sehingga

pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah akan terlihat bahwa sebagian besar pendapatannya digunakan untuk membeli makanan.

Persentase pengeluaran konsumsi rumah tangga di Kabupaten Konawe Utara dikelompokkan menjadi pengeluaran untuk makanan dan non makanan. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, persentase pengeluaran untuk kelompok non makanan cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2016, persentase pengeluaran non makanan penduduk Konawe Utara lebih dominan dibandingkan pengeluaran makanan. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat perekonomian penduduk di Kabupaten Konawe Utara sampai dengan tahun 2020 semakin baik.

Tabel 2.92.
Persentase Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga
di Kabupaten Konawe Utara

No.	Jenis Pengeluaran Konsumsi	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Non Makanan (Rp)	347.845	351.990	485.504	471.832	543.716
2.	Makanan (Rp)	303.306	402.167	485.025	662.264	632.825
Jumlah (Rp)		46,58	651.151	754.157	970.529	1.134.096
3.	Non Makanan (%)	53,42	46,68	49,91	47,45	46,21
4.	Makanan (%)	46,58	53,32	50,09	52,55	53,79
Jumlah (%)		100	100	100	100	100

Sumber : BPS Statistik Kesejahteraan Rakyat Kab. Konawe Utara, 2017 s.d 2020

2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

2.4.2.1 Wilayah Produktif

Wilayah produktif Kabupaten Konawe Utara meliputi wilayah pertanian, wilayah perkebunan dan Hutan Rakyat. Luasan wilayah produktif akan mengalami pergeseran setiap tahunnya mengingat perubahan peruntukan lahan khususnya perkembangan pemukiman.

Berdasarkan RTRW Kabupaten Konawe Utara Tahun 2012 - 2032, luas wilayah produktif di Kabupaten Konawe Utara seluas 239.234 Ha yang terdiri dari wilayah pertanian seluas 16.0000 Ha, Kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B) seluas 4.000 Ha, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan seluas 1.500 Ha, wilayah perkebunan hortikultura seluas 15.000 Ha, wilayah perkebunan Kelapa Sawit seluas 15.402, wilayah perkebunan tanaman rakyat 19.925, dan Hutan Rakyat

seluas 173.400 Ha. Maka rasio luas wilayah produktif sebesar 82,30 %, dimana angka rasio ini menunjukkan 82,30 % dari luas kawasan budidaya diusahakan menjadi lahan produktif.

Tabel 2.93.
Persentase Luas Wilayah Produktif
Kabupaten Konawe Utara

No.	Uraian	Luas (Ha)
1.	Luas wilayah produktif	239.234
2.	Luas seluruh wilayah budidaya	290.678
3.	Rasio (1/2)	0,82

Sumber : Perda 20/2012 RTRW Kab. Konawe Utara Tahun 2012 – 2032

2.4.2.2 Penyediaan Air Minum

Penyediaan Air minum dilaksanakan bekerjasama dengan PDAM Kabupaten Konawe Utara (Tirta Lasolo) bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Konawe Utara. Dalam rangka penanganan di desa rawan kekeringan dan belum terjangkau jaringan PDAM, selama lima tahun terakhir telah dibangun Hidran Umum (HU), pembangunan Sistem Instalasi Perpipaan Air Sederhana (SIPAS). Adapun lingkungan kawasan perkotaan dibangun Sistem Pengolahan Air Minum (SPAM) di masing - masing.

Sumber air minum sebagian besar berasal dari air tanah, baik air tanah dangkal yang berupa sumur gali maupun sumur dalam dan PDAM. Penduduk menggunakan sumur gali baik terlindungi maupun tak terlindungi, mencapai 9,57%, penduduk yang menggunakan mata air baik terlindungi maupun tak terlindungi 40,39%, sisanya menggunakan air dalam kemasan 0,59%, hanya sebagian kecil menggunakan air dari PDAM yang bersumber dari sumur dalam (lebih kurang 2,47%).

Upaya Pemerintah Kabupaten Konawe Utara untuk meningkatkan akses terhadap air bersih diantaranya dengan menambah jumlah sambungan rumah ke jaringan PDAM dan membangun instalasi Sistem Penyediaan Air Sederhana (SIPAS) melalui program APBD dan Pamsimas (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat) dengan mekanisme sharing APBN di daerah yang rawan air bersih. Instalasi yang terbangun tersebut selanjutnya diserahkan kepada masyarakat

setempat untuk dimanfaatkan, dikelola, dan dipelihara.

Cakupan air bersih pada tahun 2020 menurut data Dinas Kesehatan dan Dinas Pekerjaan umum sebesar 98,10%. Hal ini menunjukkan bahwa semua masyarakat Kabupaten Konawe Utara sudah dapat mengakses air bersih, walaupun akses air bersih ini masih mengalami kendala dari segi kualitas, kontinuitas dan kuantitas.

Tabel 2.94.
Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Air Minum
Menurut Sumbernya di Kabupaten Konawe Utara

No.	Sumber	Persentase (%)
1.	Pompa	2,47
2.	Air Dalam Kemasan	0,59
3.	Sumur Terlindungi	5,35
4.	Sumur Tak Terlindungi	4,22
5.	Mata Air Terlindungi	32,11
6.	Mata Air Tak Terlindungi	8,28
7.	Air Permukaan	0,69
8.	Lainnya	46,29
Total		100,00

Sumber : BPS Kab. Konawe Utara, Tahun 2021

2.4.2.3 Penyediaan Energi Listrik

Komitmen pemerintah daerah pada bidang energi dengan berupaya untuk mengatasi ketersediaan listrik di Kabupaten Konawe Utara selama kurun waktu empat tahun terakhir telah memperlihatkan capaian yang sangat memuaskan. Dapat dilihat pada angka Rasio elektrifikasi Kabupaten Konawe Utara pada tahun 2020 mencapai 99,99 persen.

Tabel 2.95.
Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik
di Kabupaten Konawe Utara

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Listrik PLN	60,84	66,78	85,86	87,45	99,99
2.	Listrik Non PLN	12,57	12,34	12,11	11,88	-
3.	Bukan Listrik	26,59	20,88	2,03	0,67	-
4.	Rasio Elektrifikasi	73,41	79,12	97,97	99,33	99,99

Sumber : BPS Kab. Konawe Utara 2021, Dianalisis

2.4.2.4 Penyediaan Jaringan Telekomunikasi

e-Government merupakan salah satu pengungkit dalam mendukung terwujudnya program reformasi birokrasi di daerah. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara memposisikan urusan komunikasi dan informatika sebagai komponen terpenting untuk menuju pemerintahan berbasis elektronik atau teknologi informasi dan komunikasi. Mutlak bagi pemerintah Kabupaten Konawe Utara, agar mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara prima dengan kemampuan memanfaatkan sarana dan prasarana teknologi informasi tersebut di berbagai lini.

Penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan disebut juga *e-Government (e-gov)*. *e-Government* telah diaplikasikan didukung dengan sarana dan prasarana pengembangan jaringan internet yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi internal pemerintahan, menyampaikan pelayanan publik, atau proses pemerintahan yang demokratis. Keuntungan dari *e-Government* adalah peningkatan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik dari pelayanan publik. Selain penyajian informasi dan aplikasi *e-Gov* melalui *website*, Pemerintah Kabupaten Konawe Utara juga sudah menerapkan sistem informasi baik yang bersifat *intranet*, *desktop*, maupun *online sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut*.

Tabel 2.96.
Aplikasi Sistem Informasi di Kabupaten Konawe Utara

No.	Tahun	Nama Sistem Informasi
1.	2010	SIMDa Keuangan
2.	2015	SIJARI (Sistem Informasi Jaringan Irigasi)
3.	2016	Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
4.	2017	Satu Peta Untuk Semua (Konawe Utara Geoportal)
5.	2019	SIMDAren Terintegrasi
6.	2019	Atisisbada (Aplikasi Teknologi Informasi Siklus Barang Daerah)
7.	2020	SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah)

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, Tahun 2021

2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

Iklim investasi di Kabupaten Konawe Utara terus berkembang dan menarik investor dari tahun ke tahun seiring bertambahnya pertumbuhan ekonomi di wilayah ini. Untuk mendorong iklim investasi yang baik, Kabupaten Konawe Utara memiliki Dinas Perizinan dan Penanaman Modal yang dibentuk atas kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Gambaran atas iklim berinvestasi dapat dilihat pada indikator angka kriminalitas, jumlah demo, lama proses perizinan, jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah, dan jumlah perda yang mendukung iklim usaha.

2.4.3.1 Angka Kriminalitas

Dalam mendukung terciptanya iklim berinvestasi di Kabupaten Konawe Utara maka pemerintah daerah bersama dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah instansi vertikal (kepolisian, TNI, dan Kejaksaan) harus berupaya meningkatkan keamanan yang kondusif di masyarakat, menjaga ketertiban dalam pergaulan masyarakat, serta menanggulangi kriminalitas sehingga kuantitas dan kualitas kriminalitas dapat diminimalisir. Angka kriminalitas yang tertangani merupakan indikator yang berguna untuk menggambarkan tingkat keamanan masyarakat, semakin rendah tingkat kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat.

Tabel 2.97.
Angka Kriminalitas di Kabupaten Konawe Utara

No.	Tindak Kriminal	Jumlah Kasus			
		2017	2018	2019	2020
1.	Narkoba	-	-	1	-
2.	Pembunuhan	-	-	1	-
3.	Kejahatan Seksual	1	-	-	1
4.	Penganiayaan	14	6	7	23
5.	Pencurian	12	18	14	9
6.	Penipuan	3	8	3	1
7.	Pemalsuan Uang	1	-	-	-
8.	Jumlah selama 1 tahun	25	32	26	34
Jumlah Penduduk		59.673	60.884	62.017	67,871
Angka Kriminalitas		0.04%	0.05%	0.04%	0.05%

Sumber : Konawe Utara Dalam Angka, Tahun 2021

Tabel 2.97 menunjukkan bahwa pada tahun 2020 angka kriminalitas di Kabupaten Konawe Utara mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2019. Peningkatan angka kriminalitas ini sebagian besar adalah kasus penganiayaan sebanyak 23 kasus. Perlu penanganan yang serius dari pemerintah untuk menekan angka kriminalitas di Konawe Utara.

2.4.3.2 Jumlah Demonstrasi

Salah satu yang harus dikendalikan dalam mendukung iklim investasi yang kondusif adalah demonstrasi/unjukrasa. Demonstrasi atau unjuk rasa adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang dihadapan umum. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut.

Tabel 2.98.
Jumlah Demonstrasi/Unjuk Rasa
di Kabupaten Konawe Utara

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Bidang politik	4	1	2	1	1
2.	Bidang ekonomi	15	24	22	20	18
3.	Kasus pemogokan kerja	-	-	-	-	-
Jumlah Demostrasi/Unjuk Rasa		17	19	25	24	19

Sumber : Kesbangpol Kab. Konawe Utara, Tahun 2021

2.4.3.3 Kemudahan Perizinan

Pelayanan publik yang memuaskan masyarakat adalah tujuan akhir dari reformasi birokrasi. Sejalan dengan hal itu, Pemerintah Kabupaten Konawe Utara terus berupaya meningkat kualitas berbagai jenis pelayanan publik, termasuk pelayanan di bidang perizinan.

Kemudahan perijinan adalah proses pengurusan perijinan yang terkait dengan persoalan investasi relatif sangat mudah dan tidak memerlukan waktu yang lama. Kemudahan perijinan merupakan salah satu faktor pembentuk daya saing investasi yang memengaruhi masuknya investasi ke suatu daerah.

Pemerintah Kabupaten Konawe Utara terus berupaya untuk memberikan pelayanan yang baik dalam proses perijinan melalui reformasi di bidang perijinan guna

menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Perepatan Pelaksanaan Berusaha. Kemudian menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang mengamanatkan untuk mengkaji peraturan daerah dan peraturan bupati terkait perijinan di Kabupaten yang sesuai dengan peraturan pemerintah tersebut, telah diadakan konsultasi publik.

Pemerintah Kabupaten Konawe Utara telah membentuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu yang menangani pengelolaan perijinan secara terpadu agar terjadi peningkatan pelayanan perizinan dengan prosedur yang mudah, murah, cepat, berkualitas, dan akurat. Sampai dengan Tahun 2020 terdapat 73 jenis pelayanan perizinan di Kabupaten Konawe Utara, sebagaimana ditampilkan pada table berikut:

Tabel 2.99.
Jenis Pelayanan Perizinan
di Kabupaten Konawe Utara

No.	Sektor	Jumlah Jenis Perizinan	Jenis Perizinan Yang Dikeluarkan
1.	Perizinan Bidang Pendidikan	2	<ul style="list-style-type: none"> - Izin Pendidikan Dasar Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat - Izin Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
2.	Perizinan Bidang Kesehatan	11	<ul style="list-style-type: none"> - Izin Rumah Sakit Kelas C dan D - Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C dan D - Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kesehatan - Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal - Izin Klinik - Izin Operasional Klinik - Izin Operasional Puskesmas - Izinusaha Mikro/Kecil Obat Tradisional (UMOT) dan (UKOT) - Izin Produksi Makanan dan Minuman Pada Industri Rumah Tangga - Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum Pratama - Izin PRT Alat Kesehatan dan PKRT

No.	Sektor	Jumlah Jenis Perizinan	Jenis Perizinan Yang Dikeluarkan
3.	Perizinan Bidang Pekerjaan Umum	3	<ul style="list-style-type: none"> - Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Layak Fungsi - Tanda Daftar Usaha Perseorangan (TDUP) - Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) (Non Kecil dan Kecil) - Izin Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan - Izin Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air
4.	Perizinan Bidang Perhubungan	10	<ul style="list-style-type: none"> - Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir - Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Orang - Izin Usaha Angkutan Sungai dan dan au - Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat - Izin Usaha Angkutan Laut - Surat Izin Usaha Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan dan au Untuk Kapal Yang Melayani Trayek - Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyebrangan(Pelayanan Dalam Kabupaten) - Izin Usaha Jasa Perawatan dan Perbaikan Kapal - Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter - Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) Untuk Jalan Kabupaten dan / Atau Jalan Desa
5.	Perizinan Bidang Koperasi	2	<ul style="list-style-type: none"> - Izin Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten - Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten
6.	Perizinan Bidang Sosial	1	<ul style="list-style-type: none"> - Izin Pengumpulan Sumbangan

No.	Sektor	Jumlah Jenis Perizinan	Jenis Perizinan Yang Dikeluarkan
			Dalam Daerah Kabupaten/Kota
7.	Perizinan Bidang Ketenagakerjaan	3	<ul style="list-style-type: none"> - Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) - Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta - Pengesahan Peraturan dan Pendaftaran Perjanjian Kerjasama Untuk Perusahaan Yang Hanya Beroperasi Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten
8.	Perizinan Bidang Pertanahan	1	<ul style="list-style-type: none"> - Izin Lokasi
9.	Perizinan Bidang Lingkungan Hidup	3	<ul style="list-style-type: none"> - Izin Lingkungan - Izin Pembuangan Air Limbah - Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) Untuk Penghasil
10.	Perizinan Bidang Pariwisata	1	<ul style="list-style-type: none"> - Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)
11.	Perizinan Bidang Pertanian	30	<ul style="list-style-type: none"> - Usaha Budidaya Perkebunan - Izin Usaha Proses Produksi Tanaman Pangan - Izin Usaha Obat Hewan - Izin Usaha Hortikultura - Izin Usaha Peternakan - Pendaftaran Usaha Perkebunan - Pendaftaran Usaha Tanaman Pangan - Pendaftaran Usaha Budi Daya Hortikultura - Pendaftaran Usaha Peternakan - Izin Pemasukan dan Pengeluaran Benih Tanaman - Izin Pemasukan dan Pengeluaran Benih/Bibit Ternak - Izin Pemasukan dan Pengeluaran Sumber Daya Genetik - Izin Pemasukan Agens Hayati - Izin Pemasukan dan Pengeluaran Bahan Pakan Asal Hewan dan Tumbuhan - Izin Pemasukan dan Pengeluaran Obat Hewan - Izin Pemasukan dan Pengeluaran Hewan Peliharaan

No.	Sektor	Jumlah Jenis Perizinan	Jenis Perizinan Yang Dikeluarkan
			<ul style="list-style-type: none"> - Rekomendasi Ekspor/Impor Beras Tertentu - Rekomendasi Impor Produk Hortikultura - Rekomendasi Teknis Impor Produk Tembakau - Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran Produk Hewan - Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran Ternak Ruminansia dan Babi - Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan - Pendaftaran Alat Mesin Pertanian - Pendaftaran Pakan Ternak - Pendaftaran/Registrasi Obat Hewan - Pendaftaran/Pelepasan Varietas Tanaman - Perlindungan dan Pendaftaran Varietas Tanaman - Pendaftaran Pestisida - Pendaftaran Pupuk - Penetapan Instalasi Karantina Tumbuhan dan Hewan
12.	Perizinan Bidang Perikanan Dan Kelautan	1	<ul style="list-style-type: none"> - Izin Perikanan (IUP) Dibidang Pembudidayaan Ikan Yang Usahanya Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten
13.	Perizinan Bidang Perdagangan Dan Perindustrian	5	<ul style="list-style-type: none"> - Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Swalayan - Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) - Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Gol B dan C - Izin Usaha Industri Kecil dan Menengah (IUI) dan Izin Perluasan Usaha Industri - Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri Yang Lokasinya Di Kabupaten

Sumber : DPMPTSP Kab. Konawe Utara, Tahun 2021

Dengan adanya penyederhanaan pelayanan dan efisiensi waktu, proses penyelesaian ijin dapat diselesaikan paling lama 12 hari kerja jika syarat administrasi dan teknisnya lengkap, jelas, dan benar. Di samping itu, di Kabupaten Konawe Utara pengurusan ijin dapat dilaksanakan secara paralel (sekali mengajukan untuk beberapa jenis ijin dalam obyek ijin yang sama). Secara terperinci pelayanan perizinan disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.100.
Lama Proses Perizinan di Kabupaten Konawe Utara

No.	Uraian	Lama Mengurus (Hari)	Jumlah Persyaratan (Dokumen)	Biaya Resmi (Rata-Rata Maks Rp.)
1.	SIUP	-	-	-
2.	TDP	-	-	-
3.	IUI	5	7	Gratis
4.	TDI	-	-	-
5.	IMB	5	7	Gratis

Sumber : DPMPTSP Kab. Konawe Utara, Tahun 2021

Tabel 2.101.
Rekapitulasi Perizinan di Kabupaten Konawe Utara

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Permohonan izin	159	191	202	256	530
2.	Izin diterbitkan	53	62	68	56	65
3.	Izin ditolak	-	-	-	-	-
4.	Izin dalam proses	106	129	134	200	465

Sumber : DPMPTSP Kab. Konawe Utara, Tahun 2021

Pemerintah Kabupaten Konawe Utara berusaha menyelesaikan pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan pelayanan perizinan dengan baik dan memuaskan melalui berbagai sarana baik datang langsung (disediakan loket khusus pengaduan), telepon, SMS, WA, *e-mail*. Pengaduan yang masuk ditangani sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) khusus penanganan pengaduan.

2.4.3.4 Peraturan Daerah Yang Mendukung Iklim Usaha

Peraturan Daerah merupakan sebuah instrumen kebijakan daerah yang sifatnya formal, melalui perda inilah dapat diindikasikan adanya insentif maupun disinentif sebuah kebijakan di daerah terhadap aktivitas perekonomian. Perda yang mendukung iklim usaha dibatasi yaitu perda terkait dengan perijizinan, perda terkait dengan lalu lintas barang dan jasa, serta perda terkait dengan ketenagakerjaan.

2.4.3.5 Perkembangan Pembangunan Desa

Selain status desa perdesaan dan perkotaan, ada status desa berdasarkan perkembangan kemajuan desa, mengingat desa Kabupaten Konawe Utara memiliki karakteristik yang berbeda-beda baik dari segi luas wilayah, kondisi ekonomi, politik, dan sosial budaya. Hal ini penting karena pembangunan perdesaan merupakan salah satu amanat Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 86, yang salah satu ayatnya menyebutkan "Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem informasi desa dan pembangunan kawasan perdesaan". Selain itu juga mendukung salah satu Nawacita pemerintah, yaitu "Pembangunan Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah - daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan".

Ada dua status desa berdasarkan perkembangan kemajuan desa, yaitu Indeks Pembangunan Desa (IPD) Tahun 2018 dan Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2020 yang merupakan hasil analisis dari basis data yang sama yaitu hasil pendataan Potensi Desa (Podes) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2014.

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. Perangkat indikator yang dikembangkan dalam Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju Desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan Desa untuk mensejahterakan kehidupan Desa. Kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, didasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan. Dalam konteks ini ketahanan sosial, ekonomi, dan

ekologi bekerja sebagai dimensi yang memperkuat gerak proses dan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Indeks Desa Membangun memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa. Indeks Desa Membangun mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari Pemerintah sesuai dengan partisipasi Masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah Desa yaitu tipologi dan modal sosial. Hasil analisis terhadap status desa di Kabupaten Konawe Utara menurut IDM, disajikan pada Tabel 2.102 berikut ini:

Tabel 2.102.
Status Desa di Kabupaten Konawe Utara Menurut
Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2020

No.	Kecamatan	Desa	IDM	Klasifikasi
1	Motui	Banggina	0,5016	Tertinggal
		Kapolano	0,5595	Tertinggal
		Lambuluo	0,5805	Tertinggal
		Matandahi	0,5565	Tertinggal
		Motui	0,6494	Berkembang
		Poni Poniki	0,5210	Tertinggal
		Punggulahi	0,5767	Tertinggal
		Puuwonggia	0,5311	Tertinggal
		Ranombupulu	0,6233	Berkembang
		Sama Subur	0,4952	Tertinggal
		Sambasule	0,5932	Tertinggal
		Tobimeita	0,5503	Tertinggal
		Tondowatu	0,5894	Tertinggal
		Wawoluri	0,6471	Berkembang
2	Sawa	Kokapi	0,7051	Berkembang
		Laimeo	0,6100	Berkembang
		Lalembo	0,5938	Tertinggal
		Matanggonawe	0,6811	Berkembang

No.	Kecamatan	Desa	IDM	Klasifikasi
		Panggulawu	0,5897	Tertinggal
		Pekaroa	0,6251	Berkembang
		Pudonggala	0,6519	Berkembang
		Pudonggala Utama	0,6268	Berkembang
		Puupi	0,5759	Tertinggal
		Tanjung Laimeo	0,6195	Berkembang
		Tongauna	0,6257	Berkembang
		Tudungano	0,5881	Tertinggal
		Ulu Sawa	0,6457	Berkembang
3	Lembo	Alo Alo	0,6451	Berkembang
		Bungguosu	0,6032	Berkembang
		Lapulu	0,6068	Berkembang
		Laramo	0,6049	Berkembang
		Padaleu	0,6222	Berkembang
		Pasir Putih	0,6367	Berkembang
		Puulemo	0,6029	Berkembang
		Puusiambu	0,5905	Tertinggal
		Taipa	0,6275	Berkembang
		Tongalino	0,6181	Berkembang
		Watuwula	0,5489	Tertinggal
4	Wawolesea	Barasanga	0,6043	Berkembang
		Kampoh Bunga	0,6137	Berkembang
		Kampoh Cina	0,5744	Tertinggal
		Lemo Bajo	0,6438	Berkembang
		Otipulu	0,6306	Berkembang
		Tanjung Bunga	0,5876	Tertinggal
		Toreo	0,6365	Berkembang
		Wawolesea	0,6379	Berkembang
5	Lasolo	Abola	0,6284	Berkembang
		Andeo	0,6049	Berkembang
		Andumowu	0,6511	Berkembang

No.	Kecamatan	Desa	IDM	Klasifikasi
		Basule	0,6194	Berkembang
		Belalo	0,6105	Berkembang
		Lalowaru	0,6130	Berkembang
		Lametono	0,5851	Tertinggal
		Larodangge	0,6359	Berkembang
		Marombo Pantai	0,4490	Sangat Tertinggal
		Matapila	0,6719	Berkembang
		Muara Tinobu	0,6984	Berkembang
		Otole	0,6308	Berkembang
		Tetelupai	0,6190	Berkembang
		Tokowuta	0,5784	Tertinggal
		Watukila	0,6116	Berkembang
		Waworaha	0,6249	Berkembang
6	Lasolo Kepulauan	Boedingi	0,5014	Tertinggal
		Boenaga	0,5483	Tertinggal
		Labengki	0,5749	Tertinggal
		Morombo	0,5083	Tertinggal
		Tapunopaka	0,5022	Tertinggal
		Waturambaha	0,5637	Tertinggal
7	Molawe	Awila	0,6863	Berkembang
		Awila Puncak	0,7070	Berkembang
		Bandaeha	0,6608	Berkembang
		Mandiodo	0,6290	Berkembang
		Mataiwoi	0,6806	Berkembang
		Mowundo	0,6773	Berkembang
		Tapuemea	0,5975	Tertinggal
		Tapunggaya	0,5940	Tertinggal
8	Andowia	Ambake	0,5744	Tertinggal
		Amolame	0,6690	Berkembang
		Anggolohipo	0,6205	Berkembang
		Banggarema	0,5433	Tertinggal

No.	Kecamatan	Desa	IDM	Klasifikasi
		Labungga	0,5559	Tertinggal
		Lahimbua	0,6122	Berkembang
		Lambudoni	0,6038	Berkembang
		Lamondowo	0,6397	Berkembang
		Larobende	0,6414	Berkembang
		Laronanga	0,5246	Tertinggal
		Mataiwoi	0,6448	Berkembang
		Puusuli	0,5216	Tertinggal
		Puuwonua	0,5873	Tertinggal
		Waworate	0,5038	Tertinggal
9	Asera	Alaa Wanggudu	0,5546	Tertinggal
		Amorome	0,5546	Tertinggal
		Amorome Utama	0,5562	Tertinggal
		Andedao	0,5322	Tertinggal
		Aseminunulai	0,4871	Sangat Tertinggal
		Kota Mulya	0,5841	Tertinggal
		Longeo Utama	0,5168	Tertinggal
		Oheo Trans	0,5327	Tertinggal
		Puunggomosi	0,6273	Berkembang
		Puuwanggudu	0,5770	Tertinggal
		Tangguluri	0,5281	Tertinggal
		Tapuwatu	0,5243	Tertinggal
		Walalindu	0,5503	Tertinggal
		Walasolo	0,6140	Berkembang
		Wanggudu Raya	0,6167	Berkembang
		Wawolimbue	0,5621	Tertinggal
		Wunduhaka	0,6238	Berkembang
10	Oheo	Bandaeha	0,6657	Berkembang
		Bendewuta	0,5151	Tertinggal
		Horoe	0,5502	Tertinggal
		Kota Maju	0,6476	Berkembang

No.	Kecamatan	Desa	IDM	Klasifikasi
		Lameoru	0,5763	Tertinggal
		Landawe	0,5414	Tertinggal
		Laronaha	0,6251	Berkembang
		Mopute	0,5760	Tertinggal
		Paka Indah	0,5917	Tertinggal
		Puuhialu	0,5519	Tertinggal
		Sambandete	0,5394	Tertinggal
		Tadolojiyo	0,5078	Tertinggal
		Tadolojiyo Trans	0,5344	Tertinggal
		Tinondo	0,5224	Tertinggal
		Walandawe	0,5524	Tertinggal
		Wiwirano	0,5671	Tertinggal
11	Langgikima	Alenggo	0,5962	Tertinggal
		Lameruru	0,5029	Tertinggal
		Mekar Jaya	0,5746	Tertinggal
		Molore	0,5246	Tertinggal
		Molore Pantai	0,5311	Tertinggal
		Morombo Pantai	0,5837	Tertinggal
		Ngapa Inia	0,5738	Tertinggal
		Pariama	0,5998	Berkembang
		Polora Indah	0,5825	Tertinggal
		Sarimukti	0,5422	Tertinggal
		Tobimeita	0,5211	Tertinggal
12	Landawe	Hialu	0,6098	Berkembang
		Hialu Utama	0,6913	Berkembang
		Kolosua	0,5992	Berkembang
		Kuratao	0,6230	Berkembang
		Landawe Utama	0,5144	Tertinggal
		Landiwo	0,5317	Tertinggal
		Laumoso	0,5259	Tertinggal
		Mata Benua	0,6067	Berkembang

No.	Kecamatan	Desa	IDM	Klasifikasi
		Matabaho	0,5784	Tertinggal
		Polo-Polora	0,5335	Tertinggal
		Tambakua	0,5008	Tertinggal
13	Wiwirano	Culumbatu	0,5759	Tertinggal
		Lamonae Utama	0,5470	Tertinggal
		Lamparinga	0,5222	Tertinggal
		Larompana	0,5114	Tertinggal
		Mata Osole	0,6832	Berkembang
		Padalere	0,5481	Tertinggal
		Padalere Utama	0,5230	Tertinggal
		Pondoa	0,5129	Tertinggal
		Tetewatu	0,5687	Tertinggal
		Wacu Pinodo	0,5298	Tertinggal
		Wacumelewe	0,5622	Tertinggal
		Wawoheo	0,6329	Berkembang
		Wawonsangi	0,4963	Tertinggal
		Wawontoaho	0,5789	Tertinggal
Rata - Rata IDM Konawe Utara 2020			0,5855	TERTINGGAL
Rata - Rata IDM Konawe Utara 2019			0,5824	TERTINGGAL
Rata - Rata IDM Konawe Utara 2018			0,5429	TERTINGGAL
Rata - Rata IDM Konawe Utara 2017			0,5352	TERTINGGAL
Rata - Rata IDM Konawe Utara 2016			0,5236	TERTINGGAL

Sumber : idm.kemendesa.go.id/idm_data

Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Konawe Utara sebesar 0,5855 atau yang terendah setelah Kabupaten Konawe Kepulauan (0,5654) di Provinsi Sulawesi Tenggara. Sementara Indeks Desa Membangun (IDM) berdasarkan analisis Tahun 2020, dari 159 desa di Kabupaten Konawe Utara, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tidak ada satupun desa di Kabupaten Konawe Utara mendapat status/klasifikasi mandiri dan maju;
2. Jumlah desa yang berstatus/klasifikasi tertinggal sebanyak 89 desa;
3. Jumlah desa yang berstatus/klasifikasi sangat tertinggal sebanyak 2 desa;

4. Jumlah desa yang berstatus/klasifikasi berkembang sebanyak 68 desa;
5. Berdasarkan *ranking* IDM, tiga desa dengan skor tertinggi adalah Desa Awila Puncak, Kecamatan Molawe (0,7070); Desa Kokapi, Kecamatan Sawa (0,7051); dan Desa Muara Tinobu, Kecamatan Lasolo (0,6984). Adapun desa dengan nilai terendah adalah Desa Morombo Pantai, Kecamatan Lasolo (0,4490); Desa Aseminunulai, Kecamatan Asera (0,4871); dan Desa Sama Subur, Kecamatan Motui (0,4952).

2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

Kualitas tenaga kerja dapat dilihat dari kualitas SDM yang mengenyam pendidikan tinggi dan mempunyai keahlian serta menguasai teknologi yang dibutuhkan di dunia kerja. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kunci keberhasilan pembangunan nasional dan daerah. Hal ini dapat disadari oleh karena manusia sebagai subyek dan obyek dalam pembangunan. Mengingat hal tersebut, maka pembangunan SDM diarahkan agar benar-benar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin dan profesional. Disamping itu juga mampu memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan nasional. Kualitas sumberdaya manusia juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan daya saing daerah dan perkembangan investasi di daerah. Salah satu pengukuran dasar kualitas tenaga kerja adalah rasio lulusan S1/S2/S3 sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 2.103.
Tingkat Pendidikan Tenaga Kerja
di Kabupaten Konawe Utara

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah lulusan S1/S2/S3	1.466	1.080	1.534	5.852	9.997
2.	Jumlah penduduk	59.673	60.884	62.017	63.814	67.871
3.	Rasio (1/2)	2.51	1.81	2,51	9,17	14,73

Sumber: BPS Kab. Konawe Utara 2021, Dianalisis

2.4.4.1 Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan menunjukkan besar beban tanggungan kelompok usia produktif atas penduduk usia non produktif. Kelompok usia produktif adalah penduduk yang berada pada kelompok umur 15-64 tahun, yang dianggap dapat bekerja dan berkontribusi secara ekonomi maupun sosial. Kelompok non produktif adalah penduduk yang berada pada kelompok umur 0-14 tahun dan 65 tahun ke atas, yang dianggap belum mampu atau sudah tidak mampu bekerja sehingga tidak berkontribusi secara ekonomi maupun sosial.

Semakin besar rasio ketergantungan berarti semakin besar beban tanggungan bagi kelompok produktif. Angka ketergantungan dianggap rendah apabila kurang dari 30, sedang apabila antara 30-40 dan tinggi apabila lebih dari 40. Semakin rendah angka ketergantungan, mengindikasikan semakin baik kondisi perekonomian karena semakin rendah kelompok non produktif yang ditanggung secara ekonomi oleh kelompok produktif. Tanggungan dapat berbentuk jaminan sosial, bantuan pensiun dan fasilitas lain yang diperoleh kelompok non produktif.

Rasio ketergantungan di Kabupaten Konawe Utara pada tahun 2020 sebesar 50,88 Hal ini menunjukkan bahwa 100 orang penduduk usia produktif di Kabupaten Konawe Utara harus menanggung 51 orang penduduk yang non produktif. Meski rasio ketergantungan tahun 2020 turun jika dibandingkan tahun 2019 (57,11) tetapi masih termasuk kategori tinggi. Oleh sebab itu untuk mengurangi rasio ketergantungan, maka pemerintah berusaha meningkatkan pelayanan kesehatan dan pemberdayaan bagi lansia sehingga selain sehat dan kuat juga dapat lebih produktif.

Tabel 2.104.
Rasio Ketergantungan (Beban Tanggungan)
di Kabupaten Konawe Utara

No.	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah penduduk usia < 15 tahun dan > 64 tahun (usia tidak produktif)	20.871	21.365	22.114	22.901	23.196	22.889
2.	Jumlah penduduk usia 15 - 64 tahun (usia produktif)	33.851	35.712	37,559	39.502	40.618	44.982
3.	Rasio ketergantungan (1/2)	61,66	59,83	58,88	57,92	57,11	50,88

Sumber : BPS, Kab. Konawe Utara 2021, Dianalis

2.5 CAPAIAN KINERJA RPJMD 2016 - 2021

Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021-2026 disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi Perubahan RPJMD sampai dengan tahun 2020. Capaian indikator sasaran pokok pembangunan yang merepresentasikan pencapaian masyarakat Kabupaten Konawe Utara yang sejahtera dan beradab hingga tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 2.105.
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran s.d Tahun 2020
Terhadap Target Akhir RPJMD

No.	Sasaran Daerah	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2020	Target Akhir RPJMD 2016-2021	Capaian s.d Tahun 2020 terhadap Target Akhir RPJMD
1.	Meningkatnya pelayanan dan pembangunan transportasi perkotaan dan perdesaan	Persentase kualitas jalan dan jembatan dalam kondisi mantap	%	84,03	87,96	95,53
2.	Meningkatnya pengelolaan sumber daya air	Jaringan irigasi dalam kondisi baik	%	67,23	70,45	95,43
3.	Meningkatnya sarana dan prasarana perumahan dan permukiman	Persentase rumah layak huni	%	68	85	80
		Jaringan Perpipaan SPAM	km	25	11,6	215,52
		Persentase rumah tangga pengguna air bersih	%	98,10	100	98,10
		Persentase penduduk berakses sanitasi yang layak	%	63,37	100	63,37
4.	Meningkatnya Perekonomian Daerah	Pertumbuhan Ekonomi	%	(0,72)	7,31	78,25
		Inflasi	%	2,25	2,8	80,36
5.	Meningkatnya ketersediaan	Tingkat Penguatan Cadangan Pangan	%	100	100	100,00

No.	Sasaran Daerah	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2020	Target Akhir RPJMD 2016-2021	Capaian s.d Tahun 2020 terhadap Target Akhir RPJMD
	pangan					
6.	Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan dan perikanan	Pertumbuhan PDRB sub sektor pertanian tanaman pangan	%	2,51	4,52	55,53
		Pertumbuhan PDRB sub sektor hortikultura	%	6,12	6,82	89,74
		Pertumbuhan PDRB sub sektor perkebunan	%	7,15	8,05	88,82
		Pertumbuhan PDRB sub sektor perikanan	%	8,73	11,63	75,06
7.	Meningkatnya jumlah wisatawan	Kunjungan Wisata	orang	8.187	104.000	7,87
8.	Meningkatnya koperasi dan UMKM	Koperasi Aktif	nilai	227	233	97,42
9.	Meningkatnya investasi Daerah	Investasi daerah	Rp. (Milyar)	163,88	220	74,49
		Rasio izin yang diterbitkan	jumlah	530	620	85,48
10.	Meningkatnya jaringan distribusi barang	Persentase peningkatan kualitas pasar	%	11,82	13,28	89,01
11.	Meningkatnya industri kecil dan menengah	Pertumbuhan sektor perindustrian terhadap PDRB	%	1,13	5,39	20,96
		Pertumbuhan sektor perdagangan terhadap PDRB	%	11,78	10,23	115,15
12.	Meningkatnya partisipasi angkatan kerja dan penyerapan tenaga kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	3,79	3,17	119,56
13.	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	indeks	69,86	71,51	97,69
		Angka rata-rata lama sekolah	tahun	9,21	8,99	102,45
		Angka Partisipasi	%	99,12	99,84	99,28

No.	Sasaran Daerah	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2020	Target Akhir RPJMD 2016-2021	Capaian s.d Tahun 2020 terhadap Target Akhir RPJMD
		Sekolah (APS) Penduduk Usia 7-12 tahun				
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 13-15 Tahun	%	93,63	97,18	96,35
		Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15-59 Tahun	%	96,78	98,54	98,21
14.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka usia harapan hidup	tahun	69,10	68,96	96,35
		Angka kematian Ibu	jiwa	2	0	
		Angka Kematian Bayi	jiwa	14	0	
		Prevalensi Balita Gizi Buruk	%	100	100	100
		Persentase Jaminan Kesehatan Masyarakat	%	97,57	99,64	97,92
15.	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Tingkat Kemiskinan	%	13,53	6,70	201,94
16.	Meningkatnya fasilitas tempat ibadah dan aktivitas keagamaan masyarakat	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	Nilai	4	4	100,00
		Persentase lembaga keagamaan yang mendapatkan bantuan	%	36,66	43,94	83,43
17.	Menguatnya kebudayaan sebagai identitas daerah	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	keg	0	1	0,00
18.	Meningkatnya Sarana dan Prestasi Olahraga	Sarana Olahraga	jumlah	282	299	94,31
		Prestasi Cabang Olah raga	peringkat	2	5	40,00
19.	Meningkatnya penyelenggaraan penataan ruang	Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	%	80	81,28	98,43

No.	Sasaran Daerah	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2020	Target Akhir RPJMD 2016-2021	Capaian s.d Tahun 2020 terhadap Target Akhir RPJMD
20.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Kualitas Air (penetapan kelas air)	nilai	5	16	31,25
21.	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja reformasi birokrasi	Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai/ Predikat	B	BB	
		Opini BPK	Nilai/ Predikat	WTP	WTP	100
		Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Nilai	Baik	Sedang	
22.	Meningkatnya Pembangunan Desa	Indeks Desa Membangun	indeks	0,5855	0,5468	107,08

Sumber : Bappeda Kab. Konawe Utara, 2021

Mencermati pencapaian IKU Konawe Utara tahun 2020 dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kabupaten Konawe Utara 2016 - 2021, tampak bahwa dari 43 IKU Bupati, sebanyak 31 indikator masuk dalam kategori pencapaian kinerja sangat tinggi dan tinggi, dan terdapat 5 indikator dengan capaian kinerja sangat rendah, yaitu angka kemiskinan, jumlah kunjungan wisatawan, rasio izin yang diterbitkan, angka kematian bayi, dan angka kematian ibu. Untuk itu diperlukan upaya dan kerja keras agar target penurunan dan/atau peningkatan dari capaian indikator tersebut bisa dicapai.

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH



Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengatur perubahan pembagian kewenangan urusan pemerintahan antara Pemerintahan Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota, maka manajemen pengelolaan keuangan daerah yang lebih adil, rasional, transparan, partisipatif dan akuntabel telah mengalami perubahan fundamental yang signifikan pada berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai pengganti atas Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Ruang lingkup Keuangan Daerah meliputi:

- a. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah dan membayar tagihan kepada pihak ketiga;
- c. Penerimaan Daerah;
- d. Pengeluaran Daerah;
- e. Kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan;
- f. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum.

Lebih lanjut, Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara: tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan keuangan

daerah akan dikatakan baik jika berhasil dalam merealisasikan program-program yang dicanangkan.

Pengelolaan keuangan menyangkut pengelolaan sumber pendapatan daerah, pengeluaran belanja dan sumber-sumber pembiayaan. Suatu daerah yang mampu mengoptimalkan sumber pendapatan asli daerah dan meminimalkan sumber pendapatan dana transfer, maka daerah tersebut memiliki peluang untuk bisa menjadi daerah yang maju dan mandiri. Upaya untuk mengetahui tingkat kemampuan keuangan daerah Kabupaten Konawe Utara dapat dilakukan dengan mencermati kondisi kinerja keuangan daerah, baik kinerja keuangan masa lalu maupun kebijakan yang melandasi pengelolaannya.

3.1. KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU

Keuangan daerah merupakan komponen daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menyatu dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD sebagai bentuk penjabaran kuantitatif dari tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah serta tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah, disusun dalam suatu struktur yang menggambarkan besarnya pendanaan atas berbagai sasaran yang hendak dicapai, tugas-tugas pokok dan fungsi sesuai kondisi, potensi, aspirasi dan kebutuhan riil di masyarakat untuk suatu tahun tertentu. Dengan demikian APBD dijadikan salah satu bentuk instrumen kebijakan untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di Daerah. Oleh karena itu, untuk dapat melakukan analisis pengelolaan keuangan daerah diperlukan analisis pelaksanaan APBD selama 5 (lima) tahun, yang dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah.

APBD terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Dengan demikian dalam menganalisis pengelolaan keuangan daerah, terlebih dahulu harus memahami jenis obyek Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah sesuai dengan kewenangan Daerah. Analisis tersebut diperlukan sebagai dasar untuk menentukan kerangka pendanaan di masa yang akan datang, dengan mempertimbangkan peluang dan hambatan yang dihadapi.

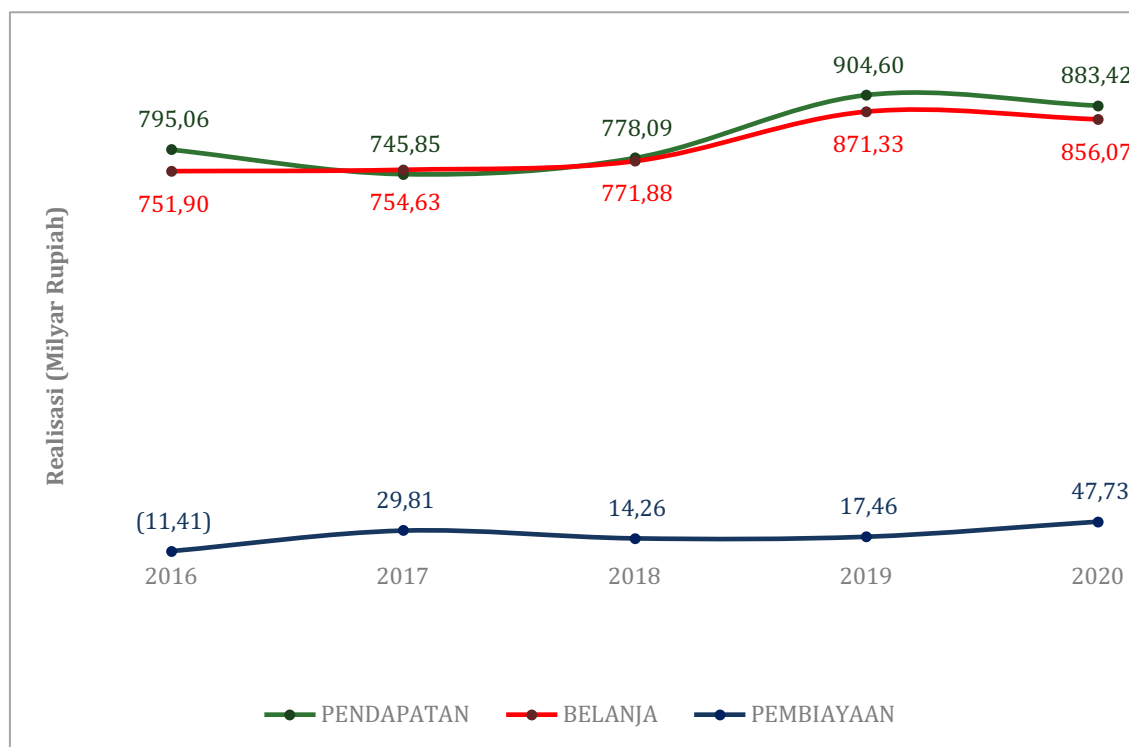
Gambaran kinerja keuangan daerah Kabupaten Konawe Utara secara umum disajikan realisasi anggaran dan kinerja keuangan untuk periode tahun anggaran

2016 sampai dengan tahun anggaran 2019 sebagai dasar untuk menentukan rata-rata pertumbuhan. Sedangkan, untuk tahun dasar ditetapkan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, pasca adanya perubahan akibat dikeluarkannya kebijakan keuangan daerah dalam menghadapi wabah COVID-19. Proyeksi keuangan dilakukan untuk 5 tahun ke depan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026. Perkiraan proyeksi selama 5 tahun ke depan menggunakan informasi dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah sebagai antisipasi dampak adanya wabah COVID-19.

Berdasarkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah yang diterbitkan setiap tahun, maka komponen APBD terdiri atas: (1) Pendapatan Daerah, yang di dalamnya terdapat Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah; (2) Belanja Daerah, yang dibagi menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer; dan (3) Pembiayaan Daerah, yang di dalamnya terdapat Penerimaan Pembiayaan Daerah, Pengeluaran Pembiayaan Daerah, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan. Pembahasan berikutnya terkait kinerja pelaksanaan APBD dan kebijakan masa lalu, dibagi dalam kinerja penerimaan daerah, yang terdiri dari Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan, dan kinerja pengeluaran daerah, yang terdiri dari Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan.

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

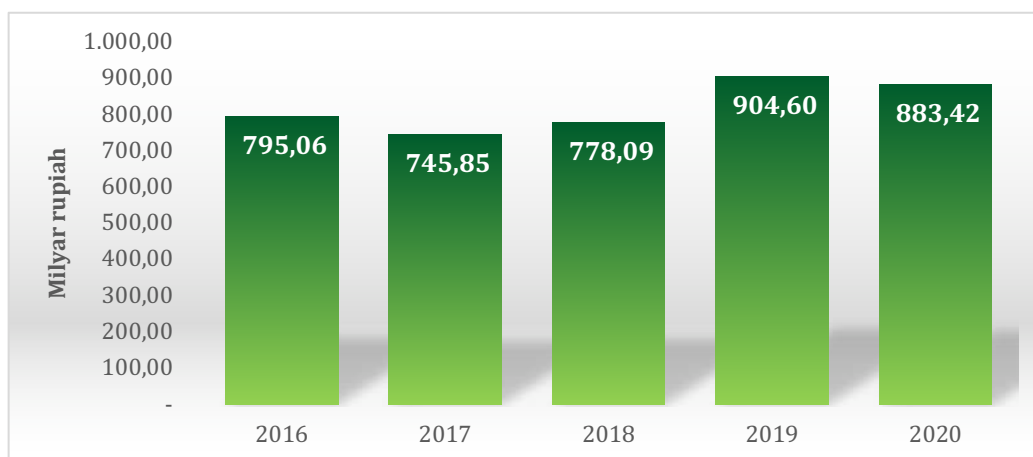
Pada dasarnya, konsep penganggaran adalah membandingkan antara anggaran dan realisasinya antara penerimaan dikurangi dengan pengeluaran. Begitu juga, pada APBN/APBD, pada intinya adalah membandingkan antara anggaran dan realisasi penerimaan dengan anggaran dan realisasi pengeluaran. Dalam konteks APBD, penerimaan daerah terdiri dari pendapatan daerah ditambah penerimaan pembiayaan, sedangkan pengeluaran daerah terdiri dari belanja daerah ditambah pengeluaran pembiayaan. Oleh karena itu, untuk analisis keuangan daerah dalam sub bab ini akan dibagi dalam kerangka penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Pada sub bab penerimaan daerah akan dianalisis kinerja realisasi dan rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan, yang kemudian perhitungan proyeksi selama 5 tahun ke depan (dari tahun 2021 s.d tahun 2026) akan dijelaskan pada sub bab tersendiri. Gambaran umum realisasi APBD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016-2021 disajikan dalam gambar 3.1 berikut.



Gambar 3.1 Gambaran Umum Realisasi APBD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016-2020 (Milyar Rupiah)

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak Daerah dalam satu tahun anggaran.

Pendapatan Daerah dikelompokkan atas: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Pendapatan daerah Kabupaten Konawe Utara dalam kurun waktu tahun 2016-2020 menunjukkan peningkatan dari sebesar 796,05 Milyar rupiah pada tahun 2016 menjadi 883,42 Milyar rupiah. Secara rinci perkembangan pendapatan daerah tercantum pada gambar 3.2 berikut.



Gambar 3.2 Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016-2020 (Milyar Rupiah)

Selama kurun waktu tahun 2016-2020 rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah mencapai sebesar 4,41%. Pertumbuhan pendapatan daerah berfluktuasi, tertinggi pada tahun 2019 sebesar 13,99% dan terendah pada tahun 2017 sebesar minus 6,60%. Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah fluktuatif dengan rata-rata sebesar 13,21%. Pertumbuhan pendapatan transfer fluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan 4,16%. Lain-lain pendapatan daerah yang sah juga fluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar minus 83,21%.

Pertumbuhan APBD Kabupaten Konawe Utara tahun 2016-2020 secara rinci tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah
Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016 – 2020

Kode	Uraian	Pertumbuhan(%)					
		2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata
4	PENDAPATAN	12,90	(6,60)	4,14	13,99	(2,40)	4,41
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	18,97	53,70	(60,12)	14,65	38,83	13,21
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	(33,33)	28,17	42,41	24,88	73,56	27,14
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	(192,69)	49,60	50,51	(50,73)	9,23	(26,81)
4.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6,71	13,15	23,61	35,57	21,05	20,02
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	43,15	59,12	(145,55)	14,89	14,64	(2,75)

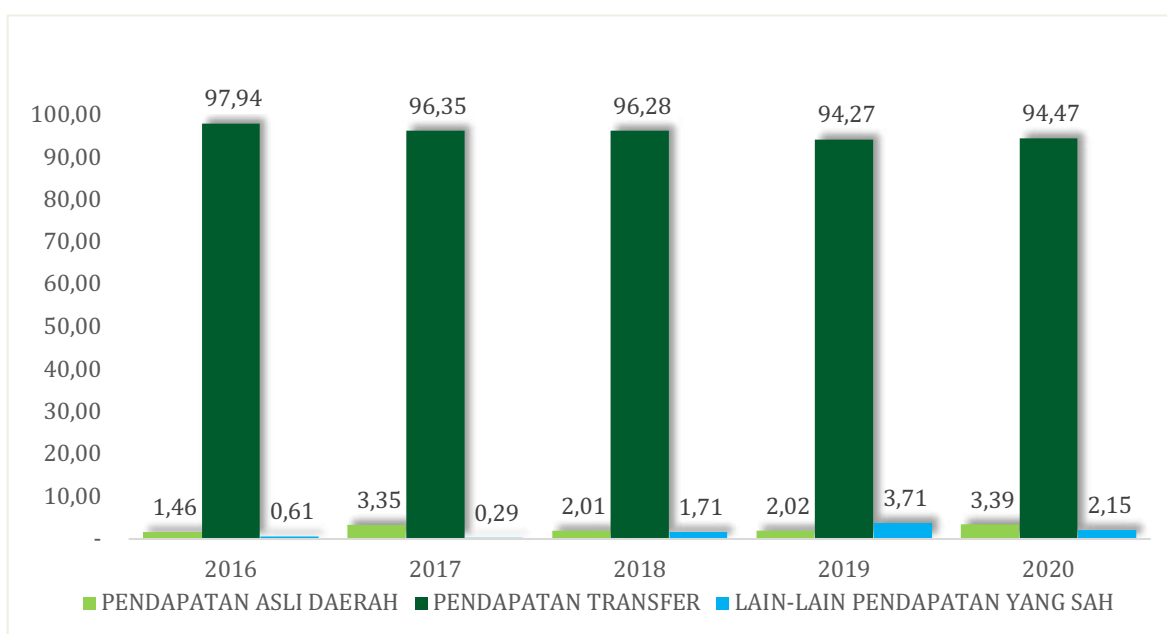
Kode	Uraian	Pertumbuhan(%)					
		2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	15,13	(8,35)	4,07	12,15	(2,19)	4,16
4.2.01	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	11,55	(14,83)	6,36	12,00	(7,70)	1,47
4.2.01.01	Dana Bagi Hasil Pajak / Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	5,58	(152,01)	52,86	41,23	32,68	(3,93)
4.2.01.02	Dana Alokasi Umum	5,67	(1,07)	-	3,57	(9,81)	(0,33)
4.2.01.03	Dana Alokasi khusus	30,77	(43,41)	11,64	21,93	(43,47)	(4,51)
4.2.02	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	40,07	22,22	(9,46)	11,39	18,93	16,63
4.2.02.01	Dana Otonomi Khusus						
4.2.02.02	Dana Penyesuaian	40,07	22,22	(9,46)	11,39	18,93	16,63
4.2.03	Transfer Pemerintah Provinsi	22,19	2,35	9,26	25,00	18,70	15,50
4.2.03.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak / Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	22,19	2,35	9,26	25,00	18,70	15,50
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	(362,65)	(120,64)	83,55	60,34	(76,62)	(83,21)
4.3.01	Pendapatan Hibah	(684,61)	(20,64)	84,12	59,12	(75,99)	(127,60)
4.3.02	Pendapatan Dana Darurat						
4.3.03	Pendapatan Lainnya	(2,90)	(2.886,72)	-	100,00	-	(557,92)
5	BELANJA	5,41	0,36	2,23	11,41	(1,78)	3,53
5.1	BELANJA OPERASI	(1,55)	4,99	9,90	8,02	(4,08)	3,46
5.1.01	Belanja Pegawai	21,39	(4,44)	(17,91)	7,03	3,18	1,85
5.1.02	Belanja Barang dan jasa	(25,66)	14,21	28,04	5,66	(33,87)	(2,33)
5.1.03	Belanja Bunga						
5.1.04	Belanja Subsidi						
5.1.05	Belanja Hibah	(181,51)	(34,05)	27,43	49,54	77,38	(12,24)
5.1.06	Bantuan Sosial	100,00	64,83	(17,72)	44,78	22,01	42,78
5.1.07	Belanja Bantuan keuangan						
5.2	BELANJA MODAL	(3,23)	(35,71)	(12,96)	20,05	(39,18)	(14,20)
	Belanja Modal	(3,23)	(35,71)	(12,96)	20,05	(39,18)	(14,20)
5.2.01	Belanja Modal Tanah						
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin						
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan						
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan						
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya						
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya						
5.3	BELANJA TAK TERDUGA	100,00	99,92	46,75	76,81	96,23	83,94

Kode	Uraian	Pertumbuhan(%)					
		2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata
5.3.1	Belanja Tak Terduga	100,00	99,92	46,75	76,81	96,23	83,94
5.4	BELANJA TRANSFER	42,25	24,13	(6,33)	11,37	1,02	14,49
5.4.01	TRANSFER / BAGI HASIL KE DESA						
5.4.01.01	Bagi Hasil Pajak						
5.4.01.02	Bagi Hasil Retribusi						
5.4.01.03	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya						
5.4.02	TRANSFER / BANTUAN KEUANGAN	42,25	24,13	(6,33)	11,37	1,02	14,49
5.4.02.01	Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya						
5.4.02.02	Bantuan Keuangan ke Desa	42,25	24,13	(6,33)	11,37	1,02	14,49
5.4.02.03	Bantuan Keuangan Lainnya						
6	PEMBIAYAAN	93,35	138,27	(109,05)	18,36	63,41	40,87
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	92,71	132,72	(74,21)	10,78	59,66	44,33
6.1.01	Penggunaan SiLPA	92,71	132,72	(74,21)	10,78	59,66	44,33
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan						
6.1.03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan						
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah						
6.1.05	Penerimaan Kembali Pinjaman daerah						
6.1.06	Penerimaan Piutang Daerah						
6.1.07	Penerimaan Kembali Dana Bergulir						
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	100,00	50,00	50,00	(33,33)	-	33,33
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan						
6.2.02	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	100,00	50,00	50,00	(33,33)	-	33,33
6.2.03	Pembayaran Pokok Utang						
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah						
6.2.05	Pembayaran Utang Kepada Pihak Ketiga						
6.2.06	Dana Talangan						
6.2.07	Pemberian Pinjaman Dana Bergulir						

Sumber : BKAD Kabupaten Konawe Utara, diolah

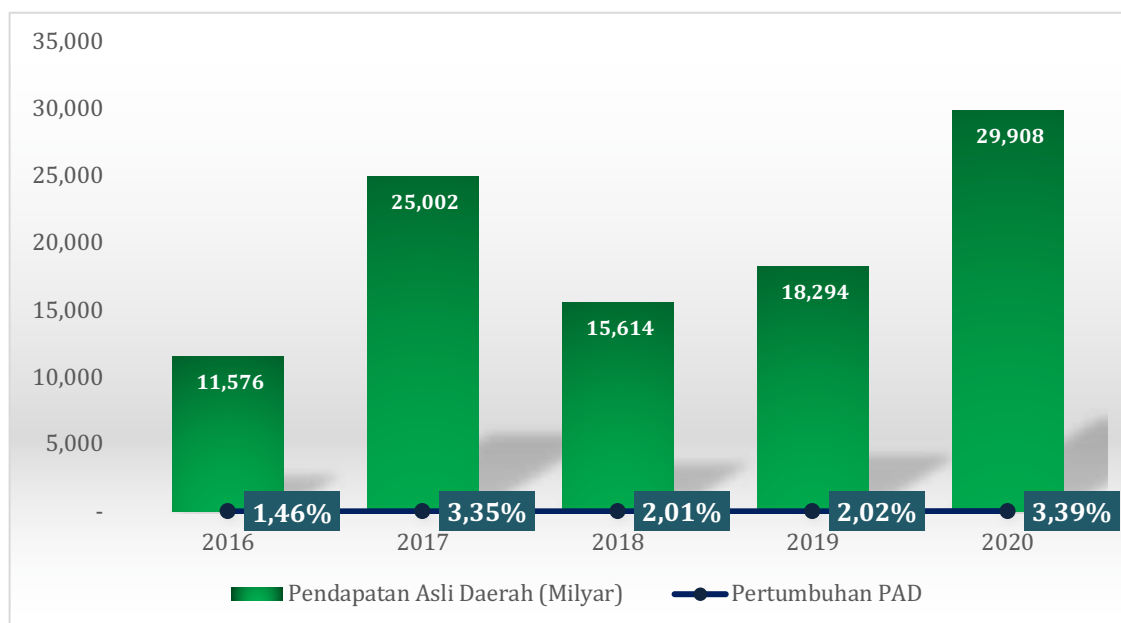
Pendapatan daerah Kabupaten Konawe Utara didominasi oleh pendapatan transfer dari pemerintah pusat dengan proporsi terhadap total pendapatan daerah cenderung menurun dari sebesar 97,94% pada tahun 2016 menjadi 94,47% pada

tahun 2020. Derajat kemandirian keuangan daerah dapat dilihat dari proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meningkat dari sebesar 1,46% pada tahun 2016 menjadi 3,39% pada tahun 2020. Dari data tersebut terlihat ada kecenderungan peningkatan derajat kemandirian keuangan daerah. Lain-lain pendapatan yang sah proporsinya terhadap total pendapatan daerah juga cenderung meningkat dari sebesar 0,61% pada tahun 2016 menjadi 2,15% pada tahun 2020. Perkembangan proporsi unsur-unsur pendapatan daerah terhadap total pendapatan daerah dapat dilihat pada gambar berikut.



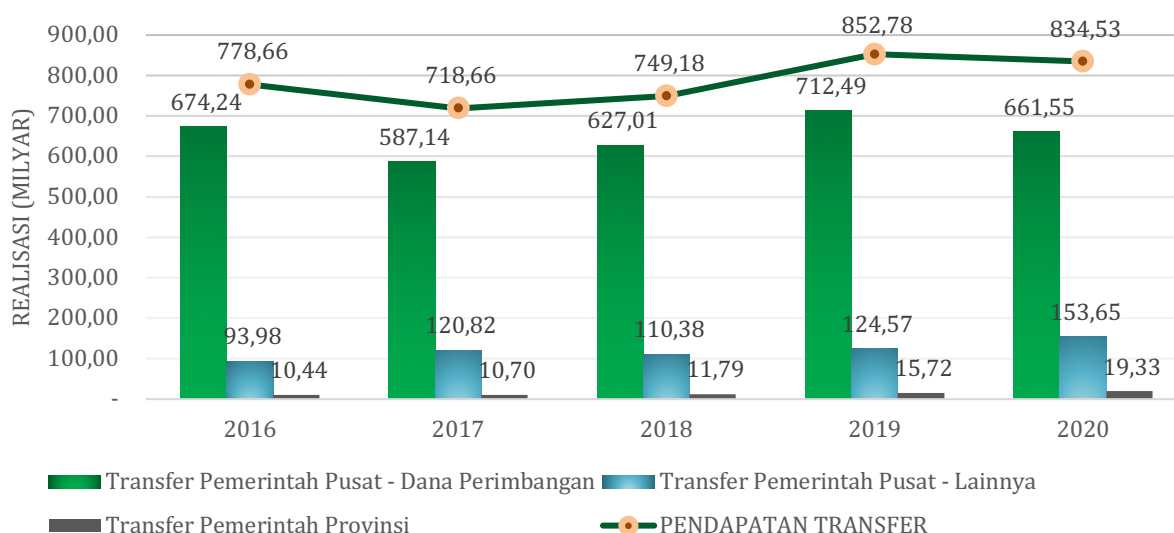
Gambar 3.3 Proporsi Unsur Pendapatan Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016- 2020 (Persen)

Pendapatan asli daerah mencakup pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan asli daerah Kabupaten Konawe Utara cukup fluktuatif serta menunjukkan peningkatan dari sebesar 11,576 milyar pada tahun 2016 menjadi 29,908 milyar rupiah pada tahun 2020. Secara rinci perkembangan pendapatan asli daerah terlihat pada gambar berikut.



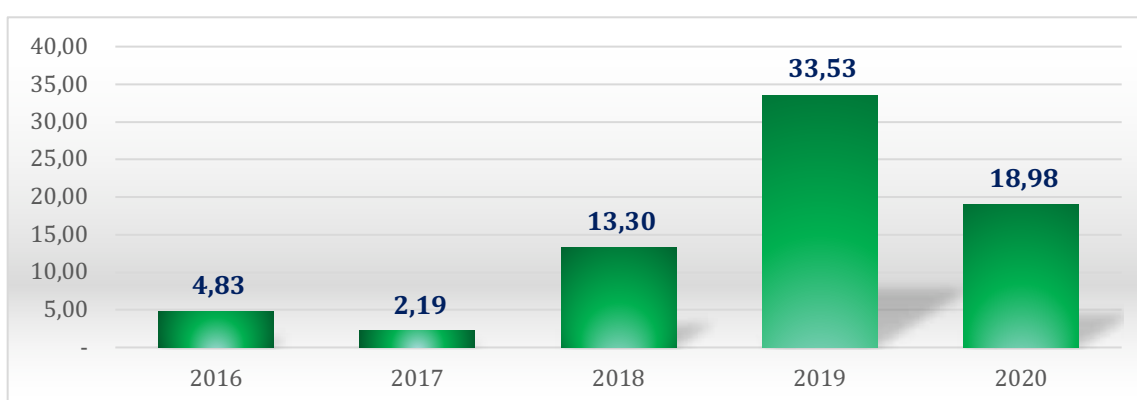
Gambar 3.4 Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016-2020 (Milyar Rupiah)

Dana transfer meliputi dana transfer dari pemerintah pusat dana perimbangan (Dana hasil pajak/bukan pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK)), transfer pemerintah pusat lainnya (dana otonomi khusus dan dana penyesuaian), dan dana transfer pemerintah provinsi. Pencapaian dana tranfer dari pemerintah pusat dan provinsi sangat ditentukan oleh kebijakan pemerintah pusat dan provinsi kepada daerah, sehingga sangat sulit untuk dipastikan pencapaiannya. Selama kurun waktu tahun 2016- 2020 perkembangan dana transfer cenderung meningkat dari sebesar 778,66 milyar rupiah pada tahun 2016 menjadi 852,78 milyar rupiah pada tahun 2019 namun mengalami penurunan menjadi 834,53 milyar rupiah pada tahun 2020 sebagai dampak pandemi Covid-19. Transfer dana perimbangan meningkat dari 674,24 milyar pada tahun 2016 menjadi 852,78 milyar rupiah pada tahun 2019 dan menurun pada tahun 2020 dikarenakan dampak pandemi Covid- 19 menjadi 661,55 milyar rupiah, seperti terlihat pada gambar berikut ini.



Gambar 3.5 Perkembangan Pendapatan Dana Tranfer Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016-2020 (Milyar Rupiah)

Lain-lain pendapatan daerah mencakup: pendapatan hibah; pendapatan dana desa; pendapatan dana darurat; dan pendapatan lainnya. Pencapaian target lain-lain pendapatan daerah sangat ditentukan oleh pihak lain kepada daerah, yaitu kebijakan lembaga pemerintah/swasta dalam hal pendapatan yang bersumber dari hibah, sehingga sulit dipastikan pencapaiannya. Selama kurun waktu tahun 2016-2020 realisasi lain-lain pendapatan daerah menunjukkan peningkatan dari sebesar Rp 4,83 milyar menjadi Rp 18,98 milyar rupiah. Secara rinci perkembangan lain-lain pendapatan daerah yang sah tercantum pada gambar 3.6 berikut.



Gambar 3.6 Perkembangan Lain-Lain Pendapatan yang Sah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016-2020 (Milyar Rupiah)

Secara rinci perkembangan masing-masing unsur-unsur pendapatan daerah tercantum pada tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3.2
Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016-2020 (Rupiah)

Kode	Uraian	Realisasi(Rp)				
		2016	2017	2018	2019	2020
4	PENDAPATAN	795.063.068.870	745.847.438.032	778.087.318.332	904.601.385.384	883.421.957.166
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	11.575.504.080	25.002.200.734	15.614.196.958	18.294.312.882	29.907.922.318
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	982.059.538	1.367.253.842	2.374.211.751	3.160.388.138	11.953.787.565
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	631.247.850	1.252.457.000	2.530.962.900	1.679.155.148	1.849.981.933
4.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.534.897.522	1.767.368.780	2.313.598.907	3.591.138.519	4.548.358.303
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	8.427.299.170	20.615.121.112	8.395.423.400	9.863.631.077	11.555.794.517
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	778.659.898.923	718.657.185.788	749.175.877.657	852.777.762.321	834.530.366.675
4.2.01	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	674.238.414.504	587.139.835.477	627.007.721.289	712.494.063.445	661.548.666.999
4.2.01.01	Dana Bagi Hasil Pajak	56.943.414.504	22.595.249.534	47.932.193.811	81.553.416.587	121.145.641.351
4.2.01.02	Dana Alokasi Umum	459.091.000.000	454.226.840.000	454.226.840.000	471.019.248.000	428.934.559.000
4.2.01.03	Dana Alokasi khusus	158.204.000.000	110.317.745.943	124.848.687.478	159.921.398.858	111.468.466.648
4.2.02	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	93.976.997.000	120.821.635.000	110.381.183.800	124.568.294.760	153.651.180.000
4.2.02.01	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-	-
4.2.02.02	Dana Penyesuaian	93.976.997.000	120.821.635.000	110.381.183.800	124.568.294.760	153.651.180.000
4.2.03	Transfer Pemerintah Provinsi	10.444.487.419	10.695.715.311	11.786.972.568	15.715.404.116	19.330.519.676
4.2.03.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	10.444.487.419	10.695.715.311	11.786.972.568	15.715.404.116	19.330.519.676
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	4.827.665.867	2.188.051.510	13.297.243.717	33.529.310.181	18.983.668.173
4.3.01	Pendapatan Hibah	2.547.665.867	2.111.713.510	13.297.243.717	32.529.310.181	18.483.668.173
4.3.02	Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	-	-
4.3.03	Pendapatan Lainnya	2.280.000.000	76.338.000	-	1.000.000.000	500.000.000
	Jumlah	795.063.068.870	745.847.438.032	778.087.318.332	904.601.385.384	883.421.957.166

Sumber : BKAD Kabupaten Konawe Utara

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber utama keuangan daerah untuk membiayai pembangunan daerahnya, disamping dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, Ketergantungan yang tinggi terhadap penerimaan dari pemerintah pusat dan rendahnya peranan PAD dalam penerimaan daerah, membawa konsekuensi terhadap rendahnya kemampuan PAD dalam membiayai pengeluaran daerah, Kondisi demikian tentu saja akan sangat menyulitkan pemerintahan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah secara nyata dan bertanggung jawab sebagaimana diamanatkan dalam undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 sehingga dibutuhkan langkah - langkah strategis dalam upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Konawe Utara, antara lain sebagai berikut :

1. Meningkatkan pendapatan daerah melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak dan retribusi daerah juga mengembangkan kerjasama operasi/investasi.
2. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemungutan pendapatan daerah melalui perbaikan sitem dan prosedur, misal penagihan dipermudah dengan cara jemput bola selain itu perlu dikembangkan sistem pembayaran pajak secara on-line dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan.
3. Meningkatkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah.
4. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah.
5. Meningkatkan peran dan fungsi Lembaga Teknis dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan.
6. Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah dan asset daerah;
7. Mendorong iklim investasi di Kabupaten Konawe Utara antara lain melalui penyederhanaan proses perijinan dan instensifikasi pemasaran daerah, yang diharapkan akan membawa dampak peningkatan PDRB per kapita penduduk dan secara tidak langsung akan meningkatkan pendapatan daerah.

Kapasitas fiskal daerah merupakan gambaran kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu. Semakin besar kapasitas fiskal daerah akan memberikan keleluasaan bagi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Komponen yang menjadi dasar penghitungan kapasitas fiskal daerah meliputi pendapatan yang dikurangi dengan penjumlahan dari pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan ditambah belanja tertentu. Secara umum, keterbatasan kapasitas fiskal dikarenakan tingginya kebutuhan anggaran belanja mengikat dan belanja wajib daerah seperti gaji PNS dan jenis pendapatan yang sifatnya *ernmarked* (ditentukan penggunaannya).

Pelaksanaan desentralisasi fiskal memungkinkan daerah untuk secara otonom mengembangkan potensi daerah guna meningkatkan kapasitas fiskal keuangan daerah sehingga dapat dimanfaatkan secara lebih optimal untuk membiayai program dan kegiatan strategis daerah. Pada sisi pendapatan upaya meningkatkan kapasitas fiskal dapat dilakukan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah dan optimalisasi pemanfaatan aset daerah, adapun pada sisi belanja dapat dilakukan melalui peningkatan efektivitas dan efisiensi belanja.

Indeks kapasitas fiskal Kabupaten Konawe Utara merupakan posisi relatif kapasitas fiskal Kabupaten Konawe Utara terhadap keseluruhan kapasitas fiskal daerah di seluruh Indonesia. Indeks kapasitas fiskal Kabupaten Konawe Utara menunjukkan nilai yang berkecenderungan menurun sampai tahun 2019, namun sedikit meningkat di tahun 2020 sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.3 di bawah ini.

Tabel 3.3
Indeks Kapasitas Fiskal Kabupaten Konawe Utara
Tahun 2015-2020

Tahun	IKF	Kategori
2015	3,18	Sangat Tinggi
2016	2,44	Sangat Tinggi
2017	0,69	Rendah
2018	0,60	Rendah
2019	0,491	Sangat Rendah
2020	0,514	Sangat Rendah

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah

Data Peta Fiskal Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021 menunjukkan bahwa Pendapatan daerah sebesar Rp. 943.443.713.657 dimana proporsi pajak daerah sebesar 0,54%, retribusi daerah 1,89% dan proporsi terbesar bersumber dari pendapatan transfer dari pemerintah pusat sebesar 91,09%. Data selengkapnya tersaji dalam tabel 3.4 berikut.

Tabel 3.4
Fiskal Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021

Kode	Uraian	Anggaran
4.	PENDAPATAN DAERAH	
4.1.01	Pajak Daerah	5.124.228.248
4.1.02	Retribusi Daerah	17.789.655.087
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.237.876.765
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	20.619.498.917
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	859.347.752.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	19.330.519.640
4.3.01	Pendapatan Hibah	4.500.000.000
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	11.494.183.000
Jumlah Pendapatan		943.443.713.657

Sumber : BKAD Kabupaten Konawe Utara

Belanja dari pendapatan transfer yang penggunaannya telah ditentukan sebesar Rp. 421.820.063.640 dengan proporsi terbesar Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp. 135.029.659.000 dan Dana Desa sebesar Rp. 125.761.543.000 serta dana transfer umum dengan proporsi 25% sebesar Rp. 105.341.920.000. Adapun belanja tertentu secara total sebesar Rp. 456.081.929.497 dengan penggunaan diantaranya untuk anggaran pendidikan sebesar 20% dan anggaran urusan kesehatan sebesar 10%. Secara rinci data belanja disajikan dalam tabel 3.5 berikut.

Tabel 3.5
Tabel Uraian Belanja dan Pendapatan Kabupaten Konawe Utara
Tahun 2021

No.	Uraian	Anggaran
	PENDAPATAN YANG PENGGUNAANNYA SUDAH DITENTUKAN	421.820.063.640
1	BLUD	4.500.000.000
2	Dana Alokasi Khusus (DAK)	135.029.659.000
3	Dana Insentif Daerah (DID)	24.862.239.000
4	Dana Desa	125.761.543.000
5	25 % Belanja Dana Transfer Umum	105.341.920.000
6	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	11.494.183.000
7	10 % DBH Pajak Provinsi - PKB	19.330.519.640
	BELANJA TERTENTU	456.081.929.497
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	190.565.918.750
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	47.737.638.579
3	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	11.066.648.332
4	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	320.228.516
5	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	2.303.176.640
7	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi untuk masyarakat DINAS KESEHATAN	13.577.037.600
8	Belanja Bidang Pendidikan (20%)	203.706.382.580
9	Belanja Bidang Kesehatan (10%)	101.853.191.290
10	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi BPJS Kesehatan TPP, Insentif, Tunjangan Profesi Guru	47.737.638.579
11	0,5% Belanja Kegiatan Pengawasan	5.092.659.565
12	Belanja Kegiatan Diklat	10.560.723.500
13	Bantuan Hibah partai Politik	381.936.100
Jumlah Belanja		877.901.993.137
Kapasitas Fiskal		65.541.720.520

Sumber : Bappeda Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021

Berdasarkan Tabel 3.5 dapat diketahui bahwa kapasitas fiskal Kabupaten Konawe Utara pada tahun 2021 sebesar Rp. 65.541.720.520. besaran nilai yang dapat secara leluasa dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di Kabupaten Konawe Utara.

3.1.2 Neraca Daerah

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas (perusahaan, pemerintah pusat, pemerintah daerah) yang meliputi aset, kewajiban dan ekuitas dana pada suatu jangka waktu tertentu. Analisis terhadap Neraca Daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas dan kemampuan aset daerah dalam penyediaan dana untuk membiayai pembangunan daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2001, Neraca Daerah adalah neraca yang disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah secara bertahap sesuai dengan kondisi masing-masing pemerintah. Neraca Daerah memberikan informasi mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang), dan ekuitas dana pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan. Aset, kewajiban, dan ekuitas dana merupakan rekening utama yang masih dapat dirinci lagi menjadi sub rekening sampai level rincian obyek.

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Neraca Daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah. Laporan Neraca Daerah digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki daerah secara efisien dan efektif.

Adapun gambaran mengenai posisi Neraca Daerah Kabupaten Konawe Utara pada tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.6
Neraca Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Catatan	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1	ASET	5.6				
2	ASET LANCAR					
3	Kas di Kas Daerah	5.6.1	31.752.350.077,00	21.034.877.468,00	22.521.813.076,00	50.247.835.062,00
4	Kas di Bendahara Pengeluaran	5.6.2	1.886.909.085,00	714.045.045,00	246.540.362,00	22.452.700,00
5	Kas di Bendahara Penerimaan	5.6.3	14.400.147,00	-	-	1.164.862,00
6	Kas di BLUD	5.6.4	173.388.079,00	405.795.907,00	108.173.960,00	568.736.992,00
7	Kas di Bendahara FKTP	5.6.5	4.391.044,00	27.511.661,00	73.185.629,00	50.343.497,00
8	Kas di Bendahara Dana BOS	5.6.6	-	440.612.012,00	318.067.665,00	2.389.986.792,00
9	Kas Lainnya	5.6.7	461.472.940,00	-	-	40.148.626,00
10	Investasi Jangka Pendek		-	-	-	-
11	Piutang Pendapatan	5.6.8	6.838.275.677,00	11.031.645.836,00	16.442.272.195,00	21.669.404.345,00
12	Piutang Lainnya	5.6.9	3.695.621.695,75	4.625.500.651,36	4.705.003.106,96	5.100.553.893,00
13	Penyisihan Piutang	5.6.10	(5.334.453.336,00)	(8.029.973.508,40)	(10.874.820.502,26)	(7.487.812.531,95)
14	Penyisihan Piutang Lainnya	5.6.11	-	-	-	(3.827.193.332,01)
15	Persediaan	5.6.12	2.114.695.024,70	4.034.820.103,93	3.963.536.112,94	3.822.859.128,29
16	Jumlah Aset Lancar		41.607.050.433,45	34.284.835.175,89	37.503.771.604,64	72.598.480.033,33
17	INVESTASI JANGKA PANJANG					
18	Investasi Nonpermanen		-	-	-	-
19	Investasi Nonpermanen Lainnya		-	-	-	-
20	Jumlah Investasi Nonpermanen		-	-	-	-
21	Investasi Permanen					
22	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.6.12	6.127.500.000,00	8.127.500.000,00	11.906.983.559,00	14.435.151.469,00
23	Investasi Permanen Lainnya		-	-	-	-
24	Jumlah Investasi Permanen		6.127.500.000,00	8.127.500.000,00	11.906.983.559,00	14.435.151.469,00
25	Jumlah Investasi Jangka Panjang		6.127.500.000,00	8.127.500.000,00	11.906.983.559,00	14.435.151.469,00
26	ASET TETAP	5.6.13				
27	Tanah	5.6.13.1	52.679.579.811,00	57.303.773.811,00	57.582.053.811,00	61.653.650.498,00
28	Peralatan dan Mesin	5.6.13.2	332.071.573.845,75	334.067.715.475,91	364.075.061.422,60	387.992.356.154,38
29	Gedung dan Bangunan	5.6.13.3	603.490.688.913,43	631.108.777.723,76	714.448.081.780,43	775.953.403.970,43
30	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.6.13.4	622.858.531.936,89	699.011.423.685,89	760.400.118.117,89	836.483.318.042,89
31	Aset Tetap Lainnya	5.6.13.5	27.015.704.344,00	31.959.241.168,00	36.175.192.568,00	45.872.148.224,00
32	Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.6.13.6	42.129.709.289,00	42.129.709.289,00	543.200.000,00	1.280.747.320,00
33	Akumulasi Penyusutan	5.6.13.7	(412.398.534.340,20)	(590.909.096.890,02)	(706.939.762.690,48)	(815.941.875.730,72)
34	Jumlah Aset Tetap		1.267.847.253.799,87	1.204.671.544.263,54	1.226.283.945.009,44	1.293.293.748.478,98
35	DANA CADANGAN					
36	Dana Cadangan		-	-	-	-
37	Jumlah Dana Cadangan		-	-	-	-
38	ASET LAINNYA	5.6.14				
39	Tagihan Jangka Panjang	5.6.14.1	11.573.416,93	10.768.129,36	134.811.473,40	173.979.152,29
40	Kemitraan dengan Pihak Ketiga		-	-	-	-
41	Aset Tak Berwujud	5.6.14.2	-	-	-	372.770.000,00
42	Amortisasi Aset Tak Berwujud		-	-	-	(60.064.000,00)
43	Aset Lain-Lain	5.6.14.3	14.671.489.311,00	27.519.039.320,97	17.798.666.460,00	15.234.767.053,00
44	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		-	(14.618.578.690,97)	(4.152.238.105,00)	-
45	Jumlah Aset Lainnya		14.683.062.727,93	12.911.228.759,36	13.781.239.828,40	15.721.452.205,29
46	Jumlah Aset		1.330.264.866.961,25	1.259.995.108.198,79	1.289.475.940.001,48	1.396.048.832.186,60
47	KEWAJIBAN	5.7				
48	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK					
49	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.7.1	2.077.176.788,00	1.602.842.563,00	2.804.154.649,00	2.588.694.722,00
50	Utang Bunga		-	-	-	-
51	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		-	-	-	-
52	Pendapatan Diterima Dimuka		-	-	-	-
53	Utang Beban	5.7.2	440.520.583,00	50.886.248,00	23.760.000,00	23.760.000,00
54	Utang Jangka Pendek Lainnya	5.7.3	13.053.357.625,00	4.682.967.243,00	1.436.842.551,00	1.436.842.551,00
55	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek Lainnya		15.571.054.996,00	6.336.696.054,00	4.264.757.200,00	4.049.297.273,00
56	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG					
57	Utang Dalam Negeri		-	-	-	-
58	Utang Jangka Panjang Lainnya		-	-	-	-
59	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		-	-	-	-
60	Jumlah Kewajiban		15.571.054.996,00	6.336.696.054,00	4.264.757.200,00	4.049.297.273,00
61	EKUITAS		1.314.693.811.965,25	1.253.658.412.144,79	1.285.211.182.801,48	1.391.999.534.913,60
62	EKUITAS	5.8	1.314.693.811.965,25	1.253.658.412.144,79	1.285.211.182.801,48	1.391.999.534.913,60
63	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		1.330.264.866.961,25	1.259.995.108.198,79	1.289.475.940.001,48	1.396.048.832.186,60

Sumber: LKPD Kab. Konawe Utara Tahun 2017 – 2020 (dianalisis)

* : Angka Target

Aset memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan yang dikuasai oleh pemerintah daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah dan masyarakat dimasa yang akan datang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam satuan moneter. Aset terdiri dari; (i) aset lancar, (ii) investasi jangka panjang, (iii) aset tetap, (iv) dana cadangan, dan (v) aset lainnya. Pada tahun 2016, Kabupaten Konawe Utara memiliki aset senilai Rp.1.330.264.866.961,25 dengan nilai aset terbesar berasal dari aset tetap yakni Rp.1.267.847.253.799,87 Sedangkan nilai pertumbuhan aset selama 2016-2020 mencapai 4,88 persen pertahun.

Aset lancar adalah kas dan sumber daya lainnya yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi. Pertumbuhan rata-rata Aset Lancar Pemerintah Kabupaten Konawe Utara tahun 2016-2019 memiliki perubahan yang cukup fluktuatif yaitu sebesar 69,73 persen per tahun. Pertumbuhan rata-rata tertinggi ada pada komponen Kas di Kas Daerah dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 458,19 persen, diikuti oleh komponen Piutang Pendapatan sebesar 31,99 persen dan Piutang Lainnya sebesar 25,82 persen.

Investasi Jangka Panjang yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Utara, memberikan sumbangan dalam Neraca Aset Daerah dengan rata-rata pertumbuhan 29,97 persen pertahun. Pada tahun 2016, infestasi jangka panjang baru sebesar Rp.6.127.500000 dan tahun 2019 mencapai Rp.14.435.151.469. Investasi jangka panjang ini didominasi oleh komponen investasi permanen berupa penyertaan modal pemerintah daerah.

Pertumbuhan rata-rata Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Konawe Utara pada tahun 2016-2020 memiliki kenaikan yang cukup besar setiap tahun yaitu sebesar 260,11 persen. Pertumbuhan rata-rata tertinggi ada pada komponen Jalan, Irigasi dan Jaringan dengan pertumbuhan sebesar 12,23 persen. Kemudian diikuti dengan komponen Gedung dan Bangunan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 9,25 persen dan komponen Peralatan dan Mesin sebesar 6,68 persen.

Pencatatan untuk Aset Lainnya pada kurun waktu 2016-2020 juga mengalami peningkatan seperti Aset Lainnya dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3,96 persen yang berasal dari komponen Aset Lainnya, lalu diikuti oleh komponen Tagihan Jangka Panjang dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 293,51 persen.

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak dimasa lalu. Kewajiban memberikan informasi tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Jumlah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Utara pada tahun 2016 adalah sebesar Rp.15.571.054.886 lebih rendah dari tahun 2015 yang sebesar 37.597.071.890,24 yang berasal dari Kewajiban Jangka Pendek. Kewajiban jangka pendek yang diharapkan harus diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan tumbuh rata-rata 58,58 persen per tahun. Peningkatan Utang Jangka Pendek ini didorong adanya peningkatan utang jangka pendek lainnya yang sebesar Rp. 13.571.054.996, Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) sebesar Rp. 2.077.176.788 dan Utang Beban sebesar Rp. 440.053.357.625.

Pada tahun 2018 jumlah Kewajiban yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Utara jauh lebih rendah dari tahun 2016, yaitu sebesar Rp. 4.262.757.200 yang terdiri dari komponen Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) sebesar Rp. 2.804.154.649, Utang Beban sebesar Rp. 23.760.000 dan Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp. 1.436.842.551.

Pertumbuhan Kewajiban hanya terjadi pada Kewajiban Jangka Pendek, sedangkan untuk Kewajiban Jangka Panjang tidak ada karena Pemerintah Kabupaten Konawe Utara tidak memiliki utang kepada Pemerintah Pusat ataupun Utang Jangka Panjang lainnya.

Ekuitas dana merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah daerah. Ekuitas dana meliputi; (i) ekuitas dana lancar, (ii) ekuitas dana investasi, dan (iii) ekuitas dana cadangan. Ekuitas dana lancar adalah selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas dana investasi merupakan selisih antara jumlah nilai investasi permanen, aset tetap dan aset lainnya (tidak termasuk dana cadangan) dengan nilai utang jangka panjang. Ekuitas dana cadangan merupakan kekayaan pemerintah daerah yang diinfestasikan dalam dana cadangan untuk tujuan tertentu dimasa datang. Nilai ekuitas dana Kabupaten Konawe Utara tahun 2016-2019 menunjukkan angka yang positif dengan dengan rata-rata peningkatan sebesar 5,39 persen per tahun.

Rasio Likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Untuk neraca keuangan daerah, rasio likuiditas yang digunakan adalah rasio lancar (*current ratio*) dan *Quick Ratio*. Rasio lancar adalah aset lancar dibagi dengan kewajiban jangka pendek. Rasio lancar digunakan untuk melihat Kabupaten Konawe Utara dalam menyelesaikan hutang jangka pendeknya, dimana semakin besar rasio yang diperoleh, maka semakin lancar hutang pembayaran jangka pendeknya. Sedangkan *Quick Ratio* adalah aset lancar dikurangi persediaan dibagi kewajiban jangka pendek.

Berdasarkan perhitungan, nilai rasio lancar neraca keuangan Daerah Kabupaten Konawe Utara pada tahun 2016-2019 terus mengalami kenaikan dengan rata-rata sebesar 8,70 persen setiap tahunnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa keuangan Kabupaten Konawe Utara sangat liquid dengan kemampuan pengembalian terhadap utang lancar yang sangat tinggi pada tahun 2016-2019. Jika dicermati terlihat aktiva lancar selama empat tahun berturut-turut naik dan rasio lancar juga menunjukkan kenaikan. Hal tersebut disebabkan karena kenaikan pada aktiva lancar diikuti pula dengan kenaikan kewajiban jangka pendek yang lebih besar persentasenya yaitu kewajiban utang kepada pihak ketiga. Keterangan lebih jelas dapat lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.7
Analisis Rasio Keuangan Kabupaten Konawe Utara
Tahun 2016-2019

No.	Uraian	2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1.	Rasio lancar (<i>current ratio</i>)	2,67	5,41	8,79	17,93	8,70
2.	Rasio quick (<i>quick ratio</i>)	2,54	4,77	7,86	16,98	8,04

Sumber: LKPD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2017 – 2020 (dianalisis)

Quick ratio lebih akurat dibandingkan rasio lancar, karena quick ratio telah mempertimbangkan persediaan didalam hitungannya. Berdasarkan tabel diatas nilai quick ratio neraca keuangan daerah Kabupaten Konawe Utara tahun 2016-2019 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun nilai dari perhitungan tersebut

menunjukkan bahwa kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara setelah dikurangi persediaan mempunyai kemampuan yang cukup kuat untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya.

Rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Untuk neraca keuangan daerah, rasio yang digunakan adalah rasio kewajiban terhadap aset dan rasio kewajiban terhadap ekuitas. Rasio kewajiban terhadap aset adalah kewajiban dibagi dengan aset, sedangkan rasio kewajiban terhadap ekuitas adalah kewajiban dibagi dengan ekuitas.

Tabel 3.8
Rasio Solvabilitas Kabupaten Konawe Utara
Tahun 2016-2019

No.	Rasio Solvabilitas	2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1.	Rasio Kewajiban terhadap Aset	0,0117	0,0050	0,0033	0,0029	0,006
2.	Rasio Kewajiban terhadap Ekuitas	0,0118	0,0051	0,0033	0,0029	0,006

Sumber: LKPD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2017 – 2020 (dianalisis)

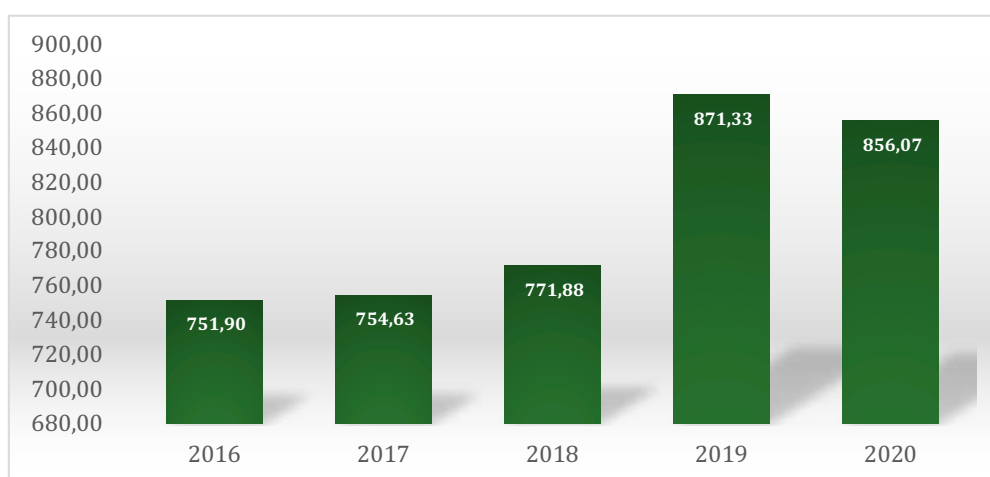
Berdasar hasil perhitungan pada tabel rasio solvabilitas diperoleh nilai rasio kewajiban terhadap aset pada tahun 2016 sebesar 0,0117 dan pada tahun 2019 sebesar 0,0029. Semakin besar nilai rasio kewajiban terhadap aset, maka semakin buruk rasio kewajiban terhadap aset. Jika dilihat dari nilai tersebut dapat dikatakan bahwa kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara selama 4 (empat) tahun cukup kuat untuk membayar jika pemerintah melakukan pinjaman ke kreditor dan tingkat kemampuan membayar tersebut cenderung stabil dengan laju pertumbuhan 0,006 persen per tahun.

Rasio kewajiban terhadap ekuitas secara langsung membandingkan kewajiban dibagi dengan ekuitas. Nilai rasio kewajiban terhadap ekuitas Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara pada tahun 2016 sebesar 0,0118 dan pada tahun 2019 sebesar 0,0029. Semakin kecil nilai tersebut, maka semakin baik pula rasio kewajiban terhadap ekuitas karena menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah untuk membayar kewajibannya.

3.2. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU

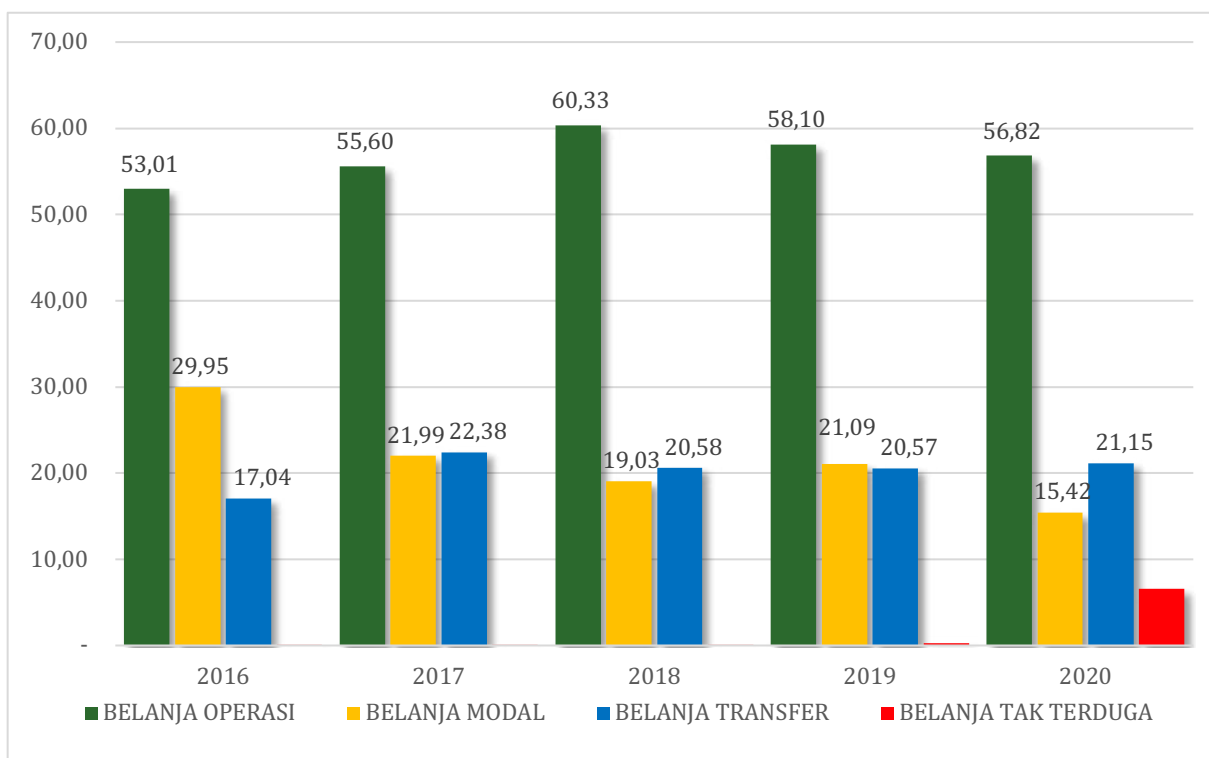
3.2.1. Kinerja Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Perkembangan belanja daerah Kabupaten Konawe Utara menunjukkan angka yang fluktuatif dalam kurun waktu tahun 2016-2020 dengan kecenderungan meningkat dari sebesar 751,90 milyar pada tahun 2016 menjadi sebesar 871,33 milyar pada tahun 2019 dan sedikit menurun menjadi 856,07 milyar rupiah di tahun 2020. Belanja daerah Kabupaten Konawe Utara tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 secara rinci tercantum pada gambar 3.7 berikut.



Gambar 3.7 Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016-2020 (Milyar Rupiah)

Belanja daerah Kabupaten Konawe Utara memiliki komposisi terbesar pada belanja operasi dengan proporsi sebesar 53,01% pada tahun 2016 dengan kecenderungan meningkat menjadi 60,33% pada tahun 2018 namun kembali menurun menjadi 56,82% pada tahun 2020. Selanjutnya adalah belanja modal dengan proporsi cenderung menurun dari sebesar 29,95% pada tahun 2016 menjadi 15,42% pada tahun 2020. Kemudian belanja transfer dengan kecenderungan meningkat dari sebesar 17,04% pada tahun 2016 menjadi 21,15% pada tahun 2020. Perkembangan proporsi unsur belanja daerah Kabupaten Konawe Utara tercantum pada gambar 3.8 berikut.



Gambar 3.8 Proporsi Unsur Belanja Daerah terhadap Total Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016-2020 (Milyar Rupiah)

Beberapa permasalahan yang terkait dengan belanja daerah antara lain Sumber daya manusia (SDM) yang kurang memahami perencanaan belanja, terutama pada penyesuaian belanja dan kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga terkendala pada saat pencairan dana. Selain itu, Kegiatan pengadaan barang jasa dan modal yang dilakukan melalui mekanisme lelang dilaksanakan pada pertengahan tahun berjalan sehingga penyerapan belanja daerah menumpuk di akhir tahun, serta adanya peraturan-peraturan baru dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi yang mengatur hal-hal yang bersifat teknis terkait pelaksanaan kegiatan dan penyerapan belanja, sehingga muncul kendala pada saat pencairan dana.

Perincian belanja daerah Kabupaten Konawe Utara selama kurun waktu tahun 2016-2020 tercantum pada tabel 3.6 berikut ini.

Tabel 3.9
Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016-2020 (Rupiah)

No.	Uraian	Realisasi (Rp)				
		2016	2017	2018	2019	2020
5	BELANJA	751.901.396.691	754.634.224.949	771.881.731.451	871.333.037.618	856.065.731.732
5.1	BELANJA OPERASI	398.588.177.300	419.542.885.153	465.642.313.503	506.247.378.652	486.384.357.129
5.1.01	Belanja Pegawai	220.136.377.300	210.781.038.810	178.771.189.729	192.280.560.730	198.598.939.688
5.1.02	Belanja Barang dan jasa	169.913.000.000	198.049.994.343	275.221.523.774	291.735.060.498	217.925.323.491
5.1.03	Belanja Bunga	-	-	-	-	-
5.1.04	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-
5.1.05	Belanja Hibah	6.468.800.000	4.825.800.000	6.649.600.000	13.176.900.000	58.249.225.950
5.1.06	Bantuan Sosial	2.070.000.000	5.886.052.000	5.000.000.000	9.054.857.424	11.610.868.000
5.1.07	Belanja Bantuan keuangan					
5.2	BELANJA MODAL	225.164.000.000	165.920.510.866	146.886.999.088	183.722.108.496	132.001.111.279
	Belanja Modal	225.164.000.000	165.920.510.866	146.886.999.088	183.722.108.496	132.001.111.279
5.2.01	Belanja Modal Tanah	-	-	-	-	-
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	-	-	-
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-	-	-
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-	-
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	-	-	-

No.	Uraian	Realisasi (Rp)				
		2016	2017	2018	2019	2020
5.3	BELANJA TAK TERDUGA	219.391	263.562.880	495.000.000	2.135.000.000	56.599.230.000
5.3.1	Belanja Tak Terduga	219.391	263.562.880	495.000.000	2.135.000.000	56.599.230.000
5.4	BELANJA TRANSFER	128.149.000.000	168.907.266.050	158.857.418.860	179.228.550.470	181.081.033.324
5.4.01	TRANSFER / BAGI HASIL KE DESA	-	-	-	-	-
5.4.01.01	Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-	-
5.4.01.02	Bagi Hasil Retribusi	-	-	-	-	-
5.4.01.03	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-	-	-	-
5.4.02	TRANSFER / BANTUAN KEUANGAN	128.149.000.000	168.907.266.050	158.857.418.860	179.228.550.470	181.081.033.324
5.4.02.01	Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-	-
5.4.02.02	Bantuan Keuangan ke Desa	128.149.000.000	168.907.266.050	158.857.418.860	179.228.550.470	181.081.033.324
5.4.02.03	Bantuan Keuangan Lainnya	-	-	-	-	-
	BELANJA	751.901.396.691	754.634.224.949	771.881.731.451	871.333.037.618	856.065.731.732
	SURPLUS / DEFISIT	43.161.672.179	(8.786.786.917)	6.205.586.881	33.268.347.766	27.356.225.434

Sumber : BKAD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021

3.2.2 Proporsi Penggunaan Anggaran

Proporsi penggunaan anggaran untuk belanja pegawai dalam kurun waktu tahun 2016-2020 menunjukkan kecenderungan menurun dari sebesar 29,24 persen pada tahun 2016 menjadi sebesar 23,12 persen pada tahun 2021. Proporsi penggunaan anggaran untuk belanja pegawai dalam kurun waktu tahun 2016-2020 Kabupaten Konawe Utara tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 3.10
Analisis Proporsi Belanja Pegawai

No.	Tahun Anggaran	Total Belanja Untuk Kebutuhan Pemenuhan Aparatur (Rp)	Total Pengeluaran (Belanja + Pengeluaran Pembiayaan) (Rp)	Persentase
		(a)	(b)	$\frac{(a)}{(b)} \times 100$
1.	2016	220.136.377.300	752.901.396.691	29,24
2.	2017	210.781.038.810	756.634.224.949	27,86
3.	2018	178.771.189.729	775.881.731.451	23,04
4.	2019	192.280.560.730	874.333.037.618	21,99
5.	2020	198.598.939.688	859.065.731.732	23,12
Rata-rata				25,05

Sumber : BKAD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021, dianalisis

Pada tahun 2016 proporsi belanja aparatur mencapai 29,24%, sedangkan pada tahun 2017 proporsi belanja aparatur turun menjadi 27,86%. Tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 berflktuatif dan mencapai titik terendah pada tahun 2019 sebesar 21,99%. Prporosi belanja pegawai mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 masih dibawah 30 persen dengan rata-rata sebesar 25,05 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan belanja daerah sangat baik, karena proporsi belanja aparatur masih lebih sedikit dibandingkan dengan proporsi belanja daerah yang bersifat pelayanan masyarakat yaitu masih diatas 70 persen. Namun demikian pengelolaan belanja daerah perlu dikelola dengan baik agar proporsi belanja daerah yang digunakan untuk kebutuhan rutin birokrasi tidak lebih besar dibandingkan dengan proporsi belanja untuk memberikan pelayanan publik.

3.2.3 Analisis Pembiayaan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Kondisi anggaran dalam APBD Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2016, perbandingan antara pendapatan dan belanja masih lebih besar pendapatan. Sedangkan pada tahun 2017-2018, kondisi belanja lebih besar dari pendapatan sehingga dalam pembiayaan digunakan untuk menutup defisit dari selisih tersebut. Sumber-sumber penerimaan pembiayaan yang paling besar masih tetap dari pos Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya.

Kondisi pembiayaan daerah dipengaruhi oleh sisi penerimaan dan pengeluaran. Selama kurun waktu 2016 hingga 2020, APBD Kabupaten Konawe Utara mengalami dua kali defisit anggaran yakni pada tahun 2016 dan 2019, serta mengalami tiga (3) kali surplus anggaran yakni pada tahun 2017, 2019 dan 2020. Kondisi APBD yang mengalami surplus dan defisit tersebut memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) pada tahun berkenaan dan tentu berpengaruh total terhadap penerimaan pembiayaan pada tahun selanjutnya. Selain itu penerimaan pembiayaan juga didapat dari pencairan dana cadangan dan penerimaan piutang daerah. Sedangkan pengeluaran pembiayaan lebih banyak digunakan untuk infestasi pemerintah dalam rangka pembiayaan BUMD, baik Perusahaan Daerah (PD), Bank Perkreditan Rakyat (BPR) maupun PDAM. Selain itu pengeluaran pembiayaan juga dialokasikan untuk pemenuhan dana cadangan.

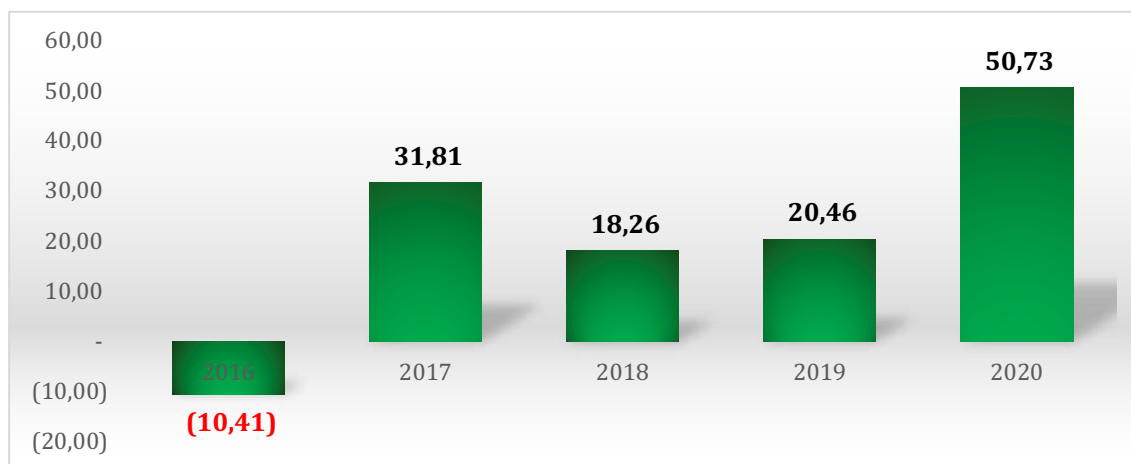
Perkembangan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel 3.11 berikut.

Tabel 3.11.
Perkembangan Pembiayaan Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016-2020 (Rupiah)

NO.	Uraian	Realisasi (Rp)				
		2016	2017	2018	2019	2020
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	(10.406.141.033)	31.806.786.447	18.258.039.162	20.463.626.043	50.731.973.809
6.1.01	Penggunaan SiLPA	(10.406.141.033)	31.806.786.447	18.258.039.162	20.463.626.043	50.731.973.809
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
6.1.03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
6.1.05	Penerimaan Kembali Pinjaman daerah	-	-	-	-	-
6.1.06	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-
6.1.07	Penerimaan Kembali Dana Bergulir	-	-	-	-	-
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.000.000.000	2.000.000.000	4.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
6.2.02	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	1.000.000.000	2.000.000.000	4.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000
6.2.03	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-	-
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
6.2.05	Pembayaran Utang Kepada Pihak Ketiga	-	-	-	-	-
6.2.06	Dana Talangan	-	-	-	-	-
6.2.07	Pemberian Pinjaman Dana Bergulir	-	-	-	-	-
PEMBIAYAAN NETTO		(11.406.141.033)	29.806.786.447	14.258.039.162	17.463.626.043	47.731.973.809
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN		31.755.531.146	21.019.999.530	20.463.626.043	50.731.973.809	75.088.199.243

Sumber : BKAD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021

Perkembangan penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Konawe Utara menunjukkan peningkatan dari sebesar minus 10,41 milyar pada tahun 2016 menjadi 50,73 milyar pada tahun 2020, seperti terlihat pada gambar 3.9 berikut.



Gambar 3.9 Perkembangan Penerimaan Pembiayaan Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016-2020 (Milyar Rupiah)

Pengeluaran pembiayaan Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah. Pengeluaran pembiayaan di Kabupaten Konawe Utara berasal dari Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah. Pengeluaran pembiayaan daerah pada tahun 2016 sebesar 1,00 milyar rupiah mengalami fluktuasi menjadi 3,00 milyar rupiah pada tahun 2020 cenderung stabil, seperti terlihat pada gambar 3.10 berikut.



Gambar 3.10 Perkembangan Pengeluaran Pembiayaan Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016-2020 (Milyar Rupiah)

Defisit riil anggaran Kabupaten Konawe Utara selama kurun waktu tahun 2016-2020 hanya terjadi pada tahun 2017 sebesar Rp 9.786.786.917 sedangkan tahun 2016, tahun 2018, tahun 2019, dan tahun 2020 terjadi surplus anggaran seperti tercantum pada tabel 3.12 berikut ini.

Tabel 3.12
Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Realisasi Pendapatan Daerah	795.063.068.870	745.847.438.032	778.087.318.332	904.601.385.384	883.421.957.166
Dikurangi realisasi:						
2	Belanja Daerah	751.901.396.691	754.634.224.949	771.881.731.451	871.333.037.618	856.065.731.732
3.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
Defisit Riil		42.161.672.179	(9.786.786.917)	5.205.586.881	32.268.347.766	26.356.225.434

Sumber : Dinas BKAD Kabupaten Konawe Utara, dianalisis

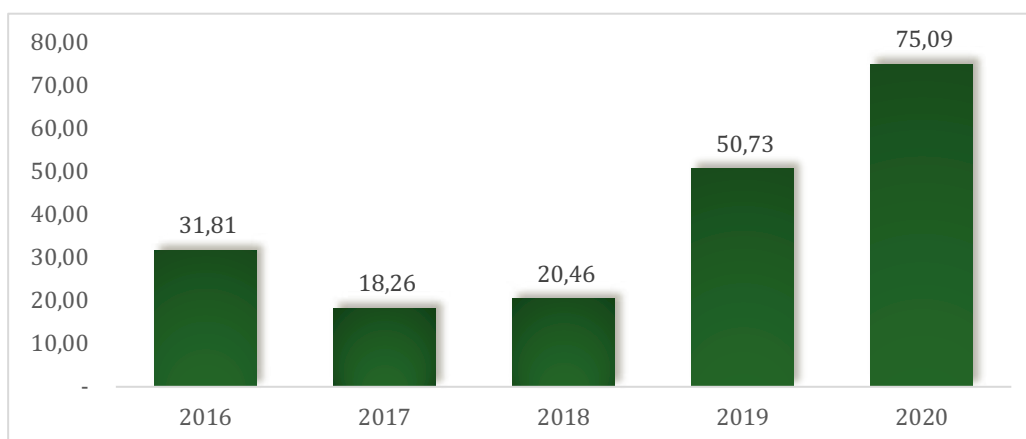
Sumber penutup defisit riil anggaran terutama berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya dengan rincian yang dalam tabel 3.13 berikut.

Tabel 3.13
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran
Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016-2020

NO.	Uraian	Proporsi dari total defisit riil (%)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	100	100	100	100	100
2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
5	Penerimaan Kembali Pinjaman daerah	-	-	-	-	-
6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-
7	Penerimaan Kembali Dana Bergulir	-	-	-	-	-

Sumber : Dinas BKAD Kabupaten Konawe Utara, dianalisis

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. SiLPA tahun berjalan di Kabupaten Konawe Utara menunjukkan kecenderungan peningkatan dari sebesar 31,81 milyar rupiah pada tahun 2016 menjadi sebesar 75,09 milyar rupiah pada tahun 2020 yang tercantum pada gambar 3.11 berikut.



Gambar 3.11 Perkembangan SiLPA tahun Berjalan Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016-2020 (Milyar Rupiah)

Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016-2020 berfluktuatif namun cenderung meningkat, dari sebesar Rp 31.806.786.447 pada tahun 2016 menjadi Rp 18.258.039.162 pada tahun 2017 dan Rp 75.088.199.243 pada tahun 2020. Adapun komponen realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran antara lain pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan pendapatan transfer, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, sisa penghematan belanja atau akibat lainnya, pelampauan penerimaan pembiayaan, dan sisa pengeluaran pembiayaan.

Pada Tahun 2020, komponen sisa penghematan belanja atau akibat lainnya menyumbangkan SiLPA terbesar yaitu Rp 112.083.952.322 dengan presentase 149,27%. Secara rinci Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel 3.14 berikut ini.

Tabel 3.14
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Konawe Utara
Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016		2017		2018		2019		2020	
		Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA
1	Jumlah SiLPA	31.806.786.447	100,00	18.258.039.162	100,00	20.463.626.043	100	50.731.973.809	100	75.088.199.243	100,00
2	Pelampauan penerimaan PAD	1.575.504.080	4,95	12.252.200.734	67,11	(483.114.281)	100,00	(2.608.186.071)	(5,14)	(36.685.031.624)	(48,86)
3	Pelampauan penerimaan pendapatan transfer	(8.339.976.496)	(26,22)	(11.890.372.523)	(65,12)	19.789.096.289	96,70	6.571.431.445	12,95	(15.306.185.001)	(20,38)
4	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	(48.193.166.829)	(151,52)	7.541.226.775	41,30	5.463.416.928	26,70	28.102.718.900	55,39	(1.658.579.263)	(2,21)
5	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	92.670.566.725	291,35	(3.251.318.881)	(17,81)	(11.367.876.795)	(55,55)	1.202.383.492	2,37	112.083.952.322	149,27
6	Pelampauan penerimaan pembiayaan	(15.406.141.033)	(48,44)	13.606.303.057	74,52	8.062.103.902	39,40	16.463.626.043	32,45	16.654.042.809	22,18
7	Sisa pengeluaran pembiayaan	9.500.000.000	29,87	-	-	(1.000.000.000)	(4,89)	1.000.000.000	1,97	-	-

Sumber : BKAD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016-2021, diolah

3.3. KERANGKA PENDANAAN

3.3.1 Proyeksi Keuangan Daerah

Asumsi penyusunan Proyeksi keuangan daerah Kabupaten Konawe Utara tahun 2022-2026 dengan mempertimbangkan pemulihan ekonomi akibat pandemi covid-19. Pemulihan ekonomi akan memicu peningkatan pertumbuhan ekonomi sehingga diharapkan terjadi peningkatan pendapatan daerah. Pertumbuhan ekonomi dalam jangka menengah Kabupaten Konawe Utara tahun 2022-2026 kemungkinan besar masih terpengaruh oleh Pandemi Covid-19, terutama dalam dua tahun ke depan.

Penjelasan asumsi proyeksi keuangan daerah tahun 2021- 2026 sebagai berikut:

1. Untuk tahun 2021 pendapatan asli daerah utamanya pajak dan retribusi kemungkinan besar masih terpengaruh oleh pelaksanaan new normal selama masa Pandemi Covid-19, sehingga hanya mengalami sedikit peningkatan dibandingkan tahun 2020. Kemudian untuk tahun 2022-2026 diproyeksikan pendapatan asli daerah mengalami sedikit peningkatan dengan asumsi kondisi perekonomian sudah dapat pulih kembali setelah vaksin Covid-19 diberikan pada tahun 2021 dan ditargetkan selesai pada bulan april tahun 2022, serta adanya kebijakan ekonomi tahun 2022 yang diarahkan pada upaya pemulihan ekonomi. Diharapkan kebijakan ini akan berdampak pada membaiknya pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya pendapatan asli daerah pada tahun 2022 hingga tahun 2026.
2. Pendapatan daerah yang berasal dari transfer pemerintah pusat diasumsikan masih sama dengan APBD tahun 2021 yang tertuang PMK No. 35/PMK.07/2020. Namun diharapkan kedepan transfer dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam kurun waktu tahun 2022-2026 dapat meningkat sehingga dapat disesuaikan dalam RKPD, tentunya kepastiannya mendasarkan pada postur APBN dan APBD Provinsi Sulawesi Tenggara.
3. Lain-lain pendapatan yang sah diasumsikan sama selama kurun waktu tahun 2022-2026.
4. Wacana pengajuan pinjaman daerah tahun 2021 sebesar 300 milyar rupiah diasumsikan dapat terealisasi pada tahun 2022 sehingga meningkatkan penerimaan pembiayaan yang berdampak pada peningkatan belanja daerah

utamanya dalam prioritas percepatan pembangunan infrastruktur serta pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

5. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo dimulai pada tahun 2023 dilakukan selama empat tahun sampai dengan tahun 2026.

Dengan mendasarkan pada asumsi dan kebijakan di atas, maka dilakukan proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum pada tabel 3.15 berikut

Tabel 3.15
Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021-2026

Kode	Uraian	Proyeksi (Rp)					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
4	PENDAPATAN DAERAH	943.443.713.657	966.729.787.331	991.752.874.555	1.018.998.181.177	1.048.843.609.521	1.081.742.401.453
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	48.771.259.017	55.879.657.901	64.172.292.422	73.873.332.570	85.254.199.368	98.644.368.986
4.1.01	Pajak Daerah	5.124.228.248	6.514.943.795	8.283.099.540	10.531.132.756	13.389.282.185	17.023.133.371
4.1.02	Retribusi Daerah	17.789.655.087	19.431.640.252	21.225.180.647	23.184.264.820	25.324.172.463	27.661.593.582
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.237.876.765	6.294.880.296	7.565.187.140	9.091.841.905	10.926.575.601	13.131.558.557
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	20.619.498.917	23.638.193.558	27.098.825.095	31.066.093.089	35.614.169.118	40.828.083.476
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	878.678.271.640	894.697.218.561	911.267.117.728	928.648.982.877	946.949.272.910	966.291.730.848
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	859.347.752.000	872.152.033.505	884.972.668.397	897.981.766.623	911.182.098.592	924.576.475.441
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	19.330.519.640	22.545.185.056	26.294.449.331	30.667.216.255	35.767.174.318	41.715.255.407
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	15.994.183.000	16.152.910.869	16.313.464.404	16.475.865.729	16.640.137.243	16.806.301.618
4.3.1	Pendapatan Hibah	4.500.000.000	4.516.200.000	4.532.458.320	4.548.775.170	4.565.150.761	4.581.585.303
4.3.2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	11.494.183.000	11.636.710.869	11.781.006.084	11.927.090.559	12.074.986.482	12.224.716.315
	Jumlah Pendapatan	943.443.713.657	966.729.787.331	991.752.874.555	1.018.998.181.177	1.048.843.609.521	1.081.742.401.453

Kode	Uraian	Proyeksi (Rp)					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
5	BELANJA	1.015.281.912.900	1.314.979.787.331	965.002.874.555	994.248.181.177	1.024.093.609.521	1.056.992.401.453
5.1	BELANJA OPERASI	653.241.399.185	659.840.263.854	665.389.618.333	671.261.037.840	677.498.045.532	684.150.920.539
5.1.01	Belanja Pegawai	290.851.822.141	293.324.062.629	295.817.317.162	298.331.764.357	300.867.584.354	303.424.958.821
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	349.032.635.944	349.905.217.534	350.779.980.578	351.656.930.529	352.536.072.855	353.417.413.038
5.1.03	Belanja Hibah	13.356.941.100	14.991.830.691	16.826.830.767	18.886.434.853	21.198.134.479	23.792.786.139
5.1.04	Belanja Bantuan Sosial	-	1.619.153.000	1.965.489.827	2.385.908.101	2.896.253.843	3.515.762.540
5.2	BELANJA MODAL	171.725.154.876	462.134.853.668	103.787.560.123	124.192.824.896	144.666.957.944	167.592.359.506
5.2.1	Belanja Modal Tanah	3.100.000.000	3.107.440.000	3.114.897.856	3.122.373.611	3.129.867.308	3.137.378.989
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	66.563.761.305	67.279.230.502	26.208.840.463	41.624.545.831	47.312.412.440	47.500.887.195
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	38.940.304.156	200.415.375.867	29.896.243.452	34.382.977.622	43.625.649.949	48.874.332.878
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	59.076.866.462	187.261.083.630	40.468.166.962	40.935.640.444	46.443.675.306	63.896.151.102
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.044.222.953	4.071.723.669	4.099.411.390	4.127.287.387	4.155.352.942	4.183.609.343
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.790.203.639	6.597.358.026	7.517.029.735	8.564.903.680	9.758.851.253	11.119.235.118
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	5.790.203.639	6.597.358.026	7.517.029.735	8.564.903.680	9.758.851.253	11.119.235.118
5.4	BELANJA TRANSFER	184.525.155.200	186.407.311.783	188.308.666.363	190.229.414.760	192.169.754.791	194.129.886.290
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	184.525.155.200	186.407.311.783	188.308.666.363	190.229.414.760	192.169.754.791	194.129.886.290
	Jumlah Belanja	1.015.281.912.900	1.314.979.787.331	965.002.874.555	994.248.181.177	1.024.093.609.521	1.056.992.401.453
	Total Surplus/(Defisit)	(71.838.199.243)	(348.250.000.000)	26.750.000.000	24.750.000.000	24.750.000.000	24.750.000.000

Kode	Uraian	Proyeksi (Rp)					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
6	PEMBIAYAAN						
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	75.088.199.243	352.500.000.000	52.500.000.000	52.500.000.000	52.500.000.000	52.500.000.000
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	75.088.199.243	52.500.000.000	52.500.000.000	52.500.000.000	52.500.000.000	52.500.000.000
6.1.02	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	300.000.000.000	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	75.088.199.243	352.500.000.000	52.500.000.000	52.500.000.000	52.500.000.000	52.500.000.000
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	3.250.000.000	4.250.000.000	79.250.000.000	77.250.000.000	77.250.000.000	77.250.000.000
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	3.250.000.000	3.250.000.000	3.250.000.000	1.250.000.000	1.250.000.000	1.250.000.000
6.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo	-	-	75.000.000.000	75.000.000.000	75.000.000.000	75.000.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	3.250.000.000	4.250.000.000	79.250.000.000	77.250.000.000	77.250.000.000	77.250.000.000
	Pembiayaan Netto	71.838.199.243	348.250.000.000	(26.750.000.000)	(24.750.000.000)	(24.750.000.000)	(24.750.000.000)
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	-	-	-	-	-	-
	TOTAL APBD	1.018.531.912.900	1.319.229.787.331	1.044.252.874.555	1.071.498.181.177	1.101.343.609.521	1.134.242.401.453

Sumber : Bappeda Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021

3.3.2. Perhitungan Kerangka Pendanaan

Analisis Kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah, kemudian menentukan ke pos-pos mana sumber penerimaan tersebut akan dialokasikan.

Dari total pendapatan dan penerimaan yang dikurangi total belanja wajib dan pengeluaran yang wajib mengikat serta prioritas utama diperoleh kapasitas riil kemampuan keuangan. Suatu kapasitas riil keuangan daerah adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos belanja pegawai dan pengeluaran pembiayaan. Untuk menentukan proyeksi kapasitas riil keuangan daerah yang akan digunakan untuk membiayai program/kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan (2021-2026) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Konawe Utara sebagaimana tabel berikut.

Berdasarkan dana alokasi pagu indikatif yang tersedia, kemudian dialokasikan ke berbagai program/kegiatan sesuai urutan prioritas. Adapun ketentuan prioritas anggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut:

- a. Prioritas I adalah dialokasikan untuk pengeluaran wajib mengikat serta untuk program - program pelayanan wajib dasar terutama pemenuhan SPM;
- b. Prioritas II adalah dialokasikan untuk program-program terkait dengan pelaksanaan visi dan misi Bupati (Janji Bupati) di luar program prioritas untuk pemenuhan urusan wajib pelayanan dasar;
- c. Prioritas III adalah untuk program-program urusan pemerintahan lainnya serta penunjang tugas dan fungsi OPD.

Pembagian anggaran untuk masing-masing prioritas I, II dan III dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.16
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Konawe Utara
Tahun 2021-2026

No.	Uraian	Proyeksi					
		2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	2025 (Rp)	2026 (Rp)
1.	Pendapatan	943.443.713.657	966.729.787.331	991.752.874.555	1.018.998.181.177	1.048.843.609.521	1.081.742.401.453
2.	Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)	-	-	-	-	-	-
3.	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	75.088.199.243	52.500.000.000	52.500.000.000	52.500.000.000	52.500.000.000	52.500.000.000
4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	300.000.000.000	-	-	-	-
Total penerimaan		1.018.531.912.900	1.319.229.787.331	1.044.252.874.555	1.071.498.181.177	1.101.343.609.521	1.134.242.401.453
	Dikurangi:						
5.	Belanja Pegawai	290.851.822.141	293.324.062.629	295.817.317.162	298.331.764.357	300.867.584.354	303.424.958.821
6.	Pengeluaran Pembiayaan	3.250.000.000	4.250.000.000	79.250.000.000	77.250.000.000	77.250.000.000	77.250.000.000
Kapasitas riil kemampuan keuangan		724.430.090.759	1.021.655.724.702	669.185.557.393	695.916.416.820	723.226.025.166	753.567.442.631

Sumber : Bappeda Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021

Tabel 3.17
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021-2026

No.	Uraian	Proyeksi					
		2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	2025 (Rp)	2026 (Rp)
1.	Kapasitas riil kemampuan keuangan	724.430.090.759	1.021.655.724.702	669.185.557.393	695.916.416.820	723.226.025.166	753.567.442.631
	digunakan untuk mendanai prioritas :						
2.	Prioritas I Pengeluaran wajib mengikat serta untuk program-program pelayanan wajib dasar terutama pemenuhan SPM	467.558.269.297	476.426.247.982	485.834.528.730	495.928.869.113	506.822.837.647	518.652.606.725
3.	Prioritas II Program terkait dengan pelaksanaan visi dan misi Bupati (Janji Bupati) di luar program prioritas untuk pemenuhan urusan wajib pelayanan dasar	179.810.275.023	490.706.529.047	128.345.720.064	139.991.283.394	151.482.231.263	164.440.385.134
4.	Prioritas III Program-program urusan pemerintahan lainnya serta penunjang tugas dan fungsi OPD	77.061.546.439	54.522.947.672	55.005.308.599	59.996.264.312	64.920.956.256	70.474.450.772
Jumlah prioritas I, II, dan III		724.430.090.759	1.021.655.724.702	669.185.557.393	695.916.416.820	723.226.025.166	753.567.442.631

Sumber : Bappeda Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021

Tabel 3.16 dan 3.17 di atas menginformasikan bahwa kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara terus membaik secara perlahan dari tahun ke tahun, namun hasil perhitungan di atas menunjukkan bahwa secara keseluruhan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Konawe Utara relatif terbatas. Ini dikarenakan adanya dampak dari pandemi Covid-19 yang menyebabkan krisis perekonomian global dan nasional, yang juga menyebabkan tekanan anggaran (fiscal distress). Perekonomian dunia dan nasional diperkirakan akan kembali normal setelah 2 tahun dari selesainya pandemi, atau jika diperkirakan sampai dengan akhir tahun 2020 pandemi akan mereda, maka baru tahun 2023 perekonomian global akan kembali normal. Di masa 2 tahun ke depan diperkirakan fiskal Pemerintah dan Pemerintah Daerah akan mengalami tekanan dan penurunan kapasitas. Sehingga, diperkirakan dengan kondisi yang terjadi pada tahun 2020 ini, baru pada tahun 2023 kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Konawe Utara akan membaik.

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH



Analisis isu strategis merupakan pemahaman permasalahan pembangunan dan isu-isu penting dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021-2026. Isu strategis merupakan tantangan atau peluang yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi masyarakat di masa mendatang. Suatu analisis isu-isu strategis menghasilkan rumusan strategi dan kebijakan yang bersifat antisipatif dan solusi atas berbagai kondisi yang tidak ideal di masa depan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka menengah. Sedangkan pada sisi lain, permasalahan pembangunan daerah menggambarkan kinerja daerah atau kondisi masyarakat yang belum ideal. Dengan demikian, rumusan tentang permasalahan pembangunan dan isu strategis merupakan bagian penting dalam penentuan strategi dan kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Konawe Utara.

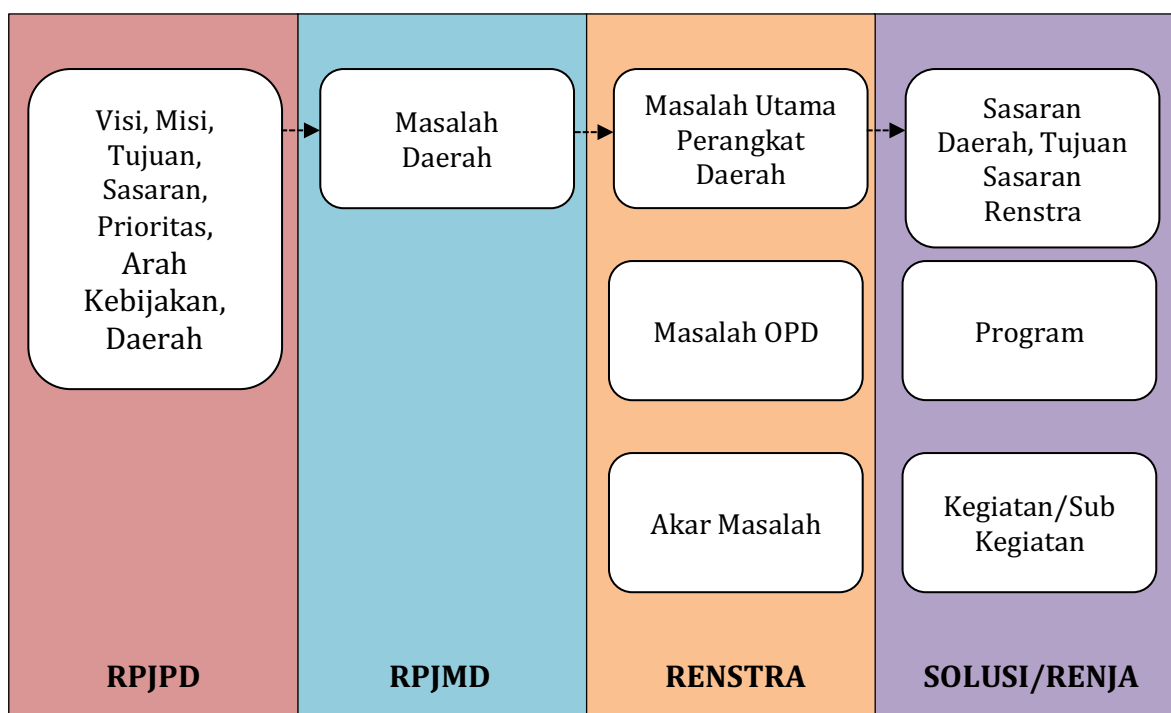
Perkembangan terkini, permasalahan dan tantangan pembangunan Kabupaten Konawe Utara, regional, nasional maupun internasional semakin bertambah sebagai implikasi terjadinya pandemi COVID-19 yang dimulai pada awal tahun 2020 dan hingga saat ini belum dapat dipastikan sampai kapan pandemi dapat dikendalikan atau berakhir. Dampak pandemi sudah terjadi pada tahun 2020 dan masih akan berlanjut pada tahun-tahun berikutnya. Oleh karena itu, permasalahan dan tantangan pembangunan sebagai dampak pandemi COVID-19 harus diintegrasikan ke dalam permasalahan dan isu strategis pembangunan Kabupaten Konawe Utara.

4.1 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

Permasalahan pembangunan daerah merupakan kesenjangan antara sasaran pembangunan yang ingin dicapai di masa mendatang dengan kondisi riil saat perencanaan pembangunan dilaksanakan. Untuk meminimalisir kesenjangan tersebut dalam rangka mewujudkan visi dan misi kepala daerah terpilih, maka diperlukan perumusan yang tepat terkait analisis permasalahan daerah.

Identifikasi permasalahan pembangunan Kabupaten Konawe Utara dilakukan terhadap data capaian pembangunan sampai dengan tahun 2020 seluruh bidang urusan pemerintahan dan permasalahan daerah dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah dalam RPJPD Kabupaten Konawe Utara tahun 2012-2032. Identifikasi permasalahan dilakukan dalam *Forum Group Discussion* (FGD)

dengan perangkat daerah terkait. Hasil FGD dipetakan dengan pendekatan kerangka logis masalah pada RPJMD dan Renstra. Kerangka logis permasalahan Daerah dan Perangkat Daerah ditunjukkan Gambar 4.1.



Gambar 4.1 Hubungan Permasalahan Daerah dan Perangkat Daerah

Hasil analisis permasalahan yang merupakan penjabaran Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2012-2032, ditemukan 26 (dua puluh enam) masalah utama di Kabupaten Konawe Utara dalam rangka mewujudkan layanan publik dan kesejahteraan masyarakat sebagaimana ditunjukkan dalam tabel 4.1 sebagai berikut.

Tabel 4.1 Keterkaitan Masalah Daerah dan Permasalahan Perangkat Daerah

No.	Arah Kebijakan RPJPD	Masalah Daerah	Masalah OPD	Urusan	Ket.
1.	Peningkatan kualitas pendidikan, aksesibilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pendidikan, serta pemerataan pendidikan dan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu.	Belum optimalnya akses pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> Masih rendahnya perluasan akses dan pemerataan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan yang ditujukan oleh masih rendahnya Angka Rata-Rata Lama Sekolah (9,21 Tahun), APK PAUD (63,75), APM SD (97,70), dan APM SMP (77,64). Masih rendahnya mutu, relevansi dan daya saing pendidikan yang ditunjukkan oleh rasio guru sekolah (PAUD, SD 8,44, SMP 12,69), rendahnya persentase guru tersertifikasi (SD 30,64 % dan SMP 30,20%). Masih rendahnya persentase sekolah akreditasi SD (17,31 %) dan SMP (41,67%) dan masih belum meratanya keberadaan sekolah dasar dan sekolah menengah di wilayah Kabupaten Konawe Utara (65,41% dari jumlah desa). Masih kurang optimalnya kapasitas perpustakaan daerah dan sekolah guna mendorong minat baca masyarakat. Masih belum optimalnya pengelolaan perpustakaan digital, guna mendorong minat baca masyarakat, dalam rangka penyesuaian terhadap kondisi zaman. 	<p>Pendidikan</p> <p>Perpustakaan</p>	<p>Wajib Pelayanan Dasar</p> <p>Wajib Non Pelayanan Dasar</p>
2.	Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan, aksesibilitas, dan	Derajat kesehatan masyarakat dan capaian keluarga sehat masih perlu	<ol style="list-style-type: none"> Belum terpenuhinya SPM Bidang Kesehatan Masih ditemukannya balita dengan kondisi gizi kurang (296 jiwa), gizi buruk, dan stunting. 	Kesehatan	Wajib Pelayanan Dasar

No.	Arah Kebijakan RPJPD	Masalah Daerah	Masalah OPD	Urusan	Ket.
	partisipasi masyarakat dalam Kesehatan.	ditingkat	<ol style="list-style-type: none"> 3. Cakupan pelayanan untuk ibu hamil, ibu nifas, bayi, balita dan anak masih perlu ditingkatkan sesuai standar. 4. Ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan baik di Rumah Sakit, puskesmas dan puskesmas pembantu masih perlu ditingkatkan sesuai standar (akreditasi puskesmas baru 72,73 %). 5. Standar Pelayanan Minimal pada Rumah Sakit Umum Daerah belum tercapai secara optimal. 6. Optimalisasi upaya preventif dan promotif terhadap pandemi Covid-19 guna menurunkan dampak dari pandemi tersebut. 7. Masih diperlukannya peningkatan pencegahan dan penanganan terhadap penderita penyakit menular antara lain HIV/AIDS, TB, dll., dan penyakit tidak menular seperti hipertensi, kanker, diabetes, dll. 8. Tingkat pengetahuan serta kesadaran masyarakat untuk menerapkan gaya hidup sehat untuk mencegah penyakit masih rendah (Semakin tingginya warga usia produktif yang menderita penyakit degeneratif). 9. Jumlah dokter dan tenaga kesehatan yang kurang dibanding dengan jumlah warga kabupaten (pasien) yang dilayani (0,2). 		

No.	Arah Kebijakan RPJPD	Masalah Daerah	Masalah OPD	Urusan	Ket.
			10. Masih adanya angka stunting di Kabupaten Konawe Utara sebesar 11,6 % terhadap jumlah balita		
3.	Peningkatan perluasan kesempatan kerja, kualitas tenaga kerja, perlindungan tenaga kerja, dan transmigrasi.	Masih tingginya angka pengangguran terbuka	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya pemutusan hubungan kerja terutama sebagai dampak pandemi Covid-19 (TPT 3,79) 2. Masih diperlukannya fasilitasi pembentukan wirausaha baru untuk peningkatan perekonomian masyarakat, baik terkait pelatihan produksi, pengelolaan dan manajemen usaha, permodalan dan pemasaran. 3. Masih kurangnya tenaga kerja bersertifikat kompetensi 4. Belum optimalnya penempatan tenaga kerja (74,45 TPAK) 5. Pengawasan ketenagakerjaan. perlindungan serta hubungan industrial belum optimal dijalankan. 	Tenaga Kerja	Wajib Non Pelayanan Dasar
4.	Pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga pendapatan perkapita pada akhir periode pembangunan jangka panjang mencapai tingkat	Rendahnya pertumbuhan ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih rendahnya iklim investasi daerah 2. Masih kurang optimalnya pengelolaan data investasi serta data potensi investasi Kabupaten Konawe Utara yang dapat dipromosikan untuk menunjang peningkatan jumlah investasi di daerah. 3. Masih kurang optimalnya pertumbuhan investasi (11,86) 4. Masih perlunya peningkatan sistem 	Penanaman Modal	Wajib Non Pelayanan Dasar

No.	Arah Kebijakan RPJPD	Masalah Daerah	Masalah OPD	Urusan	Ket.
	kesejahteraan setara dengan kabupaten maju di Indonesia.		pelayanan investasi yang berbasis TIK yang terintegrasi secara nasional		
5.	Peningkatan inovasi produk dan perluasan jangkauan pemasaran baik dalam negeri maupun luar negeri; penerapan sistem industri, dalam lingkup mikro, kecil dan menengah, serta koperasi yang ramah lingkungan dan berbasis keluarga dan teknologi; fasilitasi kawasan pengembangan industri kreatif yang memadai; peningkatan produktivitas pertanian, perikanan dan kelautan serta kehutanan diarahkan untuk menghasilkan produk- produk yang bertumpu pada sistem agribisnis dan agroindustri, guna menjamin	Masih rendahnya kapasitas KUMKM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih belum optimalnya pemanfaatan fasilitasi akses permodalan untuk usaha mikro (Rp.3.763.000.000 kurang lebih sama dengan Modal sendiri Rp. 3.958.000.000) 2. Masih ada produk usaha mikro yang belum layak diuji mutukan dan belum memiliki sertifikasi merk, halal dan ijin edar Badan POM. 3. Masih kurang optimalnya volume usaha koperasi (76,79 koperasi aktif). 4. Jenis usaha koperasi yang kurang variatif dan masih rendahnya minat masyarakat untuk bergabung dalam keanggotaan sebuah lembaga koperasi (masih fokus di simpan pinjam) 5. Masih diperlukan upaya peningkatan daya saing produk-produk lokal di pasar domestik. 6. Kurangnya jiwa enterpreneurship maupun pengetahuan manajemen usaha yang dimiliki pelaku UMKM, sehingga jenis usaha yang ditekuni seringkali tidak bertahan lama. 	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Wajib Non Pelayanan Dasar

No.	Arah Kebijakan RPJPD	Masalah Daerah	Masalah OPD	Urusan	Ket.
	ketersediaan pangan dan nilai tambah dalam rangka mengurangi kemiskinan dan pengangguran; pengembangan kepariwisataan memanfaatkan keberagaman pesona keindahan alam, budaya dan potensi daerah lainnya; penguatan kelembagaan ekonomi guna menciptakan regulasi dan perizinan yang efisien dan efektif; dan optimalisasi fungsi pasar tradisional untuk meningkatkan pendapatan pedagang melalui pemberian modal yang mudah dan murah.				
		Masih rendahnya kontribusi sektor - sektor unggulan daerah terhadap	7. Belum optimalnya pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata. 8. Menurunnya kunjungan di objek wisata dikarenakan pandemi covid-19 dan kondisi	Pariwisata	Urusan Pilihan

No.	Arah Kebijakan RPJPD	Masalah Daerah	Masalah OPD	Urusan	Ket.
		perekonomian daerah	<p>infrastruktur jalan yang rusak.</p> <p>9. Masih belum optimalnya kerjasama dengan stakeholder bidang pariwisata.</p> <p>10. Masih rendahnya individu/kelompok yang mengaplikasikan keahlian dibidang handicraft, kuliner, fashion, dll.</p> <p>11. Masih rendahnya pelaku usaha kreatif yang belum mendapatkan legalisasi usaha.</p>		
		Belum optimalnya sarana dan prasarana perdagangan	<p>12. Masih adanya sentra dan pasar yang belum beroperasi secara optimal.</p> <p>13. Masih diperlukannya penerapan protokol kesehatan sektor perdagangan dalam rangka penyesuaian terhadap kondisi new normal.</p> <p>14. Masih kurangnya minat masyarakat terhadap produk lokal UMKM karena kurang promosi dan pemasaran terhadap produk-produk tersebut.</p> <p>15. Belum optimalnya koordinasi dalam hal pemantauan harga pasar.</p>	Perdagangan	Urusan Pilihan
		Masih rendahnya kontribusi sektor industri pengolahan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah	<p>16. Masih belum berkembangnya Industri Kecil Menengah di daerah</p> <p>17. Rendahnya daya saing IKM</p> <p>18. Belum optimalnya fasilitasi IKM (48,30 % dari 294 IKM)</p>	Perindustrian	Urusan Pilihan
		Masih rendahnya kontribusi sektor - sektor unggulan	<p>19. Masih belum optimalnya pembudidaya perikanan dan kelautan yang memanfaatkan fasilitas sarana dan</p>	Perikanan dan Kelautan	Urusan Pilihan

No.	Arah Kebijakan RPJPD	Masalah Daerah	Masalah OPD	Urusan	Ket.
		daerah terhadap perekonomian daerah	<p>prasarana yang telah disediakan.</p> <p>20. Teknologi Tepat Guna (TTG) yang belum sepenuhnya diaplikasikan oleh pembudidaya perikanan serta belum optimalnya pengolahan produk unggulan hasil perikanan.</p>		
		Masih rendahnya kontribusi sektor - sektor unggulan daerah terhadap perekonomian daerah	<p>21. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung dalam pengembangan pertanian tanaman pangan (JUT, saluran irigasi teknis 67,23 % dalam kondisi baik), alsintan, pupuk, dll),</p> <p>22. Belum optimalnya pembudidayaan, distribusi dan pemasaran pertanian, peternakan dalam rangka peningkatan ketahanan pangan.</p> <p>23. Masih kurang optimalnya lembaga pertanian atau kelompok tani dalam mengembangkan budidaya, distribusi dan pemasaran produk pertanian, peternakan dan perikanan.</p> <p>24. Masih kurang optimalnya pemanfaatan fasilitas sarana dan prasarana produksi oleh pembudidaya tanaman pangan dan hortikultura binaan.</p> <p>25. Masih terdapat pembudidaya tanaman pangan dan hortikultura yang belum mengaplikasikan Teknologi Tepat Guna dalam proses budidaya.</p> <p>26. Masih terdapat pembudidaya ternak binaan yang belum menggunakan Teknologi Tepat Guna.</p>	Pertanian	Urusan Pilihan

No.	Arah Kebijakan RPJPD	Masalah Daerah	Masalah OPD	Urusan	Ket.
		Belum optimalnya pola konsumsi pangan masyarakat	27. Kurang optimalnya ketahanan pangan masyarakat, terutama dalam menghadapi pandemi Covid-19 (79,60 Pola Pangan Harapan) 28. Belum optimalnya diversifikasi produk pangan masyarakat 29. Ketersediaan beras dikelola oleh Bulog yang terbagi ke dalam beberapa wilayah (divre). Sehingga belum ada data tersendiri untuk stok beras Kabupaten Konawe Utara (lumbung pangan lokal Kabupaten Konawe Utara).	Pangan	Wajib Non Pelayanan Dasar
		Masih rendahnya kontribusi sektor - sektor unggulan daerah terhadap perekonomian daerah	30. Terbatasnya prasarana jalan produksi perkebunan 31. Kurangnya bibit tanaman unggulan 32. Masih rendahnya akses permodalan bagi petani untuk mengembangkan perkebunan rakyat	Perkebunan	Urusan Pilihan
6.	Peningkatan jaringan infrastruktur yang andal guna meningkatkan aksesibilitas serta mendukung kegiatan produksi pada kawasan-kawasan pertumbuhan baru/ kawasan strategis	Masih terbatasnya infrastruktur wilayah dan sarana prasarana dasar	1. Kondisi infrastruktur jalan dan jembatan belum memadai untuk menunjang aksesibilitas pusat - pusat produksi (Persentase keterhubungan/konektivitas jalan) 2. Masih terbatasnya kondisi jaringan jalan kawasan perkotaan Wanggudu. 3. Rendahnya Rumah Tangga air minum perpipaan layak (48,33 %) dan sanitasi layak (36,31 %). 4. Masih terjadinya genangan di beberapa titik di Konawe Utara karena curah hujan tinggi	Pekerjaan Umum	Wajib Pelayanan Dasar

No.	Arah Kebijakan RPJPD	Masalah Daerah	Masalah OPD	Urusan	Ket.
			serta masih adanya jaringan drainase yang belum berfungsi optimal. 5. Belum adanya lembaga pengelola air minum.		
		Masih terbatasnya infrastruktur wilayah dan sarana prasarana dasar	6. Masih tingginya angka RTLH di Konawe Utara yaitu 26% dari 17.147 rumah. 7. Masih tingginya angka Backlog yaitu 1.720 unit. 8. Belum optimalnya pembenahan atau rehabilitasi jalan dan saluran lingkungan serta sarana dan prasarana permukiman. 9. Belum optimalnya peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dan rumah layak huni. 10. Masih diperlukannya peningkatan sarana prasarana permukiman antara lain penyediaan air layak minum dan sanitasi.	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Wajib Pelayanan Dasar
		Masih terbatasnya infrastruktur wilayah dan sarana prasarana dasar	11. Belum optimalnya pengelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. 12. Terbatasnya sarana angkutan antar daerah, maupun angkutan dari kecamatan ke Ibukota kabupaten. 13. Belum optimalnya pengelolaan Terminal Lahimbua sehingga diperlukan kebijakan yang terintegrasi untuk memanfaatkan terminal penumpang. 14. Masih adanya kejadian kecelakaan lalu lintas dikarenakan kurangnya kesadaran pengguna jalan untuk tertib berlalu lintas.	Perhubungan	Wajib Non Pelayanan Dasar
		Masih terbatasnya infrastruktur	15. Masih perlunya peningkatan sarana prasarana dan jaringan utilitas untuk	Komunikasi, Informatika, dan	Wajib Non Pelayanan Dasar

No.	Arah Kebijakan RPJPD	Masalah Daerah	Masalah OPD	Urusan	Ket.	
		wilayah dan sarana prasarana dasar	menunjang sistem informasi di seluruh kecamatan dan kawasan perkotaan.	Persandian		
7.	Perencanaan, Pemanfaatan dan pengendalian ruang dalam suatu sistem wilayah pembangunan yang berkelanjutan, melalui: penataan ruang sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	Belum optimalnya pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang dalam rangka mendukung pembangunan dan investasi daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum selesainya Revisi RTRW Kabupaten Konawe Utara 2. Belum ditetapkannya RDTR Kawasan Perkotaan Wanggudu dan kawasan lainnya untuk mendukung kemudahan perizinan melalui OSS 3. Masih lemahnya pengawasan penataan ruang 4. Masih adanya bangunan yang belum memiliki IMB atau bangunan yang tidak sesuai dengan IMB. 5. Masih lemahnya penertiban tata ruang terhadap indikasi pelanggaran tata ruang 	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Wajib Dasar	Pelayanan
8.	Pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup yang tercermin oleh tetap terjaganya fungsi, daya dukung, dan kemampuan pemulihannya dalam mendukung kualitas kehidupan industri dan ekonomi secara serasi dan seimbang. Pengurangan risiko bencana melalui	Belum optimalnya Pengelolaan kualitas lingkungan hidup dan Kebencanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih diperlukan upaya pembangunan baru RTH di Ibukota Kabupaten dan mengoptimalkan fungsi Ruang Terbuka Hijau yang tersedia. 2. Belum optimalnya sarana dan prasarana penanganan sampah. 3. Masih diperlukan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan. 4. Masih adanya kegiatan/usaha diawasi yang belum menaati/mematuhi aspek lingkungan, mengingat masih adanya tindakan-tindakan yang mencemari lingkungan (air, udara, tanah) dan menurunkan kualitas lingkungan hidup. 5. Masih adanya permasalahan lingkungan 	Lingkungan Hidup, BPBD, Pemadam Kebakaran	Wajib Dasar	Non Pelayanan

No.	Arah Kebijakan RPJPD	Masalah Daerah	Masalah OPD	Urusan	Ket.
	penataan pemukiman dan merelokasi penduduk dari wilayah rawan bencana, melalui: pembuatan rencana penataan permukiman berbasis mitigasi bencana; sosialisasi dan peningkatan kewaspadaan masyarakat siaga bencana; dan peningkatan kelembagaan dan kapasitas masyarakat.		hidup yang perlu ditangani, antara lain terkait limbah, kebisingan dan polusi udara dari kegiatan usaha. 6. Masih tingginya resiko bencana di Konawe Utara (172,4/Tinggi/Zona Merah) 7. Belum optimalnya mitigasi bencana 8. Masih terbatasnya sarana prasarana penanganan bencana alam 9. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap resiko bencana alam 10. Masih terjadi kebakaran lahan/hutan ketika musim kemarau.		
9.	Pengurangan penyandang masalah kesejahteraan sosial, tercapainya pertumbuhan penduduk tumbuh seimbang, serta peningkatan peran perempuan dalam pembangunan.	Belum optimalnya penanganan kemiskinan	1. Belum optimalnya pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial dan perlindungan jaminan sosial. 2. Data DTKS masih perlu disinkronisasi 3. Belum optimalnya program penanganan PMKS, dilihat dari banyaknya PMKS usia produktif yang dilatih/dibina yang belum berproduksi.	Sosial	Wajib Pelayanan Dasar
		Belum optimalnya pengarusutamaan gender dan hak anak	4. Belum optimalnya upaya perlindungan perempuan dan anak, dilihat dari masih terdapat permasalahan perempuan dan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan	Wajib Non Pelayanan Dasar

No.	Arah Kebijakan RPJPD	Masalah Daerah	Masalah OPD	Urusan	Ket.
			<p>anak antara lain Kekerasan Dalam Rumah Tangga.</p> <p>5. Kurang optimalnya peran jejaring dalam penanganan permasalahan perempuan dan anak.</p> <p>6. Pemberdayaan perempuan di sektor ekonomi belum sepenuhnya optimal (69,52 IDG/86,17 IPG)</p>	Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		Belum optimalnya pengendalian penduduk	<p>7. Masih adanya pasangan usia subur yang belum mengikuti KB (76,38 dari 18.276 PUS)</p> <p>8. Masih adanya pasangan usia subur yang tidak terpenuhi kebutuhan KB/unmeet need (18 jiwa)</p> <p>9. Masih ada pasangan usia subur (PUS) yang istrinya berusia kurang dari 20 tahun.</p>	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Wajib Non Pelayanan Dasar
10.	Peningkatan prestasi olahraga dan kualitas generasi muda, melalui: peningkatan sarana dan prasarana penunjang olah raga; membudayakan olah raga dalam kehidupan sehari-hari bagi masyarakat; dan peningkatan kualitas dan partisipasi pemuda dalam pembangunan dan	Belum optimalnya pembinaan kepemudaan dan olahraga	<p>1. Terbatasnya calon peserta yang akan menjadi kader dikarenakan kurangnya minat masyarakat dan waktu pengkaderan yang sering berbenturan dengan jadwal kegiatan pribadi (sekolah, kuliah, dll).</p> <p>2. Kurang meratanya sarana prasarana olah raga yang tersedia dan dalam kondisi baik.</p> <p>3. Masih diperlukannya pembinaan dan pengembangan tenaga atlit dan pelatih profesional.</p>	Kepemudaan dan Olahraga	Wajib Non Pelayanan Dasar

No.	Arah Kebijakan RPJPD	Masalah Daerah	Masalah OPD	Urusan	Ket.
	pemberdayaan pemuda sebagai subyek pembangunan, melalui pengembangan lembaga kepemudaan yang berwawasan kebangsaan.				
11.	Peningkatan karakter masyarakat yang berbudaya, tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, berkeperibadian Indonesia, berdasarkan falsafah Pancasila yang dicirikan dengan watak dan perilaku yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, bertoleransi, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dan dinamis.	Terbatasnya event budaya yang dilaksanakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih belum optimalnya upaya penguatan budaya lokal dan upaya yang mendorong nilai-nilai budaya menjadi identitas daerah (kantor pemerintahan, sekolah, ruang publik, hotel, rumah makan) dalam rangka meningkatkan daya tarik wisata. 2. Masih ada bangunan cagar budaya yang belum terpelihara dengan baik, karena pelibatan pemilik/pengelola cagar budaya dalam pengembangan kawasan sejarah/cagar budaya masih belum optimal. 3. Infrastruktur kebudayaan masih terbatas dan pengelolaan komunitas budaya belum optimal 4. Masih belum optimalnya pembinaan kelompok seni agar layak tampil. 	Kebudayaan	Wajib Non Pelayanan Dasar
		Masih rendahnya pemahaman	5. Belum optimalnya pemahaman masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter	Ketentraman dan Ketertiban	Wajib Non Pelayanan Dasar, Urusan

No.	Arah Kebijakan RPJPD	Masalah Daerah	Masalah OPD	Urusan	Ket.
		masyarakat terhadap nilai-nilai keagamaan	6. kebangsaan Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dan organisasi kemasyarakatan	Umum serta Perlindungan Masyarakat, Pembedayaan Masyarakat dan Desa	Penunjang
			7. Belum optimalnya pengembangan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan masyarakat	Sekretariat Daerah	Urusan Penunjang
12.	Peningkatan kapabilitas perangkat daerah dan kemampuan pengelolaan keuangan daerah secara efisien, efektif, transparan, partisipatif dan akuntabel, melalui: peningkatan kinerja, kapasitas dan profesionalisme aparatur pemerintah dan lembaga pemerintah dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan.	Akuntabilitas keuangan daerah masih perlu ditingkatkan	1. Indeks Reformasi Birokrasi dari 8 area perubahan masih rendah (CC : 50,04) Tahun 2019 2. Perlunya mempertahankan opini WTP dari BPK 3. Konsistensi perencanaan dan penganggaran masih perlu ditingkatkan 4. Manajemen pengelolaan asset masih perlu ditingkatkan 5. Kenaikan PAD yang belum optimal 6. Tingkat kemandirian daerah (1,59 %) 7. Kurang optimalnya realisasi pendapatan daerah pada tahun 2020 karena dampak Covid- 19.	Keuangan, Sekretariat Daerah	Urusan Penunjang
		Belum optimalnya penerapan zona	8. Belum optimalnya kapabilitas APIP 9. Masih rendahnya Sistem Pengendalian	Pengawasan	Urusan Penunjang

No.	Arah Kebijakan RPJPD	Masalah Daerah	Masalah OPD	Urusan	Ket.
		integritas	Intern Pemerintah/SPIP (level 3) dan implementasi Zona Integritas. 10. Belum optimalnya upaya pengawasan dan penegakan peraturan.		
		Penyusunan, implementasi, evaluasi dan pengendalian perencanaan masih perlu ditingkatkan	11. Masih terdapat inkonsistensi perencanaan dan penganggaran. 12. Kesesuaian Program RPJMD dan RKPD (60,74) 13. Masih adanya pelaksanaan kegiatan yang tidak tepat waktu pada beberapa Perangkat Daerah. 14. Masih terdapat kegiatan pada beberapa Perangkat Daerah yang belum optimal. 15. Masih banyaknya Perangkat Daerah yang dokumen perencanaan tahunannya belum berkualitas.	Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	Urusan Penunjang
			16. Masih adanya data penunjang perencanaan dan hasil pembangunan yang masih perlu validasi.	Statistik	Wajib Non Pelayanan Dasar
		Belum optimalnya implementasi manajemen ASN	17. Belum optimalnya keterisian jabatan fungsional, formasi ASN, dan pola pengembangan karir ASN 18. Kompetensi ASN belum sesuai dengan bidang pekerjaan	Kepegawaian	Urusan Penunjang
		Akuntabilitas kinerja masih perlu ditingkatkan	19. Implementasi SAKIP masih perlu ditingkatkan. 20. Belum optimalnya capaian kinerja pembangunan	Sekretariat Daerah	Urusan Pemerintahan Umum
		Belum optimalnya pelaksanaan Sistem Pemerintahan	21. Masih diperlukan optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan sistem satu data. Belum ada aplikasi tunggal untuk menampung	Komunikasi dan Informatika	Wajib Non Pelayanan Dasar

No.	Arah Kebijakan RPJPD	Masalah Daerah	Masalah OPD	Urusan	Ket.
		Berbasis Elektronik (SPBE)	data skala kabupaten yang hasil pengolahannya bisa digunakan untuk berbagai kepentingan (aplikasi masih tumpang tindih). 22. Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) belum maksimal karena keterbatasan sarana prasarana dan jaringan.		
13.	Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, melalui: peningkatan teknologi informasi dalam pelayanan publik; peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan <i>Standart Operating Procedure</i> (SOP) yang berorientasi pada terciptanya kepuasan masyarakat; peningkatan sarana dan prasarana publik; dan peningkatan daya respon terhadap keinginan dan kebutuhan	Belum optimalnya kualitas layanan publik	1. Masih diperlukannya penataan kelembagaan, pelaksanaan evaluasi pelayanan publik dan administrasi pemerintahan sesuai peraturan yang berlaku. 2. Masih perlunya evaluasi peraturan yang berlaku dalam rangka penyesuaian peraturan perundang-undangan dikaitkan dengan perkembangan daerah dan kondisi masyarakat. 3. BUMD belum memiliki kinerja sesuai standar. 4. Masih adanya SOP yang belum dievaluasi, agar prosedur pelayanan publik dapat lebih mudah dan cepat.	Sekretariat Daerah	Urusan Pemerintahan Umum

No.	Arah Kebijakan RPJPD	Masalah Daerah	Masalah OPD	Urusan	Ket.
	masyarakat.				
			5. Masih adanya penduduk lahir yang belum memperoleh akte kelahiran (83,88 %) 6. Masih adanya penduduk meninggal yang belum memperoleh akte kematian. 7. Belum semua warga Kabupaten Konawe Utara yang wajib ber-KTP memiliki KTP. 8. Masih adanya kecamatan yang memproses dokumen administrasi kependudukan tidak sesuai dengan SOP. 9. Kualitas dan kuantitas SDM di bidang pelayanan masih kurang	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar
			10. Penyediaan tanah dan / atau bangunan bagi pembangunan untuk kepentingan umum masih diperlukan koordinasi dengan instansi lain (BPN-ATR, dll) terkait proses pengumpulan dan verifikasi data. 11. Masih adanya aset tanah yang belum dilakukan sertifikasi serta pemasangan pagar, papan, patok karena masih belum jelas batas dan belum lengkap bukti kepemilikannya.	Pertanahan, Sekretariat Daerah	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Umum
		Belum optimalnya kualitas layanan publik kewilayahan	12. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan 13. Belum optimalnya pelimpahan kewenangan pelayanan pada Camat	Kecamatan, Sekretariat Daerah	Urusan Pemerintahan Umum dan Kewilayahan
14.	Menciptakan	Belum optimalnya	1. Masih adanya temuan pelanggaran	Ketentraman	Urusan Wajib

No.	Arah Kebijakan RPJPD	Masalah Daerah	Masalah OPD	Urusan	Ket.
	ketertiban masyarakat, melalui: terciptanya kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan masyarakat.	Penegakan hukum daerah dan pemenuhan Hak Asasi Manusia	peraturan. 2. Masih terdapat gangguan ketentraman dan ketertiban umum. 3. Masih kurangnya partisipasi lembaga/komunitas dalam kegiatan yang mendorong nilai-nilai kebangsaan. 4. Masih adanya warga yang belum berperan untuk disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan untuk pencegahan dan penanganan pandemik covid-19.	dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Pelayanan Dasar
			5. Belum optimalnya penyusunan produk hukum dan penegakan aturan hukum daerah untuk kewibawaan daerah dan mengatur serta mensejahterakan rakyat	Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan	Urusan Pemerintahan Umum

Sumber : Bappeda Kabupaten Konawe Utara, 2021

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan. Selanjutnya permasalahan sektoral tersebut digabung menjadi satu rumusan masalah pembangunan di Kabupaten Konawe Utara. Suatu kebijakan pembangunan harus memiliki dasar rumusan permasalahan yang relevan sehingga kebijakan publik memiliki pertimbangan matang sebagai dasar penentuan prioritas pembangunan. Prioritas pembangunan yang baik akan menciptakan agenda utama pembangunan dan memberikan harapan baru bagi pemerintah daerah dalam 5 (lima) tahun kedepan. Berdasarkan hasil analisis permasalahan pembangunan untuk masing-masing aspek dan urusan pemerintahan, maka RPJMD tahun 2021-2026 dirumuskan menjadi lima permasalahan utama pembangunan Kabupaten Konawe Utara yaitu:

1. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia;
2. Pertumbuhan ekonomi yang masih rendah dan tidak berkualitas;
3. Belum terpenuhinya pelayanan infrastruktur wilayah dan sarana parasarana kawasan permukiman;
4. Belum terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik;
5. Belum terciptanya kualitas lingkungan hidup yang baik dan mitigasi bencana alam;
6. Belum terwujudnya pembangunan kebudayaan dan kehidupan keagamaan masyarakat.

Keenam permasalahan utama tersebut menjadi pemicu utama belum maksimalnya pembangunan daerah di Kabupaten Konawe Utara sehingga belum tercapainya kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah.

Tabel 4.2 Rumusan Permasalahan Pembangunan Daerah

No.	Masalah Daerah	Bidang/Pilar	Rumusan Permasalahan Pembangunan
1.	Belum optimalnya akses pendidikan	Sosial	1. Rendahnya kualitas sumber daya manusia
2.	Derajat kesehatan masyarakat dan capaian keluarga sehat masih perlu ditingkat	Sosial	
3.	Masih tingginya angka pengangguran terbuka	Sosial	

No.	Masalah Daerah	Bidang/Pilar	Rumusan Permasalahan Pembangunan
4.	Masih rendahnya pertumbuhan ekonomi	Ekonomi	2. Pertumbuhan ekonomi yang masih rendah dan tidak berkualitas
5.	Masih rendahnya kapasitas dan kontribusi sektor KUMKM terhadap perekonomian daerah	Ekonomi	
6.	Masih rendahnya kontribusi sektor - sektor unggulan daerah terhadap perekonomian daerah	Ekonomi	
7.	Belum optimalnya sarana prasarana perdagangan	Ekonomi	
8.	Belum optimalnya pola konsumsi pangan masyarakat	Ekonomi	
9.	Masih terbatasnya infrastruktur wilayah dan sarana prasarana dasar	Ekonomi	3. Belum terpenuhinya pelayanan infrastruktur wilayah dan sarana prasarana kawasan permukiman
10.	Belum optimalnya pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang dalam rangka mendukung pembangunan dan investasi daerah	Lingkungan	4. Belum terciptanya kualitas lingkungan hidup yang baik
11.	Belum optimalnya Pengelolaan kualitas lingkungan hidup dan Kebencanaan	Lingkungan	
12.	Belum optimalnya penanganan kemiskinan	Sosial	1. Rendahnya kualitas sumber daya manusia Kabupaten Konawe Utara
13.	Belum optimalnya pengarusutamaan gender dan hak anak	Sosial	
14.	Belum optimalnya pengendalian penduduk	Sosial	
15.	Belum optimalnya pembinaan kepemudaan dan olahraga	Sosial	
16.	Terbatasnya event budaya yang dilaksanakan	Sosial	5. Belum terwujudnya pembangunan kebudayaan dan kehidupan keagamaan
17.	Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai keagamaan	Sosial	

No.	Masalah Daerah	Bidang/Pilar	Rumusan Permasalahan Pembangunan
			masyarakat
18.	Akuntabilitas keuangan daerah masih perlu ditingkatkan	Tata Kelola	6. Belum terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik
19.	Belum optimalnya penerapan zona integritas	Tata Kelola	
20.	Penyusunan, implementasi, evaluasi dan pengendalian perencanaan masih perlu ditingkatkan	Tata Kelola	
21.	Belum optimalnya implementasi manajemen ASN	Tata Kelola	
22.	Akuntabilitas kinerja masih perlu ditingkatkan	Tata Kelola	
23.	Belum optimalnya pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Tata Kelola	
24.	Belum optimalnya kualitas layanan publik	Tata Kelola	
25.	Belum optimalnya kualitas layanan publik kewilayahan	Tata Kelola	
26.	Belum optimalnya Penegakan hukum daerah dan pemenuhan Hak Asasi Manusia	Tata Kelola	

Sumber : Bappeda Kab. Konawe Utara, 2021

4.2 ISU STRATEGIS

Isu strategis merupakan tantangan atau peluang yang harus diperhatikan atau dikedepankan karena dampaknya yang signifikan dalam pelaksanaan pembangunan. Perumusan isu strategis mempertimbangkan permasalahan daerah dan lingkungan strategis. Suatu analisis isu-isu strategis menghasilkan rumusan kebijakan yang bersifat antisipatif dan solutif atas berbagai kondisi yang tidak ideal di masa depan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, rumusan tentang isu strategis merupakan bagian penting dalam penentuan strategi dan kebijakan pembangunan dalam lima tahun mendatang.

4.2.1 Isu Global/Internasional

Isu strategis internasional yang relevan dan wajib diperhatikan bagi pembangunan 5 (lima) tahun mendatang antara lain: Komitmen Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/TPB (*Sustainable Development Goals/SDGs*); Pandemi Covid-19; Perubahan iklim global (*global warning/climate change*); dan Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang semakin pesat (revolusi industri 4.0).

4.2.1.1 Komitmen Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals (SDGs)*

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/TPB (*Sustainable Development Goals/SDGs*) adalah seperangkat target yang berhubungan dengan pembangunan internasional di masa mendatang. SDG's menjadi salah satu acuan dalam kebijakan pembangunan Nasional saat ini yang telah dituangkan dalam peraturan perundang-undangan antara lain: Peraturan Presiden RI Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan; Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencanan Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Pengarusutamaan SDGs dalam rencana pembangunan daerah diarahkan untuk dapat menjawab permasalahan kesejahteraan masyarakat serta mengakomodasi nilai-nilai lokal dan karakteristik masing-masing daerah. Konsep SDGs pada intinya bertujuan untuk membawa pembangunan ke arah yang lebih adil bagi semua pihak. Adapun 17 (ketujuh belas) tujuan pembangunan berkelanjutan adalah sebagai berikut:

1. **Tidak Ada Kemiskinan:** Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya di mana saja.

2. **Menghapuskan Kelaparan:** Mengakhiri kelaparan dan kematian akibat kelaparan, mencapai keamanan pangan dan perbaikan nutrisi, serta menggalakkan pertanian yang berkelanjutan.
3. **Kesehatan yang Baik:** Memastikan hidup sehat dan menggalakkan kesejahteraan bagi semua orang pada segala usia.
4. **Pendidikan Berkualitas:** Memastikan pendidikan inklusif bagi semua orang, dan menggalakkan kesetaraan serta kesempatan belajar seumur hidup yang berkualitas.
5. **Kesetaraan Gender:** Mencapai kesetaraan gender melalui pemberdayaan kaum wanita dan anak perempuan.
6. **Air Bersih dan Sanitasi:** Memastikan ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi berkelanjutan bagi semua orang.
7. **Energi Terbarukan:** Memastikan akses ke energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan terbarukan bagi semua orang.
8. **Pekerjaan yang Baik dan Pertumbuhan Ekonomi:** Menggalakkan pertumbuhan ekonomi yang terus menerus, inklusif dan berkelanjutan, lapangan kerja yang lengkap dan produktif serta pekerjaan yang layak bagi semua orang.
9. **Industri, Inovasi dan Infrastruktur:** Membangun infrastruktur yang kukuh, menggalakkan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, serta membantu mengembangkan inovasi.
10. **Berkurangnya Ketidaksetaraan:** Mengurangi ketidaksetaraan di dalam dan di antara negara-negara.
11. **Kota dan Masyarakat Berkelanjutan:** Membangun kota dan pemukiman warga yang inklusif, aman dan kukuh.
12. **Pemakaian yang Bertanggungjawab:** Memastikan pemakaian dan pola produksi yang berkelanjutan.
13. **Aksi Iklim:** Mengambil tindakan segera untuk memberantas perubahan iklim dan dampaknya.
14. **Kehidupan di Bawah Air:** Mengambil tindakan segera untuk memberantas perubahan iklim dan dampaknya.
15. **Kehidupan di Darat:** Melindungi, memulihkan dan menggalakkan penggunaan ekosistem bumi yang berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan,

memberantas penggersangan lahan, dan menghentikan serta membalikkan degradasi lahan dan menghentikan penyusutan kenekaragaman hayati.

16. Perdamaian dan Keadilan: Menggalakkan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pengembangan yang berkelanjutan, menyediakan akses untuk keadilan bagi semua orang, serta membangun berbagai lembaga yang efektif, bertanggungjawab dan inklusif di semua strata.

17. Kemitraan: Memperkuat sarana pelaksanaan dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk perkembangan yang berkelanjutan.

SDG/s/TPB mencakup 17 (*tujuh belas*) item tujuan, 169 target dan 319 indikator pembangunan yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. Perincian jumlah cakupan indikator TPB berdasarkan kewenangan pemerintahan adalah sebagai berikut :

1. Jumlah indikator yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat sebanyak 308 indikator;
2. Jumlah indikator yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi sebanyak 235 indikator;
3. Jumlah indikator yang menjadi kewenangan Pemerintah kabupaten sebanyak 220 indikator;
4. Jumlah indikator yang menjadi kewenangan Pemerintah kota sebanyak 222 indikator.

Selain cakupan indikator berdasarkan kewenangan sebagaimana dimaksud di atas, faktor lain yang menentukan jumlah indikator TPB dan karenanya menjadi bagian dari kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten adalah kekhususan indikator, kondisi geografis dan ketentuan indikator RPJMD.

Selanjutnya, dengan merujuk pada konsepsi di atas, Pemerintah Kabupaten Konawe Utara, sesuai kewenangannya, telah melakukan identifikasi, serta pengumpulan dan analisis data terhadap 220 indikator TPB pada 4 (empat) Pilar Pembangunan (*yaitu pilar pembangunan social, pilar pembangunan ekonomi, pilar pembangunan lingkungan dan pilar pembangunan hukum dan tata kelola*). Hasil identifikasi, pengumpulan dan analisis data tersebut antara lain membuahkan beberapa informasi yang disajikan secara singkat berikut ini.

Dari 220 indikator TPB yang dianalisis (pada empat pilar pembangunan) diperoleh indikasi bahwa terdapat 49,09% (108 indikator) yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Utara, dengan rincian : 59 indikator (26,82%) telah mencapai target, dan 49 indikator (22,27%) belum mencapai target. Pilar Pembangunan dengan persentase pencapaian target tertinggi adalah **Pilar Sosial**, yakni sebesar 22 indikator (atau 42,37%), sedangkan pilar pembangunan dengan persentase pencapaian target terendah adalah **Pilar Lingkungan**, yakni hanya sebanyak 9 indikator (atau sebesar 15,25%).

Lebih lanjut disebutkan bahwa dari 220 indikator TPB yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten (Konawe Utara), terdapat 71 indikator (atau sebesar 32,37%) yang belum memiliki data, terdiri dari :

- Pilar Pembangunan Sosial : 37 indikator (52,11%)
- Pilar Pembangunan Ekonomi : 23 indikator (32,39%)
- Pilar Pembangunan Lingkungan : 5 indikator (7,04 %)
- Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola : 6 indikator (8,45 %)

Hasil analisis statistik juga menunjukkan bahwa terdapat sebanyak 15,91% atau sebesar 35 indikator TPB yang bukan merupakan target RPJMD Kabupaten Konawe Utara, terdiri dari :

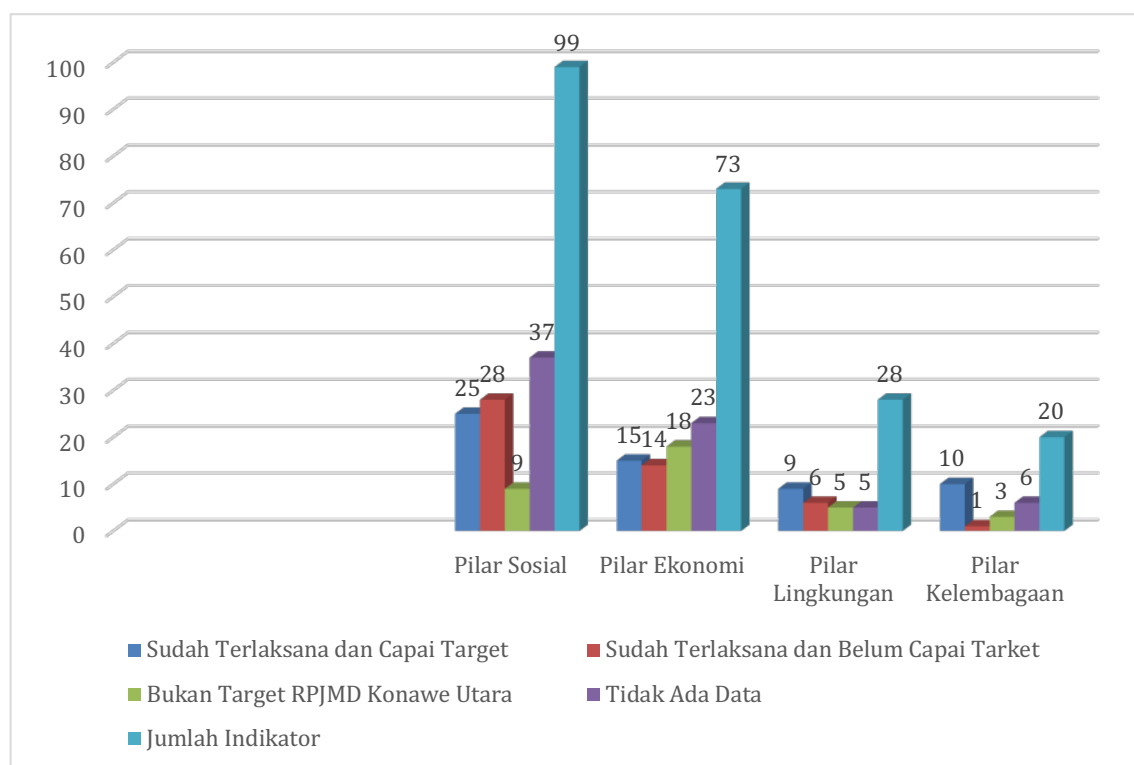
- Pilar Pembangunan Sosial : 9 indikator (27,71%)
- Pilar Pembangunan Ekonomi : 18 indikator (51,43%)
- Pilar Pembangunan Lingkungan : 5 indikator (14,29 %)
- Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola : 3 indikator (8,57 %)

Untuk lebih jelasnya, gambaran kuantitatif mengenai pencapaian target TPB pada masing-masing pilar pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Konawe Utara, dapat dilihat pada tabel 4.3. dan gambar 4.1. berikut ini.

Tabel 4.3.
Pencapaian Target Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Konawe Utara

Pilar	Sudah Terlaksana dan Capai Target		Sudah Terlaksana dan Belum Capai Tarket	Bukan Target RPJMD Konawe Utara			Tidak Ada Data	Jumlah Indikator	Persentase (%)	
	Jumlah	(%)	Jumlah	(%)	Jumlah	(%)	Jumlah	(%)		
Pilar Sosial	25	42,37	28	57,14	9	25,71	37	52,11	99	45,00
Pilar Ekonomi	15	25,42	14	28,57	18	51,43	23	32,39	73	33,18
Pilar Lingkungan	9	15,25	6	12,24	5	14,29	5	7,04	28	12,73
Pilar Kelembagaan	10	16,95	1	2,04	3	8,57	6	8,45	20	9,09
Jumlah	59		49		35		71		220	
Persentase	26,82		22,27		15,91		32,27			
Jumlah Terlaksana	108									
Persentase Terlaksana (%)	49,09									

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Konawe Utara, 2021



Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Konawe Utara, 2021

Gambar 4.2 Pencapaian Target Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Konawe Utara

Adapun capaian target indikator berdasarkan tujuan TPB di Kabupaten Konawe secara umum dapat dilihat pada tabel 4.4. berikut ini.

Tabel 4.4.
Capaian Target Indikator TPB Kabupaten Konawe Utara

No.	Ringkasan Tujuan TPB	Sudah Terlaksana dan Capai Target	Sudah Terlaksana dan Belum Capai Tarket	Bukan Target RPJMD Konawe Utara	Tidak Ada Data	Jumlah Indikator
1	Tanpa Kemiskinan	5	5	2	5	17
2	Tanpa Kelaparan	0	0	0	4	4
3	Kehidupan sehat dan sejahtera	12	13	4	27	56
4	Pendidikan berkualitas	8	3	2	1	14
5	Kesetaraan Gender	0	7	1	0	8
6	Energi Bersih dan Terjangkau	0	0	3	3	6
7	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	7	6	7	6	26
8	Industri, Inovasi dan Infrastruktur	1	5	3	7	17
9	Berkurangnya Kesenjangan	1	1	4	7	15
10	Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	6	2	1	0	9
11	Air Bersih dan Sanitasi Layak	0	0	1	1	2
12	Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan	0	0	1	2	3
13	Konsumsi dan produksi yang bertanggungjawab	1	1	0	0	2
14	Penanganan Perubahan Iklim	3	5	1	0	9
15	Ekosistem Laut	2		1	1	6
16	Ekosistem Darat	3		1	1	6
17	Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan Yang Tangguh	10	1	3	6	20
	Jumlah	59	49	35	71	220
	Persentase	26,82	22,27	15,91	32,27	
	Jumlah Terlaksana	108				
	Persentase Terlaksana (%)	49,09				

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Konawe Utara, 2021

4.2.1.2 Kesadaran Aksi Global Terkait Climate Action (Aksi Iklim)

Perkembangan lingkungan pada era globalisasi pembangunan sekarang ini menunjukkan penurunan. Hal ini disebabkan pembangunan yang mengesampingkan faktor kelestarian lingkungan hidup sehingga menyebabkan kelestarian hidup yang buruk dengan akibat ancaman global warming. *Global warming* merupakan efek atau dampak dari rusaknya kelestarian ekosistem alam yang dapat mengakibatkan kekeringan, kelangkaan bahan pangan, hingga banjir dan bahkan menjadi penyebab utama adanya bencana alam. Perlu adanya antisipasi dari pemerintah dan masyarakat dunia dalam menyikapi *global warming*. Segala bentuk perencanaan pembangunan harus mempunyai strategi dalam menerapkan pembangunan yang

ramah lingkungan. Hal ini dilakukan agar kelestarian alam dapat terjaga dan efek *global warming* dapat diminimalisir atau dapat dihindari namun tetap terlaksana pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

Terkait hal tersebut maka Kabupaten Konawe Utara harus mengambil peran yang penting dalam menjalankan aksi iklim tersebut. Hal ini perlu dilakukan, mengingat Kabupaten Konawe Utara adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara yang kegiatan eksplorasi sumberdaya alamnya cukup masif. Seperti yang telah disebut sebelumnya bahwa pengurangan emisi karbon sebagian besar terkait dengan aktivitas ekonomi. Oleh karena itu upaya Kabupaten Konawe Utara dalam ikut aktif menyukseskan aksi pelaksanaan aksi iklim bagi Indonesia perlu menjadi salah satu pertimbangan utama dalam menyusun perencanaan pembangunan kedepan.

4.2.1.3 Dampak Pandemi Covid-19

Hadirnya pandemi COVID-19 telah membawa perubahan terhadap dunia dengan berbagai tantangan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Di Indonesia, COVID-19 telah menjangkiti lebih dari 1,3 juta orang sejak kasus pertama diumumkan pada bulan Maret 2020, setidaknya 35.000 orang telah meninggal dunia. Namun, upaya untuk menghambat penyebaran virus COVID-19 telah menghambat kegiatan perekonomian dan dampaknya terhadap tingkat kesejahteraan sosial semakin dirasakan masyarakat. Setelah menunjukkan pencapaian penurunan kemiskinan beberapa tahun belakangan ini, tingkat kemiskinan kembali meningkat setelah pandemi COVID-19. Satu dari 10 orang di Indonesia hari ini hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Tingkat kemiskinan anak juga dapat meningkat secara signifikan. Dampak negatif terhadap keadaan sosial-ekonomi dari pandemi bisa menjadi jauh lebih buruk tanpa adanya bantuan sosial dari pemerintah.

Dalam menghadapi krisis ekonomi ini, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan sejumlah paket stimulus fiskal skala besar melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Dalam aspek jumlah anggaran pemerintah yang diperuntukkan untuk mengurangi dampak negatif dari pandemi COVID-19, Indonesia berada pada peringkat lima besar dari negara-negara di wilayah Asia Pasifik (ADB, 2021). Pada tahun 2020, Pemerintah Indonesia mengalokasikan sekitar Rp 695,2 triliun (sekitar US\$ 49 miliar) untuk PEN. Oleh karena krisis masih berlangsung, pada

bulan Februari 2021 Pemerintah Indonesia kembali mengumumkan alokasi anggaran senilai Rp 699,43 triliun (sekitar US\$ 49,3 miliar) untuk melanjutkan keberlangsungan program PEN (Kemenkeu, 2021).

Indonesia terus melakukan sejumlah upaya perbaikan dalam memperkuat berbagai program perlindungan sosialnya untuk menangani krisis setelah pandemi COVID-19. Program-program perlindungan sosial ini telah diperluas untuk melindungi masyarakat miskin terhadap guncangan ekonomi, dan juga masyarakat berpenghasilan menengah kebawah yang jumlahnya terus meningkat namun menjadi rentan terhadap risiko jatuh miskin di kemudian hari. Selain itu, usaha-usaha kecil juga menerima bantuan pemerintah seiring dengan upaya mereka untuk terus bertahan di tengah penurunan perekonomian dan pembatasan kegiatan masyarakat setelah pandemi COVID-19.

Untuk mengukur dampak dari COVID-19 terhadap rumah tangga Indonesia dan untuk memberikan informasi sebagai dasar pembuatan kebijakan pemerintah, UNICEF, UNDP, Prospera, dan The SMERU Research Institute berkolaborasi dalam sebuah survei berskala nasional di akhir tahun 2020. Survei ini meliputi 12.216 sampel rumah tangga representatif tingkat nasional yang tersebar di 34 provinsi yang dilakukan dalam kurun waktu antara Oktober dan November 2020. Ini merupakan survei terbesar terkait dampak pandemi COVID-19 dan berfokus pada anak serta kelompok rentan. Survei ini dilakukan melalui wawancara tatap muka dengan rumah tangga yang sebelumnya juga telah diwawancarai oleh Badan Pusat Statistik sebagai sampel dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) di tahun 2019. Pelaksanaannya melibatkan kerjasama erat dengan Pemerintah Indonesia.

Berdasarkan survei tersebut, Dampak Sosial Ekonomi Covid-19 Terhadap Rumah Tangga dan Rekomendasi Kebijakan Strategis Untuk Indonesia, sebagai berikut :

Temuan utama 1: Keuangan rumah tangga mengalami dampak parah dari pandemi COVID-19

Hampir tiga perempat rumah tangga (74,3%) yang diwawancara pada bulan Oktober-November 2020 mengalami penurunan pendapatan dari yang mereka terima pada bulan Januari 2020. Proporsi rumah tangga dengan penurunan pendapatan lebih besar adalah mereka yang memiliki anak (75,3%) dan mereka yang

tinggal di wilayah perkotaan (78,3%). Rumah tangga perkotaan juga mengalami penurunan pendapatan yang lebih besar dibandingkan rumah tangga perdesaan.

Rumah tangga pada seluruh kelompok pendapatan dari yang termiskin hingga yang paling berkecukupan melaporkan persentase penurunan pendapatan yang sama. Terdapat banyak rumah tangga yang sebelumnya aman secara ekonomi dan berada di tengah-tengah kelompok distribusi pendapatan kemudian jatuh miskin atau menjadi rentan terhadap kemiskinan.

Bagi sebagian besar rumah tangga, penurunan pendapatan bukanlah satu-satunya tantangan: hampir seperempat (24,4%) responden juga melaporkan peningkatan pengeluaran. Penyumbang utama dari peningkatan pengeluaran adalah naiknya biaya belanja bahan makanan dan keperluan pokok lainnya. Proporsi rumah tangga dengan anak yang menghabiskan lebih banyak biaya internet dan telepon genggam secara signifikan lebih besar (65%) dibandingkan rumah tangga yang tidak memiliki anak (28,9%).

Hanya sedikit dari pencari nafkah utama (14%) yang berganti pekerjaan sebagai akibat dari COVID-19. Meskipun demikian, hampir setengah (47,3%) dari mereka yang pindah pekerjaan berganti dari pekerjaan di sektor formal menjadi pekerjaan di sektor informal, yang mana perlindungan ketenagakerjaan untuk pekerjaan di sektor informal umumnya rendah. Setengah dari seluruh rumah tangga (51,5%) tidak memiliki tabungan untuk berjaga-jaga. Hampir sepertiga (27,3%) menggadaikan kepemilikan barang-barang untuk bertahan hidup. Seperempat dari mereka (25,3%) meminjam uang secara informal dari keluarga atau teman.

Usaha kecil merupakan sumber pendapatan yang penting bagi banyak rumah tangga. Satu pertiga dari responden memiliki setidaknya satu anggota rumah tangga yang menjalankan usaha mikro dan kecil, dan hampir seluruh usaha ini (87,5%) telah terkena dampak dari pandemi COVID-19. Kekhawatiran yang utama dari para pelaku usaha mikro dan kecil ini ialah pelanggan yang menjadi lebih sedikit, menurunnya penerimaan, serta meningkatnya biaya operasional.

Temuan utama 2: Anak-anak mengalami ketertinggalan dalam hal pendidikan dan layanan kesehatan

Hampir tiga dari empat orang tua merasakan kekhawatiran terkait ketertinggalan pembelajaran sebagai hasil dari gangguan dalam proses pendidikan anak setelah pandemi COVID-19. Akses terhadap koneksi internet yang baik

merupakan tantangan utama bagi anak untuk belajar dari rumah, dimana 57,3% rumah tangga dengan anak melaporkan hal ini sebagai keprihatinan utama mereka. Rumah tangga yang berlokasi di wilayah perdesaan dan kurang berkecukupan lebih sering mengalami permasalahan internet dan keterbatasan perangkat dibandingkan mereka yang tinggal di perkotaan dan lebih berkecukupan.

Banyak orang tua yang melaporkan memiliki keterbatasan waktu (28,7%) dan/atau keterbatasan kemampuan (25,3%) dalam mendukung anak belajar dari rumah. Rumah tangga dengan anak mengakses lebih sedikit layanan kesehatan, dimana ketakutan akan penularan COVID-19 adalah alasan utama mereka menghindari kunjungan ke tempat layanan kesehatan. Lebih dari 1 dari 10 rumah tangga dengan anak usia dibawah 5 tahun belum membawa anak mereka ke klinik imunisasi sejak April 2020 karena adanya ketakutan terhadap virus COVID-19.

Penutupan sekolah, isolasi sosial, bersamaan dengan ketidakpastian ekonomi menghadapi anak dengan risiko-risiko lainnya. Survei ini menemukan bahwa 45% rumah tangga melaporkan adanya tantangan perilaku dari anak mereka. Dari mereka yang melaporkan hal tersebut, 20,5% diantaranya mengatakan anak mengalami kesulitan untuk berkonsentrasi dalam belajar; 12,9% menjadi lebih mudah marah, dan 6,5% mengalami kesulitan tidur.

Temuan utama 3: Bantuan sosial telah mencapai mereka yang membutuhkan, tetapi masih banyak yang bisa dilakukan

Sebagian besar rumah tangga (85,3%) menerima setidaknya satu bentuk bantuan sosial, baik berupa tunai maupun barang. Setengah dari rumah tangga (50,8%) menerima bantuan tunai. Rumah tangga yang paling tidak berkecukupan menerima paling banyak bantuan. Dari rumah tangga yang berada di 40% terbawah kelompok distribusi pengeluaran, lebih dari 90% diantaranya menerima setidaknya satu bantuan dan lebih dari 60% menerima bantuan tunai. Rumah tangga yang aman secara ekonomi sebelum pandemi COVID-19 namun ternyata mengalami penurunan pendapatan yang signifikan juga dapat menjangkau bantuan sosial yang ada (sekitar 70%). Bantuan-bantuan sosial yang diterima meliputi program seperti penangguhan pajak, subsidi kredit, dan bantuan paket internet yang ditargetkan bagi rumah tangga yang baru terkena dampak pandemi COVID-19.

Banyak rumah tangga menerima bantuan tunai dan barang secara bersamaan dan terdapat sedikit rumah tangga yang menerima bantuan tunai saja. Hal ini

mengindikasikan penyebaran manfaat bantuan-bantuan sosial yang lebih luas. Dua pertiga (67,4%) dari penerima bantuan sosial pemerintah menyatakan bantuan-bantuan tersebut membantu dalam mengatasi dampak penurunan keuangan rumah tangga setelah pandemi COVID-19. Mereka menggunakan bantuan tersebut untuk membeli kebutuhan sehari-hari dan memenuhi kebutuhan listrik, air, dan internet atau pulsa telepon genggam.

Meskipun demikian, lebih dari sepertiga (38%) dari rumah tangga paling miskin yang berada di 40% terbawah kelompok distribusi pengeluaran tidak menerima bantuan tunai apapun di bulan Oktober- November 2020. Terdapat sangat sedikit rumah tangga (7,5%) dengan usaha mikro-kecil yang menerima bantuan usaha dari pemerintah setelah pandemi. Hampir empat puluh persen dari pemilik usaha kecil mengatakan mereka tidak mengetahui adanya bantuan usaha mikro-kecil dari pemerintah.

Temuan utama 4: Perempuan mengalami penambahan tanggungjawab dan tugas dalam peran pengasuhan anak

Para ibu tiga kali lebih sering mengasuh anak dibandingkan ayah: 71,5% rumah tangga menjawab ibu sebagai sosok utama yang lebih berperan dalam membantu anak belajar di rumah, dibandingkan 22% rumah tangga yang hanya menjawab ayah yang lebih berperan. Setengah dari para perempuan juga terlibat dalam pekerjaan untuk mendukung keluarga. Mereka mengalami kesulitan dalam menyeimbangkan tuntutan pekerjaan rumah-tangga dan tambahan tanggungjawab lainnya yang muncul karena penutupan sekolah sehingga anak-anak harus belajar dari rumah.

Temuan utama 5: Kerawanan pangan dan kelompok rentan harus menjadi perhatian lebih kedepannya

Hampir sepertiga (30%) responden merasa khawatir mereka tidak bisa memberi makan keluarga. Proporsi dari rumah tangga yang menghadapi kerawanan pangan sedang dan parah telah meningkat menjadi 11,7% di tahun 2020. Penurunan pendapatan dan gangguan sistem pasokan makanan adalah faktor-faktor utama yang menyebabkan kerawanan pangan.

Rumah tangga yang memiliki anggota dengan disabilitas mengalami kehilangan pendapatan dan pekerjaan yang lebih tinggi. Satu dari 10 rumah tangga dengan anggota keluarga disabilitas ringan mengalami kehilangan pekerjaan karena

pandemi COVID-19 dan delapan dari 10 rumah tangga tersebut mengalami penurunan pendapatan dibandingkan sebelum pandemi COVID-19. Sedangkan, rumah tangga dengan anggota penyandang disabilitas berat tidak dapat menjangkau layanan kesehatan atau layanan terapi yang mereka butuhkan. Terdapat lebih banyak rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan tidak memiliki tabungan (56,7%) dimana tabungan dapat digunakan sebagai penyangga kehidupan di saat krisis, dibandingkan rumah tangga yang dikepalai laki-laki (50,6%).

Rekomendasi kebijakan strategis, meliputi :

1. **Diperlukan dukungan lebih besar bagi anak-anak**, terkait pembelajaran, perlindungan sosial, kesehatan dan gizi, serta perlindungan anak. Dukungan terhadap pembukaan kembali sekolah secara aman dan bertahap; pastikan manfaat dari program bantuan tunai mencakup seluruh rumah tangga terdampak yang memiliki anak; utamakan penyampaian vaksinasi dan obat-obatan untuk melindungi anak dari penyakit; ikut sertakan layanan kesehatan mental bagi orangtua dan anak sebagai bagian dari bentuk tanggap kesehatan masyarakat terkait pandemi COVID-19.
2. **Perluas cakupan bantuan pangan**, dan atasi gangguan pasokan pangan untuk melawan meningkatnya kerawanan pangan. Memperlengkapi bantuan pangan berbasis tunai dengan promosi kesehatan dan gizi sehingga pemenuhan gizi lebih dapat tercapai. Sediakan pengawasan gizi pada tingkat lokal. Pastikan ketersediaan dan keterjangkauan pasokan makanan yang bergizi.
3. **Pertahankan dukungan untuk kelompok pendapatan menengah kebawah**, yang sekarang lebih rentan dan tidak berkecukupan melalui berbagai program yang pro pasar tenaga kerja dan bantuan sosial tunai.
4. **Teruskan pendampingan dalam pemulihan usaha keluarga**, melalui program bantuan tunai yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka, diseminasi informasi terkait tingkat manfaat, pendaftaran program berdasarkan kebutuhan masyarakat, dan menghubungkan penerima bantuan dengan dukungan pelengkap. Pastikan usaha yang dimiliki perempuan juga didukung secara adil.
5. **Kurangi beban tanggungjawab pengasuhan anak dari perempuan**, dengan membuka kembali sekolah secara perlahan dan aman, melakukan kampanye untuk mempromosikan pembagian tanggungjawab dalam pengasuhan anak di rumah

yang seimbang antara laki-laki dan perempuan, dan berikan kedua orang tua keterampilan dan dukungan yang dibutuhkan untuk membantu anak belajar dari rumah saat sekolah ditutup dan/atau pada periode pembelajaran campuran.

6. **Pastikan orang dengan disabilitas dapat mengakses layanan kesehatan dan perawatan kesehatan**, yang mereka butuhkan. Prioritaskan rumah tangga dengan anggota penyandang disabilitas untuk mendapatkan bantuan sosial dan dampingi dengan kesempatan untuk meningkatkan keterampilan atau pelatihan kembali.
7. **Hubungkan pendaftaran baru bantuan sosial dengan basis data tunggal** untuk penargetan bantuan kedepannya. Rekomendasi yang sifatnya khusus meliputi konsolidasi dan integrasi data penerima bantuan tunai dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Kembangkan peraturan dan pedoman untuk mengumpulkan informasi yang terstandarisasi secara nasional. Pastikan izin usaha mikro yang baru memiliki nomor identifikasi rumah tangga untuk keperluan penggabungan data secara lebih terintegrasi.
8. **Upayakan tingkat pemahaman yang lebih besar terkait informasi jenis bantuan pemerintah** dengan mengembangkan media yang mudah digunakan dan dilengkapi informasi terbaru tentang program bantuan usaha.

4.2.1.4 Perkembangan Teknologi Informasi (Revolusi Industri 4.0)

Globalisasi yang terjadi saat ini salah satunya ditandai dengan kecepatan arus informasi dan ekonomi digital yang tidak dapat dilepaskan oleh pengaruh besar teknologi. Kemampuan teknologi dalam mengintegrasikan tradisi perdagangan, dapat mengubah bentuknya menjadi lebih sempurna, universal, dan spasial temporal (mampu menembus ruang dan waktu). Bagaimana kemudian teknologi juga mampu menggerakkan arus informasi dan gagasan tanpa batas, sehingga yang diperlukan adalah kemampuan mentransformasikan teknologi informasi menjadi sebuah aktivitas positif, baik secara ekonomi, sosial, maupun budaya yang tetap sejalan dengan nilai-nilai luhur kepribadian bangsa Indonesia.

Selain itu, bagaimana mengantisipasi dimulainya era industri 4.0 (industri yang mengkombinasikan kecerdasan buatan, data raksasa, komputasiawan, serba internet dan cetak tiga dimensi) terutama pada industri otomotif, serta industri makanan dan minuman dan lainnya, serta bagaimana mengkombinasikan dengan

penyerapan dan penciptaan lapangan kerja baru. Dibidang pemerintahan juga penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan keharusan.

4.2.2 Isu Nasional yang Tercantum dalam RPJMN 2020 - 2024

Isu-isu nasional yang memiliki potensi besar untuk memengaruhi arah pembangunan Kabupaten Konawe Utara pada masa mendatang adalah kebijakan dari pemerintah pusat. Dokumen perencanaan tingkat nasional merupakan salah satu sumber kebijakan yang memiliki kepastian tinggi dan dalam amanat peraturan perundangan wajib diikuti dan harus berpedoman pada RPJMN.

Kebijakan pembangunan nasional yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024 diarahkan untuk mencapai visi pembangunan nasional yaitu ***“TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG”***. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua yaitu :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia.
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Presiden menetapkan 7 (tujuh) Prioritas Nasional dalam Pembangunan Tahun 2020-2024 beserta isu strategisnya sebagai berikut.

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
 - Keberlanjutan Sumber Daya Alam
 - Efektivitas Tata Kelola Sumber Daya Ekonomi
 - Transformasi Struktur Berjalan Lambat
 - Revolusi Industri 4.0 dan Ekonomi Digital

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
 - Ketimpangan Antar wilayah, yang ditandai dengan tingginya kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia; ketimpangan pendapatan; terjadinya konsentrasi kegiatan ekonomi di Kawasan Barat Indonesia terutama Pulau Jawa; terbatasnya sarana prasarana dan aksesibilitas di daerah tertinggal, desa dan Kawasan pedesaan, Kawasan transmigrasi, dan Kawasan perbatasan; dan belum optimalnya pengembangan ekonomi lokal di daerah tertinggal, desa dan Kawasan pedesaan, Kawasan transmigrasi, dan Kawasan perbatasan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
 - Pengendalian penduduk dan penguatan tata Kelola kependudukan
 - Perlindungan sosial bagi seluruh penduduk
 - Pemenuhan layanan dasar
 - Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda
 - Pengentasan kemiskinan
 - Peningkatan produktivitas dan daya saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
 - Melemahnya ideologi Pancasila dan ketahanan budaya bangsa
 - Belum optimalnya pemajuan kebudayaan Indonesia
 - Belum mantapnya Pendidikan karakter dan budi pekerti
 - Masih lemahnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ajaran agama
 - Belum kukuhnya moderasi beragama untuk memperkuat toleransi dan kerukunan
 - Belum optimalnya peran keluarga
 - Rendahnya budaya literasi, inovasi, dan kreativitas
5. Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
 - Penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau
 - Penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman
 - Pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan
 - Keselamatan dan keamanan transportasi
 - Ketahanan kebencanaan infrastruktur
 - Waduk multiguna dan modernisasi irigasi

- Konektivitas jalan, kereta api, laut, udara, dan darat
 - Infrastruktur perkotaan meliputi transportasi, energi dan ketenagalistrikan, infrastruktur dan ekosistem TIK perkotaan, penyediaan akses air minum dan sanitasi yang layak dan aman, penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau
 - Energi dan ketenagalistrikan meliputi keberlanjutan penyediaan, akses serta keterjangkauan dan kecukupan penyediaan
 - Transformasi digital meliputi penuntasan dan pemanfaatan infrastruktur TIK, serta fasilitas pendukung transformasi digital
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
- Peningkatan kualitas lingkungan hidup
 - Peningkatan ketahanan bencana dan iklim
 - Pembangunan rendah karbon
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
- Konsolidasi demokrasi
 - Optimalisasi kebijakan luar negeri
 - Penegakan hukum nasional
 - Reformasi birokrasi dan tata Kelola
 - Menjaga stabilitas keamanan nasional

Berdasarkan telaahan RPJMN tahap IV (2020-2025), maka pembangunan Kabupaten Konawe Utara dalam lima tahun kedepan harus selaras dengan arahan kebijakan maupun agenda RPMN tahap IV dengan menyesuaikan kemampuan daerah.

4.2.3 Isu Strategis Provinsi Sulawesi Tenggara 2018-2023

Perencanaan pembangunan jangka menengah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023 memiliki isu strategis sebagai berikut:

1. Penanggulangan Kemiskinan;
2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;
3. Peningkatan Daya Saing Ekonomi dan Produktivitas Tenaga Kerja;
4. Pembangunan Berkelanjutan dengan Memperhatikan Daya Dukung Lingkungan dan Sumber Daya Alam;

5. Tata Kelola Pemerintahan;
6. Peningkatan Kapasitas Infrastruktur Dasar dan Wilayah.

4.2.4 Isu Strategis Yang Dihasilkan Dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021-2026

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), lebih mengutamakan pendekatan strategis, sehingga bukan KRP dalam RPJMD yang dinilai dampaknya, tetapi lebih memastikan strategi pembangunan berkelanjutan sesuai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDG's), yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, telah diintegrasikan ke dalam RPJMD.

Terkait hal ini, terdapat dari 220 indikator TPB yang dianalisis (pada empat pilar pembangunan) diperoleh indikasi bahwa terdapat 49,09% (108 indikator) yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Utara, dengan rincian : 59 indikator (26,82%) telah mencapai target, dan 49 indikator (22,27%) belum mencapai target. Disebutkan kemudian bahwa terdapat 71 indikator (atau sebesar 32,37%) yang belum memiliki data serta sebanyak 15,91% atau sebesar 35 indikator TPB yang bukan merupakan target RPJMD Kabupaten Konawe Utara. Penentuan isu strategis KLHS Kabupaten Konawe Utara didahului dengan penentuan isu panjang pembangunan berkelanjutan kemudian dilakukan penentuan isu strategis prioritas. Adapun isu strategis prioritas Kabupaten Konawe Utara dari hasil KLHS RPJMD 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dan kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup;

2. Optimalisasi pembangunan kualitas sumber daya manusia dan Reformasi Birokrasi;
3. Implementasi pembangunan perekonomian dan pertanian berkelanjutan serta kepariwisataan;
4. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah.

4.2.5 Rumusan Isu - Isu Strategis Kabupaten Konawe Utara

Berangkat dari berbagai permasalahan daerah, isu internasional, isu nasional, isu regional dan amanat dalam RPJPD, maka dirumuskan isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Konawe Utara melalui berbagai pertimbangan di antaranya memiliki pengaruh yang besar terhadap pencapaian sasaran Pembangunan Nasional, merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, luasnya dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat, memiliki daya ungkit terhadap pembangunan daerah, dan kemudahan untuk dikelola. Adapun isu strategis tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 4.5 Keterkaitan Isu Strategis Kabupaten Konawe Utara, Isu Internasional, Isu Nasional, Isu Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Isu Strategis KLHS RPJMD

No.	Rumusan Isu Strategis RPJMD	Masalah Daerah	Isu Global SDGs/TPB	Pandemi Covid-19	Isu Strategis Nasional dalam RPJMN 2020-2024	Isu Strategis RPJMD Provinsi Sultra	Isu KLHS RPJMD
1.	Peningkatan Kualitas dan daya saing sumberdaya manusia	<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya akses pendidikan - Derajat kesehatan masyarakat dan capaian keluarga sehat masih perlu ditingkat - Masih tingginya angka pengangguran terbuka - Belum optimalnya penanganan kemiskinan - Belum optimalnya pengarusutamaan gender dan hak anak - Belum optimalnya pengendalian penduduk - Belum optimalnya pembinaan kepemudaan dan olahraga 	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak Ada Kemiskinan: Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya di mana saja - Menghapuskan Kelaparan: Mengakhiri kelaparan dan kematian akibat kelaparan, mencapai keamanan pangan dan perbaikan nutrisi, serta menggalakkan pertanian yang berkelanjutan. - Kesehatan yang Baik: Memastikan hidup sehat dan menggalakkan kesejahteraan bagi semua orang pada segala usia. - Pendidikan Berkualitas: Memastikan pendidikan inklusif bagi semua orang, dan menggalakkan kesetaraan serta kesempatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Anak – anak mengalami ketertinggalan dalam hal pendidikan dan layanan sosial - Perempuan mengalami penambahan tanggungjawab dan tugas dalam peran pengasuhan anak 	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing <ul style="list-style-type: none"> - Pengendalian penduduk dan penguatan tata Kelola kependudukan - Perlindungan sosial bagi seluruh penduduk - Pemenuhan layanan dasar - Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda - Pengentasan kemiskinan - Peningkatan produktivitas dan daya saing 	<ul style="list-style-type: none"> - Penanggulangan Kemiskinan; - Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia; 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kualitas pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dan kesehatan masyarakat dan lingkungan - Optimalisasi pembangunan kualitas sumber daya manusia dan Reformasi Birokrasi

No.	Rumusan Isu Strategis RPJMD	Masalah Daerah	Isu Global SDGs/TPB	Pandemi Covid-19	Isu Strategis Nasional dalam RPJMN 2020-2024	Isu Strategis RPJMD Provinsi Sultra	Isu KLHS RPJMD
			<p>belajar seumur hidup yang berkualitas.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kesetaraan Gender: Mencapai kesetaraan gender melalui pemberdayaan kaum wanita dan anak perempuan. - Berkurangnya Ketidaksetaraan: Mengurangi ketidaksetaraan di dalam dan di antara negara-negara. 				
2.	Peningkatan Daya saing ekonomi daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Rendahnya pertumbuhan ekonomi - Masih rendahnya kapasitas dan kontribusi sektor KUMKM terhadap perekonomian daerah - Masih rendahnya kontribusi sektor - sektor unggulan daerah terhadap perekonomian daerah - Belum optimalnya sarana prasarana perdagangan - Belum optimalnya pola konsumsi pangan masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> - Pekerjaan yang Baik dan Pertumbuhan Ekonomi: Menggalakkan pertumbuhan ekonomi yang terus menerus, inklusif dan berkelanjutan, lapangan kerja yang lengkap dan produktif serta pekerjaan yang layak bagi semua orang. - Industri, Inovasi dan Infrastruktur: Membangun infrastruktur yang 	<ul style="list-style-type: none"> - Keuangan rumah tangga mengalami dampak parah dari pandemi Covid-19 - Bantuan sosial telah mencapai mereka yang membutuhkan, tetapi masih banyak yang bisa dilakukan - Kerawanan pangan dan kelompok rentan harus menjadi perhatian lebih kedepannya 	<p>Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keberlanjutan Sumber Daya Alam - Efektivitas Tata Kelola Sumber Daya Ekonomi - Transformasi Struktur Berjalan Lambat - Revolusi Industri 4.0 dan Ekonomi Digital 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Daya Saing Ekonomi dan Produktivitas Tenaga Kerja 	Implementasi pembangunan perekonomian dan pertanian berkelanjutan serta kepariwisataan

No.	Rumusan Isu Strategis RPJMD	Masalah Daerah	Isu Global SDGs/TPB	Pandemi Covid-19	Isu Strategis Nasional dalam RPJMN 2020-2024	Isu Strategis RPJMD Provinsi Sultra	Isu KLHS RPJMD
			<p>kukuh, menggalakkan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, serta membantu mengembangkan inovasi.</p> <p>- Pemakaian yang Bertanggungjawab : Memastikan pemakaian dan pola produksi yang berkelanjutan.</p>				
3.	Pembangunan Infrastruktur wilayah dan sarana prasarana Kawasan permukiman	- Masih terbatasnya infrastruktur wilayah dan sarana prasarana dasar	<p>- Air Bersih dan Sanitasi: Memastikan ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi berkelanjutan bagi semua orang.</p> <p>- Industri, Inovasi dan Infrastruktur: Membangun infrastruktur yang kukuh, menggalakkan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, serta membantu mengembangkan inovasi.</p> <p>- Kota dan Masyarakat Berkelanjutan:</p>	- Meningkatnya kebutuhan listrik, pulsa dan air bersih;	<p>Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan</p> <p>- Ketimpangan Antar wilayah, yang ditandai dengan tingginya kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia; ketimpangan pendapatan; terjadinya konsentrasi kegiatan ekonomi di Kawasan Barat Indonesia terutama Pulau Jawa; terbatasnya sarana prasarana dan aksesibilitas di daerah tertinggal,</p>	- Peningkatan Kapasitas Infrastruktur Dasar dan Wilayah.	Percepatan pembangunan. Infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah

No.	Rumusan Isu Strategis RPJMD	Masalah Daerah	Isu Global SDGs/TPB	Pandemi Covid-19	Isu Strategis Nasional dalam RPJMN 2020-2024	Isu Strategis RPJMD Provinsi Sultra	Isu KLHS RPJMD
			Membangun kota dan pemukiman warga yang inklusif, aman dan kukuh.		<p>desa dan Kawasan pedesaan, Kawasan transmigrasi, dan Kawasan perbatasan; dan belum optimalnya pengembangan ekonomi lokal di daerah tertinggal, desa dan Kawasan pedesaan, Kawasan transmigrasi, dan Kawasan perbatasan.</p> <p>Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau - Penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman - Pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan - Keselamatan dan keamanan transportasi - Ketahanan kebencanaan infrastruktur - Waduk multiguna dan modernisasi 		

No.	Rumusan Isu Strategis RPJMD	Masalah Daerah	Isu Global SDGs/TPB	Pandemi Covid-19	Isu Strategis Nasional dalam RPJMN 2020-2024	Isu Strategis RPJMD Provinsi Sultra	Isu KLHS RPJMD
					irigasi - Konektivitas jalan, kereta api, laut, udara, dan darat - Infrastruktur perkotaan meliputi transportasi, energi dan ketenagalistrikan, infrastruktur dan ekosistem TIK perkotaan, penyediaan akses air minum dan sanitasi yang layak dan aman, penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau - Energi dan ketenagalistrikan meliputi keberlanjutan penyediaan, akses serta keterjangkauan dan kecukupan penyediaan - Transformasi digital meliputi penuntasan dan pemanfaatan infrastruktur TIK, serta fasilitas pendukung transformasi digital		
4.	Perbaikan Tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik	- Akuntabilitas keuangan daerah masih perlu ditingkatkan	- Perdamaian dan Keadilan: Menggalakkan	- Terhambatnya aktivitas pelayanan publik	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan	- Tata Kelola Pemerintahan	Optimalisasi pembangunan kualitas sumber

No.	Rumusan Isu Strategis RPJMD	Masalah Daerah	Isu Global SDGs/TPB	Pandemi Covid-19	Isu Strategis Nasional dalam RPJMN 2020-2024	Isu Strategis RPJMD Provinsi Sultra	Isu KLHS RPJMD
		<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya penerapan zona integritas - Penyusunan, implementasi, evaluasi dan pengendalian perencanaan masih perlu ditingkatkan - Belum optimalnya implementasi manajemen ASN - Akuntabilitas kinerja masih perlu ditingkatkan - Belum optimalnya pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) - Belum optimalnya kualitas layanan publik - Belum optimalnya kualitas layanan publik kewilayahan - Belum optimalnya Penegakan hukum daerah dan pemenuhan Hak Asasi Manusia 	<p>masyarakat yang damai dan inklusif untuk pengembangan yang berkelanjutan, menyediakan akses untuk keadilan bagi semua orang, serta membangun berbagai lembaga yang efektif, bertanggungjawab dan inklusif di semua strata.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kemitraan: Memperkuat sarana pelaksanaan dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk perkembangan yang berkelanjutan. 	dan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan.	Transformasi Pelayanan Publik <ul style="list-style-type: none"> - Konsolidasi demokrasi - Optimalisasi kebijakan luar negeri - Penegakan hukum nasional - Reformasi birokrasi dan tata Kelola - Menjaga stabilitas keamanan nasional 		daya manusia dan Reformasi Birokrasi
5.	Peningkatan Kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana alam	<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang dalam rangka mendukung pembangunan dan investasi daerah - Belum optimalnya Pengelolaan kualitas lingkungan hidup dan 	<ul style="list-style-type: none"> - Energi Terbarukan: Memastikan akses ke energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan terbarukan bagi semua orang. - Aksi Iklim: Mengambil 		Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kualitas lingkungan hidup - Peningkatan ketahanan bencana dan iklim 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan Berkelanjutan dengan Memperhatikan Daya Dukung Lingkungan dan Sumber Daya Alam 	Peningkatan kualitas pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dan kesehatan masyarakat dan lingkungan

No.	Rumusan Isu Strategis RPJMD	Masalah Daerah	Isu Global SDGs/TPB	Pandemi Covid-19	Isu Strategis Nasional dalam RPJMN 2020-2024	Isu Strategis RPJMD Provinsi Sultra	Isu KLHS RPJMD
		Kebencanaan	<p>tindakan segera untuk memberantas perubahan iklim dan dampaknya.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kehidupan di Bawah Air: Mengambil tindakan segera untuk memberantas perubahan iklim dan dampaknya. - Kehidupan di Darat: Melindungi, memulihkan dan menggalakkan penggunaan ekosistem bumi yang berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memberantas penggersangan lahan, dan menghentikan serta membalikkan degradasi lahan dan menghentikan penyusutan keanekaragaman hayati. 		- Pembangunan rendah karbon		

No.	Rumusan Isu Strategis RPJMD	Masalah Daerah	Isu Global SDGs/TPB	Pandemi Covid-19	Isu Strategis Nasional dalam RPJMN 2020-2024	Isu Strategis RPJMD Provinsi Sultra	Isu KLHS RPJMD
6.	Pembangunan kebudayaan dan kehidupan keagamaan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatasnya event budaya yang dilaksanakan - Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai keagamaan 	<ul style="list-style-type: none"> - Perdamaian dan Keadilan: Menggalakkan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pengembangan yang berkelanjutan, menyediakan akses untuk keadilan bagi semua orang, serta membangun berbagai lembaga yang efektif, bertanggungjawab dan inklusif di semua strata. 	<ul style="list-style-type: none"> - Terhambatnya aktivitas pelayanan publik dan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan. 	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan <ul style="list-style-type: none"> - Melemahnya ideologi Pancasila dan ketahanan budaya bangsa - Belum optimalnya pemajuan kebudayaan Indonesia - Belum mantapnya Pendidikan karakter dan budi pekerti - Masih lemahnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ajaran agama - Belum kukuhnya moderasi beragama untuk memperkuat toleransi dan kerukunan - Belum optimalnya peran keluarga - Rendahnya budaya literasi, inovasi, dan kreativitas 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia; 	Peningkatan kualitas pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dan kesehatan masyarakat dan lingkungan

Sumber : Bappeda Kab. Konawe Utara, 2021

1. Kualitas dan daya saing sumber daya manusia Kabupaten Konawe Utara

Daya saing Sumber Daya Manusia (SDM) berhubungan dengan bagaimana kualitas masyarakat Kabupaten Konawe Utara berperan di berbagai sektor penting dalam perekonomian daerah. Rendahnya daya saing SDM Kabupaten Konawe Utara memiliki masalah inti yakni rendahnya kualitas SDM. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya untuk memecahkan permasalahan terkait kualitas SDM yang akan berdampak pada peningkatan daya saing masyarakat Kabupaten Konawe Utara.

Indikasi untuk mengukur kualitas SDM antara lain dengan mengukur sejauh mana SDM Kabupaten Konawe Utara dapat bersaing dengan SDM wilayah lain, sekurang-kurangnya di Provinsi Sulawesi Tenggara. Selain itu, masih dominannya produk primer yang menjadi andalan ekspor menunjukkan bahwa kemandirian lokal SDM masih menjadi kendala utama pembangunan karena belum mampu memberi nilai tambah terhadap pengelolaan sumber daya alam yang dihasilkan.

Rendahnya kualitas SDM Kabupaten Konawe Utara berhubungan dengan permasalahan pokok antara lain rendahnya akses dan mutu pendidikan, rendahnya akses dan mutu pelayanan kesehatan, dan rendahnya serta belum meratanya pendapatan per kapita masyarakat. Permasalahan rendahnya akses dan mutu pendidikan dapat dilihat dari angka melek huruf di Kabupaten Konawe Utara sebesar 96,72 persen pada tahun 2019 dan angka rata-rata lama sekolah 9,21 tahun 2020. Oleh karena itu, untuk memperbaiki daya saing SDM di Kabupaten Konawe Utara pada masa datang, perlu perhatian khusus dari pemerintah terkait pendidikan, terutama dari segi kualitas maupun sarana dan prasarana penunjangnya.

Permasalahan berikutnya yang memengaruhi rendahnya daya saing SDM Kabupaten Konawe Utara adalah akses dan mutu pelayanan kesehatan. Peningkatan layanan kesehatan sangat perlu dilakukan mengingat kesehatan merupakan kunci utama individu dalam melaksanakan aktivitasnya. Angka harapan hidup di Kabupaten Konawe Utara cenderung naik perlahan dimana pada tahun 2017 sebesar 68,71 dan meningkat menjadi 69,1 tahun 2020. Selain itu masih terdapatnya angka kematian ibu yakni sebesar 2 jiwa pada tahun 2020 juga perlu diberi perhatian khusus meskipun angka tersebut jauh berkurang dari tahun 2019 dimana terdapat 5 kematian ibu/1.000 kelahiran hidup. Demikian pula Angka Kematian Bayi tahun 2020 sebanyak 14 jiwa meningkat signifikan dari tahun 2019 sebanyak 4 jiwa. Mutu pelayanan kesehatan juga perlu ditingkatkan sampai ke wilayah perdesaan terpencil

dan perbatasan mengingat penduduk dengan keluhan kesehatan sebesar 431 jiwa pada tahun 2019 dan tahun 2020 tersebar di seluruh sudut wilayah Kabupaten Konawe Utara.

Permasalahan turunan yang juga dapat memengaruhi rendahnya daya saing SDM Kabupaten Konawe Utara adalah pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita di Kabupaten Konawe Utara mengalami penurunan dimana pada tahun 2019 sebesar 61,52 juta rupiah turun menjadi 60,84 juta rupiah di tahun 2020. Angka pendapatan perkapita hanya membagi total produksi barang dan jasa dengan jumlah penduduk, namun belum mampu menggambarkan pemerataan pendapatan.

Pengeluaran rata-rata per kapita sebulan masyarakat Kabupaten Konawe Utara pada tahun 2020 sebesar Rp 1.176.540,-. Jika dilihat berdasarkan kelompok pengeluaran, proporsi pengeluaran rata-rata per kapita sebulan untuk konsumsi makanan pada tahun 2020 yang sebesar Rp 632.825 dan bukan makanan Rp. 543.716. Angka tersebut bermakna bahwa pengeluaran per bulan masyarakat Kabupaten Konawe Utara menunjukkan masih didominasi untuk konsumsi makanan. Semakin tinggi pendapatan/kesejahteraan seseorang, maka proporsi pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan makanan akan menurun, namun sebaliknya pengeluaran untuk non makanan proporsinya akan semakin meningkat. Berbagai variabel yang dapat mengilustrasikan isu ini antara lain:

- Peningkatan kualitas sarana prasarana sekolah dan tenaga pendidik secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Konawe Utara.
- Peningkatan kualitas sarana prasarana kesehatan dan tenaga kesehatan secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Konawe Utara.
- Peningkatan kesehatan ibu dan anak.
- Mempromosikan budaya hidup sehat bagi semua segala usia.
- Mencapai kesetaraan gender dengan memberdayakan perempuan dan anak.
- Cakupan layanan jaminan kesejahteraan sosial secara menyeluruh dan terintegrasi secara sistem bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan masyarakat terdampak bencana Covid-19.

2. Daya saing ekonomi daerah

Pertumbuhan ekonomi menjelaskan berbagai dampak dari kebijakan dan aktivitas ekonomi oleh masyarakat dan pelaku usaha. Di lain pihak, pertumbuhan

ekonomi juga memberi dampak lanjutan terutama pada tingkat kesejahteraan masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi merupakan pertumbuhan Produk Domestik Regional bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan. Tercatat pada tahun 2020 perekonomian Kabupaten Konawe Utara turun menjadi -0,72%, pertumbuhan ini turun signifikan dibandingkan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019 sebesar 6,44 %. Hal ini terjadi karena pandemi Covid-19 yang melanda dunia, sehingga menyebabkan perekonomian nasional terkontraksi menjadi -2,07 dan Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar -0,65 %.

Jika ditilik menurut lapangan usaha, sektor pertanian, kehutanan, perikanan yang merupakan sektor dengan peranan terbesar dalam PDRB Kabupaten Konawe Utara sebesar 39,75 persen sekaligus menjadi sektor unggulan daerah tetapi pertumbuhannya mengalami penurunan, tahun 2019 tumbuh 5,21 persen dan -1,20 persen pada tahun 2020. Sektor – sektor yang mengalami pertumbuhan positif pada tahun 2020 di masa pandemi Covid-19 yaitu sektor informasi dan komunikasi mengalami sebesar 11,08, jasa keuangan dan asuransi 6,61 persen, jasa kesehatan dan kegiatan sosial 9,88 persen, jasa pendidikan 6,82 persen, pengadaan listrik dan gas 5,57 persen dan pengadaan air, pengolahan sampah, limbah, dan daur ulang sebesar 4,24 persen.

Dari dilihat aspek ketenagakerjaan, dimana jumlah penduduk Kabupaten Konawe Utara tahun 2020 sebanyak 67.871 jiwa dengan jumlah penduduk usia produktif 44.982 (66,28 persen), dari penduduk usia produktif tersebut sebanyak 74,45 % merupakan Angkatan Kerja, selanjutnya dari angkatan kerja sebanyak 3,79 persen adalah Pengangguran. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Konawe Utara mengalami penurunan 0,13 persen dari tahun 2019 sebesar 3,92 persen dan tahun 2018 sebesar 3,59 persen.

Sebanyak 42,99 persen penduduk yang bekerja di Sektor Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan berdasarkan tingkat pendidikan, para pekerja di Kabupaten Konawe Utara masih banyak yang memiliki pendidikan SD ke bawah yaitu sekitar 35,38 persen. Berbagai lapangan kerja juga masih banyak dipenuhi oleh SDM dari luar Kabupaten Konawe Utara karena tidak mampu dipenuhi oleh SDM lokal. Kondisi ini mencerminkan kualitas tenaga kerja di wilayah Kabupaten Konawe Utara relatif masih rendah. Dengan demikian, dalam 5 tahun kedepan harus dilakukan upaya

peningkatan produktivitas sektor-sektor yang mampu menyerap tenaga kerja relatif lebih tinggi dan sesuai dengan kondisi masyarakat Kabupaten Konawe Utara.

Pertumbuhan ekonomi yang lambat dan penurunan angka pengangguran terbuka di Kabupaten Konawe Utara, belum mampu menurunkan kemiskinan dengan signifikan yang cenderung menurun dalam tiga tahun terakhir. Tercatat angka kemiskinan di tahun 2020 sebesar 13,53 persen atau menurun dari 13,66 persen di tahun 2019.

Adanya stagnasi pertumbuhan sektor pertanian dan kegiatan ekonomi lainnya di daerah perdesaan menyebabkan penurunan kemiskinan tergolong lambat. Tersedianya lapangan kerja seharusnya mengurangi kemiskinan. Namun, kalau sekarang ini, ada lapangan kerja, tetapi masyarakat tetap miskin. Hal ini menjadi permasalahan pokok di Kabupaten Konawe Utara yang harus dituntaskan dalam 5 tahun mendatang.

Tingginya kemiskinan di Konawe Utara menyebabkan orientasi untuk bekerja berubah. Penduduk rela bekerja tanpa dibayar asalkan tempat tinggal dan makan minum setiap hari terjamin. Mereka juga rela dibayar murah karena jenis lapangan kerja terbatas. Dengan demikian, berarti kemiskinan harus ditekan dulu dengan penciptaan lapangan kerja berkualitas.

Agar lapangan kerja berkualitas di Konawe Utara dibutuhkan investasi, sedikitnya investasi menjadi salah satu akar masalah kemiskinan di Kabupaten Konawe Utara. Investasi penting untuk menambah lapangan kerja berkualitas, yang akhirnya bisa menekan kemiskinan. Untuk itu kedepan harus bisa meningkatkan investasi di daerah. Investasi yang ditarik mesti berbasis keunggulan daerah. Konawe Utara memiliki potensi pertanian dan perikanan melalui pengembangan agroindustri. Investasi untuk memaksimalkan potensi itu dan menciptakan nilai tambah akan menjadikan perekonomian daerah unggul. Berbagai variabel yang dapat mengilustrasikan isu ini antara lain:

- Peningkatan iklim investasi daerah
- Menumbuhkan dan mengembangkan kewirausahaan Usaha Mikro untuk menanggulangi kemiskinan dan pengangguran.
- Peningkatan produktifitas pertanian, perkebunan dan perikanan melalui peningkatan kualitas benih akan menjadi prioritas, pemanfaatan teknologi, dan penciptaan inovasi bidang pertanian perkebunan dan perikanan.

- Mengembangkan nilai tambah (*value added*) melalui agroindustri komoditas unggulan yang mampu berdaya saing dan berkelanjutan.
- Mengembangkan sistem distribusi dan pemasaran produk lokal berbasis online yang terintegrasi antara produsen, lembaga keuangan dan konsumen.
- Penguatan ketahanan pangan melalui manajemen stok yang baik dan diversifikasi produk olahan sub sector pertanian antara lain perikanan.
- Peningkatan performa BUMD sebagai badan usaha profit yang juga dapat memberikan support bagi ekonomi masyarakat.
- Pengembangan pariwisata yang mampu menjadi pendorong dan penggerak bagi bertumbuhkembangnya ekonomi lokal dan UMKM.

3. Infrastruktur wilayah dan sarana prasarana kawasan permukiman

Pengembangan infrastruktur merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan secara keseluruhan. Hal ini mengingat dampaknya yang hampir memengaruhi indikator kunci keberhasilan pembangunan dasar, baik pendidikan, kesehatan, maupun ekonomi.

Pembangunan infrastruktur berkualitas dengan kapasitas yang memadai dan merata merupakan faktor penting untuk mendorong konektivitas antar wilayah sehingga dapat mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi. Dibutuhkan jaringan infrastruktur yang efektif guna meningkatkan keterkaitan sektor primer berbasis pertanian dengan sektor industri pendukungnya melalui kluster dan pengembangan kawasan berdasarkan potensi dan unggulan komoditas daerah.

Kualitas dan kapasitas infrastruktur yang memadai akan memperlancar konektivitas, menurunkan biaya transportasi dan biaya logistik sehingga dapat meningkatkan daya saing produk dan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi. Belum terpenuhinya infrastruktur (jalan, jembatan, pelabuhan, air bersih, kelistrikan, telekomunikasi) secara merata. Selain itu, sebab utama lainnya adalah kualitas infrastruktur yang belum memadai dimana terlihat minimnya kemantapan jalan kabupaten sebesar 84,03 persen pada tahun 2020.

Dalam pengelolaan jaringan irigasi sebagai infrastruktur pengembangan pertanian, tolok ukur keberhasilan pengelolaan adalah efisiensi dan efektifitas. Tolok ukur efisiensi dapat diwakili dengan cakupan daerah irigasi (DI) yang terlayani air irigasi sementara tolok ukur efektifitas diwakili oleh capaian saluran irigasi dalam

kondisi baik. Sampai dengan Tahun 2020, di wilayah Kabupaten Konawe Utara terdapat 22 Daerah Irigasi (DI) dengan total luas 3.941 Ha. Kondisi jaringan irigasi primer dalam kondisi baik tahun 2020 adalah 66,79% (7.698,26 m), sedangkan irigasi sekunder sebesar 69,65% (1.453,39).

Dari sisi transportasi, bahwa rasio panjang jalan terhadap luas wilayah di Kabupaten Konawe Utara masih kecil dan masih jauh di bawah rasio rata-rata provinsi dan nasional. Selain itu, akses jalan di wilayah pedalaman belum berkondisi mantap, bahkan banyak jalan yang terputus oleh alur sungai maupun karena rusak parah sehingga sulit untuk dilalui. Sarana transportasi umum juga belum berkembang baik dari jumlah armada angkutan darat maupun pemanfaatan terminal angkutan darat yang belum optimal. Jumlah angkutan darat yang ada di Kabupaten konawe utara hanya berjumlah 216 unit. Hal ini menyebabkan terbatasnya akses ke pusat-pusat produksi dan belum optimalnya pemasaran ke pusat-pusat distribusi. Berbagai variabel yang dapat mengilustrasikan isu ini antara lain:

- Percepatan pengembangan jaringan jalan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Utara dan RDTR Kawasan Perkotaan Wanggudu.
- Pemantapan infrastruktur pendukung kualitas permukiman, jalan, kegiatan ekonomi, pariwisata, Industri, perdagangan dan Jasa.
- Pengembangan sarana transportasi orang dan transportasi barang.
- Peningkatan jaringan komunikasi dan teknologi informasi untuk memfasilitasi seluruh aktivitas pemerintahan dan aktivitas sosial ekonomi.
- Pengembangan sistem sanitasi yang terintegrasi untuk mewujudkan 100% terlayani sistem sanitasi.
- Penyediaan sarana prasarana umum (RTH, Landmark, Tempat Olah Raga, Balai Pertemuan, Tempat Ibadah, Pemakaman, dll) yang berkualitas dan merata.
- Pengembangan jaringan air bersih dan manajemen pengelolaan air yang baik.

4. Perbaikan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik

Terdapat empat elemen penting penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, meliputi: *accountability*, *transparency*, *predictability*, dan *participation*. Tanpa empat elemen tersebut, sulit sekali untuk menjamin bahwa pembangunan daerah diselenggarakan dengan efektif dan efisien. Mencermati kinerja “tata kelola pemerintahan yang baik” di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Konawe Utara yang

belum terwujud, beberapa faktor penyebabnya dapat diidentifikasi antara lain: belum optimalnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada 8 area perubahan dimana capaian pada tahun 2020 indeks Reformasi Birokrasi baru mencapai 50,08 (CC), belum terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, kompeten, bersih, dan bebas KKN; pelayanan publik yang belum prima; serta akuntabilitas kinerja yang belum memuaskan.

Reformasi birokrasi masih menjadi isu strategis nasional dan daerah. Beberapa hal yang menjadi penyebab belum terlaksananya reformasi birokrasi secara optimal adalah profesional aparatur belum mencapai standar yang ditentukan, kompetensi ASN masih perlu ditingkatkan, untuk itu hal - hal yang perlu dilaksanakan antara lain :

- Pengelolaan Pemerintahan yang Transparan, Bersih, dan Efektif.
- Menyederhanakan birokrasi, meningkatkan kemudahan dan kecepatan layanan publik berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi menuju Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
- Pengembangan kualitas ASN secara merit sistem.
- Pemantapan sistem informasi pemerintahan daerah yang transparan.

5. Kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana alam

Mengingat Kabupaten Konawe Utara adalah daerah dengan Indeks Resiko Bencana tinggi yaitu 172,4 (tinggi/zona merah), maka penyelesaian isu lingkungan berkaitan dengan masalah bencana banjir, pencemaran lingkungan serta menjalankan keterpaduan kegiatan pasca tambang dengan konservasi lingkungan harus menjadi perhatian dalam pembangunan lima tahun ke depan. Berbagai variabel yang dapat mengilustrasikan isu ini antara lain:

- Menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan.
- Pengurangan kerentanan bencana alam.
- Menyediakan dan mengembangkan sarana prasarana penanganan bencana.
- Melatih dan mendorong kesadaran masyarakat untuk tanggap pencegahan dan mitigasi bencana.

6. Pembangunan kebudayaan dan kehidupan keagamaan masyarakat

Kabupaten Konawe Utara merupakan daerah majemuk yang memiliki khazanah budaya yang kaya dan melimpah bersumber dari nilai, tradisi, adat istiadat, kearifan lokal, seni, dan bahasa yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat. Kekayaan budaya tersebut tidak cukup hanya untuk dilestarikan, tapi juga perlu dikembangkan dan dimanfaatkan. Namun demikian belum optimalnya pengembangan kebudayaan sehingga menyebabkan masyarakat dan pelaku budaya belum sepenuhnya merasakan manfaat dari kekayaan budaya yang dimiliki Kabupaten Konawe Utara. Hal ini tercermin dari masih terbatasnya event budaya yang dilaksanakan di Kabupaten Konawe Utara, dikarenakan belum optimalnya peran pemerintah dalam pembinaan di satu sisi, dan di sisi lainnya, dukungan para budayawan dan seniman.

Untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan perlu dilakukan upaya pemajuan kebudayaan dengan membangun kapasitas kelembagaan masyarakat adat yang berkelanjutan (Lembaga Adat Tolaki, Lembaga Adat Bajo, Lembaga Adat Landawe, Lembaga Adat Culambatu, Lembaga Adat Muna Buton, Lembaga Adat Bugis - Makassar, Lembaga Adat Toraja, Lembaga Adat Jawa dan Sunda, Lembaga Adat Bali dan Lembaga Adat Flobamora) agar siap dipromosikan melalui pengembangan event budaya. Melalui pemajuan kebudayaan, diharapkan kekayaan budaya dapat menjadi kekuatan penggerak dan modal dasar pembangunan daerah di Kabupaten Konawe Utara.

Para pemangku budaya dan seni harus bersinergi agar kekayaan budaya khas Konawe Utara dapat dilestarikan dan dimanfaatkan sehingga dapat meningkatkan daya tarik Kabupaten Konawe Utara, khususnya dengan sektor pariwisata. Dengan penguatan seni budaya serta dikolaborasikan dengan sektor lainnya maka dapat dimanfaatkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya dalam kerangka pembangunan daerah, agama dapat menjadi landasan spiritual, moral dan etika dalam kehidupan bermasyarakat Sesuai Sila Pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa, para pendiri bangsa menempatkan nilai agama sebagai landasan moralitas. Nilai-nilai agama dapat ditransformasikan untuk membentuk insan yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, berkepribadian luhur, dan bermanfaat bagi diri dan lingkungannya.

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN



5.1 Visi

Visi Kabupaten Konawe Utara harus menemukan relevansi dalam upaya meningkatkan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akuntabel. Visi pembangunan menjadi penting untuk menyatukan cita dan cipta bersama seluruh pemangku kepentingan dalam pencapaian pembangunan daerah sesuai dengan rumusan permasalahan pembangunan dan isu strategis yang dihadapi oleh Kabupaten Konawe Utara. Visi juga dibangun sebagai usaha bersama seluruh pemangku kepentingan untuk menyamakan dan menyelaraskan pandangan tentang apa yang ingin dicapai dalam satu periode pembangunan.

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang disampaikan pada saat pemilihan kepala daerah (Pilkada Serentak Tahun 2020). Visi menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Visi pembangunan jangka menengah yang akan diwujudkan dalam RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021-2026 adalah:



“KONWE UTARA LEBIH SEJAHTERA & BERDAYA SAING”

Visi RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021 - 2026 terdiri dari 2 (tiga) frase yaitu:

1. Lebih Sejahtera

RPJMD Kabupaten Konawe Utara tahun 2021-2026 ini merupakan akhir periode dari Bapak Dr. Ir. H. Ruksamin, ST, M.Si, IPU, ASEAN.Eng sebagai Bupati Konawe Utara. Untuk itu refleksi dari spirit visi pembangunan daerah pada kurun waktu tahun sebelumnya (2016 - 2021) yang hendak dilanjutkan dan disempurnakan pada kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan yang didampingi oleh Bapak H. Abuhaera, S.Sos, M.Si sebagai Wakil Bupati Konawe Utara. Oleh karena itu, pemaknaan lebih sejahtera menjadi penting untuk diperhatikan.

Daerah sejahtera dalam kerangka pembangunan adalah daerah yang menunjukkan kemakmuran, mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat (lahir dan batin) secara adil dan merata. Daerah sejahtera menekankan peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi berkelanjutan, peningkatan pendapatan perkapita yang tinggi dan terus bertumbuh, serta memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk bekerja dan berusaha, penurunan angka kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar, peningkatan perlindungan dan kesejahteraan sosial, peningkatan kesejahteraan pekerja, peningkatan partisipasi pemuda dan prestasi olah raga, serta peningkatan peranan perempuan dalam pembangunan. Seluruh aspek - aspek tersebut dibangun diatas pondasi nilai - nilai keagamaan dan kebudayaan lokal, dengan kondisi yang lebih sejahtera ini, diharapkan akan terpenuhi seluruh kebutuhan sosial dasar bagi seluruh warga Konawe Utara, sehingga hidup secara bermartabat

2. Berdaya Saing

Berdaya saing dapat dimaknai sebagai kemampuan dan kekuatan untuk bersaing dengan daerah lain dengan memanfaatkan keunggulan komparatif dan kompetitif yang dimiliki Kabupaten Konawe Utara. Berdaya saing secara rinci mengandung dua makna sebagaimana yaitu :

- Kemampuan daerah dalam mengelola aset dan proses, daya tarik dan agresivitas pada sektor ekonomi, sosial dan budaya untuk menciptakan nilai tambah dalam rangka menambah kekayaan daerah guna mensejahterakan masyarakat.
- Kemampuan daerah dalam mengembangkan lingkungan yang produktif bagi bisnis dan inovasi yang berkelanjutan.

5.2 Misi

Misi adalah rumusan umum yang akan menjadi pemandu tugas bersama antara pemerintah daerah dan masyarakat untuk mewujudkan visi. Perumusan misi RPJMD Kabupaten Konawe Utara tahun 2021-2026 dilakukan dengan memperhatikan permasalahan daerah dan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah dan keselarasannya dengan misi RPJPD Kabupaten Konawe Utara tahun 2012-2032, RPJMN Tahun 2020-2024, dan RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara tahun

2018-2023. Berdasarkan visi di atas, maka dirumuskan 6 (enam) Misi Pembangunan Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021-2026 sebagai berikut:



1. Meningkatkan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia;
2. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar dan sarana prasarana kawasan permukiman;
3. Mewujudkan keadilan sosial dan nilai tambah dalam pengelolaan sumberdaya alam guna meningkatkan daya saing ekonomi;
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, mendorong reformasi birokrasi, dan pelayanan publik yang prima;
5. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana; dan
6. Membangun peradaban masyarakat yang bertumpu pada nilai - nilai keagamaan dan kebudayaan lokal.

Maksud pelaksanaan misi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia

Untuk mencapai Kabupaten Konawe Utara yang lebih sejahtera dan berdaya saing, maka salah satu hal yang harus diupayakan adalah meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Saat ini hampir disemua tatanan masyarakat sedang dihadapkan pada isu perubahan yang dinamikanya semakin tinggi sebagai akibat dari pengaruh kemajuan teknologi informasi. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Konawe Utara bersama dengan masyarakat perlu membangun sumber daya manusia yang berkualitas, memiliki kompetensi dan produktivitas yang tinggi, menguasai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki derajat kesehatan yang tinggi, optimalnya pengarusutamaan gender, pengarusutamaan hak anak, serta masyarakat yang memiliki pendapatan per kapita yang merata.

2. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar dan sarana prasarana kawasan permukiman

Keterbatasan dan kualitas infrastruktur yang belum memadai menjadi problem daya saing di Kabupaten Konawe Utara dalam rangka mendukung perekonomian daerah dan peningkatan investasi. Misi ini diarahkan untuk pemenuhan infrastruktur dasar yang berkualitas guna mendukung pertumbuhan dan kelancaran perekonomian masyarakat dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta antisipasi bencana yang mengancam keberadaan sumber daya potensial dan strategis.

Hal ini diwujudkan melalui pembangunan jalan untuk menghubungkan sentra-sentra produksi dan kawasan pertumbuhan ekonomi menuju pusat pemasaran. Dalam rangka meningkatkan daya saing Kabupaten Konawe Utara juga perlu dilakukan pembangunan dermaga, pengembangan pelabuhan Molawe dan Tinobu, serta peningkatan sarana dan prasarana telekomunikasi di seluruh kecamatan.

Sebagai upaya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal bidang Pekerjaan Umum maka pemenuhan kecukupan layanan air minum, air baku dan air limbah menjadi perhatian khusus dalam 5 tahun kedepan, penyediaan sarana prasarana kawasan permukiman dan permukiman kumuh, optimalnya pelayanan persampahan perkotaan. Selanjutnya peningkatan jaringan irigasi serta infrastruktur pertanian dilaksanakan peningkatan kualitas dan kapasitas pengelolaan sumber daya air,

3. Mewujudkan keadilan sosial dan nilai tambah dalam pengelolaan sumberdaya alam guna meningkatkan daya saing ekonomi

Kabupaten Konawe Utara adalah kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara yang memiliki potensi sumberdaya alam yang cukup besar guna menopang perekonomian daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, misi ini meletakkan konsep pondasinya pada pengelolaan potensi sumberdaya alam dalam menumbuhkan nilai tambah perekonomian daerah melalui peningkatan produksi dan industrialisasi sektor - sektor unggulan. Dalam kondisi ideal, diharapkan akan mampu menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat yang dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi daerah dan PDRB perkapita masyarakat. Adapun sasaran misi ini adalah perekonomian yang ditopang dari berbagai upaya seperti peningkatan investasi, pengembangan

industri pertambangan, peningkatan sarana prasarana perdagangan, peningkatan nilai modal usaha KUMKM, peningkatan produksi pertanian dan perkebunan, peningkatan nilai produksi perikanan, dan juga pembangunan bidang pariwisata. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan perluasan lapangan kerja mengurangi kemiskinan dan pengangguran.

4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, mendorong reformasi birokrasi, dan pelayanan publik yang prima

Misi ini bertujuan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien, sehingga akan berdampak pada peningkatan indeks reformasi birokrasi yang kemudian dapat diandalkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kondisi ini dapat dilihat dari optimalnya implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik, meningkatnya kualitas pelayanan publik, meningkatnya kualitas manajemen ASN, meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan, meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan, dan meningkatnya penerapan zona integritas pada Organisasi Perangkat Daerah.

5. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana

Aktivitas pembangunan dan pengelolaan sumberdaya alam yang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan menjadi sangat penting. Berdasarkan kejadian bencana banjir besar pada tahun 2019, maka penyelenggaraan penataan ruang dengan pola-pola adaptasi pengurangan resiko bencana menjadi sebuah keharusan. Misi ini dimaksudkan sebagai rangkaian peningkatan kualitas kesiapsiagaan teknis dan manajemen pencegahan, penanggulangan dan pemulihan bencana alam dan bencana sosial, serta penyelamatan, pelestarian, perlindungan dan konservasi lingkungan untuk mewujudkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development) dalam konteks pengelolaan sumberdaya alam di Konawe Utara.

Beberapa upaya yang harus dilakukan bermuara meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan dan menurunnya Indeks Resiko bencana. Dalam rangka mewujudkan kualitas lingkungan yang baik, pemerintah daerah harus mulai menumbuhkan kesadaran semua pihak akan pentingnya menjaga lingkungan dan sadar bencana.

6. Membangun peradaban masyarakat yang bertumpu pada nilai - nilai keagamaan dan kebudayaan lokal

Dengan melihat keragaman budaya dan kearifan lokal di Kabupaten Konawe Utara, maka Pemerintah Daerah bersama masyarakat mengemban misi untuk melestarikan budaya dan kearifan lokal tersebut. Dalam praktiknya misi ini akan mendorong peningkatan intensitas event budaya yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah daerah ataupun oleh masyarakat.

Kemudian untuk misi mengembangkan tata kehidupan yang berakhlakul karimah nantinya akan diimplementasikan guna untuk mencapai tujuan berupa mewujudkan kehidupan masyarakat yang dilandasi nilai-nilai kerukunan beragama.

Misi RPJMD Kabupaten Konawe Utara memiliki keselarasan dengan : Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Konawe Utara 2012-2032; Misi dan 7 Agenda Pembangunan RPJMN tahun 2020-2024, dan Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2018-2023 sebagai berikut:

Tabel 5.1
Keterkaitan Misi RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021-2026
dengan Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2012-2032,
Misi dan 7 Agenda Pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024,
dan RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023

Nomor Sasaran Pokok Pada RPJPD	Misi RPJMN 2020-2024	7 Agenda RPJMN 2020-2024	RPJMD Prov. Sultra Tahun 2018-2023	Misi RPJMD Kabupaten Konawe Utara 2021-2026
3. Tersedianya sumberdaya manusia yang berkualitas serta mampu memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan pembangunan 8. Terwujudnya pembangunan bidang kependudukan yang lebih terencana 15. Tersedianya akses pelayanan sosial bagi masyarakat miskin 16. Tidak adanya diskriminasi dalam pembangunan 18. Terwujudnya kesejahteraan sosial	1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia	- Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	1. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat agar dapat berdaulat dan aman dalam bidang ekonomi, pangan, pendidikan, kesehatan, lingkungan, politik, serta iman dan taqwa.	1. Meningkatkan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia.

Nomor Sasaran Pokok Pada RPJPD	Misi RPJMN 2020-2024	7 Agenda RPJMN 2020-2024	RPJMD Prov. Sultra Tahun 2018-2023	Misi RPJMD Kabupaten Konawe Utara 2021-2026
<p>5. Tersedianya fasilitas wilayah/infrastruktur daerah</p> <p>12. Terciptanya pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah kecamatan dan kelurahan/desa</p>	<p>4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan</p>	<p>- Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar</p>	<p>4. Meningkatkan konektivitas dan kemitraan antar pemerintah, swasta dan masyarakat dalam rangka peningkatan daya saing daerah melalui pembangunan dan perbaikan infrastruktur dan aspek-aspek sosial ekonomi.</p>	<p>2. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar dan sarana prasarana kawasan permukiman.</p>
<p>4. Kemampuan ekonomi daerah yang semakin tinggi</p> <p>6. Terwujudnya iklim berinvestasi yang kondusif</p> <p>9. Terwujudnya pembangunan ekonomi yang berbasis kerakyatan dengan mengedepankan keunggulan kompetitif</p>	<p>2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing</p> <p>3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan</p>	<p>- Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan</p> <p>- Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan</p>	<p>3. Memajukan daya saing wilayah melalui penguatan ekonomi lokal dan peningkatan investasi.</p>	<p>3. Mewujudkan keadilan sosial dan nilai tambah dalam pengelolaan sumberdaya alam guna meningkatkan daya saing ekonomi.</p>

Nomor Sasaran Pokok Pada RPJPD	Misi RPJMN 2020-2024	7 Agenda RPJMN 2020-2024	RPJMD Prov. Sultra Tahun 2018-2023	Misi RPJMD Kabupaten Konawe Utara 2021-2026
17. Terwujudnya kesejahteraan ekonomi				
10. Terwujudnya pembangunan sistem kelembagaan yang efektif dan efisien 14. Terciptanya kesempatan yang sama dalam berusaha	6. Penegakkan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya 7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga 8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya 9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan	- Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	2. Mendorong birokrasi pemerintahan provinsi yang modern, tata kelola pemerintahan desa yang baik (<i>good village governance</i>) serta memberikan bantuan kepada kecamatan dan kelurahan sebagai pusat pelayanan pemerintahan.	4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, mendorong reformasi birokrasi, dan pelayanan publik yang prima.
11. Terwujudnya Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkualitas	4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan	- Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	1. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat agar dapat berdaulat dan aman dalam bidang ekonomi, pangan, pendidikan,	5. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana.

Nomor Sasaran Pokok Pada RPJPD	Misi RPJMN 2020-2024	7 Agenda RPJMN 2020-2024	RPJMD Prov. Sultra Tahun 2018-2023	Misi RPJMD Kabupaten Konawe Utara 2021-2026
			kesehatan, lingkungan, politik, serta iman dan taqwa.	
1. Terwujudnya karakter masyarakat Kabupaten Konawe Utara yang tangguh, berakhlak mulia, bermoral berdasarkan falsafah Pancasila 2. Makin mantapnya budaya lokal yang tercermin dengan meningkatnya pemahaman dan implementasi nilai-nilai budaya 7. Terwujudnya pembangunan bidang sosial yang lebih berkualitas 13. Berkurangnya kesenjangan sosial	5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa	- Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	1. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat agar dapat berdaulat dan aman dalam bidang ekonomi, pangan, pendidikan, kesehatan, lingkungan, politik, serta iman dan taqwa.	6. Membangun peradaban masyarakat yang bertumpu pada nilai-nilai keagamaan dan kebudayaan lokal.

Sumber : Bappeda Kab. Konawe Utara, 2021

5.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan sasaran merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah dalam mendukung pelaksanaan misi. Tujuan merupakan dampak (impact) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai Program Perangkat Daerah terkait. Selaras dengan penggunaan paradigma penganggaran berbasis kinerja maka perencanaan pembangunan daerah pun menggunakan prinsip yang sama. Rencana pembangunan daerah lebih ditekankan pada target kinerja, baik pada dampak, hasil, maupun keluaran dari suatu kegiatan, program, dan sasaran. Perumusan tujuan dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih juga menjadi landasan perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Penjabaran tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021-2026 yang akan dicapai pada masing-masing misi tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 5.2 Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021 - 2026

Visi : **KON**awe Utar**A** Lebih **SejahterA** dan Be**R**daya **SA**ing

No.	Misi RPJMD	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja					
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia	Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	69,86	70,266	70,672	71,078	71,484	71,890	72,296
			Meningkatnya akses pendidikan	Rata - Rata Lama Sekolah	Tahun	9,21	9,40	9,60	9,79	9,99	10,18	10,37
				Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,83	13,07	13,30	13,54	13,77	14,01	14,25
			Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	69,51	70,09	70,67	71,26	71,84	72,42	73,00
			Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan pengarusutamaan hak anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	86,17	86,41	86,66	86,90	87,14	87,39	87,63
				Kota Layak Anak	Kategori	Pratama	Pratama	Pratama	Pratama	Madya	Madya	Madya
			Meningkatnya Sumberdaya Manusia Yang Kompeten dan Produktif	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	74,45	75,15	75,84	76,54	77,24	77,93	78,63
			Meningkatnya ketahanan pangan	Skor Pola Pangan Harapan	Skor	79,60	80,52	81,53	82,56	83,56	84,58	85,58
			Meningkatnya penanganan	Persentase Penurunan	Persen	13,53	12,87	12,21	11,55	10,23	9,57	9,57

No.	Misi RPJMD	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja					
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			masalah kesejahteraan sosial	Warga Miskin (DTKS/Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)								
2.	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar dan sarana prasarana kawasan permukiman	Meningkatkan kualitas infrastruktur wilayah dan kawasan permukiman		Persentase Keterhubungan /Konektivitas Wilayah	Persen	85,15	85,84	86,53	87,22	87,91	88,60	89,29
			Meningkatnya kapasitas infrastruktur wilayah	Proporsi Panjang Jalan dan Jembatan Dalam Kondisi Mantap	Persen	84,03	84,81	85,58	86,36	87,13	87,91	88,68
				Persentase Daerah Irigasi (DI) Yang Terlayani Jaringan Irigasi	Persen	67,23	67,79	68,35	68,91	69,47	70,03	70,59
			Terpenuhinya sarana parasarana kawasan permukiman	Persentase kawasan permukiman (Perkotaan/Perdesaan) yang tidak kumuh	Persen	78,45	81,58	84,72	87,85	90,99	94,12	97,26
				Rasio Akses Air Minum perpipaan layak	Persen	48,33	56,86	59,20	61,54	63,88	66,22	68,79
				Rasio Akses Sanitasi Layak	Persen	36,31	39,28	54,28	56,62	58,96	61,30	63,64
				Cakupan	Persen	15,38	18,63	21,88	25,13	28,38	31,63	34,88

No.	Misi RPJMD	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja					
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
				layanan persampahan								
3.	Mewujudkan keadilan sosial dan nilai tambah dalam pengelolaan sumberdaya alam guna meningkatkan daya saing ekonomi	Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi		Pertumbuhan Ekonomi	Persen	-0,72	4,90	5,24	5,58	5,91	6,25	6,59
				PDRB Perkapita	Rp. Juta/Jiwa/Tahun	60.847	61.177	61.508	61.838	62.169	62.500	62.830
				Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3,79	3,75	3,70	3,66	3,62	3,58	3,53
				Indeks Gini	Indeks	0,388	0,384	0,380	0,376	0,372	0,368	0,364
				Tingkat Kemiskinan	Persen	13,53	13,40	13,27	13,14	13,01	12,88	12,75
			Meningkatnya pertumbuhan sektor - sektor unggulan daerah	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Persen	39,75	39,89	40,03	40,16	40,30	40,44	40,58
				Pertumbuhan PDRB Sektor Pertambangan dan Penggalian	Persen	21,24	21,29	21,34	21,39	21,44	21,49	21,54
				Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	Persen	11,78	11,80	11,82	11,85	11,87	11,89	11,91
				Pertumbuhan PDRB Sektor Industri	Persen	1,13	1,14	1,15	1,15	1,16	1,17	1,18

No.	Misi RPJMD	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja					
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
				Pengolahan								
				Persentase PAD Sektor Pariwisata	Persen	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
				Nilai Omset Usaha Koperasi	Rp. Ribu	705.375	741.587	777.799	814.011	850.223	886.435	922.647
			Meningkatnya investasi daerah	Pertumbuhan Investasi PMDN dan PMA	Persen	11,86	13,49	15,12	16,74	18,37	20,00	21,63
4.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, mendorong reformasi birokrasi, dan pelayanan publik yang prima	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	50,08	50,24	50,40	50,57	50,73	50,89	51,05
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah	Nilai SAKIP	Kategori	B	B	BB	BB	BB	BB	BB
				Opini BPK	Kategori	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			Terwujudnya birokrasi yang kapabel, optimalnya implementasi SPBE, serta pelayanan publik yang terpercaya	Indeks Maturitas Kelembagaan	Level	1	1	2	3	3	3	3

No.	Misi RPJMD	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja					
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
				Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE))	Indeks	1,3	1,38	1,46	1,54	1,62	1,70	1,78
				Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	3,34	3,41	3,48	3,55	3,62	3,69	3,76
			Meningkatnya kualitas manajemen ASN	Indeks Merit Sistem	Indeks	162	177	192	207	222	237	252
			Meningkatnya kapasitas pemerintahan desa	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,5855	0,5946	0,6037	0,6128	0,6218	0,6309	0,6400
5.	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	58,84	59,67	60,50	61,33	62,16	62,99	63,82
			Terjaganya kualitas pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang	Persentase Ketaatan Terhadap Perencanaan Tata Ruang	Persen	80	80,49	80,98	81,47	81,96	82,45	82,94
			Menurunnya tingkat pencemaran air dan udara	Indeks Kualitas Air dan Udara	Indeks	92,58	93,32	94,06	94,80	95,54	96,28	97,02
			Terwujudnya tata kelola dan manaieimen	Indeks Resiko Bencana	Indeks	172,4	170,71	169,02	167,33	165,64	163,95	162,26

No.	Misi RPJMD	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja					
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			bencana									
6.	Membangun peradaban masyarakat yang bertumpu pada nilai - nilai keagamaan dan kebudayaan lokal	Melestarikan seni budaya lokal		Persentase Kapasitas Lembaga Adat Yang Dibina	Persen	100	100	100	100	100	100	100
			Meningkatnya intensitas event seni budaya yang diselenggarakan	Jumlah penyelenggaraa n event seni budaya	Nilai	0	1	2	3	4	5	5
		Mewujudkan kehidupan masyarakat yang dilandasi nilai - nilai kerukunan beragama		Indeks kerukunan beragama	Indeks	73,92	74,29	74,66	75,03	75,40	75,77	76,14
				Persentase Pengelolaan Potensi Konflik Sosial	Persen	100	100	100	100	100	100	100

Sumber : Bappeda Kab. Konawe Utara, 2021

Selanjutnya, untuk menjelaskan kerangka logis keterhubungan kebijakan daerah dan perangkat daerah, sasaran dipisahkan menjadi sasaran yang terkait dengan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati dan sasaran yang tidak secara langsung terkait dengan pencapaian visi dan misi tetapi secara langsung menjadi prioritas perangkat daerah. Selanjutnya sasaran secara spesifik pembangunan daerah terangkai menjadi sebagai arsitektur kinerja ‘impact’ yang saling terhubung. Dengan demikian, indikator tujuan pembangunan merupakan representasi langsung keberhasilan pencapaian pembangunan daerah pada akhir periode Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara pada tahun 2024. Berikut ini disajikan tabel keterkaitan kinerja daerah dan perangkat daerah Kabupaten Konawe Utara.

Tabel 5.3 Keterkaitan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala Daerah dan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021-2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	IKU Renstra	OPD
Mis 1 : Meningkatkan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia					
Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Meningkatnya akses pendidikan	Rata - Rata Lama Sekolah	Angka Melek Huruf, Angka Partisipasi Kasar, Angka Kelulusan, Angka Partisipasi Sekolah, Tenaga Pendidik dan Kependidikan, Jumlah Guru Yang Bersertifikat	Dinas P & K
			Harapan Lama Sekolah		Dinas P & K
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup	Angka Kematian Bayi / 1000 kelahiran hidup, Angka Kematian Ibu / 100.000 kelahiran hidup, Rasio Puskesmas per satuan penduduk x 1.000, Tingkat Penggunaan Tempat Tidur, Rasio Dokter / 100.000 Penduduk, Rasio Bidan / 100.000 Penduduk, Rasio Perawat / 100.000 Penduduk, Prevalensi Balita Gizi Buruk, Prevalensi Kasus Suntang, Prevalensi Tuberkulosis (TB) / 100.000 Penduduk	Dinkes, RSUD
		Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan pengarusutamaan hak anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Persentase Perempuan yang menduduki jabatan publik, Jumlah Korban Kekerasan Perempuan yang ditindak lanjuti, Jumlah Korban Kekerasan Anak yang ditindak lanjuti	DPPPA
			Kota Layak Anak		DPPPA
				Jumlah Peserta KB Aktif, Persentase Keluarga Sejahtera, Cakupan PUS Unmeetneed	DPPKB
		Meningkatnya Sumberdaya Manusia Yang Kompeten dan Produktif	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Besaran Pencari Kerja Yang ditempatkan, Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat Pelatihan berbasis Kompetensi, Jumlah Penyelesaian Kasus Hubungan Industrial	Disnaker
		Meningkatnya ketahanan	Skor Pola Pangan Harapan	Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita, Tingkat Penguatan	Ketahanan Pangan

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	IKU Renstra	OPD
pangan			Cadangan Pangan		
		Meningkatnya penanganan masalah kesejahteraan sosial	Persentase Penurunan Warga Miskin (DTKS/Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)	Persentase PPKS Yang memperoleh bantuan sosial, Persentase Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat	Dinsos
				Tingkat Waktu Tanggap (respon time rate) daerah WMK, Jumlah Desa Tangguh Bencana	Dinsos, BPBD, Damkar
Misi 2 : Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar dan sarana prasarana kawasan permukiman					
Meningkatkan kualitas infrastruktur wilayah dan Kawasan Permukiman	Indeks Layanan Infrastruktur (Ketersediaan, Aksesibilitas, Keterjangkauan, Keberlanjutan)	Meningkatnya kapasitas infrastruktur wilayah	Proporsi Panjang Jalan dan Jembatan Dalam Kondisi Mantap	Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap Persentase Ketersediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan (Rambu, Marka, APIL, Guadrail, Delinator, dll) yang berfungsi baik, Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas	Dinas PUPR Dinas Perhubungan
			Persentase Daerah Irigasi (DI) Yang Terlayani Jaringan Irigasi	Luas Daerah Irigasi dalam kondisi baik	Dinas PUPR
		Terpenuhinya sarana parasarana kawasan permukiman	Persentase kawasan permukiman (Perkotaan/Perdesaan) yang tidak kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh Yang ditangani, Jumlah rumah layak huni	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Rasio Akses Air Minum	Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Perpipaan	Dinas PUPR
			Rasio Akses Sanitasi Layak	Penduduk Berakses Sanitasi Yang Layak	Dinas PUPR
			Cakupan layanan persampahan	Jumlah sarana prasarana pelayanan persampahan	DLH
Misi 3 : Mewujudkan keadilan sosial dan nilai tambah dalam pengelolaan sumberdaya alam guna meningkatkan daya saing ekonomi					
Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya pertumbuhan sektor - sektor unggulan daerah	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Produktivitas Tanaman Pertanian, Produktisi Tanaman Perkebunan, Produksi Tanaman Hortikultura, Jumlah Produksi Peternakan (Daging dan Telur), Produktivitas perikanan tangkap, Produktivitas perikanan budidaya	Dinas Tanaman Pangan & Peternakan, Dinas Perkebunan, DKP
				Produktivitas Tanaman Pertanian, Produksi Tanaman Perkebunan, Produksi Tanaman Hortikultura, Jumlah Produksi Peternakan (Daging dan Telur), Produktivitas perikanan tangkap, Produktivitas perikanan budidaya	Dinas Tanaman Pangan & Peternakan, Dinas Perkebunan, DKP
	Tingkat Pengangguran Terbuka		Pertumbuhan PDRB Sektor Pertambangan dan Penggalan	Persentase IUI dan IUKI efektif	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Bapenda, DPMPTSP
	Tingkat Kemiskinan		Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	Kontribusi Sektor Perdagangan, Jumlah Omset yang dihasilkan dari Usaha Sektor Perdagangan, Persentase Pasar Sehat, Persentase Peningkatan Pelaku Usaha Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Indeks Gini		Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	Jumlah Omset yang dihasilkan dari Usaha Sektor Perindustrian	Dinas Perindustrian dan

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	IKU Renstra	OPD
					Perdagangan
			Persentase PAD Sektor Pariwisata	Jumlah Kunjungan wisata, Lama Kunjungan Wisata	Dinas Pariwisata
			Nilai Omset Usaha Koperasi	Persentase koperasi aktif, Jumlah UMKM yang dibina	Diskop & UMKM
		Meningkatnya investasi daerah	Pertumbuhan Investasi PMDN dan PMA	Lama Proses Perizinan, Jumlah nilai investasi PMA/PMDN	DPMPTSP
Misi 4 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, mendorong reformasi birokrasi, dan pelayanan publik yang prima					
Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah	Nilai SAKIP	Jumlah Sarana dan Prasarana Keagamaan Yang Dibangun/Rehabilitasi, Persentase penyerapan anggaran pembangunan dan realisasinya, Nilai dan status kinerja Pemerintah Daerah (Nilai EKPPD),	Setda
			Opini BPK	Penetapan APBD dan APBDP Tepat Waktu, Ketepatan Waktu Penyusunan, Persentase Aset Pemda Yang Terinventarisir	BPKAD
				Persentase Sinergitas Perencanaan, Persentase Keterukuran Indikator Perencanaan, Persentase Konsistensi Pelaksanaan Pembangunan, Persentase Tingkat Partisipatif Perencanaan, Persentase OPD Yang Pencapaian Kinerja Sesuai Target, Persentase implementasi rencana kelitbangan, Persentase sistem data dan statistik yang terintegrasi.	Bappeda
				Persentase Kenaikan Pendapatan Daerah, Tingkat kemandirian keuangan daerah (Rasio PAD dibandingkan Pendapatan Daerah)	Dinas Pendapatan
		Terwujudnya birokrasi yang kapabel, Optimalnya implementasi SPBE, serta meningkatnya pelayanan publik yang terpercaya	Indeks Maturitas Kelembagaan	Tingkat leveling kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK	Inspektorat
			Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Jumlah Penerapan SPBE, Persentase Pengelolaan Layanan Pengaduan Berbasis Online Yang didistribusikan ke OPD, Jumlah sarana persandian	Diskominfo
			Indeks Kepuasan Masyarakat	Pertumbuhan Pengunjung Perpustakaan Daerah	Dinas Perpustakaan
				Persentase Arsip Statis dan Dinamis Yang Diarsipkan	Dinas Perpustakaan
				Kepemilikan dokumen kependudukan Berbasis Elektronik, Persentase Kepemilikan dokumen Pencatatan Sipil Berbasis Elektronik, OPD Yang Memanfaatkan Data Kependudukan	Disdukcapil
				Persentase Peraturan Daerah Yang Dihasilkan	Sekwan
				Jumlah Organisasi Kepemudaan yang dibina, Jumlah Cabang Olahraga Yang Berprestasi	Dikpora
				Angka Kriminalitas, Persentase Partisipasi Politik Pemilih Pada	Satpol, Kesbangpol

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	IKU Renstra	OPD
				Pemilihan Umum, Persentase Penduduk/Etnis/Suku/Agama/Ormas Yang Memahami Nilai-Nilai Kehidupan Politik dan Berbangsa,	
				Jumlah Penerapan SPBE, Survei Kepuasan Masyarakat	Diskominfo, DPMPTSP, Setda
		Meningkatnya kualitas manajemen ASN	Indeks Merit Sistem	Persentase Penempatan Pegawai Sesuai Kompetensi, Persentase Peningkatan Kualitas SDM Aparatur	BKPSDM
		Meningkatnya kapasitas pemerintahan desa	Indeks Desa Membangun	Jumlah Desa Berkembang, Persentase 1(satu) BUMDes dalam 1(satu) Desa Yang Aktif, Persentase Penyampaian RKPDes, APBDes, dan Laporan Keuangan Desa Tepat Waktu dan Sesuai Peraturan Bupati	BPMD dan Pemdes
Misi 5 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana					
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Terjaganya kualitas pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang	Persentase Ketaatan Terhadap Perencanaan Tata Ruang	Persentase Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah	PUPR
		Menurunnya tingkat pencemaran air dan udara	Indeks Kualitas Air dan Udara	Kualitas Air (penetapan kelas air), Kualitas Udara (penetapan kelas udara), Kualitas Tutupan Lahan, Persentase Usaha yang memilah B3 dan Limbah B3, Cakupan Wilayah Pelayanan Persampahan	DLH
		Terwujudnya tata kelola dan manajemen bencana	Indeks Resiko Bencana	Jumlah Desa Tangguh Bencana	BPBD, PUPR, Damkar
Misi 6 : Membangun peradaban masyarakat yang bertumpu pada nilai - nilai keagamaan dan kebudayaan lokal					
Melestarikan seni budaya lokal	Persentase seni budaya yang dilestarikan	Meningkatnya intensitas event seni budaya yang diselenggarakan	Jumlah penyelenggaraan event seni budaya	Persentase Kesenian dan Budaya Lokal yang dilestarikan, Jumlah Lembaga adat Yang dibina, Persentase Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal penunjang proses pendidikan	Dinas P & K
Mewujudkan kehidupan masyarakat yang dilandasi nilai - nilai kerukunan beragama	Indeks kerukunan beragama	Meningkatnya pengelolaan potensi konflik sosial	Persentase Pengelolaan Potensi Konflik Sosial	Penanganan Potensi Konflik tidak menjadi konflik	Kesbangpol

Sumber : Bappeda Kab. Konawe Utara, 2021

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN



6.1 STRATEGI

Dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, dirumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan. Strategi akan diturunkan kedalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah. Strategi pembangunan jangka menengah daerah RPJMD Kabupaten Konawe Utara tahun 2021- 2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 6.1
Strategi Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021-2026

Misi/Tujuan	Sasaran	Strategi
Misi 1 : Meningkatkan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia		
Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia	Meningkatnya akses pendidikan	Peningkatan partisipasi pendidikan dan peningkatan kualitas pengelolaan pendidikan melalui pendidikan karakter, peningkatan motivasi belajar, pemberian bantuan beasiswa bagi peserta didik, beasiswa Konasara bagi perguruan tinggi, peningkatan sarana prasarana sekolah serta bahan ajar, peningkatan kualitas dan pemerataan tenaga pengajar sesuai dengan kebutuhan wilayah
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Peningkatan pelayanan kesehatan (promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif), penerapan hidup bersih dan sehat, pengendalian penyakit dan perbaikan status gizi masyarakat, serta perluasan jaminan kesehatan
	Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan pengarusutamaan hak anak	Peningkatan kualitas hidup melalui pemberdayaan perempuan, pengarusutamaan gender dalam pembangunan, perlindungan perempuan,

Misi/Tujuan	Sasaran	Strategi
		pengarustamaan hak anak, serta meningkatkan pengendalian penduduk melalui intensifikasi program KB
	Meningkatnya Sumberdaya Manusia Yang Kompeten dan Produktif	Memperluas kesempatan kerja, pelatihan tenaga kerja, penyediaan lapangan kerja, perlindungan dan pengawasan ketenagakerjaan
	Meningkatnya ketahanan pangan	Penyediaan pangan yang baik dengan harga yang terjangkau dalam rangka meningkatkan kualitas konsumsi pangan
	Meningkatnya penanganan masalah kesejahteraan sosial	Penurunan angka kemiskinan melalui program - program penanggulangan kemiskinan bagi warga miskin
Misi 2 : Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar dan sarana prasarana kawasan permukiman		
Meningkatkan kualitas infrastruktur wilayah	Meningkatnya kapasitas infrastruktur wilayah	Peningkatan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, drainase, dan irigasi melalui pengembangan jaringan, pembangunan dan rehabilitasi
		Penyediaan sarana prasarana perhubungan
		Percepatan pembangunan sarana prasarana kawasan perkotaan Wanggudu
	Terpenuhinya sarana parasarana kawasan permukiman	Penurunan angka backlog rumah dan penurunan luas kawasan kumuh melalui peningkatan kualitas rumah layak huni dan jalan lingkungan permukiman, serta pembangunan dan rebailitasi rumah korban bencana
		Peningkatan cakupan dan kualitas layanan air bersih, air limbah domestik, dan persampahan
Misi 3 : Mewujudkan keadilan sosial dan nilai tambah dalam pengelolaan sumberdaya alam guna meningkatkan daya saing ekonomi		
Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi	Meningkatnya pertumbuhan sektor - sektor unggulan daerah	Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian melalui penyediaan bibit, sarana dan prasarana pertanian, kapasitas petani/kelompok tani, dan bantuan permodalan

Misi/Tujuan	Sasaran	Strategi
		Pengembangan perternakan melalui penyediaan sarana prasarana, pemanfaatan teknologi, dan peningkatan kesehatan hewan
		Meningkatkan produktivitas perikanan melalui pembinaan nelayan tangkap dan budidaya, penyediaan sarana prasarana, dan pengembangan pola kemitraan
		Meningkatkan kinerja ekspor dan perdagangan dalam negeri melalui peningkatan kualitas pasar, pengawasan, promosi dan pemasaran produk - produk unggulan
		Pengembangan kapasitas koperasi dan UMKM
		Mendorong pengembangan industri dan kawasan industri sesuai dengan potensi daerah
		Peningkatan kunjungan wisata melalui pengembangan atraksi serta peningkatan destinasi wisata baru
	Meningkatnya investasi daerah	Peningkatan layanan perizinan, penyediaan informasi potensi dan peluang investasi, memberikan kepastian hukum dan jaminan kemananan, serta peningkatan kapasitas Perusahaan Daerah guna mendorong investasi berkualitas dengan melibatkan pengusaha-pengusaha lokal
Misi 4 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, mendorong reformasi birokrasi, dan pelayanan publik yang prima		
Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah	Implementasi reformasi birokrasi dan pelayanan publik melalui optimalisasi pencapaian target pada 8 (delapan) area perubahan
		Peningkatan kualitas kebijakan daerah di bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum, pembangunan dan penyelenggaraan administrasi umum melalui koordinasi,

Misi/Tujuan	Sasaran	Strategi
		pemantauan dan evaluasi serta pemusan rekomendasi kebijakan kepala daerah
		Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah melalui peningkatan kapasitas SDM perencana, sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, perbaikan mekanisme SIPD serta optimaslisasi pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan
		Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan aset melalui peningkatan kapasitas SDM, pengendalian belanja dan dana transfer, sinkronisasi perencanaan dan penganggaran, pengelolaan pembiayaan, pemanfaatan dan inventarisasi aset
		Peningkatan pelayanan, pendaftaran, penetapan, dan penagihan sumber-sumber PAD
	Terwujudnya birokrasi yang kapabel dan optimalnya implementasi SPBE, serta meningkatnya pelayanan publik yang terpercaya	Optimalisasi pengawasan intern, melalui peningkatan SDM APIP yang berkualitas dan peningkatan sistem pengawasan yang efektif
		Pengembangan sarana prasarana e-government untuk menunjang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan pelayanan publik
		Peningkatan implementasi Satu Data yang didukung teknologi informasi yang andal
		Meningkatkan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan catatan sipil melalui peningkatan kesadaran masyarakat dan perbaikan kualitas layanan administrasi kependudukan
		Meningkatkan kunjungan perpustakaan dan pengelolaan kearsipan melalui pengembangan sarana prasarana kearsipan

Misi/Tujuan	Sasaran	Strategi
		Peningkatan kualitas pelayanan sekretariat DPRD dengan memfasilitasi kegiatan-kegiatan DPRD dan penyaluran aspirasi masyarakat
		Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan umum di tingkat kecamatan
		Meningkatkan partisipasi pemuda dan prestasi olahraga melalui peningkatan sarana prasarana dan pembinaan organisasi kepemudaan
		Meningkatkan kondusivitas daerah, penegakan Perda dan peningkatan SDM
		Meningkatkan kinerja unit pelayanan informasi publik melalui penerapan SOP dan peningkatan SDM
	Meningkatnya kualitas manajemen ASN	Meningkatkan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui penerapan Sistem Merit dan pengembangan jabatan fungsional
	Meningkatnya kapasitas pemerintahan desa	Peningkatan kualitas aparatur pemerintahan desa, pengembangan BUMDes, dan pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat desa
Misi 5 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana		
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Terjaganya kualitas pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang	Percepatan penetapan peraturan tentang rencana tata ruang penataan ruang dan meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang
	Menurunnya tingkat pencemaran air dan udara	Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui pemantauan kualitas air, tanah dan udara, serta tertib hukum lingkungan
	Terwujudnya tata kelola dan manajemen bencana	Meningkatkan ketahanan daerah dalam menghadapi bencana melalui pengurangan resiko bencana untuk ketangguhan (mitigasi, kesiapsiagaan, pra bencana), manajemen kedaruratan, dan manajemen pemulihan

Misi/Tujuan	Sasaran	Strategi
Misi 6 : Membangun peradaban masyarakat yang bertumpu pada nilai - nilai keagamaan dan kebudayaan lokal		
Melestarikan seni budaya lokal	Meningkatnya intensitas event seni budaya yang diselenggarakan	Pelestarian budaya lokal melalui peningkatan event seni budaya dengan pemberdayaan berbasis lembaga-lembaga adat
Mewujudkan kehidupan masyarakat yang dilandasi nilai - nilai kerukunan beragama	Meningkatnya pengelolaan potensi konflik sosial	Meningkatkan pendidikan politik dan wawasan kebangsaan untukantisipasi terhadap potensi konflik sosial di masyarakat
	Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama	Pembangunan dan rehabilitasi sarana keagamaan, peningkatan kualitas pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan, peningkatan upaya menjaga keserasian sosial dalam kelompok keagamaan

Sumber : Bappeda Kab. Konawe Utara, 2021

6.2 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

Arah kebijakan merupakan penjabaran dari strategi pembangunan daerah berupa rumusan kerangka kerja untuk menyelesaikan masalah pembangunan daerah yang dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan urgensi permasalahan dan penekanan yang berbeda tiap tahunnya (tematik) namun tetap berkesinambungan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan guna pelaksanaan misi pembangunan jangka menengah daerah, sebagai berikut :

Tabel 6.2
Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021-2026

Misi/Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Misi 1 : Meningkatkan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia								
Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia	Meningkatnya akses dan mutu pendidikan	Peningkatan partisipasi pendidikan dan peningkatan kualitas pengelolaan pendidikan melalui pendidikan karakter, peningkatan motivasi belajar, pemberian bantuan beasiswa bagi peserta didik, beasiswa Konasara bagi perguruan tinggi, peningkatan sarana prasarana sekolah serta bahan ajar, peningkatan kualitas dan pemerataan tenaga pengajar sesuai dengan kebutuhan wilayah	Peningkatan akses pelayanan pendidikan di masa pandemi Covid-19	Peningkatan akses pendidikan dan tata kelola pelayanan pendidikan di masa pandemi Covid-19	Peningkatan akses dan mutu pendidikan melalui keterjangkauan biaya pendidikan dan meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui literasi	Pemerataan dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai peningkatan sarana prasarana pendidikan dan pengembangan kurikulum lokal dan pendidikan karakter	Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan	Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk peningkatan mutu pembelajaran dan percepatan pemerataan kualitas layanan pendidikan
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Peningkatan pelayanan kesehatan (promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif), penerapan hidup bersih dan sehat, pengendalian penyakit dan	Peningkatan kapasitas sumberdaya dan penguatan tata kelola pelayanan kesehatan	Peningkatan kapasitas sumberdaya dan penguatan tata kelola pelayanan kesehatan	Penguatan peran serta masyarakat dan keluarga secara aktif dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Penguatan sarana prasarana dan alat kesehatan pada semua tingkatan pelayanan kesehatan	Percepatan pencapaian target peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Penataan keberlanjutan program peningkatan derajat kesehatan masyarakat

Misi/Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
		perbaikan status gizi masyarakat, serta perluasan jaminan kesehatan						
	Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan pengarusutamaan hak anak	Peningkatan kualitas hidup melalui pemberdayaan perempuan, pengarusutamaan gender dalam pembangunan, perlindungan perempuan, pengarusutamaan hak anak, serta meningkatkan pengendalian penduduk melalui intensifikasi program KB	Perumusan rencana aksi daerah PUG dan PUHA	Pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak melalui optimalisasi pelaksanaan rencana aksi daerah, serta peningkatan program KB dan kesejahteraan keluarga	Penguatan kebijakan, regulasi dan kelembagaan PUG dan PUHA serta penguatan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender dan responsif anak	Penguatan sistem penyediaan, pemutakhiran dan pemanfaatan data pilah gender dan anak serta peningkatan pengetahuan tentang PUG dan PUHA	Peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan	Peningkatan PUG dan PUHA melalui jejaring dan kerjasama antara pemerintah dengan komunitas, lembaga masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi
	Meningkatnya Sumberdaya Manusia Yang Kompeten dan Produktif	Memperluas kesempatan kerja, pelatihan tenaga kerja, penyediaan lapangan kerja, perlindungan dan pengawasan ketenagakerjaan	Perluasan kesempatan kerja dan penurunan tingkat pengangguran terbuka	Perluasan kesempatan kerja dan penurunan tingkat pengangguran terbuka	Perluasan kesempatan kerja dan penurunan tingkat pengangguran terbuka	Perluasan kesempatan kerja dan penurunan tingkat pengangguran terbuka	Perluasan kesempatan kerja dan penurunan tingkat pengangguran terbuka	Perluasan kesempatan kerja dan penurunan tingkat pengangguran terbuka
	Meningkatnya ketahanan pangan	Penyediaan pangan yang baik dengan harga yang terjangkau dalam rangka meningkatkan kualitas konsumsi pangan	Pemenuhan pangan bagi kelompok masyarakat terutama warga miskin (akibat bencana alam, sosial, ekonomi) melalui pendistribusian bantuan pangan	Peningkatan ketersediaan pangan, pemantapan penanganan kerawanan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan	Peningkatan ketersediaan pangan, pemantapan penanganan kerawanan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan	Peningkatan ketersediaan pangan, pemantapan penanganan kerawanan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan	Peningkatan ketersediaan pangan, pemantapan penanganan kerawanan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan	Peningkatan ketersediaan pangan, pemantapan penanganan kerawanan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan

Misi/Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Meningkatnya penanganan masalah kesejahteraan sosial	Penurunan angka kemiskinan melalui program - program penanggulangan kemiskinan bagi warga miskin	Peningkatan kualitas data terpadu kesejahteraan sosial dengan mengoptimalkan peran serta masyarakat serta peningkatan kelembagaan penanggulangan kesejahteraan sosial di semua tingkatan	Peningkatan kualitas data terpadu kesejahteraan sosial dengan mengoptimalkan peran serta masyarakat serta peningkatan kelembagaan penanggulangan kesejahteraan sosial di semua tingkatan	Meningkatkan ketersediaan dan jangkauan pelayanan dasar bagi penduduk miskin melalui kolaborasi pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi dan dunia usaha	Penguatan kapasitas dan pembinaan usaha bagi penduduk miskin melalui peningkatan ketrampilan dan kemudahan akses pembiayaan	Mendorong sinkronisasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan di daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan percepatan penurunan kemiskinan	Penyiapan keberlanjutan sinergitas program penanggulangan kemiskinan dan peran serta masyarakat, perguruan tinggi dan dunia usaha
Misi 2 : Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar dan sarana prasarana kawasan permukiman								
Meningkatkan kualitas infrastruktur wilayah	Meningkatnya kapasitas infrastruktur wilayah	Peningkatan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, drainase, dan irigasi melalui pengembangan jaringan, pembangunan dan rehabilitasi	Pembangunan dan peningkatan jalan/jembatan kewenangan kabupaten dan jalan kawasan strategis	Pembangunan dan peningkatan jalan/jembatan kewenangan kabupaten dan jalan kawasan strategis	Pembangunan dan peningkatan jalan/jembatan kewenangan kabupaten dan jalan kawasan strategis	Pembangunan dan peningkatan jalan/jembatan kewenangan kabupaten dan jalan kawasan strategis	Pembangunan dan peningkatan jalan/jembatan kewenangan kabupaten dan jalan kawasan strategis	Pembangunan dan peningkatan jalan/jembatan kewenangan kabupaten dan jalan kawasan strategis
		Penyediaan sarana prasarana perhubungan	Peningkatan sarana parasarana lalu lintas jalan dan pelabuhan/dermaga	Peningkatan sarana parasarana lalu lintas jalan dan pelabuhan/dermaga	Peningkatan sarana parasarana lalu lintas jalan dan pelabuhan/dermaga	Peningkatan sarana parasarana lalu lintas jalan dan pelabuhan/dermaga	Peningkatan sarana parasarana lalu lintas jalan dan pelabuhan/dermaga	Peningkatan sarana parasarana lalu lintas jalan dan pelabuhan/dermaga
		Percepatan pembangunan sarana prasarana kawasan perkotaan Wanggudu	Penetapan perencanaan pembangunan kawasan perkotaan Wanggudu	Pelaksanaan pembangunan jaringan jalan kawasan perkotaan Wanggudu	Pelaksanaan pembangunan jaringan jalan kawasan perkotaan Wanggudu	Peningkatan kualitas jaringan jalan kawasan perkotaan Wanggudu	Peningkatan kualitas jaringan jalan, dan RTH Kawasan Perkotaan Wanggudu	Peningkatan kualitas jaringan jalan, dan RTH Kawasan Perkotaan Wanggudu
	Terpenuhinya sarana parasarana kawasan permukiman	Penurunan luas kawasan kumuh melalui peningkatan kualitas rumah layak huni dan jalan lingkungan permukiman, serta pembangunan dan	Perumusan rencana penanganan, pencegahan, dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh yang berkualitas	Penjaringan stakeholder potensial untuk pembiayaan penanganan kawasan permukiman kumuh	Pelaksanaan pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh	Pelaksanaan pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh	Pelaksanaan pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh	Pengelolaan kawasan permukiman kumuh yang telah ditangani

Misi/Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
		reabilitasi rumah korban bencana						
		Peningkatan cakupan dan kualitas layanan air bersih, air limbah domestik, dan persampahan	Validasi data kondisi dan pelayanan air bersih, air limbah, dan persampahan termasuk aspek kelembagaannya	Peningkatan cakupan dan kualitas layanan air bersih, air limbah domestik, dan penanganan persampahan	Peningkatan cakupan dan kualitas layanan air bersih, air limbah domestik, dan penanganan persampahan	Peningkatan cakupan dan kualitas layanan air bersih, air limbah domestik, dan penanganan persampahan	Peningkatan cakupan dan kualitas layanan air bersih, air limbah domestik, dan penanganan persampahan	Penguatan kelembagaan pengelolaan air bersih dan persampahan
Misi 3 : Mewujudkan keadilan sosial dan nilai tambah dalam pengelolaan sumberdaya alam guna meningkatkan daya saing ekonomi								
Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi	Meningkatnya pertumbuhan sektor - sektor unggulan daerah	Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian melalui penyediaan bibit, sarana dan prasarana pertanian, kapasitas petani/keompok tani, dan bantuan permodalan	Peningkatan pengelolaan sektor ekonomi unggulan daerah melalui peningkatan SDM, akses permodalan, pemasaran dan daya saing produksi	Peningkatan pengelolaan sektor ekonomi unggulan daerah melalui peningkatan SDM, akses permodalan, pemasaran dan daya saing produksi	Peningkatan pengelolaan sektor ekonomi unggulan daerah melalui peningkatan SDM, akses permodalan, pemasaran dan daya saing produksi	Peningkatan pengelolaan sektor ekonomi unggulan daerah melalui peningkatan SDM, akses permodalan, pemasaran dan daya saing produksi	Peningkatan pengelolaan sektor ekonomi unggulan daerah melalui peningkatan SDM, akses permodalan, pemasaran dan daya saing produksi	Peningkatan pengelolaan sektor ekonomi unggulan daerah melalui peningkatan SDM, akses permodalan, pemasaran dan daya saing produksi
		Pengembangan peternakan melalui penyediaan sarana prasarana, pemanfaatan teknologi, dan peningkatan kesehatan hewan	Peningkatan produksi peternakan untuk memenuhi konsumsi daerah dan kawasan industri	Peningkatan produksi peternakan untuk memenuhi konsumsi daerah dan kawasan industri	Peningkatan produksi peternakan untuk memenuhi konsumsi daerah dan kawasan industri	Peningkatan produksi peternakan untuk memenuhi konsumsi daerah dan kawasan industri	Peningkatan produksi peternakan untuk memenuhi konsumsi daerah dan kawasan industri	Peningkatan produksi peternakan untuk memenuhi konsumsi daerah dan kawasan industri
		Meningkatkan produktivitas perikanan melalui pembinaan nelayan tangkap dan budidaya, penyediaan sarana prasarana, dan pengembangan pola kemitraan.	Peningkatan pengelolaan sektor perikanan melalui pemberdayaan nelayan, akses permodalan, pemasaran dan daya saing produksi	Peningkatan pengelolaan sektor perikanan melalui pemberdayaan nelayan, akses permodalan, pemasaran dan daya saing produksi	Peningkatan pengelolaan sektor perikanan melalui pemberdayaan nelayan, akses permodalan, pemasaran dan daya saing produksi	Peningkatan pengelolaan sektor perikanan melalui pemberdayaan nelayan, akses permodalan, pemasaran dan daya saing produksi	Peningkatan pengelolaan sektor perikanan melalui pemberdayaan nelayan, akses permodalan, pemasaran dan daya saing produksi	Peningkatan pengelolaan sektor perikanan melalui pemberdayaan nelayan, akses permodalan, pemasaran dan daya saing produksi

Misi/Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Meningkatkan kinerja ekspor dan perdagangan dalam negeri melalui peningkatan kualitas pasar, pengawasan, promosi dan pemasaran produk - produk unggulan	Peningkatan kualitas sarana prasarana perdagangan dan peningkatan pemasaran produk unggulan daerah	Peningkatan kualitas sarana prasarana perdagangan dan peningkatan pemasaran produk unggulan daerah	Peningkatan kualitas sarana prasarana perdagangan dan peningkatan pemasaran produk unggulan daerah	Peningkatan kualitas sarana prasarana perdagangan dan peningkatan pemasaran produk unggulan daerah	Peningkatan kualitas sarana prasarana perdagangan dan peningkatan pemasaran produk unggulan daerah	Peningkatan kualitas sarana prasarana perdagangan dan peningkatan pemasaran produk unggulan daerah
		Pengembangan kapasitas koperasi dan UMKM	Penguatan koperasi dan UMKM dalam menghadapi dampak pandemi Covid-19	Penguatan kapasitas koperasi dalam memberikan akses permodalan bagi UMKM	Penguatan kapasitas koperasi dalam memberikan akses permodalan bagi UMKM	Penguatan kapasitas koperasi dalam memberikan akses permodalan bagi UMKM	Penguatan kapasitas koperasi dalam memberikan akses permodalan bagi UMKM	Penguatan kapasitas koperasi dalam memberikan akses permodalan bagi UMKM
		Mendorong pengembangan industri dan kawasan industri sesuai dengan potensi daerah	Fasilitasi pengembangan kawasan industri untuk penciptaan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi	Fasilitasi pengembangan kawasan industri untuk penciptaan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi	Fasilitasi pengembangan kawasan industri untuk penciptaan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi	Fasilitasi pengembangan kawasan industri untuk penciptaan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi	Fasilitasi pengembangan kawasan industri untuk penciptaan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi	Fasilitasi pengembangan kawasan industri untuk penciptaan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi
		Peningkatan kunjungan wisata melalui pengembangan atraksi serta peningkatan destinasi wisata baru	Peningkatan promosi daya tarik objek wisata	Peningkatan promosi daya tarik objek wisata serta pengembangan sarana prasarana	Peningkatan promosi daya tarik objek wisata serta pengembangan sarana prasarana	Peningkatan kualitas SDM kepariwisataan yang mampu berdaya saing	Peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan, pelestarian, pemajuan pariwisata dan ekonomi kreatif	Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata yang kondusif
	Meningkatnya investasi daerah	Peningkatan layanan perizinan, penyediaan informasi potensi dan peluang investasi, memberikan	Peningkatan iklim investasi daerah dan peningkatan kapasitas Perusahaan Daerah	Peningkatan iklim investasi daerah dan peningkatan kapasitas Perusahaan Daerah	Peningkatan iklim investasi daerah dan peningkatan kapasitas Perusahaan Daerah	Peningkatan iklim investasi daerah dan peningkatan kapasitas Perusahaan Daerah	Peningkatan iklim investasi daerah dan peningkatan kapasitas Perusahaan Daerah	Peningkatan iklim investasi daerah dan peningkatan kapasitas Perusahaan Daerah

Misi/Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
		kepastian hukum dan jaminan kemananan, serta peningkatan kapasitas Perusahaan Daerah guna mendorong investasi berkualitas dengan melibatkan pengusaha-pengusaha lokal						
Misi 4 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, mendorong reformasi birokrasi, dan pelayanan publik yang prima								
Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah	Implementasi reformasi birokrasi dan pelayanan publik melalui optimalisasi pencapaian target pada 8 (delapan) area perubahan	Penataan organisasi dan jabatan fungsional dalam rangka meningkatkan profesional ASN dan mewujudkan pelayanan publik yang terpercaya	Meningkatkan dan memperluas pemahaman Reformasi Birokrasi kepada SDM Apratur	Optimalisasi implementasi Reformasi Birokrasi	Optimalisasi implementasi Reformasi Birokrasi	Optimalisasi implementasi Reformasi Birokrasi	Perwujudan pemerintahan yang bebas dari korupsi dan birokrasi yang melayani
		Peningkatan kualitas kebijakan daerah di bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum, pembangunan dan penyelenggaraan administrasi umum melalui koordinasi, pemantauan dan evaluasi serta pemsan rekomendasi kebijakan kepala daerah	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui sistem akuntabilitas kinerja, perencanaan, keuangan, pengawasan, keterbukaan informasi berbasis SPBE.	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui sistem akuntabilitas kinerja, perencanaan, keuangan, pengawasan, keterbukaan informasi berbasis SPBE.	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui sistem akuntabilitas kinerja, perencanaan, keuangan, pengawasan, keterbukaan informasi berbasis SPBE.	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui sistem akuntabilitas kinerja, perencanaan, keuangan, pengawasan, keterbukaan informasi berbasis SPBE.	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui sistem akuntabilitas kinerja, perencanaan, keuangan, pengawasan, keterbukaan informasi berbasis SPBE.	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui sistem akuntabilitas kinerja, perencanaan, keuangan, pengawasan, keterbukaan informasi berbasis SPBE.
		Peningkatan kualitas perencanaan						

Misi/Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
		pembangunan daerah melalui peningkatan kapasitas SDM perencana, sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, perbaikan mekanisme SIPD serta optimaslisasi pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan						
		Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan aset melalui peningkatan kapasitas SDM, pengendalian belanja dan dana transfer, sinkronisasi perencanaan dan penganggaran, pengelolaan pembiayaan, pemanfaatan dan inventarisasi aset						
		Peningkatan pelayanan, pendaftaran, penetapan, dan penagihan sumber-sumber PAD						
	Terwujudnya birokrasi yang kapabel dan optimalnya	Optimalisasi pengawasan intern, melalui peningkatan SDM APIP yang						

Misi/Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
	implementasi SPBE, serta meningkatnya pelayanan publik yang terpercaya	berkualitas dan peningkatan sistem pengawasan yang efektif						
		Pengembangan sarana prasarana e-government untuk menunjang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan pelayanan publik						
		Peningkatan implementasi Satu Data yang didukung teknologi informasi yang andal						
		Meningkatkan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan catatan sipil melalui peningkatan kesadaran masyarakat dan perbaikan kualitas layanan administrasi kependudukan						
		Meningkatkan kunjungan perpustakaan dan pengelolaan kearsipan melalui pengembangan sarana prasarana kearsipan						
		Peningkatan kualitas						

Misi/Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
		pelayanan sekretariat DPRD dengan memfasilitasi kegiatan-kegiatan DPRD dan penyaluran aspirasi masyarakat						
		Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan umum di tingkat kecamatan						
		Meningkatkan partisipasi pemuda dan prestasi olahraga melalui peningkatan sarana prasarana dan pembinaan organisasi kepemudaan						
		Meningkatkan kondusivitas daerah, penegakan Perda dan peningkatan SDM						
		Meningkatkan kinerja unit pelayanan informasi publik melalui penerapan SOP dan peningkatan SDM	Penyusunan penyelarasan dan implementasi pedoman pelayanan informasi publik	Penerapan sistem pelayanan informasi publik	Inovasi penerapan sistem pelayanan informasi publik	Inovasi penerapan sistem pelayanan informasi publik	Penguatan sistem pelayanan informasi publik	Penguatan sistem pelayanan informasi publik
	Meningkatnya kualitas manajemen ASN	Meningkatkan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui penerapan Sistem Merit dan	Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Perwujudan SDM Aparatur yang profesional, bersih dalam pelayanan kepada masyarakat

Misi/Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
		pengembangan jabatan fungsional						
	Meningkatnya kapasitas pemerintahan desa	Peningkatan kualitas aparatur pemerintahan desa, pengembangan BUMDes, dan pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat desa	Penguatan pemerintahan desa dan pengembangan potensi desa	Penguatan pemerintahan desa dan pengembangan potensi desa	Penguatan pemerintahan desa dan pengembangan potensi desa	Penguatan pemerintahan desa dan pengembangan potensi desa	Penguatan pemerintahan desa dan pengembangan potensi desa	Akselerasi menuju desa manu dan mandiri
Misi 5 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana								
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Terjaganya kualitas pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang	Percepatan penetapan peraturan tentang rencana tata ruang penataan ruang dan meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang	Penyusunan rencana revisi tata ruang wilayah	Penetapan rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang	Peningkatan Pengendalian pemanfaatan ruang	Peningkatan Pengendalian pemanfaatan ruang	Peningkatan Pengendalian pemanfaatan ruang	Peningkatan Pengendalian pemanfaatan ruang
	Menurunnya tingkat pencemaran air dan udara	Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui pemantauan kualitas air, tanah dan udara, serta tertib hukum lingkungan	Perumusan dan penetapan rencana pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup (RPPLH)	Pengurangan pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui peningkatan kapasitas daerah dalam implementasi PPLH	Pengurangan pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui peningkatan kapasitas daerah dalam implementasi PPLH	Pengurangan pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui peningkatan kapasitas daerah dalam implementasi PPLH	Pengurangan pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui peningkatan kapasitas daerah dalam implementasi PPLH	Pengurangan pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui peningkatan kapasitas daerah dalam implementasi PPLH
	Terwujudnya tata kelola dan manajemen bencana	Meningkatkan ketahanan daerah dalam menghadapi bencana melalui pengurangan resiko bencana untuk ketangguhan (mitigasi, kesiapsiagaan, pra bencana),	Pengurangan resiko bencana serta membangun komitmen bersama stakeholder PRB dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam PRB	Pengurangan resiko bencana serta membangun komitmen bersama stakeholder PRB dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam PRB	Pengurangan resiko bencana serta membangun komitmen bersama stakeholder PRB dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam PRB	Pengurangan resiko bencana serta membangun komitmen bersama stakeholder PRB dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam PRB	Pengurangan resiko bencana serta membangun komitmen bersama stakeholder PRB dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam PRB	Pengurangan resiko bencana serta membangun komitmen bersama stakeholder PRB dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam PRB

Misi/Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
		manajemen kedaruratan, dan manajemen pemulihan						
Misi 6 : Membangun peradaban masyarakat yang bertumpu pada nilai - nilai keagamaan dan kebudayaan lokal								
Melestarikan seni budaya lokal	Meningkatnya intensitas event seni budaya yang diselenggarakan	Pelestarian budaya lokal melalui peningkatan event seni budaya dengan pemberdayaan berbasis lembaga-lembaga adat		Penanaman nilai - nilai budaya masyarakat melalui penyelenggaraan event seni dan budaya	Peningkatan peran serta komunitas dan lembaga – lembaga adat dalam penyelenggaraan event seni dan budaya	Peningkatan kualitas dan kuantitas event seni dan budaya	Peningkatan pelaku seni budaya yang berwawasan nasional dan global	Penguatan keberlanjutan pelestarian, pemberdayaan, pengembangan seni budaya lokal
Mewujudkan kehidupan masyarakat yang dilandasi nilai - nilai kerukunan beragama	Meningkatnya pengelolaan potensi konflik sosial	Meningkatkan pendidikan politik dan wawasan kebangsaan untuk antisipasi terhadap potensi konflik sosial di masyarakat		Pengendalian potensi konflik dan optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan kondusivitas wilayah				
	Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama	Pembangunan dan rehabilitasi sarana keagamaan, peningkatan kualitas pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan, peningkatan upaya menjaga keserasian sosial dalam kelompok keagamaan	Peningkatan kualitas pelayanan dan pemahaman agama serta kehidupan beragama dan peningkatan kerukunan antarumat beragama	Peningkatan kualitas pelayanan dan pemahaman agama serta kehidupan beragama dan peningkatan kerukunan antarumat beragama	Peningkatan kualitas pelayanan dan pemahaman agama serta kehidupan beragama dan peningkatan kerukunan antarumat beragama	Peningkatan kualitas pelayanan dan pemahaman agama serta kehidupan beragama dan peningkatan kerukunan antarumat beragama	Peningkatan kualitas pelayanan dan pemahaman agama serta kehidupan beragama dan peningkatan kerukunan antarumat beragama	Peningkatan kualitas pelayanan dan pemahaman agama serta kehidupan beragama dan peningkatan kerukunan antarumat beragama

Sumber : Bappeda Kab. Konawe Utara, 2021

6.3 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

Perencanaan pembangunan daerah pada prinsipnya bertujuan mengintegrasikan rencana tata ruang wilayah dengan rencana pembangunan daerah. Dalam kaitan itu, penyusunan RPJMD harus berpedoman pada RTRW. Oleh karena itu, diperlukan penelaahan RTRW untuk menjamin agar arah kebijakan dalam RPJMD selaras dengan, atau tidak menyimpang dari arah kebijakan RTRW. Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Konawe Utara, maka ditetapkan kebijakan dan strategi pembangunan kewilayah meliputi:

1. Kebijakan pengembangan dan peningkatan pusat-pusat pelayanan yang dapat mendorong pertumbuhan yang merata sesuai dengan hirarki dan skala pelayanannya, melalui strategi :
 - a. meningkatkan dan mempertahankan fungsi pusat pelayanan eksisting;
 - b. mengembangkan pusat pelayanan baru di seluruh Kabupaten Konawe Utara;
 - c. menetapkan pusat pelayanan sebagai kawasan fungsional sesuai dengan unggulan wilayah sekitarnya; dan
 - d. meningkatkan keterkaitan antar pusat pelayanan sehingga tercipta keterpaduan antar wilayah.
2. Kebijakan pengembangan dan peningkatan kualitas dan jangkauan jaringan transportasi, energi listrik, telekomunikasi, dan sumber daya air, pelayanan sarana dan prasarana air minum, persampahan, air limbah, dan drainase untuk meningkatkan pertumbuhan wilayah, melalui strategi :
 - a. mengembangkan dan meningkatkan sistem jaringan prasarana transportasi internal dan regional kabupaten dalam menunjang pergerakan barang dan penumpang;
 - b. mengembangkan simpul-simpul transportasi dalam rangka peningkatan sistem jaringan pelayanan inter dan antarmoda untuk meningkatkan pelayanan barang dan penumpang;
 - c. mengembangkan dan meningkatkan jaringan energi listrik dengan memanfaatkan energi terbarukan dan tidak terbarukan secara optimal untuk mendukung pengembangan sektor unggulan;
 - d. mengembangkan dan meningkatkan jaringan telekomunikasi untuk meningkatkan keterkaitan antarwilayah;

- e. mengembangkan dan meningkatkan jaringan sumber daya air untuk menciptakan keterpaduan pengelolaan sumber daya air; dan
 - f. mengembangkan dan meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana air minum, persampahan, air limbah dan drainase untuk meningkatkan kualitas lingkungan permukiman penduduk.
3. Kebijakan pengembangan kegiatan industri pertambangan yang ramah lingkungan dalam rangka memberi nilai tambah dalam perekonomian wilayah, melalui strategi:
- a. mengembangkan kegiatan pendukung dan/atau kegiatan turunan dari sektor pertambangan;
 - b. mendorong pengembangan pusat kegiatan industri pertambangan yang inovatif dan ramah lingkungan;
 - c. mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah yang ramah lingkungan untuk mendukung kegiatan industri pertambangan; dan
 - d. mengembangkan dan meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana penunjang kegiatan industri pertambangan.
4. Kebijakan pengembangan kegiatan unggulan pertanian, perkebunan, perikanan, dan pertambangan secara bijak dengan memperhatikan daya dukung lingkungan, melalui strategi :
- a. mewujudkan pemanfaatan kawasan budidaya secara efisien, serasi dan seimbang berdasarkan kesesuaian lahannya;
 - b. mengembangkan dan meningkatkan pengembangan pertanian dalam rangka mendukung swasembada pangan;
 - c. mengembangkan dan meningkatkan pengembangan perkebunan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan untuk mendukung kesejahteraan rakyat;
 - d. mengembangkan dan meningkatkan pengembangan perikanan untuk mendukung kesejahteraan rakyat;
 - e. mengembangkan kegiatan pendukung dan/atau kegiatan turunan dari kegiatan perkebunan dan perikanan untuk kesejahteraan rakyat;
 - f. mengembangkan kegiatan pertambangan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan;

- g. mengintegrasikan kawasan unggulan pertanian tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura serta kawasan pertambangan dengan wilayah sekitar dan kawasan unggulan lain;
 - h. meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang mampu mengelola sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan pertambangan secara profesional dan berkelanjutan melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; dan
 - i. mengembangkan dan meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana penunjang kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan, dan pertambangan, termasuk kegiatan pendukungnya guna mendukung aksesibilitas pusat-pusat pertumbuhan kawasan.
5. Kebijakan pelestarian lingkungan hidup dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan daya dukung lingkungan demi kelangsungan di masa mendatang; melalui strategi :
- a. mempertahankan kawasan lindung di wilayah darat dan wilayah laut untuk meningkatkan daya dukung lingkungan hidup;
 - b. mempertahankan kawasan hutan dengan luas paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari luas wilayah keseluruhan;
 - c. menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup terutama kawasan tangkapan air, sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar mata air, dan kawasan perairan laut;
 - d. mengelola sumber daya alam tak terbarukan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan sumber daya alam yang terbarukan untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya; dan
 - e. mengembalikan dan meningkatkan kualitas lingkungan yang telah rusak akibat kegiatan budidaya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem lingkungan.
6. Kebijakan peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara, melalui strategi :
- a. menetapkan aset-aset budidaya militer dan kepolisian dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
 - b. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam aset-aset militer dan kepolisian untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan; dan

- c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar aset-aset militer/kepolisian sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan budidaya terbangun.

6.4 PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Berdasarkan rumusan strategi dan arah kebijakan sebagaimana diuraikan di atas, maka untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan guna mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021-2026, maka program Perangkat Daerah dijabarkan pada setiap misi sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 6.3 sebagai berikut.

Tabel 6.3
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH YANG DISERTAI PAGU INDIKATIF KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2021 - 2026

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat daerah Penanggungjawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
VISI : "KONAWE UTARA LEBIH SEJAHTERA & BERDAYA SAING"							499.807.013.731		535.708.724.747		553.939.893.630		567.464.857.359		583.719.217.434		594.261.615.170		2.872.718.840.385	
1		Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Dan Daya Saing Sumberdaya Manusia					141.158.491.413		151.447.649.508		157.213.858.390		159.296.197.054		163.491.712.710		162.051.176.838		830.035.031.545	
1	1	Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	69,86	70,266	141.158.491.413	70,672	151.447.649.508	71,078	157.213.858.390	71,484	159.296.197.054	71,89	163.491.712.710	72,296	162.051.176.838	72,296	830.035.031.545	
1	1	1	Sasaran 1 : Meningkatnya akses pendidikan	Rata - Rata Lama Sekolah	Tahun	9,21	9,404	78.334.800.000	9,598	83.629.800.000	9,792	9,986	10,18	102.614.800.000	10,374	103,74	103,74	474.879.000.000	Dinas P & K	
				Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,83	13,066		13,302		13,538	13,774	14,01		14,246	14,246			Dinas P & K	
				Persentase capaian SPM	%	86			87		88	89	90		90	90				
				APK SD	Indeks	107,97	107,30		106,80		106,25	105,79	104,7		103,59	103,59				
				APK SMP	Indeks	87,10	86,90		86,19		85,35	84,13	83,90		82,95	82,95				
				APM SD	Indeks	97,70	98,15		98,65		98,90	99,07	99,31		99,45	99,45				
				APM SMP	Indeks	77,64	78,03	76.119.800.000	78,45	81.414.800.000	79,35	80,45	81,69	81,89	100.264.800.000	81,89	100.264.800.000	81,89	463.534.000.000	
				Persentase SD Terakreditasi Minimal B	%	17,31	17,31		19,23		19,23	20,19	20,19		21,15	21,15				
				Persentase SMP Terakreditasi Minimal B	%	41,67	41,67		44,44		44,44	47,22	47,22		50	50,00				
		2	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase pengembangan kurikulum muatan lokal penunjang proses pendidikan	Persen	68	70	1.675.000.000	72	1.675.000.000	74	1.675.000.000	78	1.675.000.000	80	1.675.000.000	80	8.375.000.000	Dinas P & K	
				Persentase Guru SD Bersertifikat Pendidik	Persen	30,64	31,096	135.000.000	31,552	135.000.000	32,008	135.000.000	32,464	135.000.000	32,92	135.000.000	32,92	675.000.000	Dinas P & K	
				Persentase Guru SMP Bersertifikat Pendidik	Persen	30,2	30,516	135.000.000	30,832	135.000.000	31,148	135.000.000	31,464	135.000.000	31,78	135.000.000	31,78	675.000.000	Dinas P & K	
				Rasio tenaga pendidik terhadap peserta didik (SD)	Persen	10,66	10,962	135.000.000	11,264	135.000.000	11,566	135.000.000	11,868	135.000.000	12,170	270.000.000	12,170	945.000.000	Dinas P & K	
				Rasio tenaga pendidik terhadap peserta didik (SMP)	Persen	12,25	12,67	135.000.000	13,09	135.000.000	13,51	135.000.000	13,93	135.000.000	14,35	135.000.000	14,35	675.000.000	Dinas P & K	
1	1	2	Sasaran 2 : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	69,51	70,09	49.042.714.108	70,67	49.977.228.027	71,26	49.597.639.003	71,84	45.919.469.227	72,42	42.820.330.259	73,00	40.590.310.078	73,00	264.752.594.143
				Angka Kematian Bayi / 1000 kelahiran hidup	rasio	2,08	1,87		1,64		1,41	1,18	0,95		0,72		1			
				Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup	rasio	138,79	137		135		133	131	129		127		127			
				Prevalensi Balita Gizi Buruk	%	0,3	0,3	31.813.406.448	0,2	32.131.540.512	0,2	29.561.017.271	0,2	25.126.864.681	0,1	21.357.834.979	0	18.154.159.732	0	158.144.823.623
				Prevalensi kasus Stunting	%		11		10,8		10,6	10,4	10,2		10		10			
				Rasio Puskesmas per satuan penduduk x 1000	Rasio	0,324144	0,32		0,32		0,32	0,32	0,32		0,32		0			
				Prevalensi Tuberkulosis (TB) /100.000 penduduk	Rasio	143	140		137		134	131	128		125		125			
		2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rasio dokter per 100.000 penduduk	Rasio	27,99	49,71	1.452.884.875	52,30	1.529.352.500	56,24	1.929.352.500	60,16	2.229.352.500	64,05	2.429.352.500	67,92	2.729.352.500	67,92	10.846.762.500
				rasio bidan / 100.000 penduduk	Rasio	215,11	216,78		222,95		229,08	235,17	241,23		247,24		247,24			
				Rasio perawat / 100.000 penduduk	Rasio	109,03	129,79		141,75		153,64	165,44	177,17		188,83		188,83			
		3	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Jumlah sertifikat laek higien	Sertifikat	0	0	657.993.750	5	692.625.000	8	1.002.625.000	10	1.232.625.000	13	1.472.625.000	16	1.732.625.000	16	6.133.125.000
				Jumlah Rekomendasi Ijin Apotek/Toko Obat	Rekomendasi	6	8		10		12	15	17		20		20			
				Jumlah Desa Siaga Aktif	desa	104	107		110		113	116	119		122		122			
				Jumlah posyandu aktif	posyandu		165	4.034.211.100	165	4.246.538.000	165	5.546.538.000	165	5.602.003.380	165	5.658.023.414	165	5.714.603.648	165	30.801.917.542
				Persentase Rumah Tangga ber PHBS	%	85	87		89		91	93	94		95		95			
				Rata-rata Kunjungan Rawat Jalan Per Hari	Rawat Jalan	10			12		17	23	29		35		35			
				Length Of Stay (LOS)/Rata-rata Lama Hari Dirawat	Hari	9-8		8.637.670.435	8-7	8.724.047.139	7-6	8.811.287.611	6-5	8.899.400.487	5-4	8.988.394.492	4-3	9.258.046.326	4-3	44.681.176.055
				Bed Occupancy Rate (BOR)/ Tingkat Penggunaan Tempat Tidur	%	20			35		60	75	80		85		85			

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat daerah Penanggungjawab	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026					
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	6	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Emergency Respon Time Rate Kurang Dari 5 Menit	%		40	2.446.547.500	50	2.568.874.875	70	2.645.941.121	80	2.725.319.355	90	2.807.078.936	100	2.891.291.304	100	13.638.505.590	RSUD
	7	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Kecepatan Pelayanan Resep Obat Jadi Kurang dari 30 Menit	%		40	-	50	54.250.000	70	55.877.500	80	57.553.825	90	59.280.440	100	61.058.853	100	288.020.618	RSUD
	8	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Masyarakat yang Diberdayakan	%		70	-	80	30.000.000	90	45.000.000	100	46.350.000	90	47.740.500	100	49.172.715	100	218.263.215	RSUD
1	3	Sasaran 3 : Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan pengarusutamaan hak anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	86,17	86,413	8.348.485.806	86,656667	8.765.910.096	86,9	9.028.887.399	87,14333	9.299.754.021	87,3867	9.578.746.642	87,63	9.866.109.041	87,63	46.539.407.200	
			Kota Layak Anak	Kategori	Pratama	Pratama		Pratama		Pratama		Madya		Madya		Madya		Madya		
	1	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Perempuan Yang Menduduki Jabatan Publik	%		7,69	151.409.000	7,87	158.979.450	7,96	163.748.834	8,05	168.661.299	8,14	173.721.137	8,23	178.932.772	8,23	844.043.491	DPPPA
	2	Program Perlindungan Perempuan	Jumlah Perempuan korban kekerasan yang mendapat pelayanan/ditangani	Orang	3	3	66.342.750	2	69.659.888	2	71.749.684	1	73.902.175	1	76.119.240	1	78.402.817	1	369.833.803	DPPPA
	3	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase peningkatan kualitas keluarga	%	100	100	52.137.000	100	54.743.850	100	56.386.166	100	58.077.750	100	59.820.083	100	61.614.685	100	290.642.534	DPPPA
	4	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Persentase pengelolaan data gender dan anak	%	100	100	21.599.500	100	22.679.475	100	23.359.859	100	24.060.655	100	24.782.475	100	25.525.949	100	120.408.413	DPPPA
	5	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Persentase Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	%		55,25	160.256.500	60	168.269.325	72	173.317.405	73	178.516.927	80	183.872.435	88	189.388.608	92	893.364.699	DPPPA
	6	Program Perlindungan Khusus Anak	Jumlah korban kekerasan anak yang ditindaklanjuti	Orang	3	3	31.237.000	2	32.798.850	2	33.782.816	1	34.796.300	1	35.840.189	1	36.915.395	1	174.133.549	DPPPA
	7	Program Pengendalian Penduduk	Persentase pertumbuhan penduduk	%		6,71	751.886.056	7,06	789.480.359	7,41	813.164.770	7,76	837.559.713	8,11	862.686.504	8,46	888.567.099	8,46	4.191.458.444	
	8	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Jumlah Peserta KB Aktif	Orang	11.786	11.786	5.963.313.000	11.871	6.261.478.650	11.923	6.449.323.010	11.957	6.642.802.700	11.973	6.842.086.781	12.051	7.047.349.384	12.051	33.243.040.524	DPPKB
	9	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Keluarga Sejahtera	%		81,58	1.150.305.000	81,82	1.207.820.250	81,94	1.244.054.858	82,06	1.281.376.503	82,18	1.319.817.798	82,30	1.359.412.332	82,30	6.412.481.741	DPPKB
		Cakupan PUS Unmetneed	%	0,09	0,09	0,13		0,07		0,05		0,03		0,01		0,01				
1	4	Sasaran 4 : Meningkatkan Sumberdaya Manusia Yang Kompeten dan Produktif	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	74,45	75,14667	240.027.313	75,8433333	252.178.679	76,54	260.535.289	77,23667	269.186.116	77,9333	278.142.381	78,63	287.415.771	78,63	1.347.458.236	
	1	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase Tersedianya Perencanaan Tenaga Kerja	%	100	100	30.000.000	100	31.650.000	100	33.390.750	100	35.227.241	100	37.164.740	100	39.208.800	100	176.641.531	Transnaker
	2	Program Penempatan Tenaga Kerja	Besaran Pencari Kerja Yang ditempatkan	Orang	306	306	58.327.000	349	61.243.350	351	63.080.651	367	64.973.070	397	66.922.262	403	68.929.930	403	325.149.263	Transnaker
	3	Program Hubungan Industrial	Persentase Penyelesaian Kasus Hubungan Industrial	%	0	100	42.862.063	100	45.005.166	100	46.355.321	100	47.745.981	100	49.178.360	100	50.653.711	100	238.938.539	Transnaker
	4	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat Pelatihan berbasis Kompetensi	Orang	70	70	108.838.250	75	114.280.163	77	117.708.567	80	121.239.824	83	124.877.019	85	128.623.330	85	606.728.903	UPT BLK
1	5	Sasaran 5 : Meningkatkan ketahanan pangan	Skor Pola Pangan Harapan	Skor	79,6	80,52	1.808.647.494	81,53	5.267.094.725	82,56	4.709.895.577	83,56	3.971.023.535	84,58	4.314.570.348	85,58	4.690.865.176	85,58	23.640.268.858	
	1	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Persentase Desa Mandiri Pangan	Persen		3,14	370.000.000	6,29	1.638.133.000	9,43	1.306.196.300	12,58	398.850.000	15,72	438.735.000	18,87	482.608.500	18,87	4.264.522.800	Ketapang
	2	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Desa Lumbung Pangan	Persen		2,52	686.819.497	5,03	2.181.668.753	7,55	1.869.658.241	10,60	1.936.724.065	12,58	2.130.396.471	15,09	2.343.436.119	15,09	10.461.883.649	Ketapang
	3	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Tingkat Penguatan Cadangan Pangan	%	100	100	21.394.500	100	323.590.500	100	348.449.550	100	383.294.505	100	421.623.956	100	463.786.351	100	1.940.744.862	Ketapang
			Persentase penanganan kerawanan pangan	%	100	100		100		100		100		100						
	4	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Ketersediaan energi dan protein perkapita	Kkl/Kapita/Hari		2.753	43.614.000	2.811	402.542.000	2.870	442.796.200	2.928	487.075.820	2.986	535.783.402	3.046	589.361.742	3.046	2.457.559.164	Ketapang
				Gr/Kapita/Hari		70,86		72,27		75,34		76,85		78,39		79,95		79,95		Ketapang
	5	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor PPH Konsumsi	Skor	79,6	79,6	686.819.497	81,15	721.160.472	81,93	742.795.286	82,70	765.079.145	83,48	788.031.519	84,25	811.672.464	84,25	4.515.558.383	Ketapang
1	6	Sasaran 6 : Meningkatkan penanganan masalah kesejahteraan sosial	Persentase Penurunan Warga Miskin (DTKS/Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)	Persen	13,53	12,87	3.383.816.692	12,21	3.555.437.982	11,55	3.662.101.121	10,89	3.771.964.155	10,23	3.885.123.079	9,57	4.001.676.772	9,57	18.876.303.108	
	1	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase usaha ekonomi keluarga yang mendapatkan pembinaan	%		51,61	2.344.756.042	53,85	2.461.993.844	55,22	2.535.853.659	56,52	2.611.929.269	57,14	2.690.287.147	61,64	2.770.995.762	61,64	13.071.059.682	Dinas Sosial

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat daerah Penanggungjawab
							2021		2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		2	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase DTKS yang memperoleh pelayanan dan rehabilitasi	%		30,09	221.566.900	31,44	235.075.700	34,25	242.127.971	40,00	249.391.810	49,64	256.873.564	59,43	264.579.771	59,43	1.248.048.817	Dinas Sosial
		3	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial	%		27,48	817.493.750	29,18	858.368.438	31,89	884.119.491	36,01	910.643.075	41,84	937.962.368	48,06	966.101.239	48,06	4.557.194.610	Dinas Sosial
2			Misi 2 : Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar dan sarana prasarana kawasan permukiman					44.422.479.725		50.018.455.751		51.519.009.424		53.064.579.707		54.656.517.098		56.296.212.611		265.554.774.590	
2	1		Tujuan 2 : Meningkatkan kualitas infrastruktur wilayah	Persentase Keterhubungan /Konektivitas Wilayah	Persen	85,15	85,84	44.422.479.725	86,53	50.018.455.751	87,22	51.519.009.424	87,91	53.064.579.707	88,6	54.656.517.098	89,29	56.296.212.611	89,29	265.554.774.590	
2	1	1	Sasaran 7 : Meningkatkan kapasitas infrastruktur wilayah	Proporsi Panjang Jalan dan Jembatan Dalam Kondisi Mantap	Persen	84,03	84,8057	31.901.750.996	85,5814	34.541.844.216	86,3571	87,1328	36.645.442.529	87,9085	37.744.805.804	88,684	38.877.149.979	88,6842	183.387.342.070		
			Persentase Daerah Irigasi (DI) Yang Terlayani Jaringan Irigasi	Persen	67,23	67,79	68,35		68,91		70,03			70,59							
		1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Luas Daerah Irigasi Dalam Kondisi Baik	Ha	2650	2.671,6	6.438.600.000	2.693,67	6.760.530.000	2.715,74	6.963.345.900	2.737,81	7.172.246.277	2.759,88	7.387.413.665	2.781,95	7.609.036.075	2.781,95	35.892.571.918	Dinas PUPR
		2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Drainase Yang Terbangun	%		41,48	-	42,91	1.045.005.670	44,34	1.076.355.840	45,77	1.108.646.515	47,20	1.141.905.911	48,63	1.176.163.088	48,63	5.548.077.024	Dinas PUPR
		3	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase isian aplikasi SI-BPB	%		27	631.300.000	38	662.865.000	53	682.750.950	64	703.233.479	85	724.330.483	95	746.060.397	95	3.519.240.309	Dinas PUPR
		4	Program Penyelenggaraan Jalan	Panjang jalan dalam kondisi mantap	Km	588,16	593,59	18.890.555.636	599,02	19.835.083.418	604,45	20.430.135.920	609,88	21.043.039.998	615,31	21.674.331.198	620,74	22.324.561.134	620,74	105.307.151.668	Dinas PUPR
		6	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Ketersediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan (Rambu, Marka, APIIL, Guadrail, Delinator, dll) yang berfungsi baik	%	30	30,00	3.949.302.500	34,39	4.146.767.625	36,58	4.271.170.654	38,78	4.399.305.773	40,97	4.531.284.947	43,16	4.667.223.495	43	22.015.752.494	Dishub
				Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas	%	85	85,00		86,75		87,62		88,50		89,37		90,24				
		7	Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase Pelabuhan Rakyat/Dermaga Rakyat Yang Berfungsi Baik	%	63,64	72,73	1.991.992.860	81,82	2.091.592.503	90,91	2.154.340.278	100	2.218.970.486	100	2.285.539.601	100	2.354.105.789	100	11.104.548.658	Dishub
2	1	2	Sasaran 8 : Terpenuhinya sarana parasarana kawasan permukiman	Persentase kawasan permukiman (Perkotaan/Perdesaan) yang tidak kumuh	Persen	78,45	81,58	12.520.728.729	84,72	15.476.611.535	87,85	15.940.909.882	90,99	16.419.137.178	94,12	16.911.711.293	97,26	17.419.062.632	97,26	82.167.432.520	
				Rasio Akses Air Minum Layak	Persen	48,33	56,86		59,2		61,54		63,88		66,22		68,79				
				Rasio Akses Sanitasi Layak	Persen	36,31	39,28		54,28		56,62		58,96		61,3		63,64				
				Cakupan layanan persampahan	Persen	15,38	18,63		21,88		25,13		28,38		31,63		34,88				
		1	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Perpipaan	Unit	18812	18.853	5.735.526.386	18.894	6.022.302.705	18.935	6.202.971.786	18.976	6.389.060.940	19.017	6.580.732.768	19.058	6.778.154.751	19.058	31.973.222.951	Dinas PUPR
		2	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Jumlah sarana dan prasarana pelayanan persampahan yang berfungsi baik	Unit		5	-	5	375.465.240	6	386.729.197	6	398.331.073	6	410.281.005	6	422.589.435	6	1.993.395.951	Dinas PUPR
		3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Penduduk Berakses Sanitasi Yang Layak	KK	8562,55	8.813	1.953.358.363	9063	2.051.026.281	9313	2.112.557.070	9563	2.175.933.782	9813	2.241.211.795	10.063	2.308.448.149	10.063	10.889.177.077	Dinas PUPR
		4	Program Pengembangan Perumahan	Persentase pembangunan perumahan untuk korban bencana alam	%		0	-	5	1.049.813.240	5	1.081.307.637	5	1.113.746.866	5	1.147.159.272	5	1.181.574.050	25	5.573.601.066	Dinas Perumahan
		5	Program Kawasan Permukiman	Jumlah rumah layak huni	Unit	12.766	12.816	2.786.883.980	12.896	2.926.228.179	12.996	3.014.015.024	13.096	3.104.435.475	13.196	3.197.568.539	13.296	3.293.495.596	13.296	15.535.742.813	Dinas Perumahan
		6	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh Yang ditangani	Ha	76,83	76,83	-	76,83	904.567.890	76,83	931.704.927	76,83	959.656.075	76,83	988.445.757	76,83	1.018.099.129	384	4.802.473.777	Dinas Perumahan

Kode		Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat daerah Penanggungjawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase pembangunan sarana dan prasarana dan utilitas umum	%		100	2.044.960.000	100	2.147.208.000	100	2.211.624.240	100	2.277.972.967	100	2.346.312.156	100	2.416.701.521	100	11.399.818.884	Dinas Perumahan
3		Misi 3 : Mewujudkan keadilan sosial dan nilai tambah dalam pengelolaan sumberdaya alam guna meningkatkan daya saing ekonomi					25.683.868.369		28.870.613.225		30.236.025.223		31.128.448.930		32.062.302.398		33.024.171.470		155.321.561.246	
3	1	Tujuan 3 : Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	-0,72	4,9	25.683.868.369	5,238	28.870.613.225	5,576	30.236.025.223	5,914	31.128.448.930	6,252	32.062.302.398	6,59	33.024.171.470	6,59	155.321.561.246	
	PDRB Perkapita		Rp. Juta/Iiwa/Tah un	60,847	61,178	61,508		61,839		62,169		62,500		62,831		62,831				
	Tingkat Pengangguran Terbuka		Persen	3,79	3,747	3,704		3,661		3,618		3,575		3,532		3,532				
	Indeks Gini			0,388	0,384	0,380		0,376		0,372		0,368		0,364		0,364				
	Tingkat Kemiskinan		Persen	13,53	13,4	13,27		13,14		13,01		12,88		12,75		12,75				
3	1	Sasaran 9 : Meningkatkan pertumbuhan sektor - sektor unggulan daerah	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Persen	39,75	39,888	24.950.999.755	40,026	27.685.196.650	40,164	29.015.046.151	40,302	29.885.497.536	40,44	30.782.062.462	40,578	31.705.524.336	40,578	149.073.327.135	
	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertambangan dan Penggalian		Persen	21,24	21,29	21,34		21,39		21,44		21,49		21,54		21,54				
	Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan		Persen	11,78	11,802	11,824		11,846		11,868		11,89		11,912		11,912				
	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan		Persen	1,13	1,138	1,146		1,154		1,162		1,17		1,178		1,178				
	Persentase PAD Sektor Pariwisata		Persen	0,033462	0,043462	0,0534622		0,063462		0,073462		0,08346		0,0935		0,09346				
	Nilai Omset Usaha Koperasi		Rp. ribu	705.375	741.587	777.799		814.011		850.223		886.435		922.647		922.647				
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap		Persen	40	50	60		70		80		90		100		100				
		Produktivitas perikanan tangkap	Ton	15059	15,059	15,149	15,239	15,419	15,509	15,599	15,599	15,599	15,599	15,599	15,599	15,599	15,599	15,599	DKP	
	2	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produktivitas perikanan budidaya	Ton	8818,73	8,879,27	2.918.916.000	8,939,81	3.064.861.800	9,000,35	3.156.807.654	9,060,89	3.251.511.884	9,121,43	3.349.057.240	9,171,43	3.449.528.957	9,222,43	16.271.767.535	DKP
		Persentase kelompok pembudidaya yang dibina	persen	40	50	60		70		80		85		95		95				
	3	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Persentase POKMASWAS yang dibina	persen	40	45	50.630.000	50	53.161.500	55	54.756.345	60	56.399.035	65	58.091.006	70	59.833.737	70	282.241.623	DKP
	4	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan yang dibina	persen	45	50	263.285.000	55	276.449.250	60	284.742.728	65	293.285.009	70	302.083.560	75	311.146.066	75	1.467.706.613	DKP
	5	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Lama menginap	Hari	1	1	378.055.891	2	396.958.686	2	408.867.446	3	421.133.469	3	433.767.474	4	446.780.498	4	2.107.507.573	Dispar
	6	Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah kunjungan wisata	Jiwa	8187	9.084	944.445.717	9.981	991.668.003	10.878	1.021.418.043	11.775	1.052.060.584	12.672	1.083.622.402	13.569	1.116.131.074	13.569	5.264.900.106	Dispar
	7	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase pengembangan prasarana ekonomi kreatif	persen		0	-	10	200.000.000	40	305.987.200	50	315.166.816	55	324.621.820	60	334.360.475	60	1.480.136.312	Dispar
	8	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase pembinaan ekonomi kreatif dan SDM kepariwisataan	persen		100	80.174.626	100	84.183.357	100	86.708.858	100	89.310.124	100	91.989.427	100	94.749.110	100	446.940.877	Dispar
	10	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produktivitas tanaman perkebunan	Kw/Ha	417,3		-		356.002.570		366.682.647		377.683.127		389.013.620		400.684.029		1.890.065.993	Dinas Perkebunan
	11	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Produksi tanaman Perkebunan	Ton	2.011	2.092	2.494.590.000	2173	2.619.319.500	2.254	2.697.899.085	2.335	2.778.836.058	2.416	2.862.201.139	2.497	2.948.067.173	2.497	13.906.322.955	Dinas Perkebunan
			Jumlah Produksi tanaman Hortikultura	kg	166.040	166.119		166.198		166.277		166.356		166.435		166.514		166.514		
	12	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase luas areal pengendalian OPT	persen		0	98.750.250	14	98.750.250	14	101.712.758	14	104.764.140	14	107.907.064	14	111.144.276	70	524.278.489	Dinas Perkebunan
	13	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase peningkatan SDM kelembagaan kelompok tani	persen		100	70.547.500	100	74.074.875	100	76.297.121	100	78.586.035	100	80.943.616	100	83.371.924	100	393.273.571	Dinas Perkebunan
	14	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produktivitas tanaman pangan	Kw/Ha		432,71	63.000.000	463	66.150.000	493,29	68.134.500	523,58	70.178.535	553,87	72.283.891	584,16	74.452.408	584,16	351.199.334	Dinas Tanaman Pangan & Peternakan
	15	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Produksi tanaman pangan	ton		107.046	7.579.280.326	107.417	7.958.244.342	107.788	8.196.991.673	108.159	8.442.901.423	108.530	8.696.188.465	108.901	8.957.074.119	108.901	42.251.400.022	Dinas Tanaman Pangan & Peternakan
			Jumlah produksi peternakan (Daging dan Telur)	kg	216.361	217.655		243.410		254.605		265.856		305.881		342.089				
	16	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase pengendalian penyakit hewan ternak	persen		50	137.911.288	60	144.806.852	60	149.151.058	65	153.625.590	70	158.234.357	70	162.981.388	70	768.799.246	Dinas Tanaman Pangan & Peternakan

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat daerah Penanggungjawab	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026					
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	17	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase pengendalian bencana pertanian dan penanggulangannya	%	100	524.282.750	100	550.496.888	100	567.011.794	100	584.022.148	100	601.542.812	100	619.589.097	100	2.922.662.739	Dinas Tanaman Pangan & Peternakan	
	18	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase izin yang diterbitkan	persen	80	-	85	125.486.500	88	129.251.095	90	133.128.628	95	137.122.487	95	141.236.161	95	666.224.871	Dinas Tanaman Pangan & Peternakan	
	19	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase peningkatan SDM kelembagaan kelompok tani	persen	100	406.855.003	100	427.197.753	100	440.013.686	100	453.214.096	100	466.810.519	100	480.814.835	100	2.268.050.889	Dinas Tanaman Pangan & Peternakan	
	20	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase pengajuan SKA yang diproses dan ditindaklanjuti	persen	0	115.460.000	10	121.233.000	20	124.869.990	30	128.616.090	40	132.474.572	50	136.448.810	50	643.642.462	Disperindag	
	21	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pasar sehat	pasar	29,41	1.600.118.350	52,94	1.680.124.268	64,71	1.730.527.996	76,47	1.782.443.835	88,24	1.835.917.150	100,00	1.890.994.665	100	8.920.007.914	Disperindag	
		Persentase peningkatan pelaku usaha perdagangan	pasar	64,71	76,47		82,35		88,24		94,12		100,00		100					
	22	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase stabilisasi jenis barang penting	persen	40	157.804.962	45	165.695.210	45	170.666.066	50	175.786.048	50	181.059.630	55	186.491.419	55	879.698.373	Disperindag	
	23	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Jumlah Omset yang dihasilkan dari Usaha Sektor Perdagangan	persen	51,28	51,49	204.129.000	51,7	214.335.450	51,91	220.765.514	52,12	227.388.479	52,33	234.210.133	52,54	241.236.437	52,54	1.137.936.013	Disperindag
	24	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Kontribusi Sektor Perdagangan	persen	12,6	-	13,42	-	14,24	-	15,06	-	15,88	-	16,70	-	16,70	-	Disperindag	
	25	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Jumlah Omzet yang dihasilkan dari Sektor Usaha Perindustrian	%	63,3	792.984.541	63,55	832.633.768	63,80	857.612.781	64,05	883.341.165	64,30	909.841.399	64,55	937.136.641	64,80	4.420.565.755	Disperindag	
	26	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Persentase IUI dan IUKI efektif	%	20	20	-	20	86.754.850	20	89.357.496	20	92.038.220	20	94.799.367	20	97.643.348	20	460.593.281	Disperindag
	27	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Persentase ketersediaan dperencanaan daerah kawasan transmigrasi	persen	100	22.019.000	100	23.119.950	100	423.119.950	100	435.813.549	100	448.887.955	100	462.354.594	100	1.793.295.997	Transnaker	
	28	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase pembangunan sarana dan prasarana di kawasan transmigrasi	persen	100	1.939.332.113	100	2.036.298.719	100	2.097.387.680	100	2.160.309.311	100	2.225.118.590	100	2.291.872.148	100	10.810.986.447	Transnaker	
	29	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase warga transmigrasi yang mandiri	persen	100	64.454.000	100	67.676.700	100	69.707.001	100	71.798.211	100	73.952.157	100	76.170.722	100	359.304.791	Transnaker	
	30	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi aktif yang dibina	Koperasi	22,32	74.845.063	31,25	78.587.316	35,71	80.944.936	37,95	83.373.284	40,18	85.874.482	42,41	88.450.717	42,41	417.230.734	Dikop & UMKM	
	31	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	Persentase koperasi sehat	%	16	39.084.500	17	41.038.725	18	42.269.887	19	43.537.983	20	44.844.123	21	46.189.447	21	217.880.164	Dikop & UMKM	
	32	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase peningkatan koperasi yang mengikuti pelatihan	%	55,74	-	67,57	155.837.000	74,32	160.512.110	81,08	165.327.473	84,46	170.287.297	87,84	175.395.916	87,84	827.359.797	Dikop & UMKM	
	33	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase koperasi aktif	%	76,69	76,01	204.520.000	76,35	214.746.000	77,03	221.188.380	77,70	227.824.031	79,39	234.658.752	81,08	241.698.515	81	1.140.115.679	Dikop & UMKM
	34	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase wirausaha baru	%	0,90	439.455.000	0,39	461.427.750	0,76	475.270.583	0,77	489.528.700	0,78	504.214.561	0,79	519.340.998	0,79	2.449.782.591	Dikop & UMKM	
	35	Program Pengembangan UMKM	Jumlah UMKM yang dibina	UMKM	-	50	567.503.500	50	584.528.605	50	602.064.463	50	620.126.397	50	638.730.189	50	3.012.953.154	Dikop & UMKM		
3	1	2 Sasaran 10 : Meningkatkan investasi daerah	Pertumbuhan Investasi PMDN dan PMA	Persen	11,86	13,488	732.868.614	15,116	1.185.416.575	16,744	1.220.979.072	18,372	1.242.951.394	20	1.280.239.936	21,628	1.318.647.134	21,628	6.248.234.111	
	1	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah Perbup yang mendukung iklim Investasi	Perbup	0	-	2	250.000.000	3	257.500.000	4	250.567.950	5	258.084.989	6	265.827.538	6	1.281.980.477	DPMPSTP	
	2	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah nilai investasi PMA/PMDN	Rp (milyar)	163,88	180,99	118.628.000	198,1	124.559.400	215,21	128.296.182	232,32	132.145.067	249,43	136.109.419	266,54	140.192.702	266,54	661.302.771	DPMPSTP
	3	Program Pelayanan Penanaman Modal	Lama proses perizinan	hari	2	2	291.667.614	2	306.250.995	2	315.438.525	2	324.901.680	2	334.648.731	2	344.688.193	2	1.625.928.123	DPMPSTP
	4	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase pengawasan investasi	%	100	322.573.000	100	338.701.650	100	348.862.700	100	359.328.580	100	370.108.438	100	381.211.691	100	1.798.213.059	DPMPSTP	
	5	Program Pengelolaan data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Jumlah izin yang diterbitkan	Izin	290	-	345	165.904.530	398	170.881.666	442	176.008.116	495	181.288.359	500	186.727.010	500	880.809.681	DPMPSTP	
		Survey Kepuasan Masyarakat	%	76,61	77,24		77,78		78,45		79,21		79,86		80,36		80,36			

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat daerah Penanggungjawab	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp.		
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
4		Misi 4 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, mendorong reformasi birokrasi, dan pelayanan publik yang prima				274.330.703.231		290.761.193.580		299.973.923.530		308.581.302.293		317.723.385.973		326.702.056.018		1.544.831.956.394		
4	1	Tujuan 4 : Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	50,08	50,242	274.330.703.231	50,404	290.761.193.580	50,566	299.973.923.530	50,728	308.581.302.293	50,89	317.723.385.973	51,052	326.702.056.018	51,052	1.544.831.956.394	
4	1	Sasaran 11 : Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah	Nilai SAKIP	Kategori	B	B	249.716.836.009	BB	264.601.887.730	BB	272.946.832.691	BB	280.739.868.730	BB	289.046.709.402	BB	297.165.079.150	BB	1.405.590.472.703	
			Opini BPK	Kategori	WTP	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		
	1	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase sistem data dan statistik yang terintegrasi	Persen	-	25	72.187.500	35	440.000.000	45	887.250.000	55	969.112.500	65	1.102.568.125	75	1.157.696.531	75	4.628.814.656	Bappeda
	2	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Sarana dan Prasarana keagamaan Yang Dibangun/Rehabilitasi	unit	64	64	6.310.969.000	64	6.626.517.450	64	6.825.312.974	64	7.030.072.363	64	7.240.974.534	64	7.458.203.770	64	35.181.081.089	Setda
			Nilai EKPPD	nilai	baik	baik		baik		baik		baik		baik		baik				
	3	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase penyerapan anggaran pembangunan dan realisasinya	persen	88	90	884.363.813	93	928.582.004	95	956.439.464	95	985.132.648	95,5	1.014.686.627	96	1.045.127.226	96	4.929.967.968	Setda
	4	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase konsistensi pelaksanaan pembangunan	persen	93,35	93,92	12.294.019.864	94,49	13.575.662.377	95,06	13.973.878.358	95,63	14.242.890.061	96,2	14.596.930.883	96,77	14.843.144.511	96,77	71.571.808.691	Bappeda
			Persentase Keterukuran Indikator Perencanaan	persen	100	100,00		100		100		100		100		100		100		
			Persentase Tingkat Partisipatif Perencanaan	persen	12,77	15,27		17,77		20,27		22,27		25,27		27,77		27,77		
	5	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase sinergitas perencanaan	persen	74,16	75	11.476.479.364	75,06	12.714.736.207	75,51	13.087.124.403	75,96	13.329.533.488	76,41	13.656.173.612	76,86	13.874.164.522	76,86	67.001.034.732	Bappeda
			Persentase OPD Yang Pencapaian Kinerja Sesuai Target	persen	77,27	78		79,21		80,18		81,15		82,12		83,09		83,09		
	6	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase implementasi rencana kelitbangan.	Persen		25	339.302.500	30	1.020.700.500	35	1.042.267.625	40	923.331.006	45	877.785.057	50	712.424.309	50	4.915.810.997	Bappeda
	7	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Penetapan APBD/APBDP tepat waktu	Tepat Waktu		Tepat Waktu	197.124.097.274	Tepat Waktu	206.980.302.138	Tepat Waktu	213.189.711.202	Tepat Waktu	219.585.402.538	Tepat Waktu	226.172.964.614	Tepat Waktu	232.958.153.552	Tepat Waktu	1.098.886.534.044	BKAD
	8	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase aset pemda yang terinventarisir	persen		90	2.296.133.800	90	2.410.940.490	90	2.483.268.705	90	2.557.766.766	90	2.634.499.769	90	2.713.534.762	90	12.800.010.491	BKAD
	9	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Tingkat kemandirian keuangan daerah (Rasio PAD dibandingkan pendapatan daerah)	persen	1,79	3,38	9.856.204.864	3,72	10.349.015.107	4,31	10.659.485.560	4,53	10.979.270.127	4,84	11.308.648.231	5,12	11.647.907.678	5,12	54.944.326.702	Bapenda
	10	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase kenaikan pendapatan daerah	persen	5,5	27	817.540.500	30	858.417.525	32	884.170.051	35	910.695.152	37	938.016.007	40	966.156.487	40	4.557.455.222	Bapenda
	11	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK	persen		80,44	2.086.908.000	80,5	2.191.253.400	80,56	2.256.991.002	80,62	2.324.700.732	80,69	2.394.441.754	80,75	2.466.275.007	80,75	11.633.661.895	Inspektorat

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat daerah Penanggungjawab	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026					
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	12	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Tingkat leveling kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	level		2	1.280.972.000	2	1.345.020.600	3	1.385.371.218	3	1.426.932.355	3	1.469.740.325	3	1.513.832.535	3	7.140.897.033	Inspektorat
	13	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase pelimpahan wewenang administrasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh camat	Persen		53,48	-	53,91	5.234.500	54,35	5.391.535	54,78	5.553.281	55,22	5.719.879	55,65	5.891.476	55,65	27.790.671	Kecamatan
	14	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya koordinasi dan pengawasan keamanan dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	persen		100	-	100	2.508.645	100	2.583.904	100	2.661.421	100	2.741.264	100	2.823.502	100	13.318.737	Kecamatan
	15	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan	persen		100	-	100	31.456.380	100	32.400.071	100	33.372.074	100	34.373.236	100	35.404.433	100	167.006.194	Kecamatan
	16	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	Persen		57	4.877.657.531	59	5.121.540.408	62	5.275.186.620	66	5.433.442.218	69	5.596.445.485	72	5.764.338.849	72	27.190.953.580	Kecamatan
4	1	2	Sasaran 12 : Terwujudnya birokrasi yang kapabel, optimalnya implementasi SPBE, serta pelayanan publik yang terpercaya	Indeks Maturitas Kelembagaan	Level	1	1		2		3		3		3		3		3	
			Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	1,3	1,38	15.543.275.606	1,46	16.549.505.204	1,54	17.128.996.172	1,62	17.646.396.058	1,7	18.175.787.939	1,78	18.721.061.577	1,78	88.221.746.951	
			Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	3,34	3,41		3,48		3,55		3,62		3,69		3,76		3,76		
			Kepemilikan dokumen kependudukan Berbasis Elektronik	%	100	100	420.946.000	100	441.993.300	100	455.253.099	100	468.910.692	100	482.978.013	100	497.467.353	100	2.346.602.457	Dukcapil
	2	Program Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan dokumen Pencatatan Sipil Berbasis Elektronik	%	95	95	252.838.500	95	265.480.425	100	273.444.838	100	281.648.183	100	290.097.628	100	298.800.557	100	1.409.471.631	Dukcapil
	3	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	OPD Yang Memanfaatkan Data Kependudukan	OPD	4	4	190.766.500	7	200.304.825	8	206.313.970	9	212.503.389	10	218.878.491	11	225.444.845	11	1.063.445.519	Dukcapil
	4	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Jumlah Data Base kependudukan terupdate	Database		1	-	1	240.975.630	1	248.204.899	1	255.651.046	1	263.320.577	1	271.220.195	1	1.279.372.347	Dukcapil
	5	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase Pengelolaan Layanan Pengaduan Berbasis Online Yang didistribusikan ke OPD	%	0	0	192.882.500	25	202.526.625	45	208.602.424	69	214.860.496	75	221.306.311	80	227.945.501	80	1.075.241.357	Diskominfo
	6	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Jumlah Penerapan SPBE	aplikasi	1	1	524.215.000	3	550.425.750	3	566.938.523	5	583.946.678	5	601.465.079	7	619.509.031	7	2.922.285.060	Diskominfo
	7	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Jumlah Organisasi Kepemudaan yang dibina	Organisasi	12	12	1.069.737.617	12	1.123.224.498	12	1.156.921.233	13	1.191.628.870	13	1.227.377.736	13	1.264.199.068	13	5.963.351.404	Dikpora
	8	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Jumlah Cabang Olahraga Yang Berprestasi	Cabor	7	7	4.896.674.876	7	5.141.508.620	8	5.295.753.878	8	5.454.626.495	8	5.618.265.290	8	5.786.813.248	8	27.296.967.531	Dikpora
	9	Program Pembinaan Perpustakaan	Pertumbuhan Pengunjung Perpustakaan Daerah	%		30,00	791.403.275	49,87	830.973.439	50,00	855.902.642	58,13	881.579.721	65,75	908.027.113	69,81	935.267.926	69,81	4.411.750.841	Dinas Perpustakaan
	10	Program Pengelolaan Arsip	Persentase Penyelamatan Arsip Yang Telah Direservasi	persen		13,35	106.476.588	15,23	111.800.417	16,15	115.154.430	27,31	118.609.063	33,05	122.167.335	36,22	125.832.355	36,22	593.563.600	Dinas Perpustakaan
	11	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Persentase perlindungan dan penyelamatan arsip	persen		19,67	238.196.250	23,22	238.196.250	25,32	249.000.000	28,41	260.000.000	32,58	267.800.000	35,69	275.834.000	35,69	1.290.830.250	Dinas Perpustakaan
	12	Program Perizinan Penggunaan Arsip	Jumlah izin penggunaan arsip yang diterbitkan	izin		0	-	0	-	1	79.347.950	1	81.728.389	1	84.180.240	1	86.705.647	1	331.962.226	Dinas Perpustakaan
	13	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Peraturan Daerah Yang Dihasilkan	persen		52	6.859.138.500	54	7.202.095.425	56	7.418.158.288	58	7.640.703.036	60	7.869.924.127	62	8.106.021.851	62	38.236.902.728	Sekwan
4	1	3	Sasaran 13 : Meningkatnya kualitas manajemen ASN	Indeks Merit System	Indeks	162	177	192	8.312.388.116	207	8.989.847.747	222	9.259.543.180	237	9.537.329.475	252	9.823.449.360	252	46.338.177.284	
	1	Program Kepegawaian Daerah	Persentase Penempatan Pegawai Sesuai Kompetensi	persen		71,73	4.156.194.058	73,46	4.364.003.761	75,19	4.494.923.874	76,92	4.629.771.590	78,65	4.768.664.738	80,38	4.911.724.680	80,38	23.169.088.642	BKPSDM
	2	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Peningkatan Kualitas SDM Aparatur	persen		81,81	4.156.194.058	83,12	4.364.003.761	84,43	4.494.923.874	85,74	4.629.771.590	87,05	4.768.664.738	88,36	4.911.724.680	88,36	23.169.088.642	BKPSDM
4	1	4	Sasaran 14 : Meningkatnya kapasitas pemerintahan desa	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,5855	0,594583	0,60366667	881.793.125	0,61275	908.246.919	0,621833	935.494.326	0,63092	963.559.156	0,64	992.465.931	0,64	4.681.559.457	
	1	Program Penataan Desa	Persentase BPD, LPM, dan PKK aktif	persen		100	100	-	85.679.450	100	88.249.834	100	90.897.329	100	93.624.248	100	96.432.976	100	454.883.836	DPMD
	2	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Jumlah Desa Berkembang	Desa		68	68	74	72.299.850	77	74.468.846	79	76.702.911	80	79.003.998	81	81.374.118	81	383.849.723	DPMD
	3	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Penyampaian RKPDes, APBDes, dan Laporan Keuangan Desa Tepat Waktu dan Sesuai Peraturan Bupati	%		81,76	81,76	82,88	332.068.875	83,45	348.317.488	84,01	358.767.013	84,57	369.530.023	85,13	380.615.924	85	1.795.402.767	DPMD
	4	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase 1(satu) BUMDes dalam 1(satu) Desa Yang Aktif	%		100	100	100	367.277.625	100	385.641.506	100	397.210.751	100	409.127.074	100	421.400.886	100	2.047.423.131	DPMD

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat daerah Penanggungjawab		
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp.			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
5		Misi 5 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana				9.064.460.893		9.587.052.078		9.893.463.640		10.208.467.549		10.514.721.576		10.830.163.223		51.033.868.065			
5	1	Tujuan 5 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	58,84	59,67	9.064.460.893	60,5	9.587.052.078	61,33	9.893.463.640	62,16	10.208.467.549	62,99	10.514.721.576	63,82	10.830.163.223	63,82	51.033.868.065		
5	1	1	Sasaran 15 : Terjaganya kualitas pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang	Persentase Ketaatan terhadap Perencanaan Tata Ruang	Persen	80	80,49	2.464.797.000	80,98	2.588.036.850	81,47	2.665.677.956	81,96	2.745.648.294	82,45	2.828.017.743	82,94	2.912.858.275	82,94	13.740.239.118	
		1	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah	%	80	80	1.799.131.000	80,98	1.889.087.550	81,47	1.945.760.177	81,96	2.004.132.982	82,45	2.064.256.971	82,94	2.126.184.680	83	10.029.422.360	Dinas PUPR
		2	Program Penatagunaan Tanah	Persentase penatagunaan tanah untuk wilayah Kabupaten	%		100	665.666.000	100	698.949.300	100	719.917.779	100	741.515.312	100	763.760.772	100	786.673.595	100	3.710.816.758	Setda
5	1	2	Sasaran 16 : Menurunnya tingkat pencemaran air dan udara	Indeks Kualitas Air dan Udara	Indeks	92,576	93,3168	4.181.303.505	94,0576	4.184.658.480	94,7984	4.328.998.235	95,5392	4.477.068.182	96,28	4.611.380.227	97,021	4.749.721.634	97,0208	22.351.826.758	
		1	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan yang berkualitas	Persen		100	1.000.000.000	100	1.050.000.000	100	1.081.500.000	100	1.113.945.000	100	1.147.363.350	100	1.181.784.251	100	5.574.592.601	DLH
		2	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	nilai	1,576	1,76		1,94		2,12		2,30		2,48		2,66		2,66		
			Indeks Kualitas Udara	nilai	91	91,09	199.268.550	91,19	209.231.978	91,38	215.508.937	91,57	221.974.205	91,76	228.633.431	91,95	235.492.434	92,14	1.110.840.984		
		3	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Indeks Tutupan Lahan	%	77,68	77,68	2.307.479.830	77,86	2.422.853.822	77,95	2.495.539.436	78,04	2.570.405.619	78,13	2.647.517.788	78,22	2.726.943.321	78,22	12.863.259.986	DLH
		4	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase usaha yang memilah B3 dan limbah B3	%		65	36.311.750	68	38.127.338	70	39.271.158	75	40.449.292	78	41.662.771	80	42.912.654	80	202.423.213	DLH
		5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan serta pengelolaan LH (PPLH)	%		82	49.197.750	85	51.657.638	90	53.207.367	95	54.803.588	100	56.447.695	100	58.141.126	100	274.257.413	DLH
		6	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase ASN bersertifikat AMDAL yang profesional	%		60	19.724.000	70	40.000.000	80	60.000.000	90	80.000.000	100	82.400.000	100	84.872.000	100	347.272.000	DLH
		7	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase kelompok masyarakat yang mendapat penghargaan LH	%		50	31.329.750	60	32.896.238	63	33.883.125	65	34.899.618	68	35.946.607	70	37.025.005	70	174.650.593	DLH
		8	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase aduan LH yang diselesaikan	%		100	16.993.875	100	17.843.569	100	18.378.876	100	18.930.242	100	19.498.149	100	20.083.094	100	94.733.930	DLH
		9	Program Pengelolaan Persampahan	Cakupan wilayah pelayanan persampahan	%		15,38	20.998.000	15,38	22.047.900	15,38	22.709.337	15,38	23.390.617	15,38	24.092.336	15,38	24.815.106	15	117.055.295	DLH
		10	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH	Persentase MHA yang Terakui	%		100,00	500.000.000	100,00	300.000.000	100,00	309.000.000	100,00	318.270.000	100,00	327.818.100	100,00	337.652.643	100	1.592.740.743	DLH
5	1	3	Sasaran 17 : Terwujudnya tata kelola dan manajemen bencana	Indeks Resiko Bencana	Indeks	172,4	170,71	2.418.360.388	169,02	2.814.356.747	167,33	2.898.787.450	165,64	2.985.751.073	163,95	3.075.323.606	162,26	3.167.583.314	162,26	14.941.802.190	
		1	Program Penanggulangan Bencana	Jumlah Desa Tangguh Bencana	Desa	1	2	1.599.761.660	9	1.679.749.743	9	1.730.142.235	9	1.782.046.502	9	1.835.507.897	9	1.890.573.134	45	8.918.019.512	BPBD
		2	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap (Respo n Time Rate) Daerah WMK	%	66	67,3	-	68,6	275.078.340	69,9	283.330.690	71,2	291.830.611	72,5	300.585.529	73,8	309.603.095	73,8	1.460.428.265	Damkar
		3	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Angka Kriminalitas	kasus	34	30	158.419.500	26	166.340.475	23	171.330.689	20	176.470.610	18	181.764.728	17	187.217.670	17	883.124.172	Satpol PP,
		4	Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat	%	100	100	660.179.228	100	693.188.189	100	713.983.835	100	735.403.350	100	757.465.451	100	780.189.414	100	3.680.230.239	Dinas Sosial
6		Misi 6 : Membangun peradaban masyarakat yang bertumpu pada nilai - nilai keagamaan dan kebudayaan lokal				5.147.010.100		5.023.760.605		5.103.613.423		5.185.861.826		5.270.577.681		5.357.835.011		25.941.648.546			
6	1	Tujuan 6 : Melestarikan seni budaya lokal	Persentase kapasitas lembaga adat yang dibina	Persen	100	100	2.948.000.000	100	2.714.800.000	100	2.725.384.000	100	2.736.285.520	100	2.747.514.086	100	2.759.079.508	100	13.683.063.114		
6	1	1	Sasaran 18 : Meningkatkan intensitas event seni budaya yang diselenggarakan	Jumlah penyelenggaraan event seni budaya	Nilai	0	1	2.948.000.000	2	2.714.800.000	3	2.725.384.000	4	2.736.285.520	5	2.747.514.086	5	2.759.079.508	5	13.683.063.114	
		1	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase budaya lokal daerah yang dikembangkan	Persen	57	57	2.312.000.000	59	2.312.000.000	61	2.312.000.000	62	2.312.000.000	65	2.312.000.000	65	2.312.000.000	65	11.560.000.000	Dinas P & K

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat daerah Penanggungjawab	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp.		
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	2	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga adat Yang dibina	lembaga	8	8	336.000.000	8	352.800.000	8	363.384.000	8	374.285.520	8	385.514.086	8	397.079.508	8	1.873.063.114	Dinas P & K
	3	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan	Situs	4	4	300.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	4	250.000.000	Dinas P & K
6	2	Tujuan 7 : Mewujudkan kehidupan masyarakat yang dilandasi nilai – nilai kerukunan beragama	Indeks kerukunan beragama	Indeks	73,92	74,29	2.199.010.100	74,66	2.308.960.605	75,03	2.378.229.423	75,4	2.449.576.306	75,77	2.523.063.595	76,14	2.598.755.503	76,14	12.258.585.432	
6	2	1 Sasaran 19 : Meningkatnya pengelolaan potensi konflik sosial	Persentase Pengelolaan Potensi Konflik Sosial	Persen	100	100	2.199.010.100	100	2.308.960.605	100	2.378.229.423	100	2.449.576.306	100	2.523.063.595	100	2.598.755.503	100	12.258.585.432	
	1	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Penduduk/Etnis/Suku/Agama/Ormas Yang Memahami Nilai-Nilai Kehidupan Politik dan Berbangsa	persen		78,31	108.470.000	78,62	113.893.500	78,93	117.310.305	79,24	120.829.614	79,55	124.454.503	79,86	128.188.138	79,86	604.676.059	Kesbangpol
	2	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Partisipasi Politik Pemilih Pada Pemilihan Umum	persen		93,13	747.883.100	93,3	785.277.255	93,47	808.835.573	93,64	833.100.640	93,81	858.093.659	93,98	883.836.469	93,98	4.169.143.595	Kesbangpol
	3	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan kabupaten	persen		100	207.356.000	100	217.723.800	100	224.255.514	100	230.983.179	100	237.912.675	100	245.050.055	100	1.155.925.223	Kesbangpol
	4	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase pembinaan ketahanan bidang politik, sosial dan budaya	persen		100	375.227.500	100	393.988.875	100	405.808.541	100	417.982.797	100	430.522.281	100	443.437.950	100	2.091.740.445	Kesbangpol
	5	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Penanganan Potensi Konflik Tidak menjadi Konflik	100		100	760.073.500	100	798.077.175	100	822.019.490	100	846.680.075	100	872.080.477	100	898.242.892	100	4.237.100.109	Kesbangpol

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH



7.1 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN

Berdasarkan gambaran keuangan daerah yang dijelaskan dalam bab III, maka proyeksi belanja tahun 2021-2026 ditunjukkan dalam gambar 7.1 berikut.

Tabel 7.1
Kerangka Pendanaan Pembangunan Tahun 2021 - 2026

Kode	Uraian	Tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
5	BELANJA	1.015.281.912.900	1.264.979.787.331	1.040.002.874.555	985.498.181.177	1.015.343.609.521	1.049.492.401.453
5.1	BELANJA OPERASI	653.241.399.185	659.840.263.854	665.389.618.333	671.261.037.840	677.498.045.532	684.150.920.539
5.1.01	Belanja Pegawai	290.851.822.141	293.324.062.629	295.817.317.162	298.331.764.357	300.867.584.354	303.424.958.821
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	349.032.635.944	349.905.217.534	350.779.980.578	351.656.930.529	352.536.072.855	353.417.413.038
5.1.03	Belanja Hibah	13.356.941.100	14.991.830.691	16.826.830.767	18.886.434.853	21.198.134.479	23.792.786.139
5.1.04	Belanja Bantuan Sosial	-	1.619.153.000	1.965.489.827	2.385.908.101	2.896.253.843	3.515.762.540
5.2	BELANJA MODAL	171.725.154.876	412.134.853.668	178.787.560.123	115.442.824.896	135.916.957.944	160.092.359.506
5.2.1	Belanja Modal Tanah	3.100.000.000	3.107.440.000	3.114.897.856	3.122.373.611	3.129.867.308	3.137.378.989
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	66.563.761.305	67.279.230.502	71.208.840.463	36.874.545.831	47.312.412.440	47.500.887.195
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	38.940.304.156	150.415.375.867	39.896.243.452	30.382.977.622	40.875.649.949	41.374.332.878
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	59.076.866.462	187.261.083.630	60.468.166.962	40.935.640.444	40.443.675.306	63.896.151.102
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.044.222.953	4.071.723.669	4.099.411.390	4.127.287.387	4.155.352.942	4.183.609.343
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.790.203.639	6.597.358.026	7.517.029.735	8.564.903.680	9.758.851.253	11.119.235.118
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	5.790.203.639	6.597.358.026	7.517.029.735	8.564.903.680	9.758.851.253	11.119.235.118
5.4	BELANJA TRANSFER	184.525.155.200	186.407.311.783	188.308.666.363	190.229.414.760	192.169.754.791	194.129.886.290
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	184.525.155.200	186.407.311.783	188.308.666.363	190.229.414.760	192.169.754.791	194.129.886.290
	Jumlah Belanja	1.015.281.912.900	1.264.979.787.331	1.040.002.874.555	985.498.181.177	1.015.343.609.521	1.049.492.401.453

Sumber : Bappeda Kab. Konawe Utara, 2021

7.2 PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Indikasi rencana program dalam RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021-2026 merupakan rencana program pembangunan daerah yang menunjang pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Program Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana dimutakhirkan melalui Kepmendagri Nomor 050-3708 tahun 2020.

Program Perangkat Daerah untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah terbagi ke dalam 6 (enam) urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, 5 (lima) urusan pilihan, dan 2 (dua) Unsur pendukung urusan pemerintahan, 5 (lima) unsur penunjang urusan pemerintahan, 1 (satu) unsur pengawasan urusan pemerintahan, 1 (satu) unsur kewilayahan, 1 (satu) unsur pemerintahan umum, dan Non Urusan.

7.2.1 URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

7.2.1.1 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

1. Program Pengelolaan Pendidikan,
2. Program Pengembangan Kurikulum
3. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

7.2.1.2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

7.2.1.3 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
2. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
3. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional
4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
5. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase

6. Program Pengembangan Permukiman
7. Program Penataan Bangunan Gedung
8. Program Penyelenggaraan Jalan
9. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
10. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

7.2.1.4 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

1. Program Pengembangan Perumahan
2. Program Kawasan Permukiman
3. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
4. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)

7.2.1.5 Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

1. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
2. Program Penanggulangan Bencana
3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
4. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
5. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
6. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
7. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
8. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

7.2.1.6 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

1. Program Pemberdayaan Sosial
2. Program Rehabilitasi Sosial

3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
4. Program Penanganan Bencana

7.2.2. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

7.2.2.1 Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

1. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
2. Program Penempatan Tenaga Kerja
3. Program Hubungan Industrial

7.2.2.2 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

1. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
2. Program Perlindungan Perempuan
3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
4. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
5. Program Perlindungan Khusus Anak

7.2.2.3 Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

1. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
2. Program Penanganan Kerawanan Pangan
3. Program Pengawasan Keamanan Pangan

7.2.2.4 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

1. Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan
2. Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee

7.2.2.5 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
2. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
6. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
7. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
8. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
9. Program Pengelolaan Persampahan
10. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH.

7.2.2.6 Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

1. Program Pendaftaran Penduduk
2. Program Pencatatan Sipil

7.2.2.7 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

1. Program Peningkatan Kerjasama Desa
2. Program Administrasi Pemerintahan Desa
3. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

7.2.2.8 Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

1. Program Pengendalian Penduduk
2. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
3. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

7.2.2.9 Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

7.2.2.10 Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

1. Program Informasi Dan Komunikasi Publik
2. Program Aplikasi Informatika

7.2.2.11 Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

1. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
2. Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi
3. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian
4. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
5. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
6. Program Pengembangan UMKM

7.2.2.12 Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
2. Program Promosi Penanaman Modal
3. Program Pelayanan Penanaman Modal
4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
5. Program Pengelolaan data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal

7.2.2.13 Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

7.2.2.14 Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

1. Program Penyelenggaraan Statistik Sektor

7.2.2.15 Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

1. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

7.2.2.16 Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

1. Program Pengembangan Kebudayaan
2. Program Pengembangan Kesenian Tradisional
3. Program Pembinaan Sejarah
4. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

7.2.2.17 Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

1. Program Pembinaan Perpustakaan
2. Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno

7.2.2.18 Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

1. Program Pengelolaan Arsip
2. Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip
3. Program Perizinan Penggunaan Arsip

7.2.3 URUSAN PILIHAN

7.2.3.1 Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
3. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

7.2.3.2 Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
2. Program Pemasaran Pariwisata
3. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
4. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

7.2.3.3 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
3. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
4. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
5. Program Perizinan Usaha Pertanian
6. Program Penyuluhan Pertanian

7.2.3.4 Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

1. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan
2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
3. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
4. Program Pengembangan Ekspor
5. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen
6. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

7.2.3.5 Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

1. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
2. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota
3. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

7.2.3.6 Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

1. Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi
2. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
3. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi

7.2.4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

7.2.4.1 Sekretariat Daerah

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

1. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
2. Program Perekonomian dan Pembangunan

7.2.4.2 Sekretariat DPRD

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

1. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

7.2.5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

7.2.5.1 Perencanaan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

7.2.5.2 Keuangan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

7.2.5.3 Kepegawaian

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

1. Program Kepegawaian Daerah

7.2.5.4 Pendidikan dan Pelatihan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

1. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

7.2.5.5 Penelitian dan Pengembangan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

1. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

7.2.5.6 Pengawasan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan
2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi

7.2.7 UNSUR KEWILAYAHAN

7.2.7.1 Kecamatan dan Kelurahan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

7.2.8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM

7.2.8.1 Kesatuan Bangsa dan Politik

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
2. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
3. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
4. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

Tabel 7.2
Indikasi Rencana Program Perangkat Daerah Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021 - 2026

Visi : "Konawe Utara Lebih Sejahtera Dan Berdaya Saing"

NO.	Urusan/OPD/Program		Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Pada Tahun Dasar Perencanaan (Tahun 2021)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Capaian Akhir Tahun RPJMD		Perangkat Daerah
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
TOTAL PAGU INDIKATIF					953.417.574.125	973.598.888.229	962.066.004.050	979.079.264.232	995.391.572.491	1.003.228.255.270	4.913.363.984.273								
1	URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				387.185.979.274	402.554.903.833	392.538.234.221	397.770.747.287	400.736.620.483	395.092.026.836	1.988.692.532.660								
1.01	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan				176.481.565.206	182.330.561.476	189.162.569.126	199.631.977.006	202.930.857.122	203.018.283.641	977.074.248.370								
1.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				176.481.565.206	182.330.561.476	189.162.569.126	199.631.977.006	202.930.857.122	203.018.283.641	977.074.248.370								
	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan program penunjang SKPD	Persen	85,29	95.762.840.131	86,43	96.198.890.147	87,57	96.631.591.657	89,13	100.914.464.213	90,54	97.584.512.945	90,54	97.590.743.139	91	488.920.202.102	Dinas P & K
	2	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase capaian SPM	%	86	78.478.725.075	87	88	89	90	96.477.512.793	81,69	102.971.344.176	81,89	103.052.540.502	81,89	476.684.046.268	Dinas P & K	
	APK SD		Indeks	107,3	106,8		106,25	105,79	104,7	103,59		103,59							
	APK SMP		Indeks	86,9	86,19		85,35	84,13	83,9	82,95		82,95							
	APM SD		Indeks	98,15	98,65		98,9	99,07	99,31	99,45		99,45							
	APM SMP		Indeks	78,03	78,45		79,35	80,45	81,69	81,89		81,89							
	Persentase SD Terakreditasi Minimal B		%	17,31	19,23		19,23	20,19	20,19	21,15		21,15							
	Persentase SMP Terakreditasi Minimal B		%	41,67	44,44		44,44	47,22	47,22	50		50,00							
	3	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase pengembangan kurikulum muatan lokal penunjang proses pendidikan	Persen	70	1.675.000.000	72	1.675.000.000	74	1.675.000.000	78	1.675.000.000	80	1.675.000.000	80	1.675.000.000	80	8.375.000.000	Dinas P & K
	4	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Persentase Guru SD Bersertifikat Pendidik	Persen	31,096	135.000.000	31,552	135.000.000	32,008	135.000.000	32,464	135.000.000	32,92	135.000.000	32,92	135.000.000	32,920	675.000.000	Dinas P & K
	Persentase Guru SMP Bersertifikat Pendidik		Persen	30,516	135.000.000	30,832	135.000.000	31,148	135.000.000	31,464	135.000.000	31,78	135.000.000	31,78	135.000.000	31,780	675.000.000	Dinas P & K	
	Rasio tenaga pendidik terhadap peserta didik (SD)		Persen	10,962	135.000.000	11,264	135.000.000	11,566	135.000.000	11,868	135.000.000	12,170	270.000.000	12,170	270.000.000	12,170	945.000.000	Dinas P & K	
	Rasio tenaga pendidik terhadap peserta didik (SMP)		Persen	12,67	135.000.000	13,09	135.000.000	13,51	135.000.000	13,93	135.000.000	14,35	135.000.000	14,35	135.000.000	14,350	675.000.000	Dinas P & K	
	5	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persentase pengendalian perizinan PAUD	Persen	65	25.000.000	68	25.000.000	70	25.000.000	72	25.000.000	75	25.000.000	75	25.000.000	75.000	125.000.000	Dinas P & K
1.02	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan				123.176.214.651	124.852.063.575	112.026.007.537	108.972.121.446	106.503.509.001	98.577.209.083	550.930.910.642								
1.02.01	Dinas Kesehatan				100.170.732.714	101.434.414.919	88.307.019.897	84.961.007.557	82.195.699.509	73.968.039.498	430.866.181.380								
	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan program penunjang SKPD	Persen	100	62.212.236.541	100	62.834.358.906	100	50.267.487.125	100	50.770.161.996	100	51.277.863.616	100	45.637.298.619	100	260.787.170.263	Dinas Kesehatan
	2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Bayi / 1000 kelahiran hidup	rasio	1,87	31.813.406.448	1,64	1,41	1,18	0,95	0,72	18.154.159.732	1	126.331.417.175	Dinas Kesehatan				
	Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup		rasio	137	135		133	131	129	127	127								
	Prevalensi Balita Gizi Buruk		%	0,3	0,2		0,2	0,2	0,1	0	0								
	Prevalensi kasus Stunting		%	11	10,8		10,6	10,4	10,2	10	10								
	Rasio Puskesmas per satuan penduduk x 1000		Rasio	0,32	0,32		0,32	0,32	0,32	0	0								
	Prevalensi Tuberkulosis (TB) /100.000 penduduk		Rasio	140	137		134	131	128	125	125								
	3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rasio dokter per 100.000 penduduk	Rasio	49,71	1.452.884.875	52,30	56,24	60,16	64,05	67,92	2.729.352.500	67,92	10.846.762.500	Dinas Kesehatan				
	rasio bidan / 100.0000 penduduk		Rasio	216,78	222,95		1.529.352.500	229,08	1.929.352.500	235,17	2.229.352.500		241,23			2.429.352.500	247,24	247,24	
	Rasio perawat / 100.000 penduduk		Rasio	129,79	141,75		153,64	165,44	177,17	188,83	188,83								
	4	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Jumlah sertifikat laek higien	Sertifikat	0	657.993.750	5	8	10	13	16	1.732.625.000	16	6.133.125.000	Dinas Kesehatan				
	Jumlah Rekomendasi Ijin Apotek/Toko Obat		Rekomendas i	8	10		12	15	17	20	20								
		Jumlah Desa Siaga Aktif	desa	107		110	113	116	119	122	122		122						

NO.	Urusan/OPD/Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Pada Tahun Dasar Perencanaan (Tahun 2021)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Capaian Akhir Tahun RPJMD		Perangkat Daerah	
				Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	2022		2023		2024		2025		2026		Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)		
						Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Jumlah posyandu aktif	posyandu	165	4.034.211.100	165	4.246.538.000	165	5.546.538.000	165	5.602.003.380	165	5.658.023.414	165	5.714.603.648	165	26.767.706.442	Dinas Kesehatan
		Persentase Rumah Tangga ber PHBS	%	87		89		91		93		94		95		95			
1.02.01.02	Rumah Sakit Umum Daerah				23.005.481.937		23.417.648.656		23.718.987.640		24.011.113.889		24.307.809.492		24.609.169.584		120.064.729.262		
	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan program penunjang SKPD	Persen	100	11.921.264.002	100	12.040.476.642	100	12.160.881.408	100	12.282.490.223	100	12.405.315.125	100	12.529.368.276	100	12.654.661.959	RSUD
	2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rata-rata Kunjungan Rawat Jalan Per Hari	Rawat Jalan	10	8.637.670.435	12	8.724.047.139	17	8.811.287.611	23	8.899.400.487	29	8.988.394.492	35	9.078.278.437	35	44.501.408.165	RSUD
		Length Of Stay (LOS)/Rata-rata Lama Hari Dirawat	Hari	9-8	8-7		7-6		6-5		5-4		4-3		4-3				
		Bed Occupancy Rate (BOR)/ Tingkat Penggunaan Tempat Tidur	%	20	35		60		75		80		85		85				
	3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Emergency Respon Time Rate Kurang Dari 5 Menit	%	40	2.446.547.500	50	2.568.874.875	70	2.645.941.121	80	2.725.319.355	90	2.807.078.936	100	2.891.291.304	100	13.638.505.590	RSUD
	4	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Kecepatan Pelayanan Resep Obat Jadi Kurang dari 30 Menit	%	40	-	50	54.250.000	70	55.877.500	80	57.553.825	90	59.280.440	100	61.058.853	100	288.020.618	RSUD
	5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Masyarakat yang Diberdayakan	%	70	-	80	30.000.000	90	45.000.000	100	46.350.000	90	47.740.500	100	49.172.715	100	218.263.215	RSUD
1.3	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				44.683.043.438		48.152.975.079		43.051.986.803		39.761.642.138		40.760.107.585		41.786.583.156		213.513.294.761		
1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				44.683.043.438		48.152.975.079		43.051.986.803		39.761.642.138		40.760.107.585		41.786.583.156		213.513.294.761		
	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan program penunjang SKPD	Persen	100	9.234.572.053	100	9.511.609.215	100	9.796.957.491	100	10.090.866.216	100	10.393.592.202	100	10.705.399.968	100	50.498.425.092	Dinas PUPR
	2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Luas Daerah Irigasi Dalam Kondisi Baik	Ha	2.671,6	6.438.600.000	2.693,67	6.760.530.000	2.715,74	6.963.345.900	2.737,81	7.172.246.277	2.759,88	7.387.413.665	2.781,95	7.609.036.075	2.781,95	35.892.571.918	Dinas PUPR
	3	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Perpipaan	Unit	18.853	5.735.526.386	18.894	6.022.302.705	18.935	6.202.971.786	18.976	6.389.060.940	19.017	6.580.732.768	19.058	6.778.154.751	19.058	31.973.222.951	Dinas PUPR
	4	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Jumlah sarana dan prasarana pelayanan persampahan yang berfungsi baik	Unit	5	-	5	375.465.240	6	386.729.197	6	398.331.073	6	410.281.005	6	422.589.435	6	1.993.395.951	Dinas PUPR
	5	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Penduduk Berakses Sanitasi Yang Layak	KK	8.813	1.953.358.363	9063	2.051.026.281	9313	2.112.557.070	9563	2.175.933.782	9813	2.241.211.795	10.063	2.308.448.149	10.063	10.889.177.077	Dinas PUPR
	6	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Drainase Yang Terbangun	%	41,48	-	42,91	1.045.005.670	44,34	1.076.355.840	45,77	1.108.646.515	47,20	1.141.905.911	48,63	1.176.163.088	48,63	5.548.077.024	Dinas PUPR
	7	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase isian aplikasi SI-BPB	%	27	631.300.000	38	662.865.000	53	682.750.950	64	703.233.479	85	724.330.483	95	746.060.397	95	3.519.240.309	Dinas PUPR
	8	Program Penyelenggaraan Jalan	Panjang jalan dalam kondisi mantap	Km	593,59	18.890.555.636	599,02	19.835.083.418	604,45	13.884.558.392	609,88	9.719.190.875	615,31	9.816.382.783	620,74	9.914.546.611	620,74	63.169.762.080	Dinas PUPR
	9	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah	%	80	1.799.131.000	80,98	1.889.087.550	81,47	1.945.760.177	81,96	2.004.132.982	82,45	2.064.256.971	82,94	2.126.184.680	83	10.029.422.360	Dinas PUPR
1.4	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman				8.693.605.240		11.082.666.632		11.415.146.631		11.757.601.030		12.110.329.061		12.473.638.933		58.839.382.286		
1.04.01	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman				8.693.605.240		11.082.666.632		11.415.146.631		11.757.601.030		12.110.329.061		12.473.638.933		58.839.382.286		
	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan program penunjang SKPD	Persen	100	3.861.761.260	100	4.054.849.323	100	4.176.494.803	100	4.301.789.647	100	4.430.843.336	100	4.563.768.636	100	21.527.745.745	Dinas Perumahan
	2	Program Pengembangan Perumahan	Persentase pembangunan perumahan untuk korban bencana alam	%	0	-	5	1.049.813.240	5	1.081.307.637	5	1.113.746.866	5	1.147.159.272	5	1.181.574.050	25	5.573.601.066	Dinas Perumahan
	3	Program Kawasan Permukiman	Jumlah rumah layak huni	Unit	12.816	2.786.883.980	12.896	2.926.228.179	12.996	3.014.015.024	13.096	3.104.435.475	13.196	3.197.568.539	13.296	3.293.495.596	13.296	15.535.742.813	Dinas Perumahan
	4	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh Yang ditangani	Ha	76,83	-	76,83	904.567.890	76,83	931.704.927	76,83	959.656.075	76,83	988.445.757	76,83	1.018.099.129	76,83	4.802.473.777	Dinas Perumahan
	5	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase pembangunan sarana dan prasarana dan utilitas umum	%	100	2.044.960.000	100	2.147.208.000	100	2.211.624.240	100	2.277.972.967	100	2.346.312.156	100	2.416.701.521	100	11.399.818.884	Dinas Perumahan
1.5	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat				27.257.585.446		28.895.543.058		29.424.197.291		29.965.329.029		30.519.278.778		31.086.396.919		149.890.745.075		
1.05.01	Satuan Polisi Pamong Praja				6.411.589.785		6.732.169.274		6.934.134.352		7.142.158.383		7.356.423.135		7.577.115.829		35.742.000.973		
	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan program penunjang SKPD	Persen	100	6.253.170.285	100	6.565.828.799	100	6.762.803.663	100	6.965.687.773	100	7.174.658.406	100	7.389.898.159	100	34.858.876.800	Satpol PP,
	2	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Angka Kriminalitas	kasus	30	158.419.500	26	166.340.475	23	171.330.689	20	176.470.610	18	181.764.728	17	187.217.670	17	883.124.172	Satpol PP,

NO.	Urusan/OPD/Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Pada Tahun Dasar Perencanaan (Tahun 2021)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Capaian Akhir Tahun RPJMD		Perangkat Daerah	
				Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	2022		2023		2024		2025		2026		Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)		
						Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1.05.02	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan				3.140.897.837		3.573.021.069		3.680.211.701		3.790.618.052		3.904.336.594		4.021.466.691		18.969.654.107		
	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan program penunjang SKPD	Persen	100	3.140.897.837	100	3.297.942.729	100	3.396.881.011	100	3.498.787.441	100	3.603.751.064	100	3.711.863.596	100	17.509.225.841	Damkar
	2	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) Daerah WMK	%	67,3	-	68,6	275.078.340	69,9	283.330.690	71,2	291.830.611	72,5	300.585.529	73,8	309.603.095	73,8	1.460.428.265	Damkar
1.05.03	Badan Penanggulangan Bencana Daerah				17.705.097.824		18.590.352.715		18.809.851.237		19.032.552.594		19.258.519.050		19.487.814.399		95.179.089.996		
	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan program penunjang SKPD	Persen	100	16.105.336.164	100	16.910.602.972	100	17.079.709.002	100	17.250.506.092	100	17.423.011.153	100	17.597.241.264	100	86.261.070.483	BPBD
	2	Program Penanggulangan Bencana	Jumlah Desa Tangguh Bencana	Desa	2	1.599.761.660	9	1.679.749.743	9	1.730.142.235	9	1.782.046.502	9	1.835.507.897	9	1.890.573.134	45	8.918.019.512	BPBD
1.6	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial				6.893.965.293		7.241.094.013		7.458.326.833		7.682.076.638		7.912.538.937		8.149.915.105		38.443.951.526		
1.06.01	Dinas Sosial				6.893.965.293		7.241.094.013		7.458.326.833		7.682.076.638		7.912.538.937		8.149.915.105		38.443.951.526		
	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan program penunjang SKPD	Persen	100	2.849.969.373	100	2.992.467.842	100	3.082.241.877	100	3.174.709.133	100	3.269.950.407	100	3.368.048.919	100	15.887.418.178	Dinas Sosial
	2	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase usaha ekonomi keluarga yang mendapatkan pembinaan	%	51,61	2.344.756.042	53,85	2.461.993.844	55,22	2.535.853.659	56,52	2.611.929.269	57,14	2.690.287.147	61,64	2.770.995.762	61,64	13.071.059.682	Dinas Sosial
	3	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase DTKS yang memperoleh pelayanan dan rehabilitasi	%	30,09	221.566.900	31,44	235.075.700	34,25	242.127.971	40,00	249.391.810	49,64	256.873.564	59,43	264.579.771	59,43	1.248.048.817	Dinas Sosial
	4	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial	%	27,48	817.493.750	29,18	858.368.438	31,89	884.119.491	36,01	910.643.075	41,84	937.962.368	48,06	966.101.239	48,06	4.557.194.610	Dinas Sosial
	5	Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat	%	100	660.179.228	100	693.188.189	100	713.983.835	100	735.403.350	100	757.465.451	100	780.189.414	100	3.680.230.239	Dinas Sosial
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					91.701.809.585		102.603.329.191		105.461.131.265		108.383.651.187		112.336.656.144		116.393.009.477		545.177.777.263	
2.1	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja				6.190.076.346		6.499.730.163		6.695.513.318		6.897.213.486		7.105.010.573		7.319.090.008		34.516.557.548		
2.1.01	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja				6.190.076.346		6.499.730.163		6.695.513.318		6.897.213.486		7.105.010.573		7.319.090.008		34.516.557.548		
	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan program penunjang SKPD	Persen	100	5.950.049.033	100	6.247.551.485	100	6.434.978.029	100	6.628.027.370	100	6.826.868.191	100	7.031.674.237	100	33.169.099.312	Transnaker
	2	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase Tersedianya Perencanaan Tenaga Kerja	%	100	30.000.000	100	31.650.000	100	33.390.750	100	35.227.241	100	37.164.740	100	39.208.800	100	176.641.531	Transnaker
	3	Program Penempatan Tenaga Kerja	Besaran Pencari Kerja Yang ditempatkan	Orang	306	58.327.000	349	61.243.350	351	63.080.651	367	64.973.070	397	66.922.262	403	68.929.930	403	325.149.263	Transnaker
	4	Program Hubungan Industrial	Persentase Penyelesaian Kasus Hubungan Industrial	%	100	42.862.063	100	45.005.166	100	46.355.321	100	47.745.981	100	49.178.360	100	50.653.711	100	238.938.539	Transnaker
	2	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat Pelatihan berbasis Kompetensi	Orang	70	108.838.250	75	114.280.163	77	117.708.567	80	121.239.824	83	124.877.019	85	128.623.330	85	606.728.903	UPT BLK
2.2	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				4.167.069.494		4.375.422.969		4.506.685.658		4.641.886.227		4.781.142.814		4.924.577.099		23.229.714.767		
2.02.01	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				4.167.069.494		4.375.422.969		4.506.685.658		4.641.886.227		4.781.142.814		4.924.577.099		23.229.714.767		
	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan program penunjang SKPD	Persen	100	3.684.087.744	100	3.868.292.131	100	3.984.340.895	100	4.103.871.122	100	4.226.987.256	100	4.353.796.873	100	20.537.288.277	DPPPA
	2	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Perempuan Yang Menduduki Jabatan Publik	%	7,69	151.409.000	7,87	158.979.450	7,96	163.748.834	8,05	168.661.299	8,14	173.721.137	8,23	178.932.772	8,23	844.043.491	DPPPA
	3	Program Perlindungan Perempuan	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pelayanan/ditangani	Orang	3	66.342.750	2	69.659.888	2	71.749.684	1	73.902.175	1	76.119.240	1	78.402.817	1	369.833.803	DPPPA
	4	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase peningkatan kualitas keluarga	%	100	52.137.000	100	54.743.850	100	56.386.166	100	58.077.750	100	59.820.083	100	61.614.685	100	290.642.534	DPPPA
	5	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Persentase pengelolaan data gender dan anak	%	100	21.599.500	100	22.679.475	100	23.359.859	100	24.060.655	100	24.782.475	100	25.525.949	100	120.408.413	DPPPA
	6	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Persentase Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	%	55,25	160.256.500	60	168.269.325	72	173.317.405	73	178.516.927	80	183.872.435	88	189.388.608	92	893.364.699	DPPPA
	7	Program Perlindungan Khusus Anak	Jumlah korban kekerasan anak yang ditindaklanjuti	Orang	3	31.237.000	2	32.798.850	2	33.782.816	1	34.796.300	1	35.840.189	1	36.915.395	1	174.133.549	DPPPA

NO.	Urusan/OPD/Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Pada Tahun Dasar Perencanaan (Tahun 2021)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Capaian Akhir Tahun RPJMD		Perangkat Daerah	
				Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	2022		2023		2024		2025		2026		Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)		
						Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
2.3	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan				5.021.563.580		10.357.037.663		9.981.663.929		9.687.716.712		10.645.440.703		11.698.937.093		52.370.796.100		
2.03.01	Dinas Ketahanan Pangan				5.021.563.580		10.357.037.663		9.981.663.929		9.687.716.712		10.645.440.703		11.698.937.093		52.370.796.100		
	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan program penunjang SKPD	Persen	100	3.899.735.583	100	5.811.103.410	100	6.014.563.638	100	6.481.772.322	100	7.118.901.874	100	7.819.744.381	100	33.246.085.625	Ketapang
	2	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Persentase Desa Mandiri Pangan	Persen	3,14	370.000.000	6,29	1.638.133.000	9,43	1.306.196.300	12,58	398.850.000	15,72	438.735.000	18,87	482.608.500	18,87	4.264.522.800	Ketapang
	3	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Desa Lumbung Pangan	Persen	2,52	686.819.497	5,03	2.181.668.753	7,55	1.869.658.241	10,60	1.936.724.065	12,58	2.130.396.471	15,09	2.343.436.119	15,09	10.461.883.649	Ketapang
	4	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Tingkat Penguatan Cadangan Pangan	%	100	21.394.500	100	323.590.500	100	348.449.550	100	383.294.505	100	421.623.956	100	463.786.351	100	1.940.744.862	Ketapang
			Persentase penanganan kerawanan pangan	%	100		100				100		100		100				
	5	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Ketersediaan energi dan protein perkapita	Kld/Kapita/Hari Gr/Kapita/Hari	2.753 70,86	43.614.000	2.811 72,27	402.542.000	2.870 75,34	442.796.200	2.928 76,85	487.075.820	2.986 78,39	535.783.402	3.046 79,95	589.361.742	3.046 79,95	2.457.559.164	Ketapang
2.4	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan				1.945.666.000		2.042.949.300		2.104.237.779		2.527.155.312		2.602.969.972		2.681.059.071		11.958.371.434		
4.01.01	Sekretariat Daerah				1.945.666.000		2.042.949.300		2.104.237.779		2.527.155.312		2.602.969.972		2.681.059.071		11.958.371.434		
	1	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase penyelesaian ganti kerugian tanah untuk pembangunan	%	100	1.280.000.000	100	1.344.000.000	100	1.384.320.000	100	1.785.640.000	100	1.839.209.200	100	1.894.385.476	100	8.247.554.676	Setda
	3	Program Penatagunaan Tanah	Persentase penatagunaan tanah untuk wilayah Kabupaten	%	100	665.666.000	100	698.949.300	100	719.917.779	100	741.515.312	100	763.760.772	100	786.673.595	100	3.710.816.758	Setda
2.5	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup				9.502.461.622		9.771.874.503		10.083.830.738		10.404.545.660		10.716.682.030		11.038.182.491		52.015.115.423		
2.05.01	Dinas Lingkungan Hidup				9.502.461.622		9.771.874.503		10.083.830.738		10.404.545.660		10.716.682.030		11.038.182.491		52.015.115.423		
	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan program penunjang SKPD	Persen	100	5.321.158.117	100	5.587.216.023	100	5.754.832.504	100	5.927.477.479	100	6.105.301.803	100	6.288.460.857	100	29.663.288.665	DLH
	2	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan yang berkualitas	Persen	100	1.000.000.000	100	1.050.000.000	100	1.081.500.000	100	1.113.945.000	100	1.147.363.350	100	1.181.784.251	100	5.574.592.601	DLH
	3	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	nilai	1,76	199.268.550	1,94	209.231.978	2,12	215.508.937	2,30	221.974.205	2,48	228.633.431	2,66	235.492.434	2,66	1.110.840.984	DLH
			Indeks Kualitas Udara	nilai	91,09		91,19		91,38		91,57		91,76		91,95		91,95		
	4	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Indeks Tutupan Lahan	%	77,68	2.307.479.830	77,86	2.422.853.822	77,95	2.495.539.436	78,04	2.570.405.619	78,13	2.647.517.788	78,22	2.726.943.321	78,22	12.863.259.986	DLH
	5	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase usaha yang memilah B3 dan limbah B3	%	65	36.311.750	68	38.127.338	70	39.271.158	75	40.449.292	78	41.662.771	80	42.912.654	80	202.423.213	DLH
	6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan serta pengelolaan LH (PPLH)	%	82	49.197.750	85	51.657.638	90	53.207.367	95	54.803.588	100	56.447.695	100	58.141.126	100	274.257.413	DLH
	7	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase ASN bersertifikat AMDAL yang profesional	%	60	19.724.000	70	40.000.000	80	60.000.000	90	80.000.000	100	82.400.000	100	84.872.000	100	347.272.000	DLH
	8	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase kelompok masyarakat yang mendapat penghargaan LH	%	50	31.329.750	60	32.896.238	63	33.883.125	65	34.899.618	68	35.946.607	70	37.025.005	70	174.650.593	DLH
	9	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase aduan LH yang diselesaikan	%	100	16.993.875	100	17.843.569	100	18.378.876	100	18.930.242	100	19.498.149	100	20.083.094	100	94.733.930	DLH
	10	Program Pengelolaan Persampahan	Cakupan wilayah pelayanan persampahan	%	15,38	20.998.000	15,38	22.047.900	15,38	22.709.337	15,38	23.390.617	15,38	24.092.336	15,38	24.815.106	15	117.055.295	DLH
	11	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH	Persentase MHA yang Terakui	%	100	500.000.000	100	300.000.000	100	309.000.000	100	318.270.000	100	327.818.100	100	337.652.643	100	1.592.740.743	DLH
2.6	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil				4.116.277.093		4.563.066.578		4.699.958.575		4.840.957.332		4.986.186.052		5.135.771.634		24.225.940.171		
2.06.01	Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil				4.116.277.093		4.563.066.578		4.699.958.575		4.840.957.332		4.986.186.052		5.135.771.634		24.225.940.171		
	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan program penunjang SKPD	Persen	100	3.251.726.093	100	3.414.312.398	100	3.516.741.770	100	3.622.244.023	100	3.730.911.343	100	3.842.838.684	100	18.127.048.217	Dukcapil
	2	Program Pendaftaran Penduduk	Kepemilikan dokumen kependudukan Berbasis Elektronik	%	100	420.946.000	100	441.993.300	100	455.253.099	100	468.910.692	100	482.978.013	100	497.467.353	100	2.346.602.457	Dukcapil
	3	Program Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan dokumen Pencatatan Sipil Berbasis Elektronik	%	95	252.838.500	95	265.480.425	100	273.444.838	100	281.648.183	100	290.097.628	100	298.800.557	100	1.409.471.631	Dukcapil

NO.		Urusan/OPD/Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Pada Tahun Dasar Perencanaan (Tahun 2021)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Capaian Akhir Tahun RPJMD		Perangkat Daerah
					Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	2022		2023		2024		2025		2026		Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
							Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	4	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	OPD Yang Memanfaatkan Data Kependudukan SKPD	OPD	4	190.766.500	7	200.304.825	8	206.313.970	9	212.503.389	10	218.878.491	11	225.444.845	11	1.063.445.519	Dukcapil
	5	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Jumlah Data Base kependudukan terupdate	Database	1	-	1	240.975.630	1	248.204.899	1	255.651.046	1	263.320.577	1	271.220.195	1	1.279.372.347	Dukcapil
2.7		Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				8.588.507.719		9.103.612.555		9.376.720.932		9.658.022.560		9.947.763.236		10.246.196.133		48.332.315.416	
2.07.01		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				8.588.507.719		9.103.612.555		9.376.720.932		9.658.022.560		9.947.763.236		10.246.196.133		48.332.315.416	
	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan program penunjang SKPD	Persen	100	7.830.304.219	100	8.221.819.430	100	8.468.474.013	100	8.722.528.233	100	8.984.204.080	100	9.253.730.203	100	43.650.755.959	DPMD
	2	Program Penataan Desa	Persentase BPD, LPM, dan PKK aktif	persen	100	-		85.679.450	100	88.249.834	100	90.897.329	100	93.624.248	100	96.432.976	100	454.883.836	DPMD
	3	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Jumlah Desa Berkembang	Desa	71	68.857.000	74	72.299.850	77	74.468.846	79	76.702.911	80	79.003.998	81	81.374.118	81	383.849.723	DPMD
	4	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Penyampaian RKPDes, APBDes, dan Laporan Keuangan Desa Tepat Waktu dan Sesuai Peraturan Bupati	%	82,32	322.068.875	82,88	338.172.319	83,45	348.317.488	84,01	358.767.013	84,57	369.530.023	85,13	380.615.924	85,13	1.795.402.767	DPMD
	5	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase 1 (satu) BUMDes dalam 1 (satu) Desa Yang Aktif	%	100	367.277.625	100	385.641.506	100	397.210.751	100	409.127.074	100	421.400.886	100	434.042.913	100	2.047.423.131	DPMD
2.8		Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				11.749.728.296		12.337.214.711		12.707.331.152		13.088.551.087		13.481.207.619		13.885.643.848		65.499.948.417	
2.08.01		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				11.749.728.296		12.337.214.711		12.707.331.152		13.088.551.087		13.481.207.619		13.885.643.848		65.499.948.417	
	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan program penunjang SKPD	Persen	100	6.884.224.240	100	7.228.435.452	100	7.445.288.516	100	7.668.647.171	100	7.898.706.586	100	8.135.667.784	100	38.376.745.508	DPPKB
	2	Program Pengendalian Penduduk	Persentase pertumbuhan penduduk	%	6,71	751.886.056	7,06	789.480.359	7,41	813.164.770	7,76	837.559.713	8,11	862.686.504	8,46	888.567.099	8,46	4.191.458.444	
	3	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Jumlah Peserta KB Aktif	Orang	11.786	2.963.313.000	11.871	3.111.478.650	11.923	3.204.823.010	11.957	3.300.967.700	11.973	3.399.996.731	12.051	3.501.996.633	12.051	16.519.262.723	DPPKB
	4	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Keluarga Sejahtera	%	81,70	1.150.305.000	81,82	1.207.820.250	81,94	1.244.054.858	82,06	1.281.376.503	82,18	1.319.817.798	82,30	1.359.412.332	82,30	6.412.481.741	DPPKB
			Cakupan PUS Unmeetneed	%	0,09		0,13		0,07		0,05		0,03		0,01		0,01		
2.9		Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan				9.614.392.954		10.095.112.602		10.397.965.980		10.709.904.959		11.031.202.108		11.362.138.171		53.596.323.820	
2.09.01		Dinas Perhubungan				9.614.392.954		10.095.112.602		10.397.965.980		10.709.904.959		11.031.202.108		11.362.138.171		53.596.323.820	
	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pelaksanaan program penunjang SKPD	Persen	100	3.673.097.594	100	3.856.752.474	100	3.972.455.048	100	4.091.628.699	100	4.214.377.560	100	4.340.808.887	100	20.476.022.668	Dishub
	2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Ketersediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan (Rambu, Marka, APIL, Guadrail, Delinator, dll) yang berfungsi baik	%	30,00	3.949.302.500	34,39	4.146.767.625	36,58	4.271.170.654	38,78	4.399.305.773	40,97	4.531.284.947	43,16	4.667.223.495	43,16	22.015.752.494	Dishub
			Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas	%	85,00		86,75		87,62		88,50		89,37	90,24		90,24			
	3	Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase Pelabuhan Rakyat/Dermaga Rakyat Yang Berfungsi Baik	%	72,73	1.991.992.860	81,82	2.091.592.503	90,91	2.154.340.278	100	2.218.970.486	100	2.285.539.601	100	2.354.105.789	100	11.104.548.658	Dishub
2.10		Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika				3.998.300.146		4.198.215.153		4.324.161.608		4.453.886.456		4.587.503.050		4.725.128.141		22.288.894.408	
2.10.01		Dinas Komunikasi dan Informatika				3.998.300.146		4.198.215.153		4.324.161.608		4.453.886.456		4.587.503.050		4.725.128.141		22.288.894.408	
	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pelaksanaan program penunjang SKPD	Persen	100	3.281.202.646	100	3.445.262.778	100	3.548.620.662	100	3.655.079.281	100	3.764.731.660	100	3.877.673.610	100	18.291.367.991	Diskominfo
	2	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase Pengelolaan Layanan Pengaduan Berbasis Online Yang didistribusikan ke OPD	%	0	192.882.500	25	202.526.625	45	208.602.424	69	214.860.496	75	221.306.311	80	227.945.501	80	1.075.241.357	Diskominfo
	3	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Jumlah Penerapan SPBE	aplikasi	1	524.215.000	3	550.425.750	3	566.938.523	5	583.946.678	5	601.465.079	7	619.509.031	7	2.922.285.060	Diskominfo
2.11		Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah				4.583.483.276		5.535.997.940		5.702.077.878		5.873.140.214		6.049.334.421		6.230.814.453		29.391.364.906	
2.11.01		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah				4.583.483.276		5.535.997.940		5.702.077.878		5.873.140.214		6.049.334.421		6.230.814.453		29.391.364.906	
	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pelaksanaan program penunjang SKPD	Persen	100	3.825.578.713	100	4.016.857.649	100	4.137.363.378	100	4.261.484.279	100	4.389.328.808	100	4.521.008.672	100	21.326.042.786	Dikop & UMKM
	2	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi aktif yang dibina	Koperasi	22,32	74.845.063	31,25	78.587.316	35,71	80.944.936	37,95	83.373.284	40,18	85.874.482	42,41	88.450.717	42,41	417.230.734	Dikop & UMKM
	3	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	Persentase koperasi sehat	%	16	39.084.500	17	41.038.725	18	42.269.887	19	43.537.983	20	44.844.123	21	46.189.447	21	217.880.164	Dikop & UMKM
	4	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase peningkatan koperasi yang mengikuti pelatihan	%	55,74	-	67,57	155.837.000	74,32	160.512.110	81,08	165.327.473	84,46	170.287.297	87,84	175.395.916	87,84	827.359.797	Dikop & UMKM
	5	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase koperasi aktif	%	76,01	204.520.000	76,35	214.746.000	77,03	221.188.380	77,70	227.824.031	79,39	234.658.752	81,08	241.698.515	81	1.140.115.679	Dikop & UMKM

NO.	Urusan/OPD/Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Pada Tahun Dasar Perencanaan (Tahun 2021)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Capaian Akhir Tahun RPJMD		Perangkat Daerah	
				Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	2022		2023		2024		2025		2026		Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)		
						Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	6	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase wirausaha baru	%	0,90	439.455.000	0,39	461.427.750	0,76	475.270.583	0,77	489.528.700	0,78	504.214.561	0,79	519.340.998	0,79	2.449.782.591	Dikop & UMKM
	7	Program Pengembangan UMKM	Jumlah UMKM yang dibina	UMKM	-	-	50	567.503.500	50	584.528.605	50	602.064.463	50	620.126.397	50	638.730.189	50	3.012.953.154	Dikop & UMKM
2.12	Usuran Pemerintahan Bidang Penanaman Modal				4.697.905.038		5.348.704.820	5.509.165.964		5.659.783.893		5.829.577.410		6.004.464.733		28.351.696.821			
2.12.01	Dinas Penanaman Modal dan PTSP				4.697.905.038		5.348.704.820	5.509.165.964		5.659.783.893		5.829.577.410		6.004.464.733		28.351.696.821			
	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan program penunjang SKPD	Persen	100	3.965.036.424	100	4.163.288.245	100	4.288.186.893	100	4.416.832.499	100	4.549.337.474	100	4.685.817.599	100	22.103.462.710	DPMPTSP
	2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah Perbup yang mendukung Iklim Investasi	Perbup	0	-	2	250.000.000	3	257.500.000	4	250.567.950	5	258.084.989	6	265.827.538	6	1.281.980.477	DPMPTSP
	3	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah nilai investasi PMA/PMDN	Rp (milyar)	180,99	118.628.000	198,1	124.559.400	215,21	128.296.182	232,32	132.145.067	249,43	136.109.419	266,54	140.192.702	266,54	661.302.771	DPMPTSP
	4	Program Pelayanan Penanaman Modal	Lama proses perizinan	hari	2	291.667.614	2	306.250.995	2	315.438.525	2	324.901.680	2	334.648.731	2	344.688.193	2	1.625.928.123	DPMPTSP
	5	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase pengawasan investasi	%	100	322.573.000	100	338.701.650	100	348.862.700	100	359.328.580	100	370.108.438	100	381.211.691	100	1.798.213.059	DPMPTSP
	6	Program Pengelolaan data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Jumlah izin yang diterbitkan	Izin	290	-	345	165.904.530	398	170.881.666	442	176.008.116	495	181.288.359	500	186.727.010	500	880.809.681	DPMPTSP
			Survey Kepuasan Masyarakat	%	77,24	-	77,78	-	78,45	-	79,21	-	79,86	-	80,36	-	80,36	-	
2.13	Usuran Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga				9.989.119.395		10.488.575.365	10.803.232.626		11.127.329.604		11.461.149.493		11.804.983.977		55.685.271.065			
2.13.01	Dinas Kepemudaan dan Olahraga				9.989.119.395		10.488.575.365	10.803.232.626		11.127.329.604		11.461.149.493		11.804.983.977		55.685.271.065			
	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan program penunjang SKPD	Persen	100	4.022.706.902	100	4.223.842.247	100	4.350.557.515	100	4.481.074.240	100	4.615.506.467	100	4.753.971.661	100	22.424.952.130	Dikpora
	2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Jumlah Organisasi Kepemudaan yang dibina	Organisasi	12	1.069.737.617	12	1.123.224.498	12	1.156.921.233	13	1.191.628.870	13	1.227.377.736	13	1.264.199.068	13	5.963.351.404	Dikpora
	3	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Jumlah Cabang Olahraga Yang Berprestasi	Cabor	7	4.896.674.876	7	5.141.508.620	8	5.295.753.878	8	5.454.626.495	8	5.618.265.290	8	5.786.813.248	8	27.296.967.531	Dikpora
2.14	Usuran Pemerintahan Bidang Statistik				72.187.500		440.000.000	887.250.000		969.112.500		1.102.568.125		1.157.696.531		4.556.627.156			
5.01.2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				72.187.500		440.000.000	887.250.000		969.112.500		1.102.568.125		1.157.696.531		4.556.627.156			
	1	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase sistem data dan statistik yang terintegrasi	Persen	25	72.187.500	35	440.000.000	45	887.250.000	55	969.112.500	65	1.102.568.125	75	1.157.696.531	75	4.628.814.656	Bappeda
2.15	Usuran Pemerintahan Bidang Persandian				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.10.01	Dinas Komunikasi dan Informatika				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Diskominfo	
2.16	Usuran Pemerintahan Bidang Kebudayaan				2.948.000.000		2.714.800.000	2.725.384.000		2.736.285.520		2.747.514.086		2.759.079.508		13.683.063.114			
1.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				2.948.000.000		2.714.800.000	2.725.384.000		2.736.285.520		2.747.514.086		2.759.079.508		13.683.063.114			
	1	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase budaya lokal daerah yang dikembangkan	Persen	57	2.312.000.000	59	2.312.000.000	61	2.312.000.000	62	2.312.000.000	65	2.312.000.000	65	2.312.000.000	65	11.560.000.000	Dinas P & K
	2	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga adat Yang dibina	lembaga	8	336.000.000	8	352.800.000	8	363.384.000	8	374.285.520	8	385.514.086	8	397.079.508	8	1.873.063.114	Dinas P & K
	3	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan	Situs	4	300.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	4	250.000.000	Dinas P & K
2.17	Usuran Pemerintahan Bidang Perpustakaan				4.172.398.288		4.381.018.202	4.512.448.748		4.647.822.211		4.787.256.877		4.930.874.584		23.259.420.623			
2.17.01	Dinas Perpustakaan				4.172.398.288		4.381.018.202	4.512.448.748		4.647.822.211		4.787.256.877		4.930.874.584		23.259.420.623			
	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pelaksanaan program penunjang SKPD	Persen	100	3.380.995.013	100	3.550.044.764	100	3.656.546.107	100	3.766.242.490	100	3.879.229.764	100	3.995.606.657	100	18.847.669.782	Dinas Perpustakaan
	2	Program Pembinaan Perpustakaan	Pertumbuhan Pengunjung Perpustakaan Daerah	%	30,00	791.403.275	49,87	830.973.439	50,00	855.902.642	58,13	881.579.721	65,75	908.027.113	69,81	935.267.926	69,81	4.411.750.841	Dinas Perpustakaan
2.18	Usuran Pemerintahan Bidang Kearsipan				344.672.838		349.996.667	443.502.380		460.337.451		474.147.575		488.372.002		2.216.356.076			
2.17.01	Dinas Perpustakaan				344.672.838		349.996.667	443.502.380		460.337.451		474.147.575		488.372.002		2.216.356.076			
	1	Program Pengelolaan Arsip	Persentase Penyelamatan Arsip Yang Telah Direservasi	persen	13,35	106.476.588	15,23	111.800.417	16,15	115.154.430	27,31	118.609.063	33,05	122.167.335	36,22	125.832.355	36,22	593.563.600	Dinas Perpustakaan
	2	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Persentase perlindungan dan penyelamatan arsip	persen	19,67	238.196.250	23,22	238.196.250	25,32	249.000.000	28,41	260.000.000	32,58	267.800.000	35,69	275.834.000	35,69	1.290.830.250	Dinas Perpustakaan
	3	Program Perizinan Penggunaan Arsip	Jumlah izin penggunaan arsip yang diterbitkan	izin	0	-	0	-	1	79.347.950	1	81.728.389	1	84.180.240	1	86.705.647	1	331.962.226	Dinas Perpustakaan
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				50.383.340.167		53.765.813.583	55.895.081.592		57.571.934.040		59.299.092.061		61.078.064.823		287.609.986.098			

NO.	Urusan/OPD/Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Pada Tahun Dasar Perencanaan (Tahun 2021)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Capaian Akhir Tahun RPJMD		Perangkat Daerah	
				Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	2022		2023		2024		2025		2026		Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)		
						Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
3.1	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan				11.112.596.550		11.668.226.378		12.018.273.169		12.378.821.364		12.750.186.005		13.132.691.585		61.948.198.500		
3.01.01	Dinas Kelautan dan Perikanan				11.112.596.550		11.668.226.378		12.018.273.169		12.378.821.364		12.750.186.005		13.132.691.585		61.948.198.500		
	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan program penunjang SKPD	Persen	100	4.593.696.675	100	4.823.381.509	100	4.968.082.954	100	5.117.125.443	100	5.270.639.206	100	5.428.758.382	100	25.607.987.493	DKP
	2	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pesentase Kelompok Nelayan yang di lakukan pembinaan	Persen	50	3.286.068.875	60	3.450.372.319	70	3.553.883.488	80	3.660.499.993	90	3.770.314.993	100	3.883.424.443	100	18.318.495.235	DKP
			Produktivitas perikanan tangkap	Ton	15.059		15.149		15.239		15.419		15.509		15.599		15.599		
	3	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produktivitas perikanan budidaya	Ton	8.879.27		8.939.81		9.000.35		9.060.89		#####		#####		9.181.97		
			Persentase kelompok pembudidaya yang dibina	persen	50	2.918.916.000	60	3.064.861.800	70	3.156.807.654	80	3.251.511.884	85	3.349.057.240	95	3.449.528.957	95	16.271.767.535	DKP
	4	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Persentase POKMASWAS yang dibina	persen	45	50.630.000	50	53.161.500	55	54.756.345	60	56.399.035	65	58.091.006	70	59.833.737	70	282.241.623	DKP
	5	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan yang dibina	persen	50	263.285.000	55	276.449.250	60	284.742.728	65	293.285.009	70	302.083.560	75	311.146.066	75	1.467.706.613	DKP
3.2	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata				5.826.106.017		6.317.411.318		6.606.920.857		6.805.128.483		7.009.282.338		7.219.560.808		33.958.303.804		
3.02.01	Dinas Pariwisata				5.826.106.017		6.317.411.318		6.606.920.857		6.805.128.483		7.009.282.338		7.219.560.808		33.958.303.804		
	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan program penunjang SKPD	Persen	100	4.423.429.783	100	4.644.601.272	100	4.783.939.310	100	4.927.457.490	100	5.075.281.214	100	5.227.539.651	100	24.658.818.937	Dispar
	2	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Lama menginap	Hari	1	378.055.891	2	396.958.686	2	408.867.446	3	421.133.469	3	433.767.474	4	446.780.498	4	2.107.507.573	Dispar
	3	Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah kunjungan wisata	Orang	9.084	944.445.717	9.981	991.668.003	10.878	1.021.418.043	11.775	1.052.060.584	12.672	1.083.622.402	13.569	1.116.131.074	13.569	5.264.900.106	Dispar
	4	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase pengembangan prasarana ekonomi kreatif	persen	0	-	10	200.000.000	40	305.987.200	50	315.166.816	55	324.621.820	60	334.360.475	60	1.480.136.312	Dispar
	5	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase pembinaan ekonomi kreatif dan SDM kepariwisataan	persen	100	80.174.626	100	84.183.357	100	86.708.858	100	89.310.124	100	91.989.427	100	94.749.110	100	446.940.877	Dispar
3.3	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian				23.849.298.109		25.518.314.572		26.283.864.009		27.072.379.929		27.884.551.327		28.721.087.867		135.480.197.705		
3.03.01	Dinas Perkebunan				6.357.719.331		7.026.670.355		7.237.470.466		7.454.594.580		7.678.232.417		7.908.579.390		37.305.547.207		
	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan program penunjang SKPD	Persen	100	3.693.831.581	100	3.878.523.160	100	3.994.878.855	100	4.114.725.220	100	4.238.166.977	100	4.365.311.986	100	20.591.606.199	Dinas Perkebunan
	2	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produktivitas tanaman perkebunan	Ton	2.092	-	2.173	356.002.570	2.254	366.682.647	2.335	377.683.127	2.416	389.013.620	2.497	400.684.029	2.497	1.890.065.993	Dinas Perkebunan
	3	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Produksi tanaman Perkebunan	Ton	2.092		2.173	2.619.319.500	2.254	2.697.899.085	2.335	2.778.836.058	2.416	2.862.201.139	2.497	2.948.067.173	2.497	13.906.322.955	Dinas Perkebunan
			Jumlah Produksi tanaman Hortikultura	Ton	166.119		166.198		166.277		166.356		166.435		166.514		166.514		
	4	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase luas areal pengendalian OPT	persen	0	98.750.250	14	98.750.250	14	101.712.758	14	104.764.140	14	107.907.064	14	111.144.276	70	524.278.489	Dinas Perkebunan
	5	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase peningkatan SDM kelembagaan kelompok tani	persen	100	70.547.500	100	74.074.875	100	76.297.121	100	78.586.035	100	80.943.616	100	83.371.924	100	393.273.571	Dinas Perkebunan
3.03.02	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan				17.491.578.778		18.491.644.217		19.046.393.543		19.617.785.350		20.206.318.910		20.812.508.478		98.174.650.498		
	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan program penunjang SKPD	persen	100	8.780.249.411	100	9.219.261.882	100	9.495.839.738	100	9.780.714.930	100	10.074.136.378	100	10.376.360.469	100	48.946.313.397	Dinas Tanaman Pangan & Peternakan
	2	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produktivitas tanaman pangan	Kw/Ha	432,71	63.000.000	463	66.150.000	493,29	68.134.500	523,58	70.178.535	553,87	72.283.891	584,16	74.452.408	584,16	351.199.334	Dinas Tanaman Pangan & Peternakan
	3	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Produksi tanaman pangan	ton	107.046		107.417	7.958.244.342	107.788		108.159	8.442.901.423	108.530	8.696.188.465	108.901	8.957.074.119	108.901	42.251.400.022	Dinas Tanaman Pangan & Peternakan
			Jumlah produksi peternakan (Daging dan Telur)	kg	217.655		243.410		254.605		265.856		305.881		342.089		342.089		
	4	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase pengendalian penyakit hewan ternak	persen	50	137.911.288	60	144.806.852	60	149.151.058	65	153.625.590	70	158.234.357	70	162.981.388	70	768.799.246	Dinas Tanaman Pangan & Peternakan
	5	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase pengendalian bencana pertanian dan penanggulangannya	%	100	524.282.750	100	550.496.888	100	567.011.794	100	584.022.148	100	601.542.812	100	619.589.097	100	2.922.662.739	Dinas Tanaman Pangan & Peternakan
	6	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase izin yang diterbitkan	persen	80	-	85	125.486.500	88	129.251.095	90	133.128.628	95	137.122.487	95	141.236.161	95	666.224.871	Dinas Tanaman Pangan & Peternakan

NO.	Urusan/OPD/Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Pada Tahun Dasar Perencanaan (Tahun 2021)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Capaian Akhir Tahun RPJMD		Perangkat Daerah	
				Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	2022		2023		2024		2025		2026					
						Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	7	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase peningkatan SDM kelembagaan kelompok tani	persen	100	406.855.003	100	427.197.753	100	440.013.686	100	453.214.096	100	466.810.519	100	480.814.835	100	2.268.050.889	Dinas Tanaman Pangan & Peternakan
3.4	Usuran Pemerintahan Bidang Perdagangan				6.776.549.837		7.215.377.329		7.448.838.649		7.672.303.808		7.902.472.922		8.139.547.110		38.378.539.818		
3.04.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan				6.776.549.837		7.215.377.329		7.448.838.649		7.672.303.808		7.902.472.922		8.139.547.110		38.378.539.818		
	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan program penunjang SKPD	Persen	100	4.699.037.525	100	4.933.989.401	100	5.082.009.083	100	5.234.469.356	100	5.391.503.436	100	5.553.248.540	100	26.195.219.816	Disperindag
	2	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase pengajuan SKA yang diproses dan ditindaklanjuti	persen	0	115.460.000	10	121.233.000	20	124.869.990	30	128.616.090	40	132.474.572	50	136.448.810	50	643.642.462	Disperindag
	3	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pasar sehat	pasar	35,29	52,94	64,71	82,35	1.730.527.996	76,47	88,24	88,24	94,12	1.835.917.150	100,00	1.890.994.665	100	8.920.007.914	Disperindag
			Persentase peningkatan pelaku usaha perdagangan	pasar	64,71	76,47	82,35	88,24	94,12	100,00	100								
	4	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase stabilitasi jenis barang penting	persen	40	157.804.962	45	165.695.210	45	170.666.066	50	175.786.048	50	181.059.630	55	186.491.419	55	879.698.373	Disperindag
	6	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Jumlah Omset yang dihasilkan dari Usaha Sektor Perdagangan	persen	51,49	204.129.000	51,7	214.335.450	51,91	220.765.514	52,12	227.388.479	52,33	234.210.133	52,54	241.236.437	52,54	1.137.936.013	Disperindag
	7	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Kontribusi Sektor Perdagangan	persen	12,6	-	13,42	-	14,24	-	15,06	-	15,88	-	16,70	-	16,70	-	Disperindag
	8	Program Pengembangan Ekspor	Persentase pengembangan ekspor kabupaten	Persen	-	-	20	100.000.000	22	120.000.000	24	123.600.000	26	127.308.000	28	131.127.240	28	602.035.240	Disperindag
3.5	Usuran Pemerintahan Bidang Perindustrian				792.984.541		919.388.618		946.970.277		975.379.385		1.004.640.766		1.034.779.989		4.881.159.035		
3.04.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan				792.984.541		919.388.618		946.970.277		975.379.385		1.004.640.766		1.034.779.989		4.881.159.035		
	1	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Jumlah Omset yang dihasilkan dari Sektor Usaha Perindustrian	%	51,49	792.984.541	51,7	832.633.768	51,91	857.612.781	52,12	883.341.165	52,33	909.841.399	52,54	937.136.641	52,54	4.420.565.755	Disperindag
	2	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Persentase IUI dan IUKI efektif	%	20	-	20	86.754.850	20	89.357.496	20	92.038.220	20	94.799.367	20	97.643.348	20	460.593.281	Disperindag
3.5	Usuran Pemerintahan Bidang Transmigrasi				2.025.805.113		2.127.095.369		2.590.214.631		2.667.921.070		2.747.958.702		2.830.397.463		12.963.587.236		
2.1.01	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja				2.025.805.113		2.127.095.369		2.590.214.631		2.667.921.070		2.747.958.702		2.830.397.463		12.963.587.236		
	1	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Persentase ketersediaan dperencanaan daerah kawasan transmigrasi	persen	100	22.019.000	100	23.119.950	100	423.119.950	100	435.813.549	100	448.887.955	100	462.354.594	100	1.793.295.997	Transnaker
	2	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase pembangunan sarana dan prasarana di kawasan transmigrasi	persen	100	1.939.332.113	100	2.036.298.719	100	2.097.387.680	100	2.160.309.311	100	2.225.118.590	100	2.291.872.148	100	10.810.986.447	Transnaker
	3	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase warga transmigrasi yang mandiri	persen	100	64.454.000	100	67.676.700	100	69.707.001	100	71.798.211	100	73.952.157	100	76.170.722	100	359.304.791	Transnaker
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				85.776.289.873		89.163.049.888		91.154.635.116		93.205.967.902		95.318.840.671		97.495.099.624		466.337.593.201		
4.1	Sekretariat Daerah				56.365.789.398		59.184.078.868		60.959.601.234		62.788.389.271		64.672.040.949		66.612.202.178		314.216.312.499		
4.01.01	Sekretariat Daerah				56.365.789.398		59.184.078.868		60.959.601.234		62.788.389.271		64.672.040.949		66.612.202.178		314.216.312.499		
	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan program penunjang SKPD	Persen	100	49.170.456.585	100	51.628.979.414	100	53.177.848.797	100	54.773.184.261	100	56.416.379.788	100	58.108.871.182	100	274.105.263.442	Setda
	2	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Sarana dan Prasarana keagamaan Yang Dibangun/Rehabilitasi	unit	64	6.310.969.000	64	6.626.517.450	64	6.825.312.974	64	7.030.072.363	64	7.240.974.534	64	7.458.203.770	64	35.181.081.089	Setda
			Nilai EKPPD	nilai	baik	baik	baik	baik	baik	baik	baik	baik	baik	baik	baik	baik	baik	baik	
	3	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase penyerapan anggaran pembangunan dan realisasinya	persen	90	884.363.813	93	928.582.004	95	956.439.464	95	985.132.648	95,5	1.014.686.627	96	1.045.127.226	96	4.929.967.968	Setda
4.2	Sekretariat DPRD				29.410.500.475		29.978.971.020		30.195.033.883		30.417.578.631		30.646.799.722		30.882.897.446		152.121.280.702		
4.02.01	Sekretariat DPRD				29.410.500.475		29.978.971.020		30.195.033.883		30.417.578.631		30.646.799.722		30.882.897.446		152.121.280.702		
	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan program penunjang SKPD	Persen	100	22.551.361.975	100	22.776.875.595	100	22.776.875.595	100	22.776.875.595	100	22.776.875.595	100	22.776.875.595	100	113.884.377.974	Sekwan
	2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Peraturan Daerah Yang Dihadiskan	persen	52	6.859.138.500	54	7.202.095.425	56	7.418.158.288	58	7.640.703.036	60	7.869.924.127	62	8.106.021.851	62	38.236.902.728	Sekwan
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				283.470.183.879		267.790.022.296		257.562.227.334		260.908.628.458		264.624.877.714		268.202.304.529		1.319.088.060.330		
5.1	Perencanaan				10.006.147.209		12.026.408.553		11.766.645.267		12.230.638.806		12.944.462.032		13.591.685.134		62.559.839.792		
5.01.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				10.006.147.209		12.026.408.553		11.766.645.267		12.230.638.806		12.944.462.032		13.591.685.134		62.559.839.792		

NO.	Urusan/OPD/Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Pada Tahun Dasar Perencanaan (Tahun 2021)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Capaian Akhir Tahun RPJMD		Perangkat Daerah	
				Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	2022		2023		2024		2025		2026		Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)		
						Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan program penunjang SKPD	Persen	100	7.156.723.553	100	8.562.986.243	100	7.878.786.842	100	8.148.387.459	100	8.658.098.118	100	9.091.003.024	100	42.339.261.686	Bappeda
	2	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase konsistensi pelaksanaan pembangunan	persen	93,92	2.409.423.657	94,49	3.023.422.310	95,06	3.174.593.426	95,63	3.333.323.097	96,2	3.499.989.252	96,77	3.674.988.714	96,77	21.311.727.021	Bappeda
			Persentase Keterukuran Indikator Perencanaan	persen	100,00		100		100		100		100		100		100		
			Persentase Tingkat Partisipatif Perencaaan	persen	15,27		17,77		20,27		22,27		25,27		27,77		27,77		
	3	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase sinergitas perencanaan	persen	75	440.000.000	75,06	440.000.000	75,51	713.265.000	75,96	748.928.250	76,41	786.374.663	76,86	825.693.396	76,86	3.954.261.308	Bappeda
			Persentase OPD Yang Pencapaian Kinerja Sesuai Target	persen	78		79,21		80,18		81,15		82,12		83,09		83,09		
5.2	Keuangan				258.558.402.844		239.448.265.350		228.999.827.112		231.528.566.697		234.089.755.918		236.683.934.137		1.170.750.349.214		
5.02.01	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah				249.817.027.909		230.269.821.668		219.546.030.120		221.791.155.795		224.060.222.689		226.353.514.911		1.122.020.745.183		
	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan program penunjang SKPD	Persen	100	50.396.796.835	100	50.447.193.632	100	37.876.956.993	100	38.255.726.563	100	38.638.283.829	100	39.024.666.667	100	204.242.827.684	BKAD
	2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Penetapan APBD/APBDP tepat waktu	Tepat Waktu	197.124.097.274	Tepat Waktu	177.411.687.547	Tepat Waktu	179.185.804.422	Tepat Waktu	180.977.662.466	Tepat Waktu	182.787.439.091	Tepat Waktu	184.615.313.482	Tepat Waktu	904.977.907.008	BKAD	
	3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase aset pemda yang terinventarisir	persen	90	2.296.133.800	90	2.410.940.490	90	2.483.268.705	90	2.557.766.766	90	2.634.499.769	90	2.713.534.762	90	12.800.010.491	BKAD
5.02.02	Badan Pendapatan Daerah				8.741.374.935		9.178.443.682		9.453.796.992		9.737.410.902		10.029.533.229		10.330.419.226		48.729.604.031		
	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan program penunjang SKPD	persen	100	5.952.593.463	100	6.250.223.136	100	6.437.729.830	100	6.630.861.725	100	6.829.787.577	100	7.034.681.204	100	33.183.283.473	Bapenda
	2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Tingkat kemandirian keuangan daerah (Rasio PAD dibandingkan pendapatan daerah)	persen	3,38	1.971.240.972	3,72	2.069.803.021	4,31	2.131.897.111	4,53	2.195.854.025	4,84	2.261.729.645	5,12	2.329.581.535	5,12	10.988.865.336	Bapenda
	3	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase kenaikan pendapatan daerah	persen	27	817.540.500	30	858.417.525	32	884.170.051	35	910.695.152	37	938.016.007	40	966.156.487	40	4.557.455.222	Bapenda
5.3	Kepegawaian				10.410.137.268		10.930.644.131		11.258.563.455		11.596.320.359		11.944.209.970		12.302.536.269		58.032.274.184		
5.03.01	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia				10.410.137.268		10.930.644.131		11.258.563.455		11.596.320.359		11.944.209.970		12.302.536.269		58.032.274.184		
	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan program penunjang SKPD	Persen	100	6.253.943.210	100	6.566.640.371	100	6.763.639.582	100	6.966.548.769	100	7.175.545.232	100	7.390.811.589	100	34.863.185.542	BKPSDM
	2	Program Kepegawaian Daerah	Persentase Penempatan Pegawai Sesuai Kompetensi	persen	71,73	4.156.194.058	73,46	4.364.003.761	75,19	4.494.923.874	76,92	4.629.771.590	78,65	4.768.664.738	80,38	4.911.724.680	80,38	23.169.088.642	BKPSDM
5.4	Pendidikan dan Pelatihan				4.156.194.058		4.364.003.761		4.494.923.874		4.629.771.590		4.768.664.738		4.911.724.680		23.169.088.642		
5.03.01	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia				4.156.194.058		4.364.003.761		4.494.923.874		4.629.771.590		4.768.664.738		4.911.724.680		23.169.088.642		
	1	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Peningkatan Kualitas SDM Aparatur	persen	81,81	4.156.194.058	83,12	4.364.003.761	84,43	4.494.923.874	85,74	4.629.771.590	87,05	4.768.664.738	88,36	4.911.724.680	88,36	23.169.088.642	BKPSDM
5.5	Penelitian dan Pengembangan				339.302.500		1.020.700.500		1.042.267.625		923.331.006		877.785.057		712.424.309		4.576.508.497		
5.01.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				339.302.500		1.020.700.500		1.042.267.625		923.331.006		877.785.057		712.424.309		4.576.508.497		
	1	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase implementasi rencana kelitbangan.	Persen	25	339.302.500	30	1.020.700.500	35	1.042.267.625	40	923.331.006	45	877.785.057	50	712.424.309	50	4.576.508.497	Bappeda
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				7.775.205.334		8.163.965.601		8.408.884.569		8.661.151.106		8.920.985.639		9.188.615.208		43.343.602.122		
6.01	Pengawasan				7.775.205.334		8.163.965.601		8.408.884.569		8.661.151.106		8.920.985.639		9.188.615.208		43.343.602.122		
6.01.01	Inspektorat				7.775.205.334		8.163.965.601		8.408.884.569		8.661.151.106		8.920.985.639		9.188.615.208		43.343.602.122		
	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan program penunjang SKPD	Persen	100	4.407.325.334	100	4.627.691.601	100	4.766.522.349	100	4.909.518.019	100	5.056.803.560	100	5.208.507.667	100	24.569.043.195	Inspektorat
	2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK	persen	80,44	2.086.908.000	80,5	2.191.253.400	80,56	2.256.991.002	80,62	2.324.700.732	80,69	2.394.441.754	80,75	2.466.275.007	80,75	11.633.661.895	Inspektorat
	3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Tingkat leveling kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	level	2	1.280.972.000	2	1.345.020.600	3	1.385.371.218	3	1.426.932.355	3	1.469.740.325	3	1.513.832.535	3	7.140.897.033	Inspektorat
7	URUSAN KEWILAYAHAN				41.545.966.434		43.700.064.281		45.012.338.209		46.362.708.355		47.753.589.606		49.186.197.294		232.014.897.746		

NO.	Urusan/OPD/Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Pada Tahun Dasar Perencanaan (Tahun 2021)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Capaian Akhir Tahun RPJMD		Perangkat Daerah	
				Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	2022		2023		2024		2025		2026		Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)		
						Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
7.01	Kecamatan dan Kelurahan				41.545.966.434		43.700.064.281		45.012.338.209		46.362.708.355		47.753.589.606		49.186.197.294		232.014.897.746		
7.01.01	Kecamatan				41.545.966.434		43.700.064.281		45.012.338.209		46.362.708.355		47.753.589.606		49.186.197.294		232.014.897.746		
	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pelaksanaan program penunjang SKPD	Persen	100	36.668.308.903	100	38.501.724.348	100	39.656.776.079	100	40.846.479.361	100	42.071.873.742	100	43.334.029.954	100	204.410.883.484	Kecamatan
	2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase pelimpahan wewenang administrasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh camat	Persen	53,48	-	53,91	5.234.500	54,35	5.391.535	54,78	5.553.281	55,22	5.719.879	55,65	5.891.476	55,65	27.790.671	Kecamatan
	3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya koordinasi dan pengawasan keamanan dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	persen	100	-	100	2.508.645	100	2.583.904	100	2.661.421	100	2.741.264	100	2.823.502	100	13.318.737	Kecamatan
	4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan	persen	100	-	100	31.456.380	100	32.400.071	100	33.372.074	100	34.373.236	100	35.404.433	100	167.006.194	Kecamatan
	5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	persen	100	-	100	37.600.000	100	40.000.000	100	41.200.000	100	42.436.000	100	43.709.080	100	204.945.080	Kecamatan
	6	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	Persen	57	4.877.657.531	59	5.121.540.408	62	5.275.186.620	66	5.433.442.218	69	5.596.445.485	72	5.764.338.849	72	27.190.953.580	Kelurahan
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM					5.578.799.579		5.857.739.558		6.033.471.745		6.214.475.897		6.400.910.174		6.592.937.479		31.099.534.853	
8.01.01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik					5.578.799.579		5.857.739.558		6.033.471.745		6.214.475.897		6.400.910.174		6.592.937.479		31.099.534.853	
	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pelaksanaan program penunjang SKPD	Persen	100	3.379.789.479	100	3.548.778.953	100	3.655.242.322	100	3.764.899.591	100	3.877.846.579	100	3.994.181.976	100	18.840.949.421	Kesbangpol
	2	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Penduduk/ Etnis/ Suku/ Agama/ Orm as Yang Memahami Nilai- Nilai Kehidupan Politik dan Berbangsa	persen	78,31	108.470.000	78,62	113.893.500	78,93	117.310.305	79,24	120.829.614	79,55	124.454.503	79,86	128.188.138	79,86	604.676.059	Kesbangpol
	3	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Partisipasi Politik Pemilih Pada Pemilihan Umum	persen	93,13	747.883.100	93,3	785.277.255	93,47	808.835.573	93,64	833.100.640	93,81	858.093.659	93,98	883.836.469	93,98	4.169.143.595	Kesbangpol
	4	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan kabupaten	persen	100	207.356.000	100	217.723.800	100	224.255.514	100	230.983.179	100	237.912.675	100	245.050.055	100	1.155.925.223	Kesbangpol
	5	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase pembinaan ketahanan bidang politik, sosial dan budaya	persen	100	375.227.500	100	393.988.875	100	405.808.541	100	417.982.797	100	430.522.281	100	443.437.950	100	2.091.740.445	Kesbangpol
	6	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Penanganan Potensi Konflik Tidak menjadi Konflik	100	100	760.073.500	100	798.077.175	100	822.019.490	100	846.680.075	100	872.080.477	100	898.242.892	100	4.237.100.109	Kesbangpol

BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH



Indikator kinerja daerah disusun untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator kinerja sasaran Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara. Indikator ini menjadi alat ukur untuk mengetahui ketercapaian visi dan misi RPJMD Tahun 2021-2026.

Selanjutnya indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dari setiap aspek, fokus menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangan. Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari Program Perangkat Daerah yang telah ditetapkan (outcome) atau kompositnya (impact). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Indikator Kinerja Utama Kabupaten Konawe Utara disajikan pada tabel 8.1, sedangkan tabel Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan disajikan pada tabel 8.2.

Tabel 8.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021 - 2026

Indikator Kinerja <i>Utama</i>	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026
Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Dan Daya Saing Sumberdaya Manusia									
Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia									
1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	69,86	70,266	70,672	71,078	71,484	71,890	72,296	72,296
Sasaran 1 : Meningkatnya akses pendidikan									
2. Rata - Rata Lama Sekolah	Tahun	9,21	9,40	9,60	9,79	9,99	10,18	10,37	10,37
3. Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,83	13,07	13,30	13,54	13,77	14,01	14,25	14,25
Sasaran 2 : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat									
4. Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	69,51	70,09	70,67	71,26	71,84	72,42	73,00	73,00
Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan pengarusutamaan hak anak									
5. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	86,17	86,41	86,66	86,90	87,14	87,39	87,63	87,63
6. Kota Layak Anak	Kategori	Pratama	Pratama	Pratama	Pratama	Madya	Madya	Madya	Madya
Sasaran 4 : Meningkatnya Sumberdaya Manusia Yang Kompeten dan Produktif									

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026
7. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	74,45	75,15	75,84	76,54	77,24	77,93	78,63	78,63
<i>Sasaran 5 : Meningkatnya ketahanan pangan</i>									
8. Skor Pola Pangan Harapan	Skor	79,60	80,52	81,53	82,56	83,56	84,58	85,58	85,58
<i>Sasaran 6 : Meningkatnya penanganan masalah kesejahteraan sosial</i>									
9. Penurunan Persentase Warga Miskin (DTKS/Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)	Persen	13,53	12,87	12,21	11,55	10,23	9,57	9,57	9,57
Misi 2 : Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar dan sarana prasarana kawasan permukiman									
<i>Tujuan 2 : Meningkatkan kualitas infrastruktur wilayah</i>									
10. Persentase Keterhubungan/Konektivitas Wilayah	Persen	85,15	85,15	85,15	85,15	85,15	85,15	85,15	85,15
<i>Sasaran 7 : Meningkatnya kapasitas infrastruktur wilayah</i>									
11. Proporsi Panjang Jalan dan Jembatan Dalam Kondisi Mantap	Persen	84,03	84,81	85,58	86,36	87,13	87,91	88,68	88,68

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026
12. Persentase Daerah Irigasi (DI) Yang Terlayani Jaringan Irigasi	Persen	67,23	67,79	68,35	68,91	69,47	70,03	70,59	70,59
<i>Sasaran 8 : Terpenuhinya sarana parasarana kawasan permukiman</i>									
13. Persentase kawasan permukiman (Perkotaan/Perdesaan) yang tidak kumuh	Persen	78,45	81,58	84,72	87,85	90,99	94,12	97,26	97,26
14. Rasio Akses Air Minum Layak	Persen	48,33	56,86	56,86	56,86	56,86	56,86	68,79	68,79
15. Rasio Akses Sanitasi Layak	Persen	36,31	39,28	39,28	39,28	39,28	39,28	39,28	39,28
16. Cakupan layanan persampahan	Persen	15,38	18,63	21,88	25,13	28,38	31,63	34,88	34,88
Misi 3 : Mewujudkan keadilan sosial dan nilai tambah dalam pengelolaan sumberdaya alam guna meningkatkan daya saing ekonomi									
<i>Tujuan 3 : Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi</i>									
17. Pertumbuhan Ekonomi	Persen	-0,72	4,90	5,24	5,58	5,91	6,25	6,59	6,59
18. PDRB Perkapita	Rp. Juta/Jiwa/Tahun	60,8470	61,1776	61,5082	61,8388	62,1694	62,5000	62,8306	62,8306

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026
19. Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3,79	3,75	3,70	3,66	3,62	3,58	3,53	3,53
20. Indeks Gini	Indeks	0,388	0,384	0,380	0,376	0,372	0,368	0,364	0,364
21. Tingkat Kemiskinan	Persen	13,53	13,40	13,27	13,14	13,01	12,88	12,75	12,75
<i>Sasaran 9 : Meningkatnya pertumbuhan sektor - sektor unggulan daerah</i>									
22. Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Persen	39,75	39,89	40,03	40,16	40,30	40,44	40,58	40,58
23. Pertumbuhan PDRB Sektor Pertambangan dan Penggalan	Persen	21,24	21,29	21,34	21,39	21,44	21,49	21,54	21,54
24. Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	Persen	11,78	11,80	11,82	11,85	11,87	11,89	11,91	11,91
25. Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	Persen	1,13	1,14	1,15	1,15	1,16	1,17	1,18	1,18
26. Persentase PAD Sektor Pariwisata	Persen	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,09
27. Nilai Omset Usaha Koperasi	Rp. ribu	705.375	741.587	777.799	814.011	850.223	886.435	922.647	922.647

Indikator Kinerja <i>Utama</i>	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026
Sasaran 10 : Meningkatnya investasi daerah									
28. Pertumbuhan Investasi PMDN dan PMA	Persen	11,86	13,49	15,12	16,74	18,37	20,00	21,63	21,63
Misi 4 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, mendorong reformasi birokrasi, dan pelayanan publik yang prima									
Tujuan 4 : Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien									
29. Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	50,08	50,24	50,40	50,57	50,73	50,89	51,05	51,05
Sasaran 11 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah									
30. Nilai SAKIP	Kategori	B	B	BB	BB	BB	BB	BB	BB
31. Opini BPK	Kategori	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Sasaran 12 : Terwujudnya birokrasi yang kapabel, optimalnya implementasi SPBE, serta pelayanan publik yang terpercaya									
32. Indeks Maturitas Kelembagaan	Level	1	1	2	3	3	3	3	3
33. Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE))	Indeks	1,3	1,38	1,46	1,54	1,62	1,70	1,78	1,78
34. Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	3,34	3,41	3,48	3,55	3,62	3,69	3,76	3,76
Sasaran 13 : Meningkatnya kualitas manajemen ASN									

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026
35. Indeks Merit System	Indeks	162	177	192	207	222	237	252	252
<i>Sasaran 14 : Meningkatnya kapasitas pemerintahan desa</i>									
36. Indeks Desa Membangun	Indeks	0,5855	0,5946	0,6037	0,6128	0,6218	0,6309	0,6400	0,6400
Misi 5 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana									
<i>Tujuan 5 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup</i>									
37. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	58,84	59,67	60,50	61,33	62,16	62,99	63,82	63,82
<i>Sasaran 15 : Terjaganya kualitas pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang</i>									
38. Persentase Ketaatan terhadap Perencanaan Tata Ruang	Persen	80	80,49	80,98	81,47	81,96	82,45	82,94	82,94
<i>Sasaran 16 : Menurunnya tingkat pencemaran air dan udara</i>									
39. Indeks Kualitas Air dan Udara	Indeks	92,58	93,32	94,06	94,80	95,54	96,28	97,02	97,02
<i>Sasaran 17 : Terwujudnya tata kelola dan manajemen bencana</i>									
40. Indeks Resiko Bencana	Indeks	172,4	170,71	169,02	167,33	165,64	163,95	162,26	162,26
Misi 6 : Membangun peradaban masyarakat yang bertumpu pada nilai - nilai keagamaan dan kebudayaan lokal									

Indikator Kinerja <i>Utama</i>	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026
Tujuan 6 : Melestarikan seni budaya lokal									
41. Persentase kapasitas lembaga adat yang dibina	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
Sasaran 18 : Meningkatnya intensitas event seni budaya yang diselenggarakan									
42. Jumlah penyelenggaraan event seni budaya	Event	0	1	2	3	4	5	5	5
Sasaran 18 : Meningkatnya intensitas event seni budaya yang diselenggarakan									
43. Indeks kerukunan beragama	Indeks	73,92	74,29	74,66	75,03	75,40	75,77	76,14	76,14
Sasaran 19 : Meningkatnya pengelolaan potensi konflik sosial									
44. Persentase Pengelolaan Potensi Konflik Sosial	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100

Tabel 8.2
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah
Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021 – 2026

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026
A	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi									
1	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	6,36	6,71	7,06	7,41	7,76	8,11	8,46	8,46
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	-0,72	4,9	5,238	5,576	5,914	6,252	6,59	6,59
3	Laju inflasi	%	1,37	1,84	2,31	2,78	3,25	3,72	4,19	4,19
4	Indeks Gini	Nilai	0,388	0,384	0,380	0,376	0,372	0,368	0,364	0,364
5	Kontribusi lapangan usaha yang terkait dengan perdagangan dan jasa terhadap PDRB	%	17,46	18,73	20,00	21,27	22,54	23,81	25,08	25,08
6	Nilai Tukar Petani	nilai	96,33	96,58	96,83	97,08	97,33	97,58	97,82	97,82
7	Nilai Tukar Nelayan	nilai	106,12	106,28	106,43	106,59	106,75	106,91	107,06	107,06
	Fokus Kesejahteraan Sosial									
1	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	69,86	70,27	70,67	71,08	71,48	71,89	72,30	72,30
2	Pengeluaran per Kapita disesuaikan	Rp Juta/jiwa/ tahun	60.847,00	60.847,33	60.847,66	60.847,99	60.848,32	60.848,65	60.848,98	60.848,98
3	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	69,51	70,09	70,67	71,26	71,84	72,42	73,00	73,00
4	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	9,21	9,40	9,60	9,79	9,99	10,18	10,37	10,37

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026
5	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12,83	13,07	13,30	13,54	13,77	14,01	14,25	14,25
6	Angka Kemiskinan	%	13,53	13,4	13,27	13,14	13,01	12,88	12,75	12,75
7	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	3,79	3,75	3,70	3,66	3,62	3,58	3,53	3,53
8	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	74,45	75,17	75,89	76,61	77,33	78,06	78,78	78,78
9	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
10	Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	%	96,78	97,02	97,26	97,50	97,73	97,97	98,21	98,21
Fokus Seni Budaya dan Olahraga										
1	Penyelenggaraan Festival seni dan budaya	event	0	1	1	1	1	1	1	1
B ASPEK LAYANAN UMUM										
1. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar										
1.01 Urusan Pendidikan										
	Angka Melek Huruf	%	98	98,18	98,36	98,54	98,71	98,89	99,07	99,07
	Angka Partisipasi Kasar									
1	PAUD (3-6 tahun)	%	63,75	65,72	67,69	69,66	71,62	73,59	75,56	75,56
2	SD/MI	%	107,97	108,32	108,67	109,02	109,37	109,72	110,07	110,07
3	SLTP/MTs	%	87,74	88,6	89,46	90,32	91,18	92,04	92,90	92,90
	Angka Partisipasi Murni									
1	SD/MI	%	97,70	97,87	98,04	98,21	98,38	98,55	98,72	98,72

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD 2020	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode 2026
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
2	SLTP/MTs	%	77,64	78,96	80,28	81,6	82,92	84,24	85,56	85,56
	Angka Kelulusan									
1	Angka Kelulusan SD/MI	%	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Angka Kelulusan SMP/MTs	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Angka Partisipasi Sekolah :									
1	Angka Partisipasi dari SD/MI ke SMP/MTs	%	96,38	96,77	97,16	97,55	97,94	98,33	98,72	98,72
2	Angka Partisipasi dari SMP/MTs ke SMA/MA	%	84,41	84,59	84,77	84,95	85,13	85,31	85,49	85,49
	Tenaga Pendidik dan Kependidikan									
1	Rasio murid/guru (SD)	rasio	10,66	10,96	11,26	11,57	11,87	12,17	12,47	12,47
2	Rasio murid/guru (SMP)	rasio	12,25	12,67	13,09	13,51	13,93	14,35	14,77	14,77
	Jumlah Guru Yang Bersertifikat									
1	SD/MI	%	30,64	31,10	31,55	32,01	32,46	32,92	33,38	33,38
2	SLTP/MTs	%	30,20	30,52	30,83	31,15	31,46	31,78	32,10	32,10
1.02 Urusan Kesehatan										
1	Angka Kematian Bayi / 1000 kelahiran hidup	rasio	2,08	1,87	1,64	1,41	1,18	0,95	0,72	0,72
2	Angka Kematian Ibu / 100.000 kelahiran hidup	rasio	138,79	137	135	133	131	129	127	1,00
3	Rasio Puskesmas per satuan penduduk x 1000	rasio	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32
4	Tingkat Penggunaan Tempat Tidur	%		20	35	60	75	80	85	85

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026
5	Rasio dokter / 100.000 penduduk	rasio	27,99	49,71	52,30	56,24	60,16	64,05	67,92	67,92
6	Rasio bidan / 100.000 penduduk	rasio	215,11	216,78	222,95	229,08	235,17	241,23	247,24	247,24
7	Rasio perawat / 100.000 penduduk	rasio	109,03	129,79	141,75	153,64	165,44	177,17	188,83	188,83
8	Prevalensi Balita Gizi Buruk	%	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,1	0	0
9	Prevalensi kasus Stunting	%	11,2	11	10,8	10,6	10,4	10,2	10	10
10	Prevalensi Tuberkulosis (TB) /100.000 penduduk	rasio	143	140	137	134	131	128	125	125
1.03	Urusan Pekerjaan Umum & Penataan Ruang									
1	Panjang jalan dalam kondisi mantap	Km	588,16	593,59	599,02	604,45	609,88	615,31	620,74	620,74
2	Luas Daerah Irigasi Dalam Kondisi Baik	Ha	2.650,00	2.671,60	2.693,67	2.715,74	2.737,81	2.759,88	2.781,95	2.781,95
3	Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Perpipaan	Unit	18.812	18.853	18.894	18.935	18.976	19.017	19.058	19.058
4	Penduduk Berakses Sanitasi Yang Layak	Unit	8.563	8.813	9.063	9.313	9.563	9.813	10.063	10.063
5	Persentase Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah	%	80,00	80,49	80,98	81,47	81,96	82,45	82,94	82,94
1.04	Urusan Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman									
1	Luas Kawasan Permukiman Kumuh Yang ditangani	Ha	76,83	76,83	76,83	76,83	76,83	76,83	76,83	76,83
2	Jumlah rumah layak huni	Unit	12.766	12.816	12.896	12.996	13.096	13.196	13.296	13.296

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026
1.05	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat									
1	Tingkat Waktu Tanggap (Respon time rate) daerah WMK	%	66,00	67,3	68,6	69,9	71,2	72,5	73,8	73,8
2	Angka Kriminalitas	kasus	34	30	26	23	20	18	17	17
3	Jumlah Desa Tangguh Bencana	%	1	15	25	30	35	40	47	47
1.06	Urusan Sosial									
1	Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial	%	27,32	27,48	29,18	31,89	36,01	41,84	48,06	48,06
2	Persentase Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat	%	100	100	100	100	100	100	100	100
2.	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar									
2.01	Urusan Tenaga Kerja									
1	Besaran Pencari Kerja Yang ditempatkan	Orang	306	321	349	351	367	397	403	403
2	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat Pelatihan berbasis Kompetensi	Orang	70	70	75	77	80	83	85	85

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026
3	Jumlah Penyelesaian Kasus Hubungan Industrial	Kasus	0	0	1	1	1	1	1	1
2.02 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak										
1	Persentase Perempuan yang menduduki jabatan publik	%	7,69	7,69	7,87	7,96	8,05	8,14	8,23	8,23
2	Jumlah Korban Kekerasan Perempuan yang ditindak lanjuti	Orang	3	3	2	2	1	1	1	1,00
3	Jumlah Korban Kekerasan Anak yang ditindak lanjuti	Orang	3	3	2	2	1	1	1	1,00
2.03 Urusan Pangan										
1	Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita	Kkl/Kapita/Hari	2.699	2.753	2.811	2.870	2.928	2.986	3.046	3.046
		Gr/Kapita/Hari	70,86	72,27	73,79	75,34	76,85	78,39	79,95	79,95
2	Tingkat Penguatan Cadangan Pangan	%	100,00	100	100	100	100	100	100	100
2.04 Urusan Pertanian										
1	Persentase Penatagunaan Tanah untuk Wilayah Kabupaten	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.05 Urusan Lingkungan Hidup										

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026
1	Kualitas Air (penetapan kelas air)	nilai	1,58	1,76	1,94	2,12	2,30	2,48	2,66	2,66
2	Kualitas Udara (penetapan kelas udara)	nilai	91,09	91,09	91,19	91,38	91,57	91,76	91,95	91,95
3	Kualitas Tutupan Lahan	%	77,68	77,68	77,86	77,95	78,04	78,13	78,22	78,22
4	Persentase Usaha yang memilah B3 dan Limbah B3	%	65	65	68	70	75	78	80	80
5	Cakupan Wilayah Pelayanan Persampahan	%	15,38	15,38	15,38	15,38	15,38	15,38	15,38	15,38
2.06 Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil										
1	Kepemilikan dokumen kependudukan Berbasis Elektronik	%	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Kepemilikan dokumen Pencatatan Sipil Berbasis Elektronik	%	83,88	95	95	100	100	100	100	100
3	OPD Yang Memanfaatkan Data Kependudukan	OPD	4	4	7	8	9	10	11	11
2.07 Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa										
1	Jumlah Desa Berkembang	Desa	68	71	73	75	77	79	80	80
2	Persentase 1(satu) BUMDes dalam 1(satu) Desa Yang Aktif	%	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase Penyampaian RKPDes, APBDes, dan Laporan Keuangan Desa	%	81,76	82,32	82,88	83,45	84,01	84,57	85,13	85,13

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026
	Tepat Waktu dan Sesuai Peraturan Bupati									
2.08	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana									
1	Jumlah Peserta KB Aktif	Orang	11.786	11.813	11.871	11.923	11.957	11.973	12.051	12.051
2	Persentase Keluarga Sejahtera	%	81,58	81,70	81,82	81,94	82,06	82,18	82,30	82,30
3	Cakupan PUS Unmeetneed	%	0,09	0,09	0,13	0,07	0,05	0,03	0,01	0,01
2.09	Urusan Perhubungan									
1	Persentase Ketersediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan (Rambu, Marka, APIL, Guadrail, Delinator, dll) yang berfungsi baik	%	30,00	32,19	34,39	36,58	38,78	40,97	43,16	43,16
2	Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas	%	85,00	85,87	86,75	87,62	88,50	89,37	90,24	90,24
2.10	Urusan Komunikasi dan Informatika									
1	Jumlah Penerapan SPBE	aplikasi	1	1	3	3	5	5	7	7
2	Persentase Pengelolaan Layanan Pengaduan Berbasis Online Yang didistribusikan ke OPD	%	0	0	25	45	69	75	80	80

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026
2.11	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah									
1	Persentase koperasi aktif	%	76,01	76,01	76,35	77,03	77,70	79,39	81,08	81,08
2	Jumlah UMKM yang dibina	%	0	0	50	50	50	50	50	50
2.12	Urusan Penanaman Modal									
1	Lama Proses Perizinan	Hari	2	2	2	2	2	2	2	2
2	Jumlah nilai investasi PMA/PMDN	Rp (milyar)	163,88	180,99	198,10	215,21	232,32	249,43	266,54	266,54
3	Survey Kepuasan Masyarakat	%	76,61	77,24	77,78	78,45	79,21	79,86	80,36	80,36
2.13	Urusan Kebudayaan									
1	Persentase Kesenian dan Budaya Lokal yang dilestarikan	Persen	57	59	63	65	67	75	75	75
2	Jumlah Lembaga adat Yang dibina	lembaga	8	8	8	8	8	8	8	8
3	Persentase pengembangan kurikulum muatan lokal penunjang proses pendidikan	%	0	70	72	74	78	80	82	82
2.14	Urusan Perpustakaan									
1	Pertumbuhan Pengunjung Perpustakaan Daerah	%	30,00	51,00	72,00	93,00	114,00	135,00	156,00	52,55

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026
2.15 Urusan Kearsipan										
1	Persentase Arsip Statis dan Dinamis Yang Diarsipkan	%	32,50	35,57	38,64	41,71	44,77	47,84	50,91	50,91
2.16 Urusan Kepemudaan dan Olah Raga										
1	Jumlah Organisasi Kepemudaan yang dibina	organisasi	12	12	12	12	13	13	13	13
2	Jumlah Cabang Olahraga Yang Berprestasi	cabor	7	7	7	8	8	8	8	8
2.17 Urusan Statistik										
1	Persentase sistem data dan statistik yang terintegrasi	Persen	-	25	35	45	55	67	75	75
2.18 Urusan Persandian										
1	Jumlah sarana persandian	Paket	1	1	1	1	1	1	1	1
3. Urusan Pemerintahan Pilihan										
3.01 Urusan Kelautan										
1	Produktivitas perikanan tangkap	ton	15.059	15.149	15.239	15.329	15.419	15.509	15.599	15.599
2	Produktivitas perikanan budidaya	ton	8.818,73	8.879,27	8.939,81	9.000,35	9.060,89	9.121,43	9.181,97	9.181,97
3.02 Urusan Pariwisata										

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD 2020	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode 2026
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Jumlah Kunjungan wisata	Jiwa	8.187	9.084	9.981	10.878	11.775	12.672	13.569	13.569
2	Lama menginap	Hari	1	1	2	2	3	3	4	4
3.03 Urusan Pertanian										
1	Produktivitas Tanaman Pertanian	Kw/Ha	417,3	432,71	463,00	493,29	523,58	553,87	584,16	584,16
2	Produksi Tanaman Perkebunan	Ton	2.011	2.092	2.173	2.254	2.335	2.416	2.497	2.497
3	Produksi Tanaman Hortikultura	Ton	166.040	166.119	166.198	166.277	166.356	166.435	166.514	166.514
4	Jumlah Produksi Peternakan (Daging dan Telur)	kg	216.361	217.655	243.410	254.605	265.856	305.881	342.089	342.089
3.04 Urusan Perindustrian										
1	Jumlah Omset yang dihasilkan dari Usaha Sektor Perindustrian	%	63,3	63,55	63,80	64,05	64,30	64,55	64,80	64,80
2	Persentase IUI dan IUKI Efektif	%	20	20	20	20	20	20	20	20
3.05 Urusan Perdagangan										
1	Kontribusi Sektor Perdagangan	%	11,78	12,60	13,42	14,24	15,06	15,88	16,70	16,70
2	Jumlah Omset yang dihasilkan dari Usaha Sektor Perdagangan	%	51,28	51,49	51,70	51,91	52,12	52,33	52,54	52,54
3	Persentase pasar sehat	%	29,41	35,29	52,94	64,71	76,47	88,24	100,00	100,00
4	Persentase peningkatan pelaku usaha perdagangan	%		64,71	76,47	82,35	88,24	94,12	100,00	100,00

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026
3.06 Urusan Transmigrasi										
1	Persentase Warga Transmigrasi yang mandiri	%	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Persentase pembangunan sarana dan prasarana di kawasan transmigrasi	%	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4. Unsur Pendukung										
4.01 Sekretariat Daerah										
1	Jumlah Sarana dan Prasarana Keagamaan Yang Dibangun/Rehabilitasi	unit	64	64	64	64	64	64	64	64
2	Persentase penyerapan anggaran pembangunan dan realisasinya	%		90	93	95	95	95,5	96	96,00
3	Nilai dan status kinerja Pemerintah Daerah (Nilai EKPPD)	Nilai	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
4.02 Sekretariat DPRD										
1	Persentase Peraturan Daerah Yang Dihasilkan	%	65	70	80	85	90	95	100	100
5. Unsur Penunjang										
5.01 Perencanaan										
1	Persentase Sinergitas Perencanaan	%	74,16	74,61	75,06	75,51	75,96	76,41	76,86	76,86

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026
2	Persentase Keterukuran Indikator Perencanaan	%	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase Konsistensi Pelaksanaan Pembangunan	%	93,35	93,92	94,49	95,06	95,63	96,20	96,77	96,77
4	Persentase Tingkat Partisipatif Perencanaan	%	12,77	15,27	17,77	20,27	22,77	25,27	27,77	27,77
5	Persentase OPD Yang Pencapaian Kinerja Sesuai Target	%	77,27	78,24	79,21	80,18	81,15	82,12	83,09	83,09
5.02 Keuangan										
1	Tingkat kemandirian keuangan daerah (Rasio PAD dibandingkan Pendapatan Daerah)	%	1,79	3,38	3,72	4,31	4,53	4,84	5,12	5,12
2	Penetapan APBD dan APBDP Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
3	Persentase Aset Pemda Yang Terinventarisir	%	90	90	90	90	90	90	90	90
4	Persentase Kenaikan Pendapatan Daerah	%	5,50	27	30	32	35	37	40	40
5.03 Kepegawaian										
1	Persentase Penempatan Pegawai Sesuai Kompetensi	%	70	71,73	73,46	75,19	76,92	78,65	80,38	80,38
5.04 Pendidikan dan Pelatihan										

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026
1	Persentase Peningkatan Kualitas SDM Aparatur	%	80,5	81,81	83,12	84,43	85,74	87,05	88,36	88,36
5.05 Penelitian dan Pengembangan										
1	Persentase implementasi rencana kelitbangan.	%	20	25	30	35	40	45	50	50
6. Unsur Pengawasan										
6.01 Pengawasan										
1	Tingkat leveling kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	level	2	2	2	3	3	3	3	3
2	Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK	%	80,38	80,44	80,50	80,56	80,62	80,69	80,75	80,75
7. Unsur Kewilayahan										
7.01 Kecamatan										
1	Persentase pelimpahan wewenang administrasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh camat	%		53,48	53,91	54,35	54,78	55,22	55,65	55,65
8. Unsur Pemerintahan Umum										
8.01 Kesatuan Bangsa dan Politik										
1	Persentase Partisipasi Politik Pemilih Pada Pemilihan Umum	%	92,96	93,13	93,30	93,47	93,64	93,81	93,98	93,98
2	Penanganan Potensi Konflik Tidak menjadi Konflik	%	100	100	100	100	100	100	100	100

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD 2020	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode 2026
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
3	Persentase Penduduk/Etnis/Suku/Agama/Ormas Yang Memahami Nilai-Nilai Kehidupan Politik dan Berbangsa	%	78,00	78,31	78,62	78,93	79,24	79,55	79,86	79,86
C. ASPEK DAYA SAING										
Kemampuan Ekonomi Daerah										
1	PDRB per kapita harga berlaku	Ribu Rp	60,847	61,178	61,508	61,839	62,169	62,500	62,831	62,83
2	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita	Rp Ribu	1.134	1.191	1.248	1.305	1.362	1.419	1.476	1476
Fasilitas Wilayah/Infrastruktur										
1	Persentase kualitas jalan dalam kondisi mantap	%	84,03	84,81	85,58	86,36	87,13	87,91	88,68	88,68
2	Rasio Keterhubungan Wilayah	%	96,55	96,97	97,38	97,79	98,21	98,62	98,71	98,71
3	Rasio Elektrifikasi	%	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Penerapan E-Government	Aplikasi	1	2	3	3	5	7	7	7
Fasilitas Iklim Berinvestasi										
1	Angka Kriminalitas	kasus	34	30	26	23	20	18	17	17
2	Jumlah Demonstrasi	demonstrasi	19	17	15	14	13	10	10	10
3	Lama Proses Perizinan	hari	2	2	2	2	2	2	2	2
4	Rasio Izin Yang diterbitkan	Izin	260	260	275	275	283	285	300	300

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026
5	Jumlah Peraturan Daerah Yang Mendukung Iklim Investasi	Perda	1	1	1	1	1	1	1	1
Sumber Daya Manusia										
1	Rasio Ketergantungan Penduduk (usia < 15 tahun dan > 64 tahun)	%	50,88	51,53	52,18	52,83	53,48	54,13	54,78	54,78
2	Tingkat Pendidikan Angkatan Kerja	%	74,45	75,71	76,97	78,23	79,49	80,75	82,01	82,01

Berdasarkan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 050/3499/SJ Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 bahwa dalam upaya mendukung keberhasilan pencapaian sasaran dan target pembangunan nasional, penyelarasan menjadi kunci bagi sinergi pembangunan antara pusat dan daerah. Ruang lingkup penyelarasan yang perlu dilakukan sebagai berikut :

1. Penyelarasan Target Indikator Makro.

Penyelarasan ini dimaksudkan untuk menjamin sinergi dukungan pemerintah daerah dalam pencapaian Target Indikator Makro nasional. Hal ini bertujuan untuk mendorong daerah merumuskan dan menyelaraskan pencapaian target yang mendukung pencapaian target nasional dengan mempertimbangkan karakteristik dan potensi setiap daerah.

2. Penyelarasan Program Prioritas.

Penyelarasan ini dimaksudkan untuk menjamin sinergi program prioritas pemerintah daerah yang selaras dengan program prioritas nasional. Hal ini bertujuan untuk mendorong daerah merumuskan dan menyelaraskan program perangkat daerah dengan indikator kinerja program yang selaras dan/atau mendukung program prioritas nasional, serta dapat menuangkan menjadi indikator pembangunan di daerah.

Penyelarasan Target Indikator Makro dilakukan dengan menyandingkan Target Indikator Makro Nasional dengan Target Indikator Makro Kabupaten Konawe Utara, serta Indikator Makro Provinsi Sulawesi Tenggara. Dari 6 (enam) indikator makro Kabupaten Konawe Utara, dapat dilihat bahwa seluruh target indikator telah selaras, baik terhadap Target indikator Makro nasional maupun Target Indikator Makro Provinsi Sulawesi tenggara, sebagaimana ditampilkan pada Tabel 8.3. Untuk penyelarasan program prioritas, berbagai program pembangunan Kabupaten Konawe Utara telah disusun untuk mendukung Program dan Indikator Pembangunan Nasional. Penyelarasan program prioritas pembangunan daerah yang mendukung program prioritas nasional disajikan pada Tabel 8.4 berikut.

Tabel 8.3.
Penyelarasan Target Indikator Makro Kabupaten Konawe Utara,
Provinsi Sulawesi Tenggara dan Nasional

No	Indikator Pembangunan	RPJMN 2020 - 2024					RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara 2018 - 2023						RPJMD Kabupaten Konawe Utara 2021 - 2026										
		Target					Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target					Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target									
		2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)			
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,6	5,8	5,90	6,1	6,20	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	-0,65	5	5,50	6		Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)		4,9	5,24	5,58	5,91	6,25	6,59			
2	Tingkat Kemiskinan (%)	9,81	9,43	9,00	8,45	8,15	Tingkat Kemiskinan (%)	11,65	11,35	11,20	11		Tingkat Kemiskinan (%)		13,4	13,27	13,14	13,01	12,88	12,75			
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,2	4	3,8	3,4	3,1	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,58	4	3,50	3		Tingkat Pengangguran Terbuka (%)		3,75	3,70	3,66	3,62	3,58	3,53			
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)					74,60-84,23	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70,66	71,7	71,95	72,15		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		70,266	70,67	71,078	71,48	71,89	72,30			
5	Gini Rasio					0,360-0,474	Gini Rasio	0,388	0,39	0,39	0,385		Indeks Gini		0,384	0,380	0,376	0,372	0,368	0,364			
6	Pendapatan Perkapita (Rp.000.000/jiwa)						Pendapatan Perkapita (Rp.000.000/jiwa)	47,24	47,49	47,74	47,99		Pendapatan Perkapita (Rp.000.000/jiwa)		61,18	61,51	61,84	62,17	62,50	62,83			

Sumber : RPJMN Tahun 2020-2024 dan Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023

Tabel 8.4
Penyelarasan Dukungan Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Konawe Utara Terhadap Program Prioritas Nasional

No	Kode (PN/PP)	RPJMN 2020 - 2024							RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara 2018-2023							RPJMD Kabupaten Konawe Utara 2021 - 2026								
		Prioritas Nasional / Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target						
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
I	01	01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan																						
1	01	01-Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)	Porsi EBT dalam Bauran Energi Nasional* (Persen)	13,34	14,50	15,70	17,90	19,50	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Bauran Energi Baru Terbarukan Terhadap Ketenagalistrikan (Persen)		4,82	5,50	7,21										
			Indeks Ketahanan Energi (Indeks)	68,00	68,00	68,80	69,20	70,30																
2	02	02-Peningkatan Kuantitas/ Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	Produktivitas air (water productivity) (US\$/m³)	4,00	4,40	4,70	5,10	5,40	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Meningkatnya pengelolaan sumber daya air (Persen)		65,02	86,5	92,50		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Luas Daerah Irigasi Dalam Kondisi Baik (Ha)		2.671,6	2.693,67	2.715,74	2.737,81	2.759,88	2.781,95
									PROGRAM PENGEMBANGAN DAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	(Jumlah Kawasan yang disediakan Prasarana dan Sarana Air Minum bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah) Cakupan Pelayanan Akses Air Minum (Persen)		4 Lokasi	35,00	35,00		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Perpipaan (Unit)		18.853	18.894	18.935	18.976	19.017	19.058
									PROGRAM PENGEMBANGAN DAN SISTEM DRAINASE	(Jumlah Jaringan Drainase yang terbangun di wilayah Kabupaten/Kota) Persentase Drainase Yang Terbangun (Persen)		10 Lokasi	33,33	33,33		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Drainase Yang Terbangun (%)		41,48	42,91	44,34	45,77	47,20	48,63
3	03	03-Peningkatan Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (2.2.2(c))	90,40	91,60	92,80	94,00	95,20	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	1. Ketersediaan pangan utama (beras) (ton)		455.078	465.078	465.078		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor PPH Konsumsi (Skor)		80	81	82	82,7007	83	84,2511
										2. Ketersediaan Energi (Kkl/Kap/hari)		3.300	3355	3370		Program Pengawasan Keamanan Pangan	Ketersediaan energi dan protein perkapita (Kkl/Kapita/Hari)		2.753	2811	2870	2928	2986	3046
										3. Ketersediaan Protein (Gr/kap/hari)		89	90	95			(Gr/Kapita/Hari)		71	72	75	76,85	78	79,95
			Angka Kecukupan Energi (AKE) (2.1.2(a)) (kkal/hari)	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita		5.655.778	5.799.999	5.947.899		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Desa Lumbung Pangan (Persen)		3	5	8	10,6	13	15,09
										2. Koefisien variasi pangan strategis (beras, cabe merah, bawang merah, kedelai, jagung) (CV)														
			Angka Kecukupan Protein (AKP) (gram/kapita/hari)	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00		3 Ketersediaan Energi (Kkl/Kap/hari)		3.300	3.355	3.370		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Tingkat Penguatan Cadangan Pangan (%)		100	100	100	100	100	100
									4. Ketersediaan Protein (Gr/kap/hari)		89	90	95			Persentase penanganan kerawanan pangan (%)		100	100	100	100	100	100	
		Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevelence of Under-nourishment/PoU)	6,20	5,80	5,50	5,20	5,00	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Ketersediaan Pangan Utama (Beras) (Ton)		455,078	465.078	475.078		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase penanganan kerawanan pangan (%)		100,000	100	100	100	100	100	

No	Kode (PN/PP)	RPJMN 2020 - 2024							RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara 2018-2023							RPJMD Kabupaten Konawe Utara 2021 - 2026									
		Prioritas Nasional / Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target							
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	
			Prevalensi Penduduk dengan Kerawanan Pangan Sedang atau Berat (Food Insecutiry Experience Scale/FIES)	5,20	4,80	4,50	4,20	4,00	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	1. Tingkat Keamanan Pangan (%)		89	93	93,5		Program Pengawasan Keamanan Pangan	Ketersediaan energi dan protein perkapita (Kkl/kapita/hari)		2400	2634	2751,0	2868	2985,0	3102	
										2. Sertifikat Prima 3		5	5	6		Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Persentase Desa Mandiri Pangan (Persen)		3	6	9	12,5786	16	18,8679	
4	04	04-Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, Perikanan dan Kelautan	Konservasi kawasan kelautan (14.5.1*) (Juta ha)	23,40	24,20	25,10	26,00	26,90	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU PULAU KECIL	Luas Kawasan Konservasi Laut dan Perairan, Jumlah Dokumen akses area perikanan berkelanjutan, Nilai Tukar Nelayan		1,96 Juta Ha 14 Dokume n NTN 123,78	1,96 Juta Ha 14 Dokume n NTN 124	1,96 Juta Ha 14 Dokume n NTN 124											
									PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ribu Ton)		250	260	270		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pesentase Kelompok Nelayan yang di lakukan pembinaan (Persen)		50	60	70	80	90	100	
										Jumlah Sarana Perikanan Tangkap Yang Meningkatkan Kapasitasnya (Unit)		210	210	210			Produktivitas perikanan tangkap (Ton)		15059	15149	15239	15419	15509	15599	
			Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (14.4.1*) (%) (Persen)	<64	<67	<72	<76	<80	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budi daya (Ribu ton)		490	520	650		Program Pengelolaan Perikanan Budi daya	Produktivitas perikanan budi daya (Ton)		8879	8940	9000	9060,89	9121	9181,97	
									PROGRAM PENGAWASAN SDKP	Jumlah Pokmaswas yang telah mendapatkan Pembinaan (Pokmawas)		156	161	166		Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Persentase POKMASWAS yang di bina (persen)		45	50	55	60	65	70	
										Penanganan kasus Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan (Persen)		30,00	30,00	30,00											
										Operasi kapal pengawas (Hari Operasional)		16	20	30											
									PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Tingkat Konsumsi Ikan (kg/kap/tahun)		69,98	69,98	69,98		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan yang di bina (persen)		50,00	55,00	60,00	65	70,00	75	
										Jumlah UPI (UPI)		1.450	1.500	1.550											
										Jumlah pembinaan terhadap pelaku pasar dan pengolah hasil perikanan (Pembinaan)		12	12	12											
5	05	05-Penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan Koperasi	Rasio kewirausahaan nasional (Persen)	3,60	3,70	3,80	3,90	4,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah UMKM yang tumbuh dan berkembang untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri (unit)		1.300	1.500	2.000		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase wirausaha baru (%)		1	0	1	0,77	1	0,79	
			Kontribusi UMKM terhadap PDB (Persen)	61,00	62,00	63,00	64,00	65,00	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Jumlah Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah (unit)		500	600	700		Program Pengembangan UMKM	Jumlah UMKM yang di bina (UMKM)			50	50	50	50	50	

No	Kode (PN/PP)	RPJMN 2020 - 2024							RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara 2018-2023							RPJMD Kabupaten Konawe Utara 2021 - 2026									
		Prioritas Nasional / Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target							
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	
			Kontribusi koperasi terhadap PDB	5,10	5,20	5,30	5,40	5,50	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Jumlah Anggota Koperasi dan UMKM yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (unit UMKM)		900	950	1.000		Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase peningkatan koperasi yang mengikuti pelatihan (%)		56	68	74	81,08	84	87,84	
																Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi aktif yang dibina (Koperasi)		22	31	36	37,95	40	42,41	
									PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Jumlah Koperasi Aktif (Persen)		70	71,31	72,46		Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase koperasi aktif (%)		76	76,35	77,03	77,7	79,39	81,08	
																Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase koperasi sehat (%)		16	17,00	18,00	19	20,00	21	
6	06	06-Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor PDB dan	Pertumbuhan PDB pertanian (Persen)	3,70	3,70	3,90	4,00	4,10	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Terlaksananya penyediaan sarana pertanian dalam mendukung peningkatan produksi pangan (Persen)		100,00	100,00	100,00		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produktivitas tanaman perkebunan (Kw/Ha)		2173,00	2254,00	2335,00	2416	2497,00	2497	
									PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Tersedianya prasarana pertanian (Persen)		100,00	100,00	100,00		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Produktivitas tanaman pangan (Kw/Ha)		432,71	463,00	493,29	523,58	553,87	584,16	
																	Jumlah Produksi tanaman Perkebunan (Ton)		2092,00	2173,00	2254,00	2335	2416,00	2497	
																	Jumlah Produksi tanaman Hortikultura (kg)		166.119	166.198	166.277	166.356	166.435	#####	
																	Jumlah Produksi tanaman pangan (ton)		107.046	107.417	107.788	108.159	108.530	#####	
																	Jumlah produksi peternakan (Daging dan Telur) (kg)		217.655	243.410	254.605	265.856	305.881	#####	
									PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Meningkatnya pengembangan dan penerapan penyuluhan pertanian (Persen)		100,00	100,00	100,00		Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase luas areal pengendalian OPT (persen)		0,00	14,00	14,00	14	14,00	14	
										Presentase luas areal pengendalian OPT Perkebunan dan Hortikultura (Persen)		1. Bun : 11,73% 2. Horti: 13,71%	1. Bun: 35,19% 2. Horti: 55,36 %	1. Bun: 46,19% 2. Horti: 65,36 %			Persentase pengendalian bencana pertanian dan penanggulangan nya (%)		100	100	100	100	100	100	
									PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Meningkatnya pengembangan dan penerapan penyuluhan pertanian (persen)		100,00	100,00	100,00		Program Penyuluhan Pertanian	Persentase peningkatan SDM kelembagaan kelompok tani (persen)		100,00	100,00	100,00	100	100,00	100	
			Kontribusi PDB kemaritiman (Persen)	6,50	6,90	7,20	7,50	7,80																	
			Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan (9.2.1(a)) (Persen)	5,00	5,50	6,50	7,50	8,20	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Jumlah Pendataan pada Sistem Informasi Industri Nasional (Kali)		18	18	18											
									PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Jumlah Industri yang mengolah sumber daya daerah (Persen)		2,20	2,50	3,00		Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Jumlah Omzet yang dihasilkan dari Sektor Usaha Perindustrian (%)		63,30	63,55	63,80	64,05	64,30	64,55	

No	Kode (PN/PP)	RPJMN 2020 - 2024							RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara 2018-2023							RPJMD Kabupaten Konawe Utara 2021 - 2026									
		Prioritas Nasional / Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target							
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	
										Persentase Peningkatan Nilai Produksi Industri yang mengolah sumber daya daerah (Persen)		17,82	23,17	30,12											
									PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Jumlah Koordinasi dengan instansi terkait peneribit izin usaha industri (Persen)		18,00	18,00	18,00		Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Persentase IUI dan IUKI efektif (%)		20	20	20	20	20	20	20
			Kontribusi PDB pariwisata (8.9.1*) (Persen)	4,80	5,00	5,20	5,30	5,50	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Kunjungan Wisata (orang)		922.108	968.213	1.016.624		Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah kunjungan wisata (Jiwa)		9.084	9.981	10.878	11775	12.672	13569	
			Nilai tambah ekonomi kreatif (Rp triliun)	1.189-1.214	1.314-1.333	1.439-1.452	1.564-1.570	1.689,00	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah tenaga kerja pariwisata dan Ekraf (Orang) yang dibina		100	150	200		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase pembinaan ekonomi kreatif dan SDM kepariwisataan (persen)		100	100	100	100	100	100	100
																Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase pengembangan prasarana ekonomi kreatif (persen)		0	10	40	50	55	60	
			Pertumbuhan investasi (PMTB) (Persen)	5,60	6,20	6,90	7,80	8,40	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) (perusahaan)		748	750	753		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah Perbup yang mendukung iklim Investasi (Perbup)		0	2	3	4	5	6	
																Program Promosi PMA/PMDN (Rp (milyar))	Jumlah nilai investasi PMA/PMDN (Rp (milyar))		181	198	215	232,32	249	266,54	
																Program Pelayanan Penanaman Modal	Lama proses perizinan (hari)		2	2	2	2	2	2	
																Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase pengawasan investasi (%)		100	100	100	100	100	100	
																Program Pengelolaan data Dan Sistem Informasi	Jumlah izin yang diterbitkan (Izin) Survey Kepuasan Masyarakat (%)		290	345	398	442	495	500	
																				77	78	78	79,21	80	80,36
				Penyediaan lapangan kerja per tahun (Juta orang)	2,7-3,0	2,7-3,0	2,7-3,0	2,7-3,0	2,7-3,0	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang ditempatkan,difasilitasi akses kesempatan kerja dan usaha mandiri (persen)		5,00	5,00	5,00		Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase Tersedianya Perencanaan Tenaga Kerja (%)		100,00	100,00	100,00	100	100,00	100
																	Program Penempatan Tenaga Kerja	Besaran Pencari Kerja Yang ditempatkan (Orang)		306,00	349,00	351,00	367	397,00	403
																Program Hubungan Industrial	Persentase Penyelesaian Kasus Hubungan Industrial (%)		100,00	100,00	100,00	100	100,00	100	
																Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat Pelatihan berbasis Kompetensi (Orang)		70,00	75,00	77,00	80	83,00	85	

No	Kode (PN/PP)	RPJMN 2020 - 2024							RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara 2018-2023							RPJMD Kabupaten Konawe Utara 2021 - 2026									
		Prioritas Nasional / Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target							
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	
			Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja (8.2.1*) (Persen)	3,0-3,3	3,1-3,5	3,2-3,7	3,2-4,0	3,5-4,5																	
			Kontribusi tenaga kerja industri (9.2.2*) (Persen)	14,20	14,60	15,00	15,30	15,70																	
			Jumlah tenaga kerja industri (Juta orang)	19,70	20,30	20,90	21,40	22,00																	
			Jumlah tenaga kerja pariwisata (8.9.2*) (Juta orang)	13,00	13,50	14,00	14,50	15,00	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah Daya Tarik Wisata Yang dikembangkan (DTW/Lokasi)		3	3	3		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Lama menginap (Hari)		1	2	2	3	3	4	
7	07	07-Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan	Pertumbuhan ekspor barang dan jasa (Persen)	3,90	4,20	4,80	5,50	6,20	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai Ekspor (US\$)		2,20	2,50	3,00											
			Neraca perdagangan barang (USD miliar)	0,30	1,00	3,00	7,50	15,00	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Jumlah pelaksanaan promosi penggunaan produk dalam negeri (Kali)		1	2	3		Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Kontribusi Sektor Perdagangan (persen)		13	13	14	15,06	16	16,7	
																Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pasar sehat (pasar)		29	53	65	76,4706	88	100	
																	Persentase peningkatan pelaku usaha perdagangan (pasar)		65	76	82	88,2353	94	100	
																Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase stabilisasi jenis barang penting (persen)		40	45	45	50	50	55	
																	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Jumlah Omset yang dihasilkan dari Usaha Sektor Perdagangan (persen)		51	52	52	52,12	52	52,54
8	08	08-Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi	Kontribusi sektor jasa keuangan/PDB (Persen)	4,20	4,30	4,30	4,40	4,40	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentasi Peningkatan PAD (Persen)		50,00	50,00	50,00		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase kenaikan pendapatan daerah (persen)		27,00	30,00	32,00	35	37,00	40	
			Biaya logistik terhadap PDB (Persen)	23,20	22,20	21,10	20,10	18,00	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Presentase Program Penanggulangan Bencana (Persen)		33	33	36		Program Penanggulangan Bencana	Jumlah Desa Tangguh Bencana (Desa)		2	9	9	9	9	9	
										Cakupan Kabupaten/Kota Yang Tanggap Bencana (Kab/Kota)		4	6	7		Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat (%)		100	100	100	100	100	100	
			Peringkat Travel and Tourism Competitiveness Index (TTCI) (Peringkat)	N.A.	34-39	N.A.	29-34	N.A.	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah Daya Tarik Wisata Yang dikembangkan (DTW/Lokasi)		3	3	3		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Lama menginap (Hari)		1	2	2	3	3	3	4
II	02	02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan																							
1	01	01-Pembangunan Wilayah Sumatera																							

No	Kode (PN/PP)	RPJMN 2020 - 2024							RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara 2018-2023							RPJMD Kabupaten Konawe Utara 2021 - 2026									
		Prioritas Nasional / Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target							
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	
2	02	02-Pengembangan Wilayah Jawa-Bali																							
3	03	03-Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara																							
4	04	04-Pembangunan Wilayah Kalimantan																							
5	05	05-Pembangunan Wilayah Sulawesi																							
6	06	06-Pembangunan Wilayah Maluku																							
7	07	07-Pengembangan Wilayah Papua																							
III	03	03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing																							
1	01	01-Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan	Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial (%)	78,70				98,00	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Jumlah PMKS yang mendapat perlindungan dan bantuan Sosial (KK)			200	75		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial (%)		27,48	29	32	36,01	42	48,06	
																Program Pemberdayaan Sosial	Persentase usaha ekonomi keluarga yang mendapatkan pembinaan (%)		51,61	54	55	56,52	57	61,64	
																Program Rehabilitasi Sosial	Persentase DTKS yang memperoleh pelayanan dan rehabilitasi (%)		30,09	31	34	40	50	59,43	
			Angka kelahiran total (Total fertility rate/TFR)	2,26	2,24	2,21	2,19	2,10	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Persen)		10,12	10,94	11,76		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Jumlah Peserta KB Aktif (Orang)		11786,00	11871	11923,00	11957	11973,00	12051	
																Program Pengendalian Penduduk	Persentase pertumbuhan penduduk (%)		6,71	7,06	7,41	7,76	8,11	8,46	
2	02	02-Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial	Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial	78,70				98,00	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Jumlah PMKS yang mendapat perlindungan dan bantuan Sosial (KK)			200	75		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial (%)		27,48	29	32	36,01	42	48,06	
			Proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah	65,20				80,00																	
3	03	03-Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Angka kematian ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup)	230,00	217,00	205,00	194,00	183,00	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Ibu (Per 100.000 kelahiran hidup)		100	100	100		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup (rasio)		137	135	133	131	129	127	
			Angka kematian bayi (AKB) (per 1000 kelahiran hidup)	20,60	19,50	18,60	17,60	16,00	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Bayi (Per 1.000 kelahiran hidup)		8	7	6		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Bayi / 1000 kelahiran hidup (rasio)		2	2	1	1,18	1	0,72	
			Angka kematian neonatal (per 1.000 kelahiran hidup)	12,90	12,20	11,60	11,00	10,00																	
			Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive Prevalance Rate (mCPR)	61,80	62,20	62,50	62,90	63,40	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Persen)		10,12	10,94	11,76											

No	Kode (PN/PP)	RPJMN 2020 - 2024							RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara 2018-2023							RPJMD Kabupaten Konawe Utara 2021 - 2026									
		Prioritas Nasional / Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target							
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	
			Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak	8,60	8,30	8,00	7,70	7,40								Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Keluarga Sejahtera (%)		81,58	81,82	81,94	82,06	82,18	82,3	
									PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Persen)		10,12	10,94	11,76		0,09	0,128	0,07	0,05	0,03	0,01				
			Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun/Age Specific Fertility Rate (ASFR 15-19) (kelahiran hidup per 1000 perempuan)	25,00	24,00	21,00	20,00	18,00	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase capaian pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat (Persen)		100	100	100		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Jumlah Peserta KB Aktif (Orang)		11786,00	11871	11923,00	11957	11973,00	12051	
			Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (persen)	24,10	21,10	18,40	16,00	14,00	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prevalensi Balita Stunting (Persen)		18	17,4	16		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Prevalensi kasus Stunting (%)		11	10,8	11	10,4	10	10	
			Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita (persen)	8,10	7,80	7,50	7,30	7,00								Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Prevalensi Balita Gizi Buruk (%)		0,3	0,2	0,2	0,2	0,1	0	
			Insidensi HIV (per 1.000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV)	0,21	0,21	0,19	0,19	0,18	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Insidensi HIV (per 1.000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV)		252	231	211		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat									
			Insidensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	272,00	252,00	231,00	211,00	190,00	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Insidensi tuberkulosis (TB) (per 100.000 penduduk)		18	17	16		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Prevalensi Tuberkulosis (TB) /100.000 penduduk (Rasio)		140	137	134	131	128	125	
			Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria	325,00	345,00	365,00	385,00	405,00	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Kab/Kota Eliminasi Malaria		11	15	17		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat									
			Insidensi hepatitis B (persen)	1,68	1,54	1,39	1,24	1,09																	
			Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun	9,10	9,00	8,90	8,80	8,70																	
			Prevalensi obesitas pada penduduk usia > 18 tahun (persen)	21,80	21,80	21,80	21,80	21,80																	
			Persentase tekanan darah tinggi	34,10	34,10	34,10	34,10	34,10																	
			Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi	65,00	79,00	80,00	90,00	100,00									Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rasio dokter per 100.000 penduduk (Rasio)		49,71	52,30	56,24	60,16	64,05	67,92
																			rasio bidan / 100.0000 penduduk (Rasio)		216,78	222,95	229,08	235,17	241,23

No	Kode (PN/PP)	RPJMN 2020 - 2024							RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara 2018-2023							RPJMD Kabupaten Konawe Utara 2021 - 2026									
		Prioritas Nasional / Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target							
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	
																	Rasio perawat / 100.000 penduduk (Rasio)		129,79	141,75	153,64	165,44	177,17	188,83	
																Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Jumlah sertifikat laek higien (Sertifikat)		0	5	8	10	13	16	
																	Jumlah Rekomendasi Ijin Apotek/Toko Obat (Rekomendasi)		8	10	12	15	17	20	
																Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rata-rata Kunjungan Rawat Jalan Per Hari (Rawat Jalan)		10	12	17	23	29	35	
																	Length Of Stay (LOS)/Rata-rata Lama Hari Dirawat (Hari)		3	4	6	7	8	9	
																	Emergency Respon Time Rate Kurang Dari 5 Menit (%)		40	50	70	80	90	100	
																	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Bed Occupancy Rate (BOR)/ Tingkat Penggunaan Tempat Tidur (%)		20	35	60	75	80	85
																		Kecepatan Pelayanan Resep Obat Jadi Kurang dari 30 Menit (%)		40	50	70	80	90	100
						Persentase rumah sakit terakreditasi	80,00	85,00	90,00	95,00	100,00														
4	04	04-Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas	Nilai rata-rata hasil PISA: a. Membaca b. Matematika c. Sains	NA NA NA	399,1 388,7 400,4	NA NA NA	NA NA NA	399,7 392,3 406,2	PROGRAM PENGLOLAAN PENDIDIKAN	Angka partisipasi sekolah (APS) SMA/MA/Paket C (Nilai)		76,30	80,12	84,12		Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase capaian SPM (%)		86,00	87,00	88,00	89	90,00	90	
			Proporsi Anak di Atas Batas Kompetensi Minimal dalam Test PISA (Persen): a. Membaca b. Matematika c. Sains	NA NA NA	34,4 46,6 49	NA NA NA	NA NA NA	35,6 47,4 51		Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Khusus (Nilai)		50,74	53,27	55,94			APK SD (Indeks)		107,30	106,80	106,25	105,79	104,70	103,59	
			Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas (Tahun)	8,75	8,85	8,95	9,06	9,16		Jumlah Sekolah yang mendapatkan bantuan operasional Sekolah (Sekolah)		453	570	570			APK SMP (Indeks)		87	86	85	84,13	84	82,95	
																	APM SD (Indeks)		98	98.65	99	99,07	99	99,45	
																	APM SMP (Indeks)		78	78	79	80,45	82	81,89	
																	Persentase SD Terakreditasi Minimal B (%)		17	19	19	20,19	20	21,15	
																	Persentase SMP Terakreditasi Minimal B (%)		42	44	44	47,22	47	50	
			Harapan Lama Sekolah Penduduk Usia 25 Tahun Keatas(Tahun)	13,41	13,60	13,79	13,97	14,16																	

No	Kode (PN/PP)	RPJMN 2020 - 2024							RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara 2018-2023							RPJMD Kabupaten Konawe Utara 2021 - 2026										
		Prioritas Nasional / Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target								
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)		
			Indeks Perlindungan Anak (IPA)	66,34	68,10	9,87	71,66	73,49	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Komprehensif pada Lembaga Layanan (Dinas/UPTD PPA) di daerah (Persen)		100,00	100,00	100,00		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak (%)		55,25	60,00	72,00	73	80,00	88		
			Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya (%)	Laki-laki: 61,7; Perempuan: 62 (Baseline 2018)	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun									Program Perlindungan Khusus Anak	Jumlah korban kekerasan anak yang ditindaklanjuti (Orang)		3,00	2,00	2,00	1	1,00	1	
			Indeks Pembangunan Gender (IPG)	91,21	91,28	91,28	91,33	91,39			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG)		21	38	39		Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Perempuan Yang Menduduki Jabatan Publik (%)		7,690	7,872	7,962	8,052	8,142	8,232
																		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase peningkatan kualitas keluarga (%)		100	100	100	100	100	100
																		Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Persentase pengelolaan data gender dan anak (%)		100	100	100	100	100	100
5	05	05-Peningkatan Kualitas Anak,	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	73,24	73,50	73,74	73,97	74,28																		
			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	52,51	53,13	53,76	54,38	55,00																		
			Prevalensi kekerasan terhadap perempuan usia 15-64 tahun di 12 bulan terakhir	Menurun dari 9,4 (Baseline 2016)	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif pada Lembaga Layanan (Dinas/UPTD PPA) di Daerah (Persen)		100	100	100		Program Perlindungan Perempuan	Jumlah Perempuan korban kekerasan yang mendapat pelayanan/ditangani (Orang)		3	2	2	1	1	1		
			Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	55,33	56,50	56,50	58,17	57,67	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Pengembangan Kapasitas daya saing SDM Kepemudaan (Persen)		100	100	100		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Jumlah Organisasi Kepemudaan yang dibentuk (Organisasi)		12	12	12	13	13	13		
6	06	06-Pengentasan Kemiskinan	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki aset produktif (layanan keuangan, modal, lahan, pelatihan)	27,90				40,00	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN BANTUAN SOSIAL	Jumlah PMKS yang mendapat perlindungan dan bantuan Sosial (KK)		200	75			Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial (%)		27,48	29	32	36,01	42	48,06		
			Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang mengakses pendanaan usaha	25,60				50,00																		
			Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat dan	630.000,00	1.600.000,00	1.850.000,00	1.350.000,00	1.100.000,00	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1.Luas Rehabilitasi Lahan kritis dan kawasan hutan (Ha/Tahun)		1.200	1.200	1.200												
										2. Produksi Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu (M3/Ton/Tahun)		56.000	56.000	56.000												
										3. Persentase Penurunan luas kerusakan kawasan hutan (Persen/Tahun)		100	100	100												

No	Kode (PN/PP)	RPJMN 2020 - 2024							RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara 2018-2023							RPJMD Kabupaten Konawe Utara 2021 - 2026									
		Prioritas Nasional / Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target							
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	
										4. Penurunan Titik Hotspot (Persen/Tahun)		100	100	100											
			Bidang tanah yang didistribusi	750.000,00				7.750.000,00	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Terselesainya Pemberian santunan tanah pembangunan (persen)		0	100	100		Program Penatagunaan Tanah	Persentase penatagunaan tanah untuk wilayah Kabupaten (%)		100	100	100	100	100	100	
			Bidang tanah yang dilegalisasi	6.286.087,00				56.286.087,00	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	Terlaksananya Pemberian izin lokasi Penetapan (dokumen)		0	2	2											
7	07	07-Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing	Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas	44,80	46,60	48,40	50,20	52,10	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang ditempatkan,difasilitasi akses kesempatan kerja dan usaha mandiri (persen)			5,00	5,00		Program Penempatan Tenaga Kerja	Besaran Pencari Kerja Yang ditempatkan (Orang)		306,00	349,00	351,00	367	397,00	403	
			Jumlah PT yang Masuk ke dalam World Class University Top 200	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00																	
			Jumlah PT yang Masuk ke dalam World Class University Top 300		1,00	1,00	1,00	2,00																	
			Jumlah PT yang Masuk ke dalam World Class University Top 500	2,00	2,00	2,00	2,00	3,00																	
			Proporsi pekerja berkeahlian menengah dan tinggi (%)	43,00	45,00	47,00	48,00	50,00	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang difasilitasi untuk meningkatkan kompetensi dan produktivitasnya (Persen)		5,00	10,00	10,00		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat Pelatihan berbasis Kompetensi (Orang)		70,00	75,00	77,00	80	83,00	85	
IV	04	04-Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan																							
1	01	01-Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkokuh Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter																							
2	02	02-Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia	n/a																						

No	Kode (PN/PP)	RPJMN 2020 - 2024							RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara 2018-2023							RPJMD Kabupaten Konawe Utara 2021 - 2026															
		Prioritas Nasional / Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target													
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)							
3	03	03-Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Harmoni Sosial	Indeks Kerukunan Umat Beragama																												
4	04	04-Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan, dan Berkarakter																													
V	05	05-Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar																													
1	01	01-Infrastruktur Pelayanan Dasar	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan kecukupan luas lantai per kapita (%)	92,84	93,44	94,00	94,63	95,00	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Tersedianya Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah Provinsi (Unit)	0	50	50		Program Kawasan Permukiman	Jumlah rumah layak huni (Unit)		12816	12896	12996	13096	13196	13296								
			Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan ketahanan bangunan (atap, lantai, dinding) (%)	82,35	83,50	84,80	86,00	87,00								Program Pengembangan Perumahan	Persentase pembangunan perumahan untuk korban bencana alam (%)		0	5	5	5	5	5							
			Persentase rumah tangga yang memiliki sertifikat hak atas tanah untuk perumahan (%)	55,46	56,85	58,23	59,62	60,00																							
			Rasio outstanding KPR terhadap PDB (%)	3,05	3,10	3,30	3,60	4,00																							
			Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air layak akses	78,1%	79,43%	82,07%	86,03%	90%										Program Pengelolaan dan Pengembangan	Penduduk Berakses Sanitasi Yang Layak (KK)		8.813	9063	9313	9563	9813	10.063					
			layak																	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh Yang ditangani (Ha)		76,83	76,83	76,83	76,83	76,83				
			Persentase rumah tangga yang masih mempraktikkan buang air besar sembarangan (%)	5,95	4,46	2,98	1,49	0,00															Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase pembangunan sarana dan prasarana dan utilitas umum (%)		100	100	100	100	100	100
			Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik (%)	72,92% penangan an; 3,70% penguran gan	73,79% penangan an; 5,51% penguran gan	75,28% penangan an; 9,13% penguran gan	77,64% penangan an; 14,57% penguran gan	80% penangan an; 20% penguran gan															Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Jumlah sarana dan prasarana pelayanan persampahan yang berfungsi baik (Unit)		5	5	6	6	6	6
			Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak (%)	91,8% (JP:23,6% ,BJP:68,2%)	93,8% (JP:25,4% ,BJP:68,4%)	95,9% (JP:27,1% ,BJP:68,7%)	97,9% (JP:28,9% ,BJP:69%)	100% (JP:30,4% ,BJP:69,5%)															Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Perpipaan (Unit)		18.853	18894	18935	18976	19017	19058
			Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum aman (%)	7,30	8,40	10,00	12,20	15,00																							

No	Kode (PN/PP)	RPJMN 2020 - 2024							RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara 2018-2023							RPJMD Kabupaten Konawe Utara 2021 - 2026									
		Prioritas Nasional / Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target							
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	
			Volume tampungan air per kapita (m3/kapita)	52,50	55,18	57,06	58,10	58,50																	
2	02	02-Infrastruktur Ekonomi	Panjang jalan tol baru yang beroperasi dalam 5 tahun (2.500 km)																						
			Jumlah pelabuhan utama (hub) yang memenuhi standar (7 pelabuhan)																						
			Kinerja tepat waktu (on time performance) penerbangan (90%)																						
			Panjang jaringan KA yang beroperasi (7.635 km's)																						
3	03	03-Infrastruktur Perkotaan	Jumlah layanan angkutan umum masal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan (Kota)																						
4	04	04-Energi dan	Rasio elektrifikasi (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	PROGRAM PENGELOLAAN	Rasio Elektrifikasi		99,50	99,90	100											
			Pemenuhan Kebutuhan (Konsumsi) Listrik (kWh)	1.142,00	1.203,00	1.268,00	1.336,00	1.408,00																	
			Penurunan Emisi CO2 Pembangkit (juta ton)	4,71	4,92	5,36	5,91	6,07																	
5	05	05-Transformasi Digital	Persentase pertumbuhan sektor TIK (rata-rata)	8,80	8,80	8,80	8,80	8,80								Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase Pengelolaan Layanan Pengaduan Berbasis Online Yang didistribusikan ke OPD (%)		0	25	45	69	75	80	
			Persentase pengguna internet (Persentase)	72,60	74,20	79,20	80,70	82,30							Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Jumlah Penerapan SPBE (aplikasi)		1	3	3	5	5	7		
			Persentase populasi yang dijangkau oleh jaringan bergerak pitalebar (4G) Existing Q2 2019 : 97,59%	97,50	98,00	98,50	99,00	100,00																	
			Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam (Persentase)	70,00	72,00	73,00	74,00	75,70																	
VI	06	06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim																							
1	01	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Udara (IKU)	84,10	84,20	84,30	84,40	84,50	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan keterpenuhan kajian dampak dan perizinan lingkungan hidup (Persen)		100	100	100		Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Udara (nilai)		91	91	91	91,57	92	91,95	
									PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan pelaksanaan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup (Persen)		90	90	90											

No	Kode (PN/PP)	RPJMN 2020 - 2024							RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara 2018-2023							RPJMD Kabupaten Konawe Utara 2021 - 2026									
		Prioritas Nasional / Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target							
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	
			Indeks Kualitas Air (IKA)	55,10	55,20	55,30	55,40	55,50	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan keterpenuhan kajian dampak dan perizinan lingkungan hidup (Persen)		100	100	100			Indeks Kualitas Air (nilai)		2	2	2	2,296	2	2,656	
									PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan pelaksanaan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup (Persen)		90	90	90											
			Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	58,50	59,00	59,50	60,00	60,50	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan keterpenuhan kajian dampak dan perizinan lingkungan hidup (Persen)		100	100	100											
									PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan pelaksanaan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup (Persen)		90	90	90											
			Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Ekosistem Gambut (IKTL)	61,60	62,50	63,50	64,50	65,50	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan keterpenuhan kajian dampak dan perizinan lingkungan hidup (Persen)		100	100	100		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Indeks Tutupan Lahan (%)		78	78	78	78,04	78	78,22	
									PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan pelaksanaan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup (Persen)		90	90	90											
2	02	02-Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim	Persentase potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana (persen)	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10																	
			Persentase penurunan potensi kehilangan PDB sektor terdampak bahaya iklim (persen)	0,34	0,59	0,81	1,00	1,15																	
			Kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat (menit)	5,00	4,50	4,00	3,50	3,00																	
3	03	03-Pembangunan Rendah Karbon	Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor energi (persen)	11,80	12,50	12,80	12,80	13,20																	
			Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor lahan (persen)	45,80	50,70	53,10	57,20	58,30																	

No	Kode (PN/PP)	RPJMN 2020 - 2024							RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara 2018-2023							RPJMD Kabupaten Konawe Utara 2021 - 2026									
		Prioritas Nasional / Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target							
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	
			Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor limbah (persen)	8,50	9,00	9,30	9,40	9,40																	
			Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor IPPU (persen)	2,00	2,30	2,50	2,60	2,90																	
			Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor pesisir dan kelautan (persen)	6,50	6,60	6,80	7,00	7,30																	
VII	07	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik																							
1	01	01-Konsolidasi Demokrasi	n/a																						
2	02	02-Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri	Indeks pengaruh dan peran Indonesia di dunia internasional	95,07	95,27	95,47	95,67	95,67																	
3	03	03-Penegakan Hukum Nasional	Indeks Pembangunan Hukum	0,65	0,67	0,69	0,71	0,70																	
4	04	04-Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Persentase Instansi Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga) dengan Indeks RB Baik Keatas*	70,00	75,00	80,00	85,00	85,00																	
			PersentaseInstansi Pemerintah Daerah (Provinsi) dengan Indeks RB Baik Keatas*	50,00	60,00	70,00	80,00	85,00																	
			Persentase Instansi Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) dengan Indeks RB Baik Keatas*	30,00	35,00	45,00	55,00	70,00																	
5	05	05-Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	Global Fire Power Index	0,26	0,25	0,24	0,22	0,20																	
			Global Terrorism Index	4,44	4,39	4,34	4,29	4,24																	
			Proporsi orang yang merasa aman berjalan sendirian	>55%	>55%	>55%	>60%	>60%																	
			Indeks Keamanan dan Ketertiban Nasional	3,10	3,20	3,20	3,30	3,40																	

BAB IX PENUTUP



RPJMD sebagai dokumen rencana pembangunan daerah yang merupakan pedoman penyelenggaraan pemerintahan daerah yang harus ditaati oleh seluruh pemangku kepentingan. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. RPJMD Kabupaten Konawe Utara tahun 2021-2026 merupakan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Konawe Utara dalam melaksanakan pembangunan. Agar pelaksanaan RPJMD dapat berjalan dengan baik, perlu diatur beberapa pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

9.1 Pedoman Transisi

RPJMD Kabupaten Konawe Utara tahun 2021-2026 berlaku untuk kurun waktu lima tahun sejak tahun 2021 hingga tahun 2026. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan perencanaan setelah RPJMD tahun berakhir, maka RPJMD ini menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD dan RAPBD tahun 2027.

9.2 Kaidah Pelaksanaan


Kaidah pelaksanaan bermakna aturan atau patokan dalam pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah berkewajiban menyebarluaskan peraturan daerah tentang RPJMD kepada masyarakat;
2. Seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara dan pemangku kepentingan agar melaksanakan program-program RPJMD dengan sebaik-baiknya mengarah pada pencapaian target- target yang telah ditetapkan dalam RPJMD;
3. Seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara berkewajiban melakukan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah mengacu pada RPJMD. Renstra tersebut akan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2022 hingga tahun 2026;

4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berkewajiban melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil RPJMD.

Semoga rencana pembangunan yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Konawe Utara tahun 2021-2026 ini dapat berjalan dengan baik dan dapat mencapai target-target yang telah ditetapkan, sehingga visi jangka menengah Kabupaten Konawe Utara yaitu: “Konawe Utara Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing” dapat terwujud.

BUPATI KONAWE UTARA,



Dr. Ir. H. RUKSAMIN, ST, M.Si, IPU, ASEAN.Eng